

Laporan Tahunan 2015

SINERGI UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL

2015 Annual Report
**SYNERGY FOR ACCELERATING
NATIONAL ECONOMIC TRANSFORMATION**



ANGKLUNG

Sinergi dan Keselarasan

Angklung adalah alat musik yang terbuat dari potongan-potongan bambu yang disatukan oleh palang gantung sehingga menciptakan nada-nada yang indah. Sebagai instrumen musik yang hanya menghasilkan satu nada, maka dibutuhkan sinergi di antara pemain-pemain angklung untuk dapat menghasilkan suatu alunan nada yang harmoni, begitu pula dengan perekonomian nasional. Dibutuhkan sinergi di antara para pelaku ekonomi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terlebih ketika melakukan transformasi ekonomi secara menyeluruh. Untuk itu, di sinilah peran Bank Indonesia dalam mewujudkan sinergi untuk percepatan transformasi ekonomi nasional.

Synergy and Harmony

Angklung is a musical instrument made of bamboo tubes attached to a frame which produces beautiful notes. As a monotone musical instrument, a synergy between angklung players is needed to create a harmonious tone. Similarly, the national economy. It requires a synergy between economic players to increase economic growth, especially to conduct economic transformation. Therefore, this is where Bank Indonesia plays a role in realizing synergy to accelerate the national economic transformation.

Daftar Isi

Table of Contents

2 Ikhtisar 2015 *Highlights of 2015*

3 Pengantar Gubernur *Foreword by the Governor*

8 Sambutan Ketua BSBI *Remarks of BSBI Chairman*

10 Tentang Bank Indonesia *About Bank Indonesia*



- 14 Status, Tujuan, dan Tugas
Status, Objective, and Task
- 16 Visi, Misi, dan Nilai-nilai Strategis
Vision, Mission, and Strategic Values
- 20 Dewan Gubernur Bank Indonesia
The Board of Governors of Bank Indonesia
- 28 Badan Supervisi Bank Indonesia
Bank Indonesia Supervisory Body
- 30 Peristiwa Penting 2015
Series of Events in 2015

40 Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia *Bank Indonesia Task Implementation*



- 44 Perekonomian Global
Global Economy
- 46 Perekonomian Domestik
Domestic Economy
- 53 Menjaga Kestabilan Moneter
Maintaining Monetary Stability
- 78 Memantapkan Stabilitas Sistem Keuangan
Strengthening Financial System Stability
- 94 Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran dan Efektivitas Pengelolaan Uang Rupiah
Maintaining Payment System and Rupiah Currency Management
- 107 Koordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas Lainnya
Coordination with the Government and Other Authorities
- 115 Mendorong Perluasan Akses Keuangan, serta Perkembangan Sektor Riil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Promoting Broader Financial Access as well as Real Sector and MSME Development
- 128 Memperkokoh Kerja Sama dan Meningkatkan Hubungan Internasional
Strengthening International Cooperation and Improving International Relation
- 134 Outlook Perekonomian Indonesia dan Strategi Ke Depan
Indonesia's Economic Outlook and Future Strategy

140 Tata Kelola dan Transformasi Bank Indonesia *Bank Indonesia Governance and Transformation*



- 144 Prinsip Tata Kelola (Governance) Bank Indonesia
Bank Indonesia Governance Principles
- 145 Komitmen Tata Kelola Bank Indonesia
Bank Indonesia Governance Commitment
- 153 Struktur Tata Kelola Bank Indonesia
Bank Indonesia Governance Structure
- 160 Proses Tata Kelola Bank Indonesia
Bank Indonesia Governance Process
- 173 Hasil Tata Kelola Bank Indonesia
Bank Indonesia Governance Outcome
- 174 Komunikasi Bank Indonesia Kepada Publik
Bank Indonesia Public Communication
- 181 Menata Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Restructuring the Organization and Human Resources
- 191 Transformasi menuju Bank Indonesia 2024
Transformation towards Bank Indonesia 2024

202 Program Sosial Bank Indonesia *Bank Indonesia Social Program*



- 206 Dedikasi untuk Negeri
Tribute to the Nation
- 206 Program Sosial Bank Indonesia
Bank Indonesia Social Program
- 213 Program Beasiswa Bank Indonesia
Bank Indonesia Scholarships Program

220 Organisasi Bank Indonesia *Organization of Bank Indonesia*



- 226 Sekilas Perjalanan
Brief History
- 228 Struktur Organisasi
Organizational Structure
- 230 Pemimpin Satuan Kerja
Department Heads
- 234 Peta Wilayah Kerja
Working Area Map

237 Laporan Keuangan Tahunan *Annual Financial Report*

Daftar Boks

List of Box

- 64 • Boks: *Big Data* dan Proses Pengambilan Keputusan
Box: Big Data and Decision Making Process
- 68 • Boks: 5 Strategi Bank Indonesia untuk Pasar Keuangan
Box: 5 Bank Indonesia Strategies for Financial Market
- 74 • Boks: Sebuah Peta Jalan untuk Pengendalian Inflasi
Box: A Roadmap for Inflation Control
- 80 • Boks: Makroprudensial, Mandat Bank Indonesia untuk Stabilitas Sistem Keuangan
Box: Macroprudential, Bank Indonesia's Mandate for Financial System Stability
- 90 • Boks: Upaya Memperkuat Ketahanan Perbankan
Box: Efforts toward Strengthening Banking Resilience
- 104 • Boks: Inovasi Setelmen Dana Transaksi Pasar Modal melalui *Central Bank Money* (CeBM)
Box: Innovation for the Settlement of Capital Market Transaction Funds through Central Bank Money (CeBM)
- 124 • Boks: Sinergi Pengendalian Inflasi
Box: Synergy in Inflation Control
- 130 • Boks: Menjaga Hubungan Investor dan Persepsi Positif Ekonomi Indonesia
Box: Maintaining Investor Relations and Positive Perception of Indonesian Economy
- 216 • Boks: Predator Penjaga Sawah
Box: Paddy Field Predator Guards

Daftar Tabel

List of Table

- 49 • Tabel 1. Posisi Utang Luar Negeri Menurut Jenis Mata Uang
Table 1. External Debt Position by Currency
- 123 • Tabel 2. Data Kluster Binaan Bank Indonesia Menurut Komoditas
Table 2. Data of Bank Indonesia-led Cluster Based on Commodities
- 139 • Tabel 3. Prospek Perekonomian Domestik Membaik
Table 3. Domestic Economy Prospects Improving
- 155 • Tabel 4. Kegiatan Bank Indonesia dengan DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2015
Table 4. Activities of Bank Indonesia with the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) and the House of Regional Representatives of the Republic of Indonesia (DPD-RI)
- 162 • Tabel 5. Kehadiran Anggota Dewan Gubernur dalam Rapat Dewan Gubernur Bulanan
Table 5. Attendance of Board of Governors Members in Monthly Board of Governors Meeting
- 162 • Tabel 6. Kehadiran Anggota Dewan Gubernur dalam Rapat Dewan Gubernur Mingguan
Table 6. Attendance of Board of Governors Members in Weekly Board of Governors Meeting
- 177 • Tabel 7. Pencapaian Museum Bank Indonesia Tahun 2014-2015
Table 7. Achievements of Bank Indonesia Museum Year 2014-2015
- 177 • Tabel 8. Rekapitulasi Pengunjung Museum Bank Indonesia Periode Januari-Desember 2015
Table 8. Recapitulation of Bank Indonesia Museum Visitors Period of January-December 2015
- 189 • Tabel 9. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Gender
Table 9. Number of Employees Based on Position and Gender
- 190 • Tabel 10. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Gender
Table 10. Number of Employees Based on Education and Gender
- 208 • Tabel 11. Program Strategis PSBI
Table 11. PSBI Strategic Program

Daftar Grafik

List of Graphic

- 50 • Grafik 1. Perkembangan Inflasi Tahunan
Graphic 1. Development of Annual Inflation Rate
- 60 • Grafik 2. Depresiasi/Apresiasi Mata Uang Kawasan 2015
Graphic 2. Depreciation/Appreciation of Regional Currencies in 2015
- 74 • Grafik 3. Sasaran Inflasi
Graphic 3. Inflation Target
- 78 • Grafik 4. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
Graphic 4. Financial System Stability Index
- 90 • Grafik 5. Prosiklikalitas
Graphic 5. Procyclicality
- 92 • Grafik 6. Ilustrasi Pembentukan dan Pelepasan *Buffer* CCB
Graphic 6. Illustration of the Setup and Release of CCB Buffer
- 92 • Grafik 7. Prosiklikalitas Pertumbuhan Kredit
Graphic 7. Procyclicality of Loan Growth
- 93 • Grafik 8. Gap Kredit terhadap PDB
Graphic 8. Credit to GDP Gap

- 116 • Grafik 9. Indeks Komposit Keuangan Inklusif Indonesia
Graphic 9. Indonesia Financial Inclusion Composite Indeks
- 124 • Grafik 10. Harga Eceran Cabai Nasional 2012-2014 (Rp/Kg)
Graphic 10. Graphic on National Chilli Retail Price 2012-2014 (Rp/Kg)
- 177 • Grafik 11. Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Bank Indonesia Tahun 2013 s/d 2015 (skala 1-6)
Graphic 11. Satisfaction Index of BI Museum Visitors Year 2013-2015 (scale 1-6)

Daftar Infografis

List of Infographic

- 55 • Infografis 1a. Paket Kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
Infographic 1a. Policy Package of Government, Bank Indonesia and Financial Services Authority
- 56 • Infografis 1b. Paket Kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
Infographic 1b. Policy Package of Government, Bank Indonesia and Financial Service Authority
- 67 • Infografis 2. BIG DATA Bank Indonesia
Infographic 2. Bank Indonesia BIG DATA
- 71 • Infografis 3. Mekanisme Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)
Infographic 3. Mechanism of Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)
- 87 • Infografis 4. Siklus Pengawasan Makroprudensial
Infographic 4. Macroprudential Supervision Cycle
- 97 • Infografis 5. Integrasi Sistem Generasi II
Infographic 5. Integrated System Generation II
- 99 • Infografis 6. Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
Infographic 6. Customer Protection on Payment System Service
- 101 • Infografis 7. Siklus Pengelolaan Uang Rupiah
Infographic 7. Rupiah Management Cycle
- 109 • Infografis 8. Sebaran Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah
Infographic 8. Distribution of Regional Inflation Management and Monitoring Team
- 161 • Infografis 9. Komposisi Topik yang Dibahas dalam Rapat Dewan Gubernur
Infographic 9. Topic Compositions Discussed in the Board of Governors Meeting
- 176 • Infografis 10. Perkembangan Media Sosial Bank Indonesia
Infographic 10. Development of Bank Indonesia Social Media Accounts
- 179 • Infografis 11. Perkembangan Layanan Informasi Publik Bank Indonesia
Infographic 11. Development of Bank Indonesia Public Service Information
- 189 • Infografis 12. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Gender
Infographic 12. Number of Employees Based on Position and Gender
- 190 • Infografis 13. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Gender
Infographic 13. Number of Employees Based on Education and Gender
- 212 • Infografis 14. Proporsi Program Kepedulian Sosial
Infographic 14. Proportion of Social Care Program
- 215 • Infografis 15. Penerima Manfaat PSBI Tahun 2015
Infographic 15. PSBI Beneficiaries in 2015

Daftar Gambar

List of Picture

- 126 • Gambar 1. Dukungan Bank Indonesia dalam GTCK
Picture 1. Bank Indonesia Support for GTCK
- 127 • Gambar 2. Ilustrasi Pola Tanam Cabai di Indonesia
Picture 2. Illustration of Chilli Cropping Patterns in Indonesia
- 146 • Gambar 3. Kerangka Kerja Tata Kelola Bank Indonesia
Picture 3. Bank Indonesia Governance Framework
- 149 • Gambar 4. Kewajiban dan Larangan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bank Indonesia
Picture 4. Obligation and Prohibition on Bank Indonesia Code of Ethic & Conduct
- 151 • Gambar 5. Mekanisme Pelaporan WBS BI
Picture 5. BI WBS Reporting Mechanism
- 153 • Gambar 6. Struktur Tata Kelola Bank Indonesia
Picture 6. Bank Indonesia Governance Structure
- 163 • Gambar 7. Pengambilan Keputusan Terkait Kebijakan Prinsipil-Strategis
Picture 7. Decision Making Process on Principle-Strategic Policy
- 166 • Gambar 8. Konsep Pengendalian *Three Lines of Defense*
Picture 8. Concept of Three Lines of Defense Management
- 174 • Gambar 9. Tingkat Keyakinan Masyarakat terhadap Aspek Tata Kelola Bank Indonesia (skala 1-6)
Picture 9. Level of People Trust to Governance Aspect at Bank Indonesia (scale 1-6)

SINERGI UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL

Synergy for Accelerating National Economic Transformation

Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kondisi perekonomian diliputi gejolak, baik yang bersumber dari global maupun domestik. Pemulihan ekonomi dunia yang masih lemah, berlanjutnya penurunan harga komoditas dan menurunnya aliran modal asing ke negara berkembang menjadi pemicu tekanan terhadap perekonomian negara berkembang termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, tingginya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, kinerja ekspor yang menurun sebagai dampak perekonomian global, dan belum optimalnya penyerapan anggaran fiskal mewarnai dinamika perekonomian Indonesia.

Sebagai respons atas meningkatnya tekanan terhadap stabilitas perekonomian, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan yang difokuskan untuk mendorong terwujudnya stabilitas makroekonomi dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan. Untuk mewujudkan ini, Bank Indonesia tidak berdiri sendiri. Bank Indonesia menjalin sinergi yang erat dengan pemerintah dan berbagai pemangku kebijakan di pusat, daerah, dan internasional, untuk mempercepat transformasi ekonomi guna membawa perekonomian yang tumbuh lebih sehat dan berkesinambungan. Melalui kewenangan yang dimiliki, selama 2015 Bank Indonesia melaksanakan berbagai koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga.

Di internal, upaya untuk bertransformasi menata diri menjadi bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional telah mulai diimplementasikan secara nyata di 2015. Berbagai terobosan kebijakan, organisasi, tata kelola, sumber daya manusia, hingga pembenahan infrastruktur pendukungnya telah digulirkan dan akan terus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang. Transformasi internal ini merupakan bagian dari komitmen Bank Indonesia untuk memberikan kontribusi yang lebih baik bagi bangsa.

Year 2015 were full of challenges for Indonesia's economy. Economic conditions were volatile, both from global and domestic. Weak global economic recovery, further decline in commodity prices, and decreasing foreign capital flows to emerging countries triggered pressure to emerging market economies including Indonesia. From the domestic side, high pressure on the Rupiah exchange rate, declining export performance due to the impact of global economy, and not optimum fiscal disbursement has caused the dynamics of Indonesia economy.

In response to the increasing pressure to economic stability, Bank Indonesia strengthened its policy mix focused on realizing macro economic stability while maintaining growth momentum. To achieve this, Bank Indonesia did not act alone. Bank Indonesia established a close synergy with the government and other stakeholders in the central, regional, and international levels to accelerate economic transformation to bring a healthier and more sustainable economy. Through its authority, in 2015 Bank Indonesia implemented several cross-institution coordinations and collaborations.

From the internal side, the effort to transform itself to become the most credible and best central bank in the region started to be implemented in 2015. Several policy breakthrough, organization, governance, human resource, and supporting infrastructure improvement have been rolled out and will be continued in the upcoming year. This internal transformation is part of Bank Indonesia's commitment to provide better contribution to the nation.

Ikhtisar 2015

Highlights of 2015

3,35%_(yoy)

INFLASI IHK 2015 lebih rendah dibanding 2014 (8,36% yoy).
CPI INFLATION 2015 was lower than 2014 (8.36% yoy).

11,16%

Di tengah tingginya tekanan terhadap Rupiah, **RUPIAH VOLATILITAS TERKENDALI**
*Amidst strong pressure on the Rupiah, **RUPIAH VOLATILITY WAS CONTROLLED***

4.8%

EKONOMI INDONESIA TUMBUH 4,8%, sedikit melambat dibanding 5,0% pada 2014 namun menunjukkan momentum pertumbuhan pada akhir tahun.
INDONESIAN ECONOMY GREW 4.8%, slightly slower than 5.0% in 2014 but with growth momentum at the year end.

0,93

INDEKS STABILITAS SISTEM KEUANGAN masih berada jauh dari level krisis (2,0) namun sedikit naik dari 0,79 di 2014.
FINANCIAL SYSTEM STABILITY INDEX was far below crisis level (2.0) but slightly increased from 0.79 in 2014.

11,00%

PENINGKATAN UANG YANG DIEDARKAN pada akhir 2015 menjadi Rp586,8 triliun dari Rp528,5 triliun pada 2014.
INCREASE IN CURRENCY IN CIRCULATION at the end of 2015 to Rp586.8 trillion from Rp528.5 trillion in 2014.

18,35%

PENINGKATAN LAYANAN SISTEM PEMBAYARAN yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Industri menjadi 5,5 miliar transaksi dengan nilai Rp121,1 ribu triliun.
INCREASE IN PAYMENT SYSTEM SERVICES operated by Bank Indonesia and the Industry to 5.5 billion transactions with value of Rp121.1 thousand trillion.

1,65 kali PDB
times of GDP

Nilai Transaksi **SISTEM PEMBAYARAN RITEL** mencapai sebesar 1,65 kali PDB.
*Transaction of **RETAIL PAYMENT SYSTEM** reached 1.65 times of GDP.*

- Bank Indonesia dan Pemerintah menerapkan bauran kebijakan guna mencari titik keseimbangan yang optimal bagi perekonomian.
Bank Indonesia and Government implemented policy mix to find optimal balance point for the economy.
- Bank Indonesia mempertahankan kebijakan suku bunga bias ketat untuk mengatasi tekanan terhadap nilai tukar.
Bank Indonesia maintained tight policy bias to reduce currency depreciation.
- Pelonggaran beberapa kebijakan makroprudensial mendorong intermediasi perbankan.
Loosening macroprudential policies to boost bank intermediary function.
- Sistem pembayaran terselenggara dengan aman, efisien, dan andal, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen.
Payment system was safe, efficient, and reliable, with due considerations of consumer protection aspect.
- Terpenuhinya kebutuhan uang tunai dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar.
Meeting the needs of currencies in sufficient amount, appropriate denominations, timely manner, and fit for circulation.
- Bank Indonesia terus mendorong perluasan akses keuangan masyarakat melalui sistem keuangan yang inklusif untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan.
Bank Indonesia continued to expand financial access of the society through inclusive financial system to create financial system stability.

Pengantar Gubernur

Foreword by the Governor



Meskipun perekonomian domestik di tahun 2015 dihadapkan pada berbagai gejolak eksternal, namun strategi untuk meningkatkan kapasitas perekonomian tetap secara konsisten dilakukan lewat komitmen reformasi struktural yang dilakukan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, maupun otoritas terkait.

Even though the domestic economy in 2015 faced several external shocks, the strategy to increase economic capacity was consistently performed through the commitment of structural reform conducted by the Government, Bank Indonesia, and relevant authorities.

Tahun 2015 adalah tahun yang penuh ujian bagi ketahanan perekonomian Indonesia. Setelah melewati periode *booming* harga komoditas dan kondisi likuiditas global yang amat longgar, memasuki tahun 2015 kita dihadapkan pada situasi yang sama sekali berbeda. Rencana normalisasi kebijakan moneter AS yang semakin nyata, *stance* moneter ultra akomodatif yang ditempuh Eropa dan Jepang, perlambatan struktural Tiongkok yang sebelumnya tumbuh *double digit*, dan masih terus merosotnya harga komoditas yang menjadi andalan ekspor beberapa negara termasuk Indonesia, menjadi tema utama perjalanan ekonomi global di tahun 2015. Bersama dengan itu pula, fenomena

Year 2015 was a challenging year for Indonesian economic resilience. After the boom period of commodity prices and ultra-loose global liquidity conditions, in 2015 we were faced with totally different situations. The US monetary policy normalization plan that was becoming real, ultra-accommodative monetary stance pursued by Europe and Japan, Chinese structural slowdown which previously experienced double-digit growth, and declining prices of commodities which previously became export leaders for several countries including Indonesia, became the main theme of global economic journey in 2015. Along with them, the phenomena of US

penguatan Dollar AS dalam skala global dan kebijakan devaluasi Yuan menciptakan volatilitas serta mendorong pergeseran aliran modal di pasar keuangan global. Rangkaian dinamika ini mencerminkan bagaimana pemulihan ekonomi global di tahun 2015 masih belum berimbang dan diliputi ketidakpastian. Semua ini memberikan tekanan yang cukup kuat kepada perekonomian Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dihindari mengingat Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbuka, yang secara langsung maupun tidak langsung akan terkena dampak rambatan dinamika yang terjadi pada tataran global.

Dalam upaya negara-negara maju untuk bisa pulih sepenuhnya dari dampak krisis, pertumbuhan negara berkembang yang selama ini menopang perekonomian dunia justru mulai terkendala. Indonesia sendiri tidak dapat lepas dari berbagai turbulensi yang terjadi, baik yang dirasakan melalui jalur perdagangan maupun jalur keuangan. Dengan struktur perekonomian yang masih didominasi ekspor komoditas mentah dan impor bahan produksi serta barang modal, berbagai sektor ekonomi domestik di tahun 2015 tumbuh melambat. Turunnya ekspor di tengah masih tingginya kebutuhan impor juga menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan masih terjadi. Di samping itu, ketergantungan yang tinggi pada sumber pembiayaan eksternal juga ikut menciptakan kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar, yang dialami seiring masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Namun demikian, keuletan dan keteguhan telah membawa kita untuk mampu melalui segenap dinamika tersebut. Patut disyukuri bahwa Indonesia termasuk sedikit dari negara berkembang yang perekonomiannya mampu tumbuh positif dan stabil, dengan kondisi makroekonomi yang tetap terjaga. Sebagai Otoritas Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran-Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia di sepanjang tahun 2015 menempuh bauran kebijakan yang konsisten untuk mencapai stabilitas moneter, berkontribusi dalam memelihara stabilitas sistem keuangan, sekaligus menciptakan ruang bagi kesinambungan pertumbuhan. *Stance* kebijakan moneter yang secara umum cenderung ketat ditempuh secara tegas dan penuh kehati-hatian untuk menjaga inflasi sesuai sasaran yang telah ditetapkan, menjaga defisit neraca transaksi berjalan tetap berada di level yang sehat, dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya.

Dollar strengthening in a global scale and Yuan devaluation policy created volatility and shifted capital flow in the global financial market. These dynamic series reflected how global economic recovery in 2015 remained imbalanced and full of uncertainty. All of these created strong pressure to Indonesian economy, which was unavoidable considering Indonesia is a country with open economy that directly or indirectly will suffer the impact of dynamic movement happening globally.

In the efforts of developed nations to fully recover from crisis, the growth of developing countries which has been supporting the world's economy was constrained. Indonesia itself was not immune from the turbulences happening, both from the trade channel or financial channel. With economic structure which was still dominated by exports of raw commodities and imports of production materials and capital goods, several domestic economic sectors in 2015 suffered slower growth. The decline of exports amidst high needs of imports also led to the deficit in current account. In addition, high dependency to external sources of financing also created vulnerability to fluctuations in exchange rate, which happened due to high uncertainty in the global financial market.

However, with tenacity and persistence we managed to go through those dynamics. We should be thankful that Indonesia was among the small number of developing countries whose economies managed to book positive and stable growth, with manageable macroeconomic conditions. As the Monetary, Macroprudential, and Payment System-Rupiah Management Authority, Bank Indonesia throughout 2015 pursued a consistent policy mix to achieve monetary stability, contributing in maintaining financial system stability, as well as creating room for growth sustainability. The stance of monetary policy which generally remained tight was pursued in a firm and prudent manner to maintain inflation according to the set target, maintain current account deficit in a healthy level, and maintain Rupiah exchange rate according to its fundamentals.

140

198

216

233

Berkat konsistensi dari kebijakan moneter yang ditempuh dan sinergi erat dengan Pemerintah dalam rangka pengendalian harga, inflasi tahun 2015 berhasil dijaga berada dalam rentang sasaran. Ketersediaan barang, kelancaran distribusi, dan terjangkarnya ekspektasi inflasi menjadi faktor yang dapat membawa inflasi di tahun 2015 sebagai yang terendah dalam lima tahun terakhir. Selain itu, defisit neraca transaksi berjalan juga dapat diturunkan ke level yang semakin sehat bagi perekonomian. Dengan aktivitas impor yang banyak difokuskan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis, kami meyakini bahwa tingkat defisit tersebut merupakan konsekuensi produktif dari strategi perekonomian yang ditempuh untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dalam jangka menengah panjang.

Di tengah konsistensi dalam mencapai sasaran inflasi, Bank Indonesia juga senantiasa berupaya memelihara stabilitas sistem keuangan. Melalui tiga tahapan pengawasan makroprudensial, yaitu *surveillance*, pemeriksaan, dan tindak lanjut, Bank Indonesia secara seksama mengidentifikasi dan memitigasi sumber-sumber ketidakseimbangan dan kerentanan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Dalam konteks kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia berupaya memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi secara terukur dengan memberikan tambahan ruang pertumbuhan kredit melalui pelonggaran instrumen makroprudensial berupa peningkatan rasio *Loan to Value* (LTV) dan memperluas sumber pendanaan bank dengan memasukkan komponen surat-surat berharga ke dalam *Loan to Funding Ratio* (LFR), menggantikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Selain itu, Bank Indonesia juga menerapkan ketentuan tambahan modal berupa *Countercyclical Capital Buffer* (CCB) yang diharapkan dapat mengurangi prosiklikalitas serta mengantisipasi risiko instabilitas di dalam siklus ekspansi-kontraksi perekonomian dalam rangka meningkatkan ketahanan sistem perbankan.

Untuk dapat menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan yang telah diupayakan, kami mencermati bahwa peran layanan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan andal menjadi prasyarat. Dengan fokus untuk memperkuat infrastruktur sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia di tahun 2015 mulai mengimplementasikan teknologi Generasi-II menggantikan teknologi sebelumnya yang telah berjalan selama 10 tahun. Modernisasi layanan ini selain untuk menjawab

With the consistency of monetary policy pursued and close synergy with the Government in maintaining price stability, inflation in 2015 was manageable in the target range. Goods availability, smooth distribution, and anchored inflation expectations were the factors that brought inflation in 2015 to the lowest level in the past five years. In addition, current account deficit could be lowered to a healthier level for the economy. With import activities mostly focused on the needs for strategic infrastructure development, we are confident that the deficit level was a productive consequence from the economic strategies pursued to increase economic capacity in the medium-long term.

Amidst the consistency to achieve inflation target, Bank Indonesia strives always to maintain financial system stability. Through three stages of macroprudential supervision: surveillance, assessment, and action plan, Bank Indonesia carefully identifies and mitigates sources of imbalances and vulnerabilities which potentially could create systemic risk. In the context of macroprudential policy, Bank Indonesia tried to provide support on economic growth in a measured manner by giving additional room for credit growth through the loosening of macroprudential instruments in form of increasing Loan to Value (LTV) ratio and expanding the source of bank financing by including the components of securities in Loan to Function Ratio (LFR), replacing Loan to Deposit Ratio (LDR). In addition, Bank Indonesia also implemented additional capital buffer in form of Countercyclical Capital Buffer (CCB) which is expected to reduce procyclicality as well as anticipating instability risk in the cycle of economic expansion-contraction in increasing the resilience of banking system.

To maintain monetary stability and financial system stability, we realize that a secure, efficient, and reliable payment system is a pre-requirement. With the focus to strengthen national payment system infrastructure, Bank Indonesia in 2015 began to implement Generation-II technology to replace the previous technology which has run for 10 years. Modernization of this service answers the needs of increasing transactions among people, as well as making the service more secure and efficient,

kebutuhan transaksi masyarakat yang semakin meningkat, juga menjadikan layanan yang diberikan lebih aman dan efisien, serta memiliki kemampuan pengelolaan risiko yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan *Central Bank Money (CeBM)* dalam setelmen dana transaksi di pasar modal. Di samping sebagai bentuk mitigasi risiko kredit dan likuiditas, hilangnya ketergantungan setelmen kepada salah satu bank yang kemudian dialihkan kepada bank sentral juga turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi aktivitas di pasar modal.

Meskipun perekonomian domestik di tahun 2015 dihadapkan pada berbagai gejala eksternal, namun strategi untuk meningkatkan kapasitas perekonomian tetap secara konsisten dilakukan lewat komitmen reformasi struktural yang dilakukan baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, maupun otoritas terkait. Setelah sebelumnya melakukan reformasi subsidi, di paruh kedua tahun 2015 Pemerintah telah mengambil langkah progresif dengan menerbitkan serangkaian paket kebijakan sebagai stimulus untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Bank Indonesia juga dalam semangat yang sama berkomitmen untuk mengatasi tantangan struktural yang ada dalam sektor keuangan. Dalam hal ini kami terus mendorong pendalaman pasar keuangan dengan memperluas cakupan pelaku pasar, memperbanyak variasi produk, dan mengupayakan efisiensi dari sisi harga. Di samping itu, upaya perluasan layanan akses keuangan guna memperbaiki tingkat inklusi keuangan juga terus dilakukan. Secara khusus, Bank Indonesia di tahun 2015 menerbitkan ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Selain untuk menjaga kedaulatan Rupiah sebagai wujud dari amanat UU Mata Uang, kebijakan ini juga secara struktural ditujukan untuk mengurangi permintaan valuta asing yang digunakan dalam transaksi domestik, yang pada gilirannya juga akan mendukung tercapainya stabilitas nilai Rupiah.

Berbagai langkah kebijakan yang telah ditempuh Bank Indonesia tidak terlepas dari dedikasi seluruh insan Bank Indonesia untuk memperbaiki organisasi secara berkelanjutan. Melalui *Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI)* yang telah disusun sejak tahun 2014, kami bergerak bersama untuk terus membangun kapabilitas organisasi guna mewujudkan visi sebagai bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional. Selaras dengan

and with better risk management capability. In line with that, Bank Indonesia also pushed for the use of Central Bank Money (CeBM) in the settlement of fund transactions in the capital market.

Besides as a form of liquidity and credit risks mitigation, the loss of settlement dependency in one bank which is shifted to the central bank also contributed in increasing efficiency of activities in the capital market.

Even though the domestic economy in 2015 faced several external shocks, the strategy to increase economic capacity was consistently performed through the commitment of structural reform conducted by the Government, Bank Indonesia, and relevant authorities. After conducting subsidy reform, in the second half of 2015 the Government took progressive steps by issuing a series of policy packages as stimulus to increase the competitiveness of national economy. Bank Indonesia in the same spirit also committed to resolving structural challenges in the financial sector. In this case we continued to push financial market deepening by expanding the scope of market players, adding product variety, and striving for price efficiency. In addition, efforts to expand financial access services to improve the level of financial inclusion were continuously performed. In particular, Bank Indonesia in 2015 issued policy on the requirement of Rupiah use in the Republic of Indonesia Jurisdiction. Besides to maintain Rupiah sovereignty in implementation of the Currency Law, the policy was structurally aimed to reduce foreign exchange demand for domestic transactions, which eventually will support Rupiah stability.

Several policies pursued by Bank Indonesia were due to dedications of all Bank Indonesia employees to improve the organization in a sustainable manner. Through the Bank Indonesia Strategic Functions Architecture (AFSBI) set since 2014, we move together to continue building organizational capability to realize the vision as the credible and best central bank in region. In line with the transformation spirit, Bank

semangat transformasi tersebut, Bank Indonesia di sepanjang tahun 2015 telah membangun penguatan tata kelola pengelolaan organisasi. Dilandasi prinsip independensi, akuntabilitas, dan transparansi, seluruh jenjang organisasi telah memiliki panduan untuk menerapkan pengelolaan organisasi dan pengambilan keputusan yang senantiasa tertib dan penuh dengan tanggung jawab. Penegakan kode etik dan perilaku, kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan implementasi *Whistle Blowing System* merupakan beberapa wujud komitmen nyata organisasi dalam menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik dan pengelolaan organisasi yang kredibel.

Memandang jauh ke depan, berbagai risiko dan ketidakpastian masih akan menguji kecermatan kita dalam mengelola perekonomian. Untuk dapat melewati tantangan yang semakin kompleks dan membawa perekonomian tumbuh secara kuat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan, kerja kolektif dan koordinasi di antara Pemerintah, Bank Indonesia, otoritas terkait, maupun pemangku kepentingan lainnya akan menjadi kunci. Oleh karena itu, pada tahun 2015 ini kami menyematkan tema "Sinergi Untuk Percepatan Transformasi Ekonomi Nasional" di dalam Laporan Tahunan Bank Indonesia, dengan harapan bahwa bersama-sama kita akan terus dapat memberikan yang terbaik dalam berkontribusi bagi kemajuan perekonomian bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi dan meringankan langkah kita bersama.

Indonesia in 2015 built governance strengthening of organizational management. Based on principles of independency, accountability, and transparency, all levels of organization have the guidance to implement organizational management and decision making that is always in order and responsible. The enforcement of code of ethics and behaviors, compliance on State Administrators Wealth Report (LHKPN), and implementation of Whistle Blowing System are several forms of real commitment from the organization in upholding the principle of good governance and credible organizational management.

Looking far forward, several risks and uncertainties will still test our precision in managing the economy. To be able to go through more complex challenges and bring the economy to grow in strong, balanced, inclusive, and sustainable manners, collective works and coordinations between the Government, Bank Indonesia, relevant authorities, and other stakeholders will become keys. Therefore, in 2015 we pinned the theme "Synergy for Accelerating National Economic Transformation" in the Bank Indonesia Annual Report, with hopes that together we can continue to give the best in making contributions for the development of national economy.

May God Almighty always condone and enlighten our journey.



Agus D.W. Martowardojo
Gubernur Bank Indonesia
Governor of Bank Indonesia

Sambutan Ketua BSBI

Remarks of BSBI Chairman



“Kami mengapresiasi upaya-upaya keras yang dilakukan Bank Indonesia untuk melakukan transformasi dari sisi internal, sementara terus menjaga kestabilan perekonomian dalam negeri yang penuh tantangan pada tahun 2015.”

“We appreciated the efforts made by Bank Indonesia to conduct internal transformation, but still maintaining the stability of domestic economy which was full of challenges in 2015.”

Tahun 2015 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto mencapai titik terendah dalam kurun waktu enam tahun terakhir, akibat menurunnya ekspor dan melemahnya konsumsi rumah tangga. Nilai tukar Rupiah dan pasar keuangan domestik pun mengalami tekanan akibat keluarnya arus modal ke luar negeri didorong oleh potensi kenaikan suku bunga Federal Reserve.

Untuk merespon kondisi ini, kami melihat bahwa Bank Indonesia telah berupaya agar kondisi moneter dan sistem keuangan tetap terjaga dan di saat yang sama memberikan ruang yang kondusif bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Berbagai kebijakan dikeluarkan, baik dalam rangka pengendalian inflasi, maupun menjaga stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi.

Patut disyukuri bahwa kondisi perekonomian di penghujung 2015 terjaga dan menunjukkan prospek yang membaik. Hal ini terlihat dengan membaiknya indikator-indikator ekonomi di triwulan IV tahun 2015. Inflasi pada akhir tahun terkendali pada level 3,35% (yoy) dan berada pada kisaran target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebesar 4%±1%. Nilai tukar Rupiah mengalami apresiasi terhadap Dolar AS, surplus transaksi modal dan finansial meningkat signifikan, serta Indeks Stabilitas Sistem Keuangan membaik dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kami juga menilai bahwa kondisi perekonomian yang kondusif tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait. Sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta otoritas terkait sangatlah krusial untuk menyokong kestabilan perekonomian dalam negeri, terutama di masa-masa sulit seperti tahun 2015. Kami melihat Bank Indonesia, khususnya Dewan Gubernur, telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai amanat demi kepentingan bangsa dan negara.

Year 2015 was difficult for Indonesia's economy. Gross Domestic Product growth reached the lowest level in the last six years, as exports declined and household consumption weakened. The Rupiah exchange rate and domestic financial market were under pressure due to capital outflows overseas driven by the potential of Federal Reserve rate hike.

In response to these conditions, we see that Bank Indonesia strived to maintain monetary conditions and financial system and at the same time providing conducive room for Indonesia's economic recovery. Several policies issued, either to control inflation, or to maintain the stability of financial system and macroeconomy.

We should be thankful that economic conditions at the end of 2015 were maintained and showed improving prospects. This was reflected in the improving economic indicators at the fourth quarter of 2015. Inflation at the end of the year was manageable at 3.35% (yoy) and within the inflation target range set by the Government at 4%±1%. The Rupiah exchange rate appreciated against the US Dollar, surplus of financial and capital account rose significantly, and Financial System Stability Index improved compared to that of the previous quarter.

We also viewed the conducive economic conditions arose due to good coordination between Bank Indonesia and the Government and related authorities. Synergy between Bank Indonesia and the Government, both central and regional, and related authorities was crucial in supporting domestic economic stability, especially in difficult times such as 2015. We saw Bank Indonesia, particularly the Board of Governors, has performed its functions and responsibilities as mandated for the interest of the people and country.

Sepanjang tahun 2015, Badan Supervisi Bank Indonesia menjalin komunikasi yang erat dengan Bank Indonesia untuk bersama mewujudkan tata kelola yang baik, sesuai dengan mandat Undang-Undang tentang Bank Indonesia. BSBI, selaku pengawas Bank Indonesia, memberikan saran dan rekomendasi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta melakukan telaahan atas laporan keuangan, anggaran operasional, serta investasi Bank Indonesia guna memastikan semuanya dilakukan di dalam koridor yang sesuai, yaitu akuntabel, independen, transparan, dan kredibel.

Kami mengapresiasi upaya-upaya keras yang dilakukan Bank Indonesia untuk melakukan transformasi dari sisi internal, sementara terus menjaga kestabilan perekonomian dalam negeri yang penuh tantangan pada tahun 2015. Berbagai upaya ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia senantiasa fokus pada tugasnya untuk mengawal perekonomian dalam negeri dan merupakan salah satu bank sentral terbaik di kawasan.

Memasuki tahun 2016, berbagai institusi memperkirakan tahun ini juga akan menghadapi tantangan yang serupa dengan tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan meningkat, namun disertai dengan potensi risiko yang terkait dengan celah ketidakseimbangan antara perkembangan ekonomi di negara maju dan negara berkembang. Harga komoditas diperkirakan akan tetap berada dalam posisi yang rendah, sementara pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat dapat mengakibatkan melemahnya nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Tantangan eksternal lainnya adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia.

Di dalam negeri, kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan BI rate sebesar 25 basis poin masing-masing di bulan Januari, Februari, dan Maret 2016 menjadi 6,75% diharapkan dapat menjadi katalis untuk mendorong kredit perbankan. Kami juga berharap Pemerintah dapat terus mengakselerasi belanja modal di awal tahun, terutama untuk infrastruktur, yang dapat menggairahkan kegiatan perekonomian.

Akhir kata, perkenankan saya mewakili BSBI untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Gubernur dan seluruh jajaran Bank Indonesia atas upaya dan kerja kerasnya sepanjang tahun 2015. Kami berharap sinergi yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan demi mencapai tujuan bersama.

Throughout 2015, the Bank Indonesia Supervisory Board maintained close communication with Bank Indonesia to realize a good governance, in accordance to the mandate of Law on Bank Indonesia. BSBI, as the supervisor of Bank Indonesia, provided advices and recommendations on activities conducted by Bank Indonesia as well as making review on financial report, operating budget, as well as investment of Bank Indonesia to ensure all were done in the appropriate corridor: accountable, independent, transparent, and credible.

We appreciated the efforts made by Bank Indonesia to conduct internal transformation, but still maintaining the stability of domestic economy which was full of challenges in 2015. These efforts showed that Bank Indonesia remained focus on its task to guard the domestic economy and is one of the best central banks in the region.

Entering 2016, several institutions forecast this year will face similar challenges to 2015. The global economic growth is predicted to increase, but followed with risk potentials related to the gap of imbalances between economic growth in developed and developing countries. Commodity prices are forecast to remain in a low level, while the tightening of US monetary policy could cause weakening currencies in emerging countries, including Indonesia. Another external challenge is the weakening growth of China which affects Indonesia's economy.

Domestically, Bank Indonesia's policy to cut the benchmark BI rate by 25 basis points each in January, February, and March to 6.75% is expected to become catalyst to boost bank lending. We also expect the Government can continue accelerating capital spending at the beginning of the year, especially on infrastructure, that can encourage economic activities.

Finally, allow me to represent BSBI in extending our appreciation and utmost gratitude to the Board of Governors and all members of Bank Indonesia for the efforts and hard work throughout 2015. We hope the existing synergy can continue to be increased to reach mutual goals.

Umar Juoro
Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia
Chairman of the Supervisory Board of Bank Indonesia

Tentang Bank Indonesia


About Bank Indonesia



Bank Indonesia bertekad menjadi bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian negeri.

Bank Indonesia aims to become the most credible and best central bank in the region to give optimum contributions to the domestic economy.





Berbagai upaya yang ditempuh Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar Rupiah.

Efforts pursued by Bank Indonesia are aimed at one single objective, achieving and maintaining the stability of Rupiah exchange rate.



Tentang Bank Indonesia

About Bank Indonesia

Keberadaan bank sentral merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Bank Indonesia menyadari pentingnya peranannya dalam menjaga stabilisasi perekonomian dalam negeri. Karena itu, Bank Indonesia mencanangkan sebuah program transformasi untuk mencapai visi Bank Indonesia menjadi bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional pada tahun 2024. Sementara dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia senantiasa memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga.

The presence of a central bank is mandated by the 1945 Constitutions. The structure, status, authority, responsibility, and independence are further stipulated in the Law No. 23 of 1999 on Bank Indonesia which has been amended several times, most recently by the Law No. 6 of 2009.

Bank Indonesia realizes the importance of its role in maintaining the stability of domestic economy. Therefore, Bank Indonesia launched a transformation program to achieve Bank Indonesia's vision in becoming the most credible and best central bank in the region by 2024. Meanwhile in the task implementation, Bank Indonesia continues strengthening cross-institution coordinations and collaborations.

Status, Tujuan, dan Tugas

Status, Objectives and Tasks

Status

Status

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Bank Indonesia is the Central Bank of the Republic of Indonesia, representing a legal entity with the authority to promulgate legislation. As a public legal entity, Bank Indonesia is authorised to issue legally binding subordinate regulations in accordance with its duties and jurisdiction. As a civil legal entity, Bank Indonesia is entitled to act for and on behalf of itself in and outside a court of law.

Tujuan

Objectives

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah diukur dari dua aspek yaitu kestabilan nilai uang terhadap barang dan jasa yang terefleksikan pada inflasi serta kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.

Bank Indonesia has the single objective of achieving and maintaining Rupiah currency stability. Rupiah currency stability is measured in terms of two aspects, namely stability against goods and services as reflected in inflation as well as stability against other currencies. To that end, Bank Indonesia institutes sustainable, consistent and transparent monetary policy that pays due consideration to the economic policies of the Government.

Tugas

Tasks

Sesuai Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (iii) mengatur dan mengawasi bank.

Pasca beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia mendapatkan mandat tambahan berupa tugas kebijakan, pengaturan, dan pengawasan makroprudensial. Mandat di bidang makroprudensial ini diamanatkan dalam Undang-Undang tentang OJK dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Mandat tersebut guna mendukung terwujudnya stabilitas sistem keuangan Indonesia, selain tugas di bidang moneter dan sistem pembayaran, sebagai tambahan tugas yang diamanatkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia masih dapat memeriksa individu bank secara langsung untuk bank yang masuk kategori *systemically important bank* atau bank lainnya sesuai kewenangan Bank Indonesia, berkoordinasi dengan OJK.

In accordance with the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia is authorised to implement the following tasks: (i) formulate and execute monetary policy; (ii) regulate and maintain a smooth payment system; (iii) regulate and supervise banks.

After transferring the function of banking supervision and regulation to the Financial Services Authority (FSA), Bank Indonesia received an additional mandate in the form of macroprudential policy, regulation and supervision pursuant to the FSA Act enforced on 1st January 2014. The mandate supports the realisation of financial system stability in Indonesia, in addition to the existing monetary and payment system tasks contained in the Bank Indonesia Act.

Bank Indonesia is still authorised to inspect individual systemically important banks directly as well as other banks pursuant to the mandate of Bank Indonesia in conjunction with the FSA.

Visi, Misi, dan Nilai-nilai Strategis

Vision, Mission, and Strategic Values



Visi *Vision*

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

To be a credible institution and the best central bank in the region by strengthening the strategic values held as well as through the achievement of low inflation together with a stable exchange rate.



Misi *Mission*

1. Mencapai stabilitas nilai Rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
 2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
 3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
 4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang.
1. *To achieve Rupiah stability and maintain the efficiency of monetary policy transmission in order to drive quality economic growth.*
 2. *To nurture an effective and efficient national financial system that can withstand internal and external shocks in order to support the allocation of funding/financing that contributes to national economic growth and stability.*
 3. *To create a secure, efficient and smooth payment system that contributes to the economy, monetary stability, and financial system stability with regard to broad financial access and the national interest.*
 4. *To build and maintain the organization and human resources of Bank Indonesia, who are performance based and uphold the strategic values, as well as to enforce good corporate governance in order to implement tasks as mandated by prevailing laws.*

Nilai-nilai Strategis *Strategic Values*

1 **Trust and Integrity**

Membangun kondisi saling menghormati dan mempercayai secara internal dan eksternal melalui keterbukaan, keandalan, dan konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang didasari oleh nilai-nilai moral dan etika.

Trust and Integrity

Creating mutual respect and trust internally and externally through openness, reliability and consistency in terms of thoughts, words and actions based on moral and ethical values.

2 **Professionalism**

Bekerja dengan tuntas dan bertanggung jawab atas dasar kompetensi terbaik yang dilakukan secara independen, antisipatif, rasional, dan obyektif.

Professionalism

Working diligently and responsibly to the best of one's ability in an independent, anticipative, rational and objective way.

3 **Excellence**

Senantiasa melakukan yang terbaik dengan mengedepankan penciptaan nilai tambah yang prima untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan menuju kesempurnaan.

Excellence

Always doing one's best by prioritizing the creation of value added to achieve sustainable excellence in the pursuit of perfection.

4 **Public Interest**

Senantiasa mengutamakan dan melindungi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam melaksanakan mandat dengan penuh dedikasi, adil, dan bertanggung jawab.

Public Interest

Prioritizing and protecting the national interest over personal gain when executing the mandate with dedication, fairness and accountability.

5 **Coordination dan Teamwork**

Membangun sinergi yang berkesinambungan secara internal dan eksternal melalui kolaborasi dan komunikasi yang menghasilkan komitmen yang memberikan nilai tambah dengan dasar saling percaya, saling menghargai, dan semangat interdependensi.

Coordination and Teamwork

Creating sustainable internal and external synergy through collaboration and communication that generates commitment to provide value added based on mutual trust and appreciation as well as a spirit of independence.



Erwin Rijanto
Deputi Gubernur
Deputy Governor

Mirza Adityaswara
Deputi Gubernur Senior
Senior Deputy Governor

Perry Warjiyo
Deputi Gubernur
Deputy Governor



Ronald Waas
Deputi Gubernur
Deputy Governor

Agus D.W. Martowardojo
Gubernur
Governor

Hendar
Deputi Gubernur
Deputy Governor

Dewan Gubernur Bank Indonesia

The Board of Governors of Bank Indonesia

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang sesuai Undang-Undang tentang Bank Indonesia, terdiri atas Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan 4 (empat) hingga 7 (tujuh) Deputi Gubernur. Anggota Dewan Gubernur menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu periode berikutnya.

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan mulai dari proses pemilihan hingga penilaian kinerja Dewan Gubernur. Proses pemilihan Anggota Dewan Gubernur dilakukan melalui mekanisme yang sejalan dengan konsep pemerintahan yang demokratis.

Anggota Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Untuk mendapatkan kandidat yang pantas dan layak menduduki jabatan sebagai Anggota Dewan Gubernur, DPR-RI melakukan proses seleksi yang dikenal sebagai *fit and proper test* untuk mendalami visi, misi, keahlian, dan pengalaman kandidat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Gubernur menetapkan kebijakan yang bersifat prinsipiil dan strategis secara kolektif, yang penetapannya dilakukan melalui forum Rapat Dewan Gubernur. Dalam operasionalnya, Dewan Gubernur menetapkan pembagian bidang tugas dan wewenang untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing Anggota Dewan Gubernur. Sebagai bentuk akuntabilitas, kinerja pelaksanaan tugas Dewan Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 2015 terdiri atas Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan 4 (empat) Deputi Gubernur. Pada 2015, Erwin Rijanto diangkat sebagai Deputi Gubernur untuk periode 2015-2020. Sementara Deputi Gubernur Halim Alamsyah berakhir masa jabatannya pada 17 Juni 2015.

As stipulated by the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia is led by the Board of Governors, comprised of a Governor, a Senior Deputy Governor, and 4 (four) to 7 (seven) Deputy Governors. Each Member of the Board serves for 5 (five) years with the possibility of being reappointed for the same position in the subsequent period.

Principles of good governance are applied throughout the processes starting from selection until performance appraisal of the Board of Governors. Members of the Board of Governors are selected through a mechanism that is in line with the concept of democratic government.

Members of the Board of Governors are nominated and appointed by the President with the approval of the House of Representatives. In order to acquire appropriate and feasible candidates, the House of Representatives conducts a selection process known as fit and proper tests to gain an in-depth understanding of the candidates vision, mission, expertise and experience.

In the implementation of its duties, the Board of Governors determines principal and strategy policy collectively through Board of Governors' meetings. In its operation, the Board of Governors determines tasks and authority of the Board of Governors in order to clarify the responsibility of each respective member. As a form of accountability, the performance of the Board and each Board member is appraised according to Key Performance Indicators.

Members of the Board of Governors of Bank Indonesia in 2015 were Governor, Senior Deputy Governor, and 4 (four) Deputy Governors. In 2015, Erwin Rijanto was appointed as Deputy Governor for the 2015-2020 period. While Deputy Governor Halim Alamsyah ended his term on 17 June 2015.



Agus D.W. Martowardojo

Gubernur
Governor

Agus D.W. Martowardojo lahir di Belanda pada 1956. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia. Agus D.W. Martowardojo juga memperluas wawasan dengan mengikuti berbagai program di State University of New York, Harvard Business School, Stanford University, dan Wharton Executive Education.

Perjalanan karir Agus D.W. Martowardojo diawali di dunia perbankan, yakni di Bank of America, kemudian di Bank Niaga pada 1986. Sejak 1995, Agus D.W. Martowardojo diminta untuk menjadi Direktur Utama PT Bank Bumiputera dan pada 1998 sebagai Direktur Utama PT Bank Ekspor Impor Indonesia. Selama kurun waktu 1999-2002, bertugas sebagai *Managing Director* Bank Mandiri. Pada Oktober 2002, setelah menjabat sebagai penasehat untuk Ketua BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), ditugaskan menjadi Direktur Utama PT Bank Permata Tbk dan sejak Mei 2005 hingga Mei 2010, memimpin PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Direktur Utama.

Sebelum diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak 20 Mei 2010. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.45/P Tahun 2013, tanggal 13 April 2013, diambil sumpahnya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 24 Mei 2013. Masa jabatan Agus D.W. Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia adalah untuk periode 2013-2018.

Penghargaan yang telah diraih Agus D.W. Martowardojo antara lain Indonesia's Best Executive in 2009 dari Asiamoney, The Indonesian Banker Leadership Achievement Award 2010 dari The Asian Banker, dan terpilih sebagai Finance Minister of the Year 2012 untuk level dunia dan Asia-Pasifik versi The Banker pada Februari 2012. Pada Agustus 2014, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Agus D.W. Martowardojo Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana atas pengabdian dan kontribusinya bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.

Agus D.W. Martowardojo was born in the Netherlands in 1956. He is a graduate of economics at the University of Indonesia and deepened his knowledge further through various programs at the State University of New York, Harvard Business School, Stanford University, and Wharton Executive Education.

Agus D.W. Martowardojo's career began in the banking industry at the Bank of America and then Bank Niaga in 1986. In 1995, he was appointed President Director of Bank Bumiputera and in 1998 as the President Director of Bank Ekspor Impor Indonesia. From 1999-2002, he served as the Managing Director of Bank Mandiri. In October 2002, after working as an advisor to the Chairman of IBRA (The Indonesian Bank Restructuring Agency), he was installed as the President Director of Bank Permata. From May 2005 until May 2010 Agus D.W. Martowardojo led Bank Mandiri as its President Director.

Prior to his selection as the Governor of Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo was the Minister of Finance of the Republic of Indonesia as of 20th May 2010. Subsequently, pursuant to Presidential Decree No. 45/P, 2013, dated 13th April 2013, Agus D.W. Martowardojo was sworn in as the Governor of Bank Indonesia on 24th May 2013. Agus D.W. Martowardojo's tenure as Governor of Bank Indonesia will run for the period from 2013-2018.

Agus D.W. Martowardojo won, among others, Indonesia's Best Executive in 2009 from Asiamoney, The Indonesian Banker Leadership Achievement Award 2010 from The Asian Banker, and was chosen as Finance Minister of the Year 2012 on a global and Asia-Pacific level for The Banker in February 2012. In August 2014, Agus D.W. Martowardojo received an honour of the Star of Mahaputera Adipradana by the President of the Republic of Indonesia for his devotion and contribution to the progress, welfare, and prosperity of the nation.



Mirza Adityaswara

Deputi Gubernur Senior
Senior Deputy Governor

Mirza Adityaswara, lahir di Surabaya pada 1965. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar *Master of Applied Finance* dari Macquarie University, Sydney, Australia.

Mirza Adityaswara mengawali karir sebagai Dealer di Bank Sumitomo Niaga pada tahun 1989. Sejak tahun 2002 hingga Oktober 2005, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Director, *Head of Securities Trading & Research, Bahana Securities*, kemudian pada November di tahun yang sama diminta menjadi *Director, Head of Equity Research & Bank Analysis* di Credit Suisse Securities Indonesia. Selama kurun waktu 2008-2010, Mirza Adityaswara menjabat sebagai *Managing Director, Head of Capital Market*, Mandiri Sekuritas, sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group.

Sebelum diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sejak April 2012 ditugaskan sebagai Kepala Eksekutif LPS sekaligus Dewan Komisiner. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.113/P Tahun 2013 tanggal 30 September 2013, Mirza Adityaswara diambil sumpahnya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2013 untuk masa jabatan 2013-2014.

Jabatan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tersebut diperpanjang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2014 untuk periode 2014-2019.

Mirza Adityaswara, born in Surabaya in 1965, graduated with a Bachelor of Economics from the University of Indonesia and subsequently received his Master of Applied Finance from Macquarie University, Sydney, Australia.

Mirza began his career as a Dealer at Bank Sumitomo Niaga in 1989. From 2002 until October 2005, however, he was appointed as Director, Head of Securities Trading & Research, Bahana Securities and then in November 2005 he was appointed as Director, Head of Equity Research & Bank Analysis at Credit Suisse Securities Indonesia. From 2008-2010, Mirza served as Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Securities and simultaneously as the Chief Economist for Bank Mandiri Group.

Prior to his appointment as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia, Mirza served on the Board of Commissioners of the Deposit Insurance Corporation (LPS) and since April 2012 he has also functioned as the Chief Executive of the Deposit Insurance Corporation and the Board of Commissioners. In accordance with Presidential Decree No. 113/P of 2013, dated 30th September 2013, Mirza was sworn in as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia on 3rd October 2013, incumbent for the period from 2013-2014.

Under Presidential Decree Number 62/P of 2014, Mirza Adityaswara is appointed the Senior Deputy Governor of Bank Indonesia for the period from 2014-2019.



Ronald Waas
Deputi Gubernur
Deputy Governor

Ronald Waas, lahir di Tanjung Pinang pada 1955. Ronald Waas meraih gelar sarjananya di Jurusan Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung di tahun 1980, dan meraih gelar *Master of International Affairs* (MIA) di Columbia University pada tahun 1996.

Ronald Waas mulai bekerja di Bank Indonesia pada tahun 1981 dan selama berkarir di Bank Indonesia pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Teknologi Informasi selama tiga tahun (2004-2007), kemudian dilanjutkan dengan menjabat sebagai Direktur Unit Khusus Manajemen Informasi pada tahun 2007-2009 dan terakhir menjabat sebagai Direktur Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.

Ronald Waas diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.75/P Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 dan diambil sumpahnya pada tanggal 29 Desember 2011 untuk masa jabatan 2011-2016.

Ronald Waas was born in Tanjung Pinang in 1955. Ronald earned his degree in Civil Engineering of from Bandung Institute of Technology in 1980, and holds a Master of International Affairs (MIA) at Columbia University in 1996.

Ronald Waas began working at Bank Indonesia in 1981 and during his career, he had served as Director of the Directorate of Information Technology for three years (2004-2007), then serves as Director of Information Management Special Unit in 2007-2009 and lastly he served as Director of the Directorate of Accounting and Payment System.

Ronald Waas was formally appointed as Deputy Governor of Bank Indonesia under Presidential Decree No.75/P Year 2011 dated 21th December 2011 and was sworn on 29th December 2011 for the period from 2011-2016.



Perry Warjiyo

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo pada 1959. Gelar S1 diraih dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada 1982, sementara gelar Master dan PhD di bidang moneter dan keuangan internasional diperoleh dari Iowa State University, AS, masing-masing pada 1989 dan 1991.

Perry Warjiyo memulai karirnya di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, pengelolaan devisa, isu-isu internasional, serta transformasi organisasi. Pada 2007-2009, Perry Warjiyo mendapat mandat menduduki posisi penting sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam *South-East Asia Voting Group* (SEAVG). Selanjutnya Perry Warjiyo meneruskan kariernya sebagai Kepala Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia mulai 2009-2012. Sejak awal 2013, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi area kebijakan moneter dan internasional.

Perry Warjiyo diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.28/P Tahun 2013 tanggal 5 April 2013, dan diambil sumpahnya pada 15 April 2013 untuk masa jabatan 2013-2018.

Perry Warjiyo was born in Sukoharjo on 1959. Perry Warjiyo graduated from Gadjah Mada University in 1982. He continued his study in Iowa State University, and on 1991, he received his Ph.D. degree in monetary and international financial economics.

Perry Warjiyo started his career at Bank Indonesia in 1984. He nurtured his career particularly in the areas of economic research and monetary policy, foreign exchange management, international issues and also organizational transformation. From 2007 to 2009, he held a mandatory strategic role as Executive Director in International Monetary Fund (IMF), representing the 13 members of the South-East Asia Voting Group (SEAVG). Perry Warjiyo continued his career as Head of Economic Research and Monetary Policy Directorate in Bank Indonesia from 2009-2012. Early 2013, Perry Warjiyo was appointed as Assistant Governor of Bank Indonesia in the area of international and monetary policy.

Perry Warjiyo appointed as Deputy Governor of Bank Indonesia by Presidential Decree 28/P of 2013 dated 5th April 2013, and was sworn on 15th April 2013 for the period from 2013-2018.



Hendar

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Hendar dilahirkan pada 1957 di Bandung. Pada 1982 Hendar mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di bidang ilmu manajemen dari Universitas Padjadjaran. Pada 1995, Hendar memperoleh gelar MA di bidang Ekonomi Pembangunan dari *Center for Development Economics*, Williams College, AS. Selanjutnya, pada 2010 Hendar mendapatkan gelar doktor di bidang ekonomi dari Universitas Padjadjaran. Sebagai kader Pimpinan Bank Indonesia, pada tahun 2008 Hendar menjadi wakil Bank Indonesia untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Angkatan 41 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Setelah menyelesaikan pendidikan calon pegawai Bank Indonesia, Hendar memulai perjalanan karirnya di Bank Indonesia pada 1983 sebagai staf pada Urusan Kredit Umum. Berbagai penugasan baik di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan dalam negeri telah dilalui. Sejak tahun 1995, Hendar memperoleh berbagai penugasan pada sektor moneter mulai dari bidang kajian ekonomi makro, neraca pembayaran serta analisa dan perencanaan kebijakan moneter hingga pelaksanaan operasi moneter. Jabatan terakhir yang disandang Hendar sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Gubernur adalah sebagai Asisten Gubernur Bidang Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang dan Pengelolaan Sistem Informasi. Dalam kapasitasnya mewakili Bank Indonesia, Hendar juga aktif dalam berbagai forum pertemuan internasional seperti antara lain *Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP)* dan *BIS Meeting on Government Bonds Market Development*.

Hendar diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89/P Tahun 2013 tanggal 27 Juli 2013 dan diambil sumpahnya pada tanggal 2 Agustus 2013 untuk masa jabatan 2 Agustus 2013-29 Desember 2016.

Hendar was born in 1957 in Bandung – West Java. After completing his studies at the Faculty of Economics, Padjadjaran University – Bandung, in 1982 Hendar received a bachelor of economics in management science. In 1995, Hendar received an MA in development economics from the Center for Development Economics, Williams College, US. In 2010 Hendar received a doctorate in economics from Padjadjaran University in Bandung. As a Bank Indonesia leader cadre, in 2008 Hendar represented Bank Indonesia at the PPRA Education Program Batch 41 organised by the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia.

After completing the Bank Indonesia trainee program, Hendar began his career at Bank Indonesia in 1983 as a member of staff in Credit Affairs. Hendar was assigned at various assignment both at head office and regional office. Since 1995, Hendar has been assigned to macroeconomic review, the balance of payments as well as monetary policy analysis, planning and operation. Before appointed as Deputy Governor of Bank Indonesia, his previous position was Assistant Governor for Payment Systems, Money Circulation and Management of Information Systems. In his capacity as a representative of Bank Indonesia, Hendar remains active at an array of international forum, among others the Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) and the BIS Meeting on Government Bonds Market Development.

Hendar is installed as Deputy Governor of Bank Indonesia pursuant to Presidential Decree Number 89/P of 2013, dated 27th July 2013, and sworn in on 2nd August 2013 for the period 2nd August 2013-29th December 2016.



Erwin Rijanto

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Erwin Rijanto dilahirkan di kota Yogyakarta, pada tahun 1958. Beliau mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1983. Kemudian memperoleh gelar Master di bidang Ekonomi dari Illinois University di Amerika Serikat.

Setelah berkarir selama tujuh belas tahun di bidang peraturan dan pengawasan perbankan, kapasitas beliau sebagai sentral bankir yang berpengalaman luas terus berkembang dengan diangkat menjadi Deputi Kepala Biro Gubernur pada tahun 2004.

Selain pengalaman yang luas dalam bidang pengaturan dan pengawasan perbankan, Erwin juga pernah menangani urusan internasional dan regional ketika menjabat sebagai Deputi Kepala Lembaga Restrukturisasi Hutang Indonesia dan sebagai Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Singapura.

Pencapaiannya yang gemilang lebih diperkaya lagi ketika Erwin dipercaya menjadi Direktur Eksekutif Departemen *Surveillance* Sistem Keuangan di tahun 2013, sebuah Departemen baru yang dibentuk seiring dengan amanat Bank Indonesia yang baru di bidang regulasi dan pengawasan makroprudensial. Dalam kapasitas tersebut, Erwin bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan kerangka pengawasan makroprudensial yang sehat dan kuat. Kinerja beliau yang sangat baik membawa beliau pada jabatan baru sebagai Direktur Eksekutif Kebijakan Makroprudensial di tahun 2015, tahun yang sama dimana Erwin diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Erwin Rijanto diangkat Deputi Gubernur berdasarkan keputusan Presiden 39/P Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015, dan secara resmi memulai jabatannya sejak tanggal 17 Juni 2015.

Erwin Rijanto was born in Yogyakarta in 1958. He received his Bachelor Degree in Economics from the Gadjah Mada University in 1983. He went on to receive his Master's Degree in Economics from the Illinois University in the United States of America.

Following a seventeen-year career in banking supervision and regulation, his capacity as a well-rounded central banker further developed with his appointment as the Deputy Head of the Governor's Bureau in 2004.

In addition to his extensive experiences in banking supervision and regulation, Erwin dealt with regional and international affairs when serving as the Deputy Head of Indonesian Debt Restructuring Agency and as the Director of Bank Indonesia's Representative Office in Singapore.

His scintillating achievements were further enriched when he was entrusted to become the Executive Director of Financial System Surveillance Department in 2013, a new Department formed following BI's new mandate on macroprudential regulation and supervision. In this capacity, Erwin was responsible for establishing and implementing strong and sound macroprudential supervisory framework. His excellent performance led him to a new position as the Executive Director of Macroprudential Policy in 2015, the same year he was appointed as the Deputy Governor of Bank Indonesia.

Erwin Rijanto was appointed as Deputy Governor based on the Presidential Decree 39/P of 2015 dated 6th May 2015, and officially started his term in office on 17th June 2015.



Halim Alamsyah

Deputi Gubernur
Deputy Governor

Halim Alamsyah lahir di Bangka pada 1957. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Halim Alamsyah meraih gelar *Master of Arts* dalam bidang *Development Economics*, Boston University, Massachusetts, USA dan gelar Doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi, dari Universitas Indonesia, Jakarta.

Halim Alamsyah memulai karirnya di Bank Indonesia pada tahun 1982 sebagai staf analis kredit, di Urusan Kredit Koperasi. Tahun 1985, mulai berkiprah sebagai staf peneliti di Urusan Ekonomi dan Statistik. Tahun 1999 diangkat sebagai Deputi Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Selang satu setengah tahun kemudian, tepatnya Juli 2000, Halim Alamsyah diangkat sebagai Kepala Biro Gubernur Bank Indonesia. Pada Juli 2002 dipromosikan sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. Sejak Januari 2003, Halim Alamsyah berturut-turut menempati pos sebagai Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Direktur Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat pada April 2005, dan Direktur Direktorat Statistik dan Moneter pada Februari 2006, sebelum akhirnya ditempatkan sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan pada Maret 2007.

Halim Alamsyah berakhir masa jabatannya pada 17 Juni 2015.

Halim Alamsyah was born in Bangka in 1957. Halim Alamsyah graduated with a Bachelor of Economics at the Islamic University of Indonesia, Yogyakarta, and a degree in Law at the University of Gadjah Mada University, Yogyakarta, a Master of Arts in Development Economics, Boston University, Massachusetts, USA and obtained his doctorate in Economics from the University of Indonesia, Jakarta.

Halim Alamsyah started his career at Bank Indonesia in 1982 as a staff of credit analysts, the Cooperative Credit Affairs. In 1985, Halim Alamsyah began acting as a staff researcher at the Economic Affairs and Statistics. Year 1999 was appointed as Deputy Director of the Directorate of Economic Research and Monetary Policy. Lapse of one and a half years later, in July 2000, Halim Alamsyah was appointed as a Director in Office of the Governor of Bank Indonesia. In July 2002 he was promoted as Director of the Centre of Education and Central Bank Studies. Since January 2003, Halim Alamsyah was successively occupied the post as Director of the Directorate of Economic Research and Monetary Policy, Director of the Directorate of Strategic Planning and Public Relations in April 2005, and Director of the Monetary and Statistics Directorate in February 2006, before finally issued as a Director of Banking Research and Regulation in March 2007.

Halim Alamsyah's term in office ended on 17th June 2015.

Badan Supervisi Bank Indonesia

Bank Indonesia Supervisory Body

Untuk membantu DPR-RI melakukan pengawasan di bidang tertentu serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas, Undang-Undang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Keanggotaan BSBI terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan empat anggota yang dipilih oleh DPR-RI dan diangkat oleh Presiden.

Keanggotaan BSBI dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/keahlian, profesionalisme, dan berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan atau hukum. Anggota BSBI diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pada 2015, BSBI terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang telah dipilih DPR-RI pada proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada 2013 untuk periode 2013-2016. Susunan keanggotaan BSBI tersebut adalah Umar Juoro sebagai Ketua, serta Ahmad Erani Yustika, Chaerul Djusman Djakman, Moh. Fadhil Hasan, dan Sri Adiningsih masing-masing sebagai anggota.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BSBI mencakup telaahan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, anggaran operasional, dan investasi. Cakupan lainnya adalah prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia. Hasil telaahan dilaporkan kepada DPR-RI secara triwulanan atau setiap saat apabila diminta oleh DPR-RI.

Terhadap hasil telaahan BSBI yang disampaikan tahun 2015, Bank Indonesia memberikan tanggapan secara tertulis dan/atau melalui pertemuan antara Dewan Gubernur dan pemimpin satuan kerja dengan anggota BSBI. Selain membahas hasil telaahan BSBI, dalam pertemuan juga membahas hal-hal lain yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

To assist the House of Representatives supervise certain aspects and in order to enhance accountability, independence, transparency and credibility, the Bank Indonesia Act mandates the establishment of the Bank Indonesia Supervisory Body (BSBI). BSBI membership consists of a chairman as member along with four other members selected by the House of Representatives which appointed by the President.

BSBI members are selected from candidates with integrity, morality, ability, capacity, expertise, professionalism and experience in economics, finance, banking or law. BSBI members serve tenure of three years with the possibility of reappointment for one more term in the subsequent period.

In 2015, BSBI comprised of five members selected by the House of Representatives through fit and proper tests conducted in 2013 for the period of 2013-2016. BSBI members include Umar Juoro as Chairman along with Ahmad Erani Yustika, Chaerul Djusman Djakman, Moh. Fadhil Hasan and Sri Adiningsih as members.

The supervision function of BSBI covers the findings of Bank Indonesia Annual Financial Statements, the operational budget and investments. Supervision also extends to operational decision-making procedures outside of monetary policy and asset management of Bank Indonesia. The results are reported to the House of Representatives on a quarterly basis or as requested.

Concerning the BSBI report in 2015, Bank Indonesia responded in writing as well as attended meetings between the Board of Governors, Department Heads and BSBI. In addition to discussing the report of BSBI, discussions also centred on supporting the effectiveness of task implementation at Bank Indonesia.



Umar Juoro

Ketua
Chairman

Pendidikan:
Education

Master of Art in Political
Economy dari Boston
University, USA
*Master of Art in Political
Economy from the Boston
University, USA*

Master of Art in Economics
dari University of Philipines
*Master of Art in Economics
from the University of
Philipines*



Moh. Fadhil Hasan

Anggota
Member

Pendidikan:
Education

Ph.D dalam Agricultural
Economics dari University of
Kentucky, USA
*Ph.D in Agricultural
Economics from the
University of Kentucky, USA*



Sri Adiningsih

Anggota
Member

Pendidikan:
Education

Ph.D di bidang ekonomi dari
University of Illinois, USA
*Ph.D in economics from the
University of Illinois, USA*



Chaerul Djusman Djakman

Anggota
Member

Pendidikan:
Education

Doktor bidang Akuntansi dari
Universitas Indonesia
*Ph.D in Accounting from the
University of Indonesia*



Ahmad Erani Yustika

Anggota
Member

Pendidikan:
Education

Ph.D dari Institute fuer Rurale
Entwicklung, Universitaet
Göttingen, Jerman
*Ph.D from the Institute
fuer Rurale Entwicklung,
Universitaet Göttingen,
Germany*

Peristiwa Penting 2015

Series of Event in 2015



Januari January

1. Untuk mendorong peningkatan kinerja Bank Indonesia, *leadership skills* seluruh Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia diperkuat melalui pelatihan "*Building Talents through Performance Dialogue.*"

To boost Bank Indonesia's performance, leadership skills of all Bank Indonesia's Department Heads were strengthened through the training "Building Talents through Performance Dialogue."

Februari February

2. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menyepakati kerja sama pemanfaatan transaksi non-tunai bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kerja sama ini untuk mendorong perluasan akses keuangan bagi TKI dan mendukung Gerakan Nasional Non Tunai.

Bank Indonesia, Financial Services Authority, Labor Ministry, and National Agency for Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers agreed a cooperation on utilization of non-cash transactions for Indonesian Migrant Workers (TKI). This cooperation was aimed at expanding financial access for TKI and supporting Non Cash National Movement.



3



4

Februari *February*

3. Anggota Dewan Gubernur dan Pemimpin Satuan Kerja menandatangani Kontrak Kinerja Satuan Kerja dan *Charter* 25 Program Strategis Bank Indonesia tahun 2015 untuk mewujudkan kapabilitas baru menuju Bank Indonesia 2024.

Members of Board of Governors and Department Heads signed the Departments Performance Contract and 25 Bank Indonesia Strategic Program Charter to realize new capabilities towards Bank Indonesia 2024.

Maret *March*

4. Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia menyepakati penguatan kerja sama dan koordinasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Bank Indonesia, National Sharia Board of Indonesian Ulama Council, National Amil Zakat Board, and Indonesian Wakaf Agency agreed coordination and cooperation on strengthening for the development of sharia finance and economics.



5



6

Maret March

5. Bank Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengimplementasikan program kerja sama peningkatan kemandirian narapidana dan klien pemasyarakatan di Lapas IIA Palangkaraya.

Bank Indonesia and the Law and Human Rights Ministry implemented cooperation program on increasing the independency of inmates and correctional clients in Lapas IIA Palangkaraya.

April April

6. Bank Indonesia sebagai *chairman* Islamic Financial Services Board (IFSB) menyelenggarakan pertemuan tahunan IFSB ke-6 yang dihadiri oleh 44 negara anggota, terdiri dari bank sentral, otoritas jasa keuangan, dan institusi keuangan syariah.

Bank Indonesia as the chairman of Islamic Financial Services Board (IFSB) held the 6th IFSB annual meeting participated by 44 member countries, comprising central banks, financial services authorities, and sharia financial institutions.



Mei May

7. Presiden Republik Indonesia membuka Rapat Koordinasi Nasional VI-Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas TPID) dengan tema "Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga di Daerah". Pelaksanaan Rakornas TPID difasilitasi oleh Bank Indonesia dan dihadiri oleh Gubernur dan Walikota/Bupati yang mewakili 432 TPID (34 provinsi dan 398 kabupaten/kota).

The President of Republic of Indonesia opened National Coordination Meeting VI-Regional Inflation Management Team (Rakornas TPID) with the theme "Optimizing the Role of Regional Government in Supporting Price Stability Through Accelerating Infrastructure Development and Revamping Commerce in Regions". The Rakornas was facilitated by Bank Indonesia and participated by Governors and Mayors/ Regents who represented 432 TPID (34 provinces and 398 regencies/cities).

8. Rapat koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Ambon menyepakati sejumlah komitmen penting untuk mempercepat kebangkitan ekonomi maritim Indonesia melalui pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan sinergis.

Coordination meeting between Bank Indonesia and the Central Government and Regional Governments in Ambon agreed on several important commitments to accelerate the revival of Indonesia's maritime economies through consistent and synergic policy implementations.

9. Bank Indonesia memfasilitasi penandatanganan fasilitas lindung nilai PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) dengan beberapa Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk pengelolaan risiko nilai tukar yang lebih baik.

Bank Indonesia facilitated the signing of hedging facility PT PLN (Persero) and PT Pertamina (Persero) with several State Owned Enterprise (SOE) Banks for better risk management of exchange rate.



10



11

Juni June

10. Pendirian Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) di Provinsi DKI Jakarta sebagai komitmen Bank Indonesia untuk mendukung perekonomian dan pengendalian inflasi di ibukota negara.

The establishment of Bank Indonesia's Representative Office (KPw BI) in Jakarta Province as Bank Indonesia's commitment in supporting the economy and controlling inflation in the capital

11. Erwin Rijanto dilantik sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2015-2020.

Erwin Rijanto was appointed as Deputy Governor of Bank Indonesia for the 2015-2020 period.

12. Peresmian penggunaan Central Bank Money dalam penyelesaian dana transaksi surat berharga di pasar modal, guna memitigasi risiko kredit dan risiko likuiditas.

The official use of Central Bank Money is the fund settlement of securities transactions in the stock market, to mitigate credit risk and liquidity risk.

13. Bank Indonesia menerima sertifikat ISO 30301 dan ISO 15489 yang merupakan standar internasional di bidang kearsipan.

Bank Indonesia received ISO 30301 certificate and ISO 15489 which are international standard on archiving.

14. Bank Indonesia memfasilitasi kerja sama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) sebagai upaya untuk meniadakan transaksi penarikan dana tunai dengan menggunakan kartu kredit melalui penghentian merchant berlaku gesek tunai.

Bank Indonesia facilitated cooperation between the Indonesian Payment System Association (ASPI) and Indonesian Credit Cards Association (AKKI) in moves to eliminate cash withdrawals using credit cards in merchants who offered such transactions.

15. Contact Center Bank Indonesia (BICARA 131) meraih penghargaan tertinggi untuk kategori korporat sebagai *The Best Operation* se-Indonesia.

Bank Indonesia Contact Center (BICARA 131) got the highest award for corporate category as the Best Operation in Indonesia.



16



17

Juli July

16. Bank Indonesia memfasilitasi kesepakatan penggunaan *Mini Master Repo Agreement* Syariah oleh 18 bank anggota *Indonesian Islamic Global Market Association*.

Bank Indonesia facilitated the Sharia Mini Master Repo Agreements between 18 banks members of the Indonesian Islamic Global Market Association.

17. Bank Indonesia menggelar Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis tahunan guna mengawal transformasi dan menyusun anggaran program kerja tahun berikutnya. Pertemuan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Gubernur dan Pemimpin Satuan Kerja.

Bank Indonesia held Annual Working Meeting to evaluate annual strategic program implementations in overseeing transformation and arranging next year's working program budget. The meeting was participated by all Members of Board of Governors and Department Heads.



Agustus August

18. Rapat koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Balikpapan menyepakati berbagai sinergi kebijakan makroekonomi, sektoral, dan strategi pembiayaan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Coordinating meeting between Bank Indonesia, Central Government and Regional Governments in Balikpapan agreed on synergy of macroeconomic, sectoral, and financing strategy policies to boost acceleration of energy infrastructure development to support a sustainable economic growth.

September September

19. Bank Indonesia dan International Monetary Fund membahas pembiayaan infrastruktur sebagai salah satu kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam konferensi internasional bertema "The Future of Asia's Finance."

Bank Indonesia and the International Monetary Fund discussed infrastructure financing as one of the keys to increase a sustainable economic growth in the international conference with theme "The Future of Asia's Finance."



Oktober October

20. Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, sebagai perwujudan komitmen Bank Indonesia dalam mendukung perekonomian di daerah, khususnya di wilayah Sulawesi.

The opening of Bank Indonesia's Representative Office in West Sulawesi in Mamuju, as Bank Indonesia's commitment in supporting regional economies, especially in Sulawesi areas.

21. Penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Indonesia (ISEF) 2015 di Surabaya dengan mengusung tema "Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk Kesejahteraan Bangsa."

The event of Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2015 in Surabaya held the theme "Economic and Finance Empowerment for the Nation's Prosperity."



November November

22. Peresmian tiga sistem penyelesaian transaksi yang telah diperbarui (Generasi II), yaitu Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), dan Bank Indonesia *Electronic Trading Platform* (BI-ETP).

The official announcement of three renewed (Generation II) transaction settlement systems: Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), and Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP).

23. Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015 dengan tema "Sinergi Untuk Percepatan

Transformasi." Acara tahunan dengan seluruh pemangku kepentingan Bank Indonesia tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

Bank Indonesia's Annual Meeting 2015 with the theme "Synergy for Transformation Acceleration", The annual event with all Bank Indonesia's stakeholders was attended by the Vice President of Indonesia.

24. Rapat koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Yogyakarta menyepakati upaya mempercepat peningkatan daya saing sektor industri dan pariwisata agar ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi, berkesinambungan, dan inklusif.

Coordinating meeting between Bank Indonesia, Central Government and Regional Governments in Yogyakarta agreed on increasing competitiveness of industrial and tourism sectors so that Indonesian economy can have a higher, sustainable, and inclusive growth.

25. Bank Indonesia menyepakati kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendorong tata kelola yang baik (*governance*) dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga.

Bank Indonesia agreed a cooperation with Attorney's Office of the Republic of Indonesia to boost good governance in task implementation of each institution.

26. Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo menerima kunjungan Presiden Finlandia, Sauli Väinämö Niinistö di Kantor Pusat Bank Indonesia. Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi dan keuangan terkini, serta mendorong kerja sama yang lebih baik antara Bank Indonesia dengan Bank of Finland dalam menghadapi tekanan global yang masih tinggi pada kedua negara tersebut.

Bank Indonesia's Governor, Agus D.W. Martowardojo, received the visit of Finland's President Sauli Väinämö Niinistö in Bank Indonesia's Headquarters. The meeting discussed latest economic and financial developments, as well as pushing better coordination between Bank Indonesia and the Bank of Finland in facing high global pressure in both countries.



28



29

Desember *December*

27. Penandatanganan kerja sama *Bilateral Currency Swap Arrangement* dengan Reserve Bank of Australia senilai AUD 10 miliar/Rp100 triliun dan berlaku efektif selama tiga tahun. Perjanjian ini menjamin penyelesaian transaksi perdagangan dalam mata uang lokal antara kedua negara termasuk dalam hal terdapat tekanan di pasar keuangan.

Signing of Bilateral Currency Swap Arrangement with the Reserve Bank of Australia amounting to AUD10 billion/Rp100 trillion effective for three years. This agreement guarantees trade transaction settlements in local currencies of the two countries including in the case of pressure in financial market.

28. Bank Indonesia menyepakati kerja sama dengan the Islamic Development Bank untuk terus meningkatkan peran ekonomi dan keuangan syariah dalam pembangunan di Indonesia.

Bank Indonesia agreed on cooperation with the Islamic Development Bank to continue increasing the role of sharia finance and economics in development in Indonesia.

29. Sebagai bentuk apresiasi, Bank Indonesia menganugerahkan penghargaan kepada bank dan perusahaan pelapor terbaik Lalu Lintas Devisa, Devisa Hasil Ekspor, Sistem Informasi Debitur dan Laporan Bulanan Bank Umum pada acara Temu Akhir Tahun.

As a token of appreciation, Bank Indonesia gave awards to best reporting banks and corporates of Foreign Exchange Flow, Export Proceeds, Debtor Information System, and Monthly Reports of Commercial Banks in the Year End Meeting event.

30. Rapat koordinasi dengan Pemerintah di Jakarta berhasil menyepakati enam langkah strategis untuk menjaga inflasi 2016 agar berada dalam kisaran $4\pm 1\%$.

Coordination meeting with the Government in Jakarta agreed on six strategic steps to maintain 2016 inflation within the $4\pm 1\%$ range.

Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia Task Implementation



“

Bauran kebijakan Bank Indonesia disinergikan dengan paket kebijakan ekonomi Pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan kebijakan makroekonomi.

Bank Indonesia's policy mix is synergized with the Government's economic policy packages to increase effectiveness in macroeconomic policy management.

“



Menyikapi berbagai tantangan ekonomi 2015, Bank Indonesia menerapkan bauran kebijakan guna mencari titik keseimbangan yang optimal bagi perekonomian.

Facing various economic challenges in 2015, Bank Indonesia implemented policy mix to find the optimal balance for the economy.



Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia Task Implementation

Perekonomian Indonesia mampu mencatat kinerja positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi di tahun 2015. Hal ini terlihat dari tercapainya target inflasi tahun 2015 sebesar $4\pm 1\%$, menurunnya defisit transaksi berjalan, terkendalinya tekanan Rupiah pada triwulan IV 2015, serta terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Indonesia's economy managed to record positive growth amidst challenges faced in 2015. This is reflected from the achieved 2015 inflation target of $4\pm 1\%$, declining current account deficit, controllable Rupiah pressure in the fourth quarter of 2015, and maintained financial system stability. The achievements were the results of synergy between Bank Indonesia and the Government in maintaining macroeconomic stability and financial system as well as boosting economic growth.

PEREKONOMIAN GLOBAL

Pemulihan perekonomian global pada tahun 2015 berjalan lebih lambat dari perkiraan. Ekonomi dunia hanya tumbuh 3,1%, lebih rendah dari prediksi awal sebesar 3,5% maupun realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang mencapai 3,4%. Upaya mendorong pertumbuhan dengan pelonggaran kebijakan moneter tidak cukup optimal karena belum sepenuhnya didukung stimulus fiskal dan reformasi struktural.

Perbedaan kecepatan pemulihan ekonomi memicu terjadinya divergensi kebijakan moneter di antara negara maju. Bank sentral AS mulai melakukan normalisasi kebijakan moneter, sementara bank sentral Eropa dan Jepang masih melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter.

Perbedaan kecepatan pertumbuhan juga terjadi di antara negara maju dan negara berkembang. Perekonomian negara maju tumbuh 1,9% pada tahun 2015, naik sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,8%. Sementara itu, perekonomian negara berkembang melambat menjadi 4,0% pada tahun 2015 dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 4,7%. Kendati demikian, kontribusi negara berkembang terhadap perekonomian dunia masih cukup dominan, yakni mencapai 58%.

Perlambatan ekonomi global pada tahun 2015 dipengaruhi oleh faktor siklikal maupun struktural. Faktor siklikal terutama bersumber dari perlambatan ekonomi Tiongkok, berlanjutnya penurunan harga komoditas, dan ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter

GLOBAL ECONOMY

Global economic recovery in 2015 was slower than expected. Global growth only reached 3.1%, lower than initial forecast of 3.5% or realized economic growth in 2014 at 3.4%. The efforts to boost growth by loosening monetary policy was not optimal because it was not fully supported by fiscal stimulus and structural reform.

The difference in economic recovery triggered monetary policy divergence between developed countries. The US central bank had begun normalizing monetary policy, while European and Japan central banks continued with loose monetary policy.

Growth divergence also happened between developed countries and developing countries. Developed countries grew 1.9% in 2015, slightly higher than the previous year of 1.8%. Meanwhile, developing economies slowed to 4.0% in 2015 compared to 4.7% growth in 2014. Nevertheless, the contribution of developing economies to global growth was still dominant at 58%.

Global economic slowdown in 2015 was affected by cyclical and structural factors. Cyclical factors mainly came from China's economic slowdown, continued decline of commodity prices, and uncertainties on US monetary policy normalization. Meanwhile,

Transmisi Kebijakan The Fed terhadap Perekonomian Global

Pasar keuangan global pada tahun 2015 diliputi oleh ketidakpastian karena para pelaku ekonomi menunggu keputusan Bank Sentral Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga dan mulai menormalisasi kebijakan moneter. Pertumbuhan ekonomi AS yang tidak seperti ekspektasi membuat The Fed menunggu sampai akhir tahun sebelum menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Ketidakpastian ini menyebabkan adanya pergeseran aliran modal dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju, yang memberikan tekanan terhadap nilai tukar negara-negara berkembang. Dampak dari pergeseran arus modal ini terutama dirasakan oleh korporasi yang memiliki eksposur tinggi terhadap dolar AS dan perusahaan di sektor keuangan, termasuk perbankan.

Transmission of the Fed Policy to Global Economy

Global financial market in 2015 was full of uncertainty as economic players waited for the US Central Bank's decision to raise interest rate and normalize monetary policy. US economic growth which was not as expected caused the Fed to wait until year-end before making an interest rate hike of 25 basis points. This uncertainty led to the shift of capital flows from emerging countries to developed countries, which created pressure to emerging market currencies. The impact of this capital flow shift was felt by corporates with high exposure on US dollars and financial sector firms, including banking.

140

198

216

233

AS. Sementara itu, faktor struktural terutama terjadi di negara maju, yang bersumber dari menurunnya potensi output akibat faktor demografi (populasi yang menua) dan penurunan tingkat investasi pasca krisis keuangan. Penurunan potensi output dan respons kebijakan yang ditempuh negara maju memberikan dampak *spillover* yang cukup signifikan pada negara berkembang, baik melalui jalur perdagangan maupun keuangan.

Penurunan kinerja ekonomi Tiongkok sejalan dengan transformasi yang dilakukan untuk mengubah struktur perekonomiannya, dari berbasis investasi menjadi berbasis konsumsi. Pada tahun 2015, ekonomi Tiongkok hanya tumbuh sebesar 6,8%, turun dari 7,4% pada tahun 2014. Hal ini berimbas pada melemahnya perdagangan dunia dan turunnya harga-harga komoditas ekspor, terutama hasil tambang dan perkebunan. Penurunan harga komoditas juga diperburuk oleh menurunnya harga minyak dunia karena berlebihnya pasokan dan penurunan permintaan minyak dunia.

Perlambatan ekonomi yang dibarengi dengan penurunan harga komoditas turut berpengaruh terhadap inflasi global. Laju inflasi global pada tahun 2015 mencapai 3,3%, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,5%. Inflasi negara maju mencapai 0,4%, jauh di bawah laju inflasi tahun 2014 sebesar 1,4%. Sementara di negara berkembang, inflasi meningkat dari 5,1% menjadi 5,6% seiring dengan pelemahan nilai tukar mata uangnya.

Di sektor keuangan, pasar keuangan global pada tahun 2015 diwarnai oleh meningkatnya volatilitas akibat masih tingginya ketidakpastian. Meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global pada tahun 2015 terutama dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni: (i) sentimen terhadap normalisasi kebijakan moneter AS yang memengaruhi pasar keuangan global sejak awal tahun 2015; (ii) sentimen dari kekhawatiran penyelesaian krisis Yunani pada triwulan I 2015; dan (iii) devaluasi Yuan yang dilakukan oleh otoritas moneter Tiongkok pada Agustus 2015. Ketidakpastian kenaikan suku bunga AS membuat investor cenderung menarik ke luar dana mereka dari pasar keuangan negara-negara berkembang.

structural factor mainly happened in developed economies, led by the decline in output potential due to demographic factor (aging population) and decline in investment level post-financial crisis. Declining output potential and policy response pursued by developing countries created quite significant spillover effects to developing nations, either through trade or financial channels.

The decline in China's economic performance was in line with the transformation to change its economic structure from investment-based to consumption-based. In 2015, China's economy only grew 6.8%, down from 7.4% in 2014. This impacted to the weakening global trade and declining export commodity prices, especially mining and plantation products. The declining commodity prices were exacerbated with oversupply and declining demand of global crude oil.

Economic slowdown followed by declining commodity prices affected global inflation. Global inflation rate in 2015 was 3.3%, down from the previous year of 3.5%. Inflation in developed economies reached 0.4%, far below the 2014 inflation rate at 1.4%. Meanwhile in developing countries, inflation rose from 5.1% to 5.6% along with their weakening currencies.

In the financial sector, global financial market in 2015 was affected by rising volatility due to high uncertainties. Increasing volatilities in the global financial market in 2015 were mainly affected by three factors: (i) sentiment on the US monetary policy normalization which impacted global financial market since the beginning of 2015; (ii) sentiment stemming from worries over the settlement of Greek crisis in the first quarter of 2015; and (iii) Yuan devaluation conducted by China's monetary authority in August 2015. Uncertainties over the US rate hike caused investors tend to withdraw their funds from the financial market of emerging countries.

Beberapa negara berkembang merespons fenomena global ini dengan memadukan kebijakan moneter, makroprudensial, fiskal, dan reformasi struktural secara bersamaan. Tiongkok, India, dan Indonesia adalah contoh negara berkembang yang secara konsisten menerapkan bauran kebijakan ini. Pengelolaan makroekonomi yang sehat dan disertai dengan agenda reformasi struktural diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi sehingga momentum pertumbuhan dapat terjaga secara berkesinambungan.

Penguatan kerja sama internasional juga ditingkatkan untuk mengantisipasi tantangan ekonomi global di tahun 2015. Forum G20 menekankan pada upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif, sementara IMF mendorong negara anggotanya untuk memperkuat sisi permintaan melalui bauran kebijakan makroekonomi dan percepatan reformasi struktural. Kerja sama internasional juga dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan agar tetap resilien dalam menghadapi guncangan. Upaya ini diharapkan mampu mendorong ekonomi global tumbuh lebih tinggi pada tahun 2016, yang diprediksi dapat mencapai 3,4%.

PEREKONOMIAN DOMESTIK

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi di tahun 2015, perekonomian Indonesia mampu mencatat kinerja positif dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga dan momentum pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun. Hal ini terlihat dari tercapainya target inflasi tahun 2015 sebesar $4 \pm 1\%$, menurunnya defisit transaksi berjalan, terkendalinya tekanan Rupiah pada triwulan IV 2015, serta terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Pencapaian kinerja positif tersebut tidak terlepas dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2015, Indonesia menghadapi tantangan yang bersumber dari melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, melebarnya divergensi kebijakan moneter di antara negara maju, dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan dunia. Masih lemahnya pertumbuhan

Several emerging economies responded to this global phenomenon by mixing monetary, macro prudential, fiscal policies, and structural reform in parallel. China, India, and Indonesia were examples of emerging countries which consistently implemented this policy mix. Healthy macroeconomic management coupled with structural reform agenda were believed could increase efficiency and economic competitiveness so that growth momentum can be sustainably maintained.

International cooperation was strengthened to anticipate global economic challenges in 2015. G20 forum emphasized on the efforts to achieve strong and inclusive growth, while the IMF pushed member countries to strengthen demand through macroeconomic policy mix and structural reform acceleration. International cooperation was also made to make financial system stability remain resilient in facing shocks. These efforts are expected to support the global economy to grow higher in 2016, forecast reaching 3.4%.

DOMESTIC ECONOMY

Amidst challenges faced in 2015, Indonesia's economy recorded positive growth with manageable macroeconomic stability and growth momentum at the end of the year. This is reflected from the 2015 inflation target of $4\% \pm 1\%$, declining current account deficit, controllable pressure on Rupiah in the fourth quarter, and maintained financial system stability. The positive achievements were the results of synergy between Bank Indonesia and the Government to guard macroeconomic stability and financial system as well as pushing economic growth.

In 2015, Indonesia faced challenges stemming from weakening global economic growth, widening monetary policy divergence among developed countries, and increasing uncertainty in the global financial market. Still weak global economic growth led to the continued

140

198

216

233

ekonomi global mendorong berlanjutnya penurunan harga minyak dunia dan harga komoditas nonmigas. Namun, ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda sejak triwulan IV 2015, seiring dengan sentimen positif terkait rencana kenaikan suku bunga The Fed dan proses normalisasi yang akan dilakukan secara gradual.

Di dalam negeri, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan struktural. Struktur perekonomian masih bertumpu pada komoditas sehingga penurunan harga komoditas global berpengaruh negatif tidak hanya kepada sektor komoditas saja, namun merambat ke sektor nonkomoditas. Kandungan impor dalam produk ekspor Indonesia yang masih tinggi mengurangi dampak positif dari depresiasi Rupiah terhadap perbaikan kinerja ekspor. Sektor keuangan masih mengalami permasalahan struktural terutama bersumber dari pasar keuangan domestik yang dangkal. Dangkalnya pasar keuangan Indonesia menyebabkan relatif tingginya ketergantungan korporasi pada pembiayaan eksternal sehingga rentan terhadap perubahan kondisi global.

Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia mencatat perkembangan yang positif. Kinerja stabilitas makroekonomi semakin baik, sementara momentum pertumbuhan ekonomi mulai bergulir sejak semester II 2015. Stabilitas makroekonomi yang semakin membaik tercermin dari tercapainya target inflasi tahun 2015 sebesar $4\pm 1\%$, menurunnya defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, terkendalinya tekanan Rupiah sejak triwulan IV 2015, serta terpeliharanya stabilitas sistem keuangan.

Pada tahun 2015, kinerja transaksi berjalan membaik di tengah kondisi global yang kurang kondusif dan masih adanya permasalahan struktural domestik. Defisit transaksi berjalan pada tahun 2015 mencapai 17,8 miliar Dolar AS atau setara dengan 2,1% dari PDB, lebih baik dibandingkan defisit tahun sebelumnya sebesar 27,5 miliar Dolar AS atau setara dengan 3,1% dari PDB. Perbaikan defisit transaksi berjalan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk menurunnya harga minyak, berkurangnya impor nonmigas, dan penyesuaian impor terhadap depresiasi nilai tukar Rupiah.

decline in global oil prices and non-oil and gas commodity prices. However, uncertainty in the global financial market subsided from the fourth quarter of 2015, along with positive sentiment from the Fed rate hike plan and gradual normalization process.

Domestically, Indonesia still faced structural problems. Economic structure was still concentrated on commodities so declining global commodity prices negatively impacted not only the commodity sector, but spreading to non-commodity sector. Import contents in Indonesian export goods which remained high reduced the positive effect of Rupiah depreciation to improved export performance. The financial sector still faced structural issues mainly from the shallow domestic financial market. This shallow market caused relatively high dependency of corporations to external financing, making them vulnerable to changes in global conditions.

In 2015, Indonesia's economy recorded positive development. Macroeconomic stability improved, while economic growth momentum started rolling since the second half of 2015. Improving macroeconomic stability was reflected from the achieved 2015 inflation target of $4\pm 1\%$, declining current account deficit to a healthier level, controllable pressure on Rupiah since the fourth quarter of 2015, and maintained financial system stability.

In 2015, current account improved amidst not conducive global conditions and existing domestic structural issues. Current account deficit in 2015 reached USD17.8 billion or equal to 2.1% of GDP, better than the previous year deficit of USD27.5 billion or equal to 3.1% of GDP. Improvement in current account deficit was due to several factors, including declining oil price, reduced non-oil and gas exports, and adjustment of imports to Rupiah depreciation.

Sementara itu, transaksi modal dan finansial (TMF) masih mencatat surplus di tengah perlambatan ekonomi dunia dan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Perbaikan mulai terlihat sejak triwulan IV 2015 seiring berakhirnya ketidakpastian global dan membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik. Hal tersebut mampu menjaga minat investor asing untuk tetap berinvestasi jangka panjang di Indonesia dalam bentuk investasi langsung. Di samping itu, investor kembali menanamkan modalnya pada investasi portofolio sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi di triwulan IV 2015 dan masih menariknya imbal hasil surat berharga Indonesia. Sementara investasi lainnya dalam bentuk pinjaman luar negeri yang mencatat defisit di semester I 2015 berbalik menjadi surplus dan terus membaik sampai dengan akhir tahun. Kinerja TMF pada tahun 2015 masih mencatat surplus walaupun mengalami penurunan dari tahun 2014 sehingga tidak dapat sepenuhnya membiayai defisit transaksi berjalan.

Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir 2015 mencapai 310,7 miliar Dolar AS dengan pertumbuhan sebesar 5,8% (yoy) dari sebelumnya sebesar 293,8 miliar Dolar AS. Kenaikan itu dipengaruhi oleh meningkatnya ULN jangka panjang, baik di sektor publik maupun swasta. Sementara ULN jangka pendek di sektor publik maupun swasta mengalami penurunan di tengah perlambatan kegiatan ekonomi domestik. Struktur posisi ULN tersebut menunjukkan perkembangan yang sehat, sebagaimana tercermin dari dominasi posisi ULN jangka panjang dibandingkan dengan posisi ULN jangka pendek baik pada sektor publik maupun swasta. Rasio ULN terhadap PDB tercatat sebesar 36,1% pada akhir 2015, lebih tinggi dibandingkan akhir 2014 yang mencapai 33,0%. Rasio itu masih relatif aman dan berada dalam kisaran negara *peer group*.

Meanwhile, capital and financial account (TMF) booked a surplus amidst global economic slowdown and increasing uncertainty in the global financial market. Improvement was seen since the fourth quarter of 2015 along with diminishing global uncertainty and improving domestic economic growth. This could maintain the appetite of foreign investors to make long-term investment in Indonesia in form of direct investment. In addition, investors reinvested their capital in portfolio investment along with improving economic conditions in the fourth quarter and still attractive yields of Indonesian bonds. Meanwhile, other investments in form of foreign debts which recorded deficit in the first half of 2015 turned to surplus and improved until the year end. TMF performance in 2015 still recorded a surplus despite declining from 2014 so it could not fully cover current account deficit.

Indonesia's external debt (ULN) position at the end of 2015 reached USD310.7 billion with growth of 5.8% (yoy) previously at USD293.8 billion. The increase was affected by increasing long-term external debt, in public and private sectors. While short-term external debt in public and private sectors saw a decrease amidst domestic economic slowdown. The external debt structure showed healthy development, as reflected by the domination of long-term external debt compared to short-term external debt in public and private sectors. The ratio of external debt to GDP was 36.1% at the end of 2015, higher than 2014 at 33.0%. The ratio was relatively safe and within the range of peer group.

Tabel 1. Posisi Utang Luar Negeri Menurut Jenis Mata Uang (dalam miliar Dolar AS)

Table 1. External Debt Position by Currency (in USD billion)

	2014		2015	
	Nominal ULN Amount of External Debt	Rasio ULN terhadap Total Ratio of External Debt to Total	Nominal ULN Amount of External Debt	Rasio ULN terhadap Total Ratio of External Debt to Total
USD	208.642	71,0%	223.333	71,9%
JPY	24.817	8,4%	23.697	7,6%
SDR	5.680	1,9%	5.246	1,7%
GBP	463	0,2%	347	0,1%
EUR	7.127	2,4%	7.653	2,5%
CHF	255	0,1%	209	0,1%
IDR	43.680	14,9%	47.312	15,2%
Lainnya/Others	3.106	1,1%	2.925	0,9%
TOTAL	293.770		310.722	

Sejalan dengan defisit Neraca Pembayaran Indonesia pada tahun 2015 sebesar 1,1 miliar Dolar AS, posisi cadangan devisa menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya meski masih berada dalam level aman. Selain untuk pembayaran pinjaman luar negeri Pemerintah, penurunan cadangan devisa juga disebabkan oleh stabilisasi nilai tukar Rupiah. Meski menurun, posisi cadangan devisa pada akhir tahun 2015 masih terjaga pada level 105,9 miliar Dolar AS atau setara dengan 7,4 bulan impor dan pembayaran pinjaman luar negeri Pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut diyakini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Pada keseluruhan tahun 2015, secara *point-to-point* nilai tukar Rupiah melemah sebesar 10,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pelemahan tahun 2014 sebesar 1,7%. Hal ini didorong oleh masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global terkait dengan rencana kenaikan suku bunga AS, kekhawatiran negosiasi fiskal Yunani, dan devaluasi Yuan. Di dalam negeri, tekanan terhadap Rupiah terkait dengan adanya kekhawatiran semakin melemahnya prospek ekonomi domestik dan kondisi pasar valas domestik yang belum dalam, serta ketergantungan korporasi pada pembiayaan eksternal. Nilai tukar Rupiah cenderung menguat pada triwulan IV 2015 seiring dengan meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global. Penguatan Rupiah ini didukung oleh langkah-langkah stabilisasi nilai tukar yang dilakukan Bank Indonesia serta persepsi positif investor atas prospek ekonomi domestik.

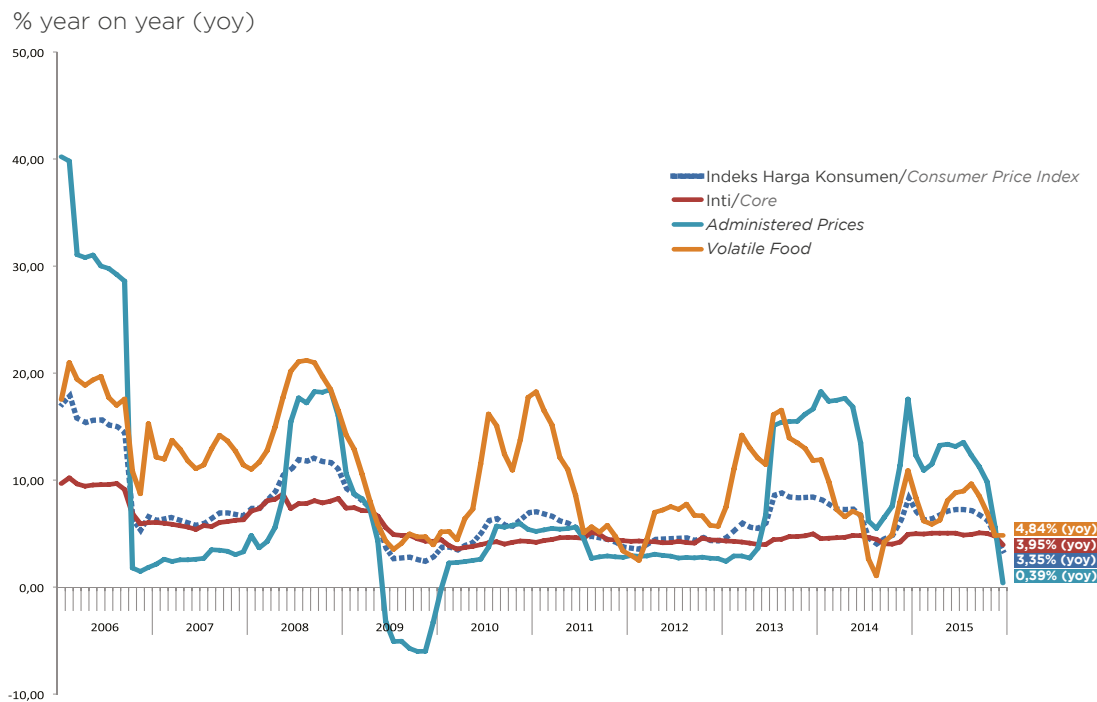
In line with the deficit of Indonesia's Balance of Payments in 2015 of USD1.1 billion, foreign exchange reserves dropped from the previous year although still within a healthy level. Aside from Government foreign debt payments, the decline in forex reserves was caused by Rupiah stabilization. Although declining, the forex reserves position at the end of 2015 remained manageable at USD105.9 billion or equal to 7.4 months of imports and Government foreign debt payments. The forex reserves position is believed can support external sector and maintain Indonesia's economic growth sustainability going forward.

Overall in 2015, the Rupiah point-to-point weakened 10.2% (yoy), higher than the 2014 weakening of 1.7%. This was driven by high uncertainty in the global financial market related to uncertainty on the US rate hike, worries on Greek fiscal negotiation, and yuan devaluation. Domestically, pressure on the Rupiah was related to worries over weakening domestic economy prospects and shallow domestic forex market, as well as dependency of corporates to external financing. The Rupiah exchange rate slightly strengthened in the fourth quarter of 2015 along with subsiding uncertainty in the global financial market. The Rupiah strengthening was supported by exchange rate stabilization moves conducted by Bank Indonesia as well as investors' positive perception on domestic economy prospects.

Inflasi pada tahun 2015 tercatat sebesar 3,35% (yoy), berada dalam kisaran sasaran inflasi 2015 yaitu 4±1%. Terkendalinya inflasi dipengaruhi oleh faktor global dan domestik. Menurunnya harga minyak dunia memberikan Pemerintah kesempatan untuk menurunkan harga BBM, harga LPG 12 kg, dan tarif listrik. Dari sisi domestik, efek pelemahan nilai tukar terhadap inflasi relatif terbatas karena permintaan domestik dapat dikelola dan inflasi barang impor relatif rendah. Menurunnya harga komoditas global, termasuk pangan, menyebabkan inflasi *volatile food* relatif terjaga di tengah terjadinya gejala El Nino. Perkembangan ini sejalan dengan semakin kuatnya koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong peningkatan produksi, memperbaiki distribusi, serta meminimalkan distorsi harga bahan pangan. Secara keseluruhan, pada tahun 2015 inflasi inti tercatat sebesar 3,95% (yoy), inflasi *administered prices* 0,39% (yoy), dan inflasi *volatile food* mencapai 4,84% (yoy).

Inflation in 2015 was recorded at 3.35% (yoy), within the 2015 inflation target range of 4%±1%. Controllable inflation was affected by global and domestic factors. Declining global oil prices provided the Government chance to cut fuel price, 12 kg LPG price, and electricity tariff. Domestically, the effect of Rupiah weakening to inflation was relatively limited as domestic demand could be managed and imported inflation was relatively low. Declining global commodity prices, including foods, caused volatile food inflation to remain manageable amidst El Nino symptoms. This development was in line with stronger coordination between the Government and Bank Indonesia in increasing production, improving distribution, as well as minimizing distortion of food prices. Overall, in 2015 core inflation was recorded at 3.95% (yoy), administered prices inflation 0.39% (yoy), and volatile food inflation reached 4.84% (yoy).

Grafik 1. Perkembangan Inflasi Tahunan
Graphic 1. Development of Annual Inflation Rate



140

198

216

233

Perekonomian Indonesia mengalami momentum perbaikan sejak semester II 2015 yang didorong oleh naiknya permintaan domestik. Konsumsi Pemerintah meningkat cukup signifikan sejalan dengan tingginya penyerapan anggaran. Investasi juga mengalami perbaikan, terutama didorong oleh peningkatan belanja modal Pemerintah dan membaiknya pertumbuhan investasi di beberapa sektor, seperti otomotif dan konstruksi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif stabil dan resilien dengan tetap tingginya tingkat keyakinan konsumen. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi 4,79% dari 5,02% pada 2014. Pertumbuhan tersebut masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain yang berbasis komoditas. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi domestik masih cukup fleksibel dalam menghadapi pelemahan perekonomian global. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai terdiversifikasi. Jawa dengan sektor manufakturnya cenderung masih tumbuh tinggi, sehingga dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa yang terkena dampak pelemahan harga komoditas.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan menurunnya harga komoditas sepanjang tahun 2015 mengakibatkan kinerja ekspor Indonesia melemah. Dengan komposisi ekspor Indonesia yang masih didominasi sumber daya alam (SDA), menurunnya harga komoditas global mengakibatkan penurunan perdagangan yang cukup dalam. Hal ini terutama dirasakan oleh ekspor yang berbasis komoditas seperti pertambangan, dengan batubara mencatat penurunan paling tajam. Ekspor manufaktur juga belum menunjukkan peningkatan di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah, yang tidak terlepas dari rendahnya permintaan global serta masih cukup besarnya kandungan impor dalam produk ekspor. Pelemahan ekspor terutama disebabkan oleh menurunnya ekspor ke salah satu mitra dagang utama yakni Tiongkok sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini karena dominasi ekspor berbasis komoditas dalam struktur ekspor ke Tiongkok. Namun demikian, ekspor otomotif Indonesia masih menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan yang cukup baik dalam dua tahun terakhir.

Indonesia's economy saw growth momentum since the second half of 2015 driven by increasing domestic demand. Government consumption rose quite significantly along with high budget absorption. Investment also improved, especially driven by the increase in Government capital spending and improving investment growth in several sectors, such as automotive and construction. The growth of household consumption was relatively stable and resilient with strong level of consumer confidence. In 2015, economic growth slowed to 4.79% from 5.02% in 2014. The growth was still relatively high compared to other commodity-based countries. This showed that the domestic economy remained flexible in facing a weakening global economy. Spatially, Indonesia's economic growth started to diversify. Java with its manufacturing sector still grew strong, and was able to balance economic growth outside Java impacted by lower commodity prices.

Slowing global economic growth and declining commodity prices throughout 2015 caused Indonesian exports to weaken. As the composition of Indonesian exports was still dominated by natural resources, declining global commodity prices caused quite a steep drop in trade. This was mainly felt by commodity-based exports such as mining, with coal recording the steepest drop. Manufacturing exports also hadn't shown improvement amidst weakening Rupiah, which could not be separated from low global demand and high import contents in export products. Export weakening was especially seen in export drop to one of the major trading partners, China, almost 20% compared to the previous year, due to domination of commodity-based exports in export structure to China. However, Indonesian automotive exports showed positive performance with decent growth in the past two years.

Sejalan dengan berkurangnya pendapatan masyarakat akibat dari penurunan ekspor, kinerja konsumsi Rumah Tangga (RT) juga melambat. Tren perlambatan terutama terjadi pada konsumsi barang sekunder dan tersier nonmakanan, walaupun pada akhir tahun 2015 sedikit membaik. Secara keseluruhan, konsumsi RT masih cukup solid seperti terlihat dari pendapatan per kapita yang berada dalam tren meningkat. Pendapatan per kapita tahun 2015 tercatat sebesar Rp45,2 juta, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp41,8 juta. Selain itu, daya beli masyarakat masih cukup terjaga dengan naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP). Rata-rata kenaikan UMP cukup besar, yaitu mencapai di atas 7% dalam lima tahun terakhir dan pada tahun 2015 naik sekitar 8,9%. Kenaikan UMP tersebut menjadi referensi kenaikan upah di berbagai lapangan usaha, terutama untuk kategori pekerjaan formal.

Di tengah kecenderungan melambatnya konsumsi swasta, peningkatan belanja modal Pemerintah yang signifikan pada paruh kedua 2015 mampu menjadi motor utama penggerak ekonomi dan mendorong perbaikan ekonomi. Secara keseluruhan, realisasi belanja modal tahun 2015 mencapai 1,8% dari PDB. Tingginya belanja modal tersebut terkait dengan akselerasi berbagai proyek infrastruktur Pemerintah, yang merupakan salah satu agenda reformasi struktural. Momentum pemulihan ekonomi telah memberikan dampak positif pada membaiknya keyakinan pelaku ekonomi, terutama konsumen, sehingga mendorong mulai membaiknya konsumsi RT khususnya kelompok nonmakanan pada akhir 2015.

Minat investasi swasta yang terbilang masih lemah pada paruh pertama 2015 akibat menurunnya keyakinan pelaku usaha berbalik di triwulan IV 2015 karena akselerasi proyek Pemerintah tersebut. Pada awal tahun, terjadi pelemahan permintaan baik dari ekspor maupun domestik, serta adanya tekanan nilai tukar, yang menurunkan kinerja korporasi sehingga meningkatkan potensi risiko. Namun pada triwulan IV 2015, investasi swasta menunjukkan perbaikan yang didorong oleh belanja modal Pemerintah. Naiknya investasi ini berdampak positif pada impor barang modal yang tadinya melemah di awal tahun karena pelaku usaha mulai melakukan impor untuk memenuhi permintaan.

In line with decreasing household income due to export decline, household consumption also slowed. The slowing trend mainly happened in consumption of secondary products and non-food tertiary products, despite improving at the end of 2015. Overall, household consumption was still solid as reflected in the trend of increasing per capita income. Per capita income in 2015 was recorded at Rp45.2 million, rising from the previous year of Rp41.8 million. Meanwhile, people's purchasing power was still maintained with the rise in Province Minimum Wage (UMP). The average of UMP increase was quite big, reaching above 7% in the past five years and in 2015 rose about 8.9%. The UMP increase became reference of wage increase in many business sectors, especially for formal job category.

Amidst the trend of slowing private consumption, significant increase of Government capital spending in the second half of 2015 became the main engine of economy and boosted economic recovery. Overall, realized capital spending in 2015 reached 1.8% of GDP. High capital spending was related with acceleration of several Government infrastructure projects, which were one of the structural reform agenda. Economic recovery momentum gave positive impact on the improvement of economic players' confidence, especially consumers, which supported the improvement of household consumption especially in non-food category at the end of 2015.

Private investors' appetite which was weak in the first half of 2015 due to declining confidence of business players turned over in the fourth quarter due to the acceleration of Government projects. At the beginning of the year, there was weakening demand both from export and domestic, as well as pressure on currency, which caused corporate performance to drop and increasing risk potential. However in the fourth quarter of 2015, private investment showed improvement supported by Government capital spending. The increase in investment gave positive impact to the import of capital goods which weakened at the beginning of the year as business players started to make imports to meet demand.

MENJAGA KESTABILAN MONETER

Perekonomian Indonesia pada tahun 2015 menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, tantangan utama yang dihadapi berupa: (i) berlanjutnya perlambatan ekonomi global; (ii) tren penurunan harga komoditas yang berlanjut seiring dengan masih melemahnya permintaan; (iii) pemulihan ekonomi yang tidak merata mendorong terjadinya perubahan lanskap pertumbuhan ekonomi; dan (iv) divergensi kebijakan moneter yang berbeda di setiap negara dalam merespons tantangan global maupun domestik.

Sementara dari internal, tantangan tergambar dari struktur fundamental perekonomian Indonesia, di antaranya: (i) tingginya kandungan impor dalam produk ekspor; (ii) masih dominannya peran komoditas dalam struktur perekonomian dan sumber pertumbuhan; (iii) sektor keuangan domestik yang belum cukup dalam; dan (iv) porsi pembiayaan luar negeri yang cukup tinggi, baik melalui investasi langsung maupun investasi portofolio di pasar keuangan.

Dinamika perekonomian global maupun domestik tersebut meningkatkan risiko di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perlambatan ekonomi global, khususnya yang bersumber dari pelemahan ekonomi Tiongkok dan penurunan harga komoditas, memberikan tekanan yang signifikan terhadap kinerja ekspor dan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia. Sementara itu, divergensi kebijakan moneter akibat pemulihan ekonomi yang belum merata memicu pergeseran likuiditas global (*flight to quality*). Ketidakpastian rencana bank sentral AS menaikkan suku bunga acuan turut meningkatkan volatilitas di pasar keuangan dan membuat investor global cenderung menghindari risiko. Perilaku itu berdampak pula terhadap berkurangnya aliran modal ke pasar keuangan domestik sehingga memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah.

MAINTAINING MONETARY STABILITY

Indonesia's economy in 2015 faced difficult challenges, both externally and internally. Externally, the main challenges were in form of: (i) continued global economic slowdown; (ii) continued trend of declining commodity prices along with weak demand; (iii) uneven economic recovery which impacted the change of economic growth landscape; and (iv) divergence of monetary policy in every country to respond against global and domestic challenges.

In the meantime, internal challenges came from Indonesia's economy fundamental structure, among others: (i) high import contents in export products; (ii) dominance of commodity role in economic structure and growth source; (iii) domestic financial sector which was not deep enough; and (iv) share of foreign financing which was quite high, either through direct investment or portfolio investment in the financial market.

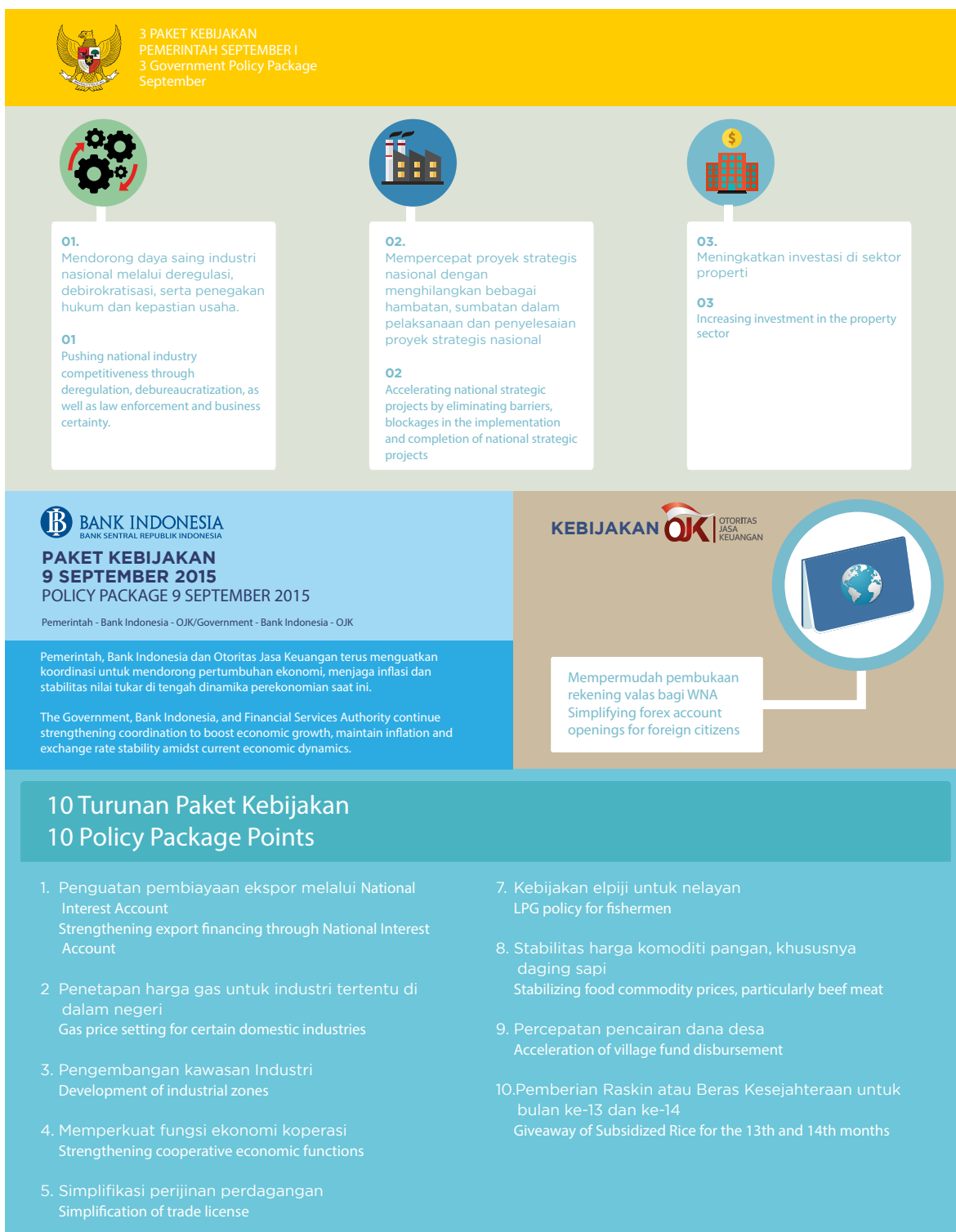
*The dynamics in global and domestic economy increased risks amidst efforts to stoke national economic growth. Global economic slowdown, especially derived from China's economic slowdown and declining commodity prices, created significant pressure to Indonesia's export performance and current account deficit. Meanwhile, monetary policy divergence due to uneven economic recovery triggered global liquidity movement (*flight to quality*). Uncertainty over the US central bank plan to raise interest rate also raised volatility in the financial market and caused risk-off among global investors. This behavior impacted the decrease in capital flow to the domestic financial market which pressured the Rupiah.*



Bank Indonesia dan Pemerintah menyikapi berbagai tantangan tersebut dengan menerapkan bauran kebijakan guna mencari titik keseimbangan yang optimal bagi perekonomian. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan domestik. Sementara untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan kebijakan makroekonomi, bauran kebijakan BI tersebut disinergikan dengan beberapa paket kebijakan ekonomi Pemerintah yang dikeluarkan pada semester II 2015. Penguatan bauran kebijakan moneter dan fiskal tersebut difokuskan pada upaya pengendalian inflasi, pengelolaan defisit neraca transaksi berjalan ke level yang lebih sehat, penguatan stabilitas sistem keuangan, dan pemulihan pertumbuhan ekonomi domestik.

Bank Indonesia and the Government responded to the challenges by implementing policy mix to find the optimal balance for the economy. Bank Indonesia continued strengthening the mix of monetary policy, macro prudential policy, and payment system to maintain macroeconomic stability and domestic financial system. Meanwhile to increase effectiveness in managing macroeconomic policy, BI's policy mix was synergized with several Government economic packages launched in the second half of 2015. The strengthening of monetary and fiscal policy mix was focused on managing inflation, controlling current account deficit to a healthier level, strengthening financial system stability, and domestic economic growth recovery.

Infografis 1a. Paket Kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Infographic 1a. Policy Package of Government, Bank Indonesia and Financial Services Authority



Infografis 1b. Paket Kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
Infographic 1b. Policy Package of Government, Bank Indonesia and Financial Services Authority



5 PAKET KEBIJAKAN Bank Indonesia

5 POLICY PACKAGES of Bank Indonesia



01.
Memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong sektor riil dari sisi penawaran

01.
Strengthening inflation management and boosting the real sector from demand side



Memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka akselerasi implementasi *roadmap* pengendalian inflasi nasional dan daerah. Saat ini telah terdapat lebih dari 430 TPID di seluruh Indonesia dan telah memiliki *roadmap* inflasi daerah. Bank Indonesia akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah pusat maupun daerah untuk mengimplementasikan *roadmap* tersebut.

Strengthening coordination of Inflation Management Team (TPI) and Regional Inflation Management Team (TPID) in accelerating the implementation of national and regional inflation management roadmap. Currently there are more than 430 TPID across Indonesia and have the regional inflation roadmap. Bank Indonesia will continue coordination with the central or regional Governments to implement the roadmap



Memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan daerah antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah

Strengthening regional finance and economic cooperations between BI and Central and Regional Governments



02.
Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah

02.
Maintaining the stability of Rupiah exchange rate



Menjaga kepercayaan pelaku pasar di pasar valuta asing (valas) melalui pengendalian volatilitas nilai tukar Rupiah

Maintaining trust of market players in the forex market through managing volatility of the Rupiah exchange rate



Memelihara kepercayaan pasar terhadap pasar Surat Berharga Negara (SBN) melalui pembelian di pasar sekunder dengan tetap memerhatikan dampaknya terhadap ketersediaan SBN bagi *inflow* dan likuiditas pasar uang

Retaining market confidence in the Government Bond (SBN) market through purchasing in the secondary market while still monitoring the impact of SBN availability for inflow and liquidity in the money market



03. Memperkuat pengelolaan likuiditas Rupiah melalui Operasi Pasar Terbuka guna mengalihkan likuiditas harian ke waktu/tenor yang lebih panjang dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah

03. *Strengthening Rupiah liquidity management through Open Market Operation to shift daily liquidity to longer tenors in supporting the stability of Rupiah*



Mengubah mekanisme lelang *Reverse Repo* (RR) SBN dari *variable* menjadi *fixed rate tender*, menyesuaikan *pricing*, dan menerbitkan RR SBN 3 bulan

Changing the mechanism of SBN Reverse Repo (RR) auction from variable to fixed rate tender, adjusting pricing, and issuing 3-month SBN RR



Mengubah mekanisme lelang Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dari *variable* menjadi *fixed rate tender* dan menyesuaikan *pricing*, serta menerbitkan SDBI tenor 5 bulan

Changing the mechanism of Bank Indonesia Deposit Certificate (SDBI) from variable to fixed rate tender and adjusting pricing, as well as issuing 5-month tenor SDBI



Menerbitkan kembali Sertifikasi Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 bulan dan 12 bulan dengan mekanisme lelang *fixed rate tender* dan menyesuaikan *pricing*

Reissuing Bank Indonesia Certificate (SBI) with 9-month and 12-month tenors under fixed rate tender auction mechanism and adjusting pricing



04. Memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valas

04. *Strengthening management of forex supply and demand*



Menyesuaikan frekuensi lelang *Foreign Exchange* (FX) Swap dari 2 kali menjadi 1 kali seminggu

Adjusting the frequency of Foreign Exchange (FX) Swap auction from 2 times to 1 time a week



Mengubah mekanisme lelang *Term Deposit* (TD) Valas dari *variable* menjadi *fixed rate tender*, menyesuaikan *pricing*, dan memperpanjang tenor sampai 3 bulan

Changing the mechanism of Forex Term Deposit (TD) auction from variable rate tender to fixed rate tender, adjusting pricing, and lengthening the tenor up to 3 months



Menurunkan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen *underlying* dari 100 ribu Dolar AS menjadi 25 ribu Dolar AS per nasabah per bulan dan mewajibkan penggunaan NPWP

Reducing the limit of forex purchase with proof of underlying documents from the existing of US\$100 thousand to US\$25 thousand per customer per month and requiring NPWP



Mempercepat proses persetujuan utang luar negeri bank dengan tetap memerhatikan asas kehati-hatian

Accelerating the approval process of bank foreign debt by ensuring prudential principles



05. Langkah-langkah lanjutan untuk pendalaman pasar uang

05. *Additional steps for financial market deepening*



Menyediakan fasilitas *swap hedging* untuk mendukung investasi infrastruktur dan sekaligus memperkuat cadangan devisa

Preparing hedging swap facility to support infrastructure investment as well as strengthening forex reserves



Menyempurnakan ketentuan tentang pasar uang yang mencakup seluruh komponen pengembangan pasar antara lain instrumen, pelaku dan infrastruktur

Improving regulations on money market which cover all components of market development among others instrument, player and infrastructure

Secara konsisten pada tahun 2015, Bank Indonesia mengimplementasikan kebijakan moneter bias ketat untuk menjaga stabilitas makroekonomi yang diarahkan untuk memastikan laju inflasi sesuai dengan kisaran target dan mengarah dalam tren yang menurun dalam jangka menengah-panjang, mendorong penurunan defisit neraca transaksi berjalan, dan menjaga stabilitas pasar keuangan domestik. Sejalan dengan kebijakan itu, Bank Indonesia sempat menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25bps pada Februari 2015 sebagai respons atas penurunan ekspektasi inflasi pasca kebijakan reformasi energi dan tren penurunan harga minyak dunia. Terkendalnya laju inflasi membuka ruang pelanggaran kebijakan moneter pada akhir tahun 2015. Namun, Bank Indonesia memilih untuk mempertahankan BI Rate pada level 7,5% hingga akhir tahun 2015 karena mempertimbangkan tingginya risiko eksternal di tengah ketidakpastian kenaikan suku bunga The Fed. Untuk memanfaatkan ruang pelanggaran moneter, Bank Indonesia menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) primer dalam Rupiah sebesar 0,5% menjadi 7,5% yang berlaku efektif pada 1 Desember 2015.

Di sisi lain, koordinasi yang semakin baik antarinstansi melalui Tim Pengendali Inflasi (TPI) di tingkat pusat dan daerah (TPID) berhasil menjaga kelancaran distribusi dan pasokan barang di tengah ancaman kekeringan (El Nino). Hal ini tercermin dari komoditas pangan yang harganya kerap bergejolak (*volatile food*), di mana stabilitas harganya relatif terjaga. Inflasi lebaran 2015 juga terkontrol dan lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi lebaran dalam empat tahun terakhir. Terkendalnya inflasi *volatile food* yang didukung oleh stabilitas

Consistently in 2015, Bank Indonesia implemented tight monetary policy bias to maintain macroeconomic stability aimed at ensuring inflation rate to be in line with the target range and on a declining trend in the medium-long term, pushing down the current account deficit, and maintaining the domestic financial market stability. In line with the policy, Bank Indonesia cut the benchmark BI rate by 25bps in February 2015 as response to the declining inflation expectation post-energy reform policy and trend of declining global oil prices. Manageable inflation rate opened room for monetary policy loosening at the end of 2015. However, Bank Indonesia decided to hold the BI rate at 7.5% until the end of 2015 after considering the high external risks due to uncertainty over the Fed rate hike. To take advantage of the space for monetary loosening, Bank Indonesia cut the primary Reserve Requirements (GWM) in Rupiah by 0.5% to 7.5% effective on 1 December 2015.

On the other hand, better coordination between institutions through the Inflation Management Team (TPI) in central and regions (TPID) succeed to maintain the continuity of distribution and supply of goods amidst the threat of drought (El Nino). This was reflected by volatile food prices, in which the prices were relatively stable. Inflation in 2015 Eid was also manageable and lower compared to the average Eid inflation in the last four years. A controlled volatile food inflation supported by the stability of administered price pushed down



Fungsi GWM Sebagai stimulus perekonomian

Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) primer dalam Rupiah dari 8 persen menjadi 7,5 persen. Dengan penurunan GWM primer maka likuiditas bank akan meningkat. Hal itu berarti, bank mampu menyalurkan kredit lebih besar ke masyarakat dan imbasnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

GWM Function as Economic Stimulus

Bank Indonesia cut the primary Reserve Requirements (GWM) in Rupiah from 8% to 7.5%. With the GWM cut, the bank liquidity will increase. This means, banks can channel more lending to the society which can boost economic growth.

140

198

216

233

harga yang diatur Pemerintah (*administered prices*) mendorong penurunan ekspektasi inflasi sehingga berdampak pada penurunan inflasi inti pada tahun 2015 menjadi 3,95% dari sebesar 4,93% pada tahun 2014.

Dalam rangka memitigasi dampak divergensi kebijakan moneter global yang memicu pergeseran dan peningkatan volatilitas aliran modal masuk, Bank Indonesia mengambil keputusan untuk mempertahankan kebijakan suku bunga bias ketat. Kebijakan ini berhasil meredam sebagian tekanan depresiasi nilai tukar, meskipun pengaruh eksternal tetap dominan. Tekanan global semakin menguat pada triwulan III 2015, yang dipicu oleh sentimen kenaikan suku bunga The Fed dan kebijakan devaluasi Yuan bank sentral Tiongkok. Kondisi ini membuat ruang kebijakan moneter menjadi terbatas sehingga perlu ditopang oleh kebijakan nilai tukar dan pengelolaan cadangan devisa. Menyikapi sentimen negatif tersebut, Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah mengeluarkan dua paket kebijakan pada 9 September 2015 dan 30 September 2015 untuk menjaga nilai tukar Rupiah, meliputi: (i) menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah; (ii) memperkuat pengelolaan likuiditas Rupiah; dan (iii) memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valas.

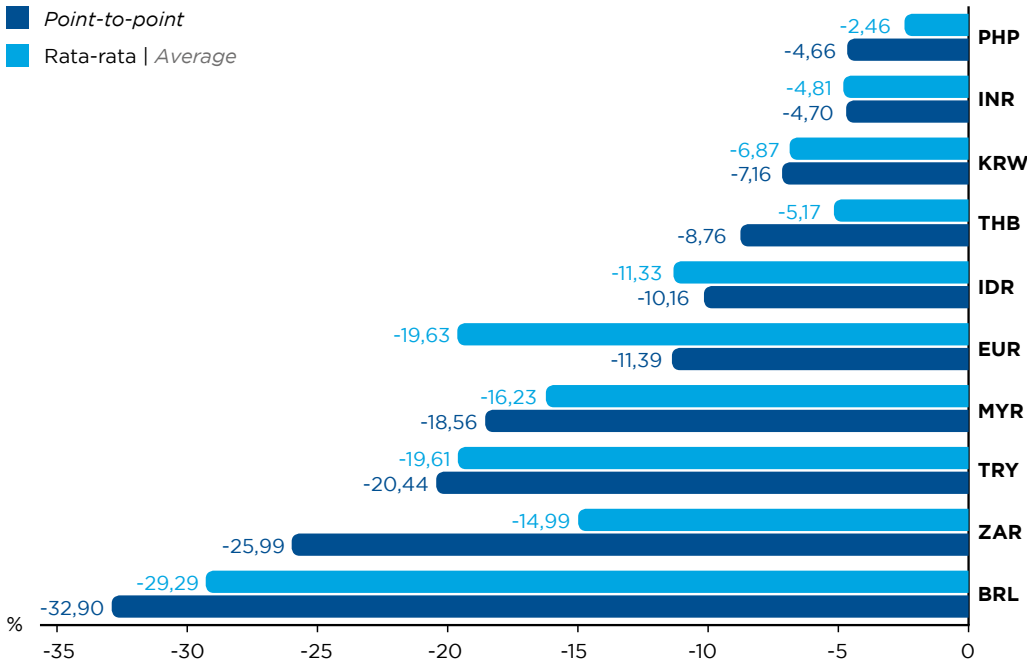
Dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia senantiasa berada di pasar dengan melakukan intervensi di pasar *spot* maupun *forward* guna menyeimbangkan pasokan dan kebutuhan valas. Untuk memperkuat penawaran dan permintaan valas, Bank Indonesia pada September 2015 menyesuaikan frekuensi lelang *FX swap* dari dua kali menjadi sekali seminggu, menurunkan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen *underlying*, dan menerbitkan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas. Sementara untuk memperkuat pengelolaan likuiditas Rupiah, Bank Indonesia menyesuaikan mekanisme lelang operasi pasar terbuka (OPT) dari *variable rate tender* (VRT) menjadi *fixed rate tender* (FRT). Selain itu Bank Indonesia juga memperkaya instrumen OPT dengan beberapa variasi tenor, di antaranya: (i) Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) tenor 3 dan 6 bulan; (ii) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tenor 9 dan 12 bulan; dan (iii) *reverse repo* SBN tenor 2 minggu.

inflation expectation which led to the decline in core inflation in 2015 to 3.95% from 4.93% in 2014.

In attempts to mitigate the effect of global monetary policy divergence which triggered a shift and an increase in volatility of capital inflows, Bank Indonesia made decision to maintain tight policy rate bias. This managed to dampen some pressure on Rupiah depreciation, despite dominant external factors. Global pressure escalated in the third quarter of 2015, triggered by sentiment over the increase of Fed interest rate and China's central bank policy to devalue Yuan. These conditions caused monetary policy space to be limited which should be supported by exchange rate policy and foreign exchange reserves management. Responding to the negative sentiments, Bank Indonesia in synergy with the Government issued two policy packages on 9 September 2015 and 30 September 2015 to maintain Rupiah stability, covering: (i) maintaining the stability of Rupiah exchange rate; (ii) strengthening the management of Rupiah liquidity; and (iii) strengthening the management of forex supply and demand.

In maintaining Rupiah stability, Bank Indonesia always remained in the market by making intervention in spot and forward markets to balance the supply and demand of forex currencies. To strengthen forex supply and demand, Bank Indonesia in September 2015 adjusted the FX swap auction frequency from twice to once a week, reducing the limit of forex purchase with underlying document as proof, and issuing Bank Indonesia Securities (SBBI) in forex denomination. Meanwhile to strengthen the management of Rupiah liquidity, Bank Indonesia adjusted the mechanism of open market operation (OPT) auction from variable rate tender (VRT) to fixed rate tender (FRT). In addition, BI also expanded OPT instruments with various tenors, such as: (i) Bank Indonesia Deposit Certificate with tenor of 3 and 6 months; (ii) Bank Indonesia Certificate (SBI) with tenor of 9 and 12 months; and (iii) reverse repo SBN (government bonds) with tenor of 2 weeks.

Grafik 2. Depresiasi/Apresiasi Mata Uang Kawasan 2015
Graphic 2. Depreciation/Appreciation of Regional Currencies in 2015



Beberapa kebijakan lain yang juga dikeluarkan Bank Indonesia pada tahun 2015 adalah implementasi aturan mengenai pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi NonBank. Sementara untuk menurunkan transaksi domestik yang menggunakan valas dan turut meningkatkan kebutuhan valas, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini mampu menurunkan transaksi valas antarpenduduk, yang sering digunakan dalam perdagangan barang elektronik dan perjalanan wisata. Koordinasi dengan Pemerintah juga dilakukan dengan mendorong devisa hasil ekspor (DHE) agar menetap lebih lama di dalam negeri. Untuk itu, Pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang bersedia menyimpan DHE di perbankan dalam negeri untuk menarik dana yang selama ini disimpan di luar negeri.

Several other policies issued by Bank Indonesia in 2015 were implementation of regulations on the management of Non-Bank Corporate Foreign Debt. Meanwhile to reduce domestic transactions using forex and increase forex needs, Bank Indonesia issued policy on the requirement to use Rupiah in the territory of Republic of Indonesia. This policy managed to reduce forex transactions among Indonesian citizens, often used in electronic goods trade and travel. Coordination with the Government was made to push export proceeds (DHE) to stay longer in the country. Therefore, the Government provided incentive of deposit tax rate cut for exporters who were willing to save their export proceeds in domestic banks to attract funds that were placed overseas.

140

198

216

233

Untuk mengantisipasi terjadinya penarikan modal secara tiba-tiba (*sudden shock*) yang bersumber dari sentimen eksternal, Bank Indonesia memperkuat penyangga (*buffer*) kecukupan cadangan devisa. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga memperkuat jaring pengaman keuangan internasional sebagai *second line of defense*. Berbagai rangkaian kebijakan stabilisasi nilai tukar dan jaring pengaman yang disiapkan tersebut mampu meredam kekhawatiran pelaku pasar dan investor asing sehingga depresiasi Rupiah relatif lebih terkelola dibandingkan dengan pelemahan mata uang negara *peers group*.

Terkait pengelolaan utang luar negeri, ketentuan di pasar valas direlaksasi untuk mendukung kewajiban lindung nilai bagi korporasi nonbank sebagai implementasi dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri. Relaksasi ketentuan mencakup transaksi derivatif yang dilakukan antara bank dengan pihak domestik dan pihak asing. Aset penjaminan (*underlying*) transaksi valas yang dilakukan pihak domestik diperluas mencakup pembiayaan untuk kegiatan perdagangan dan investasi. Selain itu, persyaratan minimum tenor transaksi derivatif bagi pihak asing dihapus guna meningkatkan likuiditas transaksi derivatif. Lebih lanjut, transaksi *Cross Currency Swap (CCS)* secara eksplisit menjadi bagian dari transaksi derivatif yang diatur, sehingga diharapkan dapat menambah fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai.

Bank Indonesia juga memberikan ruang lebih bagi perbankan untuk mengelola posisi valas harian dengan menghapuskan kewajiban bank menjaga posisi devisa neto (PDN) setiap 30 menit. Melalui kebijakan ini bank menjadi lebih leluasa dalam menyediakan instrumen lindung nilai bagi pelaku pasar sehingga diharapkan dapat menurunkan volatilitas Rupiah intrahari.

To anticipate sudden capital withdrawal (sudden shock) deriving from external sentiment, Bank Indonesia strengthened the buffer of foreign exchange reserves. In addition, Bank Indonesia also strengthened the international financial safety net as the second line of defense. Several series of exchange rate stabilization policy and safety net managed to dampen worries of market players and foreign investors so the Rupiah depreciation was relatively more manageable compared to the currency depreciation of peer countries.

Related with foreign debt management, regulations in forex market were relaxed to support hedging requirement for non-bank corporations as the implementation of prudential principles in foreign debt management. Regulation relaxations covered derivative transactions made between banks and domestic and foreign parties. Underlying assets for forex transactions made by domestic parties were expanded to cover financing for trade and investment. In addition, minimum tenor requirement of derivative transactions for foreign parties was eliminated to increase the liquidity of derivative transactions. Moreover, Cross Currency Swap (CCS) transactions explicitly became part of regulated derivative transactions, which were expected to add flexibility for market players in hedging.

Bank Indonesia also provided more room for banks to manage intraday forex position by removing the requirement for banks to maintain net open position (NOP) every 30 minutes. Through this policy banks became more flexible in providing hedging instruments for market players so it was expected to reduce the intraday Rupiah volatility.

Untuk meredam guncangan yang timbul dari eksternal maupun internal, Bank Indonesia juga memperkuat upaya pendalaman dan pengembangan pasar keuangan domestik. Caranya dengan memperluas cakupan pelaku pasar yang terlibat, memperbanyak variasi produk keuangan, dan mengupayakan efisiensi dari sisi harga. Program pendalaman pasar keuangan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar rupiah. Melalui program ini, para pelaku usaha mendapat fasilitas kemudahan pembiayaan untuk mendukung pengembangan bisnisnya, yang pada akhirnya semakin mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan program itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat pendalaman pasar keuangan dengan menyusun cetak biru (*blueprint*) sebagai pedoman perbaikan dan pengembangan struktur pasar keuangan domestik lima sampai 10 tahun ke depan. *Blueprint* tersebut mencakup panduan bagi program pengembangan pasar uang, pasar valas, pasar keuangan syariah, dan pasar obligasi. Ada lima strategi yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengembangkan pasar keuangan, yaitu pengembangan instrumen dan basis investor, penguatan regulasi dan standardisasi, pengembangan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta didukung oleh edukasi dan sosialisasi yang efektif. Melalui strategi tersebut, diharapkan akan tercipta pasar keuangan yang berkembang, likuid dan efisien, serta mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan pembangunan ekonomi.

Cakupan dari pengembangan pasar uang meliputi pasar uang Rupiah dan pasar uang valas, baik konvensional maupun syariah. Strategi program pendalaman pasar uang Rupiah meliputi pengembangan pasar keuangan berbasis agunan (*collateralized*) guna mendorong ketersediaan likuiditas, efisiensi harga dan pembentukan *term structure*, meningkatkan akses di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), serta pengembangan instrumen pasar uang yang berfungsi sebagai sumber likuiditas bagi pelaku pasar. Sementara itu di pasar uang valas, program pendalaman akan difokuskan pada pengembangan variasi instrumen penempatan dana valas secara luas dan derivatif suku bunga. Besaran strategi pendalaman pasar valas ditempuh dengan

To absorb external and internal shocks, Bank Indonesia also strengthened the efforts to deepen and develop domestic financial market, by broadening the scope of market players involved, expanding variety of financial products, and making price efficiency. The financial deepening program was made to increase the effectiveness of monetary policy and financial system stability as well as Rupiah exchange rate. Through this program, business players would get ease of financing facility to support their business development, which eventually would boost economic growth.

In line with the program, Bank Indonesia also issued several policies to accelerate financial market deepening by designing blueprint as the guideline for improvement and development of domestic financial market structure for the next five to 10 years. The blueprint includes guideline for financial market, forex market, sharia financial market, and bond market development programs. There are five strategies conducted by Bank Indonesia to develop financial market, which include investor base and instrument development, standardization and regulation strengthening, infrastructure development, institutional strengthening, and supported by effective socialization and education. Those strategies are expected to create a developed, liquid and efficient financial market, as well as supporting the effectiveness of monetary policy, financial system stability, and economic development financing.

The scope of money market development covered Rupiah money market and forex money market, both conventional or sharia. The strategy for Rupiah money market deepening program includes the development of collateralized money market to boost liquidity supply, price efficiency and term structure development, increasing access in Interbank Money Market (PUAB), as well as development of money market instruments which function as liquidity source for market players. Meanwhile in the forex money market, deepening program will be focused on the development of forex placement instrument variations and interest rate derivatives. The magnitude of forex market deepening strategy was pursued by pushing

mendorong transaksi valas derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang efektif dan efisien, mendorong diversifikasi dan partisipasi pelaku pasar guna meningkatkan keseimbangan permintaan dan penawaran valas, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi valas melalui pengembangan infrastruktur pasar. Sementara pada pasar keuangan dan ekonomi syariah, Bank Indonesia berupaya meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah dengan melakukan pengembangan instrumen pasar keuangan syariah, serta optimalisasi dana sosial dan pemberdayaan sektor riil.

derivative forex transactions as effective and efficient hedging instruments, pushing diversification and participation of market players to increase the balance of forex supply and demand, as well as increasing transparency and efficiency of forex transactions through market infrastructure development. Meanwhile in the sharia economy and financial market, Bank Indonesia tried to increase the share of sharia financial market by developing sharia financial market instruments, as well as optimizing social funds and empowering the real sector.



Dalam rangka menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia mendukung implementasi reformasi struktural yang dilakukan pemerintah, yang berfokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan daya saing, pencapaian kedaulatan pangan dan energi, serta pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu tercakup dalam rangkaian paket kebijakan ekonomi jilid I-VIII yang telah dirilis pemerintah. Bank Indonesia juga aktif menyelenggarakan beberapa forum koordinasi nasional, meliputi pengembangan ekonomi berbasis kemaritiman di Ambon, ketahanan energi di Balikpapan, serta pengembangan sektor industri dan pariwisata di Yogyakarta.

In attempts to maintain economic growth sustainability, Bank Indonesia supported structural reform implementations conducted by the government, focusing on infrastructure development, competitiveness increase, food and energy security achievement, as well as continuous development financing. These were covered in economic package series I-VIII issued by the government. Bank Indonesia also actively held several National Coordination Forums, such as maritime-based economic development in Ambon, energy security in Balikpapan, as well as industry and tourism sector development in Yogyakarta.

Big Data dan Proses Pengambilan Keputusan

Big Data and Decision Making Process

Sebagai salah satu tema transformasi, *State of The Art Technology* mendorong Bank Indonesia untuk memanfaatkan teknologi dan pendekatan mutakhir yang akan membantu Bank Indonesia dalam mencapai visi dan misinya secara efektif dan efisien. Pemanfaatan *Big Data* untuk mendukung proses pengambilan keputusan merupakan salah satu program strategis implementasi dari tema ini.

Pemanfaatan *Big Data*, khususnya oleh industri komersial, menjadi tren dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal ini didorong oleh keyakinan bahwa *Big Data* yang tersedia di sekitar kita, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, memiliki kandungan informasi/pengetahuan yang berharga. Dengan jumlah penduduk yang besar serta tingginya aktivitas masyarakat di media sosial maupun media *online*, *Big Data* di Indonesia sangat berpotensi untuk dimanfaatkan.

Di Bank Indonesia, *Big Data* diharapkan dapat memperkuat proses pengambilan keputusan di sektor Moneter, *Market*, SSK, SP-PUR, dan *Enabler* melalui peningkatan kualitas data dan analisis, serta menjadi komplemen dari pemanfaatan *data warehouse (structured data)* yang telah dilakukan selama ini. Secara garis besar, potensi pemanfaatan *Big Data* di Bank Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 area utama, yaitu:

1. Data Lag

Big Data dapat dimanfaatkan untuk membentuk berbagai indikator baru/ pelengkap untuk mengisi *lag* ketersediaan serta menjadi *leading information* dari sumber data utama.

2. Network Analysis

Big Data dapat dimanfaatkan untuk melihat keterhubungan antar pelaku dalam perekonomian (a.l. dalam *market*, SP, SSK) dengan menggunakan metode *network analysis*, untuk memperoleh informasi

As one of the transformation themes, State of the Art Technology supports Bank Indonesia to utilize the latest technology and approach to help Bank Indonesia in achieving its vision and mission effectively and efficiently. The utilization of Big Data to support decision making process is an implementation of strategic program from this theme.

Big Data utilization, especially by commercial industry, becomes trend in the last few years. This is supported by confidence that Big Data available around us, structured or not structured, contains valuable contents of information/knowledge. With large number of population and high people activities in social and online media, Big Data in Indonesia has strong potential to be utilized.

In Bank Indonesia, Big Data is expected to strengthen the decision making process in the Monetary, Market, SSK, SP-PUR, and Enabler sectors through the increase of data and analysis quality, as well as becoming complement of data warehouse (structured data) utilization that has been performed. The potential of Big Data utilization in Bank Indonesia can be classified into 4 main areas:

1. Data Lag

Big Data can be used to form several new/ complement indicators to fill the lag of availability as well as leading information from the main data source.

2. Network Analysis

Big Data can be used to see interconnection between economic players (in market, SP, SSK) by using network analysis method, to obtain information of the players who

pelaku yang paling berperan serta dapat berdampak sistem dalam perekonomian.

3. **Market & Investor Behaviour**

Big Data dapat dimanfaatkan dalam menganalisis pola perilaku pelaku ekonomi (a.l. perbankan, investor, konsumen).

4. **Public Perception of Bank Indonesia**

Big Data dapat dimanfaatkan untuk memperoleh persepsi/respon publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dalam rangka evaluasi serta memperkuat strategi komunikasi kebijakan Bank Indonesia.

Dalam upaya mencapai *end-state* pemanfaatan *Big Data* dalam pengambilan keputusan strategis di Bank Indonesia, Bank Indonesia telah menyusun *Roadmap* Pemanfaatan *Big Data* di Bank Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu:

1. **Tahap I: Establishing Big Data Foundation (2015-2018)**

- Perumusan strategi dan *roadmap* pemanfaatan *Big Data* dengan memahami posisi *Big Data* dalam proses pengambilan keputusan di Bank Indonesia.
- Pelaksanaan sejumlah *pilot project Big Data* sesuai dengan strategi pemanfaatan *Big Data* yang telah disusun.
- Aliansi bersama akademisi, industri, dan institusi lain untuk mendukung implementasi *Big Data* di Bank Indonesia.
- Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan *Big Data* serta *set-up* awal infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengolahan *Big Data*.
- Penyusunan laporan penelitian internal terkait *Big Data* serta panduan pelaksanaan (*guidelines*) *Big Data* di Bank Indonesia.

contribute the bigger role and impact in the economic system.

3. **Market & Investor Behavior**

Big Data can be used in analyzing behavior pattern of economic players (banking, investors, consumers).

4. **Public Perception of Bank Indonesia**

Big Data can be used to obtain public perception/response to the policy issued by Bank Indonesia, to evaluate as well as strengthening policy communication strategy of Bank Indonesia.

To achieve *end-state* of *Big Data* utilization in strategic decision making in Bank Indonesia, Bank Indonesia has designed *Roadmap of Big Data Utilization in Bank Indonesia* which comprises 3 (three) phases:

1. **Phase 1: Establishing Big Data Foundation (2015-2018)**

- Formulation of strategy and roadmap of *Big Data* utilization by understanding *Big Data* position in decision making process in Bank Indonesia.
- Implementation of several *Big Data* pilot projects according to the outlined *Big Data* utilization.
- Alliance with academics, industry, and other institutions to support *Big Data* implementation in Bank Indonesia.
- Increase of human resource capability in using *Big Data* as well as initial set-up of needed infrastructure to process *Big Data*.
- Outlining internal research report related to *Big Data* as well as guidelines of *Big Data* in Bank Indonesia.

2. Tahap II: *Empowering Big Data (2019-2021)*

- Secara internal Bank Indonesia, tahapan ini merupakan penguatan inisiatif *Big Data* yang tercermin dari semakin luasnya pemanfaatan *Big Data* dalam proses pengambilan keputusan di Bank Indonesia. Hal ini didukung dengan ketersediaan SDM data scientist dan infrastruktur yang memadai serta aliansi dengan pihak ketiga yang semakin erat.
- Dalam pandangan eksternal, Bank Indonesia telah menjadi *role model* dalam pemanfaatan *Big Data* bagi bank sentral lain di regional, a.l. melalui publikasi data dan *working paper Big Data* serta *sharing Big Data* dalam forum-forum internasional.

3. Tahap III: *Executing Innovative Use of Big Data (2022 dan setelahnya)*

- Pemanfaatan *Big Data* telah bersifat *real time* untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pada saat yang bersamaan, manajemen data di Bank Indonesia juga telah terintegrasi, termasuk dengan telah diimplementasikannya *Enterprise Data Warehouse (EDW)* Bank Indonesia. Hal ini dapat mendukung riset, pengambilan keputusan, dan operasional secara lebih optimal. Kondisi ini memungkinkan terciptanya inovasi penyediaan data/ indikator baru, dengan memanfaatkan sumber data yang lebih bervariasi.
- Inovasi penggunaan *Big Data* tersebut membuat Bank Indonesia menjadi salah satu yang terdepan di antara bank sentral lainnya dalam pemanfaatan *Big Data*.

Setelah mencapai *end-state* yang diharapkan, pemanfaatan *Big Data* yang sebelumnya hanya mendukung proses pengambilan keputusan akan menjelma menjadi mitra utama dalam pengambilan keputusan strategis di Bank Indonesia.

2. Phase II: *Empowering Big Data (2019-2021)*

- Inside the Bank Indonesia, this phase is a strengthening of *Big Data* initiatives which is reflected from the wide use of *Big Data* in Bank Indonesia decision making process. This is supported by HR data scientist availability and adequate infrastructure as well as close alliance with third parties.
- From external point of view, Bank Indonesia becomes a *role model* in the use of *Big Data* from other central banks in regions, inter alia through data publication and working paper of *Big Data* as well as sharing *Big Data* in international forums.

3. Phase III: *Executing Innovative Use of Big Data (2022 and after)*

- Utilization of *Big Data* is real time to support decision making process. At the same time, data management in Bank Indonesia has been integrated, along with the implementation of *Enterprise Data Warehouse (EDW)* Bank Indonesia. This supports research, decision making, and operations more optimally. The conditions allow data innovation/new indicators, utilizing varied data source.
- Innovation of *Big Data* causes Bank Indonesia to become one of the leading central banks in *Big Data* utilization.

After reaching the expected *end-state*, *Big Data* utilization which previously only supported decision making process will become main partner in strategic decision making in Bank Indonesia.

Infografis 2. **BIG DATA** Bank Indonesia
Infographic 2. **Bank Indonesia BIG DATA**

BIG DATA Bank Indonesia

"Big Data diharapkan dapat memperkuat proses pengambilan keputusan di sektor Moneter, Market, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, pengelolaan uang Rupiah dan enabler melalui peningkatan kualitas data dan analisis, serta menjadi komplemen dari Data Warehouse"

"Big Data is expected to strengthen decision making process in the Monetary, Market, financial system stability, payment system, currency management policy, and enabler sectors through the increase in data quality and analysis, as well as becoming complement of Data Warehouse"

APA ITU BIG DATA? WHAT IS BIG DATA?

BIG DATA

Data dimana ukuran, keragaman, dan kompleksitasnya membutuhkan teknik dan algoritma analitik tertentu untuk mengelola serta mengambil manfaat dan pengetahuan yang tersembunyi di dalamnya, dengan karakteristik utama 5V's, yakni *Volume, Velocity, Variety, Veracity, dan Value*.

Data in which the size, variety, and complexity need certain technic and analytical algorithm to process and take benefit and knowledge hidden inside, with the main characteristics of %V's, namely *Volume, Velocity, Variety, Veracity, and Value*.

Volume

Increasing size of the data

Velocity

Analysis of real time data

Variety

Different types of the data

Veracity

Trustworthiness/ accuracy of the data

Value Value

- Big Data merupakan salah satu sumber data untuk penyusunan statistik
- Pengolahan Big Data merupakan bagian dari proses bisnis statistik
- Big Data is one of the data source to formulate statistic
- Big Data processing is part of statistic business process

METODOLOGI BIG DATA? BIG DATA METHODOLOGY?

Kerangka Kerja Big Data Analytics Big Data Analytics Framework

Data Preparation

- ✓ Pengumpulan data (a.l. web crawling, database)
- ✓ Preprocess data (a.l. filter, cleansing)
- ✓ Penyiapan corpus sebagai data latih machine learning, keywords pencarian kata, rules dsb
- ✓ Data collection (web crawling, database)
- ✓ Data preprocess (filter, cleansing)
- ✓ Corpus preparation as machine learning training data, keywords searching, rules etc

Data Extraction

- ✓ Ekstraksi informasi dari data terstruktur maupun data tidak terstruktur
- ✓ Ekstraksi informasi dilakukan dengan metode a.l. data mining dan text mining
- ✓ Information extraction from structured and unstructured data
- ✓ Information extraction conducted with methods eg. data mining and text mining

Validation & Analysis

- ✓ Melakukan validasi hasil ekstraksi
- ✓ Memperbaiki pengolahan data berdasarkan hasil ekstraksi tersebut
- ✓ Melakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh
- ✓ Performing validation from extraction results
- ✓ Fixing data processing based on the extraction results
- ✓ Performing analysis to the received results

DATA MINING

Mengekstrak pengetahuan/ menemukan pola yang implisit dan belum diketahui sebelumnya dari kumpulan data yang besar

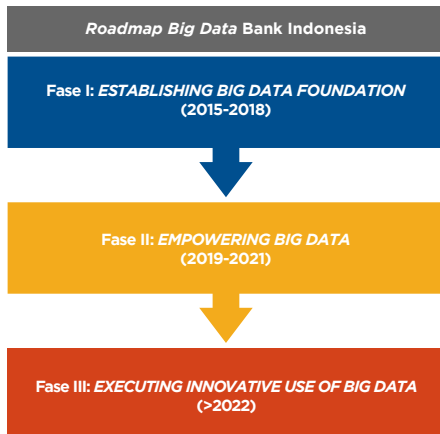
Extracting knowledge/ finding implicit and unknown pattern previously from big data collection

TEXT MINING

Mengekstrak informasi yang bermanfaat dari kumpulan teks

Extracting useful information from text collection

PEMANFAATAN BIG DATA DI BANK INDONESIA UTILIZATION OF BIG DATA IN BANK INDONESIA



Secara garis besar, potensi pemanfaatan Big Data di Bank Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 area utama, yaitu:

Overall, the potential of Big Data utilization in Bank Indonesia can be classified into 4 major areas, namely:

DATA LAG

NETWORK ANALYSIS

MARKET & INVESTOR BEHAVIOUR

PUBLIC PERCEPTION OF BI

5 Strategi Bank Indonesia untuk Pasar Keuangan

5 Bank Indonesia Strategies for Financial Market

Kondisi pasar keuangan yang masih cenderung dangkal menyebabkan pasar keuangan Indonesia rentan terhadap guncangan, baik dari eksternal maupun internal. Hal ini tentu akan berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan, nilai tukar rupiah dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Dalam upaya pendalaman dan pengembangan pasar keuangan di Indonesia, Bank Indonesia telah menetapkan lima strategi, yang mencakup (i) pengembangan instrumen dan basis investor, (ii) pengembangan infrastruktur pasar, (iii) penyesuaian regulasi dan standardisasi transaksi, (iv) penguatan dukungan kelembagaan, serta (v) pelaksanaan edukasi dan sosialisasi. Strategi tersebut diharapkan akan menciptakan pasar keuangan yang berkembang, likuid dan efisien, serta mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan pembangunan ekonomi.

Untuk **pengembangan instrumen dan perluasan basis investor**, Bank Indonesia bersama Pemerintah mendorong penggunaan fasilitas lindung nilai (*hedging*) bagi perusahaan-perusahaan BUMN. Bank Indonesia, Pemerintah, dan lembaga penegak hukum telah menyepakati bahwa konsekuensi biaya yang ditimbulkan dari transaksi lindung nilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan merupakan kerugian negara, sepanjang transaksi tersebut dilakukan secara konsisten, konsekuen, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang ada. Sosialisasi kewajiban lindung nilai dilakukan secara intensif dengan melibatkan *stakeholder* agar transaksi lindung nilai semakin meningkat.

Financial market conditions which remained shallow caused the Indonesian financial market vulnerable to shocks, both from external and internal. This definitely would affect the financial system stability, rupiah exchange rate, and effectiveness of monetary policy transmissions. In deepening and developing financial market in Indonesia, Bank Indonesia set five strategies, covering (i) investor base and instrument development, (ii) market infrastructure development (ii) transaction standardization and regulation adjustment, (iv) institutional support strengthening, and (v) socialization and education. The strategies were expected to create a developed, liquid, and efficient financial market, as well as supporting the effectiveness of monetary policy, financial system stability, and economic development financing.

*In **investor base and instrument development**, Bank Indonesia with the Government encouraged the use of hedging facilities for SOEs. Bank Indonesia, the Government, and other law enforcers have agreed that cost consequences deriving from hedging transactions of State Owned Enterprises (SOE) are not state losses, as long as the transactions are made consistently, consequently, and accountably according to prevailing regulations. Socialization of hedging requirements was intensively done by involving stakeholders so that the use of hedging transactions continued to increase.*

Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka mengembangkan pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan obligasi korporasi. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah ditekankan pada pengembangan obligasi negara jangka pendek, pengembangan infrastruktur transaksi, dan penerbitan variasi instrumen obligasi. Sementara itu, koordinasi Bank Indonesia dengan OJK difokuskan pada penyempurnaan regulasi pendukung penerbitan obligasi korporasi, termasuk BUMN. Untuk mendukung upaya tersebut, dilakukan penyiapan infrastruktur yang terintegrasi dalam transaksi obligasi korporasi.

Untuk **pengembangan infrastruktur pasar**, bank sentral terus menyempurnakan mekanisme suku bunga penawaran antarbank atau Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas transaksi keuangan. JIBOR merupakan suku bunga acuan yang digunakan pada transaksi keuangan antara lain untuk referensi suku bunga mengambang, produk derivatif suku bunga, dan valuasi instrumen keuangan dalam mata uang rupiah. Penggunaan JIBOR akan mendukung terciptanya pasar uang yang likuid dan dalam serta efisiensi transaksi di pasar uang yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kredibilitas JIBOR, sejak 1 April 2015 Bank Indonesia mewajibkan bank kontributor menerima permintaan transaksi dari bank kontributor lain dalam rangka meminjam dan/atau meminjamkan Rupiah pada tingkat suku bunga yang sesuai dengan suku bunga indikasi, sepanjang memenuhi batasan waktu dan batasan tertentu (*hitable*) JIBOR. Dengan penyempurnaan JIBOR, seluruh pelaku pasar bisa menggunakan suku bunga acuan yang sama untuk setiap

In addition, Bank Indonesia also strengthened coordination between the Government and Financial Services Authority (OJK) to develop the government bond (SBN) and corporate bond markets. Coordination between BI and the Government was emphasized on the development of short-term government bonds, development of transaction infrastructure, and issuance of bond instrument variety. Meanwhile, coordination between BI and OJK was focused on the improvement of supporting regulations for corporate bond issuance, including SOE. To support the move, integrated infrastructure was prepared for corporate bond transactions.

*In **market infrastructure development**, the central bank also continued improving the mechanism of Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) to increase efficiency and reduce complexity of financial transactions. JIBOR is a benchmark rate used in financial transactions among others for the reference of floating rates, interest rate derivative products, and valuation of financial instruments in rupiah currency. The use of JIBOR will support the creation of a liquid and deep money market as well as efficiency of transactions in the money market which will eventually strengthen financial system and monetary stability in Indonesia.*

To increase JIBOR credibility, since 1 April 2015 Bank Indonesia required contributor banks to accept transaction requests from other contributor banks in borrowing and/or lending Rupiah in interest rates suitable with indicated interest rates, as long as they meet the time limit and hitable limit of JIBOR. With the JIBOR improvement, all market players can use the same benchmark rates for every tenor. The

tenor. Pembentukan suku bunga acuan pasar uang untuk tenor satu tahun ke bawah juga akan melengkapi imbal hasil (*yield*) Surat Utang Negara yang berjangka waktu dua tahun sampai dengan 30 tahun.

Dengan demikian, Indonesia akan memiliki kurva imbal hasil (*yield curve*) yang lengkap dan kredibel, yaitu dari tenor *overnight* hingga 30 tahun. Kurva imbal hasil yang lengkap penting bagi berjalannya transmisi kebijakan moneter karena mewakili ekspektasi pasar terhadap kondisi perekonomian ke depan. Selain itu, kurva imbal hasil yang lengkap akan mendorong pembentukan instrumen baru di pasar sehingga memberikan alternatif bagi pelaku usaha untuk membiayai ekspansi usahanya, dan bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolionya.

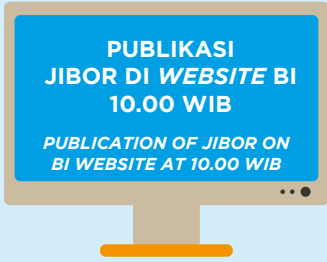
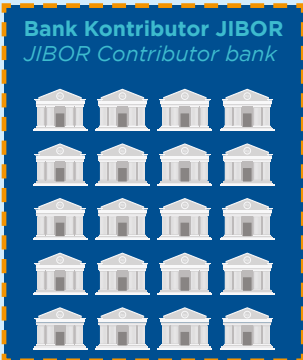
Dalam melakukan **penyesuaian regulasi dan standardisasi transaksi**, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan yang antara lain bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan terkait Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan memfasilitasi kesepakatan Mini Master Repo Agreement (MRA) Syariah. Alternatif pemenuhan kebutuhan likuiditas perbankan syariah diperluas mencakup transaksi surat berharga syariah dengan janji pembelian kembali (*repurchase agreement*) atau Repo Syariah. Melalui pengaturan Repo Syariah ini, maka jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh bank syariah bertambah, melengkapi instrumen syariah yang sudah tersedia sebelumnya, yaitu Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SIKA).

establishment of money market benchmark interest rate for tenor of below one year will also complete the yield of Government Bonds with tenors from two years to 30 years.

Therefore, Indonesia will have a complete and credible yield curve, from overnight to 30-year tenors. A complete yield curve is important to ensure the transmission of monetary policy because it represents market expectations to economic conditions going forward. In addition, a complete yield curve will push for the development of new instruments in the market which will provide alternatives for business players to finance business expansion, and for investors to make portfolio diversification.

*In making **transaction standardization and regulation adjustment**, Bank Indonesia issued several policies which among others were aimed at improving regulations related to Sharia Interbank Money Market (PUAS) and facilitating Sharia Mini Master Repo Agreement (MRA). Alternatives for the fulfillment of sharia banking liquidity needs were expanded to cover sharia securities transactions with repurchase agreement or Sharia Repo. Through this Sharia Repo regulation, the type of transactions that can be performed by sharia banks was added, completing the existing sharia instruments, which were the Interbank Mudharabah Investment Certificates (SIMA) and Sharia Principles Based Commodity Trade Certificates (SIKA).*

Infografis 3. Mekanisme Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)
Infographic 3. Mechanism of Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)



Bank Kontributor menyampaikan rate (*bid rate* dan *offered rate*) kepada Bank Indonesia

Contributor Bank submits bid rate and offered rate to Bank Indonesia

Bank Indonesia menghitung rata-rata *offered rate* setelah mengeluarkan 15% data tertinggi dan 15% data terendah dari seluruh kuotasi yang masuk

Bank Indonesia calculates the average offered rate after taking out the highest and lowest 15% portion of all submitted quotation

Bank Indonesia mempublikasikan di *website* BI pukul 10.00. Selain itu, JIBOR juga dipublikasikan melalui sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) BI, Thomson Reuters dan Bloomberg

Bank Indonesia publishes the result on its website at 10.00 WIB. JIBOR is also published through Bank Indonesia Daily Reports of Commercial Banks (LHBU), Thomson Reuters and Bloomberg

Selain itu, dalam **penguatan dukungan kelembagaan Bank Indonesia** juga menyusun cetak biru (*blueprint*) sebagai pedoman perbaikan dan pengembangan struktur pasar keuangan domestik lima sampai 10 tahun ke depan. *Blueprint* tersebut mencakup panduan bagi program pengembangan pasar uang, pasar valas, pasar keuangan syariah, dan pasar obligasi.

Cakupan dari pengembangan pasar uang meliputi pasar uang Rupiah dan pasar uang valas, baik konvensional maupun syariah. Strategi program pendalaman pasar uang Rupiah meliputi pengembangan pasar keuangan berbasis agunan (*collateralized*) guna mendorong ketersediaan likuiditas, efisiensi harga dan pembentukan *term structure*, meningkatkan akses di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), serta pengembangan instrumen pasar uang yang berfungsi sebagai sumber likuiditas bagi pelaku pasar.

Sementara itu di pasar uang valas, program pendalaman akan difokuskan pada pengembangan variasi instrumen penempatan dana valas secara luas dan derivatif suku bunga. Besaran strategi pendalaman pasar valas ditempuh dengan mendorong transaksi valas derivatif sebagai instrumen lindung nilai yang efektif dan efisien, mendorong diversifikasi dan partisipasi pelaku pasar guna meningkatkan keseimbangan permintaan dan penawaran valas, serta meningkatkan

Meanwhile, in **institutional support strengthening Bank Indonesia** also designed a blueprint as the guideline for improvement and development of domestic financial market structure for the next five to 10 years. The blueprint includes guideline for financial market, forex market, sharia financial market, and bond market development programs.

The scope of money market development covered Rupiah money market and forex money market, both conventional or sharia. The strategy for Rupiah money market deepening program includes the development of collateralized money market to boost liquidity supply, price efficiency and term structure development, increasing access in Interbank Money Market (PUAB), as well as development of money market instruments which function as liquidity source for market players.

Meanwhile in the forex money market, deepening program will be focused on the development of forex placement instrument variations and interest rate derivatives. The magnitude of forex market deepening strategy was pursued by pushing derivative forex transactions as effective and efficient hedging instruments, pushing diversification and participation of market players to increase the balance of forex supply and demand, as well as increasing transparency and efficiency of forex transactions through

transparansi dan efisiensi transaksi valas melalui pengembangan infrastruktur pasar. Sementara pada pasar keuangan dan ekonomi syariah, Bank Indonesia berupaya meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah dengan melakukan pengembangan instrumen pasar keuangan syariah, serta optimalisasi dana sosial dan pemberdayaan sektor riil.

Dalam perjalanannya, Bank Indonesia terus melakukan edukasi dan sosialisasi agar strategi-strategi yang dilakukan tadi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kesuksesan dari seluruh strategi tersebut akan tercapai bila terjadi sinergi yang baik antara Bank Indonesia dan otoritas lainnya sebagai pencetus kebijakan dengan *stakeholder* sebagai pelaku ekonomi.

market infrastructure development. Meanwhile in the sharia economy and financial market, Bank Indonesia tried to increase the share of sharia financial market by developing sharia financial market instruments, as well as optimizing social funds and empowering the real sector.

In the course, Bank Indonesia continued to perform education and socialization to ensure the strategies set can run in effective and efficient manners. The success of all strategies mentioned will be achieved if there is good synergy between Bank Indonesia and other authorities as the policy makers with stakeholders as economic players.

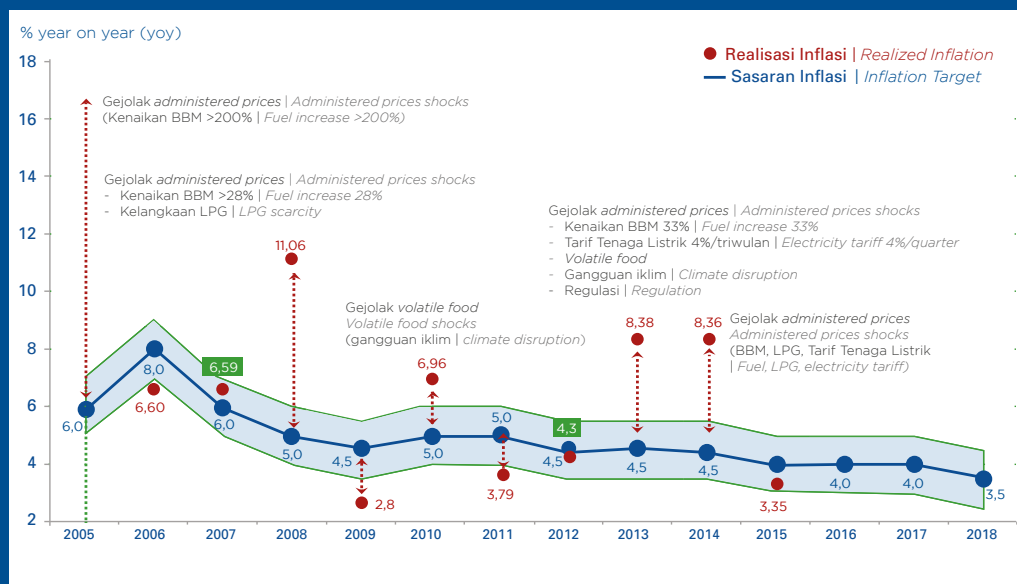
Sebuah Peta Jalan untuk Pengendalian Inflasi

A Roadmap for Inflation Control

Rata-rata inflasi Indonesia masih tinggi dan harus diarahkan ke tingkat yang lebih rendah. Selain untuk menjaga daya beli masyarakat, hal ini penting agar Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan negara-negara kawasan. Secara historis (di luar periode kebijakan harga BBM), rata-rata inflasi IHK sebesar 4,9%, inflasi inti 4,3%, *volatile food* (VF) 8,6%, dan inflasi *administered prices* (AP) 3,6%. Pemerintah sudah mengamanatkan Bank Indonesia untuk mencapai sasaran inflasi ke depan yang cukup rendah dan menurun secara gradual, sebesar 4±1% pada 2016 dan 2017 serta 3,5±1% pada 2018 (Grafik 3).

The average Indonesian inflation remains high and should be aimed to a lower level. Besides to maintain people's purchasing power, this is important so that Indonesia can have high competitiveness compared to regional peers. Historically (excluding fuel price policy), the average CPI inflation is 4.9%, core inflation 4.3%, volatile food (VF) 8.6%, and administered prices (AP) inflation 3.6%. The Government has mandated Bank Indonesia to achieve lower inflation target going forward and gradually declining, at 4±1% in 2016 and 2017 and 3.5±1% in 2018 (Graphic 3).

Grafik 3. Sasaran Inflasi
Graphic 3. Inflation Target



Tantangan pengendalian inflasi bersumber dari permasalahan struktural dan masih besarnya subsidi beberapa komoditas energi. Beberapa tantangan struktural ini termasuk (i) peningkatan kapasitas perekonomian domestik yang masih terbatas, (ii) ketergantungan pada ekspor yang berbasis sumber daya alam dan pada bahan baku impor, (iii) produksi pangan yang rentan terhadap *shock*, (iv) inefisiensi struktur mikro pasar yang menyebabkan disparitas harga cukup besar antara produsen dan konsumen, (v) pemenuhan kebutuhan energi nasional yang tergantung dari impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan *Liquid Petroleum Gas* (LPG), dan (vi) masih lemahnya konektivitas antar daerah sehingga menyebabkan disparitas harga antarwilayah yang cukup lebar. Selain itu, perlu diwaspadai dampak reformasi subsidi energi yang berlanjut terhadap inflasi (TTL dan LPG) karena saat ini masih mendapat subsidi cukup besar.

Pencapaian sasaran inflasi $3,5\pm 1\%$ pada tahun 2018 memerlukan “*extra effort*” dari semua pihak. Setiap komponen penyumbang inflasi perlu dijaga agar bergerak dalam tren yang menurun (*disinflation path*) sehingga sasaran inflasi ke depan dapat dicapai secara berkelanjutan. Untuk itu, dikarenakan waktu yang tersedia untuk mencapai sasaran inflasi tersebut sangat singkat, Bank Indonesia maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bekerja lebih keras lagi dan berkoordinasi lebih intens.

Pengendalian inflasi yang terstruktur dan terintegrasi disusun dalam *Roadmap Pengendalian Inflasi*, yang meliputi tingkat nasional dan daerah dan disusun berdasarkan aspek kewilayahan (pulau) sesuai karakteristik inflasi masing-masing. Masing-masing *roadmap* pengendalian inflasi (nasional dan daerah) memuat identifikasi permasalahan yang disertai dengan solusi jangka pendek (2015-2016)

Challenges to inflation control come from structural issues and big subsidies of several energy commodities. Several structural issues include (i) the limited increase in domestic economy capacity, (ii) dependency on natural resources-based exports and imported raw materials, (iii) food production which is vulnerable against shocks, (iv) inefficient market micro structure which creates high enough disparity between producers and consumers, (v) fulfillment of national energy needs is dependent on import of Fuel and Liquid Petroleum Gas (LPG), and (vi) The weak connectivity between regions which causes high disparity between regions. In addition, the impact of continued energy subsidy reform to inflation (electricity tariff and LPG) because they still receive quite big subsidy.

The achievement of inflation target of $3.5\pm 1\%$ in 2018 needs extra effort from all parties. Each inflation contributing component must be maintained to move in disinflation path so that inflation target going forward can be reached in a sustainable way. Due to the short time available to reach the inflation target, Bank Indonesia and the Central Government and Regional Governments must work harder and make more intensive coordination.

A structured and integrated inflation control is outlined in the Inflation Management Roadmap, covering national and regional levels and is outlined based on regional aspects (islands) according to each inflation characteristic. Each inflation management roadmap (national and regional) consists of identification of problems followed by short-term solutions (2015-2016)

dan jangka menengah (2017-2018). Di dalam *roadmap* nasional disampaikan peran daerah yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan program pengendalian inflasi. Sebaliknya, di dalam *roadmap* daerah dicantumkan dukungan pemerintah pusat dalam menunjang pencapaian pengendalian inflasi daerah, karena terdapat beberapa kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

and medium-term solutions (2017-2018). The national roadmap states that regional role is needed to support the success of inflation management program. Meanwhile, the regional roadmap states the needs of central government support to achieve regional inflation control, because there are policies which are the domain of central government.



Roadmap pengendalian inflasi inti mencakup pengelolaan permintaan domestik, peningkatan kapasitas ekonomi, pengelolaan stabilitas nilai tukar rupiah, dan pengelolaan ekspektasi inflasi. Pengelolaan permintaan domestik dilakukan melalui bauran kebijakan makro, sementara untuk peningkatan kapasitas ekonomi Pemerintah melaksanakan berbagai program infrastruktur serta menerapkan kebijakan fiskal yang akomodatif. Nilai tukar diarahkan agar sesuai dengan fundamentalnya melalui bauran kebijakan makro dan pendalaman pasar keuangan valuta asing (valas). Selain itu, ekspektasi inflasi juga terus dijaga dengan komunikasi kebijakan.

Core inflation management roadmap includes domestic demand management, economic capacity increase, management of Rupiah exchange rate stability, and inflation expectation management. Domestic demand management is pursued through macro policy mix, while to increase economic capacity the Government performs various infrastructure programs and implementing accommodative fiscal policy. Exchange rate is aimed to be in line with the fundamental through the mix of macro policy and foreign exchange (forex) financial market deepening. In addition, inflation expectation is maintained by policy communications.

Roadmap pengendalian inflasi *volatile food* mencakup peningkatan produksi dan stok pangan, perbaikan struktur pasar, dan perbaikan mekanisme penetapan harga. Upaya peningkatan produksi dan stok pangan dilakukan dengan menambah produksi melalui penambahan area pertanian, perbaikan irigasi, penyediaan sarana produksi, peningkatan bibit melalui intervensi pemerintah, dan penguatan peran BULOG. Struktur pasar dan *price setting* diperbaiki melalui efisiensi tata niaga dan pengembangan sistem penetapan harga.

Roadmap pengendalian inflasi *administered prices* mencakup implementasi reformasi kebijakan subsidi energi secara konsisten, diversifikasi konsumsi energi, dan *demand management*. Reformasi subsidi energi mencakup penyesuaian harga energi dalam negeri sesuai harga pasar yang dikomunikasikan kepada masyarakat. Selain itu, diversifikasi energi dilakukan dengan mendorong penggunaan transportasi Bahan Bakar Gas (BBG) dan peningkatan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT). Dari *demand side management*, dikeluarkan peraturan daerah tentang kepemilikan mobil dan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor pribadi serta optimalisasi transportasi umum.

Roadmap Pengendalian Inflasi ditujukan sebagai acuan pelaksanaan tugas TPI dan TPID. *Roadmap* tersebut telah melalui pembahasan di tingkat pimpinan Kementerian/Lembaga anggota TPI dan Pokjanas TPID pada Desember 2015 dan telah disampaikan ke seluruh pemimpin daerah. Selanjutnya, untuk dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas TPI dan TPID, program kerja dalam *roadmap* tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) baik pusat maupun daerah.

The inflation management roadmap of volatile food covers food stocks and production increase, market structure improvement, and price setting mechanism improvement. The efforts to increase production and food stocks are made by adding production through additional farming areas, irrigation repair, availability of production tools, seed enhancement through government intervention, and strengthening the role of BULOG. Market structure and price setting are improved through trade efficiency and development of price setting system.

The inflation management roadmap of administered prices covers implementation of energy subsidy policy reform in a consistent manner, diversification of energy consumption, and demand management. Energy subsidy reform covers energy price adjustment domestically according to market price communicated to the people. In addition, energy diversification is made by pushing the use of gas fuel (BBG) and Renewable Energy (EBT). From demand side management, a regional regulation is issued on car ownership and the implementation of progressive tax for private motor vehicles as well as optimizing public transports.

Inflation Management Roadmap is aimed as the reference for task implementation of TPI and TPID. The roadmap has gone through discussions in the level of Ministries/Institutions members of TPI and TPID National Working Group in December 2015 and has been submitted to all regional leaders. In addition, to become reference for task implementation of TPI and TPID, working programs in the roadmap are expected to become parts of the Government Working Plans (RKP) in central and regional levels.

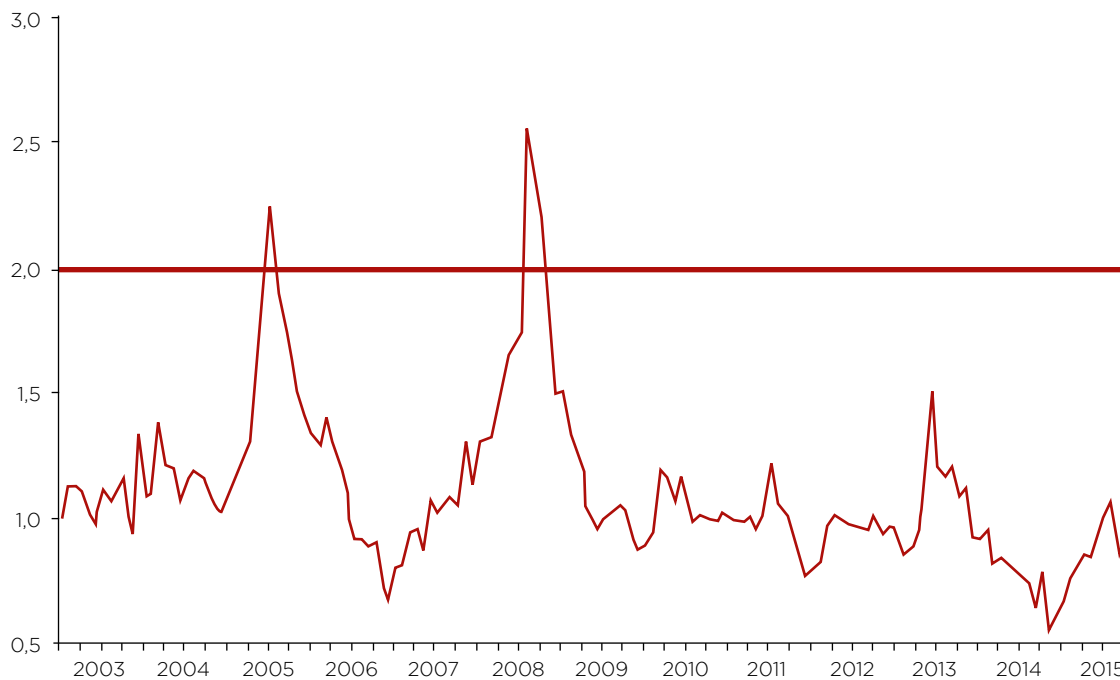
MEMANTAPKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Sistem keuangan Indonesia relatif stabil dan terkendali sepanjang tahun 2015 meski dibayangi gejolak pasar keuangan global dan perlambatan ekonomi domestik. Hal itu tergambar dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) tahun 2015 sebesar 0,93, yang masih jauh dari batas mengkhawatirkan di level 2. Namun demikian, angka itu meningkat dibandingkan ISSK tahun 2014 sebesar 0,79.

STRENGTHENING FINANCIAL SYSTEM STABILITY

Indonesian financial system was relative stable and manageable throughout 2015 despite overshadowed by global financial market volatility and domestic economic slowdown. This was seen from the Financial System Stability Index (ISSK) of 2015 at 0.93, far below the worrying level at 2. However, the number increased from ISSK in 2014 of 0.79.

Grafik 4. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
Graphic 4. Financial System Stability Index



140

198

216

233

Tingkat ISSK yang masih baik tersebut ditopang oleh rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan yang meningkat menjadi 21,33% pada tahun 2015, dari 19,40% pada tahun 2014, jauh di atas batas minimum yang dipersyaratkan sebesar 8%. Dengan tingkat permodalan yang tinggi ini, perbankan nasional diperkirakan masih mampu menyerap risiko-risiko utama seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar (suku bunga, nilai tukar, dan harga SBN).

Belum pulihnya perekonomian domestik yang diikuti dengan peningkatan persepsi risiko kredit membatasi pertumbuhan industri perbankan. Kondisi likuiditas perbankan relatif masih terjaga sejalan dengan ekspansi keuangan pemerintah terutama pada semester II 2015 yang mendorong kenaikan Alat Likuid (AL) bank. Sejalan dengan hal tersebut, risiko likuiditas cenderung menurun, antara lain tercermin dari relatif stabilnya *buffer* likuiditas perbankan, yakni GWM Primer dan GWM Sekunder. Namun demikian, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan sumber pendanaan utama perbankan Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 7,26% pada akhir tahun 2015 dari 12,29% di tahun sebelumnya terutama pada komponen giro dan deposito.

Dari sisi intermediasi perbankan, pertumbuhan kredit perbankan tercatat melambat menjadi 10,45% pada akhir tahun 2015 dari 11,58% pada tahun 2014, namun dengan risiko kredit yang tetap terjaga sebagaimana terlihat dari rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) sebesar 2,49%, meski sedikit meningkat dibandingkan dengan posisi NPL akhir tahun 2014 sebesar 2,16%. NPL terutama terjadi pada sektor pertambangan, pengangkutan, dan perdagangan.

Perlambatan kinerja juga dialami oleh Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan pasar modal. IKNB secara umum menunjukkan penurunan kinerja pada tahun 2015, yang tercermin dari menurunnya pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan, industri asuransi, dan perusahaan dana pensiun. Selain itu, terjadi peningkatan risiko yang tercermin pada naiknya rasio pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan menjadi 1,45% dari 1,41% pada akhir tahun 2014.

The good ISSK level was supported by Capital Adequacy Ratio (CAR) of banks which rose to 21.33% in 2015, from 19.40% in 2014, far above the minimum requirement of 8%. With this high capital level, Indonesian banks were expected to be able to absorb major risks such as credit risk, liquidity risk, and market risk (interest rate, exchange rate, and government bond (SBN) price).

Domestic economy which hadn't recovered was followed by increasing credit risk perception that limited the banking industry growth. Banking liquidity was relatively maintained in line with the government's financial expansion particularly in the second half of 2015 which boosted the increase in bank liquid assets. In line with that, liquidity risk tended to decline, which among others was reflected in the relative stable banking liquidity buffer, which were the Primary GWM and Secondary GWM. However, third party funds (DPK) which were the main source of funding for Indonesian banks saw growth slowdown to 7.26% at the end of 2015 from 12.29% in the previous year especially in the current account and deposit components.

On bank intermediary functions, bank lending growth was recorded slowing to 10.45% at the end of 2015 from 11.58% in 2014, but with manageable credit risk as can be seen in the Non-Performing Loan (NPL) ratio of 2.49%, despite increasing slightly from the NPL position at the end of 2014 at 2.16%. NPL mainly happened in the mining, transportation, and trade sectors.

Non-Bank Financial Industry (IKNB) and stock market also suffered a slowdown. IKNB generally showed a performance decline in 2015, as reflected by the drop in assets growth of financing firms, insurance industry, and pension funds. In addition, there was an increase of risk as reflected by the rise in Non-Performing Financing (NPF) of financing firms to 1.45% from 1.41% at the end of 2014.

Makroprudensial, Mandat Bank Indonesia untuk Stabilitas Sistem Keuangan

Macroprudential, Bank Indonesia's Mandate for Financial System Stability

Kebijakan makroprudensial menjadi salah satu isu utama setelah Krisis Keuangan Global tahun 2007/2008, yang masih menyisakan dampak pada perekonomian global hingga sekarang. Otoritas dunia menganggap pengelolaan risiko sistem keuangan melalui kebijakan makroekonomi, moneter, fiskal, serta pengaturan dan pengawasan mikroprudensial saja tidak cukup untuk mencegah krisis. Semakin canggihnya perkembangan produk keuangan, perilaku ambil risiko akibat dari motif cari untung yang sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat mungkin, serta semakin terintegrasinya sistem keuangan global menyebabkan perlunya tambahan kerangka berpikir yang terfokus pada sistem keuangan secara keseluruhan. Kerangka berpikir inilah yang dikenal dengan istilah makroprudensial.

Kebijakan makroprudensial memiliki kaitan yang erat dengan fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang moneter dan sistem pembayaran, karena jalur transmisi kebijakan moneter dilakukan melalui sistem keuangan terutama industri perbankan dan sistem pembayaran. Selain itu, sebagai *Lender of the Last Resort*, Bank Indonesia juga berkepentingan untuk memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mencegah peningkatan risiko sistemik dan/atau mengurangi risiko sistemik, yang pada gilirannya akan mencegah terjadinya krisis keuangan.

Mandat kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan kebijakan makroprudensial tentunya juga mempertimbangkan eratnya keterkaitan tersebut. Pada sektor moneter, kebijakan makroprudensial dapat turut menjaga stabilitas harga, sementara pada sistem

Macroprudential policy became one of the main issues following the 2007/2008 Global Financial Crisis, which still leaves an impact to the global economy currently. The world authorities consider that financial system risk management through macroeconomic, monetary, fiscal policies, as well as microprudential regulation and supervision are not enough to prevent crisis. The development of sophisticated financial products, risk taking behavior to gain as much profits as possible in a short time, and integrated global financial system lead to the need to have an additional framework which focuses on financial system as a whole. This framework is known as macroprudential.

Macroprudential policy has close relations with Bank Indonesia's functions as the authority in monetary and payment system, as the transmission of monetary policy is made through the financial system particularly the banking industry and payment system. In addition, as Lender of the Last Resort, Bank Indonesia has an interest to monitor and maintain financial system stability in preventing increasing systemic risk and/or reducing systemic risk, which will eventually prevent financial crisis.

The mandate to Bank Indonesia to implement macroprudential policy also considers the close relations. In the monetary sector, macroprudential policy can help maintaining price stability, while in the payment system, macroprudential supervision can help

pembayaran, pengawasan makroprudensial dapat membantu menjaga kelancaran operasional sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral juga memiliki kapasitas, baik pengetahuan institusional maupun keahlian, dalam memantau dan menilai kondisi makroekonomi baik global maupun domestik, serta memiliki jaringan internasional dengan bank sentral lainnya.

Pelaksanaan kebijakan makroprudensial bukan merupakan hal yang baru bagi Bank Indonesia. Pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan di bidang makroprudensial telah dilakukan sejak tahun 2003¹ dan tugas ini menjadi semakin penting setelah fungsi pengaturan dan pengawasan mikroprudensial perbankan dialihkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan dan pengawasan makroprudensial ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.

Dalam pengaturan makroprudensial, Bank Indonesia menggunakan sejumlah instrumen makroprudensial dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan *cross-section* dan pendekatan *time-series*. Pendekatan *cross-section* mengatasi risiko konsentrasi dan penularan (*contagion*), sedangkan pendekatan *time-series* mengatasi terjadinya akumulasi terbentuknya (*build up*) risiko sistemik yang berasal dari perilaku prosiklikalitas dari institusi keuangan dan pelaku pasar keuangan. Beberapa contoh instrumen makroprudensial yang telah diterapkan Bank Indonesia adalah ketentuan Giro Wajib Minimum *Loan to Funding Ratio* (GWM LFR) dan ketentuan *Loan to Value* (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dan *down payment* (DP) untuk kredit kendaraan bermotor (KKB), serta ketentuan *Countercyclical Capital Buffer* (CCB).

¹ Bank Indonesia mulai berperan aktif dalam mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia sejak tahun 2003. Upaya menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu mikroprudensial dan makroprudensial. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal era tahun 2000, secara implisit Bank Indonesia telah memperhitungkan dan menyadari pentingnya aspek makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

maintaining the swift operations of payment system. In addition, Bank Indonesia as the central bank also has the capacity, institutional knowledge or expertise, to monitor and evaluate macroeconomic conditions both globally and domestically, as well as having international network with other central banks.

The implementation of macroprudential policy is not a new thing for Bank Indonesia. The implementation of regulation and supervision in macroprudential has been done since 2003¹ and this task becomes more important since the function of banking microprudential regulation and supervision is transferred from Bank Indonesia to the Financial Services Authority. Macroprudential regulation and supervision is aimed at preventing and reducing systemic risk, pushing for a balanced intermediary function, as well as increasing efficiency of financial system and financial access.

In macroprudential regulation, Bank Indonesia uses some macroprudential instruments with two approaches: cross-section approach and time-series approach. Cross-section approach resolves concentration and contagion risk, while time-series approach resolves the build up of systemic risk stemming from procyclicality behavior of financial institutions and financial market players. Several macroprudential instruments that have been implemented by Bank Indonesia are the Minimum Reserve Requirement Loan to Deposit (GWM-LDR) and Loan to Value (LTV) for mortgages (KPR) and down payment (DP) for auto loans (KKB) as well as Countercyclical Capital Buffer (CCB).

¹ Bank Indonesia's efforts in pushing for financial system stability in Indonesia have been intensified since 2003. The efforts to maintain financial system stability in Indonesia are conducted from two approaches, microprudential and macroprudential. This shows that since the beginning of 2000s, Bank Indonesia implicitly has calculated and realized the importance of macroprudential aspects in maintaining financial system stability.

Selain itu, Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial melalui surveilans (*surveillance*) sistem keuangan dan pemeriksaan (*on-site*). Surveilans ditujukan untuk memantau perkembangan kondisi sistem keuangan, serta kondisi makroekonomi dengan fokus pada faktor-faktor yang merupakan sumber risiko sistemik dan pemicunya. Hasil pemantauan selanjutnya digunakan untuk mendeteksi ketidakseimbangan (*imbalance*) dan kerawanan (*vulnerabilities*) yang memiliki dampak sistemik. Pemantauan terhadap lembaga keuangan diutamakan pada *Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)*² dan konglomerasinya. Untuk memastikan adanya risiko sistemik yang bersumber dari kegiatan usaha bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan (*on-site*) terhadap D-SIB dan/atau bank lainnya yang memiliki *common exposure* yang berpotensi memberikan dampak sistemik.

Kerangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial sebagai implementasi mandat dan kewenangan Bank Indonesia diatur secara tegas dalam Peraturan Bank Indonesia³. Dalam rangka mendukung mandat sebagai otoritas kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia memandang penting upaya penguatan koordinasi makroprudensial – mikroprudensial antara Bank Indonesia dan OJK. Kerja sama dan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dilakukan dengan prinsip dasar yaitu bersifat kolaboratif, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, menghindari duplikasi, melengkapi pengaturan sektor keuangan dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan OJK yang semuanya dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkesinambungan.

Koordinasi dan kerja sama dengan otoritas lainnya juga dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai upaya mendukung SSK. Koordinasi Bank

In addition, Bank Indonesia conducts macroprudential supervision through surveillance of financial system and on-site examination. Surveillance is aimed at monitoring the development of financial system conditions, as well as macroeconomic conditions by focusing on the factors of systemic risk sources and triggers. The next monitoring result is used to detect imbalance and vulnerabilities which have systemic impact. Monitoring to financial system is mainly aimed at Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)² and its conglomerations. To ensure a systemic risk is coming from a bank's business activities, Bank Indonesia can do on-site examination to D-SIB and/or other banks with common exposure that potentially create systemic impact.

The framework of macroprudential regulation and supervision as the implementation of Bank Indonesia's mandate and authority is stated clearly in the Bank Indonesia Regulation³. In supporting the mandate as macroprudential policy authority, Bank Indonesia sees the importance of strengthening macroprudential-microprudential coordination between Bank Indonesia and FSA. The cooperation and coordination between Bank Indonesia and FSA is made in the basic principles of being collaborative, increasing efficiency and effectiveness, avoiding duplications, completing financial sector regulations and ensuring the smoothness of task implementation of Bank Indonesia and FSA, all of which are performed in creating a stable and sustainable financial system.

Coordination and cooperation with other authorities are also performed by Bank Indonesia to support SSK. Coordination

² D-SIB merupakan bank yang karena ukuran aset, modal, kewajiban, dan luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

³ Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.

² D-SIB is a bank which due to asset size, capital, obligation, and network reach, or transaction complexity of banking services, as well as relations with financial sector can cause the failure of partially or whole of other banks or financial services sector, either operation or financial wise, if the bank has trouble or failure.

³ Bank Indonesia Regulation No. 16/11/PBI/2014 on Macroprudential Supervision and Regulation.

Indonesia dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sudah berjalan dari 2009⁴ kemudian diperluas menjadi: (i) Penyelesaian bank gagal berupa pencabutan izin usaha; (ii) Pertukaran data dan/atau informasi; (iii) Pengembangan kompetensi pegawai; (iv) Penelitian, kajian, dan/atau *survey* bersama; (v) Sosialisasi dan/atau edukasi bersama; (vi) Penugasan pegawai; dan/atau (vii) Penanganan pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses keuangan.

Pada ruang lingkup yang lebih luas, Bank Indonesia, OJK dan LPS serta Kementerian Keuangan telah membentuk Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sebagai upaya menjaga SSK. Dalam forum tersebut, secara jelas diatur mengenai koordinasi dan peran masing-masing pihak baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis. Upaya menjaga SSK tersebut mencakup ruang lingkup koordinasi dan tugas masing-masing anggota, Protokol Manajemen Krisis (PMK), serta pertukaran data dan informasi antar anggota KSSK. Setiap institusi anggota KSSK bertanggung jawab atas hasil *surveillance* dan asesmen sub-protokol sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Selain itu, untuk mencapai sinergi dan harmonisasi dalam menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan, Pemerintah beserta Otoritas terkait (anggota KSSK) telah melakukan pengaturan *institutional arrangements* yang mengikat secara hukum dalam bentuk Undang-undang⁵. Ke depan, Undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam menciptakan dan memelihara SSK serta melengkapi peraturan perundangan yang telah ada.

between Bank Indonesia and Deposit Insurance Agency (LPS) which has run since 2009⁴ is expanded into: (i) Failed bank settlement in form of business license revocation; (ii) Data and/or information exchange; (iii) Employee competence development; (iv) Research, study, and/or joint survey; (v) Joint education and/or socialization; (vi) Employee placement; and/or (vii) Other task implementation handling according to existing regulations, among others supporting the implementation of Non Cash National Movement (GNNT), financial market deepening, and financial access expansion.

In a bigger scope, Bank Indonesia, OJK, and LPS as well as the Finance Ministry have formed a Financial System Stability Coordination (FKSSK) for crisis prevention and handling as part to maintain SSK. In the forum, it is clearly regulated the coordination and role of each parties in normal or not normal conditions for crisis prevention and handling. The efforts to maintain SSK cover scope, coordination, and task of each member. The Crisis Management Protocol (PMK), as well as data and information exchange among KSSK members. Every KSSK member institution is responsible for the surveillance and assessment of sub-protocol according to each task and authority. In addition, to achieve synergy and harmonization in maintaining and guarding financial system stability, the Government with related Authorities (KSSK members) have conducted institutional arrangements which are legally binding in form of Law⁵. Going forward, the Law is expected to strengthen coordination and cooperation in creating and maintaining SSK as well as completing existing regulations.

⁴ Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (No.11/55/KEP/GBI/2009)/(No.KEP.026/DK/X/2009) tanggal 22 Oktober 2009 tentang Koordinasi dan Pertukaran Data dan Informasi Dalam Rangka Mendukung Efektivitas Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

⁵ Undang Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan pada tanggal 15 April 2016 (UU PPKSK).

⁴ Joint Letter Between Bank Indonesia Governor and Chairman of Board of Commissioners of Deposit Insurance Agency No. dated 22 October 2009 on Coordination and Data and Information Exchange in Supporting Effectiveness of Task Implementation of Bank Indonesia and Deposit Insurance Agency.

⁵ Law No. 9 Year 2016 on Financial System Crisis Prevention and Handling dated 15 April 2016 (UU PPKSK).

Kontraksi juga terjadi pada bursa saham dan pasar obligasi seiring dengan meningkatnya risiko di pasar keuangan. Indikator perlambatan bursa saham terlihat dari pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turun ke level 4.593,01 pada akhir tahun 2015, lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun 2014 sebesar 5.226,95. Sementara di pasar obligasi, perlambatan terjadi seiring dengan meningkatnya risiko sebagaimana tercermin pada kenaikan imbal hasil (*yield*) SBN untuk semua tenor, dengan peningkatan *yield* terbesar pada tenor pendek.

Di tahun 2015, respons kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia di bidang stabilitas sistem keuangan diarahkan untuk mendukung tercapainya stabilitas makroekonomi serta pertumbuhan ekonomi. Dukungan tersebut dicapai melalui pelaksanaan asesmen dan *surveillance*, serta pemeriksaan makroprudensial yang dilaksanakan secara berkala. Selain itu, dilakukan pula pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan namun dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.

Kegiatan asesmen dan *surveillance* terhadap sistem keuangan ditujukan guna mengidentifikasi sumber-sumber ketidakseimbangan dan kerentanan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Asesmen dilakukan secara reguler menggunakan *tools stress test* untuk mengukur daya tahan sistem keuangan Indonesia dalam menghadapi berbagai risiko, terutama ketahanan permodalan (CAR) bank yang mencakup risiko-risiko utama termasuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Sejauh ini, hasil *stress test* dengan skenario sangat buruk menunjukkan bahwa dapat terjadi penurunan kondisi perbankan dibanding tahun sebelumnya, namun secara umum industri perbankan masih memiliki ketahanan yang cukup tinggi seperti tercermin pada CAR yang masih berada di atas batas aman. Sementara dalam hal terjadi pemburukan ekonomi yang sangat signifikan, hasil *stress test* yang terintegrasi menunjukkan terdapat beberapa bank yang masih perlu menjaga CAR-nya di atas *risk profile*.

Stock market and bond market also contracted along with the increase in risk in the financial market. Indicator of stock market slowdown can be seen from the decrease in Jakarta Composite Index (JCI) to the level 4,593.01 at the end of 2015, lower than the position at the end of 2014 at 5,226.95. Meanwhile in the bond market, there was slowdown along with the increase in risk as reflected in the yield of SBN in all tenors, with the biggest yield increase in short tenor.

In 2015, policy response pursued by Bank Indonesia in financial system stability was aimed at supporting macroeconomic stability and economic growth. The support was achieved through the implementation of assessment and surveillance, as well as macroprudential assessment held regularly. In addition, macroprudential policy was loosened to increase bank intermediary functions but still withholding prudential principles.

Assessment and surveillance activities to the financial system was aimed at identifying sources of imbalances and vulnerability which potentially could create systemic risk. Assessments were made regularly using stress test tools to measure the tolerance of Indonesian financial system in facing various risks, especially banks' capital resilience (CAR) which covered major risks including credit risk, market risk, and liquidity risk. So far, stress test results with worst case scenario showed that there was a decline in banking conditions compared to the previous year, however generally the banking industry still had strong resilience as reflected by the CAR which was above safe limit. Meanwhile in the case of significant economic deterioration, integrated stress test results showed that there were several banks which needed capital injection to keep their CAR above risk profile.



Pengertian Loan to Value/ Financing to Value

Rasio *Loan to Value* adalah angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit berdasarkan harga penilaian terakhir.

Rasio *Financing to Value* adalah angka rasio antara nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir.

Loan to Value/Financing to Value Definition

Loan to Value Ratio is the amount of loans a bank can give to consumers calculated from the percentage of collateral value according to latest appraisal.

Financing to Value Ratio is the amount of financings a bank can give to consumers calculated from the percentage of collateral value according to latest appraisal.

Menyikapi adanya tren perlambatan kredit, Bank Indonesia melakukan pelonggaran beberapa kebijakan makroprudensial untuk mendorong intermediasi perbankan, antara lain dengan menaikkan rasio *Loan to Value* (LTV) atau rasio *Financing to Value* (FTV) kredit properti dan menurunkan uang muka (*down payment*) kredit kendaraan bermotor. Sementara, guna memperluas basis sumber pendanaan intermediasi perbankan, Bank Indonesia juga mendorong penerbitan Surat-Surat Berharga (SSB) yang dimasukkan dalam perhitungan *Loan to Funding Ratio* (LFR) untuk menggantikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Kebijakan ini memberikan ruang intermediasi yang lebih besar kepada perbankan sehingga pendanaannya tidak hanya bergantung pada DPK. Bank Indonesia juga memberikan insentif peningkatan batas atas target LFR bagi bank yang dapat memenuhi target penyaluran kredit kepada UMKM dengan rasio NPL yang terjaga. Pelonggaran kebijakan makroprudensial tersebut diharapkan dapat mendorong pemulihan pertumbuhan kredit yang sempat mencapai titik terendahnya pada level 9,7% (yoy) pada Juli 2015.

Guna mengantisipasi kerugian dari pertumbuhan kredit yang berlebihan, Bank Indonesia menerapkan kebijakan *Countercyclical Buffer*, yaitu penambahan modal penyangga di saat kondisi ekonomi sedang baik (*boom period*). Kebijakan itu juga harus diimbangi dengan pembentukan penyangga modal lainnya, berupa *Capital Conservation Buffer* dan *Capital Surcharge*. *Capital Conservation Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga jika bank merugi pada periode krisis, sementara *Capital Surcharge* merupakan

Facing the trend of credit slowdown, Bank Indonesia loosened several macroprudential policies to boost bank intermediary, such as by raising Loan to Value (LTV) ratio or Financing to Value (FTV) ratio of property loans and reducing down payment of automotive loans. Meanwhile, to expand the base of bank intermediary funding source, Bank Indonesia also pushed the issuance of securities (SSB) to be included in the calculation of Loan to Funding Ratio (LFR) to replace Loan to Deposit Ratio (LDR). This policy provided bigger intermediary room to banks so the funding did not only depend to third party funds (DPK). Bank Indonesia also provided incentive of increasing the limit of LFR for banks which met the target of loan channeling to MSMEs with manageable NPL ratio. The loosening of macroprudential policy was expected to boost lending growth recovery which reached its lowest point at 9.7% (yoy) in July 2015.

To anticipate losses from excessive lending growth, Bank Indonesia implemented Countercyclical Buffer policy, which is an increase in capital buffer during economic boom period. The policy was also completed by other capital buffer formations, the Capital Conservation Buffer and Capital Surcharge. Capital Conservation Buffer is additional capital which functions as buffer when the banks suffer losses during crisis, while Capital Surcharge is additional capital required for banks to reduce negative impact to the financial

tambahan modal yang diwajibkan bagi bank guna mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian jika terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik.

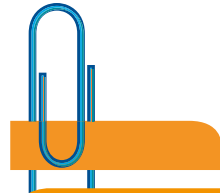
Pemeriksaan makroprudensial yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam menelaah, menilai, dan meneliti secara komprehensif kondisi dan praktik yang dilakukan bank yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Pemeriksaan tersebut didasarkan pada informasi spesifik mengenai risiko-risiko masing-masing bank yang jika terakumulasi dapat berdampak tidak saja secara individual, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan untuk menilai kepatuhan bank dalam melaksanakan dan mematuhi berbagai ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Pada tahun 2015, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap beberapa bank besar dan bank lainnya untuk melihat responsnya terhadap kondisi perekonomian, antara lain penyebab volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dan ketahanan likuiditas bank serta kesiapan bank dalam melakukan *stress test*.

Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial terhadap sistem keuangan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, dengan tiga tahapan, yaitu *surveillance*, pemeriksaan, dan tindak lanjut.

system stability and economy if there is a failure in bank with systemic risk.

Macroprudential assessment conducted by Bank Indonesia is aimed at collecting information needed to make comprehensive analysis, assessment, and review of all conditions and practices conducted by banks which potentially could create systemic risk. The assessment is based on specific information on the risks of each bank which if accumulated can impact not only individual bank, but also create aftereffects. In addition, assessment is made to evaluate bank compliance in implementing and complying to various regulations issued by Bank Indonesia. In 2015, Bank Indonesia assessed several big banks and other banks to check the response to economic conditions, among others the cause of Rupiah volatility against the USD and bank liquidity strength as well as bank preparation in performing stress test.

Bank Indonesia conducts macroprudential surveillance to the financial system to prevent and reduce systemic risk, with three stages: surveillance, examination, and action plan.



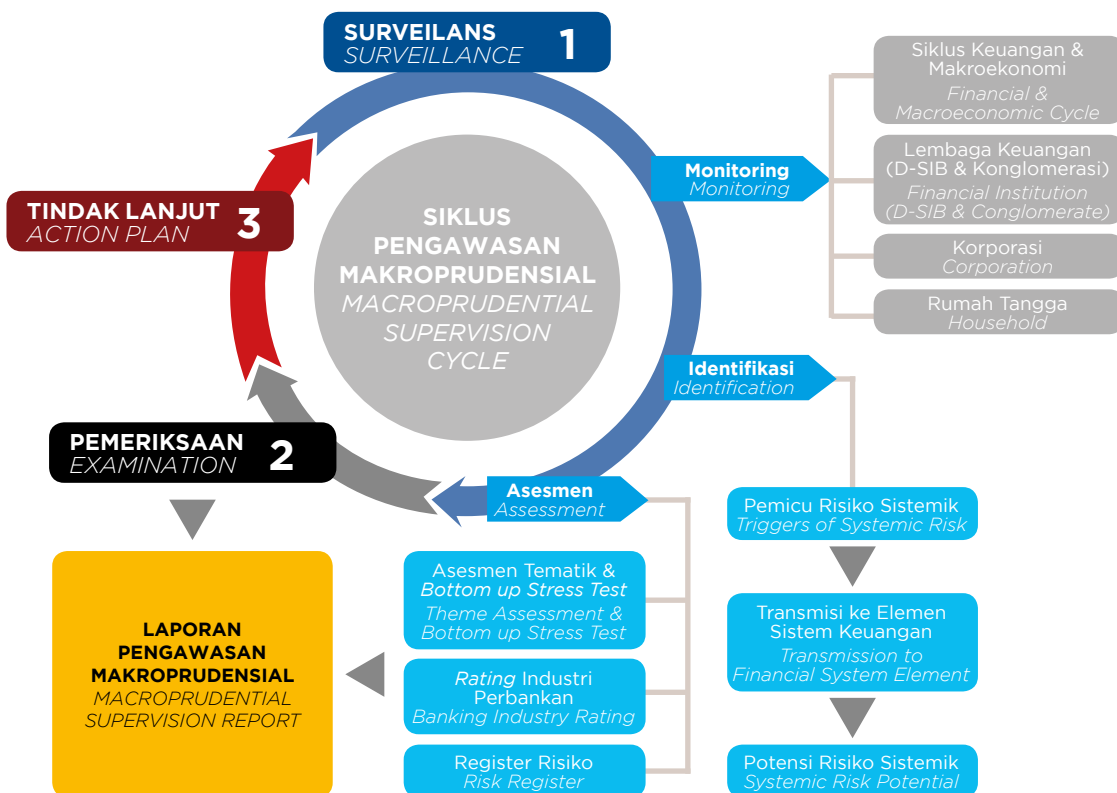
Pengertian Giro Wajib Minimum/ Loan to Deposit Ratio

GWM LDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh bank dengan LDR Target.

Minimum Reserve Requirement/ Loan to Deposit Ratio Definition

GWM LDR is the minimum placement a bank should keep in form of Current Account in Bank Indonesia based on certain percentage of Third Party Funds, calculated from the difference between a bank's LDR and LDR Target.

Infografis 4. Siklus Pengawasan Makroprudensial
Infographic 4. Macroprudential Supervision Cycle



Surveillance dilakukan dalam rangka memonitor, mengidentifikasi, dan melakukan asesmen terhadap potensi risiko sistemik yang dapat timbul dalam sistem keuangan.

Surveillance is made by monitoring, identifying, and making assessment to systemic risk potentials which can arise in the financial system.

Monitoring dapat mencakup seluruh elemen dalam sistem keuangan, yaitu: lembaga keuangan bank dan non bank, khususnya yang memiliki potensi risiko sistemik, termasuk perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari bank yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Selain itu, pasar dan infrastruktur keuangan; serta sektor rumah tangga dan korporasi juga dapat menjadi objek monitoring. Monitoring terhadap korporasi dan rumah tangga penting dilakukan mengingat kedua sektor tersebut memiliki hubungan langsung dengan institusi keuangan dan potensi adanya dampak pada institusi keuangan atas permasalahan yang terjadi pada kedua sektor tersebut.

Monitoring can cover all elements in the financial system: bank and non-bank financial institutions, especially those with systemic risk potentials, including parent companies, affiliated companies, and subsidiaries of banks with potentials to create systemic risk. In addition, financial infrastructure and market; as well as household and corporation sectors can also become monitoring object. Monitoring to corporations and households is important because both sectors have direct relations with financial institutions and potentials of impact to financial institutions due to arising problems in the two sectors.

Dari hasil monitoring Bank Indonesia, akan dilakukan identifikasi dan asesmen untuk melihat apakah perlu dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut untuk mencegah adanya gangguan di sistem keuangan. Berdasarkan hasil pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia dapat memberikan rekomendasi dan/atau sanksi kepada bank yang dianggap memiliki potensi risiko.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai bagian dari proses pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas terkait lainnya dalam penentuan bank yang masuk kategori berdampak sistemik atau *Domestic Systemically Important Bank (DSIB)*. Bank Indonesia juga terus melanjutkan upaya memperkuat resiliensi pasar keuangan terhadap guncangan dan meningkatkan perannya sebagai sumber pembiayaan yang efisien. Sejalan dengan itu, sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pelaku pasar juga terus dilakukan secara berkelanjutan oleh Bank Indonesia. Program *financial literacy* (literasi keuangan) dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, tidak hanya dengan pelaku pasar tetapi juga melibatkan penegak hukum, lembaga arbitrase, auditor, dan lembaga terkait lainnya.

Bank Indonesia juga terus aktif berperan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional serta mendukung stabilitas sistem keuangan dan kestabilan harga.

Bank Indonesia mendorong perbaikan tata kelola lembaga sektor sosial melalui penyusunan standarisasi zakat dan wakaf internasional untuk meningkatkan efektivitas pengawasannya. Dengan perbaikan tata kelola lembaga sektor sosial, penyaluran dana zakat dan wakaf dapat meningkatkan perluasan akses keuangan, pemanfaatan dana murah untuk pemberdayaan UMK, dan pengelolaan aset produktif sebagai *underlying asset* bagi penerbitan obligasi syariah (sukuk) dalam rangka pendalaman pasar keuangan syariah.

Pada Oktober 2015, Bank Indonesia menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), yang menandakan peran aktif Indonesia sebagai poros pengembangan ekonomi syariah internasional. ISEF merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan keuangan syariah terbesar dan terdepan di Indonesia yang mengintegrasikan

From Bank Indonesia's monitoring results, there will be identification and assessment to see whether examination and follow-up are needed to prevent any disruption in the financial system. Based on macroprudential supervision results, Bank Indonesia can provide recommendations and/or sanctions to banks deemed having risk potentials.

In maintaining financial system stability as part of the macroprudential supervision process, Bank Indonesia coordinated with other relevant authorities in determining banks categorized as Domestic Systemically Important Bank (DSIB). Bank Indonesia also continued strengthening efforts to strengthen the financial market resilience to shocks and increase its role as efficient source of financing. In line with those, Bank Indonesia continuously performed socialization and education to market players. Financial literacy program was done comprehensively and integrated, not only with market players but also involving law enforcers, arbitrations, auditors, and other related institutions.

Bank Indonesia also actively played role in the sharia finance and economic development to increase its contribution to the national economy as well as supporting financial system stability and price stability.

Bank Indonesia support the improvement of social institution governance in social sector by setting the standardization of zakat and wakaf internationally to increase the effectiveness of supervision. By improving social sector governance, the disbursement of zakat and wakaf funds can increase financial access expansion, low-cost fund utilization for SME empowerment, and productive asset management as underlying assets for sharia bond (sukuk) issuance in move of sharia financial market deepening.

In October 2015, Bank Indonesia held the Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), indicating Indonesia's active role as the axis of international sharia economic development. ISEF is one of the largest and leading sharia finance and economic activities in Indonesia which integrates the development of financial

140

198

216

233

pengembangan sektor keuangan dan sektor riil. Kegiatan ini menunjukkan Indonesia mampu menjawab tantangan global terkait perkembangan keuangan syariah dunia dan relevansinya terhadap kesinambungan program pembangunan ekonomi yang inklusif. ISEF melibatkan berbagai lembaga dan institusi di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Kegiatan ISEF terdiri atas dua *event* besar yaitu Sharia Economic Forum dan Sharia Fair. Kegiatan Sharia Economic Forum meliputi diskusi inovasi struktur sukuk yang dapat mendorong keterkaitan antara sektor riil dan sektor keuangan, diskusi hasil kajian “Kunci Sukses Pengembangan Pesantren di Indonesia”, *public hearing* standar zakat kepada *stakeholder* zakat nasional maupun otoritas zakat internasional, dan pembahasan standar tata kelola wakaf dengan otoritas wakaf nasional dan internasional. Sementara itu, Sharia Fair menjadi sarana promosi untuk produk industri syariah dan jasa keuangan syariah.

Sejalan dengan cetak biru (*blueprint*) pendalaman pasar keuangan, pada 2015 Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan, pengaturan, dan program pendalaman pasar guna mendukung peningkatan aktivitas dan likuiditas transaksi di pasar valas maupun di pasar uang Rupiah.

Upaya mendorong terciptanya pasar uang yang lebih likuid dan dalam dilakukan dengan penyempurnaan mekanisme suku bunga penawaran antarbank (Jakarta Interbank Offered Rate/JIBOR). Melalui penyempurnaan aturan ini, seluruh pelaku pasar akan menggunakan suku bunga acuan yang sama untuk setiap tenor sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas transaksi di pasar uang.

Selama 2015 Bank Indonesia terus melakukan program dan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi di pasar uang, antara lain dengan mendorong transaksi lindung nilai (*hedging*) dengan merelaksasi ketentuan di pasar valas. Dengan ketentuan ini pelaku usaha didorong melakukan lindung nilai untuk transaksi valas sehingga dapat mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah dinamisnya kondisi ekonomi dan pergerakan nilai tukar di tahun 2015.

sector and real sector. This activity showed Indonesia can answer to global challenges related to the global sharia finance development and its relevance to the sustainability of inclusive economic development program. ISEF involves various agencies and institutions in the local, national, and international levels.

ISEF activities include two main events: Sharia Economic Forum and Sharia Fair. The Sharia Economic Forum covers discussion on sukuk structure innovations which can boost linkages between the real sector and financial sector, discussion on study results of “Key Success of Pesantren Development in Indonesia”, public hearing on zakat standard to national zakat stakeholders as well as international zakat authorities, and discussion on wakaf governance standard with national and international wakaf authorities. Meanwhile, Sharia Fair becomes promotional tools for sharia industry and sharia finance products.

In line with the blueprint of financial market deepening, in 2015 Bank Indonesia issued several policies, regulations, and market development programs to support the increase in activities and liquidity of transactions in forex market as well as Rupiah money market.

The improvement of Jakarta Interbank Offered Rate mechanisms was made to boost a more liquid and deeper money market. Through this regulation improvement, all market/economic players will use the same benchmark interest rate for every tenor to increase efficiency and reduce complexity in the money market.

Throughout 2015 Bank Indonesia kept performing programs and policies to increase economic stability and resilience in the money market, among others by pushing for hedging transactions by relaxing regulations in the forex market. With the regulations business players were encouraged to conduct hedging for forex transactions to help stabilize the rupiah amidst the dynamics in economic conditions and rupiah movement in 2015.

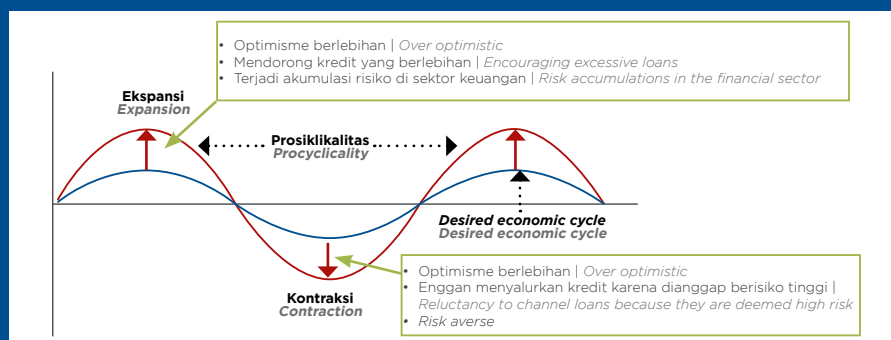
Upaya Memperkuat Ketahanan Perbankan

Efforts toward Strengthening Banking Resilience

Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di negara lain maupun di Indonesia berpotensi memengaruhi kondisi perbankan nasional. Belajar dari pengalaman krisis keuangan yang pernah terjadi, kemampuan bank dalam menyerap kerugian perlu ditingkatkan antara lain melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan sesuai standar internasional. Salah satu pengalaman yang dirasakan pada saat krisis adalah perilaku prosiklikalitas (*procyclicality*) kredit perbankan. Secara umum, prosiklikalitas adalah suatu kondisi yang ditandai oleh penyaluran kredit perbankan yang cenderung berlebihan pada saat fase ekonomi ekspansi (*boom*) dan melambat pada saat fase ekonomi kontraksi (*bust*) (Grafik 5). Pertumbuhan kredit yang berlebihan tersebut dapat menjadi salah satu faktor pendorong pembentukan risiko sistemik (*systemic risk*) yang dapat menyebabkan risiko kredit meningkat. Hal ini antara lain tercermin dari kenaikan rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada saat fase ekonomi kontraksi. Selain itu, pengalaman krisis juga memberikan pelajaran bahwa peraturan permodalan bank perlu responsif terhadap peningkatan risiko ketika periode ekonomi ekspansi.

Economic and financial crisis taking place in other countries or in Indonesia potentially impacts the national banking system. Learning from previous financial crises, the capability of banks in absorbing losses should be increased among others through the increase in quality and quantity of capital according to international standards. One of the experiences felt during crisis is the procyclicality behavior of bank lending. Generally, procyclicality is a condition signified by excessive bank lending disbursement during economic boom and slowing in economic bust (Graphic 5). Excessive credit growth can be one of the stimulating factors for systemic risk which can cause rising credit risk. This among others is reflected in the increase of Non Performing Loan (NPL) ratio during economic bust phase. In addition, crisis experiences also provide lessons that bank capital regulation should be responsive against increasing risks during economic boom.

Grafik 5. Prosiklikalitas
Graphic 5. Procyclicality



Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan ketahanan bank. Ketahanan tersebut dapat ditingkatkan antara lain dengan cara mengurangi penyaluran kredit yang berlebihan pada fase ekonomi ekspansi dan pada saat yang bersamaan membentuk tambahan modal (*buffer*) yang dapat digunakan oleh bank untuk mendukung penyaluran kredit serta menutupi kerugian yang mungkin terjadi pada saat ekonomi dalam fase kontraksi. Sehubungan dengan itu, dalam rangka memperkuat ketahanan bank dari sisi permodalan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) memperkenalkan tambahan modal (*buffer*) bagi bank yaitu *conservation buffer*, *countercyclical buffer* (CCB), dan *capital surcharge*.

Tambahan modal CCB merupakan instrumen kebijakan makroprudensial untuk mengurangi perilaku prosiklikalitas penyaluran kredit dan meningkatkan ketahanan bank. Kebijakan CCB bersifat *time varying* yakni besaran (*rate*) dan waktu pemberlakuan CCB bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi makroekonomi dan sistem keuangan. Pembentukan tambahan modal CCB dilakukan pada fase ekonomi ekspansi yaitu pada saat diindikasikan terdapat potensi risiko sistemik yang berasal dari pertumbuhan kredit yang berlebihan (*excessive credit growth*). Sementara itu, penurunan atau pelepasan (*release*) tambahan modal CCB yang telah dibentuk bank dapat dilakukan pada fase ekonomi kontraksi agar dapat digunakan bank antara lain untuk mendukung penyaluran kredit dan menutup kerugian.

Grafik 6 merupakan ilustrasi pembentukan dan pelepasan *buffer* CCB. Besaran (*rate*) CCB pada kisaran 0%-2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Namun pada kondisi tertentu kisaran *rate* CCB dapat ditetapkan berbeda dari kisaran tersebut. Kenaikan besaran CCB berlaku paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan. Sedangkan penurunan besaran CCB berlaku paling cepat sejak ditetapkan.

A policy which can increase bank resilience is needed to anticipate that. The resilience can be increased among others by reducing excessive credit growth during economic boom and at the same time building a capital buffer which the bank can use to cover credit disbursement as well as covering potential losses during economic bust. Related to that, in strengthening bank capital resilience the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) introduces capital buffer for banks: conservation buffer, countercyclical buffer, and capital surcharge.

CCB capital buffer is a macroprudential policy instrument to reduce procyclicality behavior in loan channeling and increasing bank resilience. The CCB policy is time varying, which means the rate and timing of CCB is dynamic and can be adjusted to the development in macroeconomic and financial system conditions. The development of CCB capital buffer is made during economic boom or when it is indicated there is a systemic risk potential stemming from excessive credit growth. Meanwhile, the release of CCB capital buffer a bank has formed can be made during economic bust among others to support credit channeling and cover losses.

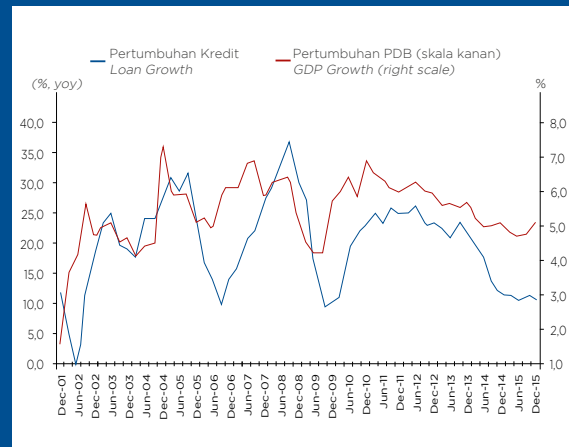
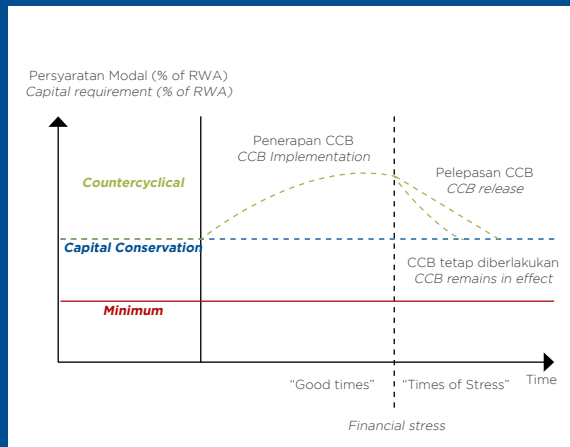
Graphic 6 is an illustration of the development and release of CCB buffer. CCB rate is at 0%-2.5% of Risk Weighted Assets. However in certain conditions the CCB rate can be set out of that range. The increase of CCB rate is effective the soonest 6 (six) months and the latest 12 (twelve) months after it is set. Meanwhile the decrease of CCB rate is effective the soonest after it is set.

Selanjutnya mengacu kepada pedoman BCBS mengenai implementasi CCB dan hasil kajian implementasi CCB di Indonesia, telah diterbitkan ketentuan mengenai kewajiban pembentukan *Countercyclical Buffer*. Kebijakan CCB ini perlu diimplementasikan di Indonesia mengingat adanya perilaku prosiklikal pada pertumbuhan kredit perbankan (Grafik 7).

Referring to the BCBS guideline on the implementation of CCB and its study results for Indonesia, a regulation has been issued on the requirement to build *Countercyclical Buffer*. The CCB policy needs to be implemented in Indonesia considering the procyclical behavior on bank lending growth (Graphic 7).

Grafik 6. Ilustrasi Pembentukan dan Pelepasan Buffer CCB
Graphic 6. Illustration of the Setup and Release of CCB Buffer

Grafik 7. Prosiklikalitas Pertumbuhan Kredit
Graphic 7. Procyclicality of Loan Growth



Berdasarkan kerangka di atas, keputusan implementasi CCB tidak bersifat mekanistik yakni tidak hanya didukung oleh informasi dari indikator utama dan indikator pelengkap yang bersifat kuantitatif, namun juga dikombinasikan dengan *judgment* yang bersifat kualitatif. Indikator utama berfungsi sebagai panduan (*buffer guide*) yang digunakan untuk menghitung besaran (*rate*) CCB. Saat ini indikator utama yang digunakan adalah gap kredit terhadap PDB. Sementara itu indikator pelengkap digunakan sebagai informasi pendukung untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari indikator utama, antara lain siklus keuangan, indikator makroekonomi, indikator perbankan, dan harga aset.

Based on the framework, the CCB implementation decision is not mechanistic or not supported by information of main indicator and supporting indicators which are quantitative, but also combined with judgement which is qualitative. The main indicators function as buffer guide used to calculate the CCB rate. Currently the main indicator used is the credit to GDP gap. Meanwhile supporting indicators are used as supporting information to complete information received from main indicators, among others financial cycle, macroeconomic indicators, banking indicators, and asset price.

CCB wajib dibentuk oleh bank umum konvensional dan bank umum syariah, termasuk kantor cabang bank asing (KCBA). Pembentukan tambahan modal CCB dilakukan bersama-sama dengan pembentukan tambahan modal (*buffer*) lainnya yakni *conservation buffer* dan *capital surcharge*

CCB is compulsory for conventional and sharia commercial banks, including foreign bank branches. The formation of CCB capital buffer is done in parallel with other buffers, conservation buffer and capital surcharge, which is formed

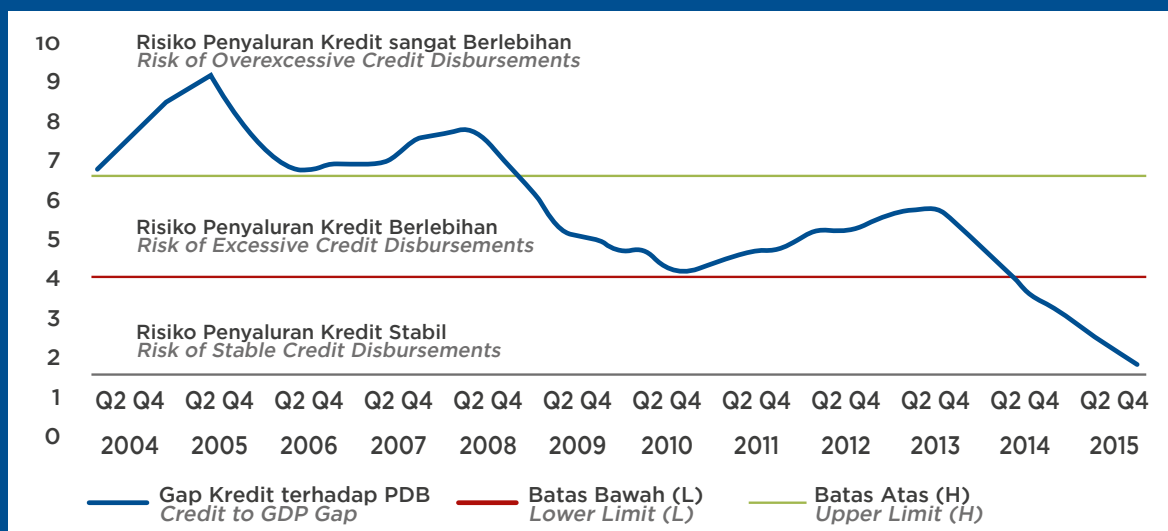
yang pemenuhannya dengan komponen Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1-CET 1*). Adapun pembentukan ketiga tambahan modal (*buffer*) tersebut dilakukan setelah pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko. Bank Indonesia akan melakukan evaluasi besaran (*rate*) dan waktu pemberlakuan CCB paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Melalui penerbitan ketentuan mengenai kewajiban pembentukan *countercyclical buffer*, Bank Indonesia telah menetapkan besaran (*rate*) CCB sebesar 0% per 1 Januari 2016, sehingga saat ini bank belum perlu membentuk tambahan modal CCB. Secara umum, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan belum terdapatnya pertumbuhan kredit yang berlebihan (sebagaimana ditunjukkan oleh indikator utama pada Grafik 8) yang dapat menyebabkan risiko sistemik, serta kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini masih berada dalam fase perlambatan (kontraksi).

with the components of *Common Equity Tier 1 (CET 1)*. The formation of those three buffers are compulsory after *Capital Adequacy Ratio (CAR)* based on risk profile. Bank Indonesia will evaluate the rate and timing of CCB at least 1 (once) in every 6 (six) months.

Through the regulation on the requirement to form *countercyclical buffer*, Bank Indonesia has decided the CCB rate of 0% per 1 January 2016, therefore banks are not required to form CCB capital buffer. Generally, the decision is made by considering there is not excessive credit risk yet (as shown by main indicator in Graphic 8) which can create systemic risk, as well as Indonesian economic conditions which are still in contraction phase.

Grafik 8. Gap Kredit terhadap PDB
Graphic 8. Credit to GDP Gap



Sebagai salah satu instrumen kebijakan makroprudensial, implementasi kebijakan CCB tidak terpisahkan dari ketentuan permodalan perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan CCB ini diharapkan dapat semakin memperkuat ketahanan perbankan Indonesia.

As one of the macroprudential policy instruments, the implementation of CCB policy is inseparable from the bank capital regulation issued by Financial Services Authority (OJK). The CCB policy is expected to further strengthen Indonesian banking resilience.

Disamping itu, pelaku usaha juga memiliki fleksibilitas lebih dalam melakukan transaksi valas. Selanjutnya, Bank Indonesia juga memfasilitasi kesepakatan dua BUMN pengguna valas terbesar yaitu PLN dan Pertamina dalam penggunaan fasilitas *hedging* dengan tiga bank BUMN (PT. Bank Mandiri, PT. Bank Negara Indonesia, dan PT. Bank Rakyat Indonesia).

Untuk mendukung pengembangan industri keuangan syariah, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan terkait Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan memfasilitasi kesepakatan *Mini Master Repo Agreement* (MRA) Syariah. Alternatif pemenuhan kebutuhan likuiditas perbankan syariah diperluas mencakup transaksi surat berharga syariah dengan janji pembelian kembali (*repurchase agreement*) atau Repo Syariah. Melalui pengaturan Repo Syariah ini, maka jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh bank syariah bertambah, melengkapi instrumen syariah yang sudah tersedia sebelumnya, yaitu Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SiKA).

MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada tahun 2015, tugas Bank Indonesia dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran dan efektivitas pengelolaan uang Rupiah berjalan dengan baik. Sistem pembayaran terselenggara dengan aman, efisien, dan andal, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Hal itu diimbangi dengan ketersediaan uang kartal dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan layak edar, serta proses distribusi yang tepat waktu.

In addition, business players had more flexibility in making forex transactions. Moreover, Bank Indonesia also facilitated agreements of two SOEs which were the largest forex users, PLN and Pertamina, in using hedging facilities with three SOE banks (PT. Bank Mandiri, PT. Bank Negara Indonesia, dan PT. Bank Rakyat Indonesia).

To support the development of sharia finance industry, Bank Indonesia improved the provisions related to Sharia Interbank Money Market (PUAS) and facilitated agreement related to Sharia Mini Master Repo Agreement (MRA). Alternatives to meet the needs of sharia banking liquidity were expanded to cover sharia bond transactions by selling sharia bonds with repurchase agreement or Sharia Repo. Through the Sharia Repo rules, there are more types of transactions for sharia banks, completing the existing sharia instruments: Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA) and Commodity Trade Certificate Based on Sharia Principles (SiKA).

MAINTAINING PAYMENT SYSTEM AND RUPIAH CURRENCY MANAGEMENT

In 2015, Bank Indonesia's task in maintaining a smooth payment system and effectiveness of Rupiah management went well. The payment system performed in safe, efficient, and reliable manner, while maintaining consumer protection aspect. This was followed by the availability of cash in sufficient amount, appropriate denominations and fit for circulation, as well as timely distribution process.



BI-RTGS dan SKNBI

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS) merupakan sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah dengan nominal besar yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) merupakan sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional dan dalam waktu tertentu.

BI-RTGS and SKNBI

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS) is a fund transfer system electronically between participants of BI-RTGS System in rupiah with large nominations whose settlement is made immediately per individual transaction.

Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI) is an electronic fund transfer system which covers debit and credit clearing whose transaction settlement is performed nationally and in certain timing.



BI-SSSS dan BI-ETP

Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.

Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP) merupakan sarana transaksi Bank Indonesia terkait operasi moneter, transaksi Pemerintah dalam pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN), transaksi pasar uang antar bank baik oleh perbankan konvensional (Pasar Uang Antar Bank/PUAB) maupun syariah (Pasar Uang Antar Syariah/PUAS).

BI-SSSS and BI-ETP

Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) is a transaction means with Bank Indonesia including the administration and Securities administration electronically and online between Participants, Organizers and BI-RTGS System.

Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP) is a transaction means of Bank Indonesia related to monetary operations, Government transactions in the management of Government Bonds (SBN), interbank money market both by conventional banks (Interbank Money Market/PUAB) or sharia (Sharia Interbank Money Market/PUAS).

Kelancaran sistem pembayaran pada tahun 2015 tidak lepas dari upaya pengembangan infrastruktur sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) untuk mendukung sistem transfer dana secara elektronik dalam waktu relatif singkat. Penguatan infrastruktur juga dilakukan terhadap Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), yang secara keseluruhan mulai masuk pada teknologi Generasi II. Pembaharuan teknologi juga menyorot pada sistem Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP), yang selama ini dijadikan sarana transaksi Bank Indonesia terkait operasi moneter, transaksi Pemerintah dalam pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN), transaksi pasar uang antarbank baik oleh perbankan konvensional (Pasar Uang Antar Bank/PUAB) maupun syariah (Pasar Uang Antar Syariah/PUAS).

Efektivitas penyelenggaraan sistem pembayaran terlihat dari proses transaksi keuangan yang lancar dan aman di dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Sementara itu, sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri relatif tidak mengalami gangguan yang signifikan. Semua itu sejalan dengan komitmen dan konsistensi Bank Indonesia untuk terus memperkuat infrastruktur sistem pembayaran.

Selama tahun 2015, penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan industri mampu melayani 5,5 miliar transaksi dengan nilai Rp121,1 ribu triliun. Jumlah transaksi tersebut mengalami peningkatan sebesar 18,35% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,7 miliar transaksi. Nilai transaksi selama tahun 2015 juga menunjukkan peningkatan sebesar 2,22% dari sebelumnya Rp118,5 ribu triliun.

The smooth payment system in 2015 was a result of the efforts to develop Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) system infrastructure to support electronic fund transfer system in a short time. Infrastructure strengthening was also performed to Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), and Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI), which have entered the Generation II technology. Technology development was also aimed at Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP) system, which is one of the Bank Indonesia transaction medium related to monetary operations, Government transactions in the management of Government Bonds (SBN), interbank money market transactions both by conventional banks (Interbank Money Market/PUAB) and sharia banks (Sharia Interbank Money Market/PUAS).

The effectiveness of payment system can be seen from the safe and smooth financial transaction process in economic activities conducted by the society, government, and businesses. Meanwhile, payment system executed by the industry relatively did not experience significant disruption. All went in line with the commitment and consistency of Bank Indonesia to continue strengthening the payment system infrastructure.

In 2015, the non-cash payment system held by Bank Indonesia and the industry managed to serve 5.5 billion transactions with value of Rp121.1 thousand trillion. The transaction number increased 18.35% from the previous year which was recorded at 4.7 billion transactions. Transaction value in 2015 also showed an increase of 2.22% from previously Rp118.5 thousand trillion.



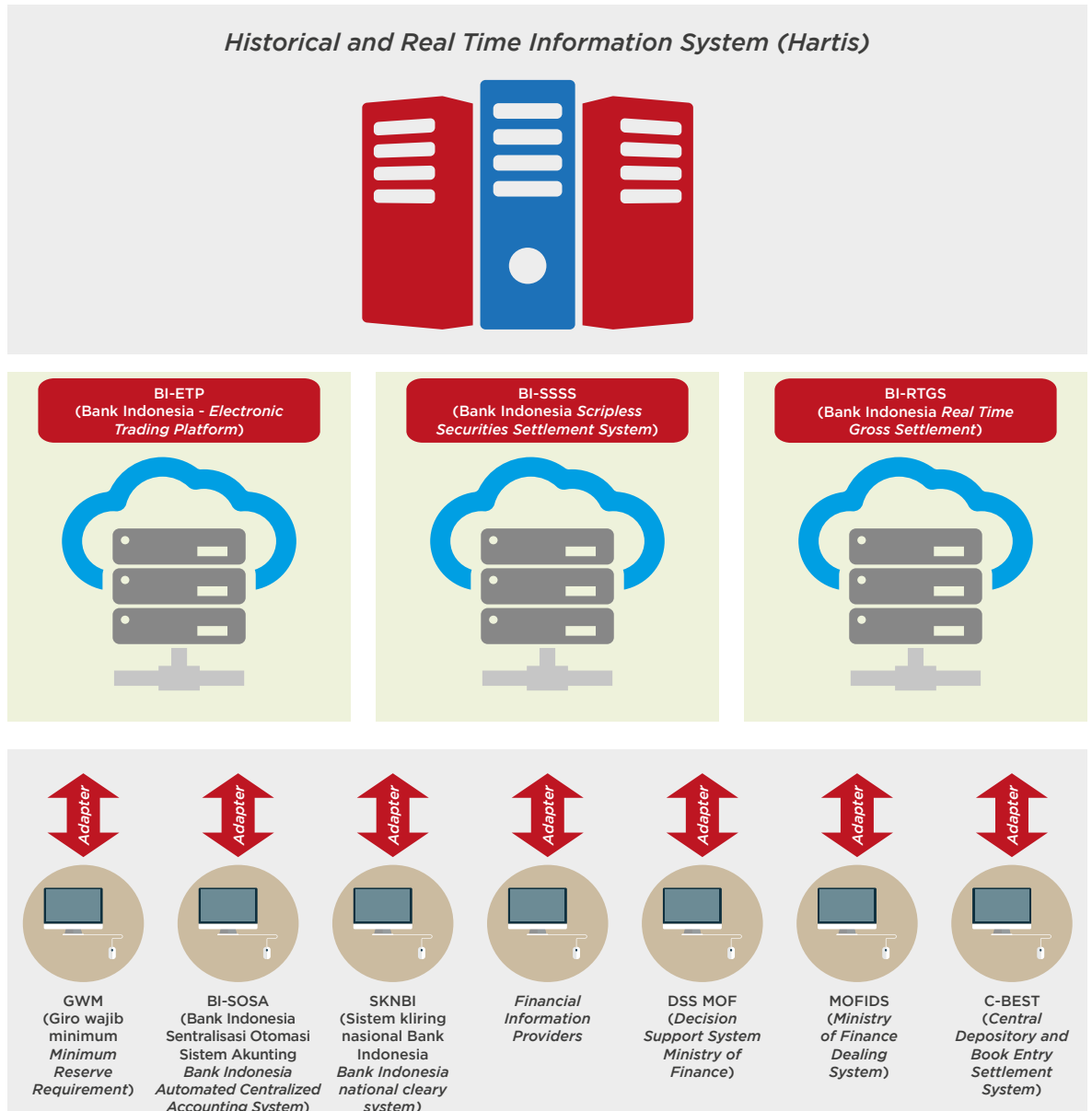
Sistem BI-RTGS sebagai muara dari sistem pembayaran di Indonesia semakin andal menyusul terpenuhinya tingkat ketersediaan yang sesuai dengan tingkat layanan yang telah ditetapkan. Demikian pula dari sisi likuiditas, peserta Sistem BI-RTGS memiliki dana yang cukup untuk menjaga kelancaran transaksi. Kecukupan likuiditas antara lain tercermin dari rendahnya *unsettled transaction*, penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) yang relatif sedikit, dan pergerakan *turn over ratio*. Sistem BI-RTGS sepanjang tahun 2015 berhasil menyelesaikan 11,0 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp112,7 ribu triliun. Meskipun secara volume transaksi mengalami penurunan sebesar 37,8% dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 17,7 juta transaksi, namun nilai transaksinya mengalami peningkatan sebesar 1,7% dari periode sebelumnya yang sebesar Rp 110,9 ribu triliun. Penurunan volume transaksi pembayaran melalui Sistem BI-RTGS merupakan dampak dari kebijakan sementara pembatasan (*capping*) minimum transaksi yang ditingkatkan menjadi Rp500 juta sejak diimplementasikannya Sistem BI-RTGS Generasi II pada 16 November 2015. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk memitigasi risiko operasional di awal implementasi Sistem BI-RTGS Generasi II. Pemberlakuan *capping* minimum ini bersifat sementara sampai dengan Juni 2016.

Sepanjang tahun 2015, penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS tercatat mampu melayani sebanyak 183,6 ribu transaksi atau meningkat sebesar 15,2% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 159,5 ribu transaksi. Sejalan dengan peningkatan tersebut, nilai transaksi surat berharga pada BI-SSSS meningkat sebesar 4,1% dari sebelumnya dari sebelumnya Rp33,57 ribu triliun menjadi Rp34,9 ribu triliun.

BI-RTGS system as the estuary of payment system in Indonesia became more reliable with sufficient supply in line with the assigned service level. In terms of liquidity, BI-RTGS system participants have sufficient funds to maintain smooth transaction. Sufficient liquidity was reflected by low unsettled transaction, relatively low usage of Intraday Liquidity Facility (FLI), and turnover ratio movement. BI-RTGS system in 2015 managed to settle 11.0 million transactions with value of Rp112.7 thousand trillion. While transaction volume experienced a decrease of 37.8% compared to the previous year with 17.7 million transactions, but the transaction value increased 1.7% from the previous period of Rp110.9 thousand trillion. The decline in payment transaction volume through BI-RTGS system was an impact of the temporary policy of minimum transaction capping which was increased to Rp500 million since the implementation of BI-RTGS System Generation II on 16 November 2015. This was one of the efforts to mitigate operating risk at the beginning of BI-RTGS Generation II System implementation. The minimum capping will be applied temporarily until June 2016.

In 2015, securities administration through BI-SSSS managed to serve 183.6 thousand transactions, increasing 15.2% compared to 2014 which reached 159.5 thousand transactions. In line with the increase, the transaction value of securities in BI-SSSS rose 4.1% from Rp33.57 thousand trillion previously to Rp34.9 thousand trillion.

Infografis 5. Integrasi Sistem Generasi II
Infographic 5. Integrated System Generation II



Peningkatan transaksi juga terjadi pada SKNBI, di mana sepanjang tahun 2015 mencapai 113,5 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp3,2 ribu triliun. Volume transaksi SKNBI pada tahun 2015 itu meningkat sebesar 5,5% dibandingkan dengan volume transaksi SKNBI pada tahun 2014 yang tercatat sebesar 107,6 juta transaksi. Peningkatan volume transaksi juga diikuti oleh peningkatan nilai transaksi yang mencapai 10,81%, dari sebelumnya Rp2,9 ribu triliun. Peningkatan transaksi melalui SKNBI berkat kebijakan Bank Indonesia memperluas akses peserta, yang dibarengi dengan sentralisasi kliring,

The transaction volume of SKNBI also increased, in 2015 reaching 113.5 million transactions with value of Rp3.2 thousand trillion. SKNBI transaction volume in 2015 rose 5.5% compared to the SKNBI transaction volume in 2014 of 107.6 million transactions. The increase in transaction volume was followed by the increasing transaction value which grew 10.81%, from previously Rp2.9 thousand trillion. The increase in transactions through SKNBI happened due to Bank Indonesia's policy in expanding access of participants, completed by clearing centralization, additional transaction features,

penambahan fitur transaksi, dan peningkatan perlindungan nasabah. Akselerasi SKNBI juga terkait dengan dinaikkannya batas maksimum nilai kliring kredit dan peningkatan batas minimum nilai Sistem BI-RTGS yang sebelumnya Rp100 juta sejak 15 Desember 2014 menjadi minimal Rp500 juta menyusul implementasi Sistem BI-RTGS Generasi II pada tahun 2015.

Kebijakan Bank Indonesia untuk mengimplementasikan Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP Generasi II berdasarkan sejumlah hal, antara lain untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan mitigasi risiko sistem sesuai standar internasional, serta memperkuat kemampuan untuk terhubung dengan infrastruktur lain di sistem keuangan baik domestik maupun lintas batas. Selain itu, Bank Indonesia juga mencoba mengakomodasi dinamika di pasar keuangan global maupun domestik dengan memodernisasi ketiga sistem pembayaran tersebut, termasuk untuk mengakomodasi perkembangan volume transaksi yang semakin meningkat, dan untuk memperbaharui teknologi sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi I yang telah berjalan lebih dari 10 tahun.

Dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran yang aman, lancar, dan efisien, pengembangan infrastruktur tersebut didukung dengan penyempurnaan ketentuan sistem pembayaran guna meningkatkan perlindungan nasabah, antara lain dengan pengaturan kewajiban waktu pemrosesan transaksi melalui SKNBI paling lama dua jam dan Sistem BI-RTGS paling lama satu jam.

Terkait sistem pembayaran nontunai dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), yang meliputi kartu ATM, kartu ATM/debet, dan kartu kredit, selama tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang positif. Instrumen APMK yang beredar di masyarakat meningkat sebesar 12,5% menjadi 137,1 juta instrumen dari sebelumnya 121,9 juta instrumen. Volume transaksi APMK pada tahun 2015 mencapai 4,9 miliar transaksi dengan nilai Rp5,2 ribu triliun. Perkembangan transaksi APMK sebagian besar disumbang oleh transaksi kartu ATM dan kartu ATM/debet berkat semakin banyaknya pemanfaatan mesin ATM dan EDC. Sampai dengan akhir tahun 2015, terdapat sekitar 99,9 ribu unit mesin ATM dan 1 juta unit mesin EDC,

and increasing consumer protection. SKNBI acceleration was also related to the increase in maximum limit of credit clearing value and the increase in minimum limit of BI-RTGS System from Rp100 million since 15 December 2014 to minimum Rp500 million following the implementation of BI-RTGS Generation II System in 2015.

Bank Indonesia's policy to implement BI-RTGS System, BI-SSSS, and BI-ETP Generation II was based on several things, such as increasing efficiency and capability of system risk mitigation according to international standards, as well as strengthening capability to be connected with other infrastructure in the financial system both domestically or cross-border. In addition, Bank Indonesia also tried accommodating dynamics in the global and domestic financial markets by modernizing the three payment systems, inducing accommodating the development of increasing transaction volume, and renewing the technology of BI-RTGS system and BI-SSSS Generation I which has run for more than 10 years.

In attempt to materialize a safe, smooth, and efficient payment system, the infrastructure development was supported by improvement in payment system regulations to increase consumer protection, among others by requiring the transaction processing time through SKNBI of maximum two hours and BI-RTGS System maximum one hour.

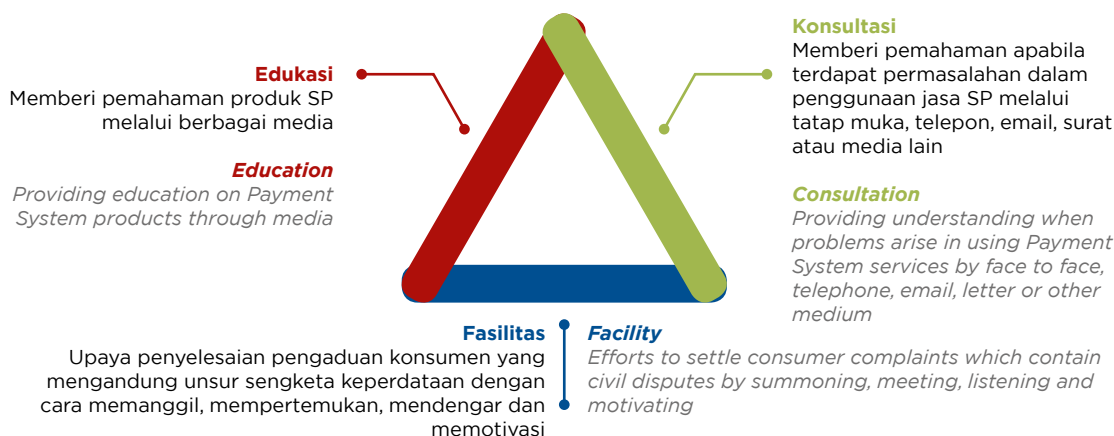
Non-cash payment system using Card-Based Payment Instruments (APMK), covering ATM cards, ATM/debit cards, and credit cards, in 2015 showed positive development. APMK instruments in the society increased 12.5% to 137.1 million instruments from previously 121.9 million instruments. Transaction volume of APMK in 2015 reached 4.9 billion transactions valued at Rp5.2 thousand trillion. The transaction volume of APMK was mostly contributed by ATM card and ATM/debit card transactions with rising usage of ATM and EDC machines. Until the end of 2015, there were 99.9 thousand units of ATM machines and 1 million units of EDC machines, increasing respectively

meningkat masing-masing sebesar 10,19% dan 19,29% dibandingkan tahun 2014 sebanyak 90,7 ribu unit mesin ATM dan 842,6 ribu unit mesin EDC.

10.19% and 19.29% compared to 2014 of 90.7 thousand units ATM machines and 842.6 thousand units EDC machines.

Infografis 6. Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
Infographic 6. Customer Protection on Payment System Service

Dasar Hukum/Legal Basis: PBI No. 16/1/PBI/2014 dan SE BI No. 16/16/DKSP



Cakupan:
Instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana (Cek dan BG) Transfer dana
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Kartu ATM/Debet, Kredit) Uang Elektronik
Penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah
Penyelenggaraan SP lain yang ditetapkan dalam ketentuan RI

Scope:
Fund transfer instruments and/or fund withdrawal (Check and BG)
Fund Transfer Card-Based Payment Instruments (ATM Card/Debit, Credit) Electronic Money
Provision and/or deposit of Rupiah
Other Payment System set in RI regulations

Peningkatan volume dan nilai transaksi juga terjadi pada instrumen Uang Elektronik. Pada tahun 2015, volume transaksi Uang Elektronik meningkat 163,35% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 203,4 ribu transaksi menjadi 535,6 ribu transaksi. Peningkatan transaksi Uang Elektronik juga diiringi dengan peningkatan nilai transaksi. Pada tahun 2015, nilai transaksi Uang Elektronik meningkat 59,15% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 3,3 triliun menjadi Rp 5,3 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan program penyaluran bantuan sosial pemerintah ke masyarakat dengan menggunakan Uang Elektronik yang dilakukan sepanjang tahun 2015.

Electronic Money also experienced an increase in transaction volume and value. In 2015, the transaction volume of Electronic Money rose 163.35% from the previous year of 203.4 thousand transactions to 535.6 thousand transactions. The increase in Electronic Money transactions was followed by the increase in transaction value. In 2015, the transaction value of Electronic Money rose 59.15% from the previous year of Rp3.3 trillion to Rp5.3 trillion. The increase was in line with the disbursement of government social aid to the people using Electronic Money throughout 2015.

Seiring dengan semakin masifnya pembayaran non tunai menggunakan APMK, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan bank untuk meningkatkan keamanan dengan menggunakan teknologi *chip* dan PIN 6 digit. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan/*fraud* APMK. Bank Indonesia juga meningkatkan batas nilai nominal dana yang dapat ditransfer dan tarik tunai pada mesin ATM.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi penggunaan instrumen transaksi non-tunai melalui penyelenggaraan festival Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Program ini diselenggarakan di Jakarta dan beberapa daerah lainnya seperti Serang dan Ambon. Adapun pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa kalangan, yaitu bank penyelenggara jasa sistem pembayaran, Kementerian, Pemerintah Daerah, perusahaan pengembang sistem pembayaran, KUPVA Bukan Bank, dan masyarakat luas. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengajak seluruh masyarakat menggunakan instrumen pembayaran non-tunai dan seluruh pihak untuk menggunakan Rupiah sebagai mata uang Republik Indonesia pada setiap transaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara terkait pengelolaan uang Rupiah, pencapaian positif tercermin pada terpenuhinya kebutuhan uang tunai dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Tercatat uang kartal yang diedarkan (UYD) Bank Indonesia tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang 5,7% menjadi 11,0% atau mencapai Rp586,8 triliun pada akhir 2015. Secara bulanan, pertumbuhan UYD dipengaruhi oleh faktor musiman masyarakat pada periode tertentu, khususnya hari raya keagamaan seperti saat Ramadan dan Natal, serta liburan masyarakat. Posisi UYD tertinggi terjadi pada akhir Ramadan 2015 sebesar Rp604,2 triliun atau tumbuh 7,0% dibandingkan periode Ramadan 2014 yang mencapai Rp564,5 triliun. Tren positif ini erat kaitannya dengan perkembangan aktivitas perekonomian domestik, yang awalnya melambat hingga pertengahan tahun 2015 dan mulai meningkat pada triwulan III 2015. Kecenderungan

Along with the massive non-cash payments using APMK, Bank Indonesia issued a policy requiring banks to increase the security of ATM/debit cards by adopting chip-based technology and 6-digit PIN. This is aimed at anticipating violation/fraud of APMK. Bank Indonesia also increased the nominal fund limit which can be transferred and withdrawn in ATM machines.

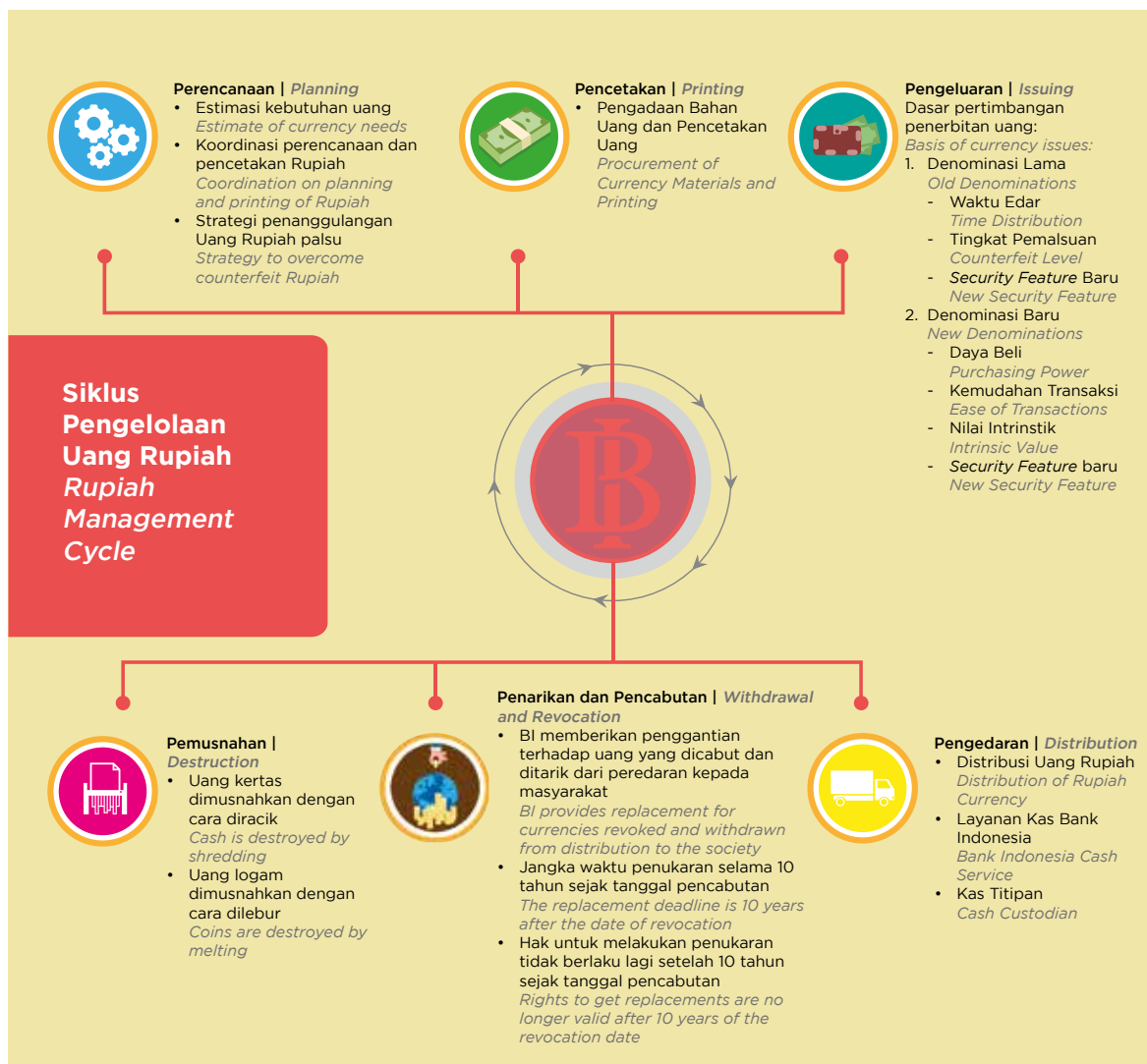
Accordingly, Bank Indonesia has conducted education and socialization activities on the use of non-cash transaction instruments through the organization of a Non-Cash National Movement (GNNT) festival. The program is held in Jakarta and some other areas such as Serang and Ambon. A number of parties have participated in the implementation of the various activities, including bank payment system service providers, Government Ministries, Local Government, payment system developer companies, Non-Bank KUPVA, and the general public. The purpose of these activities is to invite all people to use non-cash payment instruments and all parties to use the currency of the Republic of Indonesia on any transaction in everyday life.

Meanwhile related to Rupiah management, positive achievements were reflected in the currency needs in sufficient amount, appropriate denominations, timely manner, and fit for circulation. Currency in circulation (UYD) by Bank Indonesia grew higher than the previous year from 5.7% to 11.0% or reaching Rp586.8 trillion at the end of 2015. Monthly, the UYD growth was affected by the seasonal factor of the people in certain period, especially religious holidays such as Ramadan and Christmas as well as holidays. The highest UYD position happened at the end of Ramadan 2015 of Rp604.2 trillion or growing 7.0% compared to the Ramadan 2014 period which reached Rp564.5 trillion. This positive trend was closely related to the development of domestic economic activities, which were slow until mid-2015 and started to increase in the third quarter of 2015. Increasing growth trend was also seen from cash withdrawal by banks disbursing State Budget which started to increase in the

pertumbuhan yang meningkat terlihat pula dari penarikan uang kartal oleh bank penyalur APBN yang mulai naik pada periode yang sama seiring dengan membaiknya pertumbuhan konsumsi pemerintah. Sementara itu, uang tunai yang masuk ke brankas (*Cash in Vault*) masih menunjukkan perlambatan sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rupiah perbankan yang masih tertahan selama tahun 2015.

same period along with improving growth in government consumption. Meanwhile, Cash in Vault still showed a slowdown along with the limited growth of Third Party Funds (DPK) in 2015.

Infografis 7. Siklus Pengelolaan Uang Rupiah
Infographic 7. Rupiah Management Cycle



Terjaganya kinerja sistem pembayaran nasional tersebut tidak lepas dari upaya Bank Indonesia untuk terus memperkuat kebijakan, baik di bidang sistem pembayaran maupun pengelolaan uang Rupiah. Kebijakan umum

A maintained national payment system performance was the result of Bank Indonesia's effort to continue strengthening policy, both in payment system or Rupiah management. The general policy of Rupiah management is

pengelolaan uang Rupiah diarahkan untuk mencapai tiga pilar, yaitu (i) ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya, (ii) distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta (iii) layanan kas yang prima.

Untuk dapat menyediakan uang yang berkualitas dan terpercaya, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. BI dan Kementerian Keuangan menyepakati jumlah uang yang akan dicetak pada tahun 2016 dan 2017, masing-masing sebanyak Rp181,8 triliun (yang terdiri dari Rp180,7 triliun uang kertas dan Rp1,2 triliun uang logam) dan Rp310,6 triliun (terdiri dari Rp309,2 triliun uang kertas dan Rp1,5 triliun uang logam). Kesepakatan tersebut didasarkan pada asumsi indikator makroekonomi dan jumlah uang tidak layak edar yang akan dimusnahkan.

Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengenali ciri keaslian uang Rupiah (CIKUR) dan memperlakukan uang Rupiah dengan baik. Beberapa program tersebut termasuk Program Bank Indonesia Mengajar pada tingkat SMAN/SMK secara nasional. Selain itu, diadakan pameran/expo dan kesenian rakyat/tradisional di daerah serta kunjungan belajar (*study visit*) ke Bank Indonesia. BI juga melakukan penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah (3D "Dilihat, Diraba, Diterawang") di televisi nasional dan media sosial. BI berupaya meningkatkan penetrasi sosialisasi melalui media sosial mengingat makin tingginya akses masyarakat terhadap teknologi informasi.

aimed at reaching three pillars: (i) sufficiency of quality and trusted currency, (ii) safe and optimum currency processing and distribution, and (iii) prime cash services.

To provide quality and trusted currency, Bank Indonesia coordinated with the Government in planning, printing, and destroying currency as stipulated in Law No. 7 year 2011 on Currency. BI and the Finance Ministry agreed on the amount of printed currency in 2016 and 2017, respectively of Rp181.8 trillion (Rp180.7 trillion notes and Rp1.2 trillion coins) and Rp310.6 trillion (Rp309.2 trillion notes and Rp1.5 trillion coins). The agreement was based on macroeconomic indicator assumptions and the amount of currency unfit for circulation which will be destroyed.

Bank Indonesia also conducted socialization and education to the people to know the characteristic of real Rupiah currency (CIKUR) and treat the Rupiah well. Several of the programs included Bank Indonesia Teaching Program in the level of High School/Vocational School nationwide. In addition, there were exhibitions and traditional arts in regions as well as study visits to Bank Indonesia. BI also advertised Public Service Announcement on the Characteristic of Real Rupiah Currency ("Look, Touch, Look Under Light") in national televisions and social media. BI tried to increase the penetration through social media considering higher access of the people to information technology.



Edukasi Rupiah 3D4A di Android

Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali mengembangkan strategi edukasi Rupiah terbaru berbasis *mobile*. Baru-baru ini BI Bali meluncurkan aplikasi 3D4A (dibaca: *Three D For Android, Red*) berbasis android. Aplikasi ini mengedukasi masyarakat tentang ciri keaslian uang Rupiah, penggantian uang rusak, dan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI.

Rupiah Education 3D4A in Android

BI Representative Office in Bali Province developed a new mobile-based Rupiah education strategy. Recently BI Bali launched an Android-based 3D4A application (read: Three D For Android, Red). This application educated the society about the characteristics of real Rupiah currency, replacement of damaged currency, and requirement to use Rupiah in the Republic of Indonesia territory.



Untuk memastikan distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, Bank Indonesia bekerja sama dengan PT KAI dan PELNI mendistribusikan Rupiah ke seluruh wilayah NKRI melalui Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia (KPwDN BI) yang menjalankan fungsi pengelolaan uang Rupiah. Selama tahun 2015, realisasi distribusi uang mencapai Rp240,43 triliun atau meningkat 44,41% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp166,50 triliun. Selain itu Bank Indonesia melakukan modernisasi peralatan pemrosesan dan pengolaan uang berupa mesin sortasi uang kertas dengan fungsi racik di KPBI dan 23 KPwDN BI, serta mesin racik uang kertas di 14 KPwDN BI.

Sementara itu, Bank Indonesia juga berupaya memberikan layanan kas yang prima melalui Kas Keliling dan bekerja sama dengan perbankan membuka Kas Titipan di mana masyarakat bisa melakukan penarikan dan penyetoran uang. Kegiatan Kas Keliling berlokasi di tempat-tempat keramaian (seperti pasar, stasiun kereta api, kegiatan pameran) dan di wilayah perbatasan serta daerah terpencil dan pulau terdepan Indonesia. Sementara itu, Kas Titipan ditujukan pada daerah yang aktivitas perekonomiannya berkembang, namun belum terdapat layanan Bank Indonesia secara langsung.

To ensure a safe and optimum currency processing and distribution, Bank Indonesia in cooperation with PT KAI and PELNI distribute the Rupiah to all areas of NKRI through Bank Indonesia's Headquarters (KPBI) and Bank Indonesia's Domestic Representative Offices (KPwDN BI) which perform the Rupiah currency management functions. In 2015, the realized currency distribution reached Rp240.43 trillion or rose 44.41% compared to Rp166.50 trillion in 2014. In addition, Bank Indonesia modernized the currency management and processing tools in form of currency sorting machines with shredding function in KPBI and 23 KPwDN BI, as well as currency shredding machines in 14 KPwDN BI.

Meanwhile, Bank Indonesia also strived to provide prime cash services through Mobile Cash and in cooperation with banks opened Cash Custodians where the people can make currency withdrawal or deposit. The Mobile Cash activities took place in public space (such as markets, train stations, exhibitions) and in border areas as well as remote areas and outskirts islands. Meanwhile, Cash Custodians were aimed at areas with developing economic activities, but without direct presence of Bank Indonesia.

Inovasi Setelmen Dana Transaksi Pasar Modal melalui *Central Bank Money (CeBM)*

Innovation for the Settlement of Capital Market Transaction Funds through Central Bank Money (CeBM)

Pasar Modal yang merupakan bagian dari sistem keuangan, memegang peranan penting sebagai salah satu sarana untuk mengumpulkan dana bagi pembiayaan pengembangan usaha oleh pelaku kegiatan ekonomi. Pengumpulan dana tersebut dapat dilakukan melalui keikutsertaan penanaman modal (ekuitas) oleh investor, maupun dengan penerbitan surat utang (obligasi, *promissory notes*). Dengan adanya Pasar Modal, terdapat alternatif pendanaan lain bagi dunia usaha untuk mencari sumber dana selain dari pinjaman perbankan.

Dengan melihat pentingnya peran Pasar Modal dalam perekonomian, maka keamanan dan kelancaran pelaksanaan transaksi dan penyelesaian (setelmen) transaksi di Pasar Modal menjadi fokus utama bagi otoritas terkait. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan transaksi dan setelmennya di Pasar Modal, telah dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan implementasi *Central Bank Money (CeBM)*. Sebelum Juni 2015, setelmen surat berharga transaksi Pasar Modal dilakukan pada sistem PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yaitu *Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST)*. Sedangkan setelmen dananya antara Peserta KSEI (Peserta C-BEST) dengan KSEI (Penyelenggara C-BEST) dilakukan melalui bank pembayaran yang ditunjuk oleh KSEI. Sejak 18 Juni 2015, setelmen dana Rupiah transaksi Pasar Modal oleh peserta Pasar Modal kelompok Bank Kustodian telah dilakukan melalui Sistem BI-RTGS, dengan menggunakan rekening setelmen yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

Capital Market which is part of the financial system holds an important role as one of the means to gather funds for financing business development by economic players. The fund collection can be done through equity participation by investors, or issuance of debt (bond, promissory notes). With Capital Market, there are alternative fundings for businesses to look for funding source besides banking.

Seeing the importance of Capital Market role in the economy, the security and smoothness of transaction implementation and settlement in Capital Market become the main focus of related authorities. In increasing security and smoothness of transaction implementation and settlement in Capital Market, some efforts have been made, among others through the implementation of Central Bank Money (CeBM). Before June 2015, the settlement of Capital Market transaction bonds was made in the system of PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, which is the Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST). While the fund settlement between KSEI Participants (C-BEST Participants) with KSEI (C-BEST Organizer) was made through payment banks appointed by KSEI. Since 18 June 2015, the settlement of Capital Market transactions in Rupiah fund by Capital Market participants Custodian Bank group has been made through BI-RTGS System, using the settlement accounts administered by Bank Indonesia.

Setelmen dana transaksi Pasar Modal melalui Sistem BI-RTGS ini merupakan penerapan CeBM. Mekanisme setelmen dana menggunakan CeBM ini dapat memitigasi risiko dalam setelmen dana transaksi Pasar Modal, yang meliputi risiko kredit dan likuiditas. Risiko kredit yaitu risiko tidak dapat terbayarkannya kewajiban kepada nasabah akibat adanya gangguan pada bank pembayaran yang merupakan bank komersial yang berpotensi mengalami kesulitan likuiditas. Sedangkan risiko likuiditas adalah risiko tidak dapat terselesaikannya kewajiban kepada nasabah pada hari setelmen akibat adanya gangguan likuiditas pada bank pembayaran. Potensi risiko kredit dan likuiditas tersebut relatif besar, karena seluruh setelmen dana transaksi Pasar Modal hanya melibatkan atau terkonsentrasi pada lima bank pembayaran yang merupakan bank komersial.

Selain memitigasi risiko kredit dan likuiditas, keuntungan lainnya dari setelmen dana transaksi Pasar Modal melalui Sistem BI-RTGS adalah terciptanya *competitive neutrality*, karena setiap bank komersial (bank umum) dapat melakukan setelmen dana transaksi Pasar Modal, dan tidak tergantung pada bank umum tertentu. Penerapan CeBM juga meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas bagi setiap bank umum, karena seluruh Peserta KSEI termasuk bank umum tidak perlu memiliki rekening pada bank umum yang ditunjuk oleh KSEI sebagai bank pembayaran.

Adapun peresmian penggunaan CeBM tahap pertama ini dilakukan pada 29 Juni 2015, oleh Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ronald Waas, yang merupakan babak baru dalam sistem keuangan Indonesia. Penggunaan Sistem BI-RTGS untuk setelmen dana transaksi Pasar Modal antara Peserta KSEI dengan KSEI (sebagai Penyelenggara Central Securities Depository (CSD) untuk saham, obligasi korporasi dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh sektor usaha swasta tersebut) juga merupakan pemenuhan salah satu standar internasional dalam penyelenggaraan infrastruktur pasar keuangan, yang dikenal dengan Principles for Financial Market Infrastructures (PFMIs).

The settlement of Capital Market transaction funds through BI-RTGS System is the CeBM implementation. The fund settlement mechanism using CeBM can mitigate risks in the settlement of Capital Market transaction funds, covering credit risk and liquidity risk. Credit risk is a risk of being unable to pay customers due to troubles in payment banks which are commercial banks with potentials to suffer liquidity issue. While liquidity risk is a risk of being unable to pay customers on settlement day due to liquidity issues in payment banks. The potential of credit risk and liquidity risk was relatively big, because all settlement of Capital Market transaction funds only involves or is concentrated on five payment banks which are commercial banks.

Besides mitigating credit and liquidity risks, another benefit from the settlement of Capital Market transaction funds through BI-RTGS System is the competitive neutrality, because every commercial bank can make settlement of Capital Market transaction funds and it is not dependent on certain commercial banks. The CeBM implementation also increases efficiency on liquidity management for all commercial banks, because all KSEI participants including commercial banks do not need to have accounts on commercial banks appointed by KSEI as payment banks.

The first official use of CeBM was on 29 June 2015, by Member of Bank Indonesia's Board of Governors, Ronald Waas, which is a new chapter in Indonesian financial system. The use of BI-RTGS System for settlement of Capital Market transaction funds between KSEI Participants with KSEI (as Central Securities Depository (CSD) for stocks, corporate bonds and other securities issued by private business sector) is a fulfillment of one international standard in the implementation of financial market infrastructure, known as Principles for Financial Market Infrastructures (PFMIs).

Selama tahun 2015, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dengan Kementerian terkait maupun TNI-Angkatan Laut, untuk layanan Kas Titipan.

In 2015, Bank Indonesia cooperated with government institutions, from related Ministries to the Navy, for Cash Custodian service.

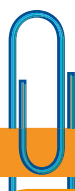


Sampai dengan tahun 2015, Bank Indonesia telah membuka 35 Kas Titipan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI bekerja sama dengan 14 bank umum dengan plafon Kas Titipan berkisar antara Rp40 miliar sampai dengan Rp300 miliar per Kas Titipan, sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Jumlah penarikan uang Rupiah dalam rangka Kas Titipan selama 2015 mencapai Rp47,4 triliun atau tumbuh 31,13% dibandingkan tahun sebelumnya.

Until 2015, Bank Indonesia has opened 35 Cash Custodians spread across Indonesia in cooperation with 14 commercial banks with Cash Custodian ceiling between Rp40 billion and Rp300 billion per Cash Custodian, in line with the need of local areas. The amount of Rupiah withdrawal in Cash Custodians in 2015 reached Rp47.4 trillion or grew 31.13% compared to the previous year.

Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan uang bersih (*clean money policy*) melalui peningkatan standar kualitas uang yang diolah (*soil level*), baik di satuan kerja kas Bank Indonesia maupun bank. Di samping itu, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) dan instansi Pemerintah lainnya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran uang Rupiah palsu.

Bank Indonesia also implemented clean money policy by increasing the standard of money quality process (soil level), both in Bank Indonesia's cash Department and banks. In addition, Bank Indonesia also strengthened coordination with all elements of the Counterfeit Rupiah Eradication Coordinating Body (Botasupal) and other Government institutions in preventing the distribution of counterfeit Rupiah. All of those saw good results, among others were reflected in the improvement of



Tugas dan fungsi TPI/TPID:

1. Melakukan koordinasi penetapan sasaran inflasi tiga tahun ke depan;
2. Melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian inflasi termasuk kebijakan-kebijakan yang ditempuh;
3. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Menteri Keuangan.

Task and function of TPI/TPID:

1. Making coordinations on the inflation target setting for the next three years;
2. Making coordinations on monitoring and evaluation of factors affecting inflation achievements including policies implemented;
3. Making coordinations on policy formulation which supports inflation target achievements to the Finance Minister.

Semua itu membuahkan hasil positif, antara lain tercermin pada membaiknya tingkat kualitas uang Rupiah yang beredar di masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan perbankan dalam melaporkan temuan uang Rupiah palsu ke Bank Indonesia, serta pengungkapan jaringan peredaran uang Rupiah palsu oleh Kepolisian RI sebelum sempat beredar ke masyarakat. Dari sisi perlindungan konsumen, Bank Indonesia juga mengakselerasi kegiatan sosialisasi ciri keaslian uang rupiah, baik dari frekuensi dan keberagaman.



KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAN OTORITAS LAINNYA

Dinamika perekonomian global yang semakin kompleks dan tingginya tingkat kerentanan perekonomian domestik menuntut penguatan koordinasi kebijakan bersama antara Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Penguatan koordinasi tersebut dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan reformasi struktural.

Refleksi dari koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah antara lain tercermin dari terkendalinya inflasi tahun 2015 di level 3,35% sesuai dengan rentang sasaran inflasi 4±1% dan bahkan terendah dalam lima tahun terakhir. Melalui Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), upaya pengendalian inflasi selama 2015 difokuskan untuk mengendalikan inflasi harga makanan yang bergejolak (*volatile food*) dan harga barang yang diatur Pemerintah

Rupiah quality level circulated in the society and the increasing people awareness and bank compliance in reporting counterfeit Rupiah findings to Bank Indonesia, as well as the capture of counterfeit Rupiah distribution network by Indonesian Police before circulated in the society. For consumer protection, Bank Indonesia also accelerated the socialization of characteristic of real rupiah, both in frequency and variety.

COORDINATION WITH THE GOVERNMENT AND OTHER AUTHORITIES

More complex global economic dynamics and high level of vulnerability in the domestic economy require policy coordination strengthening between Bank Indonesia and the Government and related authorities, both in national and international scope. The coordination strengthening is aimed at maintaining macroeconomic stability, boosting economic growth momentum, and creating structural reform.

Strong coordination between Bank Indonesia and the Government was reflected by a manageable inflation in 2015 at 3.35%, in line with the inflation target range of 4±1% and the lowest in the last five years. Through the Inflation Management and Monitoring Coordination Team (TPI) and Regional Inflation Management Team (TPID), inflation management in 2015 was focused on controlling volatile foods and administered prices. This was in line with the Government's policy in energy reform, especially related

(administered prices). Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang reformasi kebijakan energi, terutama menyangkut harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Tenaga Listrik (TTL), dan LPG. Dalam kaitan pengendalian inflasi pangan, sejumlah kebijakan diarahkan untuk mendorong ketersediaan stok dan efisiensi pasar, memperkuat data dan informasi, serta mengintensifkan komunikasi untuk mengelola ekspektasi.

Dukungan dan kontribusi Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian inflasi di daerah juga semakin kuat, yang tercermin dari meningkatnya jumlah TPID. Pada akhir 2015, telah terbentuk 442 TPID, yang terdiri dari 34 TPID provinsi dan 408 TPID kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 2014 yang saat itu berjumlah 396 TPID.

Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID 2015, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah merumuskan arah strategi pengendalian inflasi hingga tahun 2018. Fokus pengendalian inflasi ke depan adalah mengoptimalkan peran Pemda dalam mendukung stabilitas harga dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata niaga di daerah. Hal ini sejalan dengan inisiatif Pemerintah untuk meningkatkan belanja infrastruktur guna mendukung target swasembada pangan, serta perbaikan sistem logistik dengan meningkatkan konektivitas antardaerah.

to Fuel Price (BBM), Electricity Tariff (TTL), and LPG. In relation with food inflation management, all policies were aimed at boosting sufficient stocks and market efficiency, strengthening data and information, as well as intensifying communication to manage expectations.

Support and contribution from the Regional Government in controlling inflation in the regions were getting stronger, as reflected by the increase in TPID numbers. At the end of 2015, there were 442 TPID, consisting of 34 TPID provinces and 408 TPID cities/regencies across Indonesia. The number increased rapidly compared to 396 TPID in 2014.

Through the National Coordination Meeting of TPID 2015, Bank Indonesia with the Central and Regional Governments formulated the direction of inflation management strategy until 2018. The focus on inflation management going forward is optimizing the role of Regional Governments in supporting price stability by accelerating infrastructure development and improving commerce in regions. This is in line with the Government's initiative to increase infrastructure spending to support food sufficiency target, as well as fixing logistic system by increasing interregional connectivity.



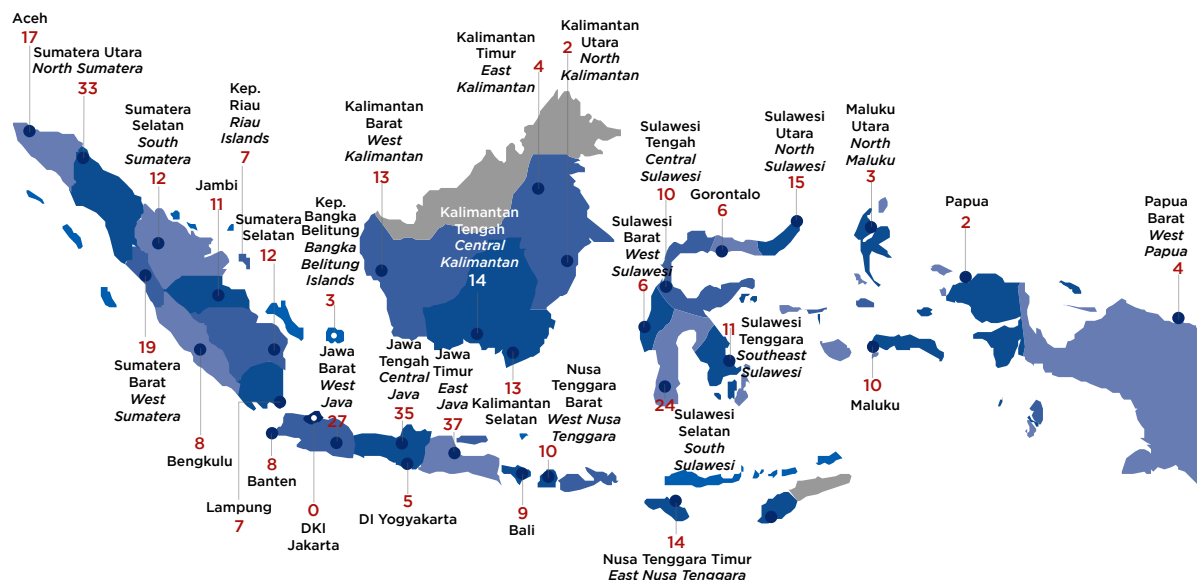
SiHaTI, SIGAP, SIGAPURA

Bank Indonesia meluncurkan terobosan penggunaan sistem informasi pemantauan harga pangan di daerah. Melalui aplikasi yang disebut dengan Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi (SiHaTi), Sistem Informasi Harga Pangan Sepuluh Bahan Pokok (SIGAP), dan Sistem Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SIGAPURA), masyarakat termasuk pedagang akan memperoleh informasi yang akurat mengenai harga pangan di daerah. Kemudahan akses informasi harga pangan akan mendorong terciptanya harga komoditas yang wajar dan membantu pengendalian inflasi.

SiHaTI, SIGAP, SIGAPURA

Bank Indonesia launched a breakthrough of the use of information system on food price monitoring in regions. Through the application called the Information System of Commodity Product and Price (SiHaTi), Information System of Ten Staple Food Prices (SIGAP), and Main Food and Strategic Commodity Price System (SIGAPURA), the people including merchants who will get accurate information on food price in the regions. The simplicity on food price information access will boost the fair commodity prices and help inflation control.

Infografis 8. Sebaran Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Infographic 8. Distribution of Regional Inflation Management and Monitoring Team



Produk dari Rakornas TPID 2015 adalah *Roadmap Pengendalian Inflasi* sampai dengan 2018. *Roadmap* tersebut berupaya untuk menyelesaikan sejumlah tantangan yang meliputi: (i) terbatasnya peningkatan kapasitas perekonomian domestik, (ii) ketergantungan yang tinggi pada ekspor berbasis sumber daya alam dan bahan baku impor, (iii) produksi pangan yang rentan terhadap gangguan pasokan, (iv) inefisiensi struktur mikro pasar, (v) pemenuhan kebutuhan energi nasional yang tergantung dari impor BBM dan LPG, (vi) masih lemahnya konektivitas antar daerah, dan (vii) kondisi ketidakpastian ekonomi global yang dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar Rupiah. Untuk itu, koordinasi pengendalian inflasi yang terencana antara seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas lainnya tidak hanya sebatas mengendalikan inflasi, tetapi juga menyangkut upaya menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk stabilitas nilai tukar. Serangkaian paket kebijakan ekonomi yang dirilis bersamaan menjadi bukti komitmen yang kuat dari Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi,

The product of 2015 Rakornas TPID is the *Inflation Management Roadmap* until 2018. The *Roadmap* tries to address several challenges which cover: (i) limited increase of domestic economic capacity, (ii) high dependency on natural resources-based exports and imported raw materials, (iii) food production which is vulnerable to supply disruptions, (iv) inefficiency of market micro structure, (v) fulfillment of national energy demand which is dependent on fuel and LPG imports, (vi) weak connectivity between regions, and (vii) global economic uncertainties which may affect Rupiah stability. Therefore, planned inflation management coordination between all stakeholders is absolutely needed, in both central and regional levels.

Coordination between Bank Indonesia and the Government and other authorities is not limited to inflation management, but also in maintaining macroeconomic stability, including exchange rate stability. A series of joint-issued economic policy packages was proof of strong commitment from Bank Indonesia, the Government, and other related authorities in pushing national economic growth by increasing consumption, improving investment

perbaikan iklim investasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur. Penguatan bauran kebijakan moneter dan fiskal melalui paket kebijakan ekonomi jilid I-VIII difokuskan pada upaya pengendalian inflasi, pengelolaan defisit neraca transaksi berjalan ke level yang lebih sehat, penguatan stabilitas sistem keuangan, dan pemulihan pertumbuhan ekonomi domestik.

Terkait upaya menstabilkan nilai tukar Rupiah, salah satu sinergi yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah adalah dengan mendorong devisa hasil ekspor (DHE) agar menetap lebih lama di dalam negeri. Hal itu dilakukan melalui pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada para eksportir yang bersedia menyimpan devisa hasil ekspor di perbankan Indonesia atau menukarkannya ke dalam bentuk rupiah. Kebijakan dimaksud berjalan seiring dengan penguatan laporan Lalu Lintas Devisa (LLD) yang bertujuan meningkatkan tingkat transparansi serta ketersediaan informasi atas penggunaan devisa.

Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, khususnya dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis (*crisis prevention* dan *crisis resolution*), melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Forum ini terbentuk sejak tahun 2012 yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Koordinasi perlu dilakukan di tengah potensi risiko global yang semakin meningkat di pasar keuangan internasional dan telah memengaruhi perkembangan perekonomian domestik selama 2015. Meningkatnya risiko global tersebut telah menimbulkan berbagai respons kebijakan yang beragam antarnegara. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Efektivitas FKSSK selama 2015 semakin meningkat dalam melakukan asesmen terkait kondisi stabilitas sistem keuangan dan merumuskan rekomendasi bersama. Hal tersebut tercermin dari dibentuknya lima kelompok kerja (*Working Group*) yang bertujuan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan tugas FKSSK yang terbagi atas tiga fungsi, yaitu pemantauan pencegahan krisis (*crisis prevention surveillance*),

climate, and accelerating infrastructure development. The strengthening of fiscal and monetary policy mix through the economic policy packages series I-VIII was focused on controlling inflation, managing current account deficit to a healthy level, strengthening financial system stability, and recovery of domestic economic growth.

Related to the effort to stabilize the Rupiah, one of the synergies between Bank Indonesia and the Government was pushing export proceeds (DHE) to stay longer in domestic. This was done by providing tax incentive in form of deposit rate reduction for exporters who are willing to save their export proceeds in Indonesian banks or exchange them into rupiah. The policy went in line with the strengthening of Foreign Exchange Transactions (LLD) report aimed at increasing transparency and information availability of forex usage.

Bank Indonesia also strengthened coordination with related authorities to maintain the national financial system stability, especially in crisis prevention and crisis resolution, through the Financial System Stability Coordination Forum (FKSSK). This forum has been established since 2012 with Bank Indonesia, Finance Ministry, Financial Services Authority (OJK), and Deposit Insurance Agency (LPS) as members. Coordination should be made amidst increasing global risk potentials in the international financial market which affected the domestic economic development in 2015. The increase in global risks caused various policy responses between countries. The condition potentially affects the financial system stability as a whole.

The effectiveness of FKSSK in 2015 increased in conducting assessments related with financial system stability conditions and formulating joint recommendations. This was reflected in the establishment of five working groups which aimed to improve the FKSSK task implementation divided into three functions,

140

198

216

233

penguatan kebijakan penanganan krisis (*policy options*), dan panduan penanganan krisis (*crisis management guidance*).

Guna mengoptimalkan efektivitas koordinasi, FKSSK pada tahun 2015 juga kembali melakukan simulasi uji kesiapan protokol pengambilan keputusan dalam menangani situasi krisis. Langkah ini mengevaluasi kecukupan prosedur perangkat ketentuan di masing-masing institusi pelaksana Protokol Manajemen Krisis (PMK), *crisis binder*, prosedur komunikasi, serta prosedur pelaksanaan ketentuan terkait fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*.

Pemerintah beserta Otoritas terkait (anggota FKSSK) telah melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK). Dalam proses penyusunan RUU tersebut, dengan mengacu pada *international best practice*, penanganan krisis mengutamakan konsep *bail in*, sehingga sedikit berbeda dengan konsep sebelumnya pada RUU JPSK. Selain itu aspek pencegahan krisis juga merupakan langkah penting yang dilakukan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sehingga diputuskan bahwa RUU JPSK disempurnakan menjadi RUU PPKSK. Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam kerangka kerja RUU PPKSK, area pengambilan keputusan yang diuji adalah menentukan dampak tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia juga telah membangun Protokol Manajemen Krisis (PMK) Bank Indonesia sebagai pedoman dan payung hukum dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.

Lebih jauh lagi, dalam rangka PMK di tingkat regional, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi antara lain namun tidak terbatas pada *Crisis Management and Resolution Framework (CMRF)* dalam *Executive's Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP)* dan *Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)*.

Bank Indonesia juga memiliki kesepakatan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013 untuk membentuk Forum Koordinasi Makro-Mikroprudensial (FKMM) dalam menjaga stabilitas perekonomian. Selain itu, juga dibentuk Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP) sebagai wadah

crisis prevention surveillance, crisis policy option strengthening, and crisis management guidance.

To optimize effectiveness of the coordination, FKSSK in 2015 also conducted readiness test simulation on decision making protocol in handling crisis. The steps evaluated the sufficiency of regulating procedures in each institution executing Crisis Management Protocol (CMP), crisis binder, communication procedure, as well as implementation procedures related to Bank Indonesia functions as the lender of last resort.

The government and relevant authorities (FKSSK members) have prepared the draft on the Financial System Safety Net Bill (JPSK Bill). In the process of drafting the bill, with reference to international best practice, the crisis management method emphasizes the bail in concept, which is slightly different to the previous concept of the JPSK Bill. In addition, the aspect of crisis prevention is also an important step undertaken in maintaining the stability of the financial system. Therefore it was decided that the JPSK Bill was refined into the PPKSK Bill. Related to Bank Indonesia's role within the framework of the PPKSK Bill, the decision-making area tested is to determine the impact of pressure on the stability of the financial system.

Bank Indonesia has also established Bank Indonesia's Crisis Management Protocol as guidance and legal protection in crisis handling and prevention.

Moreover, in CMP in the regional level, Bank Indonesia also built coordination, among others but not limited to, Crisis Management and Resolution Framework (CMRF) in Executive's Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) and Chiang Mai Initiative Multilateralization.

Bank Indonesia also has an agreement with the Financial Services Authority (OJK) in 2013 for the establishment of Macro-Microprudential Coordinating Forum (FKMM) in maintaining economic stability. In addition, there is the Reporting System and Information Exchange Coordinating Forum (FKPISP) as the medium

untuk pertukaran informasi serta pengelolaan sistem pelaporan lembaga keuangan, sehingga pengawasan makroprudensial-mikroprudensial dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2015, Bank Indonesia dan OJK kembali menandatangani sebuah Surat Keputusan Bersama untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Debitur yang semakin lengkap dan akurat. Surat ini merupakan pengembangan dari amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang memandatkan Bank Indonesia untuk mengalihkan sistem informasi tersebut kepada OJK per 31 Desember 2017.

Dalam rangka pengawasan perbankan, keuangan nonbank, dan pasar modal, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terus bersinergi untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga, meliputi perumusan Kebijakan dan Peraturan Makroprudensial-Mikroprudensial, pertukaran informasi hasil pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan *macro-surveillance*, pelaksanaan pemeriksaan bank, koordinasi di bidang sistem pembayaran, koordinasi penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, koordinasi dalam rangka *stance* Indonesia atas isu-isu forum internasional, koordinasi dalam pengelolaan rekening OJK di Bank Indonesia, serta koordinasi antara Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia dengan Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Cakupan kerja sama dan koordinasi BI-OJK tidak hanya sebatas pada sektor perbankan, namun juga mencakup sektor pasar modal dan Institusi Keuangan Non Bank (IKNB). Kerja sama dan koordinasi mencakup aspek pertukaran data maupun kerja sama dalam merespons isu atau forum internasional seperti FSB Peer Review on Shadow Banking.

Dalam hal pengembangan sistem pembayaran serta pengelolaan uang, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan sistem pembayaran

for information exchange as well as reporting system management of financial institutions, so the macroprudential-microprudential can run more effectively and efficiently.

In 2015, Bank Indonesia and OJK signed a Joint Letter to increase cooperation and coordination on the development and management of more complete and accurate Debtor Information System. This letter was the development of mandate in Law No. 21/2011 on Financial Services Authority, which requires Bank Indonesia to shift the information system to OJK per 31 December 2017.

In the supervision of banks, non-bank financial institutions, and stock market, Bank Indonesia and the Financial Services Authority continue synergy to reinforce and optimize the function, duty, and authority of each institution, through the formulation of Macroprudential-Microprudential Regulation and Policy, information exchange from supervision results of Financial Service Institutions and macro-surveillance, bank examination, coordination in payment system, coordination short-term liquidity loan facility, socialization and education to the people, coordination in Indonesia's stance on international forum issues, coordination in OJK account management in Bank Indonesia, as well as coordination between Bank Indonesia's Domestic Representative Office with Regional Office/Financial Services Authority Office.

The scope of cooperation and coordination BI-OJK is not limited to the banking sector, but also covers stock market and Non-Bank Financial Institutions (IKNB) sector. Cooperation and coordination consists of data exchange as well as cooperation in responding to issues or international forum such as FSB Peer Review on Shadow Banking.

In developing payment system as well as currency management, Bank Indonesia also coordinated with related ministries and authorities. Coordination was made to ensure the payment system and Rupiah management

140

198

216

233

dan pengelolaan uang Rupiah di Indonesia berjalan lancar, aman, efisien, dan andal. Sejalan dengan itu, dibentuk Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) pada tahun 2015 yang bertujuan untuk memberikan masukan terhadap arah kebijakan strategis sistem pembayaran, menyelaraskan kebijakan atau ketentuan terkait sistem pembayaran antara kementerian dan otoritas terkait, mengkoordinasikan program atau inisiatif lintas kementerian dan otoritas terkait, menggerakkan inovasi di bidang sistem pembayaran, serta memberikan rekomendasi program sosialisasi dan edukasi kebijakan sistem pembayaran.

Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar (UTLE) yang mencapai sebesar Rp160,25 triliun di tahun 2015. Untuk penanggulangan pemalsuan uang Rupiah, dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.

Dalam mewujudkan reformasi struktural, koordinasi dengan Pemerintah berlanjut pada peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi I dan II yang bertujuan untuk melakukan pendalaman pasar keuangan. Bank Indonesia menyusun kebijakan intervensi di pasar *forward* untuk menjaga keseimbangan *supply* dan *demand* di pasar keuangan, serta menerbitkan Surat Deposito Bank Indonesia dan *Reverse Repo* (RR) Surat Berharga Negara bertenor dua minggu untuk memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah di pasar uang. Sinergi melalui dua kebijakan di atas diharapkan dapat secara efektif memberikan sentimen positif terhadap pergerakan Rupiah di pasar keuangan dan memitigasi potensi risiko yang mungkin timbul akibat tekanan dari perekonomian global. Hal tersebut merupakan kondisi yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di tengah turbulensi perekonomian dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung upaya-upaya peningkatan kapasitas perdagangan dan investasi di dalam

in Indonesia went smooth, safe, efficient, and reliable. In line with that, the Indonesia Payment System Forum (FSPI) was established in 2015 aimed at providing recommendations to the payment system strategic policy directions, streamlining policies or provisions related with payment system between relevant ministries and authorities, coordinating programs or initiatives cross-ministries and authorities, empowering innovation in payment system, as well as giving recommendations on socialization and educational programs of payment system policy.

Bank Indonesia also coordinated with the government for the destruction of currency unfit for circulation (UTLE) which reached Rp160.25 trillion in 2015. To deal with counterfeit Rupiah, there was coordination and cooperation with all elements of the Counterfeit Rupiah Eradication Coordinating Body (Botasupal) which includes the National Intelligence Agency (BIN), Indonesian Police, Attorney General's Office, Finance Ministry, and Bank Indonesia.

In realizing structural reform, coordination with the Government continued in the launch of Economic Policy Package I and II which aimed to deepen the financial market. Bank Indonesia composed intervention policy in the forward market to maintain balance in supply and demand in the financial market, as well as issuing Bank Indonesia Deposit Notes and Reverse Repo (RR) of Government Bonds with two weeks tenor to strengthen rupiah liquidity in the money market. Synergy through the two policies above was expected to provide positive sentiment to the Rupiah movement in the financial market and mitigate risk potentials which might arise due to global economic pressure. It was an important condition to push a more sustainable economic growth amidst global economic turbulence which was full of uncertainty. The coordination was expected to support efforts to increase trade and investment capacity domestically, through transaction flexibility between economic players,

negeri, melalui fleksibilitas transaksi oleh pelaku ekonomi, yang pada akhirnya akan mewujudkan terciptanya pasar keuangan yang lebih dalam. Perumusan kebijakan di atas dilakukan dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan. Bank diwajibkan untuk memenuhi pengaturan-pengaturan terkait mitigasi risiko, sebagaimana yang telah diatur oleh otoritas perbankan.

Koordinasi dalam rangka implementasi reformasi struktural juga dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan sektor riil. Koordinasi dilakukan pada bidang unggulan yang menjadi prioritas utama pada tahun 2015 yaitu bidang kemaritiman, infrastruktur energi, serta industri dan pariwisata. Reformasi pada bidang-bidang yang menjadi penggerak utama perekonomian nasional tersebut semakin dipercepat untuk mewujudkan ketahanan perekonomian nasional yang lebih tinggi, berkesinambungan, dan inklusif. Bentuk koordinasi nasional terkait implementasi reformasi struktural tersebut, antara lain: (i) Forum koordinasi nasional dalam bidang Kemaritiman diadakan pada tanggal 25 Mei 2015 di Ambon, Maluku, (ii) Forum koordinasi nasional bidang infrastruktur energi diadakan pada tanggal 11 Agustus 2015 di Balikpapan, Kalimantan Timur, (iii) Forum koordinasi nasional bidang industri dan pariwisata diadakan pada tanggal 13 November 2015 di Yogyakarta.

which eventually would create a deeper financial market. The policy formulation was made based on prudential principles and considering the impact to financial system stability. Banks were required to fulfill regulations related to risk mitigation, as set by the banking authority.

Coordination in the structural reform implementation was conducted by Bank Indonesia together with the central and regional governments related to real sector. Coordination was made in leading sectors which became priorities in 2015, which were maritime, energy infrastructure, as well as industry and tourism. Reform on those sectors which became the main economic driver was accelerated to achieve a higher, sustainable, and inclusive economic security. The national coordination related to the structural reform implementation among others were (i) national coordination forum on maritime on 25 May 2015 in Ambon (ii) national coordination forum on infrastructure on 11 August 2015 in Balikpapan, (iii) national coordination forum on industry and tourism on 13 November 2015 in Yogyakarta.



MENDORONG PERLUASAN AKSES KEUANGAN, SERTA PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Bank Indonesia terus berupaya mendorong perluasan akses keuangan masyarakat melalui sistem keuangan yang inklusif untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan. Hal ini sejalan dengan agenda Pemerintah untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap bank agar mencapai kesejahteraan ekonomi.

Hasil survei Bank Dunia menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2014 mencapai 36,1%, meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar 19,6%. Namun, angka tersebut masih jauh di bawah tingkat inklusi keuangan rata-rata negara-negara tetangga di Asia Timur dan Pasifik sebesar 69,0%. Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia juga tercermin dari rendahnya tingkat pengenalan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep dasar keuangan seperti inflasi, asuransi, suku bunga, dan investasi atau saham.

Bank Indonesia melakukan survei untuk melihat perkembangan keuangan inklusif dalam negeri yang menghasilkan Indeks Keuangan Inklusif Indonesia (IKI). Ada tiga indikator yang digunakan, yaitu: (i) ketersediaan layanan bank berupa kantor bank, ATM, dan agen Layanan Keuangan Digital (LKD), (ii) rekening bank, serta (iii) nilai simpanan dan kredit. Selain itu, ditambahkan juga indikator jumlah rekening uang elektronik di Indonesia.

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa IKI Indonesia pada Desember 2015 sebesar 0,358 atau 35,8%, berada pada level medium berdasarkan nilai indeks komposit keuangan inklusif pada *range* antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks keuangan inklusif (mendekati 1), tingkat inklusi keuangan di negara tersebut semakin baik. Semakin rendah nilai indeks keuangan inklusif (mendekati 0), maka tingkat inklusi keuangan di negara tersebut semakin rendah.

PROMOTING BROADER FINANCIAL ACCESS AS WELL AS REAL SECTOR AND MSME DEVELOPMENT

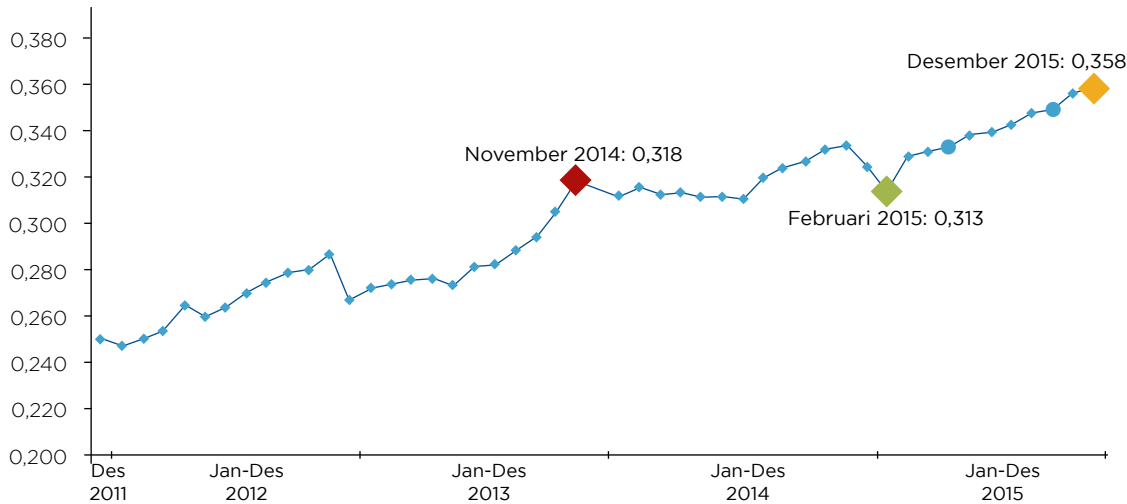
Bank Indonesia continues promoting broader financial access of the people through inclusive financial system to create financial system stability. This is in line with the Government's agenda to increase the number of people with access to banking to reach economic prosperity.

The World Bank survey results showed Indonesia's financial inclusion level in 2014 reaching 36.1%, increasing from 19.6% in 2011. However, the figure was still far below the average financial inclusion level of neighbor countries in East Asia and Pacific of 69.0%. Low financial literacy level of Indonesian people was also reflected from the low level of people awareness on financial institutions and low understanding on basic concept of finance such as inflation, insurance, interest rate, and investment or share.

Bank Indonesia conducted a survey to see the development of domestic financial inclusion which resulted in Indonesian Inclusive Finance Index (IKI). There were three indicators used: (i) indicator of available banking services in form of bank offices, ATM, and Digital Finance Service agents, (ii) bank accounts, and (iii) deposit and credit value. In addition, an indicator on the number of electronic money accounts in Indonesia was added.

Calculation results showed that Indonesia IKI in December 2015 were 0.358 or 35.8%, in the medium level based on the inclusive finance composite index in range of 0 to 1. The higher the inclusive finance index value (close to 1), the level of financial inclusion in that country is higher. The lower the inclusive finance index value (close to 0), the level of financial inclusion in that country is lower.

Grafik 9. Indeks Komposit Keuangan Inklusif Indonesia
Graphic 9. Indonesia Financial Inclusion Composite Indeks



Sumber: Laporan Indikator Keuangan Inklusif (Desember 2015)
 Source: *Financial Inclusion Indicator Report (December 2015)*

Bank Indonesia melakukan berbagai program keuangan inklusif untuk meningkatkan penetrasi keuangan ke seluruh lapisan masyarakat, antara lain melalui produk TabunganKu dan *Basic Saving Account (BSA)*, edukasi keuangan kepada masyarakat, dan kampanye Gerakan Indonesia Menabung (GIM).

Bank Indonesia conducted several financial inclusion programs to increase financial penetration in all levels of society, among others through TabunganKu product and Basic Saving Account (BSA), financial education to the people, and campaign Gerakan Indonesia Menabung (GIM).

Sampai dengan Desember 2015, jumlah rekening TabunganKu tercatat sebanyak 12.667.065 rekening, atau meningkat 1,7% dari tahun 2014 sebanyak 12.450.812 rekening. Untuk meningkatkan jumlah rekening TabunganKu, Bank Indonesia selama tahun 2015 melakukan berbagai upaya, di antaranya menyempurnakan fitur TabunganKu guna mendorong masyarakat untuk menabung sekaligus menyediakan tabungan murah dan mudah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Until December 2015, the number of TabunganKu accounts were 12,667,065 accounts, or increasing 1.7% from 2014 of 12,450,812 accounts. To increase the number of TabunganKu accounts, Bank Indonesia in 2015 performed some efforts, among others improving the features of TabunganKu to encourage the people to save as well as providing cheap and simple saving accounts in line with the people's needs.

Bank Indonesia juga melakukan kerja sama dengan Bank Dunia pada triwulan IV 2015 dalam menyusun kajian *Tiered Account for Financial Inclusion-Preliminary Study*. Kajian itu menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain uang elektronik merupakan pintu masuk (*entry point*) dalam membentuk *less cash society* dan/atau pengenalan terhadap akses keuangan. Sementara *Basic Savings Account (BSA)* menjadi media pertama untuk menabung bagi masyarakat yang belum tersentuh perbankan (*unbanked*), sedangkan masyarakat yang sudah mengenal perbankan dapat menggunakan tabungan reguler.

Bank Indonesia also cooperated with the World Bank in the fourth quarter of 2015 in outlining the Tiered Account for Financial Inclusion-Preliminary Study. The study produced several conclusions, among others electronic money is the entry point in forming less cash society and/or introduction to financial access. Meanwhile Basic Savings Account (BSA) became the first medium for the people who are unbanked, while those who know banking can use regular savings.



Dalam rangka memberikan edukasi keuangan pada masyarakat, Bank Indonesia melaksanakan berbagai aktivitas termasuk gerakan menabung di berbagai daerah yang melibatkan Satuan Kerja di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Perusahaan. Edukasi keuangan juga melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan perbankan.

In providing financial education to the people, Bank Indonesia performed various activities including savings movement in several areas involving Departments in Headquarters and all offices. Financial education also involved related ministries/institutions, regional governments, and banks.

Pada tahun 2015, Bank Indonesia juga menyelesaikan Survei Keuangan Inklusif 2015 secara nasional, yaitu Survei Edukasi Keuangan Inklusif dan Survei Keuangan Inklusif. Berdasarkan hasil Survei Keuangan Inklusif 2015, Bank Indonesia menyusun Strategi Edukasi Keuangan Inklusif yang mencakup peta jalan (*roadmap*) edukasi keuangan inklusif 2015 hingga 2019.

In 2015, Bank Indonesia also completed Financial Inclusion Survey 2015 nationwide, comprising Financial Inclusion Education Survey and Financial Inclusion Survey. Based on the 2015 Financial Inclusion Survey, Bank Indonesia formulated the Financial Inclusion Education Strategy which covered financial inclusion education roadmap 2015 to 2019.

Upaya perluasan akses keuangan difokuskan melalui pengembangan inovasi berbasis teknologi digital, pemanfaatan elektrifikasi, dan inovasi pembayaran ritel di bidang teknologi keuangan. Program Layanan Keuangan Digital (LKD) dikembangkan terutama untuk mengatasi keberadaan kantor cabang bank yang minim di pedesaan dan di wilayah pelosok. Di sisi lain, inovasi pembayaran ritel diperlukan sebagai motor penggerak sistem pembayaran di Indonesia, sehingga diharapkan dapat mendorong pembayaran secara elektronik (*e-payment*) dan berkontribusi positif bagi perekonomian.

Financial access expansion was focused through the development of digital technology-based innovation, electrification utilization, and retail payment innovation in financial technology sector. Digital Finance Services (LKD) program was developed mainly to cope with small number of bank branches in villages and in remote areas. On the other hand, retail payment innovation is needed as the driver of payment system in Indonesia, and expected to boost e-payment and make positive contribution to the economy.

Sejak diluncurkan pada Juli 2014, program LKD telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri keuangan, yang tercermin dari bertambahnya jumlah bank penyelenggara dan agen LKD. Sampai dengan Desember 2015,

Since its launch in July 2014, the LKD program has given positive impact to the financial industry development, as reflected from the growing number of bank operators and LKD agents. Until December 2015, there were five



UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian perlu mendapatkan akses keuangan yang lebih baik agar dapat meningkatkan kapasitasnya. Bank Indonesia pada 2015 mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan bank umum untuk menyalurkan 20% dari total kredit untuk UMKM.

MSME which is the backbone of the economy needs to get better access of financing to be able to increase its capacity. Bank Indonesia in 2015 issued regulation requiring commercial banks to channel 20% of total loans for MSME.





Lima tema pengembangan UMKM unggulan, yaitu (i) daerah perbatasan/tertinggal, (ii) pemberdayaan perempuan, (iii) nelayan, (iv) industri kreatif, dan (v) komoditi ekspor/substitusi impor.

Five themes of priority MSME development: (i) border/remote areas, (ii) women empowerment, (iii) fishermen, (iv) creative industry, and (v) export commodity/import substitute.



terdapat lima bank penyelenggara LKD dengan jumlah agen yang melayani masyarakat mencapai 69.548 agen dan menjangkau 461 Kabupaten/kota. Keberadaan LKD ini juga terkait dengan pemegang uang elektronik yang jumlahnya telah mencapai 1.145.486 orang dengan nominal sebesar Rp43,1 miliar. Jenis transaksi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di agen LKD adalah setor tunai (*top-up*) uang elektronik, diikuti dengan transfer dana dan transaksi pembayaran rutin. Pada tahun 2015, rata-rata nilai transaksi di agen LKD sebesar Rp44.891 sesuai dengan tingkat kemampuan membelanjakan uang dari kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh bank (*unbanked*).

Upaya meningkatkan akses keuangan masyarakat pada tahun 2015 juga dilakukan dengan menggandeng komunitas masyarakat Islam melalui strategi *Islamic Financial Inclusion*. Sebagai proyek percontohan, Bank Indonesia melibatkan tiga perusahaan jasa telekomunikasi sebagai penyelenggara LKD dan komunitas pesantren sebagai agen LKD. Penggunaan uang elektronik dalam kerangka LKD cocok untuk menarik masyarakat Islam bertransaksi mengingat uang elektronik tidak memiliki unsur bunga yang menimbulkan riba dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, Bank Indonesia juga membantu Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat secara nontunai melalui LKD dan Kantor Pos, seperti ketika menyalurkan bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Penyaluran bantuan sosial secara nontunai melalui LKD punya banyak manfaat, tidak hanya untuk masyarakat penerima bantuan dan agen LKD tetapi juga bagi Pemerintah selaku pemberi bantuan. Dari sisi Pemerintah, manfaat yang diterima berupa peningkatan transparansi, efisiensi biaya, dan ketepatan sasaran. Sedangkan bank penyelenggara memperoleh manfaat berupa munculnya pasar baru untuk pengembangan produk, serta meningkatkan pendapatan dari biaya transaksi. Sementara penerima bantuan juga mendapatkan manfaat berupa biaya pengambilan dana yang lebih murah, efisiensi waktu dalam pengambilan dana bantuan, terkoneksi dengan bank sebagai sarana menyimpan uang, dan meningkatkan keamanan dalam menyimpan uang. Penyaluran bantuan sosial secara nontunai akan berdampak pada

banks organizing LKD with 69,548 agents who served the people reaching 461 regencies/cities. The LKD existence was also related with electronic money holders which number reached 1,145,486 people with nominal of Rp43.1 billion. Most transaction types conducted by the people in LKD agents were electronic money top-up, followed by fund transfers and routine payment transactions. In 2015, the average transaction value in LKD agents reached Rp44,891 in accordance with the spending level of unbanked community.

The effort to increase the people's financial access in 2015 was also done by engaging the Islamic community through Islamic Financial Inclusion strategy. As pilot projects, Bank Indonesia invited three telecommunication firms as LKD operators and Islamic boarding school community as LKD agents. The use of electronic money in LKD framework is suitable to attract Islamic community to make transactions because electronic money does not have elements of interest which create usury and does not contradict sharia principles.

In addition, Bank Indonesia also helped the Government in channeling social aid to the people in non-cash through LKD and Post Office, such as channeling the Prosperous Family Savings Program (PSKS) aid. Non-cash social aid channeling through LKD brings lots of benefits, not only for the aid recipients and LKD agents but also the Government as the benefactor. The Government received benefits such as increased transparency, cost efficiency, and target accuracy. While organizing banks received benefits in form of new market for product development, as well as increasing revenue from transaction fees. Meanwhile aid recipients also got benefits in form of cheaper fund withdrawal fees, time efficiency in withdrawing aids, connected to banks as saving means, and increasing security in saving money. Non-cash social aid channeling will encourage local economic growth, increasing financial

140

198

216

233

pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan keuangan inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang.

Sebagai upaya mendukung pencapaian tugas BI dalam mengendalikan inflasi dari sisi suplai, BI melakukan strategi pengembangan UMKM dengan berbagai program, antara lain peningkatan akses keuangan UMKM, peningkatan kapasitas UMKM, penelitian dan penyediaan informasi UMKM, serta sinergi program dan kegiatan.

Sebagai bentuk bauran kebijakan terkait UMKM dengan kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai pemberian kredit/pembiayaan dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM. Melalui ketentuan tersebut, bank umum diwajibkan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar minimum 20% (secara bertahap) dari total kredit. Bank Indonesia memberikan insentif berupa pelonggaran batas atas *Loan to Funding Ratio* (LFR) bagi bank umum yang dapat memenuhi kewajiban pencapaian rasio kredit UMKM dengan kualitas terjaga. Sedangkan bagi yang tidak dapat memenuhi rasio kredit UMKM sesuai yang ditetapkan dan/atau memiliki kualitas kredit kurang baik akan dikenakan disinsentif pengurangan jasa giro.

Terhadap kebijakan yang diterbitkan, Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pelaku pasar. Hal ini bertujuan agar seluruh pelaku usaha memiliki kesamaan pemahaman terhadap pasar keuangan.

Berkenaan dengan hal ini, pelaksanaan program sosialisasi, koordinasi, dan edukasi akan direncanakan secara komprehensif dan terintegrasi, dan dilakukan tidak hanya dengan pelaku pasar, tapi juga dengan penegak hukum, lembaga arbitrase, auditor, dan lembaga terkait lainnya.

Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan insentif berupa pelatihan kepada bank umum yang ingin meningkatkan kompetensi SDM yang menangani penyaluran kredit UMKM, pelatihan kepada UMKM untuk meningkatkan kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan, dan fasilitasi pemeringkatan kredit (*credit rating*) yang diberikan kepada seluruh bank umum.

inclusion, increasing the people's quality of life, and can reduce poverty in the long run.

As part of moves to support BI's task in controlling inflation from supply side, BI conducts MSME development strategy with several programs, among others the increase in MSME financial access, the increase in MSME capacity, research and information availability of MSME, as well as program and activity synergy.

As form of policy mix related to MSME and macroprudential policy, Bank Indonesia issued rules on credit/financing disbursement and technical support in MSME development. Through the rules, commercial banks are required to channel loans to MSMEs at least 20% (in stages) from total loans. Bank Indonesia provided incentive in form of the loosening of Loan to Funding Ratio (LFR) limit for commercial banks which meet the requirement of MSME credit ratio with manageable quality. Those who fail to meet the required MSME credit ratio and/or have low credit quality will receive disincentive in form of currency account service reduction.

Bank Indonesia also conducted socialization and education activities of the issued policies to all market participants. The aim is for all business players to have a common understanding towards the financial market.

Related to this, socialization, coordination, and education program implementation will be planned comprehensively and integrated, not only with market players, but also law enforcers, arbitrations, auditors, and other related institutions.

In addition, Bank Indonesia also provided incentive in form of training to commercial banks which wanted to increase the competence of human resources who handled MSME loans channeling, training to prospective MSME bank debtors aimed at increasing MSME capability in making financial reports, and credit rating facility provided to all commercial banks.

Bank Indonesia juga berupaya memberikan informasi terkini mengenai UKM melalui *minisite* Info UMKM pada situs Bank Indonesia, dari penelitian sampai informasi kredit yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* terkait untuk melakukan usaha maupun dalam memberikan pembiayaan.

Dalam mengembangkan UMKM, Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah. Melalui kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bank Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan UMKM dibidang kelautan dan perikanan. Di samping itu, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sektor pertanian lebih lanjut. Bank Indonesia menjalin kerja sama terkait kewirausahaan dengan Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam implementasinya, program kerja sama dilakukan di 12 pondok pesantren dan 5 (lima) Lembaga Masyarakat.

Pengembangan UMKM juga dilakukan melalui pengembangan kluster. Ke depan, selain komoditas ketahanan pangan, pemilihan komoditas kluster didasarkan pada 5 (lima) tema pengembangan UMKM unggulan, yaitu (i) daerah perbatasan/tertinggal, (ii) pemberdayaan perempuan, (iii) nelayan, (iv) industri kreatif, dan (v) komoditi ekspor/substitusi impor. Program pengembangan kluster Bank Indonesia akan disinergikan dengan beberapa program lainnya seperti program wirausaha, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK). Program pengembangan wirausaha yang dilakukan Bank Indonesia semakin berkembang dengan fokus pada wirausaha *scale-up* di sektor agribisnis (ketahanan pangan) dan orientasi ekspor. Program ini menjangkau 643 wirausaha pada tahun 2015.

Bank Indonesia also tried to provide latest information on SME through the MSME Info mini site in Bank Indonesia's website, from research to credit information which can be used by all stakeholders to do business as well as providing financing.

In developing MSME, Bank Indonesia synergized with the Government. Through MoU with the Maritime and Fisheries Ministry, Bank Indonesia is committed to develop MSME in maritime and fisheries community. In addition, Bank Indonesia signed MoU with the Agriculture Ministry to increase capacity and empower agriculture sector. Bank Indonesia also signed cooperation on entrepreneurship with the Religious Ministry and Law and Human Rights Ministry. In the implementation, cooperation programs were conducted in 12 Islamic boarding schools in 4 (four) regions and 5 (five) Correctional Institutions.

MSME development was also done through cluster development. Going forward, besides food security commodity, cluster commodity selections will be based on 5 (five) themes of leading MSME development: (i) border/remote areas, (ii) women empowerment, (iii) fishermen, (iv) creative industry, and (v) export commodity/import substitute. Bank Indonesia's cluster development program will be synergized with several other programs such as entrepreneurship program, Non Cash National Movement (GNNT), and Financial Transaction Record (PTK). Entrepreneurship Development Program conducted by Bank Indonesia is improving with focus on scale-up entrepreneurs in agribusiness sector (food security) and export oriented. This program attracted 643 entrepreneurs in 2015.



Championship Kluster

Program Penghargaan Kinerja Kluster/*Championship Kluster*, Bank Indonesia diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memfasilitasi pengembangan kluster di wilayahnya, serta kepada pelaku/*stakeholder* pengelola atau penggerak kluster. Selain memberikan apresiasi, program ini juga dimaksudkan untuk memberikan inspirasi bagi pelaku kluster mengenai praktik-praktik terbaik pengembangan kluster, serta bagi para pembambil kebijakan dalam pelaksanaan program yang sinergis, komprehensif, dan fokus pada keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah.

Championship Cluster

The Championship Cluster Award Program, Bank Indonesia is held to give appreciation to parties which have facilitated cluster development in their areas, as well as to players/stakeholders managing or driving clusters. Besides giving appreciation, the program is aimed at providing inspirations for cluster players on the best practice for cluster development, as well as decision makers in the implementation of program which is synergic, comprehensive, and focused on the competitive and comparative advantage or the areas.

Tabel 2. Data Klaster Binaan Bank Indonesia Menurut Komoditas
Table 2. Data of Bank Indonesia-led Cluster Based on Commodities

No.	Komoditas Comodity	Jumlah Klaster Number of Commodity Clusters	Wilayah Area
1	Cabe Merah <i>Red Chili</i>	30	Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sibolga, Banten, Tasik, Solo, Jember, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan <i>South Sumatera, Lampung, Bangka Belitung, West Sumatera, Riau, Jambi, Sibolga, Banten, Tasik, Solo, Jember, East Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, Balikpapan, North Sulawesi, North Maluku, West Papua, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, South Sulawesi</i>
2	Bawang Merah <i>Red Onion</i>	24	Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Pematang Siantar, Lhokseumawe, Banten, Cirebon, Solo, Tegal, DIY, Kediri, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Merauke Utara, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan <i>South Sumatera, North Sumatera, Pematang Siantar, Lhokseumawe, Banten, Cirebon, Solo, Tegal, DIY, Kediri, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, Balikpapan, North Merauke, West Papua, Central Sulawesi, South Sulawesi</i>
3	Padi Paddy	31	Jambi, Sumatera Utara, Pematang Siantar, Lhokseumawe, Tasikmalaya, Banten, Jawa Tengah, Solo, DIY, Malang, Purwokerto, Jember, Kediri, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, NTT, Bali, Sulawesi Selatan <i>Jambi, North Sumatera, Pematang Siantar, Lhokseumawe, Tasikmalaya, Banten, Central Java, Solo, DIY, Malang, Purwokerto, Jember, Kediri, East Kalimantan, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, Maluku, Central Sulawesi, North Sulawesi, East Nusa Tenggara, Bali, South Sulawesi</i>
4	Sapi Cow	28	Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Aceh, Jawa Barat, Solo, Purwokerto, Tegal, DIY, Jawa Timur, Jember, Kalimantan Selatan, Gorontalo, NTB, NTT, Bali, Sulawesi Selatan <i>Lampung, West Sumatera, Jambi, Aceh, West Java, Solo, Purwokerto, Tegal, DIY, East Java, Jember, South Kalimantan, Gorontalo, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, Bali, South Sulawesi</i>
5	Itik Talang Benih <i>Talang Benih Duck</i>	2	Bengkulu Bengkulu
6	Sagu Sago	1	Riau Riau
7	Sayuran/ Hortikultura <i>Vegetable/ Horticulture</i>	16	Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Malang, Maluku, Sulawesi Tenggara <i>West Sumatera, West Java, East Java, Malang, Maluku, Southeast Sulawesi</i>
8	Pertanian terpadu <i>Integrated Farming</i>	4	Kepulauan Riau, Jawa Tengah <i>Riau Islands, Central Java</i>
9	Pinang Betle	1	Jambi Jambi
10	Kopi Cofee	4	Jambi, Bali <i>Jambi, Bali</i>
11	Hidroponik <i>Hydroponic</i>	2	Riau Riau
12	Perikanan <i>Fishery</i>	6	Jambi, Jawa Tengah, Tegal, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan <i>Jambi, Central Java, Tegal, East Kalimantan, South Kalimantan</i>
13	Ayam <i>Chicken</i>	2	Tasikmalaya, Tegal <i>Tasikmalaya, Tegal</i>
14	Bawang Putih <i>Garlic</i>	1	Tegal Tegal
15	Kakao Cacao	6	DIY, Sulawesi Tenggara <i>DIY, Southeast Sulawesi</i>
16	Mocaf Mocaf	1	DIY DIY
17	Gula Sugar	2	Purwokerto, DIY <i>Purwokerto, DIY</i>
18	Kelapa <i>Coconut</i>	1	Purwokerto Purwokerto
19	Kedelai <i>Soybean</i>	2	Jawa Timur, NTB <i>East Java, West Nusa Tenggara</i>
20	Kreatif/ Kerajinan <i>Creative/ Craft</i>	3	Purwokerto, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan <i>Purwokerto, East Kalimantan, South Kalimantan</i>
TOTAL		167	

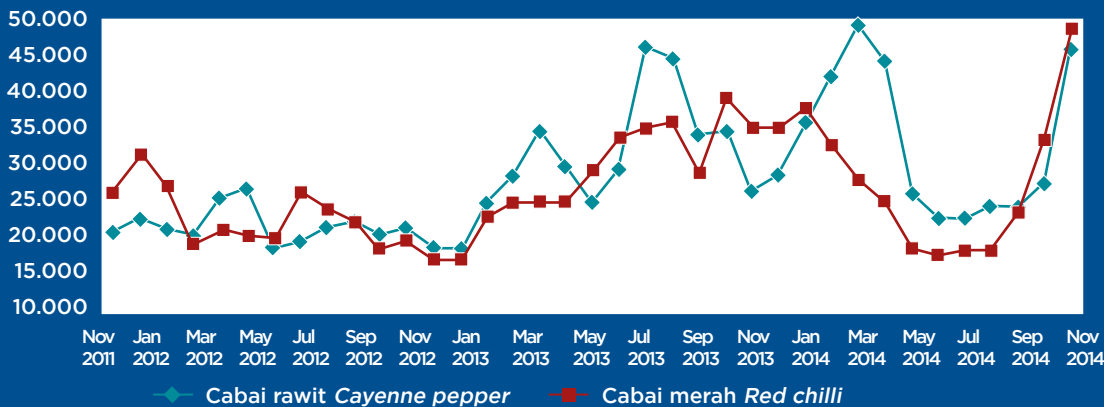
Sinergi Pengendalian Inflasi

Synergy in Inflation Control

Volatilitas inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh *shocks* dari harga yang ditetapkan/kebijakan Pemerintah (*administered prices*) dan *shocks* dalam kelompok bahan makanan (*volatile food*). Salah satu komoditi yang memiliki kontribusi besar adalah cabai. Komoditas cabai memiliki fluktuasi harga yang cukup tinggi akibat tidak meratanya ketersediaan pasokan di sepanjang tahun.

Inflation volatility in Indonesia is affected by shocks of administered prices and volatile food. One commodity which has big contribution is chili. Chili has high price fluctuation due to uneven availability of supply throughout the year.

Grafik 10. Harga Eceran Cabai Nasional 2012-2014 (Rp/Kg)
Graphic 10. Graphic on National Chilli Retail Price 2012-2014 (Rp/Kg)



Permasalahan tersebut timbul karena tidak adanya pola tanam/produksi dimana komoditas cabai hanya sedikit dibudidayakan pada musim kemarau dan lebih banyak dibudidayakan pada saat musim hujan meskipun memiliki potensi risiko kegagalan yang lebih tinggi. Di samping itu, terbatasnya sentra produksi cabai yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan pasokan.

The problems arise because there is no production/cropping pattern where chili commodity is only little cultivated in the dry season and more often cultivated in the rainy season despite having higher failure risk potentials. In addition, the limited chili production center which is still concentrated in Java areas is one of the causes of scarce supply.

Untuk mengurangi potensi lonjakan harga dan menjaga ketersediaan pasokan cabai, Pemerintah menginisiasi perubahan pola tanam komoditas cabai melalui Gerakan Tanam Cabai

To reduce price surge potential and maintain availability of chili supply, the Government initiated the change of cropping pattern of chili commodity through the Chili Cultivation

Musim Kemarau (GTCK). Gerakan ini merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong penanaman cabai di musim kemarau dengan pemberian insentif berupa bantuan paket peralatan GTCK.

Program GTCK tersebut diimplementasikan di 100 kabupaten yang diawali dengan pengembangan area percontohan seluas 1.000 meter/kecamatan, dengan total luas lahan 1.500 Ha. Sebagai langkah awal, Pemerintah melakukan *pilot project* di area percontohan seluas 1 Ha yang dilakukan di 4 Kabupaten dan Kota, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Ciamis, Kota Ternate dan Kota Pontianak. Dalam penerapan *pilot project* tersebut, Pemerintah memperoleh dukungan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPPT) dan Bank Indonesia.

Movement in Dry Season (GTCK). This movement is the Government's efforts to boost chili cultivation in day season with incentive of GTCK tools package aid.

The GTCK program was implemented in 100 regencies beginning with the pilot areas of 1,000 meter/district, with total land of 1,500 Ha. As starting steps, the Government conducted pilot project in the pilot areas of 1 Ha conducted in 4 Regencies and Cities: Kupang Regency, Ciamis Regency, Ternate City, and Pontianak City. In the pilot project implementation, the Government received support from the Agriculture Technology Assessment Agency (BPPT) and Bank Indonesia.



Bank Indonesia melakukan sinergi melalui harmonisasi program untuk mendorong pengembangan *pilot project* di 4 Kabupaten/Kota tersebut. Dalam implementasinya Bank Indonesia memberikan dukungan berupa bantuan teknis dalam pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan, disamping dukungan penyediaan peralatan GTCK berupa *rain shelter* (untuk penanaman di musim hujan) atau *screen house* (untuk penanaman di musim kemarau)

Bank Indonesia conducted synergy through the harmonization of program to push for the development of pilot project in the 4 Regencies/Cities. In the implementation Bank Indonesia provided support in form of technical assistance in developing HR capacity through training, in addition to supply of GTCK equipments in form of rain shelter (for cultivation in rainy season) or screen house (for

serta peralatan lainnya. Dalam pelaksanaannya komitmen untuk mendukung program tersebut tidak hanya diberikan oleh Kantor Pusat, namun juga oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

cultivation in dry season) and other tools. The commitment to support the program is not only provided by the Headquarters, but also Bank Indonesia's Representative Offices.

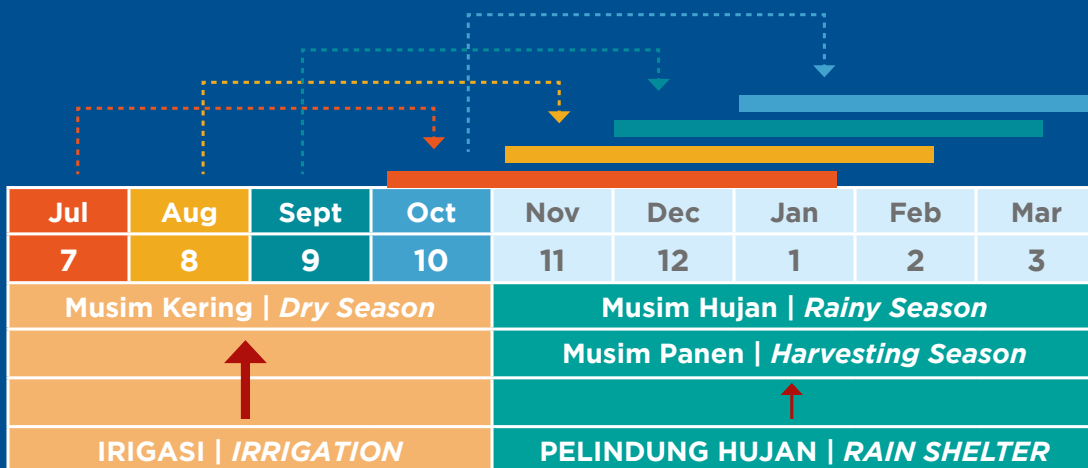
Gambar 1. Dukungan Bank Indonesia dalam GTCK
Picture 1. Bank Indonesia Support for GTCK



Sejalan dengan tugas Bank Indonesia untuk mendukung pengendalian inflasi khususnya yang bersumber dari komoditas cabai melalui pengembangan klaster, Bank Indonesia juga melakukan perluasan wilayah percontohan GTCK melalui penyediaan lahan contoh di beberapa klaster cabai binaan. Terdapat 4 (empat) klaster cabai yang menjadi percontohan, yang berlokasi di klaster cabai binaan Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, klaster binaan Kantor Perwakilan Prov. Bangka Belitung, klaster binaan Kantor Perwakilan Jember, dan klaster binaan Kantor Perwakilan Prov. NTB, sehingga terdapat total luas lahan sebesar 18 ha yang menjadi peserta GTCK dari Bank Indonesia. Pada klaster-klaster tersebut diterapkan pengaturan pola tanam cabai, dan penggunaan teknologi tepat guna.

In line with Bank Indonesia's task to support inflation control especially coming from chili commodity through cluster development, Bank Indonesia also made expansion of GTCK pilot areas by providing sample sites in several developed chili clusters. There are 4 (four) chili clusters which become models, located in chili cluster developed by South Sulawesi Representative Office, cluster developed by Bangka Belitung Representative Office, cluster developed by Jember Representative Office, and cluster developed by NTB Representative Office, making a total land area of 18 ha which become GTCK participants from Bank Indonesia. In the clusters the arrangement of chili cultivation pattern and the use of appropriate technology are implemented.

Gambar 2. Ilustrasi Pola Tanam Cabai di Indonesia
Picture 2. Illustration of Chilli Cropping Paterns in Indonesia



Saat ini klaster percontohan telah membangun sarana dan infrastruktur pelaksanaan GTCK, berupa penerapan pengaturan pola tanam cabai dan telah menghasilkan panen pada musim hujan yang pada umumnya merupakan musim tanam, sehingga dapat menambah kekurangan produksi pada musim tersebut. Diharapkan program GTCK menjadi titik awal upaya menjaga ketersediaan pasokan yang dapat meminimalisir fluktuasi harga cabai.

Currently the pilot clusters have built tools and infrastructure of GTCK implementation, in form of arrangement of chili cultivation pattern and has resulted in harvest in the rainy season which generally is the planting season, so as to adding production shortfall in that season. The GTCK program is expected to become the starting point to maintain the availability of supply which can minimize fluctuation of chili price.

Bank Indonesia akan terus memberikan dukungan pada program pengembangan UMKM dalam kerangka pengendalian inflasi dan peningkatan kapabilitas UMKM, serta bekerja sama dengan berbagai *stakeholders* agar program pengembangan tersebut dapat berdampak lebih luas dan memberikan manfaat terhadap pengembangan wirausaha baru di Indonesia.

Bank Indonesia will continue supporting MSME development program in the inflation management framework and MSME capability increase, as well as cooperating with stakeholders so the development program will create big impact and provide benefit for the development of new entrepreneurs in Indonesia.

MEMPERKOKOH KERJA SAMA DAN MENINGKATKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Kondisi ekonomi global pada tahun 2015 dipenuhi oleh ketidakpastian. Pemulihan ekonomi global yang belum merata bertumbuh di bawah ekspektasi, disertai dengan perlambatan ekonomi Tiongkok dan ketidakpastian normalisasi kebijakan The Fed hingga akhir tahun. Hal ini disertai dengan pelemahan harga komoditas. Masing-masing negara berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, dan seimbang, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan.

STRENGTHENING INTERNATIONAL COOPERATION AND IMPROVING INTERNATIONAL RELATION

Global economic conditions in 2015 were full of uncertainty. Uneven global economic recovery grew below expectations, coupled with China's economic slowdown and uncertainty over the Fed normalization policy until the end of year when the Fed raised interest rate. This was followed by weakening commodity prices. Each country tried to achieve a strong, sustainable, and balanced economic growth, but the results were not as expected.

Bank Indonesia selaku otoritas moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengelolaan uang Rupiah berupaya memperkuat sinergi dalam berbagai forum kerja sama internasional untuk menghadapi tantangan ekonomi tersebut. Di level regional, integrasi ekonomi diarahkan untuk memfasilitasi aliran investasi dan modal yang mendukung sektor riil, agar manfaatnya berkesinambungan dan dapat dinikmati secara luas.

Bank Indonesia as the authority on monetary, macroprudential, payment system and management of Rupiah currency has tried to strengthen the synergy within various international cooperation forums to face the economic challenges. At the regional level, economic integration was aimed at facilitating investment and capital flows which could support the real sector, so the benefit would be sustainable and could be widely beneficial.



140

198

216

233

Melalui forum multilateral G20, diusung tiga agenda untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Pertama, penguatan pemulihan ekonomi global dan mendorong pertumbuhan potensial melalui koordinasi kebijakan makroekonomi, menyusun strategi investasi dan pengembangan infrastruktur, mendorong pasar tenaga kerja menjadi lebih inklusif, serta memperkuat perdagangan dan investasi. Dalam konteks perdagangan, G20 akan mendukung kebijakan setiap negara yang mendorong dunia usaha, khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar dapat masuk dan terlibat dalam rantai nilai global. Kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi global yang didukung oleh regulasi di sektor keuangan, reformasi arsitektur keuangan internasional, memperbaiki sistem perpajakan global, dan membangun budaya anti korupsi. Ketiga, G20 memastikan pembangunan yang berkelanjutan yang dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek keuangan inklusif dan keberlanjutan energi.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan menyusun finalisasi G20 *Adjusted Growth Strategy* yang merupakan komitmen para negara anggota G20 untuk memelihara momentum pertumbuhan di negaranya masing-masing, serta mendorong perekonomian di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Terkait pembangunan infrastruktur, Bank Indonesia juga terlibat aktif dan mendukung pemerintah dalam pembentukan *Global Infrastructure Hub* (GIH) dalam forum G20. GIH diharapkan dapat beroperasi secepatnya sebagai pusat informasi dalam investasi infrastruktur.

Sejalan dengan itu, kerja sama *Bank International Settlement* (BIS) menekankan pentingnya reformasi regulasi keuangan demi sistem keuangan yang lebih aman. Namun, mengingat tantangan yang dihadapi oleh *Emerging Markets and Developing Countries* (EMDCs) dalam menerapkan reformasi tersebut, Bank Indonesia menyampaikan agar kondisi dan tantangan tersebut menjadi perhatian dalam penilaian kepatuhan. Di bidang pemeringkatan, BIS sepakat untuk mendorong pendirian lembaga pemeringkat baru di luar Moody's, S&P, dan Fitch untuk menjaga konsistensi dan kualitas penilaian *rating*.

Through the G20 multilateral forum, three agendas were carried to realize a strong and inclusive economic growth. First, strengthening global economic recovery and pushing potential growth through macroeconomic policy coordination, formulating investment strategy and infrastructure development, pushing labor market to be more inclusive, as well as strengthening trade and investment. In the trade context, G20 will support policies of every country to boost businesses, especially Small and Medium Enterprises (SME) to be part and involved in the global value chain. Second, increasing global economic security which is supported by regulations in the financial sector, international financial architecture reform, fixing global taxation system, and building anti-corruption culture. Third, G20 ensures sustainable development can be seen from many aspects, among others financial inclusion and energy sustainability aspects.

In line with that, Bank Indonesia with the Finance Ministry formulated the finalization of G20 Adjusted Growth Strategy which is the commitment of G20 member countries to maintain growth momentum in their respective countries, as well as boosting the economy amidst global economic slowdown. Related with infrastructure development, Bank Indonesia was active and supported the government in establishing the Global Infrastructure Hub (GIH) in G20 forum. GIH is expected to operate immediately as the information center in infrastructure investment.

In line with that, the cooperation with Bank International Settlement (BIS) underlined the importance of financial regulation reform for safer financial system. However, considering the challenges faced by Emerging Markets and Developing Countries (EMDCs) in implementing such reform, Bank Indonesia requested that the conditions and challenges became concern in compliance appraisal. In ratings, BIS agreed to push for the establishment of new rating agency out of Moody's, S&P, and Fitch to maintain consistency and quality of rating appraisal.

Menjaga Hubungan Investor dan Persepsi Positif Ekonomi Indonesia

Maintaining Investor Relations and Positive Perception of Indonesian Economy

Selama 2015 upaya penguatan fungsi internasional Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri (KPwLN) terus dilakukan dengan tujuan agar dapat lebih berperan sebagai miniatur Bank Indonesia di tataran internasional serta mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan kantor pusat. Penguatan fungsi internasional KPwLN dilakukan sejalan dengan Kerangka Kebijakan Internasional (KI) Bank Indonesia, di mana KPwLN memiliki 3 fungsi yaitu asesmen ekonomi dan keuangan internasional, hubungan investor, dan hubungan internasional. Dalam pelaksanaan fungsi hubungan internasional, kerja sama KPwLN dengan *stakeholder* eksternal tercermin terutama dalam bentuk kegiatan KPwLN yang bersinergi dengan *stakeholder* eksternal dalam rangka melakukan fungsi Bank Indonesia di negara KPwLN berada.

Secara khusus, terkait dengan pelaksanaan fungsi hubungan investor, kerja sama dengan *stakeholder* eksternal difokuskan untuk mendukung fungsi *Investor Relation Unit* (IRU) Bank Indonesia dalam meningkatkan persepsi positif terhadap ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, KPwLN melaksanakan kegiatan *engagement* dengan lembaga rating, investor utama, lembaga *think-tank* (*opinion maker*), dan mitra strategis lainnya termasuk kedutaan besar/konsulat Indonesia dan badan promosi Indonesia di luar negeri.

In 2015 the strengthening of international functions of Bank Indonesia's Foreign Representative Office (KPwLN) was continuously made with the aim to play more role as the miniature of Bank Indonesia in international level as well as supporting formulation and implementation of policy in headquarters. The strengthening of KPwLN internal functions was made in conjunction with the Internasional Policy Framework (KI) of Bank Indonesia, where KPwLN has 3 functions: international finance and economic assessment, investor relations, and international relations. In the implementation of international relation functions, cooperation between KPwLN and external stakeholders is mirrored particularly in form of KPwLN activities in synergy with external shareholders in performing Bank Indonesia functions in the country KPwLN exists.

In particular, related to the implementation of investor relation functions, cooperation with external stakeholders is focused on supporting the function of Investor Relation Unit (IRU) Bank Indonesia in raising positive perception towards Indonesia's economy. In this case, KPwLN conducted engagement activities with ratings agencies, main investors, think-tank institutions (opinion maker), and other strategic partners including Indonesian embassy/consulate and promotional agencies overseas.

Salah satu kegiatan *engagement* dengan investor yang dilakukan oleh KPwLN adalah penyelenggaraan *joint promotion* dengan KBRI setempat. Sebagai contoh, KPw NY bersama dengan KBRI Meksiko dan *Indonesian Investment Promotion Center* (IIPC) berhasil melakukan promosi mengenai Indonesia dalam bentuk *Indonesia Investment and Trade Day* dengan tema “*New Deal and Opportunities*” di Meksiko pada Mei 2015. Acara yang cukup besar tersebut dihadiri oleh 150 peserta, terdiri dari pejabat kementerian dan lembaga serta investor baik dari pihak Indonesia maupun Meksiko. Rangkaian acara promosi tersebut diisi dengan kegiatan (i) seminar, (ii) pameran produk Indonesia, (iii) *one-on-one meeting* antara instansi terkait dengan investor, dan (iv) kunjungan kerja ke beberapa perusahaan dan industri. Pada akhirnya, acara tersebut diharapkan mampu meningkatkan investasi Meksiko di Indonesia dan memperlancar aktivitas perdagangan internasional kedua negara.

One of the engagement activities with investors conducted by KPwLN is joint promotion with local KBRI. For example, Kew NY in cooperation with Mexican Embassy and Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) managed to promote Indonesia in form of Indonesia Investment and Trade Day with the theme “New Deal and Opportunities” in Mexico in May 2015. The sizable event was participated by 150 participants, comprising ministry officials and institution officials as well as investors both from Indonesia and Mexico. The promotional event was filled with (i) seminar, (ii) Indonesian product exhibition, (iii) one-on-one meeting between related institutions and investors, and (iv) working visit to several companies and industries. Eventually, the event is expected to increase Mexican investment in Indonesia and streamline international trade of the two countries.

Sementara, International Monetary Fund (IMF) juga berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang, dan memperluas lapangan kerja. Untuk itu, IMF mendorong negara anggota untuk meningkatkan kepercayaan dan memperkuat permintaan melalui bauran kebijakan makroekonomi, serta mempercepat penyusunan kerangka dan implementasi reformasi struktural. Untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan resiliensi ekonomi, IMF menekankan pentingnya penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari sisi kebijakan fiskal, investasi di bidang infrastruktur harus menjadi agenda prioritas. Hal ini harus dibarengi dengan kebijakan moneter yang tepat dan dikomunikasikan dengan baik oleh otoritas terkait, terutama di negara maju.

Islamic Development Bank (IDB) juga meningkatkan perannya untuk membantu pembiayaan infrastruktur negara anggota. Bank Indonesia turut berperan aktif dalam pembentukan Islamic Investment Infrastructure Bank (IIIB) atau World Islamic Investment Bank (WIIB). WIIB akan berkantor pusat di Indonesia dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian domestik, yaitu menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi syariah, dan menjadi katalisator pengembangan instrumen keuangan syariah.

Sementara di tingkat regional, Indonesia juga aktif dalam mendorong terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015. Forum kerja sama regional ini bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi agar menjadi kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi dan terintegrasi dengan ekonomi global. Untuk itu, liberalisasi diarahkan untuk mewujudkan aliran bebas barang yang didukung oleh aliran bebas jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas. Hal ini akan memberikan peluang sekaligus tantangan yang besar bagi Indonesia agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dari terbentuknya MEA. Tantangan terbesar berasal dari domestik, yakni menyangkut kesiapan Indonesia untuk bersaing dalam perdagangan bebas ASEAN.

Meanwhile, the International Monetary Fund (IMF) also committed to increase global economic growth that is strong, balanced, and expands employment. Therefore, IMF encouraged member countries to increase trust and strengthen demand through macroeconomic policy mix, as well as accelerating formulation of framework and implementation of structural reform. To boost growth and increase economic resilience, IMF emphasized on the importance of fiscal and monetary policy implementation which supports sustainable economic growth. From the fiscal side, investment in infrastructure should become priority agenda. This should be followed by appropriate monetary policy and well communicated by related authorities, especially in developed countries.

The Islamic Development Bank (IDB) also increased its role to help infrastructure financing of member countries. Bank Indonesia was also active in the establishment of Islamic Investment Infrastructure Bank (IIIB) to World Islamic Investment Bank (WIIB). WIIB will be headquartered in Indonesia and is expected to give benefits to the domestic economy, by becoming alternative for infrastructure financing, facilitating sharia economic growth, and becoming catalyst of sharia financial instrument development.

Meanwhile in the regional level, Indonesia was also active to push for the establishment of ASEAN Economic Community at the end of 2015. This regional cooperation program is aimed at turning ASEAN into a single market and production base to become a highly competitive economic region and integrated with the global economy. Therefore, liberation was aimed at realizing free flow of goods, investment, and skilled workers, as well as freer capital flows. This will provide opportunities as well as big challenges for Indonesia to get optimum benefits from AEC. The main challenges came from domestic, related to Indonesia's readiness to compete in ASEAN free trade.

140

198

216

233

Kerja sama di tingkat kawasan difokuskan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan agar tetap resilien ketika menghadapi guncangan. Terkait dengan itu, negara-negara ASEAN+3 yang melibatkan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan melakukan penguatan kerja sama *Regional Financial Arrangement* (RFA) melalui implementasi *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM), serta meningkatkan peran ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO). Dalam forum EMEAP, Bank Indonesia menyampaikan pandangan perlunya *regional policy action* melalui komunikasi bersama anggota EMEAP kepada pasar mengenai kondisi ekonomi dan keuangan kawasan.

Di samping itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat resiliensi perekonomian domestik dengan memperkuat *second line of defense* cadangan devisa melalui kerja sama *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dengan bank sentral lain. Bank Indonesia bersama Gubernur Bank Sentral ASEAN pada tahun 2015 telah memperpanjang perjanjian ASEAN Swap Arrangement (ASA) senilai US\$2 miliar yang dapat digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi negara anggota yang mengalami tekanan neraca pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga menjalin kerja sama BCSA dengan Reserve Bank of Australia (RBA) senilai AUD10 miliar/Rp100 triliun (ekuivalen US\$10 miliar) untuk mendorong perdagangan bilateral dan menjamin penyelesaian transaksi perdagangan dalam mata uang lokal kedua negara. Kerja sama bilateral pertukaran mata uang juga ditingkatkan dengan bank sentral Tiongkok menjadi CNY100 miliar/Rp175 triliun (ekuivalen US\$15 miliar), serta dengan Bank of Korea sebesar KRW10,7 triliun/Rp115 triliun (ekuivalen US\$10 miliar). Implementasi kerja sama bilateral *currency* akan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sehingga mendukung stabilitas Rupiah.

Bank Indonesia juga memperkuat kerja sama dengan Pemerintah di berbagai bidang, termasuk dalam upaya menjaga hubungan baik dengan investor dan lembaga pemeringkat. Sejalan dengan itu dibentuk *Regional Investor Relationship Unit* (RIRU) sebagai bagian

Cooperations in regional level was focused on maintaining financial system stability to remain resilient in facing shocks. Related to that, ASEAN+3 countries including China, Japan, and South Korea strengthened the Regional Financial Arrangement (RFA) cooperation through the implementation of Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), as well as increasing the role of ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). In the EMEAP forum, Bank Indonesia conveyed the needs of regional policy action through joint communications with EMEAP members to the market on economic and regional finance conditions.

In addition, Bank Indonesia also continued strengthening domestic economic resilience by strengthening the second line of defense of forex reserves through Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) with other central banks. Bank Indonesia with ASEAN Central Bank Governors in 2015 have extended the ASEAN Swap Arrangement (ASA) of US\$2 billion which can be used to help fulfilling the needs of short-term liquidity for member countries who experience pressure on balance of payments. In addition, Bank Indonesia also has BCSA cooperation with the Reserve Bank of Australia (RBA) of AUD10 billion/Rp100 trillion (equal to US\$10 billion) to boost bilateral trade and ensure settlement of bilateral transactions in local currencies of the two countries. Currency swap bilateral cooperation was also strengthened with China's central bank to CNY100 billion/Rp175 trillion (equal to US\$15 billion), as well as Bank of Korea of KRW10.7 trillion/Rp115 trillion (equal to US\$10 billion). The implementation of bilateral currency cooperation can reduce dependency on US dollar to support Rupiah stability.

Bank Indonesia also strengthened cooperation with the Government in several sectors, including in maintaining good relationship with investors and rating agencies. In line with that Regional Investor Relationship Unit (RIRU)

dari strategi bersama Bank Indonesia dan Pemerintah dalam meningkatkan hubungan dengan investor. Dalam konteks ini, faktor peringkat utang atau *rating* yang dilekatkan lembaga pemeringkat internasional menjadi begitu penting karena menunjukkan kesehatan ekonomi suatu negara yang diukur dari kemampuan mengembalikan utang. Dalam perspektif negara, semakin baik posisi *rating* dapat membuat negara tersebut menjadi lebih menarik bagi investor dan berpengaruh positif terhadap peningkatan investasi, baik investasi portofolio maupun penanaman modal langsung. RIRU merupakan bentuk koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan investor dan memperbaiki *rating* Indonesia melalui penyampaian informasi dan data-data perekonomian yang akurat dan kredibel.

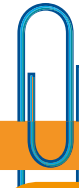
OUTLOOK PEREKONOMIAN INDONESIA DAN STRATEGI KE DEPAN

Perekonomian Indonesia masih akan menghadapi sejumlah tantangan, baik yang berasal dari eksternal maupun internal. Dari eksternal, tantangan utama bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang masih belum cukup kuat seiring dengan lambatnya perekonomian negara berkembang dan pemulihan ekonomi negara maju yang belum secepat ekspektasi. Pasar keuangan dunia juga diperkirakan masih fluktuatif, disertai dengan tren penurunan harga komoditas. Perekonomian Tiongkok juga terus menjadi perhatian karena besarnya peranan Tiongkok dalam perekonomian negara berkembang lainnya.

was established as part of joint strategy between Bank Indonesia and the Government in increasing relationship with investors. In this context, rating from international rating agencies becomes important factor because it shows the health of a country's economy measured from its ability to pay debt. In the country perspective, the higher the rating can make the country more attractive for investors and bring positive impact to an increase in investment, both portfolio or direct investment. RIRU is a form of coordination between Bank Indonesia and the Government in increasing investor trust and improving Indonesia's rating by providing accurate and credible information and economics data.

INDONESIA'S ECONOMIC OUTLOOK AND FUTURE STRATEGY

Indonesia's economy will still face several challenges, both externally and internally. Externally, the main challenges came from global economic growth which is not strong enough along with the slowdown in emerging market economies and economic recovery in developed countries is no as fast as expected. Global financial market is also predicted to remain fluctuating, along with the trend of declining commodity prices. China's economy continues to become attention due to its big role in other developing country's economies.



Rating Investment Indonesia 2015

Salah satu dari tiga lembaga pemeringkat terbesar di dunia, Standard & Poor's (S&P), merilis perubahan *credit rating* bagi Indonesia di tahun 2015, dari BB+ dengan *outlook* stabil, menjadi BB+ dengan *outlook* positif. Berdasarkan *rating* yang dirilis oleh Moody's dan Fitch, Indonesia pada tahun 2015 memiliki status *investment grade*, atau dengan kata lain dianggap sebagai negara yang layak untuk tujuan investasi bagi para investor global.

Indonesia Investment Rating 2015

One of the three largest rating agencies in the world, Standard & Poor's (S&P), released change of credit rating for Indonesia in 2015, from BB+ with stable outlook, to BB+ with positive outlook. Based on the rating issued by Moody's and Fitch, Indonesia in 2015 has an investment grade status, or in other words considered as a decent country for investment destination of global investors.

Dari dalam negeri, permasalahan struktural ekonomi nasional yang belum tuntas juga menjadi tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada level yang tinggi dan berkelanjutan. Kedaulatan pangan dan energi menjadi dua faktor utama dalam mendukung proses transformasi menuju industrialisasi. Indonesia juga perlu meningkatkan daya saing industri, maritim, dan pariwisata, yang masih tertinggal dalam rantai nilai global. Selain itu, terdapat tantangan untuk memperkuat basis pembiayaan jangka panjang yang lebih berkesinambungan guna mendukung kegiatan investasi swasta dan rumah tangga sebagai fondasi perekonomian. Penciptaan pemerataan pendapatan masyarakat juga menjadi prioritas guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang ada, Bank Indonesia memperkirakan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terjaga pada tahun 2016, dengan proyeksi pertumbuhan di kisaran 5,0-5,4%. Penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 masih akan bertumpu pada reformasi struktural yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah, khususnya yang terkait dengan percepatan eksekusi proyek-proyek infrastruktur. Investasi swasta juga diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan dampak paket kebijakan ekonomi Pemerintah dan pemanfaatan ruang pelonggaran moneter yang terukur oleh Bank Indonesia. Stabilitas makroekonomi terjaga yang tercermin dari laju inflasi, yang diprediksi berada di kisaran sasaran inflasi $4 \pm 1\%$ pada tahun 2016.

Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan menjadi kontributor utama perekonomian dan diperkirakan tumbuh di kisaran 4,9-5,3% sepanjang tahun 2016. Hal ini seiring dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif yang terlihat dari peningkatan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2016, daya beli masyarakat diperkirakan menguat seiring dengan rencana kenaikan UMP rata-rata 10,8% secara nasional dan pembayaran

Domestically, unresolved structural issues in the national economy become challenges in boosting economic growth to a higher and sustainable level. Food and energy security are two main factors in supporting transformation process towards industrialization. Indonesia also needs to increase the competitiveness of industry, maritime, and tourism, which is still left behind in the global value chain. In addition, there are challenges to strengthen a more sustainable long-term financing basis to support private investment and household as the foundations of the economy. The creation of people's income equality is also a priority to increase participation in economic development and growth.

Considering the conditions and challenges, Bank Indonesia forecast Indonesia's economic growth momentum will be maintained in 2016, with growth projection of 5.0-5.4%. The main driver of Indonesia's economic growth in 2016 will still be founded on structural reform conducted by Bank Indonesia and the Government, especially related to the acceleration of infrastructure project executions. Private investment is also expected to boost economic growth along with the impact of Government's economic policy packages and utilization of measured monetary loosening space conducted by Bank Indonesia. Macroeconomic stability is reflected by the inflation rate, predicted to be in the inflation target range of $4 \pm 1\%$ in 2016.

Overall, household consumption is predicted to remain the main contributor of the economy and is expected to grow in the 4.9-5.3% range throughout 2016. This is in line with the increasing proportion of productive-age population as seen by the increasing number of workforce. In 2016, private consumption is predicted to strengthen along with the plan to increase average minimum wage (UMP) by 10.8% nationally and payment of civil servants'

gaji ke-14 PNS. Inflasi yang rendah juga diharapkan turut mendukung terjaganya daya beli masyarakat. Meningkatnya jumlah lapangan kerja, khususnya terkait dengan proyek infrastruktur, diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan di tengah masih terbatasnya kinerja ekspor.

Konsumsi pemerintah diharapkan tumbuh 6,4-6,8% pada tahun 2016 seiring dengan semakin membaiknya implementasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan efektivitas belanja negara dengan memperbesar alokasi belanja yang produktif. Alokasi belanja produktif akan difokuskan pada peningkatan modal dasar pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi.

Investasi pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan mencapai kisaran 6,0-6,4%. Aktivitas penanaman modal akan didorong oleh percepatan realisasi pembangunan proyek infrastruktur. Investasi swasta diharapkan akan meningkat seiring dengan dampak paket kebijakan pemerintah dan pemanfaatan ruang pelonggaran moneter secara terukur dengan tetap menjaga stabilitas makro.

Penurunan kinerja ekspor kemungkinan masih akan berlanjut pada tahun 2016 seiring dengan masih lemahnya perekonomian global, khususnya Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai pasar utama ekspor Indonesia. Harga komoditas ekspor Indonesia juga diperkirakan masih mencatat pertumbuhan negatif pada tahun 2016. Dengan kondisi tersebut, ekspor riil Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan masih akan tumbuh negatif. Langkah-langkah peningkatan daya saing, antara lain dengan diversifikasi pasar dan produk, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekspor jangka panjang ke arah yang lebih baik.

14th-month salary. Low inflation is also expected to support a stable private consumption. Increasing number of employments, especially related to infrastructure projects, is expected to become a source of income amidst still limited export performance.

Government consumption is expected to grow 6.4-6.8% in 2016 along with improving implementation of government infrastructure projects to support economic growth. The Government also tried to increase the effectiveness of state spending by increasing the allocation of productive spending. Productive spending allocation will be focused on the increase of development base capital, especially infrastructure development in increasing competitiveness and production capacity.

Investment in 2016 is expected to grow higher than the previous year and reach 6.0-6.4% range. Investment activities will be supported by faster realization of infrastructure project development. Private investment is expected to increase along with the impact of government's policy packages and utilization of measured monetary loosening space by maintaining macro stability.

Declining export performance will likely continue in 2016 along with weak global economy, especially China and the US as Indonesia's main export markets. The price of Indonesian export commodities is also predicted to record negative growth in 2016. With the conditions, Indonesian real exports in 2016 are predicted to have negative growth. Steps to increase competitiveness, among others by diversifying market and products, are expected to boost long-term export growth to a better direction.

140

198

216

233

Impor juga diperkirakan masih akan berkontraksi pada tahun 2016 meskipun tidak sedalam tahun sebelumnya. Meningkatnya permintaan domestik, khususnya konsumsi dan investasi, menjadi faktor peredam penurunan impor nasional. Impor barang modal dan barang baku diperkirakan akan meningkat guna mendukung pembangunan proyek infrastruktur pemerintah dan investasi swasta. Defisit transaksi berjalan kemungkinan sedikit meningkat, namun tetap aman di bawah 3% dari PDB dengan struktur yang lebih sehat.

Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan domestik diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan semakin mendekatnya pertumbuhan ekonomi ke tingkat potensialnya. Ekspektasi inflasi diharapkan akan tetap terjaga dengan dukungan kebijakan dan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Tekanan inflasi dari sisi eksternal juga diperkirakan tidak terlalu besar mengingat masih terbatasnya peningkatan harga-harga komoditas internasional, yang sejalan dengan pemulihan perekonomian dunia yang berlangsung gradual, penurunan harga minyak, dan pergerakan nilai tukar yang relatif stabil.

Sementara itu, inflasi inti tahun 2016 diprediksi moderat. Dari sisi eksternal, tekanan inflasi inti diperkirakan relatif terjaga mengingat kenaikan harga komoditas global yang terbatas, sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia yang gradual serta nilai tukar yang relatif stabil. Dari sisi domestik, meningkatnya permintaan domestik diperkirakan masih dapat direspons oleh kapasitas produksi, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan PDB yang masih berada di bawah tingkat potensialnya. Dengan kondisi tersebut, tekanan inflasi dari sisi permintaan diperkirakan minimal walaupun sedikit meningkat. Selain itu, ekspektasi inflasi juga terindikasi relatif terjaga seiring dengan bauran kebijakan dan koordinasi yang ditempuh oleh Pemerintah dan Bank Indonesia.

Imports are predicted to contract in 2016 although not as big as the previous year. Increasing domestic demand, especially consumption and investment, becomes factor to reduce national import decline. Import of capital goods and raw materials is predicted to increase to support government infrastructure projects and private investment. Current account deficit may likely rise, but still below 3% of GDP and with healthier structure.

Meanwhile, inflationary pressure from domestic demand is predicted to increase from the previous year along with closer economic growth to its potential level. Inflation expectations are expected to be maintained with policy support and coordination between Bank Indonesia and the Government. External inflationary pressure is also predicted to be not too big considering the limited increase in international commodity prices, in line with the gradual global economic recovery, declining oil price, and relative stable exchange rate movement.

Meanwhile, core inflation in 2015 is expected to be moderate. Externally, pressure on core inflation is predicted to be manageable considering the limited global commodity price increase, in line with gradual global economic recovery as well as relative stable exchange rate. Domestically, increasing domestic demand is predicted to be responded by production capacity, as seen from the GDP growth which is still below its potential level. With that condition, inflationary pressure from demand side is predicted to be minimum although slightly increasing. In addition, inflation expectation is also relatively maintained in line with the policy mix and coordination between the Government and Bank Indonesia.

Inflasi dari kelompok harga bahan pangan yang bergejolak (*volatile food*) diperkirakan sedikit meningkat, tetapi masih terkendali sejalan dengan perkiraan peningkatan produksi dan distribusi bahan makanan dan tata niaga pangan yang lebih baik. Sementara inflasi kelompok harga barang yang diatur pemerintah (*administered price*) masih akan menjadi komponen utama yang menarik ke bawah inflasi. Pada tahun 2016, inflasi *administered prices* diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama terkait dengan tren penurunan harga minyak mentah di pasar internasional yang kemudian menyebabkan harga barang terkait energi menjadi lebih rendah. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia dan Pemerintah akan meningkatkan koordinasi di Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Stabilitas sistem keuangan pada tahun 2016 diperkirakan tetap terkendali, ditopang oleh ketahanan perbankan yang tetap terjaga dan kinerja pasar keuangan yang membaik. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) diperkirakan masih tinggi, di atas ketentuan minimum 8%. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) diperkirakan tetap di batas yang sehat. Likuiditas perbankan diharapkan akan semakin membaik seiring dengan operasi keuangan pemerintah yang lebih ekspansif. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sekitar 13-15%, diikuti dengan pertumbuhan kredit berkisar 12-14%. Bank Indonesia akan terus mendorong peran aktif perbankan dalam mendukung upaya pengelolaan ekonomi ke arah yang lebih sehat melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasar saham maupun obligasi negara juga diperkirakan membaik sejalan dengan positifnya persepsi investor terhadap perbaikan fundamental dan prospek ekonomi Indonesia ke depan.

Inflation of volatile food is predicted to slightly increase, but still manageable in line with the expected increase in production and better food distribution and trade. Meanwhile inflation of administered price will still be the main component dragging down inflation. In 2016, administered price inflation is predicted to be lower than the previous year. This is mainly related to the trend of crude oil price decline in the global market which causes energy related price to be lower. To control inflation, Bank Indonesia and the Government will increase coordination in the Inflation Management Team (TPI) and Regional Inflation Management team (TPID).

Financial system stability in 2016 is predicted to be controlled, supported by maintained bank resilience and improved financial market performance. Capital Adequacy Ratio is predicted to remain high, above the minimum requirement of 8%. Meanwhile, Non-Performing Loan is predicted to stay at healthy range. Bank liquidity is expected to improve along with more expansive government financial operations. In line with rising economic growth, Third Party Funds (DPK) grow 13-15%, followed by credit growth of 12-14%. Bank Indonesia will continue encouraging active role of banks to support healthier economic management through coordination with the Financial Services Authority (OJK). Stock market and government bonds are predicted to improve along with positive perception of investors on the fundamental improvement and Indonesian economic prospects going forward.

Pada tahun 2016, bauran kebijakan moneter dan makroprudensial masih akan menjadi fokus Bank Indonesia guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, dengan tetap memelihara momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemanfaatan ruang pelonggaran moneter akan dilakukan secara terukur. Kebijakan tersebut akan didukung oleh upaya menjaga nilai tukar terkendali sesuai fundamentalnya, memperkuat kecukupan cadangan devisa, dan mengelola aliran modal asing. Di bidang makroprudensial, kebijakan yang akomodatif akan terus dilanjutkan dengan tetap memerhatikan stabilitas sistem keuangan dan terus mendorong pendalaman pasar keuangan. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk mengembangkan industri keuangan yang lebih efisien, termasuk melalui perluasan elektronifikasi sistem pembayaran. Berbagai kebijakan tersebut akan disertai dengan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah dan institusi terkait sehingga stabilitas makroekonomi tetap terjaga, dengan struktur perekonomian yang lebih kuat.

In 2016, the mixture of monetary and macroprudential policies will remain Bank Indonesia's focus on maintaining the stability of macroeconomy and financial system, by keeping economic growth momentum. Therefore, the utilization of monetary loosening space will be done in a measured way. The policy will be supported with the effort to maintain exchange rate in line with its fundamental, strengthen sufficient forex reserves, and control foreign capital flows. In macroprudential, accommodative policy will be continued by monitoring the financial system stability and pushing financial market deepening. In the payment system, policy is aimed at developing more efficient financial industry, including by expanding payment system electrification. Some of the policies will be coupled with increased coordination with the Government and related institutions to maintain macroeconomic stability, with stronger economic structure.

Tabel 3. Prospek Perekonomian Domestik Membaik
Table 3. Domestic Economy Prospects Improving

	Realisasi <i>Realization 2015</i>	Proyeksi <i>Forecast 2016</i>
Pertumbuhan Ekonomi <i>Economic Growth</i>	4,79%	5,0-5,4%
Inflasi <i>Inflation</i>	3,35%	4,0±1%
Defisit Transaksi Berjalan (% PDB) <i>Current Account Deficit (% GDP)</i>	2,06%	<3,0%
Pertumbuhan Kredit <i>Loan Growth</i>	10,45%	12-14%

Tata Kelola dan Transformasi Bank Indonesia

Bank Indonesia Governance and Transformation



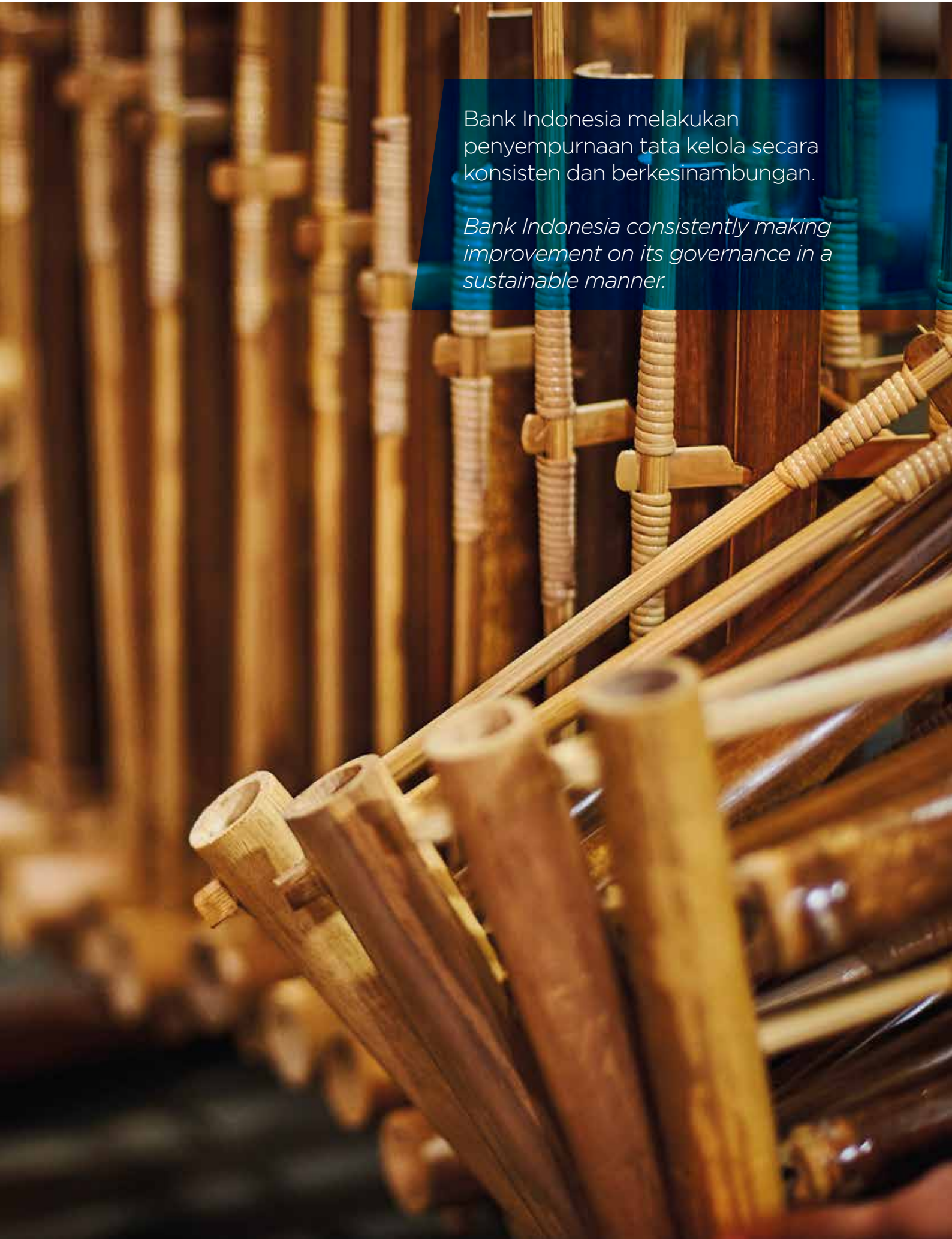
“Pelaksanaan tugas Bank Indonesia dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan independensi.

Bank Indonesia's task implementation is conducted by prioritizing accountability, transparency, and independency principles.



Bank Indonesia melakukan penyempurnaan tata kelola secara konsisten dan berkelanjutan.

Bank Indonesia consistently making improvement on its governance in a sustainable manner.





Tata Kelola dan Transformasi Bank Indonesia

Bank Indonesia Governance and Transformation

“Penguatan tata kelola dalam pelaksanaan tugas dilakukan melalui penyempurnaan kerangka kerja tata kelola yang mencakup prinsip, komitmen, struktur, proses, dan hasil. Setiap elemen pokok ini memberikan panduan yang komprehensif dan jelas agar setiap lini kegiatan Bank Indonesia menerapkan standar praktik tata kelola yang terbaik.”

Strengthening governance in task implementation is made by improving the governance framework which covers principle, commitment, structure, process, and result. Every main element provides a comprehensive and clear guideline which allow each line of activity of Bank Indonesia implements the best governance standard practice.

PRINSIP TATA KELOLA (GOVERNANCE) BANK INDONESIA

Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2009 merupakan tonggak penerapan tata kelola di Bank Indonesia, yang menandai babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen.

Undang-undang tersebut mengatur secara jelas mengenai aspek dasar tata kelola yang harus dipenuhi oleh Bank Indonesia, yakni independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bank Indonesia juga dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya, serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat.

Sebagaimana undang-undang tersebut, prinsip-prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan tata kelola di Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Independensi yaitu pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia secara profesional dan berintegritas, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
2. Akuntabilitas yakni adanya kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan tugas dan organisasi Bank Indonesia terlaksana dengan baik, terukur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Transparansi yakni adanya keterbukaan dalam mengungkapkan informasi penting dan relevan yang memiliki implikasi luas terhadap kepentingan pemangku kepentingan Bank Indonesia, dengan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan informasi yang diatur dalam perundang-undangan.

BANK INDONESIA GOVERNANCE PRINCIPLES

Law No. 23 of 1999 on Bank Indonesia, with several amendments prior to the latest adjustment of Law No. 6 of 2009, is a milestone for governance implementation in Bank Indonesia, and marked a new chapter in Bank Indonesia's history as an independent central bank.

The law clearly regulates the basic aspects of governance that Bank Indonesia has to fulfill, which are independency, accountability, and transparency. Bank Indonesia has to exercise its independency responsibly. Bank Indonesia is also required to be transparent and comply with public accountability principles in determining its policies, as well as be receptive to public supervision.

Under the law, principles underlying the implementation and enforcement of governance in Bank Indonesia are:

1. *Independency. Bank Indonesia performs its duties and authorities professionally and by means of integrity, without conflict of interests and influences/pressures from any parties.*
2. *Accountability. Bank Indonesia clearly defines its functions and responsibilities to manage its tasks and organization properly, measurably, and in accordance with laws and regulations.*
3. *Transparency. Bank Indonesia reveals important and relevant information that widely impact Bank Indonesia's stakeholders, while fulfilling responsibilities to comply with provisions of information confidentiality stipulated in laws and regulations.*

KOMITMEN TATA KELOLA BANK INDONESIA

Komitmen tata kelola mengacu pada komitmen Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia untuk menerapkan dan menegakkan tata kelola Bank Indonesia. Komitmen tersebut diawali dari pucuk pimpinan tertinggi Bank Indonesia yakni Dewan Gubernur. Pernyataan komitmen Dewan Gubernur dimulai dari penancangan visi 2024, misi yang diemban untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, serta nilai-nilai strategis dan perilaku utama sebagai landasan pelaksanaan tugas Bank Indonesia, yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola.

Dalam operasionalisasinya, Dewan Gubernur menetapkan prioritas terkait *governance* sebagai bagian dari rencana kerja jangka menengah dan panjang untuk mencapai visi 2024. Pada 2015, Bank Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program penyempurnaan tata kelola Bank Indonesia yang menyentuh berbagai aspek pengelolaan organisasi.

Dalam upaya membangun sistem tata kelola Bank Indonesia yang konsisten dan berkesinambungan, pada 2015 Bank Indonesia mengintegrasikan seluruh aturan tata kelola dalam satu kerangka kerja tata kelola. Pengaturan tersebut memberikan panduan mengenai penerapan dan penegakan tata kelola di Bank Indonesia sebagai perwujudan komitmen terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola.

Untuk meningkatkan komitmen Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Bank Indonesia mengatur kode etik dan pedoman perilaku dengan didukung pengawasan yang efektif dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan. Bank Indonesia juga memperluas cakupan pegawai yang diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan.

BANK INDONESIA GOVERNANCE COMMITMENT

Governance commitment refers to the commitment of Bank Indonesia's Board of Governors and employees in implementing and enforcing Bank Indonesia's governance. The commitment embarks on from the highest leadership in Bank Indonesia, which is the Board of Governors. The Board of Governors' commitment is established under the vision 2024, the mission embarked to achieve Bank Indonesia's goals, as well as strategic values and main behaviors serving as the foundation for Bank Indonesia's task implementation, in line with governance principles.

In the operations, the Board of Governors determines priorities related to governance as part of the mid and long-term working plans to achieve the vision 2024. In 2015, Bank Indonesia implemented various governance improvement programs touching various aspects in the organization's management.

In attempt to establish a consistent and sustainable governance system, Bank Indonesia integrated all regulations regarding governance into one framework in 2015. The arrangement has given guidance for governance implementation and enforcement in the realization of commitment in exercising functions, duties, and authorities that are in line with governance principles.

In enhancing Bank Indonesia's commitment towards state administration that is clean from corruption, collusion, and nepotism (KKN), Bank Indonesia regulates code of ethics and code of conducts that are supported by effective supervisions in case of violations. Bank Indonesia also expands the coverage of employees required to report their wealth.

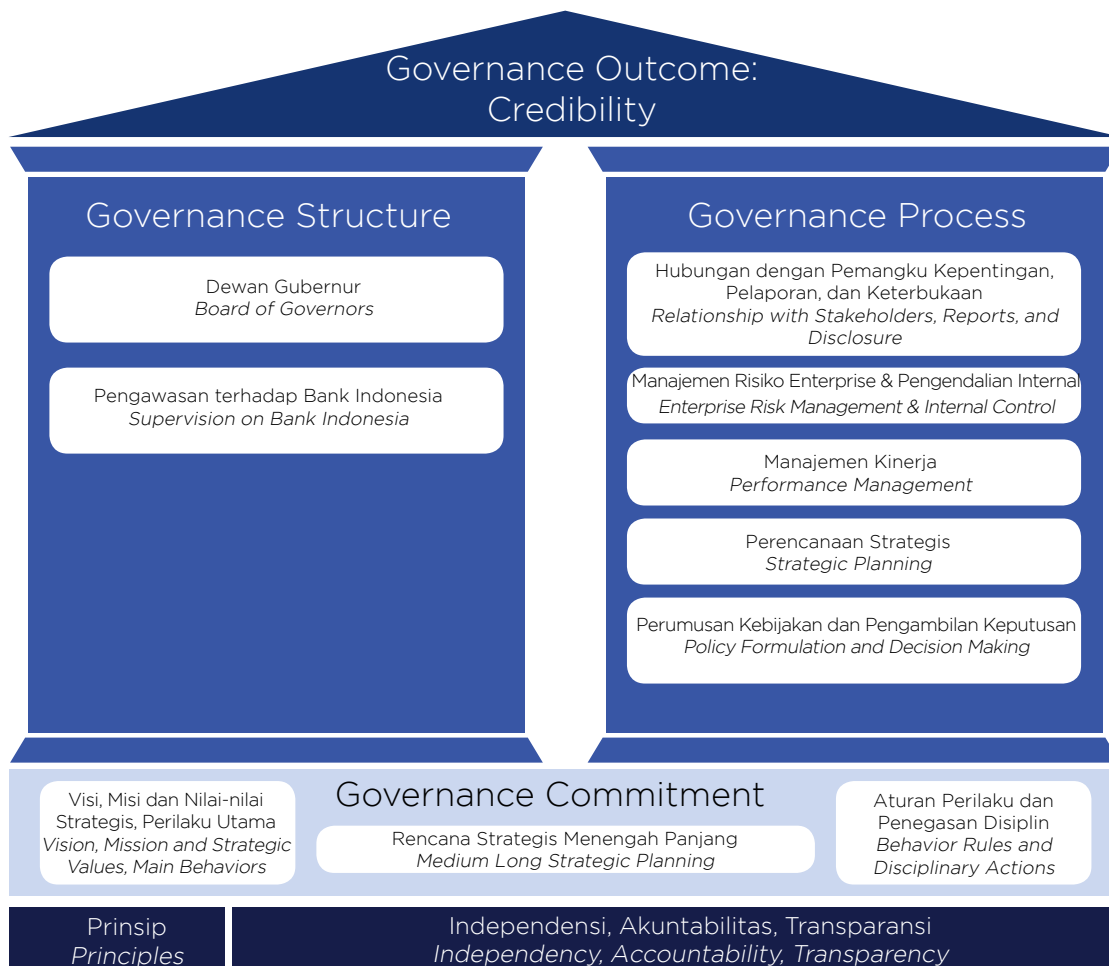
Pedoman Tata Kelola Bank Indonesia

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, berbagai dinamika dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik, serta tren tata kelola bagi lembaga publik mendorong Bank Indonesia untuk meninjau ulang kerangka kerja tata kelolanya guna mencapai visi baru Bank Indonesia 2024. Pada 2015, Bank Indonesia menyempurnakan kerangka kerja tata kelola (*governance framework*) dan kebijakan tata kelola (*governance policy*) Bank Indonesia.

Bank Indonesia Governance Guidance

In the last decade, the dynamics of economy, social, and politics, as well as governance trend in public institutions have encouraged Bank Indonesia to review its framework to achieve the vision Bank Indonesia 2024. In 2015, Bank Indonesia improved its governance framework and governance policy.

Gambar 3. Kerangka Kerja Tata Kelola Bank Indonesia
Picture 3. Bank Indonesia Governance Framework



Penyempurnaan konsep kerangka kerja tata kelola Bank Indonesia dilakukan guna memastikan penerapan *governance* di Bank Indonesia dilakukan secara terarah, konsisten, dan terkoordinasi, serta dapat dipantau dan dievaluasi pemenuhannya.

The improvement in Bank Indonesia's governance framework is performed to ensure that Bank Indonesia implements governance in a purposeful, consistent and coordinated manner, as well as to make sure that it can be monitored and evaluated.

Kerangka kerja tata kelola Bank Indonesia memuat lima elemen pokok sebagai berikut:

- a. Prinsip Tata Kelola (*Governance Principle*) Bank Indonesia, yakni prinsip-prinsip yang melandasi pelaksanaan tata kelola di Bank Indonesia;
- b. Komitmen Tata Kelola (*Governance Commitment*) Bank Indonesia, yakni wujud komitmen Dewan Gubernur dan satuan kerja untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola Bank Indonesia;
- c. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) Bank Indonesia, yakni organ internal dan eksternal Bank Indonesia yang berwenang menjalankan mandat pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan pengawasan terhadap Bank Indonesia;
- d. Proses Tata Kelola (*Governance Process*) Bank Indonesia, yakni serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh Dewan Gubernur dan satuan kerja untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola Bank Indonesia dilaksanakan secara terencana, konsekuen, dan berkelanjutan; dan
- e. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) Bank Indonesia, yakni manifestasi dari penerapan dan penegakan Tata Kelola Bank Indonesia yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan mandat Bank Indonesia (*sustainability*).

Setiap elemen pokok dari Kerangka Kerja Tata Kelola Bank Indonesia dijabarkan dalam sekumpulan aturan umum tata kelola yang menetapkan standar praktik terbaik. Pengaturan tersebut memberikan panduan atas penerapan aspek-aspek tata kelola dalam setiap kegiatan pada seluruh jenjang organisasi, agar sejalan dengan prinsip tata kelola.

Untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan program penguatan tata kelola yang telah dilakukan, Bank Indonesia memantau pencapaian kredibilitasnya dari sudut pandang pemangku kepentingan dan internal Bank Indonesia baik melalui survei kepada pemangku kepentingan, penilaian internal (*self-assessment*), maupun *expert assessment* oleh pihak eksternal.

The governance framework covers five key elements, which are:

- a. *Bank Indonesia Governance Principle, which are the principles underlying the implementation of governance in Bank Indonesia;*
- b. *Bank Indonesia Governance Commitment, which is the commitment of Board of Governors and Departments in implementing and enforcing Bank Indonesia Governance;*
- c. *Bank Indonesia Governance Structure, which are the internal and external organs of Bank Indonesia authorized to perform task implementation as mandated and supervision towards Bank Indonesia;*
- d. *Bank Indonesia Governance Process, which consists of a series of standards and procedures used by the Board of Governors and Departments to ensure the implementation and enforcement of Bank Indonesia Governance are done in a planned, consequent, and sustainable manner; and*
- e. *Bank Indonesia Governance Outcome, which includes the manifestation of Bank Indonesia Governance implementation and enforcement that give positive impacts towards value creation and sustainability of Bank Indonesia's mandate.*

Every key element of Bank Indonesia Governance Framework is elaborated in a general rule of governance that determines the standard for best practices. The arrangement gives guidance on the application of governance aspects in every activity in all levels in the organization and ensures conformity with governance principles.

To evaluate the impacts of the implementation of governance strengthening program, Bank Indonesia monitors its credibility achievement from the point of view of stakeholders and Bank Indonesia's internal structure by performing surveys to stakeholders, self-assessment, or expert assessment by external parties.

Pengaturan dan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bank Indonesia

Pada tahun 2015, Bank Indonesia memberlakukan ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang baru yang mencakup seluruh SDM Bank Indonesia (Pegawai, pihak yang dipekerjakan oleh Bank Indonesia, dan Anggota Dewan Gubernur). Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang baru ini mengatur secara komprehensif berbagai aturan perilaku yang lazim diterapkan di bank sentral lain, khususnya pencegahan konflik kepentingan dalam penggunaan wewenang dan jabatan.

Internalisasi Kode Etik diterapkan secara intensif dan berkelanjutan, termasuk dengan mewajibkan SDM Bank Indonesia untuk menyampaikan surat pernyataan kepatuhan dan surat pernyataan tahunan (*annual statement*). Secara khusus, Bank Indonesia juga mengatur mengenai pengendalian gratifikasi guna mencegah terjadinya benturan kepentingan dan pelanggaran tindak pidana korupsi.

Setiap SDM Bank Indonesia termasuk keluarganya wajib menolak hadiah yang diduga diberikan karena jabatan. Upaya ini merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku serta sistem dan prosedur yang berlaku akan dikenakan sanksi disiplin. Terkait hal ini, sejalan dengan penyempurnaan ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku, Bank Indonesia juga menyempurnakan aturan mengenai penegakan disiplin. Penyempurnaan aturan yang baru ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk tidak mentolerir adanya pelanggaran yang dilakukan oleh SDM Bank Indonesia.

Sebagai bukti nyata penegakan aturan tersebut, pada tahun 2015 Bank Indonesia telah melakukan penegakan disiplin terhadap sejumlah pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Penegakan disiplin dilakukan dengan pengenaan sanksi ringan, sedang, dan berat.

The Arrangement and Enforcement of Bank Indonesia Code of Ethics and Code of Conduct

In 2015, Bank Indonesia applied the new Code of Ethics and Code of Conducts covering all human resources (Employees, parties hired by Bank Indonesia, and Members of the Board of Governors). The new Code of Ethics and Code of Conducts regulate comprehensively various rules of conducts customarily applied in other central banks, particularly regarding the prevention of conflict of interests in authorities and positions.

The internalization of Code of Ethics is applied intensively and sustainably, including by requiring Bank Indonesia's human resources to deliver a statement on compliance and annual statement. Specifically, Bank Indonesia also regulates on gratification control in attempt to prevent conflict of interests and corruption acts.

Every Bank Indonesia's human resources and their families are obliged to refuse gifts allegedly given due to respective positions. The attempt actualizes Bank Indonesia's commitment in creating a working environment that is clean from corruption, collusion, and nepotism so that it can uphold its integrity and credibility.

Every violation against the Code of Ethics and Code of Conducts as well as the applied system and procedure will be imposed disciplinary sanctions. Moreover, in line with the improvement in the Code of Ethics and Code of Conducts, Bank Indonesia also enhances regulations on disciplinary enforcement. The improved new regulations show Bank Indonesia's commitment to not tolerate any violations conducted by its human resources.

As an actual evidence of the enforcement, Bank Indonesia in 2015 performed disciplinary acts to a number of employees who are proven to have violated regulations. Disciplinary enforcement is made in light, medium, and heavy sanctions.

Gambar 4. Kewajiban dan Larangan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bank Indonesia
Picture 4. Obligation and Prohibition on Bank Indonesia Code of Ethic & Conduct



Whistle Blowing System Bank Indonesia

Untuk melengkapi infrastruktur etik dan mendeteksi adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, pada 2015 Bank Indonesia juga menerapkan sistem pelaporan pelanggaran yang baru yakni *Whistle Blowing System (WBS)* Bank Indonesia.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran etik, perilaku, dan prosedur kerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia Bank Indonesia sebagai bentuk kontrol sosial. Setiap laporan akan dijaga kerahasiaannya dan dalam hal terdapat bukti yang cukup akan ditindaklanjuti pada proses investigasi selanjutnya. Keberadaan WBS menciptakan sistem saling mengawasi terhadap kesesuaian perilaku dan ketaatan prosedur kerja yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia Bank Indonesia.

Bank Indonesia Whistle Blowing System

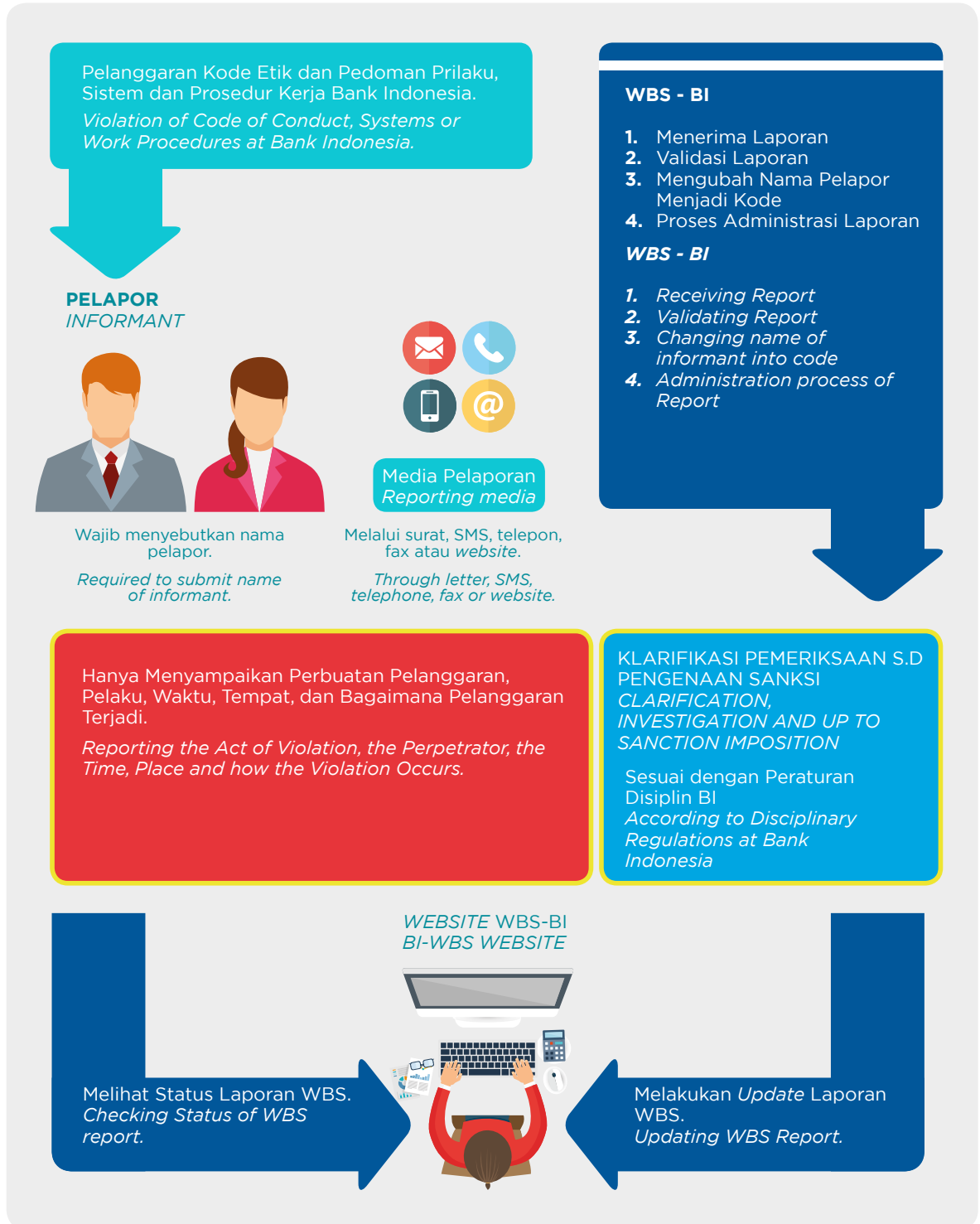
To complete the infrastructure of ethics and detect violations to code of ethics and conducts, Bank Indonesia in 2015 also implemented a new violations reporting system called Bank Indonesia's Whistle Blowing System (WBS).

Through the system, the public can report alleged violations on ethics, behavior, and working procedures conducted by Bank Indonesia's human resources as form of social control. Every report is guaranteed to be confidential and will be followed-up by further investigation in any case with sufficient evidences. The WBS creates a mutual supervision system for the appropriateness of behavior and compliance to working procedures of Bank Indonesia's human resources.

Sarana pelaporan WBS yang disediakan Bank Indonesia adalah sebagai berikut: WBS reporting medium provided by Bank Indonesia is as follows:

- **Website** : <https://www.bi.go.id/wbsbi>
- **Surat/Mail** : WBS-BI, Jl. MH. Thamrin
No. 2, Jakarta 10350
- **Faksimili/Facsimile** : (+62) 21 2310689
- **E-mail** : wbsbi@bi.go.id
- **SMS** : (+62) 8118692724
- **Telepon/Phone** : (+62) 21 29817752

Gambar 5. Mekanisme Pelaporan WBS BI
Picture 5. BI WBS Reporting Mechanism



Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Bank Indonesia mewajibkan pimpinan dan pegawai Bank Indonesia untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kewajiban pelaporan harta kekayaan ini merupakan infrastruktur yang digunakan untuk mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, menanamkan kejujuran dan integritas, serta keterbukaan di kalangan penyelenggara negara.

Pegawai yang diwajibkan melaporkan tidak hanya terbatas pada pegawai yang berada pada level pimpinan. Namun, mencakup pula pegawai pada level pelaksana yang memiliki tugas yang berhubungan langsung dengan pihak eksternal misal pada bidang perizinan, pengadaan, penerimaan pegawai, perkasan, dan pengelolaan fisik uang.

Sejalan dengan kewajiban yang diamanatkan dalam undang-undang, penyampaian LHKPN dilakukan pada saat pertama kali pegawai menduduki pangkat/jabatan, dan diperbaharui setiap 2 (dua) tahun dari penyampaian LHKPN sebelumnya. Sebelum memasuki batas usia pensiun, pegawai kembali diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN.

Untuk menjaga komitmen dan memastikan penerapan kewajiban tersebut, penyampaian LHKPN oleh pegawai menjadi salah satu syarat dalam proses promosi. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut juga menjadi objek penegakan disiplin Bank Indonesia.

State Administrators Wealth Report

As part of attempts to actualize a state administration that is clean and free from corruption, collusion, and nepotism, Bank Indonesia requires its leaders and employees to submit the State Administrators Wealth Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK).

The required wealth report is an infrastructure to prevent potential misuse of positions and authorities, instill truthfulness and integrity, as well as openness among state officials.

Employees required to submit the report are not only those holding leadership posts, but also employees in execution level who have duties directly related to external parties, such as officers in license, procurement, recruitment, cash flow section, and currency physical management divisions.

In line with the requirements mandated by the law, wealth reports are submitted once they assume a rank/position, and renewed every 2 (two) years from the previous submission. Prior to entering retirement age, employees are required to submit another wealth report.

To maintain commitment and ensure compliance to the obligation, the submission of wealth report is set as a requirement for promotion process. Violation of the obligation also leads to Bank Indonesia's disciplinary enforcement.



Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai penyelenggara negara, pejabat Bank Indonesia diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, pada 2015 Bank Indonesia mengeluarkan lima ketentuan internal terkait dengan LHKPN yang berlaku tidak hanya untuk Anggota Dewan Gubernur (ADG), namun juga Pegawai mulai dari pangkat Asisten Manajer ke atas dan jabatan-jabatan tertentu.

Requirement to Submit Wealth Report of State Administrators

As state administrators, Bank Indonesia officials are required to submit their wealth report to the Corruption Eradication Commission (KPK). This is stated in the Law No. 28 Year 1999 on State Administrations That Are Clean and Free of Corruption, Collusion, and Nepotism, as well as Law No. 30 Year 2002 on Corruption Act Eradication Commission.

To support the Law implementation, in 2015 Bank Indonesia released five internal rules related to existing LHKPN which is applicable not only to Members of the Board of Governors (ADG), but also Employees starting from Assistant Managers upwards and certain positions.

Hingga akhir Januari 2016, 96% pegawai Bank Indonesia dengan pangkat Manajer sampai dengan Direktur Eksekutif telah memenuhi ketentuan penyampaian LHKPN. Adapun sejumlah pegawai yang belum menyampaikan LHKPN dikarenakan sedang menjalani cuti sakit, cuti di luar tanggungan, memasuki masa persiapan pensiun, atau menjalani masa pensiun.

As of the end of January 2016, 96% Bank Indonesia's employees holding Managerial posts to Executive Directors have submitted wealth reports. A number of employees who have yet to submit the report were taking sick leave or unpaid leave, entering preparation period for retirement or already in retirement.

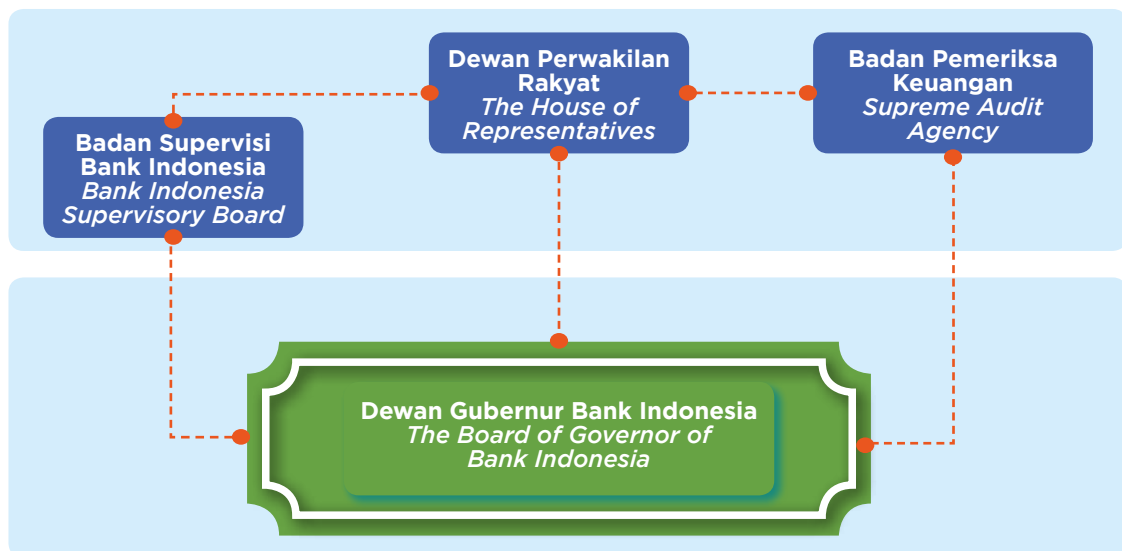
STRUKTUR TATA KELOLA BANK INDONESIA

BANK INDONESIA GOVERNANCE STRUCTURE

Sesuai Undang-undang tentang Bank Indonesia, struktur tata kelola di Bank Indonesia memiliki keunikan karakteristik. Peran eksekutif dilaksanakan oleh Dewan Gubernur, sementara pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Dewan Gubernur dilakukan oleh lembaga di luar Bank Indonesia.

In accordance with the Law on Bank Indonesia, the governance structure of Bank Indonesia has unique characteristics. The executive roles are performed by the Board of Governors, while supervision to the Board of Governor's task implementation and performance is conducted by an external institution.

Gambar 6. Struktur Tata Kelola Bank Indonesia
Picture 6. Bank Indonesia Governance Structure



Fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga publik yang independen dalam tatanan kenegaraan Indonesia. Pengawasan terhadap Bank Indonesia dilakukan sebagai perwujudan mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antar lembaga negara. Hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada publik.

The supervisory function towards Bank Indonesia cannot be separated from its jurisdiction as an independent public institution in Indonesian state. The supervision towards Bank Indonesia is performed as the actualization of checks and balances mechanism among state institutions. This is needed to ensure the accountability of Bank Indonesia in performing its duties and authorities to the public.

Pengawasan terhadap Bank Indonesia

Bank Indonesia bertanggung jawab kepada rakyat dalam pelaksanaan tugasnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia dilakukan oleh DPR-RI. Sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia, dalam hal DPR-RI memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang, termasuk dalam rangka penilaian terhadap kinerja Bank Indonesia, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan atau tertulis. Penyampaian penjelasan dan keterangan antara lain dilakukan dalam forum Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI.

Beberapa topik yang umumnya dibahas dalam forum Rapat Kerja di antaranya terkait asumsi makroekonomi untuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia.

DPR-RI melakukan pengawasan terhadap Bank Indonesia melalui Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). BSBI dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 dan bertanggung jawab langsung kepada DPR-RI, serta tidak berada dalam struktur organisasi Bank Indonesia. BSBI menyampaikan hasil telaahannya terkait dengan kegiatan operasional dan keuangan Bank Indonesia kepada DPR-RI per triwulan, dan tidak mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur Bank Indonesia. Keberadaan BSBI diharapkan memperkuat fungsi pengawasan DPR-RI terhadap Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.

Pengawasan terhadap Bank Indonesia dari sisi keuangan juga dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang hasilnya disampaikan kepada DPR-RI. Pada 2015, dilakukan pemeriksaan LKTBI 2014 yang didahului dengan audit interim pada Oktober 2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan LKTBI 2014, Bank Indonesia kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari

Supervision towards Bank Indonesia

Bank Indonesia is responsible to the people in its task implementation through the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) so that the supervision of Bank Indonesia is performed by DPR-RI. As mandated by the Law on Bank Indonesia, Bank Indonesia is responsible to deliver explanation either verbally or written in any case that DPR-RI requests explanations regarding issues related to the exercise of its duties and authorities, including assessment towards the performance. The explanations and information are delivered among others through a working meeting with the DPR-RI's Commission XI.

Several topics generally discussed in the Working Meeting forum include the macroeconomic assumption for the deliberation of Proposed State Budget (RAPBN) and Proposed Bank Indonesia Annual Budget.

DPR-RI performs supervision towards Bank Indonesia through the Bank Indonesia Supervisory Body (BSBI). BSBI was established under the Law No. 3 of 2004 and is responsible directly to DPR-RI, and stays outside the organizational structure of Bank Indonesia. BSBI delivers its assessment related to the operational and financial activities of Bank Indonesia to DPR-RI quarterly, yet performs no evaluation to the performance of the Board of Governors of Bank Indonesia. BSBI is expected to strengthen the supervisory function of DPR-RI towards Bank Indonesia as part of attempt to improve accountability, independency, transparency, and credibility of Bank Indonesia.

The supervision of Bank Indonesia's finance is also conducted through the examination of its Annual Financial Report (LKTBI) by the Supreme Audit Agency (BPK-RI), which will submit the results to DPR-RI. An examination to LKTBI 2014 was performed in 2015 and was preceded by an interim audit in October 2014. Based on the result of examination in 2014, Bank Indonesia received Unqualified Opinion (WTP) from BPK-RI. The achievement could

BPK-RI. Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya Bank Indonesia menindaklanjuti temuan audit yang disampaikan BPK-RI. Sebagian besar temuan audit BPK-RI pada 2015 (97,29%) telah ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia.

Pencapaian LKTBI dengan opini WTP sejak 2003 (13 kali berturut-turut) mencerminkan kesungguhan dan komitmen pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang transparan dan akuntabel. Bank Indonesia mempublikasikan laporan keuangan tahunannya kepada publik setelah hasil pelaksanaan audit BPK-RI disampaikan kepada Bank Indonesia.

Selain audit terhadap laporan keuangan tahunan, pada 2015 BPK-RI juga melakukan audit proses pencetakan, penerbitan, dan pemusnahan uang Rupiah guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah. Pelaksanaan audit dilaksanakan setiap tahun sejak 2013 sebagai tindak lanjut implementasi Undang-Undang tentang Mata Uang.

not be separated from Bank Indonesia's efforts in following-up audit findings by BPK-RI. Bank Indonesia addressed 97.29% of the follow-up actions on the findings of the 2015 audit.

The LKTBI achievements in receiving Unqualified Opinion from BPK-RI since 2003 (13 consecutive years) reflected the seriousness and commitment of a transparent and accountable Bank Indonesia's task implementation. Bank Indonesia published its annual financial report to the public after the audit from BPK-RI was delivered to Bank Indonesia.

In addition to the audit on the annual financial report, in 2015 BPK-RI also performed an audit for printing, publication and the destruction of Rupiah currency to ensure accountability in Bank Indonesia's task implementation on Rupiah management. The audit has been performed every year since 2013 as a follow-up on the implementation of the Law on Currency.

Tabel 4. Kegiatan Bank Indonesia dengan DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2015

Table 4. Activities of Bank Indonesia with the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) and the House of Regional Representatives of the Republic of Indonesia (DPD-RI)

No.	Nama Kegiatan Name of Activities	Waktu Time	Tempat Place	Agenda Pembahasan Agenda of Discussions
1	Pertemuan Awal Tahun Bank Indonesia dan Komisi XI DPR RI <i>Early Year Meeting of Bank Indonesia and Commission XI DPR RI</i>	Januari <i>January</i>	Jakarta	Perkembangan Perekonomian Indonesia tahun 2015 <i>Indonesia's Economic Development in 2015</i>
2	Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI - Pembahasan APBN 2015 <i>Work Meeting of DPR RI Budget Agency - 2015 State Budget Discussion</i>	Januari <i>January</i>	Jakarta	Pembahasan Tk I Perubahan APBN tahun 2015 <i>First Level Discussion on 2015 State Budget Changes</i>
3	Kunjungan Kerja Komisi XI -DPR RI <i>Working Visit of Commission XI-DPR RI</i>	Januari, Februari <i>January, February</i>	Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku Utara <i>West Nusa Tenggara, Bali, North Maluku</i>	Pengawasan KUR dan Perkembangan Perekonomian, TPID <i>KUR Monitoring and Economic Development, TPID</i>
4	Round Table Discussion Badan Supervisi Bank Indonesia <i>Round Table Discussion of Bank Indonesia Supervisory Body</i>	Februari <i>February</i>	Jakarta	Outlook Perekonomian Indonesia 2015 <i>Indonesian Economic Outlook 2015</i>
5	Kunjungan Kerja DPD RI <i>DPD RI Working Visit</i>	Februari <i>February</i>	Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara <i>North Sumatra, Central Java, and North Sulawesi</i>	Pengawasan Pelaksanaan UU Perbankan <i>Banking Law Implementation Supervision</i>
6	Rapat Kerja DPD RI <i>DPD RI Work Meeting</i>	Februari <i>February</i>	Jakarta	Pelaksanaan UU Perbankan <i>Banking Law Implementation</i>

No.	Nama Kegiatan <i>Name of Activities</i>	Waktu <i>Time</i>	Tempat <i>Place</i>	Agenda Pembahasan <i>Agenda of Discussions</i>
7	Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI <i>Work Meeting of DPR RI Budget Agency</i>	Februari <i>February</i>	Jakarta	Pengesahan RUU APBN P 2015 <i>Ratification of 2015 Budget Revision</i>
8	Kunjungan Kerja Komisi XI -DPR RI <i>Working Visit of Commission XI-DPR RI</i>	Februari <i>February</i>	Yogyakarta, Palembang, Balikpapan	Pengawasan KUR dan Perkembangan Perekonomian, TPID <i>KUR Monitoring and Economic Development, TPID</i>
9	Kunjungan Kerja Komisi XI -DPR RI <i>Working Visit of Commission XI-DPR RI</i>	Maret <i>March</i>	Makassar, Surabaya	Pendalaman RUU Perbankan <i>Banking Law Deepening</i>
10	Rapat Kerja Komisi XI DPR RI <i>Work Meeting of Commission XI-DPR RI</i>	Maret <i>March</i>	Jakarta	Perkembangan Nilai Tukar <i>Exchange Rate Development</i>
11	Kunjungan Kerja Komisi XI -DPR RI <i>Working Visit of Commission XI-DPR RI</i>	April <i>April</i>	Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau <i>North Sumatra, West Kalimantan, Riau Islands</i>	Implementasi UU No.7 Tentang Mata Uang <i>Implementation of Law No. 7 on Currency</i>
12	Kunjungan Kerja Panitia Kerja RUU Perbankan DPR-RI <i>Working Visit of Working Committee on Banking Law DPR-RI</i>	April <i>April</i>	Sumatera Utara <i>North Sumatra</i>	Draf RUU Perbankan <i>Banking Bill Draft</i>
13	Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI <i>Hearing of Commission XI-DPR RI</i>	April <i>April</i>	Jakarta	<i>Fit and Proper Test</i> Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia <i>Fit and Proper test of Bank Indonesia Deputy Governor Candidate</i>
14	Kunjungan Kerja Komisi XI-DPR RI <i>Working Visit of Commission XI-DPR RI</i>	April, Mei <i>April, May</i>	D.I. Aceh dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan <i>DI Aceh and East Nusa Tenggara, South Sulawesi</i>	Inflasi Daerah <i>Regional Inflation</i>
15	Kunjungan Kerja Komisi XI-DPR RI <i>Working Visit of Commission XI-DPR RI</i>	Mei, Juni <i>May, June</i>	Kalimantan Timur, Jawa Timur, Riau, Sumatera Selatan dan Jawa Timur <i>East Kalimantan, East Java, Riau, South Sumatra and East Java</i>	Materi mengenai Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah <i>Matter on Regional Inflation Control Supervision</i>
16	Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI <i>Work Meeting of Commission XI-DPR RI</i>	Juni <i>June</i>	Jakarta	Pembahasan Tk. I Asumsi Makro RAPBN th 2016 <i>First Level Discussion on 2016 Budget Bill Macro Assumptions</i>
17	Kunker Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumut, Sulsel, Jateng (Semarang) <i>Specific Working Visit of Commission XI-DPR RI to North Sumatra, South Sulawesi, Central Java (Semarang) Provinces</i>	Juni <i>June</i>	Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa tengah <i>North Sumatra, South Sulawesi, and Central Java</i>	Materi mengenai Pertumbuhan Perekonomian Daerah <i>Material on Regional Economic Growth</i>
18	Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI <i>Work Meeting of Commission XI-DPR RI</i>	Juli <i>July</i>	Jakarta	Pengesahan Pokok-Pokok Asumsi Makro RAPBN th 2016 <i>Approval of Main Macro Assumptions in 2016 State Budget Bill</i>
19	Kunjungan Kerja Komisi XI-DPR RI <i>Working Visit of Commission XI-DPR RI</i>	Juli <i>July</i>	Kepulauan Riau dan Yogyakarta <i>Riau Islands and Yogyakarta</i>	Perkembangan Ekonomi Daerah <i>Regional Economic Development</i>
20	Kunjungan Kerja Komisi XI-DPR RI <i>Working Visit of Commission XI-DPR RI</i>	September, Oktober <i>September, October</i>	Sulawesi Selatan, Jawa Timur <i>South Sulawesi, East Java</i>	Pengawasan Perkembangan Industri Perbankan di tengah Perlambatan Ekonomi Nasional <i>Supervision of Banking Industry Development amidst National Economic Slowdown</i>

No.	Nama Kegiatan Name of Activities	Waktu Time	Tempat Place	Agenda Pembahasan Agenda of Discussions
21	Kunjungan Kerja Komisi XI -DPR RI <i>Working Visit of Commission XI-DPR RI</i>	Oktober <i>October</i>	Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Barat <i>Bengkulu, Bali, West Nusa Tenggara</i>	Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU Perbankan <i>Supervision on Banking Law Implementation</i>
22	Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI <i>Work Meeting of Commission XI-DPR RI</i>	Oktober <i>October</i>	Jakarta	Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BI Khususnya di Bidang Moneter <i>Evaluation of Task Implementation and Authority of BI Especially in Monetary Sector</i>
23	Kunjungan Kerja Komisi XI -DPR RI <i>Working Visit of Commission XI-DPR RI</i>	Oktober <i>October</i>	Jawa Barat <i>West Java</i>	Dampak Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Sektor Riil di Provinsi Jawa Barat <i>The Impact of Economic Growth Slowdown to Real Sector in West Java Province</i>
24	Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI <i>Work Meeting of Budget Committee-DPR RI</i>	Oktober <i>October</i>	Jakarta	Penetapan Postur Sementara RUU tentang APBN TA.2016 <i>Stipulation of Temporary Posture on 2016 Budget Bill</i>
25	Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI <i>Work Meeting of Budget Committee-DPR RI</i>	Oktober <i>October</i>	Jakarta	Penetapan RAPBN TA.2016 <i>Stipulation of 2016 Budget Bill</i>
26	Kunjungan Kerja Komisi XI DPR-RI <i>Working Visit of Commission XI-DPR RI</i>	November <i>November</i>	Bali, Jawa tengah <i>Central Java</i>	Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Inflasi dan SSK <i>Regional Economic Growth, Inflation and Financial System Stability</i>
27	Kunjungan Kerja Komisi XI DPR-RI <i>Working Visit of Commission XI-DPR RI</i>	Desember <i>Desember</i>	Kalimantan Timur, Kalimantan barat, Kalimantan Selatan <i>East Kalimantan, West Kalimantan, South Kalimantan</i>	Pertumbuhan Ekonomi <i>Economic Growth</i>

Hubungan dengan Pemerintah

Tata kelola Bank Indonesia diperkuat dengan kejelasan hubungan antara Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan strategis, terutama Pemerintah. Hal tersebut diatur secara jelas dalam perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia maupun undang-undang yang lain.

Hubungan kerja sama dan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah bertujuan agar masing-masing kebijakan dapat bersinergi dalam mencapai stabilitas makroekonomi. Bentuk koordinasi dilakukan antara lain melalui keikutsertaan Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, keuangan, dan masalah lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga menyelenggarakan *Round Table Policy Dialogue* secara berkala yang melibatkan kementerian atau lembaga terkait untuk membahas dan menyusun respons kebijakan di bidang moneter dan fiskal.

Relationships with the Government

Bank Indonesia's governance is strengthened with the clarity of relationship between Bank Indonesia and strategic stakeholders, especially the Government. This is clearly regulated, both by the Law on Bank Indonesia and other laws.

The working relationship and coordination between Bank Indonesia and the Government are aimed at synergizing policies in achieving macroeconomic stability. The coordination is performed through Bank Indonesia's participation in cabinet meetings on economics, banking, finance, and other issues related to Bank Indonesia's tasks and authorities. Moreover, Bank Indonesia also organizes periodic Round Table Policy Dialogue involving related ministries or institutions to discuss and draft policy response in monetary and fiscal.

Selain itu, Bank Indonesia memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), termasuk pada saat Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara. Hal yang sama juga dilakukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah.

Bank Indonesia juga dapat mengundang wakil Pemerintah untuk hadir dalam RDG bulanan guna memperkuat asesmen perkembangan perekonomian terkini dan memberikan pandangan dari sisi kebijakan fiskal.

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, Bank Indonesia dan Pemerintah memiliki protokol koordinasi melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Dalam forum tersebut, secara jelas diatur mengenai koordinasi dan peran masing-masing pihak dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Dalam hubungan kerja operasional, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah dan memberikan remunerasi atas saldo kas Pemerintah. Pemerintah dapat melakukan transaksi dan memperoleh informasi mengenai pengelolaan rekeningnya melalui Bank Indonesia *Government Electronic Banking* (BIG-eB).

Sejak Januari 2014, aplikasi BIG-eB telah terhubung dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) milik Kementerian Keuangan. Aktivitas transaksi Pemerintah melalui sistem BIG-eB selama 2015 menunjukkan peningkatan volume transaksi yang mencapai 24.628 transaksi dengan nominal sebesar Rp8.513 triliun.

Furthermore, Bank Indonesia delivers inputs to the Government in the preparation of the Proposed State Budget (RAPBN), including when the Government will issue bonds. Bank Indonesia's Representative Offices in regions perform similar contribution during the preparation of Proposed Regional Budget (RAPBD).

Bank Indonesia can also invite the Government's representatives to attend the monthly meeting of the Board of Governors (RDG) to strengthen the assessment of updated economic development and share the fiscal policy point of view.

To maintain Indonesia's financial system stability, Bank Indonesia and the Government have a coordination protocol through the Financial System Stability Coordination Forum (FKSSK). The forum defines the role of each party in the prevention and handling of financial system crisis.

In operational working relationship, Bank Indonesia manages the Government's cash account and gives remuneration based on the account. The Government can perform transactions and obtain information regarding the account management through Bank Indonesia Government Electronic Banking (BIG-eB).

Since January 2014, the BIG-eB application has been connected to the State Budget and Treasury System (SPAN) owned by the Finance Ministry. The government transactions through BIG-eB system during 2015 showed a volume increase, reaching 24,628 transactions worth Rp8,513 trillion.



Koordinasi terkait transaksi keuangan Pemerintah, baik dari sisi kebijakan operasional maupun penggunaan BIG-eB, dilakukan dalam Forum Harmonisasi (Forhar) yang diselenggarakan secara tahunan antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Pada 2015, forum telah menghasilkan kesepakatan tindak lanjut atas penyelesaian 46 isu/topik oleh masing-masing lembaga.

Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah juga melakukan penerimaan dan penatausahaan pinjaman luar negeri, serta penyelesaian tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah kepada pihak luar negeri.

Di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia dan Pemerintah juga melakukan koordinasi dalam perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang guna meningkatkan tata kelola dalam proses pengelolaan uang Rupiah. Hal ini sebagaimana amanat Undang-undang tentang Mata Uang.

Coordination related to the Government's financial transaction, either from operational policy or the utilization of BIG-eB, is performed in the annual Harmonization Forum (Forhar) between Bank Indonesia and the Government. In 2015, the forum agreed on the follow up of 46 issues/topics by respective institutions.

Bank Indonesia for and on behalf of the government also receives and performs foreign loan management, as well as settlement of bills and financial obligations of the Government to foreign entities.

In the Rupiah management, Bank Indonesia and the Government also coordinate in planning, printing, and destruction of currency to improve governance in Rupiah management. This is in line with the Law on Currency.

PROSES TATA KELOLA BANK INDONESIA

Proses tata kelola mengatur serangkaian standar dan prosedur yang dilaksanakan oleh Anggota Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia untuk memastikan penerapan dan penegakan tata kelola secara terencana, konsekuen, dan berkelanjutan.

Pengambilan Keputusan dalam Rapat Dewan Gubernur

Rapat Dewan Gubernur (RDG) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Melalui forum ini, Dewan Gubernur menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis. Sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, mekanisme RDG diatur berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pengambilan keputusan yang baik.

Penyelenggaraan RDG terdiri atas RDG Bulanan dan RDG Mingguan. RDG Bulanan merupakan RDG yang diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perekonomian dan kebijakan Bank Indonesia serta menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Sedangkan RDG Mingguan diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter, perkembangan stabilitas sistem keuangan, perkembangan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah dan/atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam RDG, materi yang diajukan harus dikaji dan dibahas secara matang dalam forum pembahasan/koordinasi antar satuan kerja, rapat bidang, dan/atau rapat komite. Materi RDG juga harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap, serta asesmen dan mitigasi risiko atas rekomendasi keputusan.

BANK INDONESIA GOVERNANCE PROCESS

The governance process outlines a series of standards and procedures performed by Members of the Board of Governors and employees of Bank Indonesia to ensure a planned, consequent, and sustainable implementation and enforcement of governance.

Decision Making in the Board of Governors Meeting

The Board of Governors' Meeting (RDG) is the highest decision-making forum in Bank Indonesia. Through this forum, the Board of Governors determines or evaluates principle and strategic policies. As the highest decision-making forum, the RDG mechanism is arranged based on good decision-making governance principles.

The Board of Governors Meeting is conducted monthly and weekly. The monthly RDG is convened at least once a month to make thorough evaluation of the economy and Bank Indonesia's policies as well as determining general policies in monetary, macroprudential, and payment system and Rupiah management. Meanwhile, the weekly RDG is convened at least once a week to evaluate the implementation of monetary policies, development of financial system stability, development of payment system and Rupiah management and/or determining other principal and strategic policies related to Bank Indonesia's task implementation.

In improving the quality of decision making in RDG, the materials proposed should already be assessed and discussed thoroughly in discussion/coordination forum among Departments, division meetings, and/or committee meetings. RDG materials must also be supported with complete data and information, as well as assessment and risk mitigation on decision recommendations.

Selama 2015, Bank Indonesia telah menyelenggarakan 12 kali RDG Bulanan sesuai jadwal yang dipublikasikan dan 64 kali RDG Mingguan dengan 203 topik bahasan, yang sebagian besar merupakan topik moneter dan *strategic enabler*. Hal ini sejalan dengan perlunya penguatan respons kebijakan dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan domestik. Sementara itu, topik terkait *strategic enabler* diperlukan untuk mendukung implementasi transformasi Bank Indonesia yang telah dicanangkan sejak 2014.

In 2015, Bank Indonesia held 12 RDG Monthly meetings according to the published schedule and 64 RDG Weekly meetings with 203 topics, most of which were monetary and strategic enabler. This was in line with the need to strengthen policy response in facing the dynamics of global and domestic economy. Meanwhile, topics related to strategic enabler are needed to support the implementation of Bank Indonesia's transformation that has been initiated since 2014.

Infografis 9. Komposisi Topik yang Dibahas dalam Rapat Dewan Gubernur
Infographic 9. Topic Compositions Discussed in the Board of Governors Meeting



Bank Indonesia mempublikasikan jadwal RDG Bulanan selama satu tahun ke depan, sebelum berakhirnya tahun berjalan. Guna membangun ekspektasi positif *stakeholder*, keputusan yang ditetapkan dalam RDG Bulanan disampaikan kepada masyarakat pada hari yang sama dengan penyelenggaraan RDG.

Bank Indonesia published the Monthly RDG schedules for the upcoming year, prior to the end of the current year. To establish positive expectations from stakeholders, decisions approved in the Monthly RDG are delivered to the public on the same day of the meeting.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan, pada akhir tahun 2015 Dewan Gubernur memutuskan pelaksanaan RDG Bulanan 2016 dilakukan dalam waktu 2 (dua) hari berturut-turut. RDG Bulanan hari pertama bertujuan untuk memperdalam hasil asesmen moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. RDG Bulanan hari kedua dilaksanakan untuk menetapkan *stance* kebijakan terutama terkait suku bunga (*policy rate*) dan kebijakan nilai tukar, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, serta langkah koordinasi kebijakan.

In improving the quality of policy, the Board of Governors decided at the end of 2015 the Monthly RDG meetings in 2016 would be conducted in 2 (two) consecutive days. The first day of the meeting is aimed to deepen assessments on monetary issues, financial stability system, payment system and Rupiah management. The second day of the meeting will determine the policy stance particularly related to policy rate and exchange rate policy, macroprudential, payment system and Rupiah management, as well as measures for policy coordination.

Untuk menjaga tata kelola pengambilan keputusan, RDG diselenggarakan apabila telah kuorum yakni dihadiri oleh separuh atau lebih jumlah Anggota Dewan Gubernur. Pada 2015, kehadiran Anggota Dewan Gubernur dalam RDG Bulanan rata-rata mencapai 94,57%. Sementara kehadiran dalam RDG Mingguan rata-rata mencapai 77,42%.

To maintain decision-making governance, the RDG is held only after a quorum is reached, meaning that a half or more than half of the Members of the Board of Governors are present. In 2015, the attendance of Members of the Board of Governors in Monthly RDG meetings averaged at 94.57%. Meanwhile, in the RDG Weekly meeting, the attendance reached 77.42%.

Tabel 5. Kehadiran Anggota Dewan Gubernur dalam Rapat Dewan Gubernur Bulanan
Table 5. Attendance of Board of Governors Members in Monthly Board of Governors Meeting

Uraian Description	Agus D.W. Martowardojo	Mirza Adityaswara	Halim Alamsyah	Ronald Waas	Perry Warjiyo	Hendar	Erwin Rijanto
Persentase Percentage	92%	100%	100%	92%	92%	100%	86%
Topik yang Dihadiri Topic Attended	11	12	5	11	11	12	6
Tidak Hadir Absent	1	0	0	1	1	0	1

Tabel 6. Kehadiran Anggota Dewan Gubernur dalam Rapat Dewan Gubernur Mingguan
Table 6. Attendance of Board of Governors Members in Weekly Board of Governors Meeting

Uraian Description	Agus D.W. Martowardojo	Mirza Adityaswara	Halim Alamsyah	Ronald Waas	Perry Warjiyo	Hendar	Erwin Rijanto
Persentase Percentage	74%	87%	70%	79%	76%	87%	69%
Topik yang Dihadiri Topic Attended	150	177	57	160	154	176	88
Tidak Hadir Absent	53	26	20	43	49	27	33

*) Masa Jabatan Bapak Halim Alamsyah Berakhir Per Tanggal 16 Juni 2015 | Term of Office of Halim Alamsyah Ended on 16 June 2015

**) Bapak Erwin Rijanto Mulai Menjabat Pada Tanggal 17 Juni 2015 | Erwin Rijanto Took Office Starting 17 June 2015

Perumusan Kebijakan

Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengeluarkan peraturan/kebijakan perlu memastikan proses perumusan kebijakan dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan *output* kebijakan yang kredibel dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Untuk meningkatkan obyektivitas dalam perumusan kebijakan, rekomendasi kebijakan didukung oleh data, analisa, dan/atau informasi yang relevan, serta asesmen risiko dan mitigasi yang memadai.

Pada 2015, untuk memastikan proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia telah dilaksanakan secara sistematis, Bank Indonesia menyempurnakan pengaturan mengenai strategi kebijakan utama. Dengan pengaturan tersebut, Bank Indonesia menetapkan kerangka kerja kebijakan yang terintegrasi antara kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah,

Policy Making

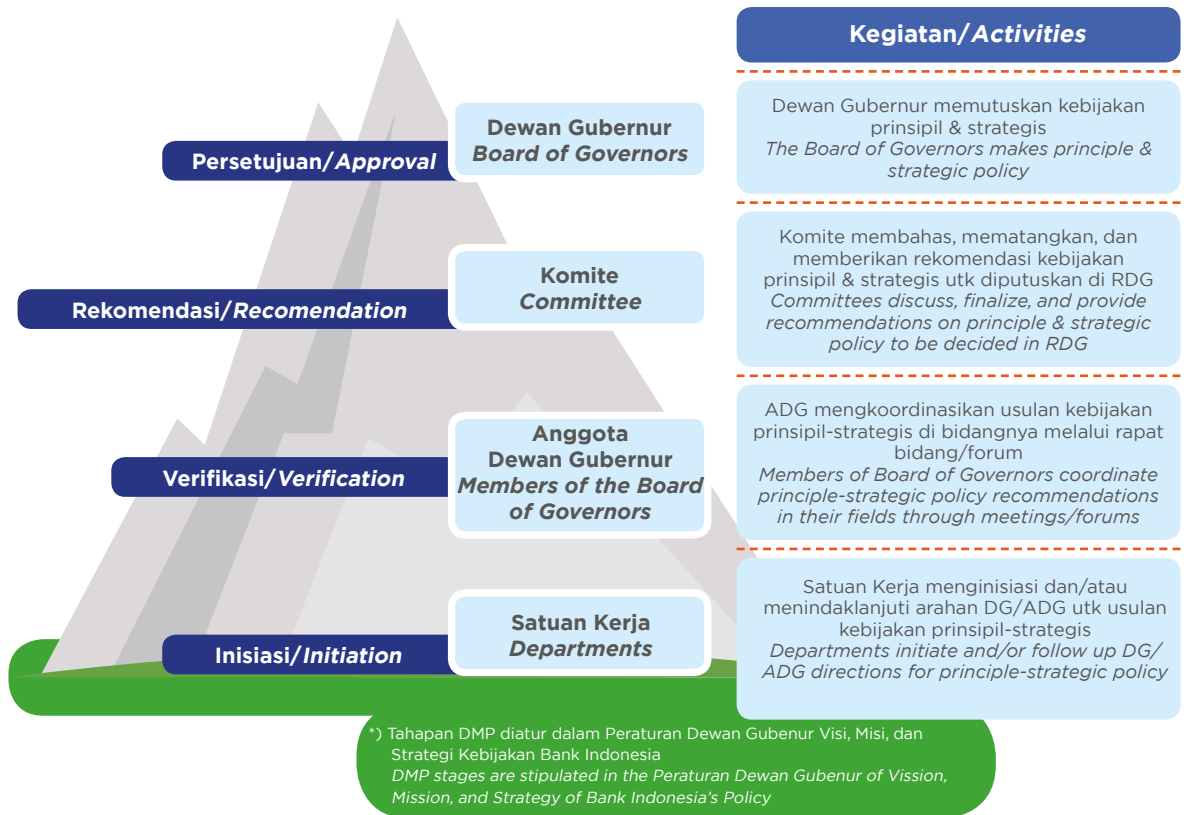
Bank Indonesia as the authority releasing regulations/policies needs to ensure the decision making process is performed through structured and systematic procedures and mechanism to produce credible policy output and meet public accountability principles. To enhance objectivity in decision-making, policy recommendations are supported by data, analysis, and/or relevant information, as well as appropriate risk assessment and mitigation.

In 2015, Bank Indonesia improved the arrangement of key policy strategies to ensure that decision-making process has been conducted systematically. With the new arrangement, Bank Indonesia set an integrated policy framework between monetary policy, macroprudential, payment system and Rupiah management, as well as support of regional economic policy and international policy. On

serta dukungan kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan internasional. Terkait proses perumusan kebijakan, peningkatan fokus pada aspek *governance* diharapkan dapat menghasilkan kebijakan Bank Indonesia yang lebih efektif, kredibel, dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

decision-making process, improvement of focus on governance aspects is expected to create Bank Indonesia's policies which are more a more effective, credible, and meeting public accountability principles.

Gambar 7. Pengambilan Keputusan Terkait Kebijakan Prinsipil-Strategis
Picture 7. Decision Making Process on Principle-Strategic Policy



Untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan terkoordinasi, Bank Indonesia menyempurnakan pengaturan Komite di Bank Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, yaitu (i) Komite Kebijakan Moneter, (ii) Komite Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, (iii) Komite Kebijakan Sistem Pembayaran, (iv) Komite Pengelolaan Cadangan Devisa, dan (v) Komite Sumber Daya Manusia. Pengaturan baru ini memperjelas mekanisme kerja komite dan meningkatkan akuntabilitas komite melalui evaluasi secara berkala.

To produce effective and coordinated policies, Bank Indonesia improves its Committee arrangement formed based on the task implementation needs: (i) Monetary Policy Committee, (ii) Financial System Stability Policy Committee, (iii) Payment System Policy Committee, (iv) Forex Reserves Management Committee, and (v) Human Resources Committee. The new arrangement gives clarity of the Committee's working mechanism and improves their accountability through periodic evaluation.

Di samping itu proses perumusan kebijakan dikomunikasikan kepada publik untuk meningkatkan kredibilitas pengaturan/kebijakan yang dihasilkan. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, dibuka kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rumusan pengaturan. Hal tersebut diharapkan dapat menjembatani komunikasi kebijakan di awal dan meningkatkan efektivitas dalam implementasi kebijakan ke depan.

Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja

Untuk mencapai Visi tahun 2024, Bank Indonesia melaksanakan proses manajemen strategis melalui Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen Kinerja (PAMK). Sistem PAMK adalah suatu sistem yang mencakup aturan, perangkat, dan mekanisme dalam manajemen strategis dan anggaran untuk mencapai visi dan misi Bank Indonesia secara terintegrasi, sistematis, seimbang, dan berkelanjutan.

Proses perencanaan Bank Indonesia dilakukan dalam dua tahapan, yaitu perencanaan lima tahunan (jangka menengah) dan perencanaan tahunan (jangka pendek). Proses perencanaan lima tahunan antara lain mencakup analisa lingkungan strategis, penetapan sasaran strategis, dan penyusunan *roadmap* program kerja strategis selama lima tahun ke depan. Rencana strategis yang dihasilkan selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh Satuan Kerja dalam Forum Strategis (FORSTRA) yang diselenggarakan secara lima tahunan.

Sedangkan, pada perencanaan tahunan (jangka pendek) dilakukan evaluasi pelaksanaan program kerja strategis, pengkinian analisa lingkungan strategis, rencana kerja tahunan, dan penyusunan anggaran program kerja strategis tahunan. Pembahasan Program Kerja Anggaran dan Rencana Investasi (PKARI) seluruh Satuan Kerja dilakukan dalam forum Rapat Kerja Tahunan. Selanjutnya, dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan DPR.

Pada Forum Strategis 2014, telah ditetapkan Program Transformasi Bank Indonesia 2014-2024 menuju Visi Bank Indonesia 2024. Program transformasi tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja jangka

Furthermore, Bank Indonesia communicates its policy making process to the public to improve its credibility in the arrangement/production of policies. It also increases public participation in the decision making by allowing stakeholders to give inputs in policies arrangement. This is expected to bridge communication from the early stage and improve the effectiveness of policy implementation in the future.

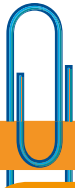
Strategic Planning and Performance Management

To accomplish the 2024 Vision, Bank Indonesia implements strategic management process through Planning, Budgeting, and Performance Management System (PAMK). PAMK is an integrated, systematic, balanced and sustainable system that covers regulation, components, and mechanism on strategic management and budgeting to achieve Bank Indonesia's vision and mission.

Bank Indonesia's planning process is conducted in two phases, five-year planning (medium term) and annual planning (short term). The five-year planning consists of strategic environment analysis, strategic goals determination, and arrangement of five-year strategic program roadmap. The strategic plan will be disseminated to entire Departments in the Strategic Forum (FORSTRA) conducted every five years.

Meanwhile, annual planning (short-term) comprises evaluation on strategic working program implementation, strategic environment analysis updates, annual working plan, and formulation of annual strategic working plan budget. The Investment Plan and Budget Work Program Discussion (PKARI) of all Departments is conducted in the Annual Working Meeting forum. Afterwards, Bank Indonesia's Annual Budget Plan is arranged to get the approval of DPR.

The Bank Indonesia Transformation Program 2014-2024 towards Bank Indonesia Vision 2024 was determined on the 2014 Strategic Forum. The transformation program becomes a benchmark for the arrangement of medium



Peran Internal Control Officer

Bank Indonesia menyesuaikan konsep *two lines of defense* dalam manajemen risiko menjadi *three lines of defense*, sesuai dengan kerangka *Basel Committee on Banking Supervision*. Peranan *Internal Control Officer (ICO)* juga ditingkatkan untuk memperkuat fungsi manajemen risiko.

ICO bertugas sebagai pemantau pengendalian internal, membantu satuan kerja (*satker*) mengelola risiko sesuai dengan perannya masing-masing. Bank Indonesia telah meningkatkan peran ICO melalui surat edaran BI sehingga pegawai yang ditunjuk sebagai ICO dapat terhindar dari potensi *conflict of interest* dan berperan maksimal sebagai fungsi *check and balance* *satker*.

Role of Internal Control Officer

Bank Indonesia adjusted the concept two lines of defense in risk management to three lines of defense, in accordance with the Basel Committee on Banking Supervision framework. The role of Internal Control Officer (ICO) is increased to strengthen the risk management function.

ICO is tasked as the internal control monitoring, helping Departments manage risks in accordance with their respective role. Bank Indonesia has increase ICO's role through BI decree so that the employees appointed as ICO can avoid the potential of conflict of interests and maximize the role as check and balance function of Departments.

menengah dan jangka pendek. Pelaksanaan rencana kerja secara berkala dilakukan pemantauan dan *review* terhadap realisasi program kerja, serta pencapaian indikator kinerja dalam bentuk kegiatan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, dan akhir tahun.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, informasi mengenai pencapaian kinerja Bank Indonesia disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada DPR-RI secara triwulanan dan tahunan. Laporan dimaksud juga disampaikan kepada Pemerintah, media massa, pengamat, akademisi, serta dipublikasikan melalui *website* dan media massa. Sementara evaluasi terkait penggunaan anggaran tahun berjalan dalam bentuk Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Operasional dan Rencana Investasi Bank Indonesia juga disampaikan kepada DPR-RI dan BSBI pada saat penyampaian Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia untuk tahun berikutnya.

Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko di Bank Indonesia telah beberapa kali mengalami penyempurnaan sejak pertama kali diterapkan pada 1999. Fungsi manajemen risiko yang sebelumnya tersebar di beberapa satuan kerja Bank Indonesia diintegrasikan dalam satu satuan kerja pelaksana fungsi manajemen risiko. Dalam satuan kerja tersebut terdapat fungsi pengelolaan risiko devisa, operasi moneter, dan *enterprise*.

and short term working plan. The implementation of working plan is being reviewed regularly according to the working program realization, and performance indicator achievements in monthly, quarterly and end-year performance evaluation.

As form of transparency and accountability, information on performance evaluation of Bank Indonesia is delivered in the Bank Indonesia Authorities and Task Implementation Report to the House of Representatives quarterly and annually. The report is also delivered to the Government, press, experts, academicians, as well as published through website and mass media. Meanwhile the evaluation related to current year budget in form of Bank Indonesia's Investment Plan and Operational Budget Evaluation Report is also delivered to the House of Representatives and BSBI during presentation of Bank Indonesia Annual Budget Plan for the following year.

Risk Management and Internal Control

Risk Management

The implementation of risk management in Bank Indonesia has been improved since the first implementation in 1999. The risk management function that was previously spread in several Departments was integrated in one Department focusing on risk management. The Department has forex risk management, monetary operation, and enterprise functions.

Penyempurnaan implementasi manajemen risiko dilakukan berdasarkan prinsip *three lines of defense*, dengan meningkatkan budaya sadar risiko pada masing-masing Satuan Kerja, melalui pembentukan *Internal Control Officer (ICO)*. Peran ICO antara lain menyusun rencana pengendalian internal, memberikan rekomendasi serta memantau pengendalian internal secara periodik, memberi konsultasi pengelolaan manajemen risiko, serta memberi fasilitasi manajemen risiko. Dengan adanya ICO diharapkan setiap pengambilan keputusan selalu mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku.

The improvement of risk management implementation is conducted based on three lines of defense principle, by increasing risk awareness on each Department, by establishing the Internal Control Officer (ICO). ICO's role among others are preparing internal control plan, giving recommendation as well as supervising internal control periodically, giving risk management consultation, and facilitating risk management. With the existence of ICO, every decision-making is expected to prioritize the compliance on prevailing rules and procedures.

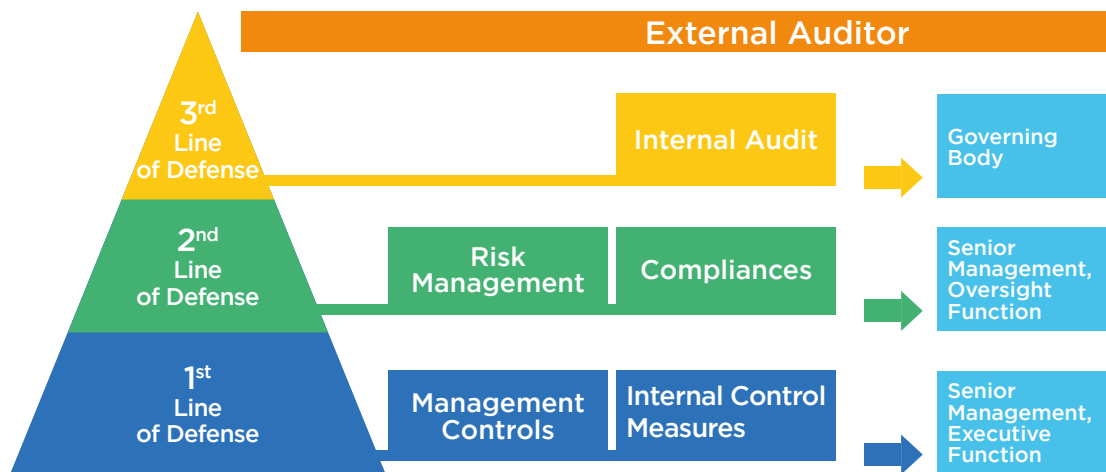
Untuk menerapkan standar terbaik, Bank Indonesia menyusun *framework* manajemen risiko dengan mengacu pada *international best practises*. Desain tersebut membagi pengendalian risiko dalam tiga kategori. Pertama, pengendalian risiko secara *first line of defense* yang dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan proses bisnis. Kedua, pengendalian risiko secara *second line of defense* dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi manajemen risiko dan independen dari unit kerja yang melaksanakan proses bisnis. Ketiga, unit kerja yang melaksanakan fungsi audit internal melakukan *quality assurance* guna memastikan kegiatan pengendalian risiko dilaksanakan secara efektif.

In order to implement the best standard, Bank Indonesia formulates the risk management framework in reference to international best practices. The design divides risk management into three categories. First, the first line of defense risk management is performed by Departments conducting business process. Second, the second line of defense risk management is performed by Departments with risk management function and are independent from the Departments conducting business process. Third, Departments conducting internal audit function performs quality assurance to ensure risk management activities are implemented effectively.

Gambar 8. Konsep Pengendalian Three Lines of Defense
Picture 8. Concept of Three Lines of Defense Management

Konsep *three lines of defense* mencakup masing-masing satuan kerja sebagai *first line of defense*, fungsi manajemen risiko sebagai *second line of defense*, fungsi internal audit sebagai *third line of defense*. Konsep ini digunakan sebagai acuan yang efektif melalui komunikasi dan koordinasi manajemen risiko serta pengendalian intern berdasarkan kejelasan tugas dan kewenangan fungsi-fungsi organisasi.

The three lines of defense concept covers each Department as the first line of defense, the risk management function as the second line of defense, internal audit function as the third line of defense. This concept is used as effective benchmark through communication and coordination of risk management as well as internal control based on the clarity of task and authority of each organizational function.



Risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kebijakan

Risiko kebijakan terkait erat dengan karakteristik nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang relatif sensitif dipengaruhi faktor eksternal Indonesia seperti keuangan global, kondisi geopolitik domestik, dan faktor sentimen pasar lainnya. Selain itu, risiko kebijakan juga dapat muncul akibat inkonsistensi antar kebijakan secara lintas otoritas. Upaya mengendalikan risiko dalam rangka menciptakan stabilitas nilai tukar Rupiah antara lain dilakukan dengan koordinasi antar otoritas, pengaturan transaksi devisa hasil ekspor, dan pengaturan valuta asing.

2. Risiko Keuangan

Risiko keuangan dapat bersumber dari beberapa hal, yaitu:

- a. Risiko pasar, timbul sebagai akibat dari pelemahan beberapa mata uang utama dunia yang memengaruhi kinerja portofolio Surat-Surat Berharga (SSB) yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Selain itu, volatilitas suku bunga akibat perubahan indikator ekonomi mempengaruhi nilai portofolio. Mitigasi terhadap risiko pasar dilakukan antara lain dengan penetapan strategi yang diadakan dalam Forum Investasi secara periodik.
- b. Risiko kredit, bersumber dari menurunnya kemampuan penerbit SSB untuk memenuhi kewajibannya dan/atau menurunnya kinerja keuangan *counterparty* transaksi valas berpotensi kemungkinan gagal bayar. Pengendalian yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah penetapan kriteria *issuer* SSB dalam *investment grade*, dan pemantauan terhadap *credit rating counterparty* secara ketat.
- c. Risiko likuiditas, terkait dengan *mismatch* pemenuhan kebutuhan valuta asing dalam jumlah cukup besar secara tiba-tiba dalam rangka pelaksanaan operasi moneter. Pengendalian yang dilakukan dengan mencadangkan likuiditas dalam jumlah yang cukup dalam upaya mencapai stabilitas nilai Rupiah.

Bank Indonesia faces risks as follows:

1. Policy Risk

Policy Risk is strongly related with the characteristic of Rupiah exchange rate against foreign currency that is relatively sensitive affected by external factors such as global finance, domestic geopolitics, and other market sentiments. Inconsistencies between cross-authorities policies can also trigger policy risk. Coordination within authorities, regulating export proceeds transactions, and regulating foreign exchange are some of the efforts taken to stabilize the Rupiah exchange rate.

2. Financial Risk

Financial risks may emerged because of following reasons:

- a. *Market risk, emerged as an impact of the depreciation of several world's main currencies which affects securities (SSB) performance owned by Bank Indonesia. Interest volatility due to the change of economic indicators also affects the value of portfolios. Market risk mitigations are made including by determination of strategies decided on Investment Forum periodically.*
- b. *Credit risk, caused by the declining ability of securities issuers to meet their duties and/or the declining counterparties' foreign exchange financial performance that potentially creates default. Bank Indonesia controls the risk by determining the requirement of SSB issuers in investment grade, and tightly supervising counterparty's credit rating.*
- c. *Liquidity risk, in regard to the mismatch on an immediate abundant foreign exchange demand in monetary operation activities. The effort to control this is by creating ample reserve liquidity to stabilizing the Rupiah.*

3. Risiko Non-Kuangan

Risiko non-keuangan meliputi risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko hukum.

a. Risiko Operasional

Gangguan pada sistem pembayaran informasi, listrik, dan telekomunikasi dalam kegiatan sistem pembayaran (kliring dan *Real Time Gross Settlement*) berpotensi menyebabkan keterlambatan penyelesaian sistem pembayaran. Mitigasi yang dilakukan dengan penyediaan *backup* terhadap sistem serta tersedianya genset dapat meminimalisir keterlambatan pembayaran. Selain itu, dalam menjaga sistem pembayaran agar berjalan lancar, secara periodik dilakukan pelatihan pemulihan tugas setelah di *Disaster Recovery Centre* yang berbeda tempat dengan pusat data.

Dalam penanganan bencana terkait dengan kabut asap yang terjadi selama dua bulan di pulau Sumatera dan Kalimantan, kegiatan operasional Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah tersebut tetap beroperasi untuk mendukung kelancaran roda perekonomian daerah. Pengendalian yang telah dilakukan dengan memberi dispensasi sementara bagi pegawai dan keluarga yang mengalami ISPA untuk mengungsi ke daerah yang tidak kena bencana.

b. Risiko Hukum

Di dalam setiap kebijakan, suatu ketentuan yang akan dikeluarkan selalu memerhatikan kemungkinan adanya risiko hukum. Dalam memitigasi hal tersebut, analisis dan rekomendasi yang akan dikeluarkan selalu dikawal ketat oleh analis hukum di Bank Indonesia maupun dengan pakar hukum eksternal.

c. Risiko Reputasi

Pemberitaan negatif terhadap Bank Indonesia dapat muncul akibat masyarakat tidak mendapat informasi secara utuh mengenai kebijakan yang telah ditempuh Bank Indonesia. Persepsi yang tidak tepat tersebut dapat menurunkan kredibilitas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Upaya membangun kredibilitas dilakukan melalui sosialisasi kepada *stakeholders* secara berkelanjutan.

3. Non-Financial Risk

Non-financial risk includes operational risk, reputation risk, and legal risk.

a. Operational Risk

The disturbance on information, electricity, and telecommunication payment system (clearing and Real Time Gross Settlement) potentially delays the payment system settlement. Providing electricity generator and making backup system can mitigate the risk. In addition, periodical training on settlement duties recovery is conducted in Disaster Recovery Center, which is in different location with data center, to maintain smooth payment settlement.

In handling disaster related to haze which happened for two months in Sumatera and Kalimantan islands, Bank Indonesia's Representative Office in Sumatera and Kalimantan remained operating to support local economic activities. Bank Indonesia gave temporary dispensation for employees and families who had respiratory infection to evacuate to the nearest areas not affected by haze.

b. Legal Risk

In every policy, a regulation issued always pays attention to potential legal risk. In mitigating such thing, analysis and recommendation issued will be tightly supervised by legal analysts in Bank Indonesia or external legal experts.

c. Reputation Risk

Negative publication on Bank Indonesia may emerge because the public does not receive complete information on policies performed by Bank Indonesia. Incorrect perception may disturb the credibility of Bank Indonesia as monetary authority. Sustainable socialization to stakeholders is conducted to increase credibility.

4. Analisis Risiko: Aset

Dalam mengelola aset, Bank Indonesia mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola portofolio cadangan devisa. Tiga prinsip utama yang dianut adalah *security liquidity*, dan *profitability*. Di samping itu dengan penerapan Strategic Asset Allocation, diharapkan dapat mengoptimalkan strategi pengelolaan cadangan devisa sekaligus memantau risiko agar tetap terkendali.

5. Analisis Risiko: Kewajiban (Liabilities)

Ekses likuiditas Rupiah di pasar dikhawatirkan memberikan gangguan stabilitas Rupiah di pasar uang dan valas. Dari sisi liabilitas, mitigasi risiko dilakukan dengan menyerap likuiditas melalui instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT) berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk tenor panjang. Selain itu, instrumen lainnya adalah penyerapan melalui Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) pada tenor menengah untuk bank domestik. Sementara, penyerapan likuiditas jangka pendek diserap melalui *Reverse Repo* SBN.

6. Analisis Risiko: Modal

Volatilitas nilai Rupiah terhadap mata uang USD berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan surplus atau defisit yang akan berdampak kepada modal Bank Indonesia. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah secara optimal untuk memperkuat ketahanan pasar domestik agar mampu meredam gejolak pasar (*market shock*). Ketahanan pasar tersebut menjadi salah satu prasyarat agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Dewan Gubernur selalu menekankan agar analisa risiko dipertimbangkan di dalam setiap pengambilan keputusan untuk mencapai sasaran strategis yang telah dicanangkan pada awal tahun.

Audit Internal

Sebagai salah satu elemen tata kelola bank sentral yang baik, Bank Indonesia melaksanakan fungsi audit internal terhadap seluruh proses kerja di Bank Indonesia. Ruang lingkup fungsi audit internal meliputi pelaksanaan audit internal dan konsultasi melalui pemberian

4. Risk Analysis: Asset

In asset management, Bank Indonesia prioritizes prudential principles in managing forex reserves portfolio. Three main principles adopted are security, liquidity, and profitability. In addition, Strategic Asset Allocation is implemented to optimize forex reserves management strategy as well as monitoring risks to remain under control.

5. Risk Analysis: Liabilities

Rupiah excess liquidity in the market is concerned to disturb Rupiah stability in the money and foreign exchange markets. From liabilities, risk mitigation is made by absorbing liquidity through Open Market Operation (OMO) in form of long-term Bank Indonesia Certificate (SBI). In addition, another instrument is the absorption through medium-tenor Bank Indonesia Deposit Certificate (SDBI) for domestic banks. Meanwhile, short-term liquidity is absorbed through Reverse Repo of government bonds.

6. Risk Analysis: Capital

The Rupiah volatility against USD impacts significantly to the surplus or deficit report which will affect Bank Indonesia's capital as the monetary authority. As the monetary authority, Bank Indonesia maintains the Rupiah exchange rate stability optimally to strengthen the domestic market resilience to absorb market shock. The market resilience is one of the preconditions for Indonesia's economy to grow sustainably.

The Board of Governors continuously emphasizes that risk analysis is considered in every decision making to achieve the strategic goals determined in the beginning of the year.

Internal Audit

As one of the elements on central bank's good governance, Bank Indonesia implements internal audit to the entire working process in Bank Indonesia. The scope of internal audit includes internal audit implementation and consultation

opini dan rekomendasi terhadap proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Keberadaan fungsi audit internal adalah untuk memberikan keyakinan bahwa proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian mampu mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia. Proses ini dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta taat pada ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi audit internal Bank Indonesia menggunakan metodologi audit internal berbasis risiko (*Risk Based Internal Audit/ RBIA*). Semakin tinggi risiko sasaran audit, maka semakin tinggi frekuensi pelaksanaan audit internal. Proses kerja yang berisiko tinggi diaudit setiap tahun, sedangkan proses kerja dengan risiko sedang dan rendah diaudit dalam rentang waktu yang lebih panjang, yakni sekali dalam 2 atau 3 tahun. Metode audit RBIA secara berkala disesuaikan dengan perkembangan konsepsi dan praktik terbaik di lapangan.

Bank Indonesia melakukan pemantauan dan mendorong satuan kerja untuk menyelesaikan tindak lanjut atas temuan audit internal secara berkala sehingga keseluruhan temuan audit pada 2015 berhasil diselesaikan pada akhir Desember 2015. Penyelesaian temuan audit secara komprehensif memberikan keyakinan bahwa tata kelola dan pengendalian di Bank Indonesia berjalan efektif untuk mengendalikan risiko.

Dalam menunjang pelaksanaan audit, Bank Indonesia melakukan konsultasi sistem pengendalian internal. Konsultasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses kerja berlandaskan pada tata kelola yang baik. Kegiatan konsultasi mencakup pemberian rekomendasi dalam penyusunan dan implementasi ketentuan, serta tindak lanjut hasil audit internal dan maupun eksternal.

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran dan meningkatkan kualitas kegiatan audit serta kegiatan konsultasi, Bank Indonesia mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi auditor internal, melalui sertifikasi nasional dan internasional. Di sisi lain, untuk meningkatkan kualitas dan mutu hasil audit, sejak 2002 Bank Indonesia menerapkan ISO 9001:2000 yang diperbarui menjadi ISO 9001:2008.

through recommendation and opinion on the governance process, risk management, and control. The existence of internal audit is to give assurance that governance process, risk management, and control can support to achieve Bank Indonesia's goals. The process is conducted effectively and efficiently, in accordance with prevailing regulations.

Bank Indonesia uses the Risk Based Internal Audit (RBIA) methodology to implement Bank Indonesia's internal audit function. The higher the risk of audit target, the higher the frequency of internal audit implementation. High risk working process is audited annually, while medium and low-risk working process is audited once in 2 or 3 years. The RBIA audit method is adjusted regularly with the best practice and concept development in the field.

Bank Indonesia observed and supported Departments to finalize the follow-up on the findings of internal audit regularly so that all audit findings in 2015 could be settled by the end of December 2015. Comprehensive settlement of audit findings assures that governance and control process in Bank Indonesia are implemented effectively to control risks.

To support audit implementation, Bank Indonesia conducts consultation on internal control system. The consultation aims to improve the quality of working process in accordance with good governance. Consultation activities include giving recommendation on the preparation and implementation of regulations, as well as follow-up on results of both internal and external audit.

Meanwhile, to support the smoothness and improve the quality of audit activities as well as consultation activities, Bank Indonesia develops human resources by increasing the competence of internal auditor proved through national and international certifications. On the other hand, since 2002 Bank Indonesia has implemented ISO 9001:2000, updated to ISO 9001:2008, to improve audit quality.

Penyempurnaan fungsi audit internal dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan *roadmap* pengembangan 2014-2018. Pengembangan audit internal mencakup aspek sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, serta database dan Sistem Informasi Audit Internal (SIAI). Tujuan pengembangan diarahkan untuk memperkuat keberadaan, peran, dan fungsi audit internal di Bank Indonesia.

Untuk menjaga kualitas pelaksanaan fungsi audit internal, satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit di evaluasi setiap semester oleh unit *Quality Assurance internal*, dan selambat-lambatnya setiap lima tahun dievaluasi oleh asesor eksternal profesional.

Pelaporan dan Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang tentang Bank Indonesia menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang, dan anggaran Bank Indonesia. Mekanisme akuntabilitas dan transparansi tersebut diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi baik kepada DPR-RI, Pemerintah, maupun dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, Bank Indonesia menyampaikan laporan pada setiap awal tahun mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan pada tahun sebelumnya, serta penetapan sasaran dan rencana kebijakan/ pelaksanaan tugas untuk tahun yang akan datang. Laporan tersebut disampaikan secara tertulis kepada DPR-RI, Pemerintah, media massa, pengamat, akademisi, serta dipublikasikan kepada masyarakat luas secara terbuka dalam *website* dan media massa. Ringkasan laporan tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dan media massa.

Demi tercapainya transparansi di bidang anggaran, Bank Indonesia menyampaikan anggaran operasional untuk tahun yang akan datang kepada DPR-RI guna memperoleh persetujuan. Penyampaian laporan tersebut dilengkapi dengan anggaran kebijakan untuk tahun yang akan datang dan disertai pula dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dicerminkan pula dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) yang

The improvement of internal audit function is carried on continuously in accordance with the 2014-2018 development roadmap. Internal audit development covers human resources, policy and procedures, organization structures, as well as database and Internal Audit Information System (SIAI). The development is aimed to strengthen the existence, role, and function of internal audit in Bank Indonesia.

To maintain the quality of internal audit function, Departments responsible for internal audit is evaluated every semester by the Quality Assurance Internal unit, and evaluated by professional external assessor every five years at the latest.

Report and Public Information Disclosure

The Law on Bank Indonesia demands accountability and transparency in every implementation of duties, authorities, and budgets of Bank Indonesia. The mechanism of accountability and transparency is delivered by presenting information to the House of Representatives, Government, or published widely to the public.

In terms of task implementation and authorities, Bank Indonesia submits report in every beginning of the year on the evaluation of policy implementation in the previous year, as well as target setting and policy plan/task implementation for the incoming year. The report is submitted in written form to the House of Representatives, Government, mass media, observers, academics, as well as published to the public in the website and mass media. The summary of the report is published on National News of Republic of Indonesia and mass media.

In terms of budget transparency, Bank Indonesia delivers operational budget for the incoming year to the House of Representatives for approval. The report is completed with policy budget for the incoming year and accompanied by the evaluation of budget spending for the current year.

Accountability in budget management is reflected in the preparation of Bank Indonesia's Annual Financial Report (LKTBI), which is

disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil audit BPK-RI tersebut disampaikan kepada DPR-RI dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa. Adapun dalam penyusunan dan pemeriksaan LKTBI, Bank Indonesia dan BPK-RI mengacu pada standar akuntansi bank sentral sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Akuntansi dan Keuangan Bank Indonesia (KAKBI). Untuk menjaga akuntabilitas dalam perumusannya, KAKBI melibatkan pula pihak eksternal yang berkompeten di bidang akuntansi dan keuangan. Transparansi anggaran Bank Indonesia kepada publik juga diwujudkan dalam bentuk pengumuman neraca singkat mingguan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan media massa.

Selain penyampaian laporan sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang, sebagai bagian dari transparansi Bank Indonesia secara berkala juga menerbitkan berbagai publikasi seperti Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter, Laporan Kebijakan Moneter, dan Laporan Tahunan Bank Indonesia.

Secara umum, seluruh publikasi yang dihasilkan oleh Bank Indonesia tersebut harus menyajikan data dan informasi yang relevan, akurat, andal, dan tepat waktu. Selain itu, publikasi data dan statistik disusun dengan mengacu pada standar yang berlaku bagi bank sentral seperti *Special Data Dissemination Standard (SDDS)* yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF).

Sejalan dengan era keterbukaan informasi, Bank Indonesia menerapkan transparansi informasi, kebijakan, dan peraturan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Penyampaian informasi dilakukan secara terbuka, tepat waktu, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, penyampaian kebijakan dan pengaturan dilengkapi dengan latar belakang, dan sasaran kebijakan/ketentuan. Pemahaman yang baik oleh pemangku kepentingan merupakan faktor penting yang mendukung efektivitas implementasi kebijakan/ketentuan Bank Indonesia.

Guna memenuhi aspek transparansi, Bank Indonesia menginformasikan berbagai aspek mengenai pelaksanaan tugas dan kebijakannya secara langsung kepada masyarakat antara lain

delivered to the Supreme Audit Agency (BPK-RI) for auditing. The BPK-RI result will be submitted to the House of Representatives and announced publicly through mass media. In the formulation and assessment of LKTBI, Bank Indonesia and BPK-RI refer to the central bank accounting standards as recommended by the Financial and Accounting Committee of Bank Indonesia (KAKBI). To maintain accountability in the formulation, KAKBI involves external parties who are competent in accounting and finance. The transparency of Bank Indonesia's budget to the public is announced in form of condensed weekly balance sheet in the National News of Republic of Indonesia and mass media.

Other than submitting reports as mandated by the law, Bank Indonesia also regularly publishes various publications such as the Indonesian Financial Economy Statistics, Monetary Policy Review, Monetary Policy Report, and Bank Indonesia Annual Report as part of transparency.

Generally, all publications produced by Bank Indonesia should provide relevant, accurate, reliable and updated data and information. In addition, data and statistical publications are prepared based of prevailing standard for central banks such as the Special Data Dissemination Standard (SDDS) issued by the International Monetary Fund (IMF).

In line with the information disclosure era, Bank Indonesia implements information transparency, policy, and regulation related to public interest. Information dissemination is conducted publicly, punctually, accessibly, and understandably to stakeholders. To improve public understanding, the submission of policy and regulatory is completed with background and policy/condition target. Knowledgeable stakeholders are important factor that supports the effective implementation of Bank Indonesia's policy/regulation.

In order to fulfill transparency aspect, Bank Indonesia informs various aspects on task and policy implementation directly to the public, among others are through publication of data,

melalui publikasi data, informasi, dan laporan di *website* Bank Indonesia. Termasuk yang dipublikasikan kepada masyarakat adalah laporan pelaksanaan tugas Bank Indonesia, hasil Rapat Dewan Gubernur mengenai *stance* kebijakan Bank Indonesia, dan berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia.

information, and report in Bank Indonesia's website. Some of the publications are report on task implementation of Bank Indonesia, Board of Governors meeting result on Bank Indonesia's policy stance, and various policies taken by Bank Indonesia.

HASIL TATA KELOLA BANK INDONESIA

BANK INDONESIA GOVERNANCE OUTCOME

Manifestasi akhir dari pelaksanaan program penguatan *governance* Bank Indonesia adalah terciptanya kredibilitas lembaga yang menunjang efektivitas kebijakan yang dikeluarkan. Pencapaian kredibilitas Bank Indonesia tercermin dari kepercayaan dan persepsi pemangku kepentingan Bank Indonesia terhadap pencapaian tujuan dan target kinerja Bank Indonesia (*performance*), melalui pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang dilandasi prinsip tata kelola, pemenuhan standar praktik (*conformance*), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (*compliance*).

Final manifestation of Bank Indonesia's governance strengthening program implementation is the establishment of institution's credibility that bolsters the effectiveness of policies issued. The accomplishment of Bank Indonesia's credibility is reflected by the trust and perception of Bank Indonesia stakeholders towards the achievement of Bank Indonesia's performance target and objective, through Bank Indonesia's task implementation based on governance, conformance, and compliance to regulations.

Kemampuan Bank Indonesia dalam mencapai sasarannya secara konsisten melalui pelaksanaan tugas yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola menunjang kredibilitas Bank Indonesia. Pencapaian kredibilitas ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terutama pada saat menghadapi krisis ekonomi dan keuangan di mana kepercayaan merupakan modal dasar utama guna mengimplementasikan kebijakan yang efektif.

Bank Indonesia's capability in achieving its target consistently through task implementation that is in line with governance principles supports Bank Indonesia's credibility. The accomplishment in credibility is very important to maintain public trust particularly during financial and economic crisis where trust is the basic capital to implement effective policies.

Untuk mengevaluasi penerapan tata kelola di Bank Indonesia dan sebagai upaya perbaikan ke depan, Bank Indonesia secara berkala melakukan survei tingkat keyakinan *stakeholders* terhadap implementasi *governance* Bank Indonesia. Dalam hal ini, survei dilakukan oleh pihak eksternal guna menjaga objektivitas dan memperoleh hasil yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Survei dilaksanakan dua kali dalam setahun yakni pada setiap akhir semester. Adapun responden survei mencakup seluruh pemangku kepentingan Bank Indonesia yakni anggota parlemen, lembaga negara, pemerintah, pengamat, akademisi, kalangan pengusaha, kalangan perbankan, jurnalis, dan masyarakat

To evaluate governance implementation in Bank Indonesia and as part of improvement going forward, Bank Indonesia regularly conducts surveys on the confidence level of stakeholders towards Bank Indonesia's governance implementation. In this case, survey was performed by external parties to maintain objectivity and get independent and result. Survey was made twice a year at the end of every semester. Survey respondents consist of all Bank Indonesia stakeholders, including members of parliament, state institutions, government, observers, academicians, business people, bankers, journalists, and the general public. Based on the 2015 survey result, stakeholders confidence in the governance

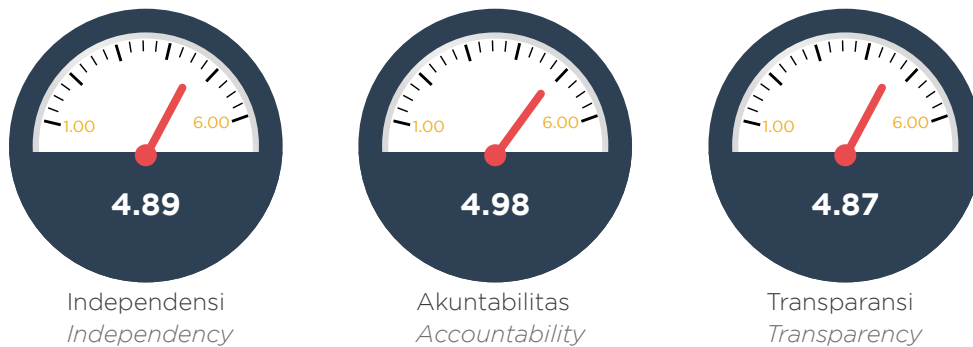
umum. Berdasarkan hasil survei tahun 2015, keyakinan *stakeholders* terhadap implementasi *governance* di Bank Indonesia dalam aspek akuntabilitas mencapai 4,98 dari skala 1-6, sedangkan untuk aspek independensi dan aspek transparansi masing-masing mencapai 4,89 dan 4,87 dari skala 1-6.

Ke depannya, untuk meningkatkan kualitas tata kelola di Bank Indonesia, evaluasi yang dilaksanakan tidak hanya melalui survei tingkat keyakinan, namun juga akan dilakukan asesmen implementasi *governance* di Bank Indonesia oleh pihak eksternal. Dengan adanya asesmen ini diharapkan akan menghasilkan hasil evaluasi yang komprehensif dan mendalam atas setiap penerapan elemen-elemen tata kelola di Bank Indonesia.

implementation in Bank Indonesia in accountability aspect reach 4.98 from the scale of 1-6, while for independency aspect and transparency aspect respectively reached 4.89 and 4.87 from the scale of 1-6.

Going forward, to increase the quality of governance in Bank Indonesia, evaluation is not only performed through confidence survey, but also through the assessment of governance implementation in Bank Indonesia by external parties. The assessment is expected to create a comprehensive and deep evaluation result in the implementation of governance elements in Bank Indonesia.

Gambar 9. Tingkat Keyakinan Masyarakat terhadap Aspek Tata Kelola Bank Indonesia (skala 1-6)
Picture 9. Level of People Trust to Governance Aspect at Bank Indonesia (scale 1-6)



KOMUNIKASI BANK INDONESIA KEPADA PUBLIK

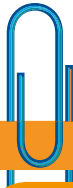
Komunikasi dan Edukasi Publik

Pelaksanaan komunikasi Bank Indonesia diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Bank Indonesia sebagai lembaga yang kredibel dan terbaik di regional. Karenanya, Bank Indonesia memfokuskan strategi komunikasinya pada produk kebijakan yang selaras dengan ekspektasi dan kebutuhan publik. Diharapkan kebijakan komunikasi tersebut dapat membentuk ekspektasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia. Ekspektasi masyarakat yang baik tercermin dari pencapaian inflasi yang terjaga, serta mampu menjaga persepsi pelaku pasar terhadap kondisi fundamental ekonomi dan sistem keuangan Indonesia.

BANK INDONESIA'S PUBLIC COMMUNICATION

Public Communication and Education

The implementation of Bank Indonesia's communication is directed to support the accomplishment of Bank Indonesia's vision as the credible and best institution at regional level. Therefore, Bank Indonesia focuses its communication strategy on policy products that are in line with public expectation and needs. The communication policy is expected to anchor public expectation in line with policy direction of Bank Indonesia. Good public expectation is shown from manageable inflation, as well as able to maintain market perception towards Indonesian economic fundamentals and financial system.



BI Goes to Campus

Untuk mendekatkan Bank Indonesia dengan kalangan Mahasiswa, diselenggarakan BI Goes to Campus. Selama 2015 kegiatan BI Goes to Campus dilakukan di beberapa tempat yaitu:

- Universitas Palangka Raya, dengan materi peredaran uang palsu, moneter, dan menjaga stabilitas keuangan sebagai tugas Bank Indonesia.
- Universitas Indonesia, dengan materi peran BI dalam perekonomian Indonesia.
- Universitas Mataram dengan topik "Bagaimana Dunia Usaha Menyikapi Situasi Perekonomian Indonesia."
- Universitas Diponegoro (Undip) dengan topik "Optimisme Dunia Usaha Dalam Menghadapi Tantangan Global."

BI Goes to Campus

To be closer with Students, Bank Indonesia held the BI Goes to Campus. In 2015 BI Goes to Campus activities were done in several places:

- Universitas Palangka Raya, with topics of counterfeit money distribution, monetary, and maintaining financial stability as Bank Indonesia's task.
- Universitas Indonesia, with topic of BI's role in the Indonesian economy.
- Universitas Mataram with topic "How Businesses Address Indonesian Economic Situations."
- Universitas Diponegoro (Undip) with topic "Optimism of Businesses in Facing Global Challenges."

Bank Indonesia melakukan komunikasi dengan publik melalui berbagai saluran media, baik konvensional maupun digital. Melalui media konvensional, Bank Indonesia senantiasa melakukan komunikasi dengan saluran media yang sesuai dengan target *stakeholders* Bank Indonesia, baik melalui iklan, infografis, *talkshow*, dan wawancara. Bank Indonesia sangat aktif melakukan diseminasi informasi melalui iklan terutama melalui televisi, agar dapat menjangkau *stakeholders* secara luas dalam berbagai lapisan masyarakat, misalnya untuk diseminasi kebijakan penggunaan uang Rupiah dan ciri-ciri keaslian uang Rupiah. Selain itu, komunikasi dengan kalangan media massa juga terus dilakukan baik dalam rangka publikasi kebijakan maupun edukasi, melalui konferensi pers, *media briefing*, dan pelatihan wartawan secara berkala.

Untuk media digital (*online*), *website* Bank Indonesia terus dikembangkan dari segi konten, desain, dan tampilan untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pemangku kepentingan. Selain *website*, penggunaan media sosial juga terus dioptimalkan sesuai perkembangan sarana komunikasi yang digunakan. Sejak 2011, Bank Indonesia telah aktif berkomunikasi melalui akun Twitter @bank_indonesia, diikuti dengan Flipboard dan Flickr (2013) dan YouTube (2014). Selain ketiga media sosial tersebut, BI melebarkan jangkauannya kepada publik dengan meluncurkan Facebook Page Bank Indonesia pada September 2015, dan Instagram yang baru saja diluncurkan pada November 2015.

Selain itu, agar lebih dekat dengan masyarakat umum Bank Indonesia juga menyelenggarakan berbagai program seperti kunjungan masyarakat ke Bank Indonesia, *BI Goes to Campus*, *Car Free Day*, *Expo*, dan program edukasi lainnya.

Bank Indonesia communicates with the public through various media channel, both digital and conventional. Through conventional media, Bank Indonesia always conducts communication with media channel appropriate for Bank Indonesia's stakeholder target, either through advertisement, infographic, talkshow, and interview. Bank Indonesia actively disseminates information through advertisement especially television in order to outreach stakeholders in various levels of society, such as the dissemination of Rupiah use policy and Rupiah real characteristics. Communication with mass media is also continuously conducted for policy publication or education, through press conference, media briefing, and regular training to reporters.

For digital media (online), Bank Indonesia continuously develop its website from content, design, and appearance to fulfill the information needs of all stakeholders. Besides website, Bank Indonesia also optimizes the use of social media in line with the development of communication platform used. Since 2011, Bank Indonesia has been actively communicating through Twitter account @bank_indonesia, followed by Flipboard and Flickr (2013) and YouTube (2014). BI also spread its reach to the public by launching Bank Indonesia Facebook Page in September 2015, and Instagram in November 2015.

In addition, Bank Indonesia also conducts various programs such as public visit to Bank Indonesia, BI Goes to Campus, Car Free Day, Expo, and other educational programs to get closer to the public.

Infografis 10. Perkembangan Media Sosial Bank Indonesia Infographic 10. Development of Bank Indonesia Social Media Accounts

1. Akun Facebook Page Bank Indonesia diluncurkan pada 1 September 2015. *Facebook Page Bank Indonesia was launched in 1 September 2015.*

facebook.



Likers Facebook Bank Indonesia sampai dengan saat ini telah mencapai 20.561. *Likers Facebook Bank Indonesia now reached 20,561.*



Facebook Page Bank Indonesia telah memposting artikel, gambar dan status sebanyak 303. *Facebook Page of Bank Indonesia has posted 303 articles, pictures and status.*

2. Akun Instagram Bank_Indonesia diluncurkan pada November 2015. *Instagram account Bank_Indonesia was launched in November 2015.*



Followers Instagram Bank Indonesia sampai dengan saat ini telah mencapai 801. *Followers of Instagram Bank Indonesia now reached 801.*

Instagram



Instagram Bank Indonesia sampai saat ini telah memposting foto sebanyak 19. *Instagram Bank Indonesia has posted 19 photos.*

3. Akun Twitter Bank Indonesia telah terverifikasi pada 24 Desember 2015. *Bank Indonesia Twitter account has been verified on 24 December 2015.*



Followers Twitter @Bank_Indonesia sampai dengan saat ini telah mencapai 273.197. *Followers of Twitter @Bank_Indonesia now reached 273,197.*



Twitter @Bank_Indonesia sampai saat ini telah memposting tweet sebanyak 5.149. *Twitter @Bank_Indonesia has posted 5.149 tweets.*



Flickr Bank Indonesia sampai saat ini telah memposting foto sebanyak 133. *Flickr Bank Indonesia now has posted 133 photos.*



Flipboard BANK INDONESIA telah memposting artikel sebanyak 583. *Flipboard of BANK INDONESIA has posted 583 articles.*

YouTube

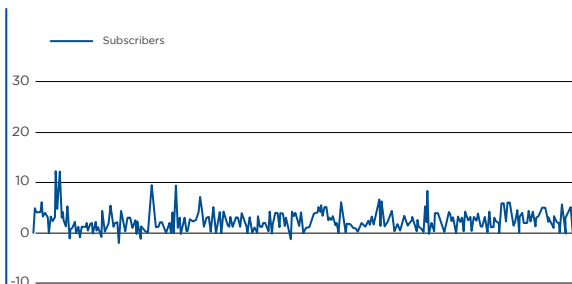


Subscribers Youtube Bank Indonesia Channel sampai dengan saat ini telah mencapai 1.308 akun. *Subscribers of YouTube Bank Indonesia Channel now reached 1,308 accounts.*



Youtube Bank Indonesia Channel sampai saat ini telah memposting video sebanyak 163. *YouTube Bank Indonesia Channel has posted 163 videos.*

Video	Watch time (minutes)	Views	Likes
Iklan Layanan Masyarakat Uang Elektronik <i>Public Service Announcements of Electronic Money</i>	84.615 (27%)	171.813 (71%)	15
Sejarah Uang dan Sejarah Bank Sentral <i>Money History and Central Bank History</i>	70.922 (23%)	18.159 (7,5%)	51
Mengenal Kebijakan Moneter Bank Indonesia <i>Knowing Bank Indonesia Monetary Policy</i>	27.892 (9,0%)	11.595 (4,8%)	83
Berkarir di Bank Indonesia <i>Career in Bank Indonesia</i>	22.638 (7,3%)	7.812 (3,2%)	103
Hasil Rapat Dewan Gubernur BI-Rate November <i>Result of Board of Governors Meeting BI-Rate November</i>	18.745 (6,1%)	1.097 (0,5%)	14
Film Edukasi - Uang Elektronik <i>Educational Film - Electronic Money</i>	10.407 (3,4%)	2.506 (1,0%)	9
Video Edukasi Sistem Pembayaran <i>Payment System Educational Video</i>	5.285 (1,7%)	2.067 (0,9%)	7
Penjelasan BI mengenai Ekonomi Terkini & Nilai <i>BI Explanation on Latest Economy & Value</i>	4.919 (1,6%)	1.484 (0,6%)	12
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) <i>Non Cash National Movement</i>	3.791 (1,2%)	1.840 (0,8%)	12
Layanan Keuangan Digital <i>Digital Money Service</i>	3.554 (1,2%)	1.511 (0,6%)	5



Pada saat dilakukan *live streaming* terhadap BI Rate 17 November 2015 lalu *subscriber* harian BI melonjak dari rata-rata 3 *subscriber* menjadi 20 *subscriber*. *During live streaming on BI Rate 17 November 2015 the daily subscriber of BI rose from 3 subscribers in average to 20 subscribers.*

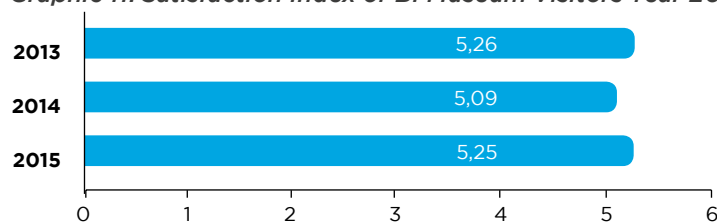
Bank Indonesia juga melakukan edukasi kebanksentralan bagi masyarakat umum melalui Museum Bank Indonesia (MBI) seiring dengan perannya sebagai penyedia informasi kebanksentralan. Dalam ajang Museum Awards 2014, MBI meraih penghargaan sebagai Museum Terbaik kategori Museum Pemerintah di DKI Jakarta dan Museum Pemerintah Terbaik kategori Museum Pintar (*Smart Museum*). Sebelumnya, MBI termasuk 10 museum favorit wisatawan versi Trip Advisor pada tahun 2013 dan museum terbaik di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012. Pada tahun 2014, MBI juga meraih sertifikat ISO 9001:2008 dalam Pelayanan Museum.

Bank Indonesia also conducts central banking education to the general public through Bank Indonesia Museum (MBI) due to its role as the provider of central banking information. In the Museum Awards 2014, MBI was awarded as the Best Museum in the category of Government Museum in Jakarta and the Best Government Museum in Smart Museum category. Previously, MBI was among 10 favorite tourist museums according to Trip Advisor in 2013 and the best museum in Jakarta in 2012. In 2014, MBI also got ISO 9001:2008 certificates on Museum Service.

Tabel 7. Pencapaian Museum Bank Indonesia Tahun 2014-2015
Table 7. Achievements of Bank Indonesia Museum Year 2014-2015

No.	Keterangan Description	Tahun Year
1	Museum Pintar (<i>Smart Museum</i>) dan Museum Pemerintah terbaik DKI Jakarta <i>Smart Museum and best Government Museum DKI Jakarta</i>	2014
2	Menjadi salah satu Museum terbaik dari 10 Museum terbaik di Indonesia versi Travellers Choice, Trip Advisor <i>Becoming one of best of 10 best Museums in Indonesia from Travellers Choice, Trip Advisor</i>	2014
3	Meraih sertifikat ISO 9001:2008 Pelayanan Museum BI <i>Achieving certificate ISO 9001:2008 BI Museum Service</i>	2014
4	Mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 Pelayanan Museum BI <i>Maintaining certificate ISO 9001:2008 BI Museum Certificate</i>	2015
5	Meraih sertifikat ISO 9001:2008 Pengelolaan Koleksi <i>Achieving certificate ISO 9001:2008 Collection Management</i>	2015

Grafik 11. Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Bank Indonesia Tahun 2013 s/d 2015 (skala 1-6)
Graphic 11. Satisfaction Index of BI Museum Visitors Year 2013-2015 (scale 1-6)



Tabel 8. Rekapitulasi Pengunjung Museum Bank Indonesia Periode Januari-Desember 2015
Table 8. Recapitulation of Bank Indonesia Museum Visitors Period of January-December 2015

Bulan Month	Umum General						Total Pengunjung Total Visitors
	BI	Institusi Institution	Pelajar Student	Mahasiswa College Student	Umum/ komunitas General/ Community	Mancanegara Foreigner	
Umum General	13	227	65.612	29.709	130.276	4.191	230.028
Kelompok Group	1.103	896	33.753	3.153	721	251	39.877
Total Seluruh Pengunjung Total Visitors							269.905

Layanan Informasi Publik

Seiring dengan perkembangan teknologi dan media digital, Bank Indonesia beradaptasi dengan terus mengoptimalkan penyebaran informasi melalui *website* dan media sosial sebagai saluran komunikasi untuk menjangkau komunikasi kebijakan BI kepada masyarakat seluas mungkin.

Keberadaan *contact center* Bank Indonesia (BICARA 131) mendapat respons yang semakin tinggi dari publik. Selama triwulan IV-2015, tercatat sebanyak 24.956 pemohon informasi yang masuk, baik melalui media telepon, email, datang langsung, surat, fax, media sosial maupun media lainnya. Mayoritas pertanyaan yang diajukan adalah seputar IDI historis (*BI checking*) serta permohonan informasi seputar Peraturan Bank Indonesia (PBI). Kelompok *stakeholders* yang dominan menghubungi BICARA 131 adalah perbankan serta masyarakat umum.

Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction Index - CSI*), sebanyak 98,21% pemohon informasi menyatakan puas akan pelayanan BICARA 131. Hal tersebut merupakan sebuah prestasi sekaligus tantangan BICARA 131 ke depan untuk selalu meningkatkan kepuasan pelayanan kepada *stakeholder*.

Public Information Service

In line with technology and digital media development, Bank Indonesia adapts by optimizing information dissemination through website and social media as communication channel to deliver BI's policy to the public as wide as possible.

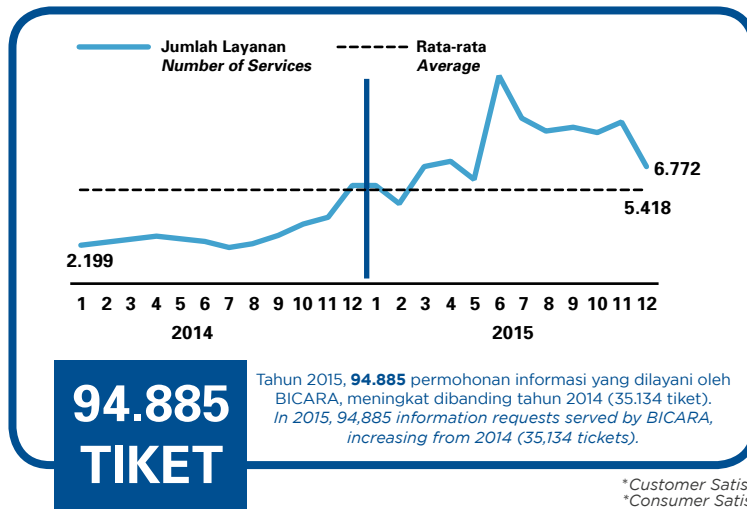
The existence of Bank Indonesia's contact center (BICARA 131) gains higher responses from the public. There were 24,956 information requests from telephone, email, direct visit, letter, fax, social media, and other media throughout the fourth quarter of 2015. Most of the questions were about BI checking as well as information request on Bank Indonesia Regulation (PBI). The most dominant stakeholders contacting BICARA 131 were banking and general public.

According to the Customer Satisfaction Index (CSI), 98.21% information requesters stated satisfaction on BICARA 131 service. It is an achievement as well as challenges for BICARA 131 going forward to continuously improve service satisfaction to stakeholders.



Infografis 11. Perkembangan Layanan Informasi Publik Bank Indonesia
Infographic 11. Development of Bank Indonesia Public Service Information

- Total 94.885 permohonan informasi yang masuk melalui Telepon, Visitor Center, Surat maupun melalui E-mail bicara@bi.go.id.
Total 94,885 information requests incoming via Telephone, Visitor Center, Letter as well as E-mail bicara@bi.go.id.
- 96% stakeholders menyatakan puas terhadap pelayanan Contact Center Bank Indonesia (BICARA).
96% stakeholders stated satisfaction to Bank Indonesia Contact Center (BICARA) service.



96% STAKEHOLDERS
Menyatakan PUAS terhadap pelayanan BICARA.
State SATISFACTION to BICARA service.

1 HK SOLVED
Permohonan Informasi Publik diselesaikan rata-rata dalam waktu 1 hari kerja.
Public information requests were solved in average one working day.

*Customer Satisfaction Index diukur menggunakan Metode Top 2 Box.
*Consumer Satisfaction Index was measured using Top 2 Box Method.

MEDIA KOMUNIKASI
COMMUNICATION MEDIA

Mayoritas stakeholders yang mengajukan permohonan informasi melalui media **Telepon (81%)**.
Majority Stakeholders submitting information request through media Telephone (81%).

KATEGORI PEMOHON
APPLICANT CATEGORY

Mayoritas stakeholders yang menghubungi BICARA berasal dari kalangan **Perbankan (41%)**.
Majority stakeholders contacting BICARA came from Banking (41%).

KLASIFIKASI INFORMASI*
*INFORMATION CLASSIFICATION**

Jenis informasi yang paling banyak diminta adalah "tersedia setiap saat".
Type of information most requested was 'Always available'.

*Klasifikasi Jenis Informasi mengacu UU No.14/2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
*Information Type Classification refers to Law No.14/2008 on Public Information Disclosure.



BICARA 131 berupaya meningkatkan kualitas layanan *contact center* baik melalui standardisasi maupun prestasi. Di bulan Oktober 2015, BICARA 131 memperoleh ISO 9001:2015 dan merupakan *contact center* pertama di Indonesia yang telah tersertifikasi ISO 9001:2015. Sejalan hal tersebut, Bank Indonesia juga memperoleh peringkat ke-6 dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2015, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di peringkat 21.

Dari sisi komunikasi *online* (digital), *website* Bank Indonesia terus dikembangkan dari segi konten, desain, dan tampilan untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pemangku kepentingan. Selain *website*, penggunaan media sosial juga terus dioptimalkan sesuai perkembangan sarana komunikasi yang digunakan. Saat ini, Bank Indonesia memiliki akun Twitter @bank_indonesia, serta Flipboard, Flickr, YouTube, Facebook Page, dan Instagram.

Melalui media sosial, para *netizen* dapat berinteraksi dua arah mengenai topik/informasi tertentu dengan Bank Indonesia. Edukasi dan sosialisasi yang disampaikan beragam *channel* media sosial ini dilakukan untuk mengoptimalisasi penyebaran kebijakan dan kegiatan yang sedang dilakukan Bank Indonesia ke segala lapisan masyarakat.

Followers Twitter @bank_indonesia pada akhir tahun 2015 merupakan yang ketiga terbesar di dunia untuk sebuah bank sentral (setelah Bank of Mexico dan Federal Reserve). Jumlah *followers* telah mencapai lebih dari 250.000, yakni berada pada angka 273.197.

BICARA 131 aims to improve the service quality of contact center both through standardization and achievement. BICARA 131 received ISO 9001:2015 in October 2015 and became the first contact center certified by ISO 9001:2015 in Indonesia. In line with that, Bank Indonesia also received the 6th position in Public Information Disclosure award in 2015, improving from the 21st position in the previous year.

In terms of online communication (digital), Bank Indonesia continuously develops its website on content, design, and appearance to fulfill the information needs of all stakeholders. Besides website, the use of social media is optimized according to the development of communication tools used. Currently, Bank Indonesia has Twitter account @bank_indonesia, as well as Flipboard, Flickr, YouTube, Facebook Page, and Instagram.

Through social media, netizen can experience two-way interaction on particular topic/information with Bank Indonesia. Education and socialization are delivered through various social media channels to optimize the dissemination of policies and activities performed by Bank Indonesia to all levels of society.

The number of followers of @bank_indonesia Twitter account was the third biggest worldwide for a central bank by the end of 2015 (after Bank of Mexico and Federal Reserve). The number of followers surpassed 250,000, reaching 273,197 accounts.



Best Contact Center

Contact Center Bank Indonesia, BICARA 131, meraih penghargaan tertinggi dalam kategori korporasi sebagai The Best Operation, dalam ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2015, dengan mendapatkan medali platinum. Di samping penghargaan tersebut, dalam ajang yang diikuti oleh 19 *call center* dari institusi lainnya pada tanggal 27 April 2015 ini, Bank Indonesia juga mendapatkan 7 penghargaan lain. 7 penghargaan tersebut adalah The Best Agent < 30 Seats (Gold Medal), The Best Back Office Operation (Medali Emas), The Best Special Agent-Socmed (Medali Perunggu), The Best Writing (Medali Perak), and The Best Creative Team Jamboree (Medali Emas).

Best Contact Center

Contact Center Bank Indonesia-BICARA 131 won the highest award in corporate category as The Best Operation in The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2015, with platinum medal. In addition to the award, Bank Indonesia also won 7 other awards in the competition where 19 *call centers* of institutions participated from 27 April 2015. The 7 awards are The Best Agent < 30 Seats (Gold Medal), The Best Back Office Operation (Gold Medal), The Best Special Agent-Socmed (Bronze Medal), The Best Writing (Silver Medal), and The Best Creative Team Jamboree (Gold Medal).

Perkembangan video Bank Indonesia di YouTube *channel* juga menunjukkan peningkatan, dengan jumlah *subscriber* sebanyak 1.308 pada triwulan IV-2015. Bank Indonesia telah merilis 158 video di *channel* tersebut, dan sampai dengan akhir Desember 2015 telah dilihat sebanyak 432.478 kali.

The development of Bank Indonesia's videos in YouTube channel also showed an improvement, with 1,308 subscribers as of the fourth quarter of 2015. Bank Indonesia has released 158 videos on the channel and have been viewed 432,482 times by the end of December 2015.

MENATA ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan Organisasi

Bank Indonesia terus berupaya untuk melakukan pengembangan organisasi dengan berbagai cara agar dapat meningkatkan kapabilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang kredibel. Pada tahun 2015, Bank Indonesia mendirikan dua Kantor Perwakilan di beberapa daerah dan juga Bank Indonesia Institute agar dapat meningkatkan kapasitas organisasi.

Sebagai ibukota Republik Indonesia, Jakarta memiliki peranan penting dalam hal ekonomi. Karena itu Bank Indonesia pada Juni 2015 mendirikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk dapat lebih dekat memonitor perkembangan ekonomi dan mengumpulkan data-data terkini yang relevan untuk pengambilan keputusan baik di pusat maupun DKI.

Selain itu, Bank Indonesia juga membuka Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw) Provinsi Sulawesi Barat pada Oktober 2015 untuk lebih mendukung perekonomian daerah. Dengan berdirinya KPw BI Propinsi Sulawesi Barat, saat ini BI telah memiliki 45 Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan 4 Kantor Perwakilan Luar Negeri yaitu di Singapura, Tokyo, London, dan New York.

Untuk memperkuat sumber daya manusia, Bank Indonesia pada Juli 2015 membentuk Bank Indonesia Institute (BI Institute), sebuah *center of excellence* bertaraf internasional yang diharapkan dapat mengembangkan talenta yang dimiliki Indonesia, sebagaimana visi yang ingin diwujudkan, yaitu dikenal secara global sebagai *Centre of Excellence* dalam menciptakan pemimpin ekonomi masa depan untuk bangsa. Untuk mewujudkannya, BI Institute mengemban misi menciptakan

RESTRUCTURING ORGANIZATION AND HUMAN RESOURCES

Organization Management

Bank Indonesia continuously strives to develop the organization in various ways to improve the capability of Bank Indonesia as a credible central bank. In 2015, Bank Indonesia established two Representative Offices in several regions as well as Bank Indonesia Institute to increase the organizational capacity.

As the capital of Republic of Indonesia, Jakarta has important role on Indonesia's economy. Therefore Bank Indonesia in June 2015 established Bank Indonesia's Representative Office Jakarta Province to be closer in monitoring economic development and collecting latest data relevant for decision making in both national and Jakarta levels.

Bank Indonesia also opened Bank Indonesia's Representative Office (KPw) West Sulawesi Province in October 2015 to further support local economy. With the establishment of West Sulawesi Representative Office, BI currently has 45 Domestic Representative Offices and 4 International Representative Offices: Singapore, Tokyo, London, and New York.

To strengthen human resources, Bank Indonesia in July 2015 formed Bank Indonesia Institute, a world-class center of excellence expected to develop Indonesian talents, as with the vision aimed to be realized, to be known globally as the Centre of Excellence in creating future economic leaders for the nation. To realize this, BI Institute has the mission to create national economic leaders through study and

pemimpin ekonomi bangsa melalui pembelajaran dan infrastruktur yang unggul, fakulti terbaik, kemitraan yang terkemuka, serta kepemimpinan yang bermartabat tinggi.

leading infrastructure, best faculties, renowned partnerships, as well as dignified leadership.



Dalam pencapaian visi dan misi tersebut, BI Institute ditopang oleh 4 pilar utama yaitu Pembelajaran, Penelitian, Kemitraan, dan Eksposur Publik.

In achieving the vision and mission, BI Institute is supported by 4 main pillars: Learning, Research, Partnership, and Public Exposure.

Pembelajaran. Menetapkan pengaturan dan pengembangan terkait sistem serta desain program pembelajaran di bidang kebanksentralan, *leadership*, dan manajerial untuk *stakeholder* internal dan eksternal dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi dan Strategi Bank Indonesia.

Learning. *Setting arrangement and development related to system and design of learning program in central banking, leadership, and managerial for internal and external stakeholders in supporting the achievement of Vision, Mission, and Strategy of Bank Indonesia.*

Penelitian. Melakukan kegiatan riset yang mendukung pencapaian Visi dan Misi BI. Termasuk di dalamnya riset-riset yang mendukung program pembelajaran BI Institute dalam bidang kebanksentralan, moneter, sistem keuangan, serta *leadership* dan manajerial.

Research. *Performing research activities which support the achievement of BI Vision and Mission. Including the researches which support BI Institute learning programs in central banking, monetary, financial system, as well as leadership and managerial.*

Kemitraan. BI Institute juga bekerja sama dengan lembaga terkemuka baik nasional maupun internasional, melalui program pembelajaran dan riset bersama (*Joint Research*), serta kegiatan seminar dan *workshop* bertaraf internasional.

Partnership. *BI Institute also cooperates with leading institutes nationally and internationally, through learning program and Joint Research, as well as seminars and international-scale workshops.*

Eksposur Publik. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk memperkenalkan BI Institute kepada publik seperti kegiatan *sponsorship*, pengembangan situs BI Institute, dan kegiatan publikasi lainnya.

Keempat pilar tersebut didukung oleh *Knowledge Management System (KMS)*, *Learning Management System (LMS)*, dan *cyber library* untuk mendukung program pembelajaran modern yang dilengkapi dengan infrastruktur berkelas dunia.

Untuk menjadi lembaga berkelas dunia, terdapat 3 (tiga) tahap yang akan dijalani BI Institute: pertama, tahap *Laying the Foundation of Learning (2015-2016)*; kedua, tahap *Accelerating (2017-2018)*; dan ketiga, tahap *Advancing (2019 dan selanjutnya)*. Pada 2015, untuk tahap *Laying the Foundation of Learning*, antara lain telah dilakukan penyusunan kurikulum yang selaras dengan visi dan misi BI, katalog pembelajaran yang komprehensif, melakukan *partnership* dengan lembaga-lembaga yang terkemuka. Selain itu juga menyelenggarakan program *flagship* berskala internasional, melakukan *public exposure* kepada *stakeholder*, serta melengkapi organ pembelajaran berupa Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan Faculty Member.

Selanjutnya pada tahap *Accelerating* akan dilakukan forum riset, *integrated learning at work (Webinar & e-Learning)*, serta program kepemimpinan nasional. Selain itu juga kerja sama penelitian dengan *visiting scholars*, eksposur internasional untuk *experts* di BI Institute, serta program kepemimpinan global.

Sementara pada tahap *Advancing*, akan dilakukan riset akademik lanjutan, pembentukan asosiasi dunia untuk institut bank sentral, pembangunan ekosistem pembelajaran, serta pembentukan program di BI Institute untuk dapat ditransfer di universitas di Indonesia.

Untuk menciptakan pemimpin ekonomi bangsa melalui pembelajaran dan infrastruktur yang unggul, diperlukan dukungan Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat dan anggota fakulti yang mumpuni. Dewan Kehormatan BI Institute memiliki tugas utama untuk menyampaikan masukan strategis mengenai

Public Exposure. Several strategic steps are made to introduce BI Institute to the public such as *sponsorship activities*, *BI Institute site development*, and other publication activities.

The four pillars are supported by *Knowledge Management System (KMS)*, *Learning Management System (LMS)*, and *cyber library* to support modern learning program completed with world-class infrastructure.

To become a world-class institution, there are 3 (three) phases BI Institute should go through: first, the phase of *Laying the Foundation of Learning (2015-2016)*; second, the phase of *Accelerating (2017-2018)*; and third, the phase of *Advancing (2019 and so on)*. In 2015, for the phase of *Laying the Foundation of Learning*, there was an adjustment of curriculum in line with the BI vision and mission, comprehensive learning catalog, partnerships with leading institutions. In addition, BI also held international-scale flagship program, conducting public exposure to stakeholders, as well as completing learning organs in form of *Honorary Board*, *Advisory Board*, and *Faculty Member*.

Afterwards in the *Accelerating* phase there will be research forum, *integrated learning at work (Webinar & e-Learning)*, as well a national leadership program. In addition to that, there will be research cooperation with *visiting scholars*, international exposure to experts at BI Institute, and global leadership program.

Meanwhile in the *Advancing* phase, there will be advance academic research, formation of world association for central bank institute, building of learning ecosystem, as well as creating BI Institute program can be transferred to universities in Indonesia.

To create national economic leaders through superior teaching and facilities, requires full support from the Respective Board, the Advisory Board as well as faculty members. The main task of the Respective Board is to provide strategic input for the preparation of national economic leaders as well as the

penyiapan pemimpin ekonomi nasional dan memberikan arah untuk pengembangan BI Institute ke depan. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, dan anggota eksternal yang merupakan tokoh ternama baik di dalam maupun luar negeri dengan reputasi tinggi.

Sedangkan Dewan Penasehat merupakan pemimpin satuan kerja di Bank Indonesia dan eksternal yang memiliki reputasi tinggi serta berlatar belakang pendidikan dari universitas terkemuka. Tugas utama Dewan Penasehat adalah memberikan masukan bagi pengembangan program pembelajaran dan riset sesuai arahan Dewan Kehormatan. Sementara itu, anggota fakulti BI Institute merupakan pakar dalam masing-masing program yang ditawarkan oleh BI Institute. Anggota fakulti dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal sesuai dengan bidang keahliannya.

Dalam hal pengelolaan organisasi, pada tahun 2015 Bank Indonesia juga melakukan penajaman fungsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Dalam Negeri (KPwDN), sejalan dengan Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI) yang digulirkan sejak 2014. Dengan penajaman tersebut, ditegaskan 9 (sembilan) fungsi KPwDN yang merupakan penjabaran misi KPwDN dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran. Kesembilan fungsi tersebut memiliki tujuan akhir tercapainya visi KPwDN sebagai kantor perwakilan yang kredibel dan kontributif bagi pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Pelaksanaan sembilan fungsi KPwDN dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Kantor Pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

Kesembilan fungsi KPwDN ini dapat dikelompokkan ke dalam lima area utama, yakni: (i) moneter dan stabilitas sistem keuangan (SSK), (ii) sistem pembayaran dan pengedaran uang Rupiah), (iii) usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan keuangan inklusif (Financial Inclusion), (iv) komunikasi kebijakan, serta (v) manajemen intern (MI). Kesembilan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

development direction of BI Institute to achieve the Institute's vision and mission. The member of the Respective Board consists of Governor of Bank Indonesia and prominent external figures with high reputation.

Meanwhile, the Advisory Board consists of internal and external member who has a high reputation and education background from leading university. The Board's main task is to provide advice to develop learning and research program in line with the strategic direction and policy from the Respective Board. The faculty members on the other hand, are experts in each of the programs offered by BI Institute. Faculty members may come from internal and external parties in accordance with their expertise.

In organizational management, in 2015 Bank Indonesia also sharpened the function of Bank Indonesia's Domestic Representative Office (KPwDN), in line with the Bank Indonesia Strategic Function Architecture (AFSBI) rolled since 2014. With that, the function of KPwDN was outlined into 9 (nine) which are the elaboration of KPwDN mission in maintaining the stability of rupiah and financial system, effectiveness of rupiah management, and reliability of payment system. The nine functions have the final aim to achieve KPwDN vision as credible and contributive representative offices for the development of regional and national economies. The nine functions of KPwDN are implemented in balance between the interest of Headquarters and each regional government.

The nine functions of KPwDN can be categorized into five main areas: (i) monetary and financial system stability (SSK), (ii) payment system and Rupiah distribution, (iii) micro, small, medium businesses and financial inclusion, (iv) policy communication, and (v) internal management. The nine functions are as follows:

- i. Fungsi *strategic advisory*, dilakukan dengan mendalami profil dan permasalahan di wilayah dengan komprehensi, melakukan evaluasi dan analisis perkembangan perekonomian, memberikan *advice* kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pengelolaan inflasi dan stabilitas sistem keuangan (SSK) di daerah serta kebijakan perekonomian daerah yang ditetapkan oleh Pemda yang berdampak kepada kebijakan Bank Indonesia melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta memfasilitasi permasalahan ekonomi yang memerlukan solusi dari Pemerintah Pusat.
 - ii. Fungsi *regional financial surveillance* (RFS), dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dalam rangka *regional surveillance*, memantau indikator-indikator *regional surveillance*, membangun kolaborasi dan kerja sama dengan *Systematically Important Organizations* (seperti perbankan daerah atau korporasi daerah), mengelola Sistem Informasi Debitur (SID), serta mengelola dan memantau Giro Wajib Minimum (GWM).
 - iii. Fungsi statistik, dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan dan analisis data terkait pelaksanaan tugas Bank Indonesia, serta membangun kolaborasi dan kerja sama dengan industri lokal terdepan dalam rangka pelaksanaan *liason*.
 - iv. Fungsi pengelolaan uang, dilakukan dengan melaksanakan distribusi uang di wilayah provinsi, melaksanakan layanan kas kepada masyarakat, dan melaksanakan pengolahan uang.
 - v. Fungsi pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, dilakukan dengan memberikan, mencabut, dan membatalkan izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan pengelolaan uang yang diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia/Money Service Business (MSB) seperti Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU), *Cash in Transit* (CIT), memberikan, mencabut, dan membatalkan izin penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA), mengawasi MSB dan KUPVA di wilayah kerja, serta melaksanakan edukasi keaslian uang kepada masyarakat.
- i. *Strategic advisory function*, conducted by fathoming the profile and issue in region comprehensively, conducting evaluation and analysis of economic development, providing advice to the Regional Government related to inflation management and financial system stability (SSK) in regions as well as regional economic policy set by Regional Government which affects Bank Indonesia policy through the Regional Inflation Management Team (TPID), as well as facilitating economic issues which need solution from the Central Government.
 - ii. *Regional financial surveillance (RFS) function*, conducted by gathering date and information for regional surveillance, monitoring regional surveillance indicators, building collaboration and cooperation with *Systematically Important Organizations* (such as regional banking or corporation), managing Debtor Information System (SID), and managing and monitoring Minimum Reserve Requirement (GWM).
 - iii. *Statistic function*, conducted by performing data analysis and collection related to Bank Indonesia's task implementation, as well as building collaborations and cooperations with leading local industries in liaison duties.
 - iv. *Cash management function*, conducted by performing cash distribution in provinces, casts services to the people, and cash processing.
 - v. *Payment system and Rupiah management supervision function*, conducted by providing, revoking, and cancelling license of payment system and cash management services held by other parties than Bank Indonesia/Money Service Business (MSB) such as Money Transfer Business Activity (KUPU), *Cash in Transit* (CIT), providing, revoking, and cancelling license of Foreign Exchange Trade Business Activity (KUPVA), monitoring MSB and KUPVA in working areas, as well as performing education of real currency to the society.

- vi. Fungsi sistem pembayaran, dilakukan dengan melaksanakan layanan kliring dan *Real Time Gross Settlement (RTGS)* di wilayah, memberikan, mencabut, dan membatalkan izin penyelenggaraan kliring di luar Sistem Kliring Nasional (SKN) BI dan BI-RTGS, edukasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) a.l melalui elektronifikasi, serta edukasi program perlindungan konsumen SP.
- vii. Fungsi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan akses keuangan (*financial inclusion/FI*), dilakukan dengan melaksanakan program FI di wilayah, melaksanakan program UMKM guna mendukung upaya pengendalian inflasi di provinsi dan mendukung pemberdayaan perekonomian daerah, serta mensinergikan pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dalam mendukung pemberdayaan perekonomian daerah.
- viii. Fungsi komunikasi kebijakan, dilakukan dengan menjadi juru bicara lokal di wilayah, serta membangun kolaborasi dan kerja sama dengan para *stakeholders* utama daerah khususnya para *opinion leader* daerah.
- ix. Fungsi manajemen intern, dilakukan dengan mengelola administrasi anggaran dan logistik, administrasi SDM dan kesekretariatan, serta administrasi manajemen kinerja KPwDN.

Untuk pelaksanaan fungsi KPwDN tersebut dilakukan penguatan peran KPwDN. Strategi penguatan peran KPwDN mencakup empat aspek yaitu:

- i. Memperkuat pengelolaan KPwDN melalui pembentukan empat Departemen Regional untuk meningkatkan supervisi KPwDN dan penyusunan model bisnis organisasi baru berbasis provinsi;
- ii. Meningkatkan nilai tambah KPwDN dalam memberikan rekomendasi perumusan kebijakan, baik bagi Bank Indonesia maupun Pemerintah Daerah, melalui implementasi *pilot project* penguatan data regional yakni *Growth Diagnostic, Regional Financial Account/Regional Balance Sheet*, dan *Regional Investor Relation Unit*;
- iii. Mengembangkan jaringan KPwDN di tiap provinsi di Indonesia melalui pembukaan dua KPwDN baru di Provinsi DKI Jakarta dan di Provinsi Sulawesi Barat;

- vi. *Payment system function, conducted by performing clearing service and Real Time Gross Settlement (RTGS) in areas, providing, revoking, and cancelling clearing license outside of BI National Clearing System (SKN) and BI-RTGS, Non-Cash National Movement (GNNT) among others through electrification, as well as education of SP consumer protection program.*
- vii. *Function of development of Micro, Small, and Medium Businesses (UMKM) and financial inclusion, conducted by performing FI programs in regions, UMKM program to support inflation management in provinces and support regional economies empowerment, as well a synergizing implementation of Bank Indonesia Social Program (PSBI) in supporting regional economic empowerment.*
- viii. *Policy communication function, conducted by becoming local spokesperson in regions, as well as building collaboration and cooperation with main regional stakeholders especially regional opinion leader.*
- ix. *Internal management function, conducted by managing budget administration and logistics, HR administration and secretariat, as well as administration of KPwDN performance management.*

To implement the KPwDN functions, there needs to be a strengthening of KPwDN role, which covers four aspects:

- i. *Strengthening KPwDN management through the development of four Regional Departments to increase KPwDN supervision and arrange new province-based organizational business model;*
- ii. *Increasing added value of KPwDN in giving recommendation of policy formulation, both for Bank Indonesia and Regional Government, through the implementation of pilot project of regional data strengthening: Growth Diagnostic, Regional Financial Account/Regional Balance Sheet, and Regional Investor Relation Unit;*
- iii. *Developing KPwDN network in every province in Indonesia through the opening of two new KPwDN in DKI Jakarta Province and West Sulawesi Province;*

- iv. Meningkatkan tata kelola pelaksanaan fungsi *advisory* KPwDN kepada Pemerintah Daerah melalui pengaturan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) guna mendukung perumusan dan efektivitas implementasi kebijakan Bank Indonesia di daerah dan penerbitan *Regional Office Handbook* sebagai panduan pelaksanaan fungsi *strategic advisory* KPwDN secara efektif berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Penataan Organisasi dan Sumber Daya BI (OSBI) juga terus dilakukan sejak Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI) dikeluarkan di akhir tahun 2014, di bawah tema *Motivated Organization*. Langkah pertama penyempurnaan OSBI adalah pembaruan struktur organisasi dan perumusan *Key Responsibility Area, Job Description/Job Requirement, RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform)* serta hubungan kerja dalam dan antar satuan kerja (*linking mechanism*). Terkait dengan penyempurnaan OSBI telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemetaan visi dan isu organisasi seluruh satuan kerja di Bank Indonesia.
2. Pemetaan *organization design principles* dan metode penyempurnaan organisasi.
3. Pemetaan *Key Responsibility Area (KRA), RACI*, dan *linking mechanism* Satuan Kerja.
4. Perancangan desain organisasi L1-L3 seluruh Satuan Kerja di Bank Indonesia.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Bank Indonesia perlu membangun praktik dan budaya manajemen kinerja yang kuat untuk mendukung tema "*Motivated Organization*" yang merupakan salah satu fokus transformasi Bank Indonesia 2014-2024. Penerbitan ketentuan mengenai manajemen kinerja pegawai Bank Indonesia yang merupakan hasil penyempurnaan ketentuan sebelumnya diharapkan mampu membentuk sistem manajemen kinerja yang berfungsi sebagai dasar pemberian penghargaan, perencanaan dan pengembangan karir, serta pembinaan dan bimbingan kepada Pegawai.

Terdapat empat area yang menjadi fokus utama dalam penyempurnaan ketentuan manajemen kinerja pegawai Bank Indonesia, yaitu:

- iv. *Increasing governance of KPwDN advisory function implementation to Regional Governments through the arrangement of Regional Finance and Economic Policy (KEKDA) to support the formulation and effectiveness of Bank Indonesia's policy implementation in regions and the issuance of Regional Office Handbook as guidance to implement KPwDN strategic advisory function effectively based on good governance principles.*

BI Resources and Organizational Restructuring (OSBI) is continuously conducted since the enactment of Bank Indonesia Strategic Function Architecture (AFSBI) at the end of 2014, under the theme Motivated Organization. The first step of OSBI improvement is the renewal of organizational structure and formulation of Key Responsibility Area, Job Description/Job Requirement, RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform) as well as working relations within Departments (linking mechanism). Some of the efforts of OSBI improvement are:

1. *Mapping vision and organizational issues of all Departments in Bank Indonesia.*
2. *Mapping organization design principles and organizational improvement method.*
3. *Mapping Key Responsibility Area (KRA), RACI, and linking mechanism of Departments.*
4. *Planning on L1-L3 organization design for all Departments in Bank Indonesia.*

Human Resources Management

Bank Indonesia needs to establish strong performance management culture and practice to support the "Motivated Organization" theme, one of the focuses of Bank Indonesia 2014-2024 transformation. The regulation issuance on performance management of Bank Indonesia employees that is an improvement of previous regulations is expected to build a performance management system which functions as a foundation of giving awards, career planning and development, as well as employee consultation and development.

There are four areas of focus on the improvement of performance-based management for Bank Indonesia employees:

1. *Goal setting* atau penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI), yaitu proses merumuskan, mengembangkan, dan menetapkan rencana kerja individu yang bersumber dari Indikator Kinerja Utama (IKU), uraian tugas (rutin dan *ad hoc*), dan dirancang dalam rangka memotivasi dan mengarahkan pegawai dalam mencapai target atau sasarannya.
2. Evaluasi tengah periode (*mid-year performance review*), yaitu evaluasi kinerja (prestasi dan kompetensi) pegawai oleh atasan langsung berdasarkan *progress* pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan sampai dengan semester I disertai rencana tindak lanjutnya.
3. *Performance dialogue*, yaitu proses dialog antara atasan langsung dengan bawahan dalam rangka *me-review progress* kinerja (prestasi dan kompetensi) dan memberikan *feedback* terhadap kinerja dan pengembangan pegawai yang bersangkutan.
4. Penilaian kinerja akhir periode (*performance appraisal*), yaitu proses menilai kualitas kinerja (prestasi kerja dan kompetensi) pegawai secara formal dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan target, sasaran, dan kriteria yang telah ditetapkan organisasi. Dalam penilaian kinerja akhir periode dilakukan kalibrasi terhadap nilai kinerja pegawai oleh Pemimpin Satuan Kerja dengan mengacu kepada distribusi kinerja pegawai yang ditetapkan berdasarkan kinerja Bank Indonesia dan kinerja Satuan Kerja.

Perencanaan SDM juga disempurnakan untuk menentukan kebutuhan pemenuhan jumlah dan kualitas SDM yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal serta strategi pemenuhannya dalam suatu periode tertentu sesuai dengan arah dan strategi Bank Indonesia. Perencanaan SDM bertujuan untuk memberikan pedoman dan informasi mengenai kebutuhan dan strategi pemenuhan SDM baik secara kuantitas dan kualitas dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga kesinambungan pengisian lowongan jabatan.

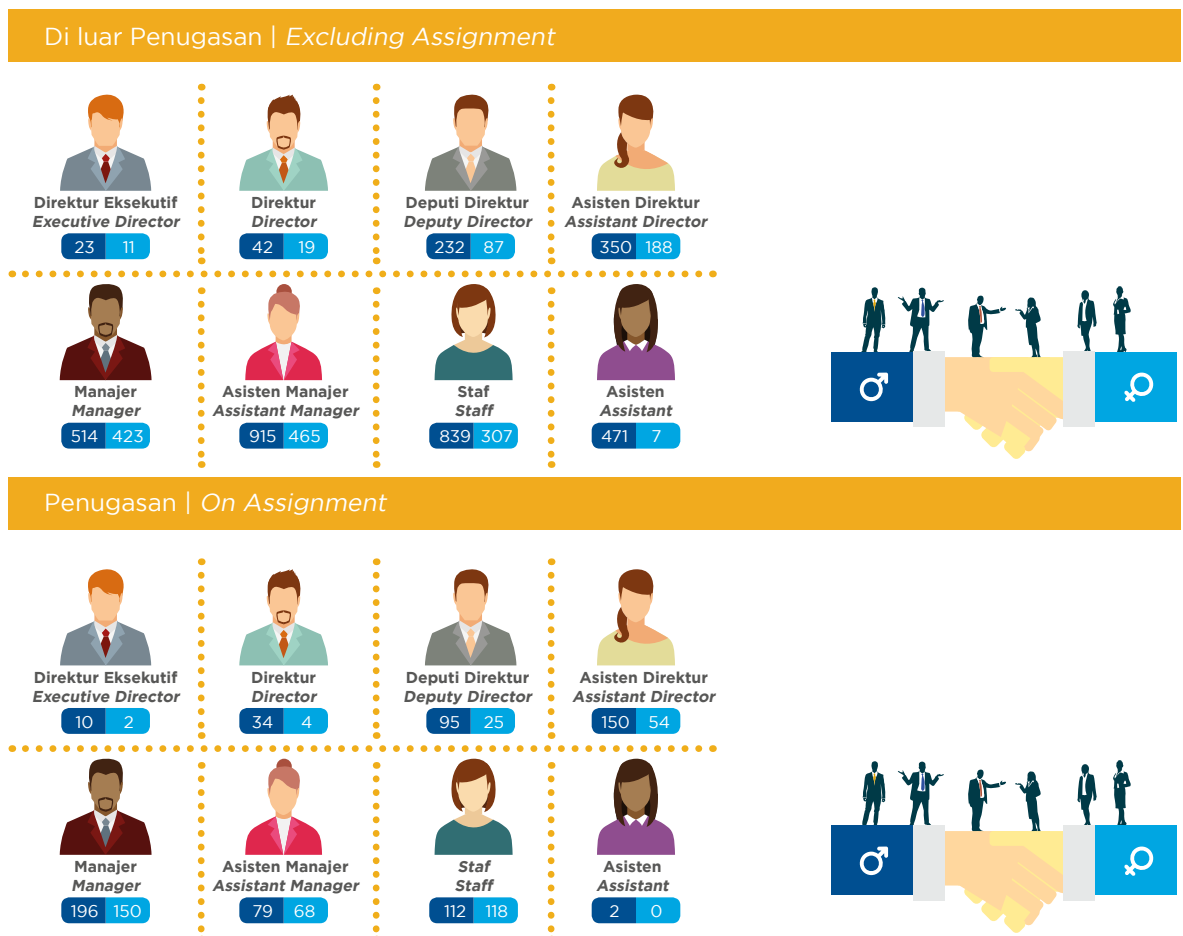
1. *Goal setting or Individual Performance Indicator (IKI) formulation*, which includes *planning, developing and implementing individual working plan derived from Key Performance Indicator (IKU), description of duties (ad hoc and routine), and is designed to motivate and direct employees in achieving their targets.*
2. *Mid-year performance review*, which is *performance evaluation (awards and competencies) of employees by direct superordinate based on achievement progress against set targets up to the first semester followed with action plan.*
3. *Performance dialogue*, which is a *dialogue process between direct superordinate and subordinates in reviewing progress of their performance (awards and competencies) and giving feedback's performance and development.*
4. *Performance appraisal*, which is a *formal process to evaluate the employee's performance quality (awards and competencies) within particular period in accordance with the target, goals, and criteria determined by the organization. In the performance appraisal, Department Heads calibrate the performance evaluation based on the employee's working distribution based on the performance of Bank Indonesia and Departments.*

Human Resources planning are also improved to determine the number and qualification of Human Resources according to optimal productivity as well as recruitment strategies in particular period based on strategies and directions of Bank Indonesia. Human Resources planning aims to give guidelines and information about the need and recruitment strategies both in quantity and quality within particular period of time to maintain the sustainability in filling particular vacancy.

Tabel 9. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Gender
Table 9. Number of Employees Based on Position and Gender

Pangkat Position	Di luar Penugasan Excluding Assignment		Jumlah Total	Penugasan On Assignment		Jumlah Total	Grand Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female		Laki-Laki Male	Perempuan Female		
Direktur Jenderal Director General				1	1	2	2
Direktur Eksekutif Executive Director	23	11	34	10	2	12	46
Direktur Director	42	19	61	34	4	38	99
Deputi Direktur Deputy Director	232	87	319	95	25	120	439
Asisten Direktur Assistant Director	350	188	538	150	54	204	742
Manajer Manager	514	423	937	196	150	346	1.283
Asisten Manajer Assistant Manager	915	465	1.380	79	68	147	1.527
Staf Staff	839	307	1.146	112	118	230	1.376
Asisten Assistant	471	1	472	2		2	474
Grand Total	3.386	1501	4.887	679	422	1.101	5.988

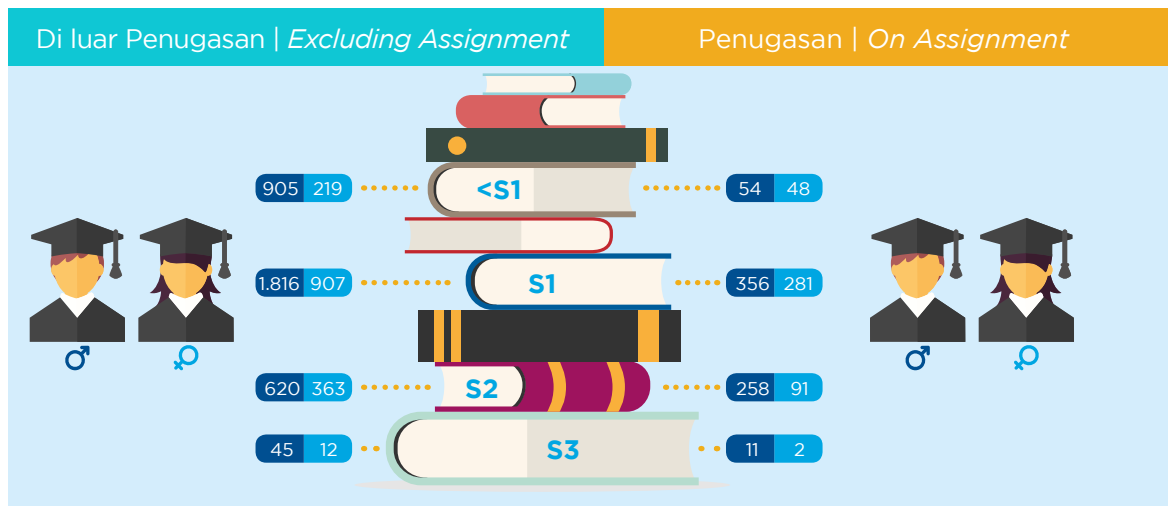
Infografis 12. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Gender
Infographic 12. Number of Employees Based on Position and Gender



Tabel 10. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Gender
Table 10. Number of Employees Based on Education and Gender

Jenjang Pendidikan <i>Education Level</i>	Di luar Penugasan <i>Excluding Assignment</i>		Jumlah Total	Penugasan <i>On Assignment</i>		Jumlah Total	Grand Total
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>		
<S1	905	219	1.124	54	48	102	1.226
S1	1.816	907	2.723	356	281	637	3.360
S2	620	363	983	258	91	349	1.332
S3	45	12	57	11	2	13	70
Grand Total	3.386	1.501	4.887	679	422	1.101	5.988

Infografis 13. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Gender
Infographic 13. Number of Employees Based on Education and Gender



Prinsip-prinsip perencanaan SDM yaitu:

1. Dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan lingkungan tugas Bank Indonesia dan kondisi pasar tenaga kerja;
2. Memenuhi aspek kuantitas dan kualitas;
3. Kesenambungan penyediaan SDM terutama pada jabatan strategis baik struktural maupun fungsional;
4. Memerhatikan kemampuan keuangan BI dengan tetap memerhatikan nilai lebih organisasi.

Human Resources planning principles include:

1. *Conducted periodically by considering Bank Indonesia's scope of duties and employment market;*
2. *Fulfilling the quality and quantity aspects;*
3. *Sustainable Human Resources provision particularly on strategic position both structural and functional;*
4. *Considering BI's financial capability by taking notice of organization's value added.*

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM melalui rekrutmen eksternal selama tahun 2015 telah dilakukan rekrutmen untuk pemenuhan kebutuhan sebagai dampak AFSBI, pengangkatan calon pegawai yang telah menyelesaikan masa pendidikan, serta berpartisipasi dalam pelaksanaan bursa kerja dalam rangka pengumpulan *database* kandidat pelamar.

In meeting the requirement of Human Resources through external recruitment, Bank Indonesia conducted recruitment in 2015 to fulfill needs as an impact of AFSBI, promotion of trainees who have completed their education, as well as participating in job expo to collect candidate database.

Selama tahun 2015, Bank Indonesia juga melaksanakan kegiatan pengembangan SDM BI yang meliputi enam area pengembangan, yaitu (1) *On Boarding Program*; (2) *Career Development Program (CDP)*; (3) *Career Transition Program (CTP)*; (4) *Program Tugas Belajar (PTB)*; (5) *Technical Assistance, Attachment & Assignment Program*; dan (6) *Seminar dan Workshop Internasional*.

Selama tahun 2015, Bank Indonesia juga melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan program budaya kerja sebagai berikut:

1. Berbagai kegiatan terkait pemahaman yang sama tentang transformasi budaya kerja Bank Indonesia seperti *workshop*, forum *Change Agent* dan *Change Leader*, sosialisasi *Change Program* dan komunikasi melalui berbagai media internal.
2. Melanjutkan program *Leads By Example* dengan mengkomunikasikan berbagai kegiatan oleh jajaran Pimpinan BI dan menyampaikan hasilnya secara rutin kepada para Penggerak Perubahan, baik melalui tulisan, gambar, maupun beberapa video.
3. Melakukan kegiatan *monitoring Change Program* yang sudah dilaksanakan seluruh Satuan Kerja selama tahun 2015 melalui *interview* langsung maupun jarak jauh, baik untuk *Change Leader*, *Change Coordinator*, dan *Change Agent/Pegawainya*.
4. Menyelenggarakan *Culture Fair* sebagai selebrasi atas keberhasilan satuan kerja dalam melakukan perubahan, termasuk juga menampilkan satker-satker terpilih untuk dapat mempresentasikan hasil perubahan dan inovasinya.
5. Melakukan survei terhadap tingkat penerimaan pegawai terhadap perubahan dan juga *work engagement* pegawai.
6. Memberikan konsultasi kepada Penggerak Perubahan dari berbagai satuan kerja terkait kegiatan *change program* yang dilakukan.



TRANSFORMASI MENUJU BANK INDONESIA 2024

Untuk mencapai Visi Bank Indonesia 2024, disusun Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia (AFSBI), dan untuk mewujudkannya dilakukan melalui program transformasi dengan lima tema: *Policy Excellence*, *Outstanding*

Bank Indonesia also conducted BI Human Resources development in 2015 that covers six development areas: (1) On Boarding Program; (2) Career Development Program (CDP); (3) Career Transition Program (CTP); (4) Education Program (PTB); (5) Technical Assistance, Attachment & Assignment Program; and (6) International Seminar and Workshop.

In 2015, Bank Indonesia also conducted various activities related to working culture program, including:

1. *Various activities related to the same understanding on Bank Indonesia working culture transformation such as workshop, Change Agent and Change Leader forum, socialization of Change Program and communication through various internal media.*
2. *Continuing Leads by Example program by communicating various activities by BI leaders and delivering the results regularly to the Change Engine, both in written form, pictures, as well as videos.*
3. *Conducting monitoring Change Program activities, which have been done by all Departments in 2015 through direct and remote interviews, for Change Leader, Change Coordinator, and Change Agent/ Employees.*
4. *Holding Culture Fair as a celebration on the success of Departments in making changes, including displaying selected Departments to present their innovations and changes.*
5. *Conducting survey on the level of employees recruitment towards the changes and work engagement of employees.*
6. *Providing consultation to the Change Engine from various Departments related to the change program activities performed.*

TRANSFORMATION TOWARDS BANK INDONESIA 2024

Bank Indonesia establishes the Bank Indonesia Strategic Function Architecture (AFSBI) to achieve the Bank Indonesia Vision 2024, and realizes it through transformation program under five themes: Policy Excellence, Outstanding

Execution, Institutional Leadership, Motivated Organization, dan State of the Art Technology.

Pelaksanaan transformasi dibagi menjadi dua fase utama, yaitu: *Fase I Restructuring and Enhancing* (2014-2019) dan *Fase II Shaping the End State* (2019-2024). Di tahun 2015, dari lima tema transformasi yang ada Dewan Gubernur menetapkan 25 program strategis yang menjadi fokus implementasi program transformasi. Pelaksanaan ke-25 program strategis ini dilakukan oleh Satuan Kerja di kantor pusat dengan koordinator Pusat Program Transformasi Bank Indonesia, yang merupakan organisasi sementara guna mendukung pelaksanaan program transformasi di tahun yang kritis.

Selama tahun 2015, program transformasi menargetkan hasil (*deliverables*) sebanyak 550, dengan pencapaian sebanyak 469 atau 85%. Pelaksanaan program strategis tersebut ditargetkan untuk menambah 104 kapabilitas baru di Bank Indonesia. Selain program strategis, untuk memberikan motivasi dan optimisme dalam pelaksanaan transformasi dipilih 39 kegiatan dari *deliverables* atau program kerja Satuan Kerja yang dinamakan *quick wins*. Penyelesaian *quick wins* mencapai 32 atau sebanyak 82%.

Beberapa pencapaian yang dapat disampaikan dari setiap tema antara lain:

I. Policy Excellence

Tema ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan efektivitas kebijakan BI. Tahap *I Restructuring and Enhancing* (2014-2019) memiliki tiga target pencapaian, yaitu memimpin dalam kebijakan moneter dan makroprudensial yang koordinatif di regional, mampu memitigasi 10-20 jenis risiko sistemik dan *financial imbalances*, serta inflasi dan volatilitas nilai tukar yang rendah dan terkendali di regional. Tahap *II Shaping the End State* (2019-2024) bertujuan untuk menjadikan BI sebagai bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional, memiliki pendekatan *balanced* dalam menangani *financial imbalances* dengan menggunakan *national* dan *financial regional balance sheet*, serta memiliki inflasi dan volatilitas nilai tukar paling terkendali di regional.

Execution, Institutional Leadership, Motivated Organization, and State of the Art Technology.

The implementation of transformation is divided into two key phases: Phase I Restructuring and Enhancing (2014-2019) and Phase II Shaping the End State (2019-2024). In 2015, out of the five transformation themes, the Board of Governors determines 25 strategic programs which become the focus on transformation program implementation. The implementation of those 25 strategic programs is conducted by Departments in headquarter with the coordinator of Bank Indonesia Transformation Program Center, a temporary organization to support the implementation of transformation program during the critical years.

In 2015, the transformation program is targeting deliverables output of 550, with accomplishment of 469 deliverables or 85%. The implementation of the strategic program is targeted to add 104 new capabilities in Bank Indonesia. Besides strategic program, to provide motivation and optimism in the transformation implementation, Bank Indonesia selected 39 activities of the deliverables or working program of Departments named quick wins. The achievement of quick wins was 32 or 82%.

Some of the accomplishments in each theme are as follows:

I. Policy Excellence

The theme aims to improve the quality and the effectiveness of BI policies. Phase I Restructuring and Enhancing (2014-2019) has three targets: leading on coordinative monetary and macroprudential policies in regional level, able to mitigate 10-20 types of systemic risks and financial imbalances, as well as low and manageable inflation and exchange rate volatility in regional level. Phase II Shaping the End State (2019-2024) aims to make BI a credible and best central bank in regional level, with balanced approach in handling financial imbalances by using national and regional financial balance sheet, as well as having the most controllable inflation and exchange rate volatility in regional level.

Untuk meraih *Policy Excellence*, 4 program strategis (PS) dilakukan selama tahun 2015:

To achieve *Policy Excellence*, 4 strategic programs (PS) were conducted throughout 2015:

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM {PS}1
Melakukan Penguatan Kerangka Kerja yang Terkoordinasi antara Kebijakan Moneter, Makroprudensial, serta Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.
Strengthening Coordinated Framework between Monetary Policy, Macroprudential, as well as Payment System and Rupiah Management.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM {PS}2
Mengembangkan Pendekatan Operasional dalam rangka Implementasi Kebijakan Moneter dan Makroprudensial.
Developing Operational Approach in the Implementation of Monetary and Macroprudential Policies.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM {PS}3
Memperbaiki Proses Pengambilan Keputusan dan Komunikasi Kebijakan.
Strengthening Decision Making Process and Policy Communication.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM {PS}4
Menyusun *National and Regional Balance Sheet*.
Arranging national and Regional Balance Sheet.

Dalam tema ini, program yang dilakukan dimulai dengan merumuskan dan memperkuat *framework/kerangka* kebijakan, mengembangkan pendekatan operasional dari kebijakan, pengembangan riset dan input pengambilan kebijakan, memperkuat proses pengambilan keputusan dan komunikasi kebijakan, serta penyusunan metodologi monitor SSK yang efisien dan efektif melalui *regional* dan *national balance sheet*.

In this theme, the program began with formulating and enhancing policy framework, developing operational approach from the policy, developing research and inputs on policymaking, strengthening decision making process and policy communication, as well as formulating efficient and effective SSK monitoring methodology through regional and national balance sheet.

Area utama yang tercakup dalam tema ini adalah area moneter dan makroprudensial. Di tahun 2015, melalui tema ini diterbitkan regulasi yang memayungi proses perumusan dan pengambilan kebijakan BI. Regulasi tersebut melandasi penyesuaian Rapat Dewan Gubernur bulanan yang kini pelaksanaannya menjadi dua hari dan terkait kehadiran perwakilan Pemerintah.

The key areas of the theme are monetary and macroprudential. In 2015, Bank Indonesia published regulations that cover formulation and policymaking of BI to support the theme. The regulation becomes the basis of the adjustment in Board of Governors meeting to two days related with the visit of Government representatives.

II. Outstanding Execution

Tema ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu, dan kualitas proses kerja di seluruh satker. Tahap I *Restructuring and Enhancing* (2014-2019) memiliki dua target pencapaian, yakni mengedarkan uang kertas dengan kualitas tinggi untuk semua denominasi di wilayah

II. Outstanding Execution

The theme aims to improve efficiency, punctuality, and the quality of working process in all Departments. Phase I *Restructuring and Enhancing* (2014-2019) has two targets: high quality paper currency circulation for all denominations across Indonesia and the establishment of Domestic

RI dan terbentuknya Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) dengan *footprint* dan struktur *governance* yang rapi. Target pencapaian pada Tahap II *Shaping the End State* (2019-2024) adalah menjadi panutan di bidang *surveillance* lembaga keuangan dan Sistem Pembayaran, dan mengarahkan KPwDN menjadi *strategic advisor* bagi pemerintah daerah.

Dalam tema ini, dilaksanakan 6 program strategis yakni:

Representative Offices (KPwDN) with foot prints and government structure. The targets on Phase II Shaping the End State (2019-2024) are becoming the role models in surveillance of financial institutions and Payment System, and directs KPwDN as a strategic advisor for regional governments.

There are 6 strategic programs under this theme:

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}5

Membangun *Center of Excellence* di bidang pengawasan BI yang meliputi Pengawasan Bidang Makroprudensial, Sistem Pembayaran dan Moneter.

Building Center of Excellence in BI supervision which covers Supervision in Macroprudential, Payment System and Monetary.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}6

Memperbaiki *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*.

Improving Business Continuity and Disaster Recovery Plan.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}7

Melakukan Optimalisasi Percetakan Uang.

Optimizing Money Printing.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}8

Membangun *Centralized Cash Network Planning/CCNP*.

Building Centralized Cash Network Planning/CCNP.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}9

Memperkuat Manajemen Risiko, *Governance* dan Pengendalian Intern.

Building risk management, governance and internal control.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}10

Memperkuat Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPw DN).

Strengthening Domestic Representative Office (KPw DN).

Untuk meraih *Outstanding Execution*, berbagai langkah penting telah disusun. Langkah itu meliputi penguatan area internal demi memberikan perbaikan terutama kepada proses pelayanan baik di internal maupun eksternal (kepada publik). Secara paralel, BI akan memperbaiki *business continuity planning & disaster recovery* serta pengelolaan manajemen risiko untuk memastikan proses bisnis terus berjalan meski kondisi darurat. Tak hanya itu, BI telah menginisiasi pembentukan *center of excellence* di bidang *surveillance* BI, serta sentralisasi jaringan distribusi uang untuk

To achieve Outstanding Execution, Bank Indonesia formulates various key steps. They cover the enhancement of internal area for improvement particularly on the service both for internal and external parties (the public). BI will concurrently improve its business continuity planning and disaster recovery as well as risk management to ensure business process remains operating despite in emergency. Not only that, BI has initiated the establishment of center of excellence in surveillance department as well as centralization of money distribution to accelerate the availability, punctuality and

mempercepat ketersediaan, ketepatan waktu, dan kualitas pengiriman uang dan upaya optimalisasi kapasitas percetakan uang.

Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan juga upaya untuk mengoptimalkan peran BI di daerah, KPwDN akan dibina dan dioptimalkan dengan bantuan Departemen Regional. Tujuannya agar KPw DN dapat berperan maksimal dalam memahami perekonomian daerah, mendorong inisiatif, dan peran *advisory* bidang ekonomi.

Di tahun 2015, sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mendampingi Pemerintah Daerah di seluruh Provinsi, BI mendirikan KPw DKI Jakarta dan Sulawesi Barat. Selain itu, regulasi internal mengenai Manajemen Keberlangsungan Tugas juga diresmikan sebagai landasan apabila terdapat berbagai kendala operasional yang berpotensi menghambat pelayanan masyarakat.

Dalam area *center of excellence*, langkah awal yang dilakukan adalah dengan membentuk kerangka kerja pengawasan terintegrasi lintas sektor, yakni moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran.

III. Institutional Leadership

Tema ini bertujuan untuk menjadikan BI sebagai inisiator/pelopor program terdepan dan diakui secara nasional. Tahap I *Restructuring and Enhancing* (2014-2019) memiliki tiga target. Pertama, terbentuknya pasar uang yang dalam dan likuid di berbagai kelas aset. Kedua, menyediakan *National Payment Gateway* (NPG). Ketiga, aktif mendorong dan mewujudkan *banked population* menjadi 30%. Sasaran Tahap II *Shaping the End State* (2019-2024) meliputi peningkatan target pendalaman pasar uang dan *banked population*, mendorong Indonesia diakui sebagai pusat keuangan syariah di regional, serta terwujudnya jalur dan instrumen pembayaran yang terinterkoneksi (ATM, debit, kredit, dan *e-money*) via NPG.

the quality of currency delivery and optimum capacity of money printing.

Bank Indonesia also optimizes the role of BI in local level. Bank Indonesia guides KPwDN to optimize its role with the help of Regional Department. It aims to maximize the role of KPwDN in understanding local economy, supporting the initiatives boosting initiatives, advisory role in economic sector.

In 2015, as one of the commitments to partner with Regional Governments in all BI provinces, BI established KPwDN in DKI Jakarta and West Sulawesi. In addition, Internal regulation on the Task Continuity Management was also inaugurated should there be operational issues potentially hampering service to the people.

Within the area of center of excellence, preliminary steps taken are forming cross-sector integrated supervision working framework that includes monetary, financial system stability and payment system.

III. Institutional Leadership

The theme aims to make BI as the leading program initiator acknowledged nationally. Phase I Restructuring and Enhancing (2014-2019) has three targets. First, establishing deeper and liquid money market in many asset classes. Second, providing National Payment Gateway (NPG). Third, actively supporting and establishing banked population to 30%. Phase II Shaping the End State (2019-2024) covers improvement of deeper money market and banked population target, supporting Indonesia to be acknowledged as the center of sharia financing in regional level, as well as realizing interconnected payment instrument and channel (ATM, debit, credit and e-money) via NPG.

Dalam tema ini dilakukan 6 program strategis yakni:

In this theme there are 6 strategic programs:

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}11

Melakukan Penguatan Strategi Kebijakan Internasional untuk Mendukung Kepentingan BI/Nasional dan Meningkatkan Kepemimpinan Bank Indonesia di Kawasan.

Strengthening International Policy Strategy to Support BI/ National Interest and Increase Bank Indonesia's Leadership in Regions.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}12

Melakukan Penguatan Mekanisme Manajemen Krisis, termasuk Penguatan Koordinasi dengan OJK, Kemenkeu dan LPS.

Strengthening Risk Management Mechanism, including Strengthening Coordination with OJK, Finance Ministry and LPS.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}13

Melakukan Pendalaman Pasar Keuangan.

Performing Financial Market Deepening.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}14

Melakukan Pengembangan Perekonomian Syariah Melalui Penguatan Koordinasi antar Lembaga.

Developing Sharia Economy by Strengthening Coordination between Institutions.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}15

Melakukan Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif.

Performing Electronification Program and Financial Inclusion.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}16

Mengembangkan *National Payment Gateway & National Scheme* dan *Sistem Electronic Bill Presentment and Payment* (NPG & EBPP).

Developing National Payment Gateway & National Scheme and Electronic Bill Presentment and Payment System (NPG & EBPP).

Untuk mencapai *Institutional Leadership*, BI secara proaktif melakukan inisiasi program yang koordinatif dengan instansi terkait. Di antaranya akan dilakukan penguatan strategi kebijakan internasional untuk mendukung Kepentingan BI/Nasional dan meningkatkan kepemimpinan Bank Indonesia di kawasan, protokol manajemen krisis termasuk Penguatan Koordinasi dengan OJK, Kemenkeu, dan LPS yang di dalamnya termasuk koordinasi yang lebih erat dengan instansi terkait, dan pendalaman pasar keuangan. BI juga mengembangkan ekonomi syariah melalui koordinasi lintas institusi, mendorong program elektronifikasi dan keuangan inklusif, serta instrumen pembayaran, dan mengembangkan *National Payment Gateway* (NPG) dan *Platform Electronic Bill Presentment and Payment* (EBPP).

To accomplish Institutional Leadership, BI proactively initiates coordinative program with respective institutions. Among others is the enhancement of international policy strategy to support BI/National interest and improve Bank Indonesia's leadership in regions, crisis management protocols including Coordination Strengthening with OJK, Finance Ministry, and LPS, which include tighter coordination with respective institutions, and deeper money market. BI also develops sharia economy through cross-institution coordination, encouraging electronification program and financial inclusion, as well as payment instrument and develops National Payment Gateway (NPG) and Platform Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP).

Dalam tema ini di tahun 2015, BI telah berhasil menerbitkan regulasi Kerangka Kebijakan Internasional Bank Indonesia yang digunakan sebagai dasar perumusan *stance* BI dalam hubungan regional, multilateral, maupun internasional. Selain itu, dalam rangka mendukung upaya pendalaman pasar keuangan, BI telah merumuskan *blueprint* berisi inisiatif, dan rencana kegiatan yang diharapkan akan menstimulus interaksi pasar.

Mendukung hal itu dan mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, BI telah menginisiasi koordinasi antar lembaga dalam rangka pengembangan ekonomi berbasis syariah. Tujuannya agar dana yang dikelola seperti zakat dan wakaf dapat lebih dioptimalkan untuk menguatkan sistem keuangan Indonesia.

Selain dari aspek syariah, upaya inklusi keuangan untuk berbagai kelas dan lapisan masyarakat terus diupayakan antara lain dengan kerja sama dan fasilitasi penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah melalui uang elektronik.

IV. **Motivated Organization**

Tema ini bertujuan untuk meningkatkan *skill*, kapabilitas, dan motivasi pegawai. Program yang ada ditujukan kepada internal BI dan ke depannya diharapkan dapat memberikan pengembangan kebanksentralan kepada masyarakat.

Tahap I *Restructuring and Enhancing* (2014-2019) dengan target *Motivated Organization* adalah memiliki sistem jalur karier yang *robust* dan selaras dengan *job grade* dan *job value*, serta memiliki budaya dan praktik manajemen kinerja yang baik.

Sementara di Tahap II *Shaping the End State* (2014-2019) diharapkan membuat BI Institute bertaraf *world class* sebagai garda depan pemikir ekonomi yang ditopang kemitraan kuat dengan lembaga riset dan pendidikan yang berkelas. Dengan demikian, BI diakui memiliki SDM yang bertalenta dengan kapabilitas kepemimpinan dan kompetensi yang tinggi.

In this theme in 2015, BI managed to publish Bank Indonesia's International Policy Framework regulation which is used as the basis for formulating BI's stance in regional, multilateral, and international relations. In addition, to support financial market deepening BI has formulated a blueprint consisting of initiative and activity plan that is expected to stimulate market interaction.

In supporting that and optimizing Indonesia's potential as one of the biggest muslim population in the world, BI initiated coordination between organizations in a bid to develop sharia-based economy. The aim is to optimize the fund collected such as zakat and wakaf to be more optimized to strengthen the financial system of Indonesia.

Aside from sharia aspect, the financial inclusion effort for various social classes and levels is continuously improved through cooperation and facilitation of social aid by the government through electronic money.

IV. **Motivated Organization**

The theme aims to improve skills, capability and motivation of employees. The existing programs are dedicated to internal Bank Indonesia and expected to provide central banking development to the society in the future.

Phase I Restructuring and Enhancing (2014-2019) with target Motivated Organization is to have robust career path system, in line with job grade and job value as well as having good culture and performance management practice.

Meanwhile Phase II Shaping the End State (2014-2019) is expected to establish a world-class BI Institute as the leading economic think tank supported by strong cooperation with top research and education institutions. Hence, BI is acknowledged to have talented human resources completed with leadership capability and high competences.

Dalam tema ini dilakukan 6 program strategis yaitu:

In this theme there are 6 strategic programs:

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}17

Memperkuat Pelaksanaan/Implementasi Arsitektur BI Institute menuju Institusi Pembelajaran berkelas Dunia.

Strengthening implementation of BI Institute Architecture through world-class educational institute.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}18

Mengembangkan Strategi Perencanaan SDM dan Rekrutmen.

Developing HR Planning and Recruitment Strategy.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}19

Menyusun Jalur karir Baru, Pergerakan Talent, Sistem Remunerasi yang Selaras dengan Sistem Penilaian jabatan (*Job Grading System*).

Setting new career path, talent movement, remuneration system aligned with job grading system.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}20

Menyempurnakan Sistem Manajemen Kinerja BI.

Improving BI performance management system.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}21

Membangun *Leadership Engine* Bank Indonesia dan *Talent Management* Bank Indonesia.

Building Bank Indonesia's Leadership Engine and Talent Management.

PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAM

{PS}22

Melakukan Reorganisasi di Seluruh Satuan Kerja Berdasarkan Strategi Bank Indonesia.

Performing Reorganization in all Departments based on Bank Indonesia's strategy.

Untuk mencapai *Motivated Organization*, pengelolaan SDM di BI akan diperbaiki mulai dari jalur perekrutan, *career path* dan *job grading*, pengembangan SDM (talenta) dan kepemimpinan yang mendukung hingga manajemen kinerjanya. Selaras dengan itu, dilakukan reorganisasi di seluruh satuan kerja sebagai wujud penguatan fungsi BI sebagai bank sentral hasil rekomendasi AFSBI.

To achieve Motivated Organization, BI will improve its human resources management starting from recruitment, career path and job grading, human resources talent development and leadership that support the performance management. In line with that, BI also reorganizes all Departments to strengthen BI's function as central bank recommended by AFSBI.

Berdasarkan fokus dan tujuan program strategis dari tema ini, di tahun 2015 Bank Indonesia mendirikan BI Institute yang akan difokuskan untuk pengembangan kompetensi dan kapabilitas pegawai. Ke depannya, tak hanya pegawai internal, BI Institute akan menjadi lembaga pengembangan kebanksentralan dan pusat pembelajaran ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Based on the focus and purpose of strategic program of this theme, in 2015 Bank Indonesia established BI Institute focusing to develop employee's competencies and capabilities. Going forward, besides for internal employees, BI Institute will also become a central banking development institution and center of economic education that can benefit the society.

Selain itu, menyadari peran besar Bank Indonesia dalam ekonomi Indonesia, Bank Indonesia berkomitmen untuk menyiapkan pemimpin yang kuat dan senantiasa didasari nilai bekerja yang mengutamakan kejujuran, integritas, profesionalisme, serta kepentingan publik. Di tahun 2015, BI melakukan program *leadership engine* dan berhasil menyelesaikan program pendidikan dengan melibatkan pengajar dari tokoh-tokoh berpengaruh di bidang ekonomi, politik, dan kepemimpinan.

Mendukung hal itu, BI mengoptimalkan opsi perekrutan pegawai selain dengan perekrutan regular juga melakukan strategi perekrutan *pro hire/spesialis* dengan mengacu kepada strategi pemenuhan pegawai yang dirumuskan 3-5 tahun ke depan.

V. State of The Art Technology

Tema ini berpijak pada pemanfaatan teknologi mutakhir untuk mempercepat *progress* dalam mencapai visi dan misi BI secara efektif dan efisien.

Tahap I *Restructuring and Enhancing* (2014-2019) dengan target *State of The Art Technology* meliputi *big data* yang terintegrasi dengan proses pengambilan keputusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan SP. Selain itu, memiliki *enterprise architecture* yang ramping dengan kapabilitas terbaik. Tahap II *Shaping the End State* (2019-2024) meliputi penggunaan *big data* secara inovatif, menjadi mitra *peer central banks*, memiliki kapabilitas pengelolaan data dan layanan yang *excellent* dalam riset, pengambilan keputusan terkait kebijakan dan kegiatan operasional.

Moreover, realizing the big role of Bank Indonesia in Indonesia's economy, Bank Indonesia is committed to prepare strong leader based on working value that prioritizes honesty, integrity, professionalism, as well as public interest. In 2015, BI conducted leadership engine program and accomplished education program by involving teachers from influential people in economic, politics and leadership sector.

To support that, BI optimizes the recruitment option by conducting pro hire/specialist recruitment in reference to the recruitment strategy formulated for the next 3-5 years, besides regular recruitment.

V. State of The Art Technology

The theme is based on the utilization of latest technology to accelerate the progress in achieving BI's vision and mission effectively and efficiently.

Phase I Restructuring and Enhancing (2014-2019) with State of The Art Technology target covers big data integrated with decision-making process on monetary policy, macroprudential, and SP, as well as having lean enterprise architecture with best capability. Phase II Shaping the End State (2019-2024) consists of innovative big data utilization, becoming central bank peer partner, having the capability of data analysis and excellent research service, decision making related to policy and operational activities.

Dalam tema ini dilakukan 3 program strategis:

There are 3 strategic programs under this theme:

PROGRAM
STRATEGIS
STRATEGIC
PROGRAM
{PS}23

Memanfaatkan *Big Data* untuk Mendukung Proses Pengambilan Keputusan di Moneter, SSK, dan SP.

Using Big Data to Support Decision Making Process in Monetary, Financial System Stability, and Payment System.

PROGRAM
STRATEGIS
STRATEGIC
PROGRAM
{PS}24

Melakukan Implementansi Proyek SI Strategis.

Conducting Implementation of Strategic SI Project.

PROGRAM
STRATEGIS
STRATEGIC
PROGRAM
{PS}25

Melakukan penguatan *Governance* Proses SI.

Strengthening SI Process Governance.

Penguatan sistem informasi di Bank Indonesia dimulai dengan desain arsitektur informasi, mencakup aspek pengelolaan operasional dan tata kelola sistem informasi, dan pemanfaatan *Big Data* dalam proses pengambilan keputusan di bidang moneter dan stabilitas sistem keuangan. Di tahun 2015, BI menyusun arsitektur sistem informasi (*IS Architecture*) sebagai landasan strategi sistem informasi yang sesuai dengan praktik dan tren bank sentral ke depan, merampingkan aplikasi dengan integrasi seluruh aplikasi SDM dalam HRIS (*Human Resource Information System*), menguatkan pengelolaan tata kelola vendor dengan membentuk *Vendor Management Office*.

Information system strengthening in Bank Indonesia began with information architecture design, covering operational management aspects and information system governance, as well as utilizing Big Data in decision making process in monetary and financial stability system. In 2015, BI formulated the information system architecture (IS Architecture) as a foundation of information strategy system that is in line with future central bank practices and trends, leaning application with integrating entire HR application in HRIS (Human Resource Information System), strengthening the vendor's governance management by forming Vendor Management Office.

Program Strategis Tahun 2016

Sebagai kontinuitas dari program yang telah dilakukan sepanjang tahun 2015, Anggota Dewan Gubernur menyepakati program strategis yang akan dikelola dari 5 tema transformasi menjadi berjumlah 28 program strategis untuk tahun 2016. PS 1 sampai dengan 25 merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan di tahun 2015, dan masih akan berfokus kepada pengembangan kerangka kebijakan dan operasionalisasi, penguatan mekanisme pengambilan keputusan, serta penyempurnaan infrastruktur.

2016 Strategic Program

As the continuity of programs implemented in 2015, Members of the Board of Governors agreed on the strategic programs derived from 5 transformation themes to 28 strategic programs for 2016. PS 1 to 25 are the continuity of what has been performed in 2015, and remain focused on the development of policy and operationalization framework, strengthening decision-making mechanism, as well as improving infrastructure.

Sementara itu, terdapat penambahan 3 (tiga) PS baru yakni PS 26, 27, dan 28 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Strategis 26 'Melakukan Penguatan Kerangka Kerja Kebijakan Moneter, Khususnya Penetapan *Stance* Kebijakan dan Kerangka Operasional yang Sejalan Dengan Inisiatif Pendalaman Pasar Keuangan'.
2. Program Strategis 27 'Mengembangkan Strategi Operasional untuk kerangka Kebijakan Makroprudensial'.
3. Program Strategis 28 'Menyusun RUU Bank Indonesia'.

There are 3 (three) new PS, namely PS 26, 27, and 28 explained as follows:

1. *Strategic Program 26 'Strengthening Monetary Policy Framework, Particularly the Determination of Policy and Operational Stance In Line with Deepening Financial Market Initiative'.*
2. *Strategic Program 27 'Developing Operational Strategy for Macprudential Policy Framework'.*
3. *Strategic Program 28 'Formulating Bank Indonesia Bill'.*

Program Sosial Bank Indonesia

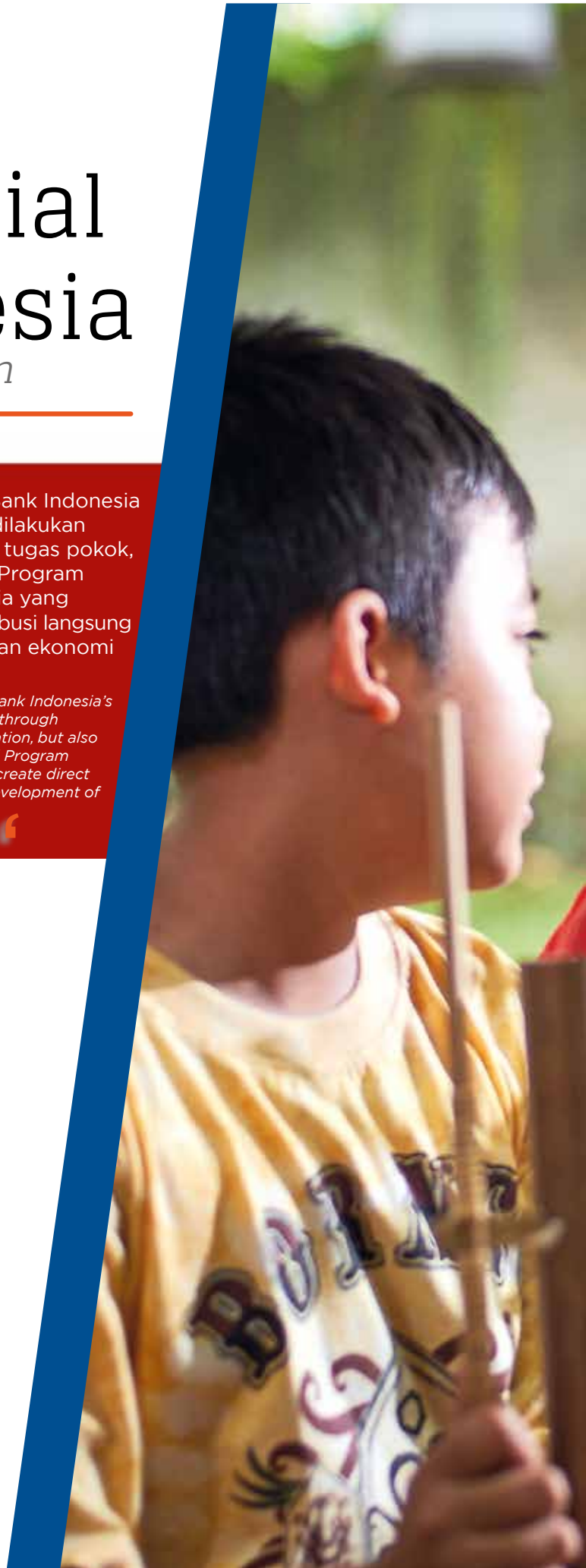
Bank Indonesia Social Program



“Pencapaian tujuan Bank Indonesia tidak semata-mata dilakukan melalui pelaksanaan tugas pokok, namun juga melalui Program Sosial Bank Indonesia yang diharapkan berkontribusi langsung dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

The achievement of Bank Indonesia's objectives is not only through main task implementation, but also Bank Indonesia Social Program which is expected to create direct contribution to the development of people's economy.

”



Melalui Program Kepedulian Sosial, Bank Indonesia menunjukkan empati dan kepedulian dalam permasalahan sosial masyarakat.

Through the Social Care Program, Bank Indonesia shows its empathy and concern in social issues of the society.







Program Sosial Bank Indonesia

Bank Indonesia Social Program

Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia terutama melalui penguatan ekonomi rumah tangga. Apabila hal ini dilakukan secara masif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pada akhirnya pencapaian stabilitas ekonomi. PSBI juga dilakukan dalam bentuk edukasi dan sosialisasi kebijakan BI. Namun demikian, pelaksanaan PSBI juga tetap memperhatikan kepedulian pada masyarakat.

Bank Indonesia Social Program (PSBI) is conducted to support the main task implementation of Bank Indonesia through the empowerment of household economies. If this is done massively and sustainably, it is expected to support the empowerment of people's economy and eventually the achievement of economic stability. PSBI is performed in form of education and socialization of BI's policies. However, PSBI implementation still focuses on its concern to the society.



DEDIKASI UNTUK NEGERI

Selain menjalankan tugas dan fungsinya sebagai otoritas moneter dan keuangan, Bank Indonesia juga menjalankan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) sebagai bentuk kepedulian sosial Bank Indonesia untuk berkontribusi dalam membantu memecahkan masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Melalui program sosial, Bank Indonesia juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Kontribusi sosial yang telah dilakukan sejak tahun 2005 kini memasuki sebuah babak baru. Sejalan dengan program transformasi Bank Indonesia, PSBI juga berubah. Secara bertahap paradigma filantropi PSBI dikembangkan menuju pemberdayaan berkelanjutan yang mampu meningkatkan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan di masyarakat. Secara spesifik, PSBI difokuskan pada program pemberdayaan yang bertujuan untuk penguatan ekonomi rumah tangga.

Bank Indonesia meyakini bahwa sektor rumah tangga berperan penting dalam pilar ekonomi nasional, seperti halnya sektor swasta dan pemerintah. Rumah tangga yang kuat secara ekonomi dan edukasi dapat mendukung pencapaian stabilitas ekonomi, khususnya mengenai efisiensi harga-harga barang dan jasa sehingga dapat mencapai tingkat inflasi yang rendah dan terkendali

Dengan semangat Dedikasi untuk Negeri, Bank Indonesia didukung oleh 45 Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia yang berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam membantu mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat yang dapat memberikan nilai bagi negeri dan institusi.



PROGRAM SOSIAL BANK INDONESIA

Jenis Program dan Ruang Lingkup PSBI

PSBI meliputi dua jenis program, pertama Program Pengembangan Ekonomi dan Peningkatan Pengetahuan serta Pemahaman Masyarakat, kedua Program Kepedulian Sosial, termasuk penyaluran beasiswa. Program pertama

TRIBUTE TO THE NATION

Apart from performing its task and function as the finance and monetary authority, Bank Indonesia also runs the Bank Indonesia Social Program (PSBI) as part of its social concern to contribute in helping to solve socio-economic issues faced by the people. Through social programs, Bank Indonesia can also raise awareness and improve understanding of the people towards the task implementation and objective achievement of Bank Indonesia.

Social contributions that have been conducted since 2005 now entered a new phase. In line with Bank Indonesia's transformation program, PSBI also changes. PSBI's philanthropic paradigm has been gradually developed towards becoming a sustainable empowerment that can enhance economic, social and environment values in the society. Specifically, PSBI is focused on empowerment programs that are aimed at strengthening household economies.

Bank Indonesia believes that the household sector plays an important role in the national economic pillars, such as the private and government sectors. Economically and educationally strong households can support the achievement of economic stability, especially in the price efficiency of goods and services so as to secure low and manageable inflation.

With the spirit of Dedication for the Nation, Bank Indonesia is supported by 45 Representative Offices across Indonesia which are committed to contribute in helping to tackle social and economic issues of the people which can give values to the nation and institution.

BANK INDONESIA SOCIAL PROGRAM

PSBI Programs and Scope

PSBI covers two types of programs, first the Economic Development and Knowledge Improvement as well as People's Understanding Program, second Social Care Program, including scholarship disbursement. The first program

mencakup Program Strategis PSBI dan Program Unggulan PSBI. Sementara itu, Program kedua merupakan kegiatan kepedulian atau empati terhadap permasalahan masyarakat yang meliputi enam aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan, keagamaan, serta penanganan musibah dan bencana alam.

Kebijakan dan Metode PSBI

Dalam melaksanakan program, PSBI memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar sekaligus cerminan dari penerapan tata kelola. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 1) menjunjung keterbukaan (*transparency*); 2) mengutamakan pertanggungjawaban (*accountability*) yang jelas kepada publik; dan 3) menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Bank Indonesia juga terus berupaya untuk mengedepankan aspek tata kelola dalam pelaksanaan PSBI dengan melakukan proses survei dan penilaian kelayakan sebelum pemberian bantuan/program. Bank Indonesia melibatkan pihak eksternal dalam proses tersebut agar hasil penilaian tetap objektif dan independen.

Selanjutnya, untuk memastikan agar program yang dilakukan dapat memberikan dampak yang luas, maka dalam pelaksanaannya selalu memperhatikan pedoman (*guiding principles*) yang terdiri dari:

- a. **Kemitraan:** Pelaksanaan dilakukan bermitra dengan lembaga yang kredibel dan bereputasi.
- b. **Keberlanjutan:** Program diharapkan dapat mandiri dan berkelanjutan (*sustainable*).
- c. **Pemanfaatan Biaya:** Program memberikan nilai lebih bagi Bank Indonesia dan masyarakat.
- d. **Multi Fungsi:** Program bermanfaat untuk berbagai aspek atau ruang lingkup penyaluran.
- e. **Terfokus:** Penerima dan bentuk program dilakukan secara terfokus.

Program Strategis PSBI

Pada tahun 2015, tema PSBI yang diusung adalah "Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Kuat, Berkesinambungan, dan Inklusif" dengan empat sub-tema, yaitu Ketahanan Pangan, Pertanian Terintegrasi, Komoditas Unggulan, serta Komunitas Kebanksentralan dan Literasi Keuangan.

encompasses PSBI Strategic Program and PSBI Priority Program. Meanwhile, the second program is social care or empathy to the society's issued which cover six aspects, namely education, health, environment, culture, religion, as well as natural disaster and disaster handling.

PSBI Policy and Method

In executing the program, PSBI carries basic principles which mirror the governance implementation. Those principles consist of: 1) upholding transparency; 2) prioritizing clear accountability to the public; and 3) avoiding conflict of interests.

Bank Indonesia also continues putting forward good governance aspects in the implementation of PSBI by organizing survey process and propriety tests before channeling assistance/program. Bank Indonesia involves external parties in the process so as to maintain objectivity and independence of judgment.

Afterwards, to ensure that the program in place will give greater benefit to a wider public, in the implementation it always regards guiding principles which consist of:

- a. **Partnership:** Implementation is done in partnership with reputable and credible agencies.
- b. **Sustainability:** The program is expected to be independent and sustainable.
- c. **Costs Consideration:** The program will give added value to Bank Indonesia and the society.
- d. **Multi-function:** The program will be beneficial for many aspects and scopes of disbursement.
- e. **Focus:** The recipients and form of the program are conducted in focus.

PSBI Strategic Program

In 2015, the theme used for PSBI is "Boosting a Strong, Sustainable, and Inclusive Economic Development" with four sub-themes, namely Food Security, Integrated Agriculture, Leading Commodities, as well as Central Banking Community and Financial Literacy.

Seluruh program yang dilakukan di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan harus berada dalam koridor tema dan sub-tema tersebut agar PSBI terarah dan dapat dilakukan secara masif sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat.

All of the programs conducted at the Headquarters and Representative Offices must be in line with the theme and sub-theme corridors so as to make the PSBI targeted and done in massive scale for the society to enjoy the broad benefits.

Terdapat 125 program yang melibatkan 45 Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam pelaksanaan tema dan sub-tema pada 2015:

There were 125 programs which engaged 45 Bank Indonesia Representative Offices in the implementation of themes and sub-themes for 2015:

Tabel 11. Program Strategis PSBI
Table 11. PSBI Strategic Program

No.	Sub-Tema Sub-Theme	Jumlah Program Number of Programs	Jumlah Satuan Kerja Pelaksana Number of Executing Departments	Program Programs
1	Ketahanan Pangan <i>Food Security</i>	55 Program 55 Programs	Kantor Pusat dan 37 Kantor Perwakilan <i>Headquarters and 37 Representative Offices</i>	Budidaya Bawang Merah, Pembangunan Kandang Sapi Komunal, Peningkatan Produktivitas Padi Melalui Pembangunan Saluran Irigasi, Perluasan Demplot Bawang Merah, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Bantuan Pemberian Mesin, Bantuan Pengembangan Klaster, Bantuan Pembibitan dengan Inseminasi Buatan, Pembuatan Greenhouse Percontohan Cabai, Pengembangan Padi Organik, dll. <i>Shallot Cultivation, Building Communal Cowshed, Increasing Rice Productivity by Building Irrigation Channels, Expansion of Shallot Demonstration Plot, Acceleration of Food Consumption Variation (P2KP), Machinery Aid, Cluster Development Aid, Seeding Aid with Artificial Insemination, Making Chilli Greenhouse, Developing Organic Rice, etc.</i>

CSR Awards

The 7th Annual Global Corporate Social Responsibility (CSR) Summit dan Awards 2015 adalah ajang konferensi tahunan bagi para pelaku CSR di kawasan Asia yang mengangkat tema "Creative Inclusive Market Innovations." Bank Indonesia melalui program pengolahan batu permata Agate di Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, memperoleh peringkat ketiga (*bronze*) untuk kategori *Product Excellence* atas keberhasilan menciptakan produk bermanfaat dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

CSR Awards

The 7th Annual Global Corporate Social Responsibility (CSR) Summit dan Awards 2015 adalah ajang konferensi tahunan bagi para pelaku CSR di kawasan Asia yang mengangkat tema "Creative Inclusive Market Innovations." Bank Indonesia melalui program pengolahan batu permata Agate di Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, memperoleh peringkat ketiga (bronze) untuk kategori Product Excellence atas keberhasilan menciptakan produk bermanfaat dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

No.	Sub-Tema Sub-Theme	Jumlah Program Number of Programs	Jumlah Satuan Kerja Pelaksana Number of Executing Departments	Program Programs
2	Pertanian Terintegrasi <i>Integrated Farming</i>	30 Program 30 Programs	23 Satuan Kerja 23 Departments	Pembangunan Instalasi Biogas dan Alat Pembuatan Konsentrat Pakan Ternak, Bantuan Fasilitasi Air Bersih, Pertanian Terintegrasi Berbasis Pengembangan Wira Usaha Tani, Klinik Tanaman Ramah Lingkungan, Peningkatan Kualitas Produk & Penciptaan Nilai Tambah Produk Diversifikasi (aneka olahan produk jagung), dll. <i>Building Biogas Installation and Tools for Making Animal Feed Concentrate, Clean Water Facilitation Aid, Integrated Farming Based on Farmer Entrepreneurship Development, Environmental Friendly Plant Clinic, Product Quality Increase & Value Added Creation of Diversified Products (various corn products), etc.</i>
3	Komoditas Unggulan <i>Leading Commodities</i>	38 Program 38 Programs	23 Satuan Kerja 23 Departments	Pengembangan Digital Kreatif di Bandung, Pengembangan Kampung Batik Ciwaringin, Pengembangan Gula Semut KSU Jatirogo, Pengembangan Kerajinan Batik/Tenun, Pengembangan Batik Madura, Pengembangan usaha Pembuatan Amplang, Pembangunan 2 (dua) unit Rumah Pengering Bahan Olah Karet (BOKAR), dll. <i>Creative Digital Development in Bandung, Development of Ciwaringin Batik Village, Development of KSU Jatirogo Brown Sugar, Batik/Tenun Craft Development, Madura Batik Development, Development of Amplang Production, Construction of 2 (two) units of Rubber Material Drying House, etc.</i>
4	Komunitas Kebanksentralan dan Literasi Keuangan <i>Central Bank Community and Financial Literacy</i>	Program (BI Corner dan Pojok Baca dan Dongeng PAUD) Programs (BI Corner and Pre- School Tale and Reading Corner)	46 Satuan Kerja 46 Departments	BI Corner dan Pojok Baca dan Dongeng PAUD. <i>BI Corner and Pre-School Tale and Reading Corner</i>

Program Unggulan PSBI

Dalam rangka mendukung fokus pemberdayaan kepada ekonomi rumah tangga, Bank Indonesia juga mulai mengimplementasikan Program Unggulan di pertengahan tahun 2015. Program Unggulan yang terdiri dari Program Indonesia Cerdas dan Program Pemberdayaan Perempuan ini diharapkan dapat menjadi identitas PSBI.

Program Indonesia Cerdas menaungi program-program inisiatif di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing generasi muda dan pemimpin masa depan. Program tersebut antara lain *BI Corner*, Pojok Baca dan Dongeng PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan Sekolah Siaga Bencana.

PSBI Leading Programs

In supporting the focus on empowering household economies, Bank Indonesia has also started to implement Leading Programs in mid-2015. The Priority Programs consisting of Smart Indonesia Program and Women Empowerment Program are expected to become the identity of PSBI.

The Smart Indonesia Program shelters many initiative programs in education, aiming at increasing the quality and competitiveness of youth and future leaders. The program includes BI Corner, Reading Corner and Story-Telling for Pre-Schools, and Disaster Alert Schools.



Program *BI Corner* bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebanksentralan. Sedangkan, program Pojok Baca dan Dongeng PAUD bertujuan untuk mengenalkan BI kepada masyarakat sejak usia dini. Program Sekolah Siaga Bencana bertujuan untuk meminimalisir jumlah korban jiwa khususnya anak-anak dan pelajar ketika terjadi bencana.

The BI Corner program aims to increase public awareness on central banking. Meanwhile, Reading Corner and Story-Telling for Pre-Schools is expected to introduce BI to the society from early age. The Disaster Alert School Program is aimed at minimizing the number of fatalities, especially children and students, during disasters.

Pada tahap awal, Program Unggulan di tahun 2015 lebih banyak dilakukan di kantor pusat. Untuk program *BI Corner* telah dilaksanakan oleh seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri. Sampai akhir tahun 2015 telah dibangun 106 *BI Corner* di seluruh Indonesia serta 74 Pojok Baca dan PAUD di 30 kota di seluruh Indonesia, sedangkan program sekolah siaga bencana dilakukan di 20 sekolah di wilayah Jakarta.

Program Pemberdayaan Perempuan terdiri dari kegiatan yang diinisiasi untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas perempuan di berbagai aspek, seperti Program Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Mikro (P3M) dan *Youthpreneur*, serta *Urban Farming* yang bekerja sama dengan PKK Provinsi DKI Jakarta.

Terkait Program Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Mikro dan *Youthpreneur*, telah dilakukan pelatihan pemberdayaan usaha kepada 3.000 pengusaha mikro perempuan dan 2.000 remaja putri. Program Pemberdayaan Perempuan lainnya dilakukan melalui pemberdayaan kepada 15 (lima belas) kelompok ibu-ibu PKK di wilayah Provinsi DKI Jakarta melalui Program *Urban Farming*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat, khususnya cabai dan sayuran serta menumbuhkan kepedulian masyarakat di wilayah DKI Jakarta terhadap optimalisasi pemanfaatan lahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga dan penghijauan lingkungan sekitar. Program *Urban Farming* dilaksanakan melalui fasilitasi 25.000 (dua puluh lima ribu *polybag*) dan 75 (tujuh puluh lima) vertikultur tanaman cabai dan sayuran hijau kepada kader PKK di 5 (lima) wilayah di DKI Jakarta.

In the early stage, many of the 2015 Priority Programs were done at headquarters. The BI Corner program has been conducted by all Bank Indonesia Domestic Representative Offices. Until the end of 2015, 106 BI Corners have been built across Indonesia, as well as 74 Reading Corners and Pre-Schools in 30 cities around the country. Meanwhile, the Disaster Alert School Program was conducted in 20 schools in the Jakarta area.

The Women Empowerment Program consists of many activities that are initiated to increase the capacity and productivity of women in many aspects, such as the Micro Female Entrepreneur Empowerment Program (P3M) and Youthpreneur, as well as Urban Farming in partnership with the Family Welfare Movement (PKK) of the Jakarta Province.

In regards to the Micro Female Entrepreneur Empowerment Program and Youthpreneur, trainings and business empowerment programs have been organized for 3,000 micro female entrepreneurs and 2,000 teenage girls. The other Women Empowerment Programs were done through the empowerment of 15 (fifteen) groups of PKK women in the Jakarta Province area through the Urban Farming Program. This program was aimed at increasing food self-sufficiency of the people, especially for chilli and vegetables, as well as growing public awareness in the Jakarta region on the optimization of land usage in boosting family welfare and green movement for the surroundings. The Urban Farming Program was done by facilitating 25,000 (twenty five thousand) polybags and 75 (seventy five) chili and green vegetables for PKK cadres in the Jakarta region.

Program Kepedulian Sosial

Meskipun PSBI lebih terfokus pada program pemberdayaan yang berkelanjutan untuk penguatan ekonomi rumah tangga, namun mekanisme penyaluran dalam bentuk kepedulian kepada masyarakat tetap dilakukan. Melalui Program Kepedulian Sosial, Bank Indonesia menunjukkan empati dan kepeduliannya terhadap permasalahan sosial masyarakat di berbagai aspek.

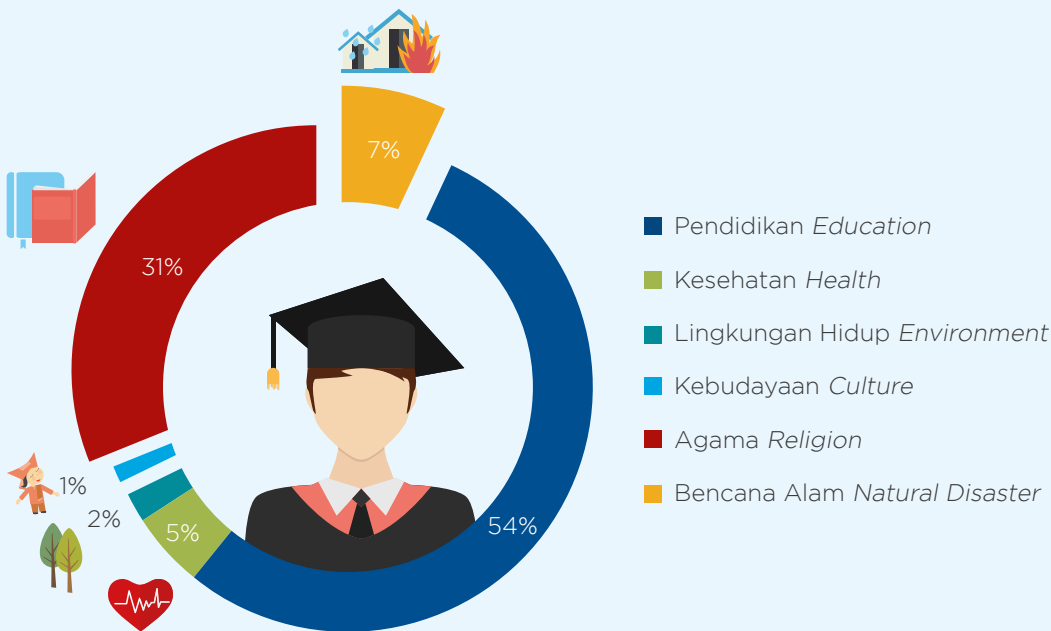
Dari enam aspek yang menjadi ruang lingkup Program Kepedulian Sosial, aspek pendidikan dan keagamaan menjadi yang paling banyak mendapatkan perhatian Bank Indonesia di tahun 2015.

Social Awareness Program

Despite PSBI is more focused on sustainable empowerment programs in strengthening household economies, but the disbursement mechanism in form of public concern was still executed. Through the Social Awareness Program, Bank Indonesia conveyed its empathy and concern on social problems facing the society in various aspects.

From the six aspects that become the scope of Social Awareness Program, the education and religion aspects drew the most attention from Bank Indonesia in 2015.

Infografis 14. Proporsi Program Kepedulian Sosial
Infographic 14. Proportion of Social Care Program



PROGRAM BEASISWA BANK INDONESIA

Perguruan Tinggi merupakan komponen strategis dalam sistem pendidikan nasional (sisdiknas) yang berperan dalam mempersiapkan dan mencetak sumber daya manusia yang tangguh dan terampil, guna menghadapi era globalisasi. Besarnya biaya pendidikan tinggi di Indonesia banyak membuat putra-putri bangsa yang berprestasi tidak dapat melanjutkan studi. Sebagai bentuk empati dan kepedulian akan kondisi dan kendala tersebut, PSBI berupaya berperan aktif dalam meningkatkan kualitas masa depan sumber daya manusia Indonesia melalui program pemberian beasiswa bagi mahasiswa. Lebih dari sebuah bentuk kepedulian, beasiswa tersebut merupakan upaya Bank Indonesia untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing generasi.

Jenis dan Program Studi Penerima Beasiswa

Beasiswa diberikan oleh Bank Indonesia kepada mahasiswa jenjang sarjana (S1) di Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas namun berprestasi akademik baik serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sampai dengan 2015, jumlah penerima beasiswa Bank Indonesia mencapai sebanyak 2.955 mahasiswa dari 79 perguruan tinggi negeri (PTN) di seluruh Indonesia. Bank Indonesia telah membuktikan komitmen dan konsistensi kepeduliannya di bidang pendidikan. Sejak tahun 2012, jumlah penerima beasiswa yang telah menyelesaikan studinya mencapai 8.025 orang dan hampir 90% di antaranya telah bekerja di berbagai bidang, termasuk wirausaha.

Jenis Beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia terdiri dari beasiswa reguler dan beasiswa unggulan. Beasiswa reguler ditujukan untuk membantu pembiayaan kuliah mahasiswa dari 79 PTN yang berprestasi namun kurang mampu, sedangkan beasiswa unggulan diberikan kepada mahasiswa dari 10 PTN terbaik yang memiliki prestasi di atas rata-rata.

BANK INDONESIA SCHOLARSHIPS PROGRAM

Universities are strategic component in the national education system which plays a role in the preparation and shaping of tough and skilled human resources, in facing the globalization era. The huge amount of tuition fees in Indonesia has disabled many talented young Indonesians to continue on their studies. As part of empathy and concern on such conditions and challenges, PSBI strives to play an active role in boosting the quality of Indonesia's future human resources by giving scholarship programs to university students. More than a concern, the scholarship is part of Bank Indonesia's efforts in contributing to increase the quality and competitiveness of the generations to come.

Type and Study Program of Scholarship Recipients

Scholarships are given by Bank Indonesia to university students taking Bachelor's Degree (S1) programs in Public Universities with limited financial capability but showing academic talents as well as being active in social works in the community.

Up to 2015, the number of Bank Indonesia's scholarship recipients reached 2,955 students from 79 public universities (PTN) across Indonesia. Bank Indonesia has shown its commitment and consistency towards its concern on education. Since 2012, the number of scholarship recipients who have finished their studies reached 8,025 students and almost 90% of them have been employed in a number of sectors, including becoming entrepreneurs.

The type of scholarship Bank Indonesia offers consists of regular scholarship and leading scholarship. Regular scholarships are aimed at helping to finance 79 PTN students who are financially less capable, while leading scholarships are extended to students from 10 best PTNs with above-average academic achievements.

Generasi Baru Indonesia (GenBI)

Dalam rangka membangun *engagement* dengan mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia, dibentuk komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI). Program pengembangan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia (GenBI) dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi dan jiwa kepemimpinan generasi muda, serta merekatkan hubungan antar GenBI, Bank Indonesia, maupun dengan masyarakat sekitarnya. GenBI dibentuk pada 11 November 2011 dengan anggota seluruh penerima beasiswa baik yang masih aktif maupun yang sudah menjadi alumni. Sampai dengan tahun 2015, terdapat 15.000 orang anggota GenBI dari 79 PTN di Indonesia.

Tujuan dari program GenBI adalah untuk membentuk para anggotanya menjadi: (1) Garda Depan (*Frontliner*), yang membantu mengkomunikasikan kebijakan BI kepada komunitas mahasiswa dan masyarakat; (2) Agen Perubahan (*Agent of Change*), sebagai *role model* bagi kalangan pelajar dan mahasiswa serta masyarakat sekitar; dan (3) Pemimpin Masa Depan (*Future Leader*), menjadi pemimpin masa depan di berbagai bidang.

Program GenBI dilakukan antara lain dalam bentuk pelatihan dan motivasi kepemimpinan (*leadership camp*), pelatihan menulis dan *public speaking, sharing session* dengan anggota Dewan Gubernur dan tokoh masyarakat, *internship* di Bank Indonesia maupun berbagai perusahaan nasional dan multinasional.

Sepanjang 2015, terdapat 410 kegiatan GenBI, 55 diantaranya adalah pelatihan penulisan, *public speaking, training of trainers* mengenai kebanksentralan, serta pelatihan kepemimpinan dan *capacity building*. Kegiatan lainnya adalah kegiatan sosial kemasyarakatan yaitu bidang pendidikan, ekonomi kewirausahaan, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

Indonesia's New Generation (GenBI)

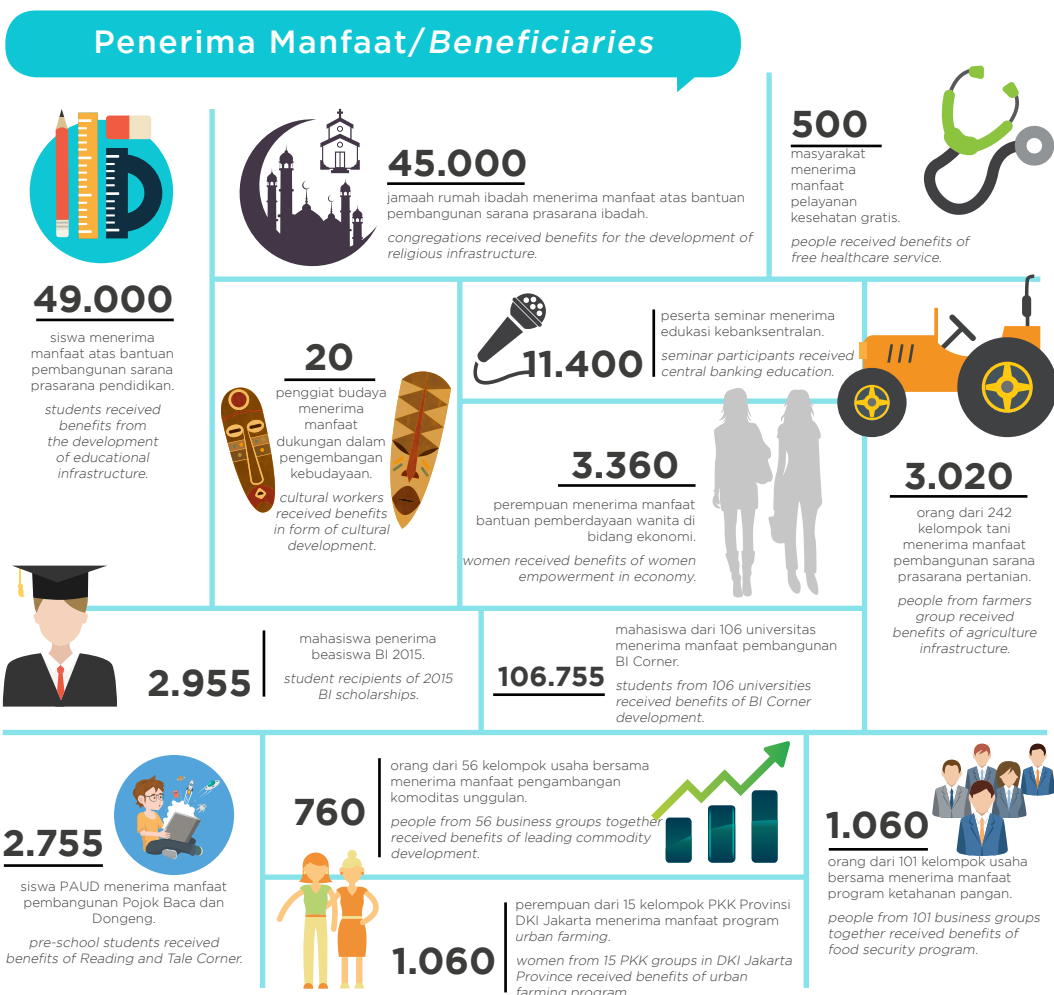
In building engagement with students who are recipients of Bank Indonesia scholarships, a community is formed under the name of Indonesia's New Generation (GenBI). The development program for Bank Indonesia's scholarship recipients community (GenBI) is developed to grow competence and leadership skills of the young generation, as well as strengthening relationship between fellow GenBIs, Bank Indonesia, as well as with the surrounding communities. GenBI was formed on 11 November 2011, with members including all scholarship recipients, both those who are still active and those who have become alumni. Until 2015, there were 15,000 GenBI members from 79 public universities in Indonesia.

The aim of GenBI program is to shape its members towards becoming: (1) Frontliners, who help communicate BI's policies to the student community and the people; (2) Agents of Change, as role models for other students as well as for the surrounding communities; and (3) Future Leaders, to become future leaders in various sectors.

The GenBI program among others is carried out in a form of trainings and leadership camps, writing and public speaking workshops, sharing sessions with members of the Board of Governors as well as public figures, internship at Bank Indonesia as well as in a number of national and multinational companies.

Throughout 2015, there were 410 GenBI activities, 55 of which were writing and public speaking workshops, training of trainers on central banking, as well as leadership training and capacity building. Other activities included social affair activities including education, entrepreneurship economy, living environment, and public health.

Infografis 15. Penerima Manfaat PSBI Tahun 2015
Infographic 15. PSBI Beneficiaries in 2015



Predator Penjaga Sawah

Paddy Field Predator Guards

DESA Maos Kidul, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, sangat ideal dijadikan persawahan. Namun hama tikus membuat petani kerap mengalami gagal panen.

Sudah bertahun-tahun petani di Desa Maos Kidul, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, resah. Keberadaan hama tikus kerap membuat jerih payah mereka sirna. Bukannya untung besar, sebagian sawah mereka malah gagal panen gara-gara serangan hama tikus.

“Bertahun-tahun petani di sini berusaha mengusir hama tikus yang merusak tanaman padi. Tikus itu selalu menggerogoti batang padi hingga merusak 40-60 persen padi yang ada di sawah,” kata Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sumber Makmur, Sudarjo.

Setelah sekian lama mencari solusi untuk memberantas tikus, harapan pun mencuat di kalangan petani. Sudarjo mendapat informasi mengenai penanganan hama tikus dengan menggunakan hewan pemangsa *tyto alba* atau Serak Jawa yang dikenal sebagai burung hantu putih.

Cara itu membuat para petani menaruh perhatian terhadap keberadaan burung hantu putih. Sang predator malam itu juga harus dibuatkan kandang. Jika tidak, hewan itu biasanya bersarang pada lubang pohon besar atau rumah kosong yang jauh dari area persawahan. Mereka pun harus memperhatikan kebutuhan hewan malam tersebut sekaligus menjadi sahabatnya.

Kandang sederhana berbahan bambu dan kotak kayu bekas yang sawahnya dikenal dengan istilah *rubuha* atau rumah burung hantu pun dibuat.

MAOS Kidul Village in Maos District, Cilacap Regency, is very ideal for paddy field. But rats caused the farmers often had crop failure.

It has been years the farmers in Maos Kidul Village in Maos District, Cilacap Regency, felt restless. The existence of rats could make their efforts vanished. Instead of making profit, some paddy fields suffered crop failure due to rat attacks.

“For years the farmers here tried to shoo rats which destroyed the paddy. Rats always gnawed on paddy straw and damaged 40-60 percent paddy in the field,” said Chairman of the Farmer Union (Gapoktan) Sumber Makmur, Sudarto.

*After a long time looking for solutions to exterminate rats, hopes arose among the farmers. Sudarto received information on handling rats using *tyto alba* predator or Serak Jawa or known as white owl.*

That made the farmers pay attention to the existence of white owl. The night predator must be made a cage. Otherwise, it nested on large tree holes or empty houses far away from paddy field. They had to pay attention the the animal needs as well as becoming its best friend.

*Simple cage made of bamboo and used boxes is known as *rubuha* or owl place.*



Namun persoalan lain muncul tatkala kandang tersebut cepat rusak, bahkan cenderung rawan roboh. Upaya mengusir hama tikus pun belum menuai hasil yang memuaskan.

Melihat hal tersebut, Bank Indonesia Purwokerto berinisiatif untuk memberikan perhatian serius terhadap cara baru membasmi hama tikus itu dengan membangun 50 unit *rubuha* permanen yang dibuat senyaman mungkin, kini keberadaan burung hantu putih bertahan lama dan hama tikus menurun drastis.

Tiang penyangganya terbuat dari beton dengan pondasi cakar ayam dan tinggi 4 meter dari permukaan tanah. Atap *rubuha* dibuat dari kayu yang dilapisi kawat dan semen agar tidak panas saat siang hari.

Pintu masuk juga menghadap ke utara atau selatan agar dapat menghalau masuknya sinar matahari.

However other issues arose when the cage was easily broken, even prone to collapse. Efforts to shoo the rats did not reap good result.

*Seeing the conditions, Bank Indonesia Purwokerto made initiative to pay serious attention to new way destroying the rats by making 50 units of permanent *rubuha* which were made as comfortable as possible, now the existence of white owls was long-lasting while rats drastically dropped.*

*The pillar is made of concrete with chicken-feet foundations and 4 meters high above ground level. *Rubuha* shelter is made of wood covered by wire and cement so it is not hot during the day.*

The entrance is facing north or south to prevent sunlight from entering.

Rubuha ditempatkan di tengah sawah. Jarak satu sama lain sekitar 50-75 meter. Tujuannya agar masing-masing burung hantu putih punya wilayah teritorial masing-masing.

Rubuha-rubuha itu kemudian tersebar di area seluas 1,7 kilometer x 2 kilometer. Sekitar 100 burung hantu putih pun bersarang dan siap menghadang serangan hama tikus.

Pola tersebut terbukti berhasil. Setelah dua kali musim panen, padi yang dihasilkan jauh lebih produktif karena tak ada lagi hama tikus. Bahkan Desa Maos Kidul jadi penghasil padi dengan produktivitas paling tinggi di Kabupaten Cilacap.

Tidak berhenti pada penyediaan sarana kandang, Bank Indonesia Purwokerto pun berinisiatif membangun penangkaran burung hantu putih di Desa Maos Kidul. Penangkaran seluas 6 meter x 9 meter dan tinggi 7 meter itu pun jadi penampungan burung hantu putih yang masih berusia muda.

Penangkaran itu juga jadi tempat tinggal burung hantu putih muda yang terusir dari kandang karena sudah dianggap mandiri oleh induknya. Berbagai fasilitas penunjang pun melengkapi penangkaran tersebut agar burung hantu putih bisa tumbuh dengan baik.

Setelah anak burung hantu putih tumbuh dewasa, mereka siap pindah ke *rubuha* di sekitar sawah dan siap beroperasi sebagai "tim tempur" para petani.

"Fasilitas dari Bank Indonesia ini sangat luar biasa dan menjadi hal yang ditunggu oleh masyarakat petani padi seperti kami. Manfaatnya sangat terasa bagi kehidupan kami dan keluarga," tutur Sudarjo.

Rubuha is placed in the middle of the field. The distance between each other is about 50-75 meters. The aim is so that each white owl has its own territorial zones.

Rubuha is spread in areas of 1.7 kilometer x 2 kilometer. Around 100 white owl were ready to nest and blocking rat attacks.

The pattern was proven successfully. After two harvest seasons, paddy produced was more productive due to no rats. Even Maos Kidul Village became paddy producer with the highest productivity in Cilacap Regency.

Not only providing cages, Bank Indonesia Purwokerto also initiated to build white owl captivity in Maos Kidul Village. The captivity with measurement of 6 meters x 9 meters and height of 7 meters became the care for young white owl.

The captivity can also be a place for young white owl which is evicted from the cage because it is considered independent by the mother. Several supporting facilities complete the captivity so that white owl can grow well.

After the young white owls growing up, they are ready to move to rubuha around the paddy field and ready to operate as the farmers "combat team".

"This is a very good facility from Bank Indonesia and one that paddy farmers like us have been waiting for. It brings direct benefits to us and our families in our lives," says Sudarjo.

Apa yang dilakukan Bank Indonesia Purwokerto menginspirasi Pemerintah Kabupaten Cilacap. Melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Cilacap mencoba mengembangkan *rubuha* di kawasan Cilacap Barat agar hasil pertanian bisa semakin meningkat.

Through the Regional Budget (APBD), Cilacap Regency Government tried to develop rubuha in West Cilacap so as to increase agriculture results.



Organisasi Bank Indonesia

Bank Indonesia Organization



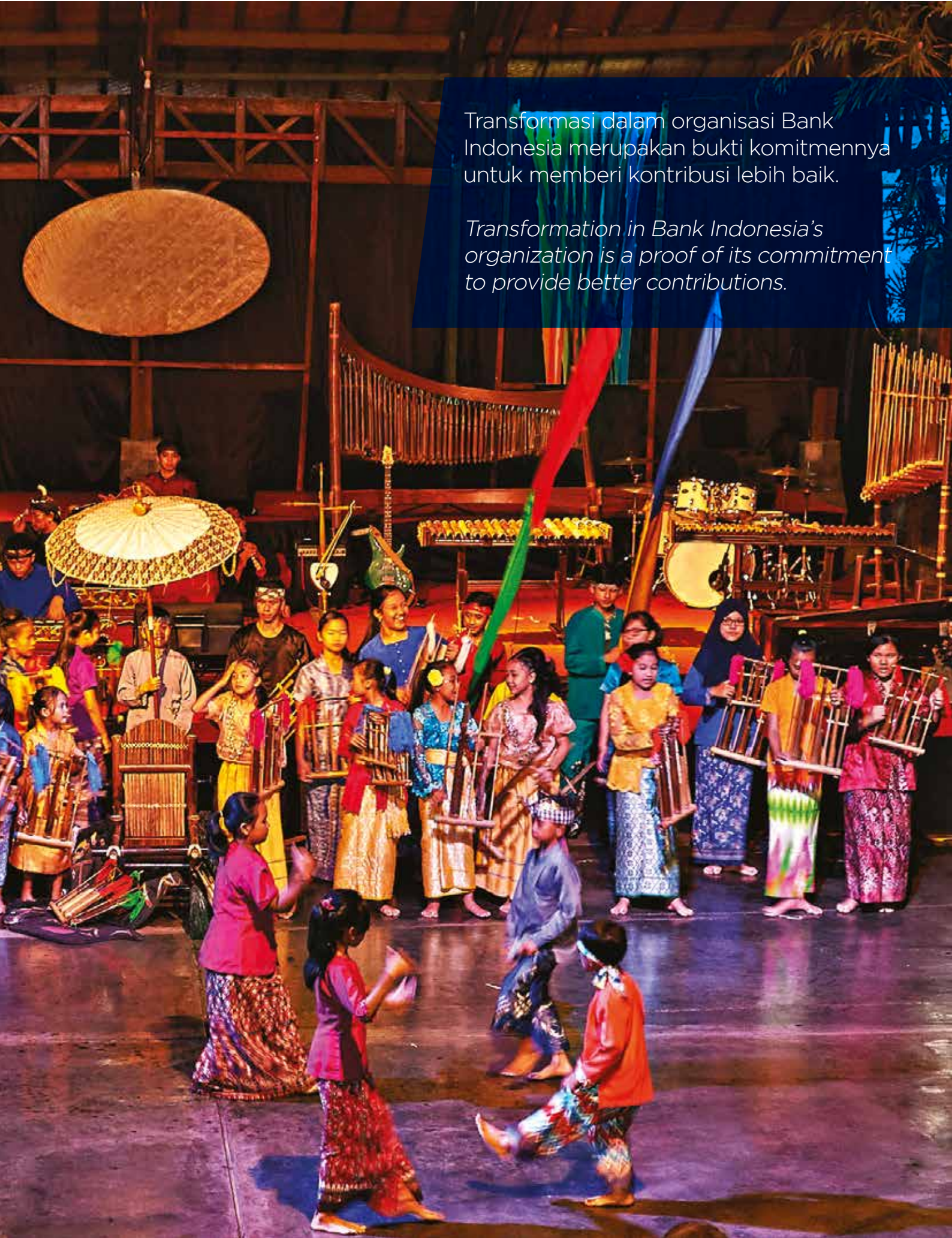
“ Menghadapi tantangan pelaksanaan tugas, Bank Indonesia juga melakukan penguatan organisasi dan kapabilitas internal sebagai bagian pelaksanaan program transformasi untuk mewujudkan Visi Bank Indonesia 2024.

Facing challenges in task implementation, Bank Indonesia also strengthens organization and internal capability as part of its transformation program implementation to realize Bank Indonesia's Vision 2024.

”

Transformasi dalam organisasi Bank Indonesia merupakan bukti komitmennya untuk memberi kontribusi lebih baik.

Transformation in Bank Indonesia's organization is a proof of its commitment to provide better contributions.





Organisasi Bank Indonesia

Bank Indonesia Organization

Bank Indonesia mencanangkan program transformasi melalui Arsitektur Fungsi Strategis BI (AFSBI) 2024 dengan lima tema, yaitu: *Policy Excellence, Outstanding Execution, Institutional Leadership, Motivated Organization, dan State-of-the-Art of Technology*. Implementasi program transformasi merupakan komitmen seluruh jajaran Bank Indonesia untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan pelaksanaan tugas.

Bank Indonesia establishes a transformation program through the BI Strategic Function Architecture (AFSBI) 2021 under five themes: Policy Excellence, Outstanding Execution, Institutional Leadership, Motivated Organization, and State-of-the-Art of Technology. The implementation of transformation program is the commitment of all employees of Bank Indonesia to prepare themselves in facing task implementation challenges.

Kurang dari satu dekade terakhir, perekonomian dunia telah menghadapi beberapa ancaman krisis. Semakin sering munculnya potensi krisis, seiring dengan cepatnya inovasi yang terjadi di sektor keuangan dunia, menunjukkan betapa pentingnya peranan otoritas keuangan dan moneter untuk dapat menjaga kestabilan perekonomian dunia.

Di era globalisasi ini, Indonesia tidak luput dari dampak yang terjadi di perekonomian dunia. Sepanjang tahun 2015, Bank Indonesia terus berupaya menjaga kestabilan perekonomian dalam negeri dengan menjaga nilai tukar Rupiah melalui berbagai kebijakan, serta tetap mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan-kebijakan makroprudensial.

Menyadari pentingnya peranan bank sentral dalam menjaga arah perekonomian sebuah negara, pada tahun 2015 Bank Indonesia memulai implementasi program transformasi melalui Arsitektur Fungsi Strategis BI (AFSBI) 2024, dengan lima tema, yaitu: *Policy Excellence, Outstanding Execution, Institutional Leadership, Motivated Organization, dan State-of-the-Art of Technology.*

Less than a past decade, the world's economy has faced several crises. The more frequent crisis potentials, along with faster innovations in the global financial sector, show the importance of monetary and financial authorities' role in maintaining the stability of world's economy.

In this globalization era, Indonesia is impacted by the occurrences in the world's economy. In 2015, Bank Indonesia strived to maintain domestic economic stability by maintaining the Rupiah exchange rate through various policies, as well as maintaining economic momentum through macroprudential policies.

Knowing the importance of a central bank role in navigating the economic direction of a country, in 2015 Bank Indonesia began the implementation of transformation program through BI Strategic Function Architecture (AFSBI) 2024, with five themes: Policy Excellence, Outstanding Execution, Institutional Leadership, Motivated Organization, and State-of-the-Art Technology.

140

198

216

233

Implementasi program transformasi merupakan komitmen seluruh jajaran Bank Indonesia untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan pelaksanaan tugas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun Bank Indonesia Institute pada tahun 2015 sebagai pusat pendidikan, riset, dan pengembangan kepemimpinan mengenai kebanksentralan dan ekonomi serta keuangan.

Selain itu dilakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang lebih efektif melalui penyusunan jalur karir yang baru dan pergerakan talenta, serta sistem penilaian jabatan yang selaras dengan sistem remunerasi. Penilaian kinerja pun disempurnakan guna mendapatkan hasil yang terbaik dan representatif di Bank Indonesia.

The implementation of transformation program is a commitment of all Bank Indonesia levels to prepare themselves in facing challenges in task implementation. One of the efforts made was building the Bank Indonesia Institute in 2015 as a center of education, research, and leadership development on central banking and economics as well as finance.

In addition, the management of Human Resources was done in more effective way by establishing a new career path and talent movement, as well as a position scoring system in line with the remuneration system. Performance assessment was improved to get the best and most representative results in Bank Indonesia.

Sekilas Perjalanan

Brief History

1828

Sejarah Bank Indonesia dimulai dari pendirian De Javasche Bank N.V. oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1828. De Javasche Bank berfungsi sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.

The history of Bank Indonesia began with the establishment of De Javasche Bank N.V. by the Government of the Dutch East Indies in 1828. De Javasche Bank functioned as a circulation bank with the duty of printing and circulating money.

1953

Setelah Indonesia merdeka, dilakukan proses nasionalisasi terhadap De Javasche Bank. Pada 15 Desember 1951, diumumkan Undang-Undang tentang nasionalisasi De Javasche Bank. Selanjutnya, pada 29 Mei 1953, Presiden mengesahkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia dan sejak 1 Juli 1953, bangsa Indonesia memiliki sebuah bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan tugas Bank Indonesia yakni menjaga stabilitas Rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit dan bank, serta melakukan pengawasan pada urusan kredit.

De Javasche Bank was nationalised after Indonesian independence. Laws concerning the Nationalisation of De Javasche Bank were announced on 15th December 1951. Subsequently, the President approved the Bank Indonesia Act on 29th May 1953, and since 1st July 1953 the nation has a central bank named Bank Indonesia. Act No. 11 of 1953 on Establishing the Principle Act of Bank Indonesia specified the duties of Bank Indonesia, namely to maintain Rupiah stability, to issue Rupiah currency, to advance credit and bank development as well as to supervise credit affairs.

1968

Tahun 1968 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang bank Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, diatur mengenai kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Dalam Undang-Undang tersebut, selain melaksanakan tiga tugas pokok, Bank Indonesia bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan dengan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Indonesia juga memiliki fungsi yang lain yakni sebagai pemegang kas pemerintah, menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah, dan berkewajiban membantu pemerintah dalam menempatkan surat-surat utang negara.

The Bank Indonesia Act was amended in 1968. Through Act No. 13 of 1968 on the Central Bank, the status and duties of Bank Indonesia as a central bank were separated from commercial banks. Accordingly, in addition to the three basic tasks, Bank Indonesia also assisted the government as an agent of development to foster smooth production and development along with expanding employment opportunities to ameliorate national living standards. Bank Indonesia also carried the distinction as the government cash administrator, disbursing government transfers and assisting the government in the placement of government securities.

2015

Dimulainya implementasi program transformasi menuju Visi Bank Indonesia 2024.

Commencing the implementation of transformation program towards Bank Indonesia 2024 Vision.

Merupakan tahun awal bagi Bank Indonesia menjalankan peran baru sebagai otoritas makroprudensial. Dengan peran tersebut, Bank Indonesia memperkuat stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Kebijakan Makroprudensial oleh Bank Indonesia untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik dan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor perekonomian. Kebijakan makroprudensial juga untuk meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran.

The first year of Bank Indonesia's new duties as the macroprudential authority. In accordance with its new duties, Bank Indonesia strengthened financial system and payment system stability. The macroprudential policy of Bank Indonesia was to prevent and reduce systemic risk as well as to nurture balanced intermediation amongst economic sectors. Macroprudential policy also aims to enhance efficiency and access to the financial system in order to maintain financial system stability as well as support monetary and payment system stability.

2014

Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, Bank Indonesia mengalihkan tugas pengawasan dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan ke OJK. Dengan pengalihan tugas tersebut, Bank Indonesia melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan makroprudensial, sementara OJK melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan mikroprudensial.

On 31st December 2013, Bank Indonesia officially handed over the regulation and supervision of financial services activity in the banking sector to the Financial Services Authority (OJK). Consequently, Bank Indonesia was responsible for macroprudential regulation and supervision, while the Financial Services Authority (OJK) handled microprudential regulation and supervision.

2013

1999

Tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia kembali diamandemen dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut, ditegaskan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di luar pemerintah. Selain itu, ditetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

The year of 1999 was the start of a new chapter in the history of Bank Indonesia. The Bank Indonesia Act was amended by Act No. 23 of 1999, which emphasised Bank Indonesia's status as an independent state institution free from government interference in performing its duties and authority. In addition, the single objective of Bank Indonesia, namely to achieve and maintain Rupiah stability, was established.

2002

Keberadaan bank sentral sebagai otoritas moneter yang independen diperkuat melalui amandemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pada Pasal 24D, disebutkan bahwa "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang".

The presence of an independent central bank as the monetary authority was strengthened through the fourth amendment to the 1945 Constitution. Article 24D states that "the country has a central bank, for which the structure, status, authority, responsibility and independence are regulated by virtue of law".

2004

Kedudukan Bank Indonesia kembali diperkuat melalui amandemen Undang-Undang Bank Indonesia. Pada 2004, diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang yang baru tersebut, dipertegas kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen serta dilakukan penyempurnaan atas pengaturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penataan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia.

The status of Bank Indonesia was strengthened through an amendment to the Bank Indonesia Act. Consequently, Act No. 3 of 2004, as an amendment to Act No. 23 of 1999, was issued, reiterating Bank Indonesia's status as an independent central bank. The new regulation also refined provisions concerning task implementation and authority, including the supervision of Bank Indonesia.

2011

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

The House of Representatives of the Republic of Indonesia formally enacted the Financial Services Authority (OJK) Act. Consequently, as of 31st December 2013, the regulation and supervision of financial services activity in the banking sector was handed over from Bank Indonesia to the OJK.

2009

Tahun 2009, Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai Undang-Undang Bank Indonesia. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2009, berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 2 of 2008, as the second amendment of Act No. 23 of 1999, was enacted as the Bank Indonesia Act. Consequently, effective from 13th January 2009, Act No. 6 of 2009 superseded Perpu No. 2 of 2008 as the second amendment to Act No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia.

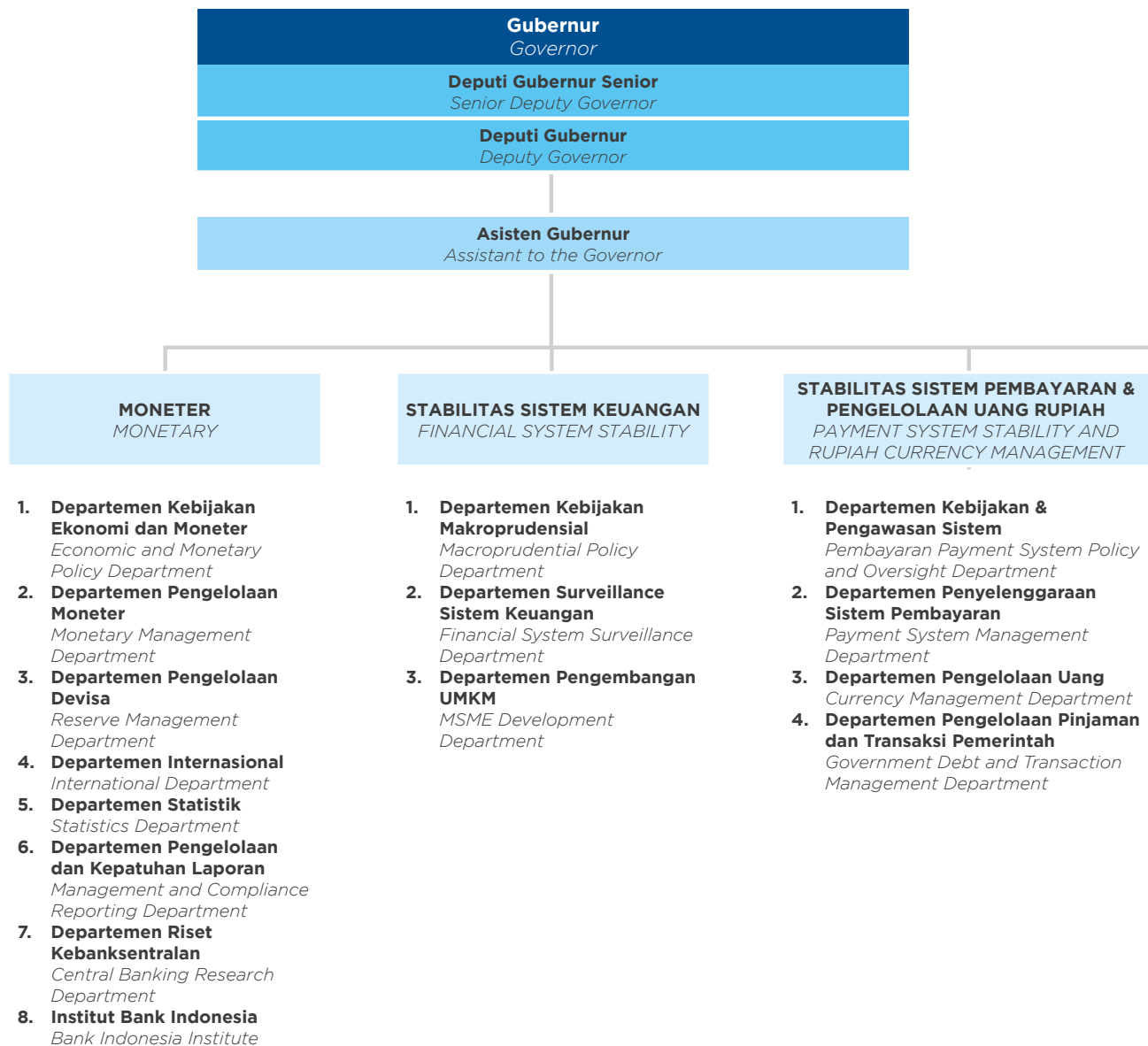
2008

Terjadinya krisis ekonomi global mendorong pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Penerbitan Perpu tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui perluasan akses pendanaan bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.

The global economic crisis compelled the government to implement various policy measures to preserve public confidence in the banking industry. One such measure was to issue Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 2 on the Second Amendment of Act No. 23 of 1999 on Bank Indonesia. The new regulation aimed to enhance national bank resilience to the global crisis by broadening access to funds for banks experiencing short-term liquidity mismatch.

Struktur Organisasi

Organizational Structure



MANAJEMEN INTERN
INTERNAL MANAGEMENT

- 1. Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola**
Strategic Management and Governance Department
- 2. Departemen Komunikasi**
Communication Department
- 3. Departemen Manajemen Risiko**
Risk Management Department
- 4. Departemen Sumber Daya Manusia**
Human Resources Department
- 5. Departemen Keuangan Intern**
Finance Department
- 6. Departemen Pengelolaan Sistem Informasi**
Information System Management Department
- 7. Departemen Audit Intern**
Internal Audit Department
- 8. Departemen Hukum**
Legal Affairs Department
- 9. Departemen Logistik dan Pengamanan**
Logistic and Security Department
- 10. Departemen Pengelolaan Aset**
Asset Management Department
- 11. Pusat Program Transformasi Bank Indonesia**
Center of BI Transformation Program

JARINGAN KANTOR
OFFICE NETWORK

REGIONAL
REGIONAL

- 1. Departemen Regional**
Regional Department
 - Regional I (Sumatera)**
Regional I (Sumatera)
 - Regional II (Jawa)**
Regional II (Java)
 - Regional III (Kalimantan)**
Regional III (Kalimantan)
 - Regional IV (Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara)**
Regional IV (Sulawesi, Maluku, Papua, Bali and Nusa Tenggara)
- 2. Kantor Perwakilan**
Regional Offices
 - 33 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi**
33 Bank Indonesia Provincial Regional Offices
 - 12 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota/Kabupaten**
12 Bank Indonesia City/Regency Regional Offices

LUAR NEGERI

Overseas

- 1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia London**
Bank Indonesia Representative Office London
- 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York**
Bank Indonesia Representative Office New York
- 3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Singapura**
Bank Indonesia Representative Office Singapore
- 4. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tokyo**
Bank Indonesia Representative Office Tokyo

Pemimpin Satuan Kerja

Department Heads

Satuan Kerja Kantor Pusat/Work Units at Head Office

Moneter Monetary	
• Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter <i>Economic and Monetary Policy Department</i>	: Juda Agung
• Departemen Pengelolaan Moneter <i>Monetary Management Department</i>	: Doddy Zulverdi
• Departemen Pengelolaan Devisa <i>Reserve Management Department</i>	: Budianto
• Departemen Internasional <i>International Department</i>	: Aida S. Budiman
• Departemen Statistik <i>Statistics Department</i>	: Hendy Sulistiowati
• Departemen Pengelolaan Kepatuhan Laporan <i>Management and Compliance Reporting Department</i>	: Wiwiek Sisto Widayat
• Departemen Riset Kebanksentralan <i>Central Banking Research Department</i>	: Darsono
• Institut Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Institute</i>	: Sugeng
Stabilitas Sistem Keuangan Financial System Stability	
• Departemen Kebijakan Makroprudensial <i>Macroprudential Policy Department</i>	: Filianingsih Hendarta
• Departemen Surveillance Sistem Keuangan <i>Financial System Surveillance Department</i>	: Agusman
• Departemen Pengembangan UMKM <i>Financial Access and SME Development Department</i>	: Yunita Resmi Sari
Sistem Pembayaran & Pengelolaan Rupiah Payment System & Rupiah Currency Management	
• Departemen Kebijakan & Pengawasan Sistem Pembayaran <i>Payment System Policy and Oversight Department</i>	: Eni V. Panggabean
• Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran <i>Payment System Management Department</i>	: Bramudija Hadinoto
• Departemen Pengelolaan Uang <i>Currency Management Department</i>	: Suhaedi
• Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah <i>Government Debt and Transaction Management Department</i>	: Dyah N.K. Makhijani
Manajemen Intern Internal Management	
• Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola <i>Strategic Management and Governance Department</i>	: Dody Budi Waluyo
• Departemen Komunikasi <i>Communication Department</i>	: Tirta Segara

Manajemen Intern Internal Management	
• Departemen Manajemen Risiko <i>Risk Management Department</i>	: Hariyadi Ramelan
• Departemen Sumber Daya Manusia: <i>Human Resources Department</i>	: Damayanti Johan
• Departemen Keuangan Intern <i>Finance Department</i>	: Mubarakah
• Departemen Pengelolaan Sistem Informasi <i>Information System Management Department</i>	: Diah P.B.A. Lubis
• Departemen Audit Intern <i>Internal Audit Department</i>	: Dyah Virgoana Gandhi
• Departemen Hukum <i>Legal Affairs Department</i>	: Rosalia Suci H.
• Departemen Logistik dan Pengamanan <i>Logistic and Security Department</i>	: Heru Pranoto
• Departemen Pengelolaan Aset <i>Asset Management Department</i>	: Wahyudi Santoso
• Pusat Program Transformasi Bank Indonesia <i>Center of BI Transformation Program</i>	: Onny Widjanarko

Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Dalam Negeri/*Bank Indonesia Regional Representative Offices*

Regional I (Sumatera) Regional I (Sumatera)	
Departemen Regional I <i>Regional I Department</i>	: Dian Ediana Rae
• KPw BI Provinsi Aceh <i>BI Regional Office Province Aceh</i>	: Ahmad Farid
• KPw BI Provinsi Sumatera Utara <i>BI Regional Office Province North Sumatera</i>	: Difi A. Johansyah
• KPw BI Provinsi Sumatera Barat <i>BI Regional Office Province West Sumatera</i>	: Puji Atmoko
• KPw BI Provinsi Riau <i>BI Regional Office Province Riau</i>	: Ismet Inono
• KPw BI Provinsi Kepulauan Riau <i>BI Regional Office Province Riau Islands</i>	: Gusti Raizal Eka Putra
• KPw BI Provinsi Jambi <i>BI Regional Office Jambi</i>	: V. Carlusa
• KPw BI Provinsi Sumatera Selatan <i>BI Regional Office Province South Sumatera</i>	: Hamid Ponco Wibowo
• KPw BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung <i>BI Regional Office Province Bangka Belitung Islands</i>	: Bayu Martanto
• KPw BI Provinsi Bengkulu <i>BI Regional Office Province Bengkulu</i>	: Bambang Himawan
• KPw BI Provinsi Lampung <i>BI Regional Office Province Lampung</i>	: Mahirsyah Emil Akbar
• KPw BI Lhokseumawe <i>BI Regional Office Lhokseumawe</i>	: Yufrizal
• KPw BI Pematang Siantar <i>BI Regional Office Pematang Siantar</i>	: Elly Tjan
• KPw BI Sibolga <i>BI Regional Office Sibolga</i>	: Mohammad Junaifin

Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Dalam Negeri/Bank Indonesia Regional Representative Offices

Regional II (Jawa) Regional II (Java)	
Departemen Regional II <i>Regional II Departement</i>	: Dwi Pranoto
• KPw BI Provinsi Banten <i>BI Regional Office Province Banten</i>	: Budiharto Setyawan
• KPw BI Provinsi Jawa Barat <i>BI Regional Office Province West Java</i>	: Rosmaya Hadi K.
• KPw BI Daerah Khusus Ibukota Jakarta <i>BI Regional Office DKI Jakarta</i>	: Doni Primanto Joewono
• KPw BI Provinsi Jawa Tengah <i>BI Regional Office Province Central Java</i>	: Iskandar Simorangkir
• KPw BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta <i>BI Regional Office Special Province of Yogyakarta</i>	: Arief Budi Santoso
• KPw BI Provinsi Jawa Timur <i>BI Regional Office Province East Java</i>	: Benny Siswanto
• KPw BI Cirebon <i>BI Regional Office Cirebon</i>	: Mohamad Abdul Majid Ikram
• KPw BI Tasikmalaya <i>BI Regional Office Tasikmalaya</i>	: Wahyu Purnama A.
• KPw BI Purwokerto <i>BI Regional Office Purwokerto</i>	: Ramdan Denny Prakoso
• KPw BI Solo <i>BI Regional Office Solo</i>	: Bandoe Widiarto
• KPw BI Tegal <i>BI Regional Office Tegal</i>	: Joni Marsius
• KPw BI Jember <i>BI Regional Office Jember</i>	: Achmad Bunyamin
• KPw BI Kediri <i>BI Regional Office Kediri</i>	: Djoko Raharto
• KPw BI Malang: <i>BI Regional Office Malang</i>	: Dudi Herawadi
Regional III (Kalimantan) Regional III (Kalimantan)	
Departemen Regional III <i>Regional III Department</i>	: R. Mirmansyah
• KPw BI Provinsi Kalimantan Barat <i>BI Regional Office Province West Kalimantan</i>	: Dwi Suslamanto
• KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan <i>BI Regional Office South Kalimantan</i>	: Harymurthy Gunawan
• KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah <i>BI Regional Office Province Central Kalimantan</i>	: Muhamad Nur
• KPw BI Provinsi Kalimantan Timur <i>BI Regional Office Province East Kalimantan</i>	: Mawardi B.H. Ritonga
• KPw BI Balikpapan <i>BI Regional Office Balikpapan</i>	: Suharman Tabrani

Regional IV (Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara)
Regional IV (Sulawesi, Maluku, Papua, Bali and Nusa Tenggara)

Departemen Regional IV: <i>Regional IV Department</i>	: Rizal Anwar Djaafara
• KPw BI Provinsi Sulawesi Utara <i>BI Regional Office Province North Sulawesi</i>	: Peter Jacobs
• KPw BI Provinsi Gorontalo <i>BI Regional Office Province Gorontalo</i>	: Suryono
• KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah <i>BI Regional Office Province Central Sulawesi</i>	: Purjoko
• KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan <i>BI Regional Office Province South Sulawesi</i>	: Mokhammad Dadi Aryadi
• KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara <i>BI Regional Office Province Southeast Sulawesi</i>	: Dian Nugraha
• KPw BI Provinsi Sulawesi Barat <i>BI Regional Office Province West Sulawesi</i>	: Asep Budi Brata
• KPw BI Provinsi Maluku Utara <i>BI Regional Office Province North Maluku</i>	: Dwi Tugas Waluyanto
• KPw BI Provinsi Maluku <i>BI Regional Office Province Maluku</i>	: Wuryanto
• KPw BI Provinsi Papua <i>BI Regional Office Province Papua</i>	: Joko Supratikto
• KPw BI Provinsi Papua Barat <i>BI Regional Office Province West Papua</i>	: Henri N. Tanor
• KPw BI Provinsi Bali <i>BI Regional Office Province Bali</i>	: Dewi Setyowati
• KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat <i>BI Regional Office Province West Nusa Tenggara</i>	: Prijono
• KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur <i>BI Regional Office Province East Nusa Tenggara</i>	: Naek Tigor Sinaga

Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Luar Negeri/Bank Indonesia Overseas Representative Offices

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw) di Luar Negeri Bank Indonesia
Overseas Representative Offices

• KPw BI London: <i>BI Representative Office London</i>	: Endy Dwi Tjahjono
• KPw BI New York: <i>BI Representative Office New York</i>	: Erwin Haryono
• KPw BI Singapura: <i>BI Representative Office Singapore</i>	: Bambang Kusmiarso
• KPw BI Tokyo: <i>BI Representative Office Tokyo</i>	: Reza Anglingkusumo

Peta Wilayah Kerja

Working Area Map



REGIONAL I (Wilayah Sumatera I Sumatera Area)

- KPw BI Provinsi Aceh
BI Regional Office Province Aceh
- KPw BI Lhokseumawe
BI Regional Office Lhokseumawe
- KPw BI Provinsi Sumatera Utara
BI Regional Office Province North Sumatera
- KPw BI Pematang Siantar
BI Regional Office Pematang Siantar
- KPw BI Sibolga
BI Regional Office Sibolga
- KPw BI Provinsi Sumatera Barat
BI Regional Office Province West Sumatera
- KPw BI Provinsi Riau
BI Regional Office Province Riau
- KPw BI Provinsi Kepulauan Riau
BI Regional Office Province Riau Islands
- KPw BI Provinsi Jambi
BI Regional Office Province Jambi
- KPw BI Provinsi Sumatera Selatan
BI Regional Office Province South Sumatera
- KPw BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BI Regional Office Province Bangka Belitung Islands
- KPw BI Provinsi Bengkulu
BI Regional Office Province Bengkulu
- KPw BI Provinsi Lampung
BI Regional Office Province Lampung



REGIONAL III (Wilayah Kalimantan I Kalimantan Area)

- KPw BI Provinsi Kalimantan Barat
BI Regional Office Province West Kalimantan
- KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan
BI Regional Office Province South Kalimantan
- KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah
BI Regional Office Province Central Kalimantan
- KPw BI Provinsi Kalimantan Timur
BI Regional Office Province East Kalimantan
- KPw BI Balikpapan
BI Regional Office Balikpapan



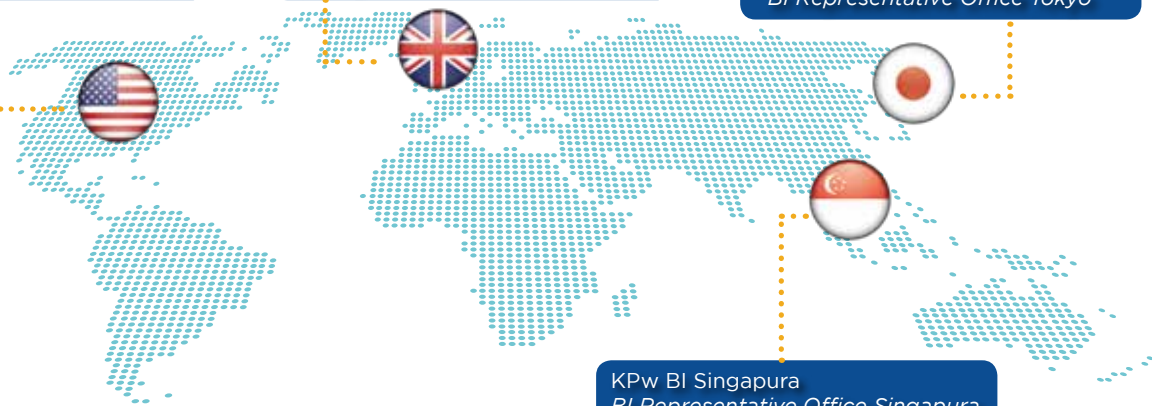
REGIONAL II (Wilayah Jawa I Java Area)

- KPw BI Provinsi Banten
BI Regional Office Province Banten
- KPw BI Provinsi Jawa Barat
BI Regional Office Province West Java
- KPw BI Daerah Khusus Ibukota Jakarta
BI Regional Office DKI Jakarta
- KPw BI Cirebon
BI Regional Office Cirebon
- KPw BI Tasikmalaya
BI Regional Office Tasikmalaya
- KPw BI Provinsi Jawa Tengah
BI Regional Office Province Central Java
- KPw BI Purwokerto
BI Regional Office Purwokerto
- KPw BI Solo
BI Regional Office Solo
- KPw BI Tegal
BI Regional Office Tegal
- KPw BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
BI Regional Office Special Province of Yogyakarta
- KPw BI Provinsi Jawa Timur
BI Regional Office Province East Java
- KPw BI Jember
BI Regional Office Jember
- KPw BI Kediri
BI Regional Office Kediri
- KPw BI Malang
BI Regional Office Malang

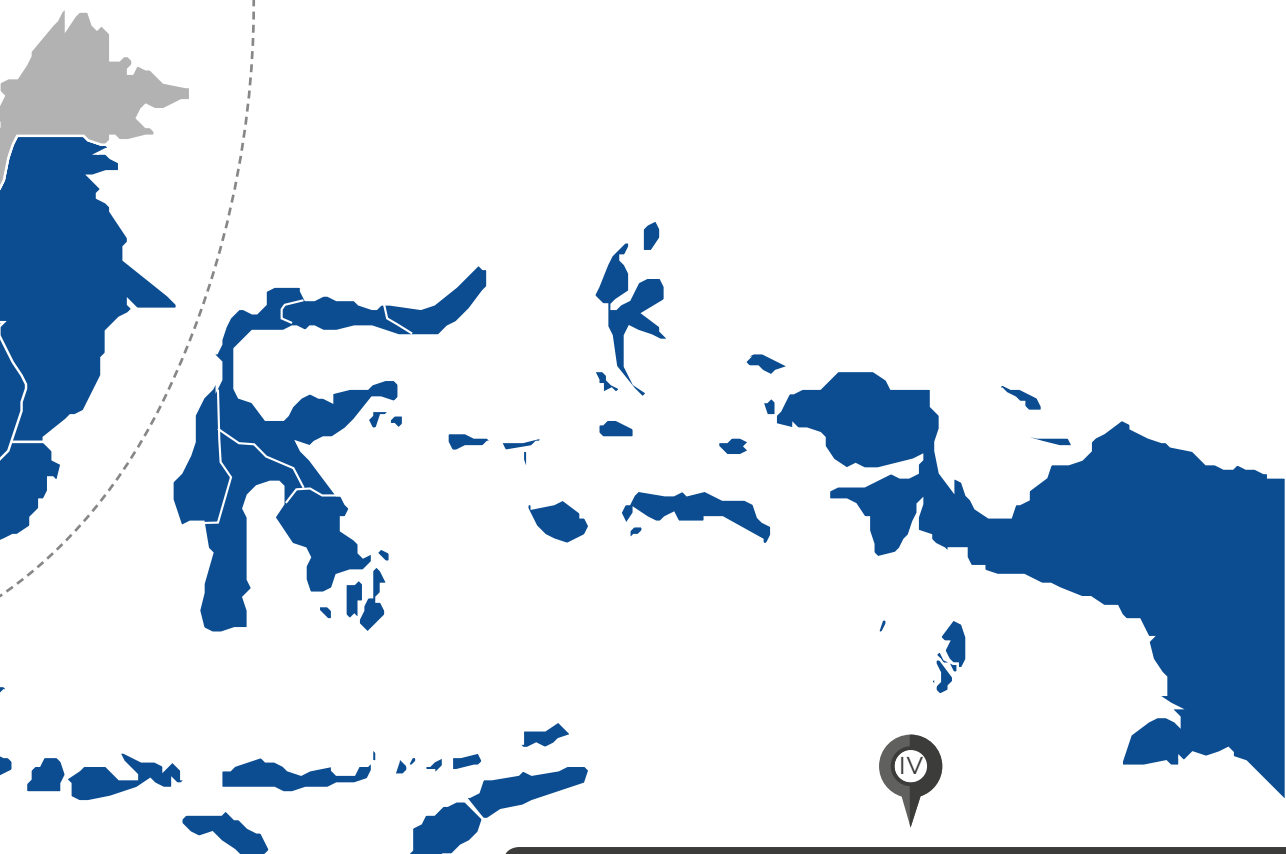
KPw BI New York
BI Representative Office New York

KPw BI London
BI Representative Office London

KPw BI Tokyo
BI Representative Office Tokyo



KPw BI Singapura
BI Representative Office Singapura



REGIONAL IV (Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara)

- KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
BI Regional Office Province North Sulawesi
- KPw BI Provinsi Gorontalo
BI Regional Office Province Gorontalo
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
BI Regional Office Province Central Sulawesi
- KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan
BI Regional Office Province South Sulawesi
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
BI Regional Office Province Southeast Sulawesi
- KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
BI Regional Office Province West Sulawesi
- KPw BI Provinsi Maluku Utara
BI Regional Office Province North Maluku
- KPw BI Provinsi Maluku
BI Regional Office Province Maluku
- KPw BI Provinsi Papua
BI Regional Office Province Papua
- KPw BI Provinsi Papua Barat
BI Regional Office Province West Papua
- KPw BI Bali
BI Regional Office Province Bali
- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
BI Regional Office Province West Nusa Tenggara
- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur
BI Regional Office Province East Nusa Tenggara

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, yang meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

Penyajian laporan keuangan Bank Indonesia:

- Tidak dimaksudkan untuk mengukur pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, karena stabilitas nilai Rupiah tidak dapat diukur dalam satuan mata uang.
- Tidak dimaksudkan untuk menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. Meskipun penggunaan sumber daya oleh Bank Indonesia dapat diukur dalam satuan mata uang tetapi pencapaian tujuannya tidak dapat diukur dalam satuan mata uang. Oleh sebab itu, tidak dapat dilakukan perhitungan efisiensi dalam ukuran perbandingan nilai keuangan dari tujuan terhadap biaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun dampak keuangan dari upaya Bank Indonesia untuk mencapai tujuannya dapat diukur dalam satuan mata uang, sehingga Laporan Keuangan Bank Indonesia dapat digunakan untuk mengukur dampak keuangan dari upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia tersebut.

The objective of the financial statements of Bank Indonesia is to demonstrate the achievements of the management and the fulfillment of management's responsibilities on financial resources use in achieving and maintaining the stability of the Rupiah, which includes information on the impacts of policies on the financial position of Bank Indonesia and the surplus/deficit of Bank Indonesia.

The presentation of Bank Indonesia's financial statements:

- Cannot be intended to assess the level of achievement of Bank Indonesia's objective, namely Rupiah stability, since it is incapable of being assessed in solely monetary terms.
- Cannot be intended to provide information on efficiency or otherwise in the use of resources in achieving the objective of Bank Indonesia. Although the use of resources by Bank Indonesia may be measured in monetary terms, but the achievement of its objective cannot be measured in monetary terms. Consequently, efficiency cannot be assessed by comparing the level of achievement of Bank Indonesia's objective with the cost incurred in achieving that objective.

Nevertheless, the financial effects of the bulk of endeavors and activities undertaken by Bank Indonesia in achieving its objectives may be measured in monetary terms so that the financial statements of Bank Indonesia can be used to assess the financial effects of Bank Indonesia's efforts to achieve its objective.

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2015	2014 (Disajikan Kembali) (As Restated)	2013	2012	2011
Jumlah Aset/Liabilitas Total Assets/Liabilities	1.906.193.817	1.812.788.971	1.648.675.453	1.519.526.148	1.371.841.819
Modal *) Capital	3.726.349	2.948.029	2.948.029	2.948.029	2.948.029
Jumlah Penghasilan Revenue	121.181.386	93.100.472	71.113.428	40.035.595	17.349.145
Jumlah Beban Expenses	38.827.508	37.674.170	28.915.937	31.939.365	42.562.149
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Surplus (Deficit) Ongoing Year	61.325.477	41.485.699	37.407.095	5.819.693	(25.148.713)

Keterangan Notes:

*) Modal sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
Capital as stipulated within the regulations

Opini Auditor Eksternal (BPK)

External Audit Opinion by The Supreme Audit Agency



Tahun Berturut-turut "Wajar Tanpa Pengecualian"
Years in a Row "Unqualified Opinion"

Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI)

Bank Indonesia Financial Accounting Policy

Mulai Starting from

1st

JANUARI
2014

Bank Indonesia menerapkan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

Bank Indonesia implemented the Bank Indonesia Accounting and Financial Policy as a guideline in preparing financial report

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2015 *Audited*

*Audited Annual Financial Statements of
Bank Indonesia 2015*

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

Laporan Posisi Keuangan <i>Statement of Financial Position</i>	243
Laporan Surplus Defisit <i>Statement of Surplus Deficit</i>	245
Catatan Atas Laporan Keuangan: <i>Notes to Financial Statements:</i>	
A. Informasi Umum <i>General Information</i>	247
B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan <i>Summary of Significant Accounting Policies</i>	258
C. Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>	281
D. Penyajian Kembali Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit <i>Restatements of Financial Position and Surplus Deficit</i>	283
E. Perincian Pos Laporan Keuangan <i>Financial Statement Details</i>	286
F. Transaksi Dengan Pihak Berelasi <i>Transactions with Related Parties</i>	312
G. Komitmen dan Kontinjensi <i>Commitments and Contingencies</i>	312
H. Informasi Lain <i>Other Information</i>	316
Lampiran: Daftar Singkatan <i>Appendix: List of Abbreviations and Acronyms</i>	319

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

*Independent Auditor's Report on the Financial
Statements*



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
THE STATE AUDIT BOARD REPUBLIC OF INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Posisi Keuangan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Laporan Surplus Defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pursuant to Law No. 15/2004 on Audit of State Financial Management and Responsibilities, Law No. 15/2006 on the State Audit Board and Law No. 23/1999 on Bank Indonesia as most recently amended by the Law No. 6/2009, the State Audit Board (BPK) has audited Bank Indonesia's Statement of Financial Position as per December 31, 2015 and 2014 and Statement of Surplus (Deficit) for the years ended on those dates as well as the Notes to the Financial Statements.

Tanggung Jawab Bank Indonesia atas Laporan Keuangan

Bank Indonesia bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Bank Indonesia untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Bank Indonesia's Responsibility for the Financial Statements

It is Bank Indonesia's responsibility to prepare and present the financial statements in a fair manner which subscribe to Bank Indonesia Financial Accounting Policy and Internal Control deemed necessary by Bank Indonesia so that the preparation of the financial statements are free of material misstatements that may have been caused by dishonesties or errors.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Bank Indonesia, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,

The State Audit Board's Responsibility

BPK's responsibility is to express an opinion on the financial statements based on State Financial Audit Standards. By this standard, BPK has to plan and implement an audit so that BPK can obtain reasonable assurances that the statements are free of material misstatements. An audit includes examining evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimations made by Bank Indonesia, evaluating the compliance with laws, the reliability of internal control system which have material impacts on the financial statements,

penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, dan Surplus Defisit untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

Penekanan Suatu Hal

BPK membawa perhatian ke Catatan D laporan keuangan terlampir yang menjelaskan penyajian kembali aset, liabilitas, dan beban imbalan kerja per 31 Desember 2014 sehubungan dengan perubahan PSAK 24.

Hal Lain

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 41/01.b/LHP/XV/04/2016 dan Nomor 41/01.c/LHP/XV/04/2016 tanggal 29 April 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. BPK believes that this audit provide a reasonable basis for our opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements as mentioned above presents fairly, in all material respects, the financial position of Bank Indonesia as on December 31, 2015 and 2014, and the Statements of Surplus (Deficit) of the years ended on those dates are in conformity with Bank Indonesia Financial Accounting Policy.

Emphasis on One Particular Matter

It has been brought to BPK's attention that the Section D of the financial statements contained the restatements of assets, liabilities, and employment benefits as of December 31, 2014 as the result of the changes in PSAK 24.

Other Notes

To obtain reasonable assurances that the financial statements is fairly presented, BPK conducted a compliance audit on internal control systems as well as laws and regulations. The report on finding of our test on the compliance with Bank Indonesia's internal control system and the report on findings of our test on the compliance with laws and regulations in effect, are presented in reports Number 41/01.b/LHP/XV/04/2016 and 41/01.c/LHP/XV/04/2016, both dated April 29, 2016 which are integral parts of these statements.

Jakarta, 29 April 2016
Jakarta, April 29, 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
STATE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Penanggung Jawab Pemeriksaan
Auditor in Charge

ttd
Signed

Slamet Kurniawan, MSc, Ak.
Register Negara Akuntan Nomor RNA-8181
Accountant State Register Number RNA-8181

Laporan Keuangan

Financial Statements

BANK INDONESIA				
LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)		STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2015 and Desember 31, 2014 (in IDR Million)		
	Catatan Notes	2015	2014 (Disajikan Kembali) (As Restated)	
ASET		ASSETS		
1. Emas	B.9, E.1	36.781.172	37.441.928	1. Gold
2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.11, E.2	1.573.395.660	1.490.095.581	2. Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation
2.1 Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	B.11, E.2	153.628.086	134.444.810	2.1 Securities Held and Claims Denominated in Rupiah
2.2 Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah	B.12, E.2	2.327.535	1.403.251	2.2 Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah
2.3 Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	B.11, E.2	1.417.440.039	1.354.247.520	2.3 Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency
3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	B.13, E.3	36.473.988	31.731.041	3. Receivables from the IMF
4. Tagihan	E.4	223.129.030	230.568.589	4. Claims
4.1 Kepada Pemerintah	B.14, E.4	222.720.114	229.135.648	4.1 Claims on the Government
4.2 Kepada Bank	B.15, E.4	408.916	1.432.941	4.2 Claims on Banks
5. Aset Non Kebijakan	E.5	36.413.967	22.878.730	5. Other Assets
5.1 Penyertaan	B.16, E.5	873.541	819.923	5.1 Participating Interest in Domestic and International Institutions
5.2 Aset Keuangan	B.17, E.5	2.107.250	2.122.832	5.2 Other Financial Assets
5.3 Aset Tetap dan Lainnya	B.18, D, E.5	33.433.176	19.935.975	5.3 Property and Equipment
TOTAL ASET		1.906.193.817	1.812.715.869	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements.

BANK INDONESIA				
LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)		STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2015 and Desember 31, 2014 (in IDR Million)		
	Catatan Notes	2015	2014 (Disajikan Kembali) (As Restated)	
LIABILITAS		LIABILITIES		
1. Uang Dalam Peredaran	B.10, E.6	586.775.262	528.549.571	1. Currency in Circulations
2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	B.11, E.7	800.877.864	880.072.254	2. Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation
2.1 Giro Bank	B.11, E.7	392.784.697	362.383.166	2.1 Banks Demand Deposits
2.2 Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah	B.11, E.7	171.340.038	373.103.654	2.2 Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah
2.3 Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Rupiah	B.12, E.7	24.650.570	31.336.162	2.3 Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah
2.4 Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing	B.11, E.7	207.260.164	112.079.884	2.4 Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency
2.5 Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing	B.12, E.7	4.842.395	1.169.388	2.5 Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency
3. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional	B.13, E.8	37.889.219	35.683.248	3. Counterpart of Special Drawing Rights Allocated by the IMF
4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah	B.14, E.9	151.106.418	69.994.425	4. Liabilities to the Government
4.1 Giro	B.14, E.9	151.057.586	69.931.641	4.1 Demand Deposits
4.2 Pinjaman	B.14, E.9	48.832	62.784	4.2 Borrowings from the Government
5. Kewajiban Non Kebijakan	B.20, B.31, B.32, D, E.10	29.589.632	23.869.029	5. Other Liabilities
6. Selisih Revaluasi	B.21, D, E.11	119.877.899	156.573.616	6. Revaluation Reserves
7. Modal	B.22, E.12	3.726.349	2.948.029	7. Capital
8. Akumulasi Surplus (Defisit)	E.13	176.351.174	115.025.697	8. Accumulated Surplus (Deficit)
8.1 Cadangan Umum	E.13	95.818.968	57.397.040	8.1 General Reserves
8.2 Cadangan Tujuan	E.13	19.206.729	16.142.958	8.2 Statutory Reserves
8.3 Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	D, E.13	61.325.477	41.485.699	8.3 Current Year Surplus (Deficit)
TOTAL LIABILITAS		1.906.193.817	1.812.715.869	TOTAL LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.
 See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements.

140

198

216

233

BANK INDONESIA				
LAPORAN SURPLUS DEFISIT Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)		STATEMENT OF SURPLUS DEFICIT For the Period of January 1 to December 31, 2015 and January 1 to December 31, 2014 (in IDR million)		
	Catatan Notes	2015	2014 (Disajikan Kembali) (As Restated)	
PENGHASILAN		REVENUES		
1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter	E.15	117.569.508	89.088.999	1. Monetary Policy Implementation
1.1. Pendapatan Bunga	B.23, E.15	31.754.228	28.831.434	1.1. Interest Income
1.2. Pendapatan Imbalan	B.24, E.15	36.271	0	1.2. Income from Sharia-based Transactions
1.3. Transaksi Aset Keuangan	B.25, E.15	4.792.850	7.924.352	1.3. Net Result of Financial Transactions
1.4. Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing	B.26, E.15	80.670.317	51.971.100	1.4. Net Result of Foreign Currency Transactions
1.5. Lainnya	E.15	315.842	362.113	1.5. Others
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	B.27, E.16	329.836	355.189	2. Payment System Services
3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial	B.28, E.17	268	119	3. Macroeconomic Regulation and Supervision
4. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan	B.29, E.18	245.175	257.038	4. Income from Providing Fund
5. Pendapatan Lainnya	E.19	3.036.599	3.399.127	5. Other Income
JUMLAH PENGHASILAN		121.181.386	93.100.472	TOTAL REVENUES
BEBAN		EXPENSES		
1. Pelaksanaan Kebijakan Moneter	E.20	22.346.172	23.206.834	1. Monetary Policy Implementation
1.1. Beban Bunga	B.23, E.20	20.424.692	21.691.645	1.1. Interest Expenses
1.2. Beban Imbalan	B.24, E.20	1.391.901	1.054.449	1.2. Sharia-based Transaction Expenses
1.3. Lainnya	E.20	529.579	460.740	1.3. Other Expenses
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	B.27, E.21	3.742.082	2.925.977	2. Payment System Services
3. Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial	B.28, E.22	113.531	77.856	3. Macroeconomic Regulation and Supervision
4. Remunerasi kepada Pemerintah	B.30, E.23	4.253.586	3.513.071	4. Remuneration on Government General Deposits
5. Beban Umum dan Lainnya	D, E.24	8.372.137	7.950.432	5. General and Administrative Expenses
JUMLAH BEBAN		38.827.508	37.674.170	TOTAL EXPENSES
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK		82.353.878	55.426.302	SURPLUS (DEFICIT) BEFORE TAXES
PAJAK	B.32, D, E.14	(21.028.401)	(13.940.603)	TAXES
SURPLUS (DEFISIT) SETELAH PAJAK		61.325.477	41.485.699	SURPLUS (DEFICIT) AFTER TAXES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements

Catatan Atas Laporan Keuangan

Notes To Financial Statements

A. INFORMASI UMUM

1. Pendirian, Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Nasionalisasi De Javasche Bank NV pada bulan Desember 1951 ditindaklanjuti dengan pembentukan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tanggal 2 Juni 1953 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1953. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendirian Bank Indonesia dimaksudkan untuk bertindak sebagai bank sentral Indonesia.

Dinamika kondisi ekonomi, sosial, khususnya politik, berpengaruh terhadap peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang ditandai dengan penggantian maupun perubahan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia. Tidak hanya pada tataran Undang-Undang, ihwal bank sentral juga menjadi substansi Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23D bahwa Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang.

Dengan landasan konstitusional yang jelas dan kuat tersebut maka sebagai implementasi dari amanat UUD 45 Pasal 23D, selain statusnya sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, juga diatur bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugasnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, serta dinyatakan sebagai badan hukum agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Agar independensi dalam melaksanakan tugasnya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan

A. GENERAL INFORMATION

1. Establishment, Status, and Domicile of Bank Indonesia

Following the nationalization of De Javasche Bank NV in December 1951, Bank Indonesia was established under the Act Number 11 of 1953 on the Establishment of the Principal Act of Bank Indonesia on June 2, 1953 which took effect on July 1, 1953. The Act stipulated Bank Indonesia's role as the Indonesian Central Bank.

The role of Bank Indonesia as the Central Bank had eventually developed due to economic, social, and particularly political dynamics, marked by substitutes of amendments made to the Bank Indonesia Act, as most currently made by Act Number 6 of 2009 on Government Regulation in Lieu of Act Number 2 of 2008 on the Second Amendment to Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia as Act referred to as Bank Indonesia Act. In addition to the Act amendment, the Central Bank's matters were also included in the substance of the Fourth Amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 45) as stipulated in Article 23D that the State has a Central Bank with structure, status, authority, responsibility, and independence, regulated by Law.

With clear-cut constitutional basis, the implementation of Article 23D of UUD 45, in addition to the status as the Central Bank of the Republic of Indonesia, stipulates that Bank Indonesia is an independent State institution to carry out duties, free from government interference and/or other parties, established as a legal entity with clear authority to manage its own assets apart from the State Budget. To perform duties independently with utmost responsibility, Bank Indonesia is required to be transparent and in compliance with the

memenuhi prinsip akuntabilitas publik serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat, termasuk kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) guna dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut wajib diumumkan kepada publik melalui media massa.

Adapun kedudukan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia tersebut di atas adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia.

2. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang didalamnya mengatur tentang pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK, maka sejak tanggal 31 Desember 2013 tugas mengatur dan mengawasi bank sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Selain mengatur tentang pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan mikroprudensial dari Bank Indonesia kepada OJK, Undang-Undang OJK juga menegaskan mengenai tugas dan kewenangan Bank Indonesia terkait pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yaitu pengaturan dan pengawasan selain mikroprudensial. Berkenaan dengan adanya pembagian tugas dan wewenang terkait pengaturan dan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah mengatur tentang

principles of public accountability and open for public scrutiny, including the obligation to prepare financial statement to be audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI). The audit result must be publicly announced through the mass media.

As stipulated in the Bank Indonesia Act, the domicile of Bank Indonesia is in the capital city of the Republic of Indonesia.

2. Objectives and Duties of Bank Indonesia

Pursuant to the Bank Indonesia Act, the objective of Bank Indonesia is to achieve and maintain stability in the value of the Rupiah. To achieve this objective, Bank Indonesia has the following duties:

- a. Formulating and implementing the monetary policy;*
- b. Regulating and safeguarding uninterrupted operation of payment system;*
- c. Regulating and supervising the banking sector.*

In line with the promulgation of Financial Services Authority Act through Act Number 21 of 2011, which regulates the transfer of functions, duties, and authority for regulating and supervising financial services in the banking sector from Bank Indonesia to the Financial Services Authority (OJK), therefore, as of December 31, 2013 the task for regulating and supervising banks as stipulated in letter c, was transferred from Bank Indonesia to OJK. In addition to regulating the transfer of functions, duties, and authority for micro-prudential regulation and supervision from Bank Indonesia to OJK, the OJK Act also affirms the duties and authority of Bank Indonesia relating to macro-prudential regulation and supervision, namely the regulation and supervision apart from micro-prudential. In regards to the separation of tasks and authority pertaining to macro-prudential and micro-prudential regulation and supervision, Act Number 21 of 2011 on coordination and cooperation between macro-prudential and micro-prudential authorities, with stipulations including: (i) coordination and cooperation in

koordinasi dan kerjasama antara otoritas makroprudensial dan mikroprudensial, yaitu diantaranya mencakup: (i) koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan peraturan pengawasan di bidang perbankan yang meliputi pengaturan tentang kewajiban pemenuhan modal minimum bank, produk perbankan, transaksi derivatif dan kegiatan usaha bank lainnya, serta penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; (ii) koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, dan (iii) koordinasi dan kerjasama dalam rangka pertukaran informasi.

Bank Indonesia memiliki urgensi yang penting untuk tetap dapat memiliki tugas dan kewenangan mengatur bank meskipun telah dibentuk OJK, mengingat peranan strategis bank sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, pelaku jasa sistem pembayaran, dan lembaga yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Selain itu, tugas dan kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur bank juga dilandaskan pada Undang-Undang (UU) lain yaitu UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU Transfer Dana, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Mata Uang.

Bahwa pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dilakukan semata-mata dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial dan tidak mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan OJK.

3. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputi Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada posisi tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

formulating banking supervisory regulations on minimum capital requirements for banks, banking products, derivative transactions and other banking activities, as well as determining banking institutions that fit into the category of a systemically important bank; (ii) coordination and cooperation in implementing bank examinations by Bank Indonesia within the context of implementing its function, task, and authority, and (iii) coordination and cooperation on information exchange.

Bank Indonesia has the vital importance to continuously hold the task and authority to regulate banks despite the OJK establishment, in view of the strategic role of banks as a means for transmitting monetary policy, enactor of payment services, and institution that influences financial system stability. Moreover, Bank Indonesia's duties and authority to regulate banks is also based on other Acts, particularly those of the Foreign Exchange Flow and Exchange Rate System Law, Funds Transfer Law, Prevention and Eradication of Money Laundering Law, and Currency Law.

Whereby the regulation and supervision of banks by Bank Indonesia is carried out solely within the framework of Bank Indonesia's tasks in the monetary, payment systems, and macroprudential fields, and excluded from matters under OJK's authorization.

3. The Board of Governors of Bank Indonesia

Pursuant to the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia is led by the Board of Governors comprising one Governor and one Senior Deputy Governor, with at least 4 (four) or maximum of 7 (seven) Deputy Governors. As of December 31, 2015, members of the Board of Governors were

Selanjutnya, diatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:

- a. 30% untuk Cadangan Tujuan; dan
- b. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter.

Selama penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10%.

Cadangan Umum dipergunakan untuk menambah modal atau menutup defisit Bank Indonesia, sedangkan Cadangan Tujuan dipergunakan antara lain untuk biaya penggantian dan atau pembaruan aset tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, serta pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta penyertaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

6. Dasar Hukum dan Tujuan Laporan Keuangan Bank Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia.

Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada BPK-RI untuk dilakukan pemeriksaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut selesai disusun. Hasil pemeriksaan BPK-RI tersebut disampaikan kepada DPR.

Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, yang meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

It is also stipulated that the surplus from Bank Indonesia's activities will be allocated as follows:

- a. 30% for the Statutory Reserves; and*
- b. The remaining balance for the General Reserves, to be used for raising the Capital and General Reserves to meet the 10% minimum requirement of the total monetary liabilities.*

During the settlement of Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI), the Statutory Reserves is set at 10%.

The General Reserves is used to increase capital or to cover the deficit of Bank Indonesia, while the Statutory Reserves is used for replacing or revitalizing fixed assets, necessary equipment procurement, organizational and human resources development to support the duty and authority of Bank Indonesia, and the participating interest needed to implement Bank Indonesia's tasks.

6. Legal Basis and Purpose of Bank Indonesia's Financial Statements

Pursuant to the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia must complete Bank Indonesia's Annual Financial Statements within 30 (thirty) days after the end of the financial year.

Bank Indonesia is obliged to submit Bank Indonesia's Annual Financial Statements to BPK-RI for an audit, within 7 (seven) days after the statements are completed. The audit result will subsequently be presented to the DPR.

The objective of the financial statements of Bank Indonesia is to demonstrate the achievements of the management and the fulfillment of management's responsibilities on financial resources use in achieving and maintaining the stability of the Rupiah, which includes information on the impacts of policies on the financial position of Bank Indonesia and the surplus/deficit of Bank Indonesia.

Penyajian laporan keuangan Bank Indonesia:

- a. Tidak dimaksudkan untuk mengukur pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, karena stabilitas nilai Rupiah tidak dapat diukur dalam satuan mata uang.
- b. Tidak dimaksudkan untuk menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. Meskipun penggunaan sumber daya oleh Bank Indonesia dapat diukur dalam satuan mata uang tetapi pencapaian tujuannya tidak dapat diukur dalam satuan mata uang. Oleh sebab itu, tidak dapat dilakukan perhitungan efisiensi dalam ukuran perbandingan nilai keuangan dari tujuan terhadap biaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun dampak keuangan dari upaya Bank Indonesia untuk mencapai tujuannya dapat diukur dalam satuan mata uang, sehingga Laporan Keuangan Bank Indonesia dapat digunakan untuk mengukur dampak keuangan dari upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia tersebut.

7. Kebijakan Utama Bank Indonesia yang Berdampak Signifikan pada Keuangan Bank Indonesia

Di tengah berlanjutnya ketidakpastian global, kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2015 difokuskan pada upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan dengan tetap memelihara momentum pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Di bidang moneter, kebijakan secara konsisten diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasarannya dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang sehat, melalui kebijakan suku bunga yang didukung oleh kebijakan nilai tukar, penguatan cadangan devisa, pengelolaan arus modal dan penguatan operasi moneter. Dalam menjaga stabilitas ekonomi, kebijakan moneter tetap memberi ruang bagi pemulihan ekonomi yang dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gangguan pada stabilitas makroekonomi. Di bidang makroprudensial, pelanggaran

The presentation of Bank Indonesia's financial statements:

- a. *Cannot be intended to assess the level of achievement of Bank Indonesia's objective, namely Rupiah stability, since it is incapable of being assessed in solely monetary terms.*
- b. *Cannot be intended to provide information on efficiency or otherwise in the use of resources in achieving the objective of Bank Indonesia. Although the use of resources by Bank Indonesia may be measured in monetary terms, but the achievement of its objective cannot be measured in monetary terms. Consequently, efficiency cannot be assessed by comparing the level of achievement of Bank Indonesia's objective with the cost incurred in achieving that objective.*

Nevertheless, the financial effects of the bulk of endeavors and activities undertaken by Bank Indonesia in achieving its objectives may be measured in monetary terms so that the financial statements of Bank Indonesia can be used to assess the financial effects of Bank Indonesia's efforts to achieve its objective.

7. Bank Indonesia's Prime Policy with Significant Impacts on Indonesia's Financial Position

Amidst the on going global uncertainty, Bank Indonesia's policy in 2015 was focused on efforts to maintain macroeconomic stability and financial system stability by maintaining the momentum for economic growth. This effort was carried out by strengthening the policy mix on monetary, macroprudential, and payment system. In the monetary sector, policy was consistently geared to control inflation towards its target and current account deficit moved towards a healthier level, through interest rate policy that was supported by the exchange rate policy, strengthening foreign exchange reserves, managing capital flows, and strengthening monetary operations. To maintain economic stability, monetary policy continued to provide room for economic recovery that was carried out with prudence, so as to prevent disruptions to macroeconomic stability. On macroprudential, easing macroprudential policy by relaxation of macroprudential

kebijakan makroprudensial melalui relaksasi ketentuan makroprudensial ditempuh untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, di bidang sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk mengembangkan industri sistem pembayaran domestik yang lebih efisien. Selain itu, Bank Indonesia terus mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka mengawal stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat reformasi struktural untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih sehat dan resilien.

Implementasi kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2015 yang berdampak signifikan pada keuangan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Merespon penurunan ekspektasi inflasi pada Februari 2015, Bank Indonesia pada tanggal 17 Februari 2015 menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 7,5%, dengan suku bunga *Deposit Facility* turun 25 bps menjadi 5,5% dan *Lending Facility* tetap pada level 8,0%. Kebijakan tersebut diambil dengan keyakinan bahwa inflasi akan tetap terkendali dan rendah sehingga berada di kisaran bawah sasaran $4\pm 1\%$ pada tahun 2015 dan tahun 2016. Kebijakan ini masih sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan pada tingkat yang lebih sehat.
- b. Dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian di pasar keuangan global, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 7,5% dari bulan Maret 2015 sampai dengan Desember 2015, dengan suku bunga *Deposit Facility* sebesar 5,5% dan *Lending Facility* pada level 8,0%.
- c. Bank Indonesia melonggarkan kebijakan makroprudensial melalui penyesuaian kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) dengan mengikutsertakan Surat-Surat Berharga (SSB) yang diterbitkan bank ke dalam perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) kebijakan GWM-LDR. Sejalan dengan masuknya SSB yang diterbitkan bank dalam perhitungan LDR maka istilah LDR diganti menjadi *Loan to Funding Ratio* (LFR). Kebijakan mengenai GWM LFR ini dituangkan dalam Peraturan Bank

provisions was carried out to maintain the momentum for economic growth. Meanwhile, on payment systems, the policy was geared towards developing a more efficient domestic payment system industry. In addition to this, Bank Indonesia continued to intensify the coordination with the Government within the context of protecting macroeconomic stability, promoting economic growth, and accelerating structural reforms to create a more healthier and resilient economic structure.

The following are Bank Indonesia's implementations in 2015 with significant impacts on Bank Indonesia's financial position:

- a. *In response to declining inflation expectations in February 2015, Bank Indonesia lowered the BI Rate on February 17, 2015 by 25 bps to 7.5%, with Deposit Facility rate lowered by 25 bps to 5.5% and Lending Facility remained at a level of 8.0%. This policy was taken with the conviction that inflation will remain manageable and low thereby remaining at a target range below $4\pm 1\%$ in 2015 and 2016. This policy was aligned with Bank Indonesia's efforts to control the current account deficit to a much healthier level.*
- b. *As part of its efforts to maintain macroeconomic stability amidst the enduring uncertainty in the global financial markets, Bank Indonesia maintained the BI Rate at 7.5% from March 2015 to December 2015, with the Deposit Facility rates at 5.5% and Lending Facility at a level of 8.0%.*
- c. *Bank Indonesia relaxed macroprudential policy by adjusting the Bank Minimum Reserve Requirements (GWM) policy to include Marketable Securities issued by banks into the Loan to Deposit Ratio (LDR) calculation as the GWM-LDR policy. In line with the inclusion of marketable securities issued by banks into the LDR calculation, the LDR terminology was therefore changed to Loan to Funding Ratio (LFR). Policies pertaining to GWM LFR was prescribed within Bank Indonesia*

Indonesia (PBI) Nomor 17/11/PBI/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional. Terhitung 1 Agustus 2015, Bank Indonesia juga memperlonggar batas atas LFR hingga menjadi 94% bagi bank yang sudah memenuhi pencapaian tertentu Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kualitas kredit yang baik. Selain itu, terdapat pengurangan jasa giro bagi bank yang tidak memenuhi rasio kredit UMKM, *Net Performing Loan* (NPL) Total Kredit atau NPL Kredit UMKM lebih atau sama dengan 5%, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, besaran GWM masih sama sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- d. Di sisi nilai tukar, Bank Indonesia senantiasa mengupayakan agar kestabilan nilai tukar tetap terjaga dan sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, khususnya merespon tekanan yang bersumber dari devaluasi Yuan dan ketidakpastian waktu dan besaran kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) pada triwulan III tahun 2015, Bank Indonesia mengoptimalkan operasi moneter baik di pasar uang Rupiah maupun pasar valuta asing (valas). Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 9 September dan 30 September 2015 telah menempuh kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang bersandar pada tiga pilar kebijakan, yaitu (i) menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, (ii) memperkuat pengelolaan likuiditas Rupiah, dan (iii) memperkuat pengelolaan *supply* dan *demand valas*.

Regulation (PBI) Number 17/11/PBI/2015 dated June 26, 2015 on Changes to PBI Number 15/15/PBI/2013 on Minimum Reserve Requirement in Rupiah for Conventional Banks and Foreign Currencies for Commercial Conventional Banks. Bank Indonesia also relaxed, as of August 1, 2015, the LFR limit up to 94% for banks that met certain SME Loan achievements with a good credit quality. Moreover, there was a reduction in current account services for banks that failed to meet the SME loan ratio, Total Loan Net Performing Loan (NPL) or SME Loan NPL of more or equal to 5%, as prescribed within the Bank Indonesia's provisions that governs the granting of loans or financing by banks and technical assistance in developing the micro, small, and medium enterprises. As for Sharia Banks and Sharia Business Units, the amount of GWM remained the same as prescribed by Bank Indonesia Regulations Number 15/16/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Minimum Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies for Sharia Banks and Sharia Business Units.

- d. *On the exchange rate, Bank Indonesia always strives to maintain exchange rate's stability and in accordance with its fundamental conditions. As part of its efforts to maintain the stability of the Rupiah's exchange rate, particularly in response to the pressure derived from the Yuan's devaluation and uncertainty in terms of the timing and scale of increase of the Fed Fund Rate (FFR) increase in the third quarter of 2015, Bank Indonesia optimized monetary operations both in the Rupiah money markets as well as the foreign currency markets. In line with these developments, on September 9 and September 30, 2015 Bank Indonesia introduced Rupiah exchange rate stabilization policy that was based on three policy pillars, (i) maintaining the Rupiah's exchange rate stability, (ii) strengthening Rupiah liquidity management, and (iii) strengthening management of foreign currency supply and demand.*

**Paket Kebijakan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
Tahun 2015**

**Rupiah Exchange Rate Stabilization Policy
Package in 2015**

Paket Kebijakan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah <i>Rupiah Exchange Rate Stabilization Policy Package in 2015</i>	
9 September 2015 <i>September 9, 2015</i>	30 September 2015 <i>September 30, 2015</i>
<p>1. Menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah <i>Maintaining the stability of the Rupiah's exchange rate</i></p>	
<p>a. Menjaga kepercayaan pelaku pasar di pasar valas melalui pengendalian volatilitas nilai tukar Rupiah. <i>Maintained market confidence on the foreign currency market by controlling the Rupiah's exchange rate volatility.</i></p> <p>b. Memelihara kepercayaan pasar terhadap pasar Surat Berharga Negara melalui pembelian di pasar sekunder, dengan tetap memerhatikan dampaknya terhadap ketersediaan Surat Berharga Negara bagi inflow dan likuiditas pasar uang. <i>Maintained market confidence on Government Securities market (SBN) through purchases in the secondary market, while continued to take into consideration its impact the supply of SBN on money market inflow and liquidity.</i></p>	<p>Melakukan implementasi intervensi <i>forward</i> untuk menyeimbangkan supply dan demand valas di pasar <i>forward</i>. <i>Implemented forward intervention to balance foreign currency supply and demand in the forward market.</i></p>
<p>2. Memperkuat pengelolaan likuiditas Rupiah <i>Strengthening the management of the Rupiah's liquidity</i></p>	
<p>a. Mengubah mekanisme lelang <i>Reverse Repo</i> (RR) SBN dari <i>variable rate tender</i> menjadi <i>fixed rate tender</i>, dan menyesuaikan <i>pricing</i> RR SBN. <i>Changed the SBN Reverse Repo (RR) auction mechanism from variable rate tender to fixed rate tender and adjusted SBN RR pricing.</i></p> <p>b. Mengubah mekanisme lelang Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dari <i>variable rate tender</i> menjadi <i>fixed rate tender</i> dan menyesuaikan <i>pricing</i> SDBI serta melaksanakan kebijakan <i>maturity lengthening</i> dengan menerbitkan SDBI tenor 3 dan 6 bulan. <i>Changed the auction mechanism for Bank Indonesia Certificate of Deposits (SDBI) from variable rate tender to fixed rate tender and adjusted SDBI pricing as well as implemented the maturity extension policy by issuing 3 and 6 months tenor SDBI.</i></p> <p>c. Menerbitkan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 bulan dan 12 bulan dengan mekanisme lelang <i>fixed rate tender</i> dan menyesuaikan <i>pricing</i>. <i>Re-issued 9 months and 12 months tenor Bank Indonesia Certificates (SBI) with a fixed rate tender mechanism and adjusted pricing.</i></p>	<p>a. Menerbitkan SDBI tenor 3 bulan untuk <i>maturity lengthening</i> instrumen OPT <i>Issued 3 month-tenor SDBI for maturity lengthening OPT instruments.</i></p> <p>b. Menerbitkan RR-SBN tenor 2 minggu untuk melengkapi instrumen OPT yang ada. <i>Issued 2 week-tenor RR-SBN to complement existing OPT instruments.</i></p>

Paket Kebijakan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
Rupiah Exchange Rate Stabilization Policy Package in 2015
9 September 2015
September 9, 2015
30 September 2015
September 30, 2015
3. Memperkuat pengelolaan supply dan demand valas
Strengthening the management of foreign currency supply and demand

- | | |
|--|--|
| <p>a. Menyesuaikan frekuensi lelang <i>Foreign Exchange (FX) Swap</i> dari 2 kali seminggu menjadi 1 kali seminggu.
<i>Adjusted the frequency of Foreign Exchange (FX) Swap auctions from twice a week to once a week</i></p> <p>b. Mengubah mekanisme lelang <i>Term Deposit (TD) Valas</i> dari <i>variable rate tender</i> menjadi <i>fixed rate tender</i>, menyesuaikan <i>pricing</i>, dan memperpanjang tenor sampai dengan 3 bulan.
<i>Changed the Foreign Currency Term Deposit (TD) auction mechanism from variable rate tender to fixed rate tender, adjust pricing, and extended the tenor up to 3 months</i></p> <p>c. Menurunkan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen <i>underlying</i> dari yang berlaku saat ini sebesar US\$100 ribu menjadi US\$25 ribu per nasabah per bulan dan mewajibkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak.
<i>Lowered the limit for foreign currency purchases with proof of underlying documents, from the existing requirement of US\$100 thousand to US\$25 thousand per customer per month and requirement for Taxpayer Identification Number proof</i></p> <p>d. Mempercepat proses persetujuan utang luar negeri Bank dengan tetap memerhatikan asas kehati-hatian.
<i>Accelerated the approval process for Banks' foreign debts while stay compliant with prudent principles</i></p> | <p>a. Penguatan kebijakan untuk mengelola <i>supply & demand</i> valas di pasar <i>forward</i>. Kebijakan ini bertujuan mendorong transaksi <i>forward</i> jual valas/Rupiah dan memperjelas <i>underlying forward</i> beli valas/Rupiah. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan <i>threshold forward</i> jual yang wajib menggunakan <i>underlying</i> dari semula 1 juta dolar AS menjadi 5 juta dolar AS per transaksi per nasabah dan memperluas <i>underlying</i> khusus untuk <i>forward</i> jual, termasuk deposito valas di dalam negeri dan luar negeri.
<i>Strengthened policy to manage foreign currency supply & demand in the forward market. This policy sought to encourage the sale of foreign currency/Rupiah forward transactions and clarify sale of foreign currency/Rupiah. This is carried out by increasing the threshold forward selling that requires the use of underlying, from the initial of USD 1 million to USD 5 million per transaction per customer and expanded the underlying especially for forward selling, including foreign currency term deposits within and outside of Indonesia.</i></p> <p>b. Penerbitan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas.
<i>Issued foreign currency Bank Indonesia Marketable Securities (SBBI).</i></p> <p>c. Penurunan holding period SBI dari 1 bulan menjadi 1 minggu untuk menarik aliran masuk modal asing.
<i>Reduced the holding period for SBI from 1 month to 1 week in order to attract foreign capital infows.</i></p> <p>d. Pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan Indonesia atau mengkonversinya ke dalam Rupiah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemerintah.
<i>Granted tax incentives on deposit interest for exporters who deposit Export Proceeds (DHE) in Indonesian banks or converted to Rupiah, as prescribed by the Government.</i></p> <p>e. Mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi atas penggunaan devisa dengan memperkuat laporan Lalu Lintas Devisa (LLD). Dalam hal ini, pelaku LLD wajib melaporkan penggunaan devisanya dengan melengkapi dokumen pendukung untuk transaksi dengan nilai tertentu. Ketentuan ini sejalan dengan UU Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dimana Bank Indonesia berwenang meminta keterangan dan data terkait LLD kepada penduduk.
<i>Promoted transparency and enhanced the availability of information on foreign currency use by strengthening Foreign Exchange Flow Report (LLD). In this regard, the LLD recipient is required to report their foreign currency usage by providing the supporting documents for transactions at a certain value. This provision is in line with Law Number 24 of 1999 on Foreign Exchange Flow and Exchange Rate System wherein Bank Indonesia is authorized to request for information and data on an individual's LLD.</i></p> |
|--|--|

- e. Stabilitas makroekonomi yang semakin baik di tengah masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global mendorong Bank Indonesia tetap berhati-hati dalam menempuh langkah pelonggaran kebijakan moneter. Sejalan dengan hal tersebut, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 17 November 2015 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 7,5% dan menurunkan GWM Primer dalam Rupiah, dari sebelumnya 8,0% menjadi 7,5%, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2015. Dalam kaitan ini, pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan GWM Primer diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang mulai meningkat sejak triwulan III tahun 2015.
- f. Di bidang pengedaran uang, untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, Bank Indonesia menjaga ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di samping itu, untuk menjaga kualitas uang yang ada di masyarakat, Bank Indonesia melakukan pemusnahan uang Rupiah yang sudah tidak layak edar, dan diganti dengan uang layak edar (*clean money policy*).

Berbagai kebijakan Bank Indonesia tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan khususnya pada pos Aset dan Liabilitas untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter, dan pos Uang Dalam Peredaran. Sedangkan dalam Laporan Surplus Defisit, tercermin dalam pos Pendapatan/Beban Bunga, pos Pendapatan/Beban Imbalan, pos Pendapatan/Beban Transaksi Aset Keuangan, pos Pendapatan/Beban Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing, dan pos Pendapatan/Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran.

Selain kebijakan yang dilakukan pada tahun 2015 tersebut di atas, Bank Indonesia juga melanjutkan berbagai kebijakan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain kebijakan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) - *Building Stock*, dan lelang *Swap valas* (FX swap).

- e. *Improving macroeconomic stability, amidst the enduring uncertainty in the global financial markets has prompted Bank Indonesia to maintain a prudent course on relaxing monetary policy. In line with this, on November 17, 2015 the Board of Governor Meeting (RDG) of Bank Indonesia decided to maintain the BI Rate at 7.5% and lower the Primary GWM in Rupiah, from previously 8.0% to 7.5%, which took effect from December 1, 2015. Therefore, monetary policy easing by reducing Primary Reserve Requirement (GWM) was expected to improve bank financing capacity to support economic activity that began to expand since the third quarter of 2015.*
- f. *To support economic activity, on currency circulation, Bank Indonesia maintained the availability of cash suitable for circulation throughout The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). In addition to this, to maintain the quality of currency circulation, Bank Indonesia has culled unfit Rupiah and replaced them with cash fit (clean money policy).*

These policies were reflected on Bank Indonesia's Financial Statements, presented in the Statement of Financial Position, particularly on Assets and Liabilities under Monetary Policy Implementation, and Currency in Circulation. In the surplus Deficit Statement, they are reflected in Interest Income/Expense, Income/Expense from Sharia-based Transactions, Net Result of Financial Transactions, Net Result of Foreign Currency Transactions, and Payment System Services Income/Expense post.

*In addition to the policy implemented in 2015, Bank Indonesia also continued to apply policies from the previous years, including the policy on purchases of Government Securities (SBN) - *Building Stock*, and foreign exchange Swap auctions (FX swap).*

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia mengacu pada standar akuntansi yang berlaku bagi Bank Indonesia yang disebut Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI).

KAKBI disusun oleh Komite Penyusun KAKBI yang independen. KAKBI disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dengan penyesuaian untuk mengakomodasi keunikan bisnis entitas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang tidak berorientasi mencari keuntungan, dan mengacu pada konvensi dan praktek akuntansi yang lazim di bank sentral.

1. Pernyataan Kepatuhan Terhadap KAKBI

Bank Indonesia menyusun Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 berdasarkan KAKBI.

2. Penerapan Teori Entitas

Bank Indonesia menerapkan konsep teori entitas. Berdasarkan teori tersebut, laporan keuangan tidak memisahkan dengan tegas unsur liabilitas dan ekuitas. Bank Indonesia menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada prioritas yang setara. Selain itu, Bank Indonesia beraktivitas bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba, sehingga penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk mengetahui kekayaan bersih (*net worth*) Pemerintah.

Oleh sebab itu, Bank Indonesia tidak menyajikan subklasifikasi ekuitas di Laporan Posisi Keuangan dan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan.

3. Konsep Pengakuan Penghasilan dan Beban

Pengakuan maupun pengukuran penghasilan dan beban mempertimbangkan kesesuaian dengan upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia. Bank Indonesia mengakui penghasilan dan beban yang berasal dari transaksi yang telah direalisasikan dan transaksi unik Bank Indonesia yang telah mencapai tujuan akhir dari pelaksanaan transaksi.

B. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Bank Indonesia's financial statements were prepared in compliance with prevailing accounting standards referred to as Bank Indonesia Financial Accounting Policies (KAKBI).

KAKBI was prepared by the independent KAKBI Drafting Committee. KAKBI was prepared based on prevailing Financial Accounting Standards and adjusted to accommodate Bank Indonesia's unique business entity as a non-profit central bank, in compliance with accounting conventions and practices generally found in central banks.

1. KAKBI Compliance Statement

Bank Indonesia prepared and presented the Financial Statements as of December 31, 2015 based on KAKBI.

2. Application of the Entity Theory

Bank Indonesia applied the concept of entity theory. Based on this theory, the financial statements did not decisively separate the elements of liabilities and equities. Bank Indonesia placed all of its stakeholders on an equal priority. Moreover, Bank Indonesia did not function to obtain revenues or profit, thereby Bank Indonesia's financial statements was not aimed at determining the net worth of the Government.

Therefore, Bank Indonesia did not present the equity sub-classification in the Statement of Financial Position and did not show changes in equity as a component of these financial statements.

3. Concept of Revenue and Expense Recognition

Revenue and expense recognition and measurement took into account the appropriateness with the efforts to achieve Bank Indonesia's objectives. Bank Indonesia recognized revenue and expense derived from transactions that had been realized and Bank Indonesia's unique transactions that had met the ultimate objectives of the transactions.

4. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah. Kecuali dinyatakan lain, informasi keuangan yang disajikan telah dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang terdekat.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep historis, kecuali untuk pos:

- Emas yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
- Instrumen keuangan pelaksanaan kebijakan yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
- Instrumen derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi;
- Liabilitas imbalan kerja yang diukur sebesar nilai kini imbalan kerja dikurangi nilai bersih aset program.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual.

5. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Sesuai Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) 07: Transaksi Tidak Unik, Bank Indonesia menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015. PSAK 24 (Revisi 2013) diterapkan secara retrospektif. Dampak perubahan terhadap beberapa pos di Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit yang dijelaskan pada butir D dan E.10.

6. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan KAKBI mengharuskan manajemen membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang dilaporkan.

7. Penjabaran Posisi dan Transaksi Dalam Valuta Asing, dan Penjabaran Posisi dan Transaksi Emas

Pada tanggal pelaporan, saldo pos moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pelaporan. Selisih yang timbul dari penjabaran saldo

4. Basis for Preparation of the Financial Statements

The financial statements are presented in Rupiah. Unless otherwise stated, the financial information presented has been rounded off in the nearest million Rupiah.

The financial statements are prepared based on a historical concept, except for the posts of:

- Gold is measured at its fair value through revaluation reserves;
- Policy implementation financial instruments that are measured at fair value through revaluation;
- Derivative instruments that are measured at fair value through revaluation;
- Employment benefit liabilities that are measured at the present value of the employment benefit less the net program asset's value

These financial statements were prepared based on an accrual basis.

5. Accounting Policy Changes

In accordance with Statement of Financial Accounting Policy (PKAK) 07: Non-Unique Transactions, Bank Indonesia applied the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 24 (Revised 2013) on Employee Benefits that took effect from January 1, 2015. PSAK 24 (Revised 2013) was retrospectively applied. The impact of the changes on a number of postings in the Statement of Financial Position and Statement of Surplus Deficit is explained in item D and E.10.

6. Use of Determination, Estimation, and Assumption

The preparation of financial statements in accordance with KAKBI required the management to establish determination, estimation, and assumption, which may impact the reported assets, liabilities, income, and expenses.

7. Translating Foreign Currency Position and Transaction, and Translating Gold Position and Transaction

At the reporting date, the foreign currency monetary balances posts are translated in Rupiah using the prevailing middle rate at the time of reporting. The difference that arises from translating foreign currency monetary

pos moneter dalam valuta asing yang terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik, disajikan sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan. Untuk selisih yang timbul dari penjabaran saldo pos moneter dalam valuta asing yang tidak terkait dengan transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik, disajikan sebagai selisih kurs valuta asing dalam Laporan Surplus Defisit. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir kepemilikan aset dan liabilitas valuta asing, diakui sebagai surplus defisit tahun berjalan. Transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs pada tanggal transaksi. Kurs tengah beberapa valuta asing utama terhadap Rupiah per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014:

balances posts, relating to transactions deemed unique to Bank Indonesia, are presented as revaluation reserves on liability groups in the Statement of Financial Position. The discrepancy arising from converting foreign currency monetary balances that are not related to transactions deemed unique to Bank Indonesia, are presented as net result of foreign currency transactions within the Statement of Surplus Deficit. Gains and losses arising from foreign currency transactions, which have achieved the substantive economic objective ownership of assets and liabilities, are recognized as current surplus deficit. Foreign currency transactions are reported in Rupiah at an exchange rate effective on the date of the transaction. The middle rates for currencies against the Rupiah as of December 31, 2015 and December 31, 2014 were:

Uraian Valuta Asing	31 Desember 2015 (Rp Penuh) <i>December 31, 2015</i> (IDR Full Amount)	31 Desember 2014 (Rp Penuh) <i>December 31, 2014</i> (IDR Full Amount)	Description Foreign Currency
1 EUR	15.069,67	15.133,27	1 EUR
1 GBP	20.451,11	19.370,34	1 GBP
1 AUD	10.064,16	10.218,23	1 AUD
1 SDR	19.131,73	18.017,85	1 SDR
1 NZD	9.441,99	9.762,29	1 NZD
1 USD	13.795,00	12.440,00	1 USD
1 CAD	9.948,09	10.734,33	1 CAD
100 JPY	11.452,42	10.424,88	100 JPY

8. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan, dan kondisi yang sama dengan pihak lain, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Transactions with Related Parties

Transactions with related parties which are carried out with or without the same level of prices, terms, and conditions of other parties are stated in the Notes to the Financial Statements.

9. Emas

Emas adalah bagian dari cadangan devisa yang ditujukan antara lain sebagai penyangga likuiditas dalam mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan atau pemenuhan kewajiban dalam valuta asing.

9. Gold

Gold forms part of Bank Indonesia's foreign reserves and is intended to, among other things, as liquidity buffer to support monetary policy implementation and/or the fulfillment of obligations denominated in foreign currency.

Emas yang dimiliki Bank Indonesia terdiri dari emas batangan dan hak kontraktual atas emas batangan.

Bank Indonesia's gold consists of gold bullion and contractual rights to gold bullion. Upon acquisition, gold is measured based on its acquisition costs.

Pada saat perolehan, emas diukur berdasarkan biaya perolehan. Pada tanggal pelaporan, saldo emas diukur berdasarkan nilai wajar yaitu harga emas yang tersedia di pasar London, yang dihitung ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah pada akhir periode pelaporan. Selisih yang timbul antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Keuntungan dan kerugian karena penghentian pengakuan diakui dalam Laporan Surplus Defisit pada tahun berjalan.

Transaksi emas dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

10. Uang Dalam Peredaran

Uang dalam peredaran adalah uang Rupiah yang berada di luar penguasaan Bank Indonesia.

Uang dalam peredaran merupakan salah satu transaksi unik yang hanya terdapat di Bank Indonesia dan tidak terdapat di entitas lain. Sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang untuk mencetak dan mengedarkan Uang Rupiah. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang Rupiah yang pelaksanaannya didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14/1/GBI/DPU/NK/MOU-5/MK.05/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.

Kewenangan Bank Indonesia untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah, menyebabkan uang Rupiah yang dalam penguasaan Bank Indonesia memiliki fungsi yang berbeda dengan entitas lain. Bagi Bank Indonesia, uang Rupiah yang dimiliki merupakan salah satu alat untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran.

On the reporting date, the balance of gold is measured based on its fair value, specifically the gold price at the London market, which is calculated into Rupiah using the middle rate at the end of the reporting period. The difference that arises between the previous carrying amount and the amount that resulted from the conversion of the balance is recognized as revaluation reserves derived from the liability group within the Statement of Financial Position.

Gains and losses derived from de-recognition is recognized within the Statement of Surplus Deficit.

Gold transactions are translated in Rupiah using the exchange rate at the date of transaction.

10. Currency in Circulation

Currency in circulation is Rupiah Currency that is beyond the control of Bank Indonesia.

Currency in circulation is a unique transaction found only in no other entity except in Bank Indonesia. In accordance with the mandate stipulated within the Bank Indonesia Act and Act Number 7 of 2011 on Currency, Bank Indonesia is the sole institution in Indonesia that is authorized to print and circulate the Rupiah currency. Bank Indonesia coordinates activities with the Government in planning, printing, and destructing Rupiah currency that is based on the Memorandum of Understanding between Bank Indonesia and the Government of the Republic of Indonesia Number 14/1/GBI/DPU/NK/MOU-5/MK.05/2012 dated June 27, 2012 concerning the Coordination of Planning, Printing, and Destructing of the Rupiah Bank Notes and Coins.

Bank Indonesia's authority to issue and circulate the Rupiah has put the Rupiah currency's control under Bank Indonesia as a function that set Bank Indonesia apart from other entities. For Bank Indonesia, the Rupiah currency is a tool used to maintain a functioning payment system.

Ketika uang Rupiah berada di luar penguasaan Bank Indonesia maka muncul liabilitas Bank Indonesia kepada pemegang uang Rupiah. Namun liabilitas tersebut tidak menunjukkan klaim terhadap aset spesifik di Bank Indonesia dan tidak memiliki jatuh tempo. Uang dalam peredaran diakui sebagai liabilitas sebesar nilai nominal yang tercantum pada pecahan uang Rupiah.

Uang dalam peredaran dihentikan pengakuannya jika dan hanya jika uang Rupiah: (a) dikuasai kembali oleh Bank Indonesia; atau (b) telah dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah akibat pencabutan dan penarikan uang Rupiah dari peredaran dan tidak dikuasai kembali Bank Indonesia setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Instrumen Keuangan Kebijakan

Bank Indonesia memiliki aset dan liabilitas keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

a. Klasifikasi

Bank Indonesia mengklasifikasikan aset keuangan kebijakan setelah pengakuan awal ke dalam kategori sebagai berikut:

- 1) Diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
- 2) Diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kondisi berikut terpenuhi:

- 1) Aset dimiliki dengan model bisnis yang tujuannya untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan
- 2) Arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut mengakibatkan pembayaran arus kas pada tanggal tertentu yang hanya terdiri atas pembayaran pokok dan bunga atas pokok yang belum dilunasi.

Bank Indonesia mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan kebijakan setelah pengakuan awal untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali untuk derivatif yang diakui sebagai liabilitas diukur pada nilai wajarnya.

If the Rupiah currency is outside of Bank Indonesia's control, therefore, Bank Indonesia's liabilities will appear on holders of the Rupiah currency. However, this liability does not show claim to a specific asset in Bank Indonesia and does not have a maturity period. Currency in circulation is recognized as a liability amounting to the nominal value as specified on the Rupiah currency.

Currency in circulation is derecognized if, and only if, the Rupiah currency is: (a) taken over by Bank Indonesia; or (b) declared invalid as legal tender as a result of its revocation and is pulled out of circulation and is no longer under the control of Bank Indonesia after a given period, in accordance with the rules and regulations.

11. Policy-related Financial Instruments

Bank Indonesia has financial assets and liabilities that are used in implementing its policies.

a. Classification

Bank Indonesia classifies financial assets into the following categories upon initial recognition:

- 1) *Measured at amortized cost; or*
- 2) *Measured at fair value through revaluation reserves.*

Financial assets are measured at amortized cost if the following two conditions are met:

- 1) *The asset is held based upon a business model that was aimed at obtaining a contractual cash flow; and*
- 2) *The contractual cash flow from the said financial asset results in cash flow payments on specific dates that consist solely of principal repayments and interest payments on unredeemed principal.*

Bank Indonesia classifies all liabilities after initial recognition for measurement at amortized cost using the effective interest method, except for derivatives that were recognized as liabilities, which are measured at fair value.

b. Aset dan Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan dalam Rupiah

Aset dan liabilitas keuangan untuk pelaksanaan kebijakan dalam Rupiah bertujuan sebagai instrumen moneter dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Aset dan liabilitas dalam Rupiah yang digunakan Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan moneter terdiri dari:

- 1) Surat Berharga Negara (SBN) yang berbasis konvensional atau Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
- 2) Tagihan kepada bank umum karena transaksi pembelian Surat-Surat Berharga dengan Janji untuk Dijual Kembali (*Reverse Repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- 3) Penempatan dana bank umum dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.
- 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

b. Financial Assets and Liabilities Related to Policy Implementation Denominated in Rupiah

Financial Assets and Liabilities Related to Policy Implementation Denominated in Rupiah seeks to serve as monetary instruments within the context of implementing monetary policies to achieve and maintain the stability of Rupiah's value in accordance with the prescribed rules and regulations.

Rupiah-denominated assets and liabilities used by Bank Indonesia to implement monetary policies, consists of:

- 1) *Conventional Government Bonds (SBN) or Government Securities (SUN) are marketable securities in the form of promissory notes denominated in Rupiah that guarantee interest and principal payments by the Government of Indonesia, subject to its tenor.*
- 2) *Claim on banks arisen from securities sold under repurchase agreements (Reverse Repo) subject to the agreed price and tenor.*
- 3) *Placement of funds with banks within the context of the Statutory Reserve Requirements that must be met by banks in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Statutory Reserve Requirements for Banks in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Banks that was amended with Bank Indonesia Regulation Number 17/11/PBI/2015 dated June 25, 2015 on Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks.*
- 4) *Bank Indonesia Certificates (SBI) are Rupiah-denominated marketable securities that are issued by Bank Indonesia as a recognition of short-term debt.*

- | | |
|---|---|
| <p>5) Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar bank.</p> <p>6) Penempatan Berjangka Rupiah (<i>Term Deposit</i> Rupiah) adalah penempatan dana Rupiah milik peserta Operasi Pasar Terbuka secara berjangka di Bank Indonesia.</p> <p>7) Penempatan Dana (<i>Deposit Facility</i>) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi peserta Operasi Moneter yang akan menempatkan dananya di Bank Indonesia. Penempatan Dana memiliki jangka waktu satu hari kerja.</p> <p>8) Liabilitas karena transaksi penjualan Surat-Surat Berharga dengan Janji untuk Dibeli Kembali (<i>repo</i>) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.</p> <p>9) Instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah, antara lain <i>swap</i> valuta asing dan <i>forward</i> valuta asing:</p> <p>a) Transaksi <i>swap</i> valuta asing adalah transaksi pertukaran dua valas melalui pembelian atau penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (<i>forward</i>) yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada kurs yang disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.</p> <p>b) Transaksi <i>forward</i> valuta asing terhadap Rupiah adalah transaksi jual/beli valuta asing terhadap Rupiah pada kurs yang telah disepakati dengan penyerahan valutanya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.</p> | <p>5) <i>Bank Indonesia Certificates of Deposits (SDBI) are Rupiah-denominated marketable securities that are issued by Bank Indonesia as a recognition of short-term debt that can only be transacted between banks.</i></p> <p>6) <i>Rupiah Term Deposits are periodic placements of Rupiah funds in Bank Indonesia owned by Open Market Operations participants.</i></p> <p>7) <i>Deposit facilities are facilities provided by Bank Indonesia for Monetary Operations participants who intend to place their funds in Bank Indonesia. Deposit Facility has a tenor of one working day.</i></p> <p>8) <i>Liabilities arisen from securities sold under repurchase agreement (repo) in accordance with the agreed upon price and timeframe.</i></p> <p>9) <i>Foreign currency derivative instruments against Rupiah, which include foreign currency swaps and forward:</i></p> <p>a) <i>Foreign currency swap transactions are two currencies exchange transactions through cash buying or selling (spot) with periodic buying or repo (forward) that are simultaneously carried out with the same bank and at the agreed upon rate on the date of the transaction.</i></p> <p>b) <i>Foreign currency forward transactions against Rupiah are foreign currency buying/selling transactions against Rupiah at the agreed rate with the handover of the foreign currencies within 2 (two) working days after the date of the transaction.</i></p> |
|---|---|

Aset dan liabilitas dalam Rupiah dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk SBN dan instrumen derivatif yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Assets and liabilities in Rupiah within the context of implementing monetary policy were classified as instruments that were measured by amortizing acquisition expenses, with the exception of SBN and derivative instruments that were classified as instruments measured at fair value through revaluation reserves.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan dalam Valuta Asing

Aset dan liabilitas dalam valuta asing yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk pelaksanaan kebijakan terdiri dari:

- 1) Penempatan dana bank umum dalam rangka simpanan GWM yang harus dipenuhi oleh bank sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.
- 2) Penempatan Berjangka Valuta Asing (*Term Deposit Valas*) adalah penempatan dana dalam valuta asing milik peserta Operasi Pasar Terbuka secara berjangka di Bank Indonesia.
- 3) Aset dan liabilitas dalam valuta asing dalam rangka pengelolaan cadangan devisa, antara lain:
 - a) Penempatan dana pada bank di luar negeri dalam bentuk giro dan deposito.
 - b) Surat-Surat Berharga dalam valuta asing.
 - c) Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing.
 - d) Liabilitas karena transaksi penjualan surat-surat berharga dengan janji untuk dibeli kembali (*repo*).
 - e) Pinjaman Luar Negeri Bank Indonesia adalah setiap penerimaan yang diperoleh Bank Indonesia dalam rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat neraca pembayaran yang diikat dengan suatu perjanjian pinjaman yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, atas nama dan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai badan hukum.

c. Financial Assets and Liabilities Related to Policy Implementation Denominated in Foreign Currencies

Foreign currency assets and liabilities used by Bank Indonesia to implement policy, consist of:

- 1) Placement of banks funds within the context of the Statutory Reserve Requirements that must be met by banks in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Rupiah and Foreign Currency-denominated Statutory Reserve Requirement for Conventional Banks as amended with Bank Indonesia Regulation Number 17/11/PBI/2015 dated June 25, 2015 on Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 15/15/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Rupiah and Foreign Currency-denominated Statutory Reserve Requirement for Conventional Banks.
- 2) Foreign currency Term Deposits are periodic placement of foreign currency-denominated funds owned by participants of Open Market Operations in Bank Indonesia.
- 3) Foreign currency assets and liabilities within the context of managing foreign exchange reserves, include:
 - a) Balances with banks outside of Indonesia in the form of demand and term deposits.
 - b) Foreign currency Marketable Securities.
 - c) Foreign currency Bank Indonesia Marketable Securities.
 - d) Liabilities derived from marketable securities transactions with reverse operations (*repo*).
 - e) Bank Indonesia's Foreign Borrowings are any proceeds received by Bank Indonesia to be used for maintaining foreign reserves to strengthen the balance of payments that are tied through an agreement, which must be repaid with certain conditions, on behalf of and becomes the responsibility of Bank Indonesia as the legal entity.

Aset dan liabilitas dalam valuta asing dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk aset SSB dalam valuta asing yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

Foreign currency assets and liabilities within the context of implementing monetary policy classified as instruments that are measured at amortized cost, except for foreign currency Marketable Securities (SSB) assets that are classified as instruments that are measured at fair value through revaluation reserves.

d. Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui aset dan liabilitas keuangan kebijakan pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

d. Initial Recognition

At its initial recognition, Bank Indonesia recognizes policy-related financial assets and liabilities at fair value. In the event that the financial assets or liabilities are not classified as measured at fair value through revaluation reserves, the fair value shall include the transaction value that can be directly attributed with the acquisition or issuance of these financial assets or financial liabilities.

e. Penghentian Pengakuan

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset keuangan kebijakan jika dan hanya jika:

- 1) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- 2) Bank Indonesia mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

e. De-recognition

Bank Indonesia derecognizes a financial asset if and only if:

- 1) *Contractual rights over the cash flow derived from these financial assets ends; or*
- 2) *Bank Indonesia transfers contractual rights to accept cash flow derived from financial assets, or continues to possess contractual rights to accept cash flow derived from financial assets but also bear the contractual liabilities to pay this cash inflow to one or more recipients as agreed upon.*

Bank Indonesia mengeluarkan liabilitas dari laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Bank Indonesia removes liability from its statement of financial position if and only if, the financial liability ends, specifically when the liability established within the contract is released or cancelled or expired.

Bank Indonesia menghapusbukkan aset keuangan dan saldo penyisihan penurunan nilai aset terkait pada saat Bank Indonesia menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih.

Bank Indonesia writes-off financial asset and allowance for related asset impairment at the time wherein Bank Indonesia determines that these financial assets cannot be collected. Bank Indonesia takes

Bank Indonesia mengambil keputusan tersebut setelah mempertimbangkan bukti objektif yang mendukung, antara lain terdapat kondisi yang menyebabkan posisi keuangan debitur tidak memungkinkan melunasi sebagian atau keseluruhan pinjamannya.

f. Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai aset.

g. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Bank Indonesia menggunakan harga kuotasi di pasar aktif sebagai acuan nilai wajar aset keuangan. Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Bank Indonesia menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan ketersediaan data yang memadai. Teknik penilaian mencakup penggunaan referensi harga pasar terkini untuk transaksi atau instrumen yang sejenis, penggunaan asumsi dan estimasi yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

h. Penyajian

Instrumen keuangan disajikan netto setelah memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar atau yang akan diterima dan penyisihan penurunan nilai aset (jika ada).

this decision by examining supporting and objective evidence, including the conditions that put the borrowers' financial position unlikely to settle part or the entire loan.

f. Measurement of Amortized Cost

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount of financial assets or liabilities at initial recognition deducted by principal payments, added or deducted by cumulative amortization using the effective interest rate that is calculated from the discrepancy between the initial value and at maturity value, minus asset impairment.

g. Fair Value Measurement

Fair value is the price for selling an asset or price for taking over a liability in an organized transaction between the market players at the date of measurement.

Bank Indonesia uses the quoted price within the active market as the financial asset's fair value benchmark. If the market for a financial instrument becomes inactive, Bank Indonesia will use a valuation technique adjusted with the situation and the availability of appropriate data. The valuation technique covers the use of the latest market price reference for the transaction or similar instrument, use of assumptions and estimates that maximize the input with relevant use that can be observed and minimize the input that cannot be observed.

h. Presentation

Financial instruments are presented net after calculating both accrued and deferred interests, as well as the allowance for impairment of financial assets (if any).

12. Instrumen Keuangan Kebijakan Berbasis Syariah

Bank Indonesia memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan berbasis syariah yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.

a. Aset keuangan berbasis syariah yang dimiliki antara lain:

- 1) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.

Bank Indonesia memiliki SBSN yang dapat diperjualbelikan dalam rangka *building stock*, untuk digunakan sebagai instrumen moneter yang akan menggantikan SBI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SBSN jangka pendek atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) diperoleh di pasar perdana sejak bulan Agustus 2011.

- 2) Tagihan dari transaksi repo syariah
Tagihan dari transaksi repo adalah tagihan Bank Indonesia yang timbul dari transaksi pembelian surat berharga dengan kewajiban penjualan kembali (*reverse repo*) sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

b. Liabilitas keuangan berbasis syariah yang dimiliki Bank Indonesia antara lain:

- 1) Penempatan dana bank dalam Rupiah maupun valuta asing dalam rangka simpanan GWM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia.

12. Sharia-based Financial Instruments for Monetary Policy

Bank Indonesia has Sharia-based financial assets and liabilities that are held to implement its policies.

a. Sharia-based financial assets consist of:

- 1) Government Sharia Securities (SBSN) or referred to as Sukuk Negara
Government Sharia Securities (SBSN) or referred to as Sukuk Negara represented state marketable securities that are issued on the basis of Sharia principles, as proof of ownership in an SBSN asset, both in Rupiah as well as foreign currency.

Bank Indonesia has SBSN that can be sold or bought intended for building stock, to be used as a monetary instrument that will replace SBI in accordance with Act Number 1 of 2004 on State Treasury. Short-term SBSN or Sharia Treasury Notes (SPNS) is obtained from the primary market since August 2011.

- 2) Claims derived from Sharia repo transactions
Claims derived from repo transactions are Bank Indonesia's claims arising from marketable securities purchase transactions with reverse repo obligations in accordance with the agreed price and terms.

b. Bank Indonesia's Sharia-based financial liabilities consist of:

- 1) Placement of bank funds in Rupiah and foreign currency within the context of Statutory Reserve Requirements deposits as prescribed in Bank Indonesia Regulation Number 15/16/PBI/2013 dated December 24, 2013 on Rupiah and Foreign Currency Statutory Reserve Requirements for Sharia Banks and Sharia Business Units.
- 2) Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) is a short-term Rupiah-denominated marketable security that is based on Sharia principles issued by Bank Indonesia.

- 3) Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka standing facilities Syariah. FASBIS memiliki jangka waktu satu hari kerja.
- 4) Liabilitas karena penjualan surat berharga dengan perjanjian untuk dibeli kembali secara syariah.
- 5) Liabilitas karena penempatan berjangka berbasis syariah dalam valuta asing.

Liabilitas keuangan berbasis syariah diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada harga perolehan sesuai dengan perjanjian (syariah).

Sesuai dengan PKAK 01 tentang Kebijakan Akuntansi, penetapan perlakuan akuntansi transaksi Bank Indonesia yang bersifat syariah dan unik ditempuh dengan mempertimbangkan secara komprehensif: (i) tujuan Bank Indonesia; (ii) substansi ekonomi dan hukum dari transaksi; (iii) perlakuan akuntansi menurut standar akuntansi atas transaksi yang sejenis pada entitas lain; (iv) bisnis model transaksi syariah; (v) prinsip-prinsip akuntansi syariah yang diterima umum; dan (vi) pendapat pihak yang berwenang untuk menilai transaksi syariah.

Mempertimbangkan model bisnis transaksi dan kepemilikan instrumen keuangan kebijakan berbasis syariah oleh Bank Indonesia, maka transaksi syariah Bank Indonesia adalah transaksi unik, dan sesuai dengan Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK) maka perlakuan akuntansi instrumen keuangan syariah merujuk pada PKAK 06 tentang Instrumen Keuangan Kebijakan.

Aset dan liabilitas berbasis syariah dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk SBSN yang diklasifikasikan sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi.

- 3) *Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS) is a deposit facility provided by Bank Indonesia for banks to place their funds in Bank Indonesia in line with Sharia standing facilities. FASBIS has a one working day terms.*
- 4) *Liability arising from the marketable securities sale with a repurchase agreement under a Sharia basis.*
- 5) *Liability arising from foreign currency Sharia-based time deposits.*

Sharia-based financial liabilities are classified as instruments that are calculated by the acquisition price in accordance with the (sharia) agreement.

In accordance with PKAK 01 on Accounting Policy, the accounting treatment for Bank Indonesia's unique and Sharia-based transactions is carried out by comprehensively assessing: (i) Bank Indonesia's objective; (ii) economic and legal substance from the transactions; (iii) accounting treatment in accordance with the accounting standards for similar transactions for other entities; (iv) Sharia-based transaction model; (v) generally-accepted Sharia accounting principles; and (vi) authorized opinion to evaluate Sharia transactions.

Considering the Sharia-based transaction business model and ownership of financial instrument policies by Bank Indonesia, Bank Indonesia's Sharia-based transactions have unique transactions and are in accordance with Fundamental Principles for the Preparation and Presentation of Bank Indonesia Financial Statements (PDP2LK). Therefore, the Sharia financial instruments accounting treatment refers to PKAK 06 regarding Policy Financial Instrument.

Sharia-based assets and liabilities within the context of implementing monetary policy classified as measured instruments at amortized cost, except for State Sharia Marketable Securities (SBSN), which is classified as an instrument measured at fair value through revaluation reserves.

13. Transaksi dengan *International Monetary Funds (IMF)*

Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, Bank Indonesia mewakili NKRI sebagai anggota pada International Monetary Fund (IMF), sehingga Bank Indonesia memiliki beberapa transaksi dengan IMF antara lain sebagai berikut:

- a. Klaim Partisipasi Keanggotaan (*Quota*)
 Klaim Partisipasi Keanggotaan (*Quota*) merupakan klaim Bank Indonesia kepada IMF yang terdiri dari setoran dalam valuta asing (*Reserve Tranche Position*) dan partisipasi dalam Rupiah (*Quota Subscription*). Partisipasi dalam Rupiah dilakukan dengan:
 - 1) menerbitkan surat utang dalam Rupiah (*Promissory Notes*); dan
 - 2) menyetor ke rekening IMF Nomor 1 (*IMF Account Number 1*) yang berada di Bank Indonesia

Selain itu, Bank Indonesia menatausahakan rekening IMF No. 2 yang digunakan IMF untuk pembayaran beban operasional dalam Rupiah.

Klaim partisipasi keanggotaan dan rekening milik IMF didenominasikan dalam SDR, sehingga Bank Indonesia melakukan penyesuaian nilai (*currency revaluation adjustment*) atas klaim partisipasi keanggotaan dalam Rupiah, *Promissory Notes* dan rekening IMF Nomor 1 dan 2 berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF, sekurang-kurangnya setiap tanggal 30 April.

- b. Hak Tarik Khusus (*Special Drawing Rights/ SDR*)
 Bank Indonesia memiliki Hak Tarik Khusus di IMF (*SDR Holdings*) yang merupakan potensi klaim Indonesia atas *freely usable currencies* (*SDR basket*) milik anggota IMF lainnya dan pemegang SDR lainnya yang telah ditetapkan. *SDR Holdings* tersebut timbul karena adanya alokasi Hak Tarik Khusus (*SDR Allocations*).

Aset dan liabilitas terkait alokasi Hak Tarik Khusus memperoleh/dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga yang sama. Atas pengelolaan Hak Tarik Khusus tersebut, IMF mengenakan biaya administrasi.

13. *Transaction with International Monetary Fund (IMF)*

By law and regulations, Bank Indonesia represents the the Republic of Indonesia (NKRI) as a member at the International Monetary Fund (IMF), whereby Bank Indonesia has a number of transactions with IMF that includes:

- a. *Membership Participation Claim (Quota)*
Membership Participation Claim (Quota) is Bank Indonesia's claims to the IMF that consists of foreign currency deposits (Reserve Tranche Position) and participation in Rupiah (Quota Subscription). Participation in Rupiah is carried out by:
 - 1) *Issuing Rupiah debt securities (Promissory Notes); and*
 - 2) *Deposit in IMF Account Number 1 in Bank Indonesia*

Additionally, Bank Indonesia manages IMF Number 2 account that is used by the IMF to pay operational expenses denominated in Rupiah.

Claim on membership participation and the IMF's account are denominated in SDR, hence Bank Indonesia makes currency revaluation adjustment on membership participation claims denominated in Rupiah, Promissory Notes and IMF Number 1 and 2 accounts based on the exchange rate set by the IMF every April 30 at the latest.

- b. *Special Drawing Rights (SDR)*
Bank Indonesia has Special Drawing Rights (SDR Holdings) at the IMF represents Indonesia's potential claim over freely usable currencies (SDR basket) owned by other IMF members and other SDR holders. These SDR Holdings arise because of Special Drawing Rights Allocations (SDR Allocations).

Assets and liabilities associated with Special Drawing Rights Allocations receives/bears interest at the same rate. The IMF applies an administration fee.

140

198

216

233

Pada saat perolehan, aset dan liabilitas karena partisipasi keanggotaan dan alokasi Hak Tarik Khusus diakui pada nilai wajar. Setelah pengakuan awal, aset dan liabilitas terkait dengan IMF diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal pelaporan:

- a. Saldo aset dan liabilitas dalam valuta asing terkait dengan IMF dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penjabaran saldo tersebut diakui sebagai selisih revaluasi pada kelompok liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.
- b. Saldo partisipasi keanggotaan dalam Rupiah, *Promissory Notes* dan rekening IMF Nomor 1 dan 2 direvaluasi sesuai perubahan nilai tukar Rupiah secara relatif terhadap SDR pada tanggal laporan. Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya dengan jumlah hasil penyesuaian disajikan sebagai estimasi penyesuaian nilai.

Aset terkait dengan IMF dihentikan pengakuannya pada saat Bank Indonesia menarik dana atau membayar kewajiban, IMF memutuskan pembatalan atas keseluruhan atau sebagian alokasi SDR, atau saat NKRI keluar dari keanggotaan di IMF.

Liabilitas terkait dengan IMF dihentikan pengakuannya pada saat IMF menarik dana atau memutuskan pembatalan atas keseluruhan atau sebagian alokasi SDR, atau saat NKRI keluar dari keanggotaan di IMF.

Partisipasi keanggotaan disajikan di aset sebagai bagian pos "Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional" sebesar nilai bersih dari *Quota* dikurangi dengan *Promissory Notes* dan Rekening IMF Nomor 1 yang telah memperhitungkan estimasi penyesuaian nilai.

Hak Tarik Khusus di IMF disajikan di aset sebagai bagian pos "Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional" sebesar nilai tercatat yang telah memperhitungkan aktualisasi pendapatan dan beban bunga dalam SDR.

Upon the acquisition, the assets and liabilities relating to membership participation and Special Drawing Rights allocation are recognized at its fair value. After the initial recognition, the assets and liabilities relating to IMF are calculated by the amortized cost.

At the end of the reporting period:

- a. *The balance of assets and liabilities in foreign currency related to the IMF is translated to Rupiah by using Bank Indonesia middle rate. The difference between the previously registered amounts with the balance amount is recognized as revaluation reserves within the Liabilities in the Statement of Financial Position.*
- b. *The balance of membership participation denominated in Rupiah, Promissory Notes, and IMF No. 1 and No. 2 account are revaluated based on Rupiah exchange rate relatively against SDR at reporting date. The difference between the previously registered amounts and the revaluated amounts is recognized as estimated value.*

Assets related to the IMF are no longer recognized once Bank Indonesia withdraws funds or pays off, whereby IMF will decide to cancel all or part of the SDR Allocations, or when NKRI withdraws its membership in the IMF.

Liabilities related with the IMF are no longer recognized if the IMF withdraws funds or decides to cancel all or part of its SDR allocations, or when the NKRI withdraws its membership with the IMF.

Membership participation is stated in the assets as Receivables from the IMF post at the amount of net Quota less Promissory Notes and IMF No.1 account after calculating estimated value.

Receivables from the IMF is stated in the assets as the part of Special Drawings Rights post at the amount after calculating accrued income and interest expense in SDR.

Alokasi Hak Tarik Khusus disajikan di liabilitas pada pos “Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional” sebesar nilai tercatat.

Allocated Receivables from the IMF is stated in the liabilities as the Counterpart of Special Drawing Rights allocated by the IMF post at its fair amount

Rekening IMF No. 2 disajikan di liabilitas sebagai bagian pos “Kewajiban Non Kebijakan” sebesar nilai tercatat yang telah memperhitungkan estimasi penyesuaian nilai.

IMF No. 2 account is stated in the liabilities as Other Liabilities post at its fair value after calculating estimated amount adjustment.

14. Tagihan dan Liabilitas kepada Pemerintah

a. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

14. Claims and Liabilities to the Government

a. Claims on the Government

Claims on the Government are claims that occurred prior to Bank Indonesia Act Number 23 of 1999 within the context of implementing the duties of Bank Indonesia.

Tagihan tersebut terutama berupa Surat Utang Pemerintah (SUP) yang merupakan surat pengakuan utang jangka panjang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak lain dan pembayaran pokok beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.

This claim is specifically in the form of a Government Bond (SUP) that represents the Government's long-term letter of credit to Bank Indonesia, which cannot be transferred and/or sold to other parties, whereby the principal and interest payment was made in accordance with the agreed terms.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui tagihan kepada Pemerintah sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, tagihan kepada Pemerintah diukur pada nilai tercatat. Bank Indonesia menghentikan pengakuan tagihan kepada Pemerintah pada saat diterima angsuran atau pelunasan.

Upon initial recognition, Bank Indonesia's claims to the government are equal to their nominal value. After its initial recognition, claims to the government are calculated based on its recorded value. Bank Indonesia's claims to the Government expire once they are partially or fully settled.

b. Liabilitas kepada Pemerintah

Bank Indonesia memiliki liabilitas kepada Pemerintah berupa:

- 1) Penempatan dana dalam Rupiah dan valuta asing milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Bank Indonesia dalam bentuk giro sehubungan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah. Bank Indonesia menerima dan mengirimkan transfer Rupiah dan valuta asing untuk dan atas nama Kemenkeu.

b. Liabilities to the Government

Bank Indonesia has liabilities to the Government which include:

- 1) *The Ministry of Finance's (Kemenkeu) Rupiah and foreign currency funds deposited in Bank Indonesia in demand deposits that validates Bank Indonesia's role as the holder of the Government's cash. Bank Indonesia receives and transfers Rupiah and foreign currency for and on behalf of the Ministry of Finance.*

140

198

216

233

Bank Indonesia memberikan remunerasi atas penempatan dana Pemerintah di Bank Indonesia. Tingkat bunga atas Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Rupiah, RKUN valuta USD, dan RKUN valuta asing non USD per tahun adalah 0,1%. Sementara itu tingkat bunga atas rekening penempatan dalam Rupiah, rekening penempatan dalam valuta USD, dan rekening penempatan valas non USD per tahun adalah 65% dari suku bunga acuan. Tingkat bunga atas Rekening Pemerintah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang mengatur mengenai koordinasi pengelolaan Uang Negara dan untuk pertama kali berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009 dan Nomor 11/3/KEP.GBI/2009 tanggal 30 Januari 2009 perihal Koordinasi Pengelolaan Uang Negara.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui giro milik Pemerintah sebagai liabilitas sebesar nilai nominal.

Setelah pengakuan awal, giro milik Pemerintah diukur pada nilai nominal.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan giro milik Pemerintah pada saat terdapat penarikan dana.

- 2) Pinjaman yang diterima oleh Bank Indonesia dari Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui pinjaman dari Pemerintah sebagai liabilitas sebesar nilai nominal.

Setelah pengakuan awal, pinjaman dari Pemerintah diukur pada nilai nominal dikurangi angsuran.

Bank Indonesia pays remuneration on the Government's fund placement in Bank Indonesia. The annual interest rate on Rupiah-denominated State General Cash Account (RKUN), USD RKUN, and non-USD RKUN is 0.1%. Meanwhile, the interest rate on Rupiah accounts, USD accounts, and non-USD accounts are 65% of the benchmark rate. The interest rate on the Government account is set based on the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia's Decree that regulates coordination of State-owned funds and for the first time, based on the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia's Decree Number 17/KMK.05/2009 and Number 11/3/KEP.GBI/2009 dated January 30, 2009 on Coordinated Management of State Funds.

Upon initial recognition, Bank Indonesia recognizes the Government's demand deposits as a liability at its nominal value.

After their initial recognition, the Government's general deposits are calculated by their nominal value.

Bank Indonesia stops recognizing the Government's general deposits once the funds are withdrawn.

- 2) *Borrowings received by Bank Indonesia from the Government c.q. Ministry of Finance are based on Act Number 13 of 1968 on the Central Bank.*

Upon initial recognition, Bank Indonesia recognizes borrowings from the Government as liabilities at their nominal value.

After their initial recognition, borrowings from the Government are calculated by their nominal value less installments.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan pinjaman dari Pemerintah pada saat terdapat angsuran atau pelunasan.

Bank Indonesia stops recognizing borrowings from the Government once they are partially or fully settled.

15. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada Bank merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Terdapat beberapa jenis kredit yang diberikan, antara lain:

- a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit atau pembiayaan kepada bank yang sumber dananya berasal dari Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah.
- b. Pinjaman Subordinasi (*subordinated loan*) selanjutnya disebut SOL merupakan kredit yang diberikan kepada bank dalam rangka penyehatan bank.

Sejak diterbitkan Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak diperbolehkan memberikan kredit berupa SOL dan KLBI.

Namun demikian, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan untuk menjalankan fungsinya sebagai lender of the last resort, antara lain:

- a. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) adalah penyediaan pendanaan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan bank sebagai peserta Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), yang dilakukan dengan cara *Repurchase Agreement* (Repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan penggunaan.
- b. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh bank.
- c. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) adalah fasilitas pendanaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh bank.

15. Claims on Banks

Claims on Banks represent claims that occurred prior to the enactment of Bank Indonesia Act Number 23 of 1999 within the context of the implementation of Bank Indonesia's duties. There are a number of given credits, which includes:

- a. *Bank Indonesia Liquidity Credit (KLBI) is a credit or financing for banks with funds source from Bank Indonesia to support the implementation of the Government's program.*
- b. *Subordinated Loan or referred to as SOL is a loan extended to banks for recovery efforts.*

Following the issuance of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, Bank Indonesia can no longer extend loans in SOL and KLBI.

However, Bank Indonesia may provide financing facilities in the capacity as the lender of the last resort, which includes:

- a. *Intraday Liquidity Facility (FLI) is a funding facility from Bank Indonesia to banks which participate in the Bank Indonesia Real Time Gross Settlement System (BI-RTGS) and the Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI), carried out through marketable securities Repurchase Agreement (Repo) that must be settled within the same day.*
- b. *Short-Term Funding Facility (FPJP) is a funding facility from Bank Indonesia for banks to overcome their short-term funding needs.*
- c. *Short-Term Sharia Funding Facility (FPJPS) is a funding facility from Bank Indonesia that is based on Sharia principles for banks to overcome their short-term funding needs.*

140

198

216

233

Tagihan kepada bank yang berasal dari pelaksanaan kebijakan moneter, misalnya tagihan karena transaksi pembelian surat-surat berharga dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*) tidak termasuk ruang lingkup pos ini. Akuntansi untuk tagihan kepada bank karena pelaksanaan kebijakan moneter diatur sebagaimana angka 11 dan 12.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mengakui tagihan kepada bank sebesar nilai nominal. Setelah pengakuan awal, tagihan kepada bank diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Bank Indonesia menghentikan pengakuan tagihan kepada bank pada saat diterima angsuran atau pelunasan.

16. Penyertaan

Bank Indonesia melakukan penyertaan modal pada lembaga domestik dan internasional. Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan DPR.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat penyertaan sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia mengukur penyertaan pada biaya perolehan. Bank Indonesia menghentikan pengakuan penyertaan pada saat Bank Indonesia melepaskan kepemilikan penyertaan.

17. Aset Keuangan Lainnya

Bank Indonesia memiliki aset keuangan yang tidak secara langsung digunakan dalam pelaksanaan kebijakan atau yang berasal dari transaksi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, antara lain: uang logam emas, uang asing, dan berbagai tagihan kepada pihak selain bank dan Pemerintah.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat aset keuangan lain sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia mengukur aset keuangan lain pada biaya perolehan.

Claims on banks arising from a monetary policy implementation, such as claims from securities sold under repurchase agreement (reverse repo), are excluded from these posts. Accounting for claims on banks arising from a monetary policy implementation is prescribed in number 11 and 12.

Upon initial recognition, Bank Indonesia recognizes claims on banks at nominal value. Following initial recognition, Bank Indonesia's claims on banks expire once they are partially or fully settled.

16. Participating Interest in Domestic and International Institutions

Bank Indonesia places participating interest in domestic and international institutions. Bank Indonesia only places participating interest in a legal entity or other entities that are deemed necessary in executing the duties of Bank Indonesia upon the approval of the House of Representatives (DPR).

Upon its initial recognition, Bank Indonesia books participating interest at acquisition cost. Following initial recognition, Bank Indonesia measures participating interest at acquisition cost. Bank Indonesia stops recognizing its participating interest once it ceased its participation in the interest.

17. Other Financial Assets

Bank Indonesia had financial assets that are indirectly used to implement policy or derived from transaction carried out in accordance with Act Number 13 of 1968 on the Central Bank, including: gold coins, foreign currency, and various claims from parties other than banks and the government.

Upon initial recognition, Bank Indonesia books other financial assets at acquisition cost. Following initial recognition, Bank Indonesia measures other financial assets at acquisition cost.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset keuangan lainnya pada saat Bank Indonesia melepaskan kepemilikan aset keuangan atau penerimaan angsuran/pelunasan tagihan.

Bank Indonesia stops recognizing other financial assets once Bank Indonesia released its financial asset ownership or upon installment of receipts/claims settlement.

18. Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud

Bank Indonesia memiliki tanah, gedung, kendaraan dan berbagai peralatan teknologi informasi yang dikelompokkan sebagai aset tetap dan aset tidak berwujud.

18. *Tangible and Intangible Assets*

Bank Indonesia owns lands, buildings, vehicles and a number of information technology equipment that are categorized as tangible and intangible fixed assets.

Pada pengakuan awal, Bank Indonesia mencatat aset tetap dan aset tidak berwujud sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, Bank Indonesia menggunakan model biaya untuk mengukur aset tetap dan aset tidak berwujud.

Upon its initial recognition, Bank Indonesia books tangible and intangible fixed assets at acquisition cost. Upon initial recognition, Bank Indonesia use cost models to calculate tangible and intangible fixed assets.

Atas aset tetap dan aset tidak berwujud dilakukan penyusutan dan amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaatnya. Pengeluaran yang menambah masa manfaat aset diakui sebagai penambah biaya perolehan aset.

Depreciation and amortization are applied on the tangible and intangible fixed assets by using a straight-line method throughout their useful life. Expenditures that add to the useful life of the assets are recognized as additional asset acquisition cost.

Bank Indonesia menghentikan pengakuan aset tetap dan aset tidak berwujud pada saat aset dimaksud telah habis masa manfaatnya, dijual, dihibahkan, ditukar, ditarik dari pemakaian atau hilang.

Bank Indonesia stops recognizing tangible and intangible fixed assets when the useful life of these assets expire or when they were sold, donated, replaced, withdrawn from use, or lost.

19. Penyisihan Penurunan Nilai Aset Keuangan

Bank Indonesia membentuk penyisihan atas risiko penurunan nilai aset keuangan untuk mengakui penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

19. *Allowance for Impairment of Financial Assets*

Bank Indonesia sets allowance for impairment of financial assets to recognize impairment of financial assets measured at amortized cost.

20. Kewajiban Non Kebijakan

Bank Indonesia memiliki berbagai kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, antara lain: rekening giro milik lembaga keuangan internasional, kewajiban pajak, dan kewajiban imbalan pascakerja.

20. *Other Liabilities*

Bank Indonesia has various liabilities that are indirectly related with policy implementation, including demand deposit accounts of international financial institutions, tax payables, and employee benefit liabilities.

21. Selisih Revaluasi

Selisih revaluasi mencerminkan perubahan kumulatif nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia atau dampak keuangan dari transaksi unik Bank Indonesia yang belum mencapai tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.

21. *Revaluation Reserves*

Revaluation reserves reflect the cumulative change in the fair value of the assets and liabilities of Bank Indonesia or the financial impacts of Bank Indonesia's unique transactions where such transactions have yet to achieve their ultimate objectives.

140

198

216

233

Selisih revaluasi diakui apabila terjadi perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia dan/atau perubahan nilai Rupiah dari aset dan liabilitas Bank Indonesia dalam valuta asing, dan/atau terjadi keuntungan dan kerugian dari transaksi unik Bank Indonesia yang substansi tujuannya ekonominya belum tercapai pada saat transaksi tersebut dilaksanakan, seperti selisih penjabaran mata uang sebagai dampak penyesuaian komposisi aset valuta asing.

Selisih revaluasi direalisasi menjadi penghasilan atau beban tahun berjalan ketika tujuan akhir atau substansi tujuan ekonominya telah tercapai.

22. Modal dan Cadangan

- a. Modal
Modal diakui dan disajikan sebesar modal Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Cadangan
Penambahan dan pengurangan Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, serta alokasi surplus/defisit periode berjalan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. Pendapatan dan Beban Bunga

Untuk menampung pendapatan dan beban yang bersifat bunga Rupiah maupun valuta asing yang merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan moneter berbasis konvensional. Termasuk dalam pos ini antara lain beban bunga dari instrumen keuangan kebijakan yang berbasis utang, beban remunerasi atas giro wajib minimum bank umum dan penerimaan bunga dari surat berharga yang dimiliki.

Pendapatan dan beban bunga diakui dalam Laporan Surplus Defisit secara basis akrual.

24. Pendapatan dan Beban Imbalan

Untuk menampung pendapatan dan beban imbalan dalam Rupiah maupun valuta asing yang merupakan implikasi dari pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah.

Revaluation reserves are recognized when there are changes in the fair value of assets and liabilities of Bank Indonesia and/or changes in the Rupiah's value of assets and liabilities of Bank Indonesia that are denominated in foreign currency, and/or the occurrence of a gain or loss on Bank Indonesia's unique transaction whose substantive economic objective has not been achieved at the time when the transaction was executed, such as the impact of currency translation differences arising out of adjustments in the composition of foreign currency assets.

Revaluation reserves are recognized as current year's income or expense when the substantive economic objective is achieved.

22. Capital and Reserves

- a. Capital
Capital is recognized and presented in the amount of Bank Indonesia's capital as stipulated within the regulations.
- b. Reserves
The increase and decrease of the General Reserves, Statutory Reserves, as well as current year surplus/deficit are determined based on the regulations.

23. Interest Income and Expenses

This post is to accommodate Rupiah and foreign currency income and expenses arising from the implementation of conventionally-based monetary policies. Included in this post were interest expenses from debt-based financial instrument policies, remuneration expenses from GWM, and interests gained from marketable securities owned.

Interest income and expenses were recognized on an accrued basis in the Statement of Surplus Deficit.

24. Sharia-based Transaction Income and Expenses

This post is to accommodate income and expenses derived from Rupiah and foreign currency Sharia-based transactions resulting from the implementation of Sharia-based

Termasuk dalam pos ini antara lain imbalan atas instrumen keuangan kebijakan berbasis syariah, dan penerimaan bagi hasil surat berharga syariah yang dimiliki.

Pendapatan dan beban imbalan diakui dalam Laporan Surplus Defisit secara basis akrual, kecuali imbalan dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Fasilitas Bank Indonesia Syariah yang diakui secara basis kas.

25. Pendapatan Transaksi Aset Keuangan

Untuk menampung pendapatan yang bersifat keuntungan/capital gain (netto setelah memperhitungkan kerugian), antara lain keuntungan dari transaksi penjualan emas, surat berharga, dan transaksi derivatif.

26. Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing

Untuk menampung pendapatan yang bersifat keuntungan selisih kurs (netto setelah memperhitungkan kerugian) yang berasal dari keuntungan transaksi valuta asing yang telah mencapai tujuan akhir.

27. Pendapatan dan Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran

Untuk menampung pendapatan dan beban dari pengelolaan sistem pembayaran tunai dan non tunai.

Pendapatan pengelolaan sistem pembayaran antara lain berasal dari pengenaan biaya tunai dan transfer non tunai, termasuk pengenaan sanksi administratif.

Beban pengelolaan sistem pembayaran antara lain berasal dari pengadaan bahan uang, biaya cetak dan pengedaran uang Rupiah, serta biaya penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai. Tidak termasuk beban depresiasi mesin dan amortisasi software.

28. Pendapatan dan Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Untuk menampung pendapatan dan beban untuk mengatur kebijakan makroprudensial, perluasan akses keuangan dan UMKM serta surveillance sistem keuangan.

monetary policy. Included in this post are sharing income from Sharia-based financial instruments and fees from income sharing of Sharia-based securities owned.

Income and expenses are recognized on an accrued basis in the Statement of Surplus Deficit, with the exception of sharing income derived from Bank Indonesia Sharia Certificates and Bank Indonesia Sharia Facilities that are recognized on a cash basis.

25. Net Result of Financial Transaction Income

This post is to accommodate profit/capital gain income (net after calculating losses), which includes gains from gold, marketable securities, and derivative transactions.

26. Net Result of Foreign Currency Transactions Income

This post is to accommodate net result of foreign exchange rate income (net after calculating losses) derived from foreign currency transactions that have achieved their ultimate objectives.

27. Payment System Services Income and Expenses

This post is to accommodate income and expenses arising from cash and non-cash payment system services.

Payment System Services income is derived from cash expense charge, non-cash transfer fees, and administration penalties.

Payment System Services expenses incur from procurement for money materials, printing and circulation of Rupiah, and non-cash payment system. Excluded to this are machineries depreciation and software amortization.

28. Macroprudential Regulation and Supervision Income and Expenses

This post is to accommodate income and expenses from macroprudential regulation and supervision, expanding financial access and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME), as well as for financial surveillance system.

140

198

216

233

Pendapatan pengaturan dan pengawasan makroprudensial berasal dari pengenaan sanksi kepada bank yang melanggar ketentuan makroprudensial.

Beban pengaturan dan pengawasan makroprudensial antara lain berasal dari formulasi kebijakan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan.

29. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan

Untuk menampung pendapatan dari fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, serta pemberian kredit/pinjaman kepada perbankan dan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

30. Beban Remunerasi kepada Pemerintah

Untuk menampung beban bunga (jasa giro) yang diberikan atas giro Pemerintah dalam Rupiah maupun valuta asing.

31. Imbalan Kerja

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja untuk pegawai yang terdiri dari imbalan kerja dan imbalan pascakerja. Imbalan kerja terdiri dari imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang. Imbalan pascakerja terdiri dari program pensiun dan imbalan pascakerja lainnya. Mulai 1 Januari 2015, Bank Indonesia memiliki dua jenis program pensiun yaitu program imbalan pasti untuk semua pegawai yang telah terdaftar sebagai peserta program pensiun imbalan pasti dan program pensiun iuran pasti untuk semua pegawai baru yang diangkat mulai 1 Januari 2015. Tidak ada kepesertaan ganda pada kedua program pensiun tersebut. Bank Indonesia menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013) tentang imbalan kerja untuk pencatatan dan pelaporan program imbalan kerja.

Jumlah beban dan liabilitas imbalan kerja dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris projected unit credit. Estimasi liabilitas imbalan kerja disajikan di

Macroprudential regulation and supervision income is derived from penalties imposed to banks that violate macroprudential regulations.

Macroprudential regulation and supervision expenses incur from policy formulation of macroprudential and financial stability system.

29. Income from Providing Fund

This post is to accommodate interest income received by Bank Indonesia as the lender of the last resort for credit/loans given to banks and the Government in accordance with Act Number 13 of 1968 on the Central Bank.

30. Remuneration Expenses on Government General Deposits

This post is to accommodate interest expenses (deposit interest) paid for the Government's general deposits, denominated in Rupiah and foreign currencies.

31. Employee Benefits

Bank Indonesia provides a benefit program for its employees that cover employee benefits and post-employee benefits. Employment benefits consist of short-term and long-term employment benefits. Employee benefits consist of pension program and other employment benefits. As of January 1, 2015, Bank Indonesia has two schemes of pension programs, namely: fixed employment program for all employees that are registered as participants of the fixed pension benefit program and contribution pension program for all new employees that are inducted starting from January 1, 2015. There is no dual participation in these two pension programs. Bank Indonesia applied the PSAK 24 (2013 Revision) on Employee Benefits for recording and reporting of employee benefits program.

The amount of employee benefit expenses and liabilities are calculated based on the periodic calculations made by an independent actuary. Employee benefit expenses and liabilities are separately set for each plan by using projected credit unit method. The estimated liability for employment benefits is presented in the Other Liabilities post within the Statement of

pos Kewajiban Non Kebijakan dalam Laporan Posisi Keuangan. Keuntungan/kerugian aktuarial disajikan di pos Selisih Revaluasi dalam Laporan Posisi Keuangan.

32. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf s Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, surplus Bank Indonesia merupakan objek Pajak Penghasilan (PPH). Oleh karena itu, sejak 1 Januari 2009 Bank Indonesia menjadi Wajib Pajak.

Pengaturan pengenaan PPH atas surplus Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPH dalam Tahun Berjalan, sebagai berikut:

- a. Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*) setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.
- b. Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.03/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 86/PMK.010/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPH dalam Tahun Berjalan disebutkan bahwa karakteristik Bank Indonesia terkait surplus antara lain berupa selisih kurs, penyisihan penurunan nilai aset, dan penyusutan aset tetap.

Financial Position. Actuarial gains/losses was shown in the posting Revaluation Reserves in the Statement of Financial Position.

32. Income Tax

Based on Article 4 section (1) letter s of Act Number 36 of 2008 on the Fourth Amendment to Act Number 7 of 1983 on Income Tax, Bank Indonesia's surplus is subject to Income Tax (PPH). Accordingly, Bank Indonesia has become a taxpayer since January 1, 2009.

The governing of the imposition of Income Tax on Bank Indonesia's surplus is prescribed further in Article 7 of Government Regulation Number 94 of 2010 dated December 30, 2010 on Taxable Income Calculation and Income Tax Settlement for the Current Year as follows:

- a. *Bank Indonesia's surplus, which is an income tax object, represents Bank Indonesia's surplus as presented in the (Audited) Annual Financial Statement after fiscal adjustments or corrections in accordance with the Income Tax Laws by taking Bank Indonesia's characteristics into consideration.*
- b. *Procedures for income tax calculation and payment over Bank Indonesia's surplus as mentioned in Article 7 (1) are regulated in the Minister of Finance's Regulation (PMK) Number 100/PMK.03/2011 dated July 11, 2011 as revised through PMK Number 86/PMK.010/2015 dated April 27, 2015 on Changes to the Minister of Finance's Regulation Number 100/PMK.03/2011 on Procedures for Tax Calculation and Payment Over Bank Indonesia's Surplus.*

Subsequently, within the notes to Article 7 of Government Regulation Number 94 of 2010 dated December 30, 2010 on Taxable Income Calculation and Income Tax Settlement for the current year, it is stipulated that Bank Indonesia's characteristics related to surplus include the exchange rate differences, allowance for impairment of financial assets, and fixed assets depreciation.

Pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang, yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

Bank Indonesia telah mengadopsi PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Berdasarkan PSAK 46, entitas menyajikan dampak pajak penghasilan baik kini maupun tanggungan terhadap surplus defisit tahun berjalan.

Pajak tanggungan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan. Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tanggungan dengan Metode Aset dan Liabilitas. Metode ini juga mengatur untuk mengakui manfaat pajak tanggungan atas kompensasi rugi fiskal.

C. MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menghadapi berbagai jenis risiko yang bersumber dari internal maupun eksternal. Pengelompokan risiko diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Nomor 17/12/PDG/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI) dengan mengelompokkan risiko berdasarkan 7 jenis risiko yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko kebijakan, risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko operasional.

Risiko kebijakan berkaitan dengan kredibilitas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam menjaga nilai Rupiah yang stabil melalui inflasi rendah dan pergerakan

Current tax for both current and previous periods is recognized as the amount of tax payable, calculated based on the prevailing tax rate (tax regulation) or the substantively effective rate on the date of the Statement of Financial Position.

Correction on tax liabilities is recognized once the tax assessments are received or upon submission of objections or appeals, once a decision over this objection or appeal has been reached.

Bank Indonesia has adopted PSAK 46 on Income Tax Accounting. In accordance with PSAK 46, income tax is calculated based on the accounting surplus (deficit) for the current year.

Deferred tax is calculated based on the prevailing tax rate at the time of asset recovery or liability settlement, using the prevailing tax rate (tax regulation) or substantively effective rate on the date of the Statement of Financial Position. All temporary discrepancies between the amount of assets and liabilities booked for Statement of Financial Position and respective tax treatments are recognized as deferred taxes using the Asset and Liability Method. This method also firmly recognizes deferred tax benefits over tax loss compensation.

C. RISK MANAGEMENT

The implementation of Bank Indonesia's main task as a monetary authority is susceptible to various types of risks derived internally as well as externally. The risk categories is prescribed in the Board of Governors Regulation (PDG) Number 17/12/PDG/2015 dated September 29, 2015 on Bank Indonesia's Risk Management (MRBI) by categorizing risk into 7 types, namely: market risk, credit risk, liquidity risk, policy risk, reputational risk, legal risk, and operational risk.

Policy risk is associated with Bank Indonesia's credibility as a monetary authority in maintaining the stability in the value of Rupiah through low inflation and controlling Rupiah

nilai tukar Rupiah yang terkendali. Risiko keuangan timbul sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan devisa dan kegiatan operasional pengelolaan moneter. Sementara itu, risiko non keuangan meliputi risiko operasional, risiko hukum, risiko kebijakan dan risiko reputasi. Seluruh jenis risiko tersebut akan berdampak pada reputasi dan kredibilitas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Untuk itu, diperlukan penguatan agar manajemen risiko dapat berjalan efektif melalui pengendalian secara terukur.

Risiko kebijakan adalah risiko yang dihadapi oleh Bank Indonesia atas pernyataan kebijakan, pengaturan, dan penetapan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan kebijakan moneter, upaya menjaga inflasi yang rendah dilakukan dengan penyerapan likuiditas Rupiah melalui instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT). Penyerapan likuiditas Rupiah menjadi komponen biaya yang paling dominan pada Laporan Posisi Keuangan Bank Indonesia. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan moneter untuk menjaga nilai tukar yang stabil dilakukan melalui intervensi valas. Upaya intervensi menunjukkan kesungguhan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah yang merupakan salah satu tugas utamanya. Upaya stabilisasi tersebut dapat mengurangi pelemahan Rupiah yang lebih dalam.

Risiko keuangan Bank Indonesia meliputi risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Eksposur risiko keuangan bersumber dari pengelolaan cadangan devisa dan pelaksanaan kebijakan moneter. Dari pengelolaan devisa, risiko kredit dirinci berdasarkan penerbit (*issuer*) Surat-Surat Berharga (SSB) dan *counterparty* pengelolaan devisa. Dalam hal ini, mitigasi risiko kredit dilakukan antara lain melalui penetapan penerbit SSB, batasan minimum *credit rating* penerbit SSB, dan pemantauan *counterparty* secara periodik. Dari pengelolaan moneter, risiko kredit berasal dari potensi gagal bayar setelmen terkait transaksi OPT. Pemantauan terhadap *counterparty* peserta OPT dilakukan untuk mengendalikan risiko tersebut.

exchange rate movements. Financial risks arise from the foreign exchange management activities and monetary management operational activities. Meanwhile, non-financial risks include operation risk, legal risk, policy risk and reputational risk. All of these risks can affect Bank Indonesia's reputation and credibility as a monetary authority. Therefore, risk management needs to be strengthened to ensure that it is effectively implemented through some control measures.

Policy risk is a risk faced by Bank Indonesia as a result of the stated policy, regulation, and determination issued by Bank Indonesia. When implementing monetary policy, efforts to maintain low inflation are carried out by absorbing Rupiah liquidity through Open Market Operations instruments (OMO). The Rupiah's liquidity absorption is the most dominant cost component in Bank Indonesia's Financial Statement. Meanwhile, the implementation of monetary policy to maintain a stable exchange rate is carried out through foreign exchange intervention. Intervention efforts reflected Bank Indonesia's seriousness as a monetary authority to maintain the stability of the Rupiah's exchange rate, which is one of its main tasks. These stabilization efforts can minimize the further weakening of the Rupiah.

Bank Indonesia's financial risks consist of credit risk, market risk, and liquidity risk. Financial risk exposure derives from foreign exchange reserves management and monetary policy implementation. On foreign exchange management, credit risk is detailed by the Securities (SSB) issuer and foreign exchange management counterparty. In this regard, credit risk mitigation is carried out by, among others, determining the SSB issuer, the SSB issuer's minimum credit rating limit, and periodically monitoring the counterparty. On monetary management, credit risk derives from potential settlement payment default related to OMO transactions. Monitoring OMO counterparties is carried out to control these risks.

Risiko pasar muncul akibat pergerakan mata uang dan suku bunga (*yield*). Pengukuran, pemantauan, dan evaluasi risiko pasar dilakukan secara periodik antara lain melalui pengukuran *Value at Risk* (VaR), *Tracking Error*, dan durasi portfolio cadangan devisa. Mitigasi risiko pasar dilakukan dengan penetapan *Strategic Asset Allocation* (SAA), yaitu dengan penetapan deviasi mata uang, jenis aset, dan durasi portfolio agar memberikan imbal hasil optimal.

Risiko likuiditas muncul berkaitan dengan kemampuan Bank Indonesia dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, terutama untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan keperluan likuiditas valas dalam rangka stabilisasi nilai tukar Rupiah. Mitigasi risiko likuiditas dilakukan dengan menjaga kecukupan jumlah cadangan devisa agar dapat memenuhi kebutuhan pembayaran dalam valas.

Bank Indonesia juga menghadapi risiko non keuangan yang dapat berdampak terhadap Laporan Keuangan Bank Indonesia. Risiko non keuangan terdiri dari risiko operasional, risiko hukum, risiko kebijakan dan risiko reputasi. Mitigasi risiko dilakukan melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, dan pelaksanaan *Business Continuity Plan*.

D. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LAPORAN SURPLUS DEFISIT

Sehubungan dengan perubahan PSAK 24 (Revisi 2013) Bank Indonesia menyajikan kembali mutasi aset, liabilitas, dan beban imbalan kerja per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

Market risk arises as a result of currency and interest rate (yield) movements. Market risk measurement, monitoring, and evaluation are periodically carried out by, among others, measuring Value at Risk (VaR), Tracking Error, and the duration of the foreign exchange reserve portfolio. Market risk mitigation is carried out by determining the Strategic Asset Allocation (SAA), namely, determining the currency deviation, the type of asset, and portfolio duration to provide optimum returns.

Liquidity risk arises in relation with Bank Indonesia's ability to meet its short-term obligations, particularly paying the government's foreign debts and foreign exchange liquidity requirements within the context of stabilizing the Rupiah exchange rate. Liquidity risk mitigation is carried out by maintaining the adequate amount of foreign exchange reserves to ensure that it meets the needs for foreign currency payments.

Bank Indonesia is also susceptible to non-financial risks that can impact Bank Indonesia's Financial Statements. Non-financial risks consist of operational risk, legal risk, policy risk and reputational risk. Risk mitigation is carried out by separation of task and responsibility, and implementing a Business Continuity Plan.

D. RESTATEMENT OF FINANCIAL POSITION AND SURPLUS DEFICIT

In accordance with the changes to PSAK 24 (2013 Revision), Bank Indonesia presented restatements of assets, liabilities, and employee benefit expenses movements as of December 31, 2014 as follows:

Uraian	Manfaat Pensiun Pension Benefit	Tunjangan Pemilikan Rumah Housing Allowance	Tunjangan Kesehatan Hari Tua Retirement Benefit Program	Imbalan Pascakerja Post Employment Benefits	Imbalan Kerja Jangka Panjang Long-Term Benefits	Pajak untuk Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Tax on Post Employment Benefit and Long-Term Employment Benefits	Jumlah Total	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Saldo Aset/ (Kewajiban) 31 Desember 2014	(593.663)	(97.445)	(834.373)	(403.957)	(1.566.469)	(295.363)	(3.791.270)	Asset/(Liabilities) Balance as per December 31, 2014
PSAK 24 (Revisi 2013):								PSAK 24 (2013 Revision):
Surplus Defisit	(158.642)	378.275	123.348	(14.120)	49.172	(50.740)	327.293	Surplus Deficit
Selisih Revaluasi	(1.510.794)	(280.830)	279.150	(155.764)	-	(26.301)	(1.694.539)	Revaluation Reserves
Saldo Aset/ (Kewajiban) 31 Desember 2014 (Disajikan Kembali)	(2.263.099)	-	(431.875)	(573.841)	(1.517.297)	(372.404)	(5.158.516)	Asset/(Liabilities) Balance as per December 31, 2014 (as restated)

Uraian	Disajikan Sebelumnya As Stated Before	Disajikan Kembali Restated	Description
Laporan Posisi Keuangan:	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	Statement of Financial Position:
ASET			ASSETS
5. Aset Non Kebijakan	22.951.832	22.878.730	5. Other Assets
5.3. Aset Tetap dan Lainnya	20.009.077	19.935.975	5.3. Property and Equipment
LIABILITAS			LIABILITIES
5. Kewajiban Non Kebijakan	22.501.783	23.869.029	5. Other Liabilities
5.2. Imbalan Kerja	3.791.270	5.158.516	5.2. Employee Benefits
6. Selisih Revaluasi	158.268.155	156.573.616	6. Revaluation Reserves
6.4 Lainnya	14.163.519	12.468.980	6.4 Others
Keuntungan/Kerugian Aktuarial	-	(1.694.539)	Actuarial Surplus/Deficit
8. Akumulasi Surplus / Defisit	114.771.506	115.025.697	8. Accumulated Surplus/Deficit
8.3 Surplus/Defisit Tahun Berjalan	41.231.508	41.485.699	8.3 Current Year Surplus (Deficit)

Laporan Surplus Defisit:	Disajikan Sebelumnya As Stated Before	Disajikan Kembali Restated	Statement of Surplus Deficit:
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
BEBAN			EXPENSES
5. Beban Umum dan Lainnya	8.277.725	7.950.432	5. General and Administrative Expenses
5.1. SDM, Organisasi dan Logistik	6.611.308	6.284.015	5.1. Human Resources and Logistics Expenses
JUMLAH BEBAN	38.001.463	37.674.170	TOTAL EXPENSES
PAJAK	(13.867.501)	(13.940.603)	TAXES
SURPLUS/DEFISIT SETELAH PAJAK	41.231.508	41.485.699	SURPLUS/DEFICIT AFTER TAXES
RASIO MODAL			CAPITAL RATIO
Rasio Modal terhadap Kewajiban Moneter	7,74%	7,76%	Capital to Monetary Liabilities Ratio

Penjelasan penyajian kembali Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Surplus Defisit:

1. Pos Aset Non Kebijakan sebesar Rp22.951.832 juta disajikan kembali menjadi Rp22.878.730 juta karena kenaikan Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp73.102 juta.
2. Pos Kewajiban Non Kebijakan sebesar Rp22.501.783 juta disajikan kembali menjadi Rp23.869.029 juta karena kenaikan kewajiban imbalan kerja sebesar Rp1.367.246 juta.
3. Pos Selisih Revaluasi sebesar Rp158.268.155 juta disajikan kembali menjadi Rp156.573.616 juta disebabkan oleh keuntungan/kerugian aktuarial yang terjadi selama tahun 2014 diakui seluruhnya pada pos Selisih Revaluasi dengan jumlah sebesar Rp1.694.539 juta.
4. Pos Akumulasi Surplus Defisit sebesar Rp114.771.506 juta disajikan kembali menjadi Rp115.025.697 juta atau naik sebesar Rp254.191 juta karena:
 - a. Keuntungan/kerugian aktuarial yang terjadi sebelum tahun 2014 dan sebelumnya telah diakui sebagai beban/pendapatan dikoreksi menjadi pos Selisih Revaluasi dengan jumlah sebesar surplus Rp286.815 juta.
 - b. Perubahan metode perhitungan bunga bersih (net interest) pada kewajiban imbalan kerja dan ekspektasi pengembalian aset program sebesar surplus Rp40.478 juta.
 - c. Penghasilan Pajak Tangguhan mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya koreksi fiskal yang bersifat temporer dari pembentukan cadangan imbalan jangka panjang dan imbalan pascakerja pada beban akibat perubahan PSAK 24 sebesar Rp73.102 juta.
5. Pos Beban Umum dan Lainnya sebesar Rp8.277.725 juta disajikan kembali menjadi Rp7.950.432 juta atau turun sebesar Rp327.293 juta sebagaimana penjelasan pada pos Akumulasi Surplus Defisit.
6. Dengan adanya penyajian kembali tersebut di atas dilakukan perhitungan kembali Rasio Modal yang sebelumnya sebesar 7,74% menjadi 7,76%.

Notes to the Restatement of Financial Position and Surplus Deficit:

1. Other Assets account amounting to IDR22,951,832 million was restated to IDR22,878,730 million due to the increase in Deferred Tax Assets amounting to IDR73,102 million.
2. Other Liabilities account amounting to IDR22,501,783 million was restated to IDR23,869,029 million due to the increase in Employee Benefits Liabilities amounting to IDR1,367,246 million.
3. Revaluation Reserves account amounting to IDR158,268,155 million was restated to IDR156,573,616 million due to actuarial gains/losses that occurred in 2014 entirely recognized in the Revaluation Reserves account amounting to IDR1,694,539 million.
4. Accumulated Surplus Deficit Account amounting to IDR114,771,506 million was restated to IDR115,025,697 million or increased by IDR254,191 million due to:
 - a. Actuarial gains/losses incurred prior to 2014 and previously recognized as expense/income were rectified to become Revaluation Reserves account amounting to a surplus of IDR286,815 million.
 - b. Changes to the calculation method on net interest on employee benefit liability and expected program's asset return amounting to a surplus of IDR40,478 million.
 - c. Decrease in Deferred Tax Receipts resulting from reduced temporary fiscal correction from allowance for long term benefits and employee benefits in line with changes to PSAK 24 amounting to IDR73,102 million.
5. General and Administrative Expenses Account amounting to IDR8,277,725 million was restated to IDR7,950,432 million or decreased by IDR327,293 million as stated in the notes to the Accumulated Surplus/Deficit account.
6. As a result of the above-mentioned restatements, the Capital Ratio was recalculated, from 7.74% previously to 7.76%.

E. PERINCIAN POS LAPORAN KEUANGAN

1. Emas

Saldo emas per 31 Desember 2015 sebesar TOZ2,510,019.6096 atau setara dengan Rp36.781.172 juta dan 31 Desember 2014 sebesar TOZ2,509,874.4000 atau setara dengan Rp37.441.928 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Emas	34.395.143	35.012.761	Gold
Hak kontraktual atas emas batangan:			Gold Receivables
Deposito Berjangka Emas	2.386.029	2.429.167	Gold Deposits
Dikurangi :			Less :
Penyisihan penurunan nilai aset	0	0	Allowance for Impairment of Financial Assets
Jumlah Emas	36.781.172	37.441.928	Total Gold

Selama tahun 2015 terdapat pembelian emas sebesar TOZ145.2096. Harga emas batangan di pasar emas London per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar USD1,062.25 per troy ounce (TOZ) dan USD1,199.25 per TOZ.

2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Surat berharga yang dimiliki oleh Bank Indonesia diukur pada nilai wajar melalui selisih revaluasi, sedangkan tagihan karena transaksi repo dan tagihan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp1.573.395.660 juta dan Rp1.490.095.581 juta dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	153.628.086	134.444.810	Securities Held and Claims Denominated in Rupiah
Surat Berharga dan Tagihan berbasis Syariah dalam Rupiah	2.327.535	1.403.251	Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah
Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	1.417.440.039	1.354.247.520	Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency
Jumlah Aset Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	1.573.395.660	1.490.095.581	Total Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation

E. FINANCIAL STATEMENTS DETAIL

1. Gold

Gold balance as of December 31, 2015 was TOZ2,510,019.6096 or equivalent to IDR36,781,172 million and December 31, 2014 was TOZ2,509,874.4000 or equivalent to IDR37,441,928 million, with the following breakdown:

Total gold purchase in 2015 was TOZ145,2096. Gold bullion prices in London gold market as of December 31, 2015 and December 31, 2014 were USD1,062.25 per troy ounce (TOZ) and USD1,199.25 per TOZ respectively.

2. Financial Assets Related to Monetary Policy Implementation

Securities held by Bank Indonesia are calculated based on their fair value through revaluation reserves, while claims derived from reverse operation transactions and other claims are calculated based on their amortized cost.

Financial assets related to Monetary Policy Implementation as of December 31, 2015 and December 31, 2014 were IDR1,573,395,660 million and IDR1,490,095,581 million respectively, with details as follows:

a. Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah

a. Securities Held and Claims Denominated in Rupiah

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Surat Utang Negara (SUN)	144.573.893	133.523.365	Government Securities
Tagihan kepada Bank karena Transaksi Repo Surat Berharga	6.970.248	0	Claim on Banks Arising from Repo Operation
Tagihan Lainnya	2.083.945	921.445	Other Claims
Dikurangi :			Less :
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0	Allowance for Impairment of Financial Assets
Jumlah Surat Berharga dan Tagihan dalam Rupiah	153.628.086	134.444.810	Total Securities Held and Claims Denominated in Rupiah

b. Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah

b. Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah

Saldo Surat Berharga dan Tagihan Berbasis Syariah dalam Rupiah per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp2.327.535 juta dan Rp1.403.251 juta yang merupakan Surat Berharga Syariah Negara.

The balance of Sharia-based Securities Held and Claims Denominated in Rupiah as of December 31, 2015 and December 31, 2014 were IDR2,327,535 million and IDR1,403,251 million respectively, in the form of State Sharia Securities.

c. Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing

c. Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Penempatan dana di luar negeri	312.097.336	352.960.670	Balances with Banks and Portfolio Managers Outside Indonesia
Surat Berharga	1.105.306.174	1.001.246.471	Securities
Tagihan	36.529	40.379	Claims
Dikurangi :			Less :
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0	Allowance for Impairment of Financial Assets
Jumlah Surat Berharga dan Tagihan dalam Valuta Asing	1.417.440.039	1.354.247.520	Total Securities Held and Claims Denominated in Foreign Currency

1) Penempatan dana di luar negeri terdiri dari Giro, Deposito, Penempatan pada *External Portfolio Manager*, dan Reinvestasi *Cash Collateral*.

1) Balances of funds overseas consisted of Demand Deposits, Term Deposits, Investments with External Portfolio Managers, and Cash Collateral Reinvestments.

Penempatan dana di luar negeri dalam bentuk deposito di antaranya pada IMF berupa Deposito *Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)* sebesar SDR25,000,000.00 atau setara dengan Rp478.293 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dan setara dengan Rp450.446 juta

Funds overseas includes term deposits at the IMF in *Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)* deposits were SDR25,000,000.00 or equivalent to IDR478,293 million on December 31, 2015 and IDR450,446 million on

pada tanggal 31 Desember 2014. Selain itu terdapat *Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) and PRGF Subsidy Operations ("The Trust")* sebesar SDR4,850,030.00 atau setara dengan Rp92.789 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dan setara dengan Rp87.387 juta pada tanggal 31 Desember 2014.

- 2) Dalam SSB Valas yang dimiliki oleh Bank Indonesia per 31 Desember 2015, termasuk alokasi penempatan pada *Third Party Securities Lending (TPSL)* sebesar Rp168.200.831 juta. Dari jumlah alokasi tersebut yang telah dipinjamkan adalah sebesar Rp153.519.270 juta dan Bank Indonesia menerima agunan (*collateral*) dalam bentuk non tunai (*non cash*) sebesar Rp134.857.069 juta yang ditatausahakan secara extra comptable dan bentuk tunai (*cash*) sebesar Rp29.257.616 juta yang direinvestasikan oleh agen.

December 31, 2014. Moreover, there was a Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) and PRGF Subsidy Operations ("The Trust") amounting to SDR4,850,030.00 or equivalent to IDR92,789 million on December 31, 2015 and IDR87,387 million on December 31, 2014.

- 2) *Securities held by Bank Indonesia as of December 31, 2015 included the allocation of placements in Third Party Securities Lending (TPSL) amounting to IDR168,200,831 million. From this allocation, an estimated IDR153,519,270 million was loaned and Bank Indonesia received non-cash collateral amounting to IDR134,857,069 million which was administered as extra comptable, in cash amounting to IDR29,257,616 million which is reinvested by the agents.*

3. Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional

Saldo Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp36.473.988 juta dan Rp31.731.041 juta dengan rincian sebagai berikut:

3. Receivables from the IMF

The balance of Receivables from the IMF as of December 31, 2015 and December 31, 2014 were IDR36,473,988 million and IDR31,731,041 million respectively, with details as follows:

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
<i>Quota:</i>			<i>Quota:</i>
Quota SDR2,079,300,000.00	39.780.606	0	Quota SDR2,079,300,000.00
Dikurangi:			<i>Less:</i>
<i>Promissory Notes</i>	34.180.099	0	<i>Promissory Notes</i>
IMF Account No.1	1.005.066	0	<i>IMF Account No.1</i>
Perkiraan penyesuaian nilai quota dalam Rupiah	1.811.799	0	<i>Estimated quota value adjustment in Rupiah</i>
Reserve Tranche Position SDR145,498,709.00	2.783.642	0	Reserve Tranche Position SDR145,498,709.00
SDR Holdings	33.690.346	31.731.041	SDR Holdings
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Penyisihan Aset	0	0	<i>Allowance for Bad Debt</i>
Jumlah Hak Tarik Khusus di Lembaga Keuangan Internasional	36.473.988	31.731.041	Receivables from the IMF

140

198

216

233

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015, keterwakilan Indonesia di IMF beralih dari Kemenkeu kepada Bank Indonesia. Terkait dengan hal tersebut pada tanggal 31 Desember 2015 telah dilakukan pengalihan *quota* IMF sebesar Rp37.159.222 juta melalui penerbitan *Promissory Note* (PN) oleh Bank Indonesia sebesar Rp33.553.945 juta untuk menggantikan PN yang sebelumnya diterbitkan oleh Kemenkeu, penyelesaian Tagihan Bank Indonesia kepada Pemerintah sehubungan dengan Keanggotaan pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) sebesar Rp2.826.956 juta serta tambahan modal Bank Indonesia sebesar Rp778.320 juta. Tambahan modal tersebut merupakan selisih dari nilai *quota* Indonesia pada IMF dengan nilai *promissory note* Kemenkeu dan penyelesaian Tagihan Bank Indonesia kepada Pemerintah sehubungan dengan Keanggotaan pada LKI.

Rekening giro *IMF Account Number 1* sebesar Rp1.005.066 juta, semula disajikan dalam pos Kewajiban Non Kebijakan (subpos Giro Lembaga Domestik dan Internasional). Setelah pengalihan *quota* IMF, rekening tersebut disajikan dalam pos Hak Tarik Khusus pada Lembaga Keuangan Internasional.

Rekening IMF dalam Rupiah disesuaikan nilainya berdasarkan kurs IMF tanggal 30 April.

Per 31 Desember 2015, terdapat peningkatan PN sebesar Rp626.154 juta karena *currency valuation adjustment*. Selain itu, Bank Indonesia telah melakukan perkiraan penyesuaian untuk *Quota Subscription* dan rekening IMF dalam Rupiah sebesar Rp1.811.799 juta.

4. Tagihan

Saldo Tagihan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp223.129.030 juta dan Rp230.568.589 juta dengan rincian sebagai berikut:

In accordance with the enactment of Government Regulation Number 98 of 2015 dated December 28, 2015, Indonesia's representative at the IMF shifted from the Ministry of Finance to Bank Indonesia. As a result, on December 31, 2015, the IMF quota amounting to IDR37,159,222 million was shifted through the issuance of Promissory Notes (PN) of IDR33,553,945 million by Bank Indonesia to replace the PN previously issued by the Ministry of Finance, settlement of Bank Indonesia's claim to the Government for Membership in International Financial Institutions (IFI) amounting to IDR2,826,956 million as well as Bank Indonesia's additional capital amounting to IDR778,320 million. This additional capital represents the balance of Indonesia's quota amount in the IMF with the value of the Ministry of Finance's PN and settlement of Bank Indonesia's claim with the Government in relation to Membership at the IFI.

IMF demand deposit Account Number 1 amounting to IDR1,005,066 million was initially presented in the Other Liabilities account (Domestic and International Institution demand deposit sub account). Following the shifting of the IMF quota, this account is thereby presented as Special Drawing Rights in the IFI account.

The IMF Rupiah-denominated account's value was adjusted based on the IMF's exchange rate as of April 30.

There was a increase in PN by IDR626,154 million due to currency valuation adjustment. Additionally, Bank Indonesia has made projected adjustments in its IMF membership participation in Rupiah as much as IDR1,811,799 million .

4. Claims

The balance of claims as of December 31, 2015 and December 31, 2014 were IDR223,129,030 million and IDR230,568,589 million respectively, with details as follows:

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Tagihan Kepada Pemerintah			Claims on the Government
Surat Utang yang tidak dapat Dipindahtangankan:			Non-Tradable Government Securities
SUP Nomor SU-002/MK/1998	15.501.145	16.444.954	SUP Number SU-002/ MK/1998
SUP Nomor SU-004/ MK/1999	42.411.261	44.796.189	SUP Number SU-004/ MK/1999
SUP Nomor SU-007/ MK/2006	40.532.844	42.812.142	SUP Number SU-007/ MK/2006
Obligasi Negara Seri SRBI-01/ MK/2003	124.196.975	125.000.645	Treasury Bond Series SRBI-01/ MK/2003
Tagihan:			Claims:
Tagihan karena Keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional	0	2.826.956	Claims due to Government Membership of International Institutions
Tagihan bunga SUP dan Subsidi Bunga Kredit Program	77.889	81.717	Claims due to Loan Interest
Tagihan Kepada Bank			Claims on Banks
Tagihan dalam Rangka Penyaluran Kredit Sebelum Tahun 1999	464.498	1.488.524	Claims arising from credit to banks prior 1999
Dikurangi:			Less:
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	55.582	2.882.538	Allowance for Impairment of Financial Assets
Jumlah Tagihan	223.129.030	230.568.589	Total Claims

a. SUP Nomor SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia. Nilai nominal SU-002 adalah sebesar Rp20.000.000 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-002 yang mengubah suku bunga dari 1,0% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak

a. SUP Number SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 was issued on October 23, 1998 based on Presidential Decree Number 55 of 1998 on Domestic Loans in Debt Securities in conjunction with Government Regulation Number 60 of 1998 on Additional Equity Participation of the Republic of Indonesia in PT Bank Ekspor Impor Indonesia. The nominal value of SU-002 was IDR20,000,000 million that is both non-tradeable and non-transferable.

Pursuant to Act Number 41 of 2008 dated November 10, 2008 on Government Budget Income and Expenditure for the Fiscal Year 2009, the Minister of Finance issued the fifth addendum of SU-002 amending the interest rate from 1.0% to 0.1% per year which took effect on January 1, 2009. The outstanding balance

140

198

216

233

tanggal 1 Januari 2009. Baki debit SU-002 per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp15.501.145 juta.

b. SUP Nomor SU-004/MK/1999 (SU-004)

SU-004 diterbitkan tanggal 28 Mei 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Persetujuan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999. Nilai nominal SU-004 adalah sebesar Rp53.779.500 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan addendum kelima SU-004 yang mengubah suku bunga dari 3,0% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Baki debit SU-004 per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp42.411.261 juta.

c. SUP Nomor SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 diterbitkan tanggal 24 November 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 tanggal 18 April 2006. Nilai nominal SU-007 adalah sebesar Rp54.862.150 juta dan tidak dapat diperdagangkan.

SU-007 diterbitkan untuk mendudukkan tunggakan bunga dan hasil indeksasi SU-002 dan SU-004 s.d. tanggal 31 Desember 2005 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tunggakan bunga SU-002 sebesar Rp4.637.583 juta.
- 2) Tunggakan bunga SU-004 sebesar Rp12.291.887 juta.
- 3) Hasil indeksasi SU-002 sebesar Rp11.231.072 juta.
- 4) Hasil indeksasi SU-004 sebesar Rp26.701.608 juta.

of SU-002 as of December 31, 2015 was IDR15,501,145 million.

b. SUP Number SU-004/MK/1999 (SU-004)

SU-004 was issued on May 28, 1999 based on Presidential Decree Number 55 of 1998 on Domestic Loans in Debt Securities in conjunction with the Joint Approval between the Government and Bank Indonesia dated February 6, 1999. The face value of SU-004 was IDR53,779,500 million that is both non-transferable and non-tradeable.

Pursuant to Act Number 41 of 2008 dated November 10, 2008 on Government Budget Income and Expenditure for the Fiscal Year 2009, the Minister of Finance issued the fifth addendum of SU-004 amending the annual interest rate from 3.0% to 0.1% which took effect on January 1, 2009. The outstanding balance of SU-004 as of December 31, 2015 was IDR42,411,261 million.

c. SUP Number SU-007/MK/2006 (SU-007)

SU-007 was issued on November 24, 2006 based on Act Number 24 of 2002 on Government Bonds and the Joint Agreement between the Minister of Finance and Bank Indonesia Governor on Restructuring of Government Bonds Number SU-002/MK/1998 and SU-004/MK/1999 dated April 18, 2006. SU-007 has a face value amounting to IDR54,862,150 million that is non-tradeable.

SU-007 was issued to substitute interest and indexation arrears resulting from SU-002 and SU-004 up to December 31, 2005 with the following details:

- 1) SU-002 interest arrears amounting to IDR4,637,583 million.
- 2) SU-004 interest arrears amounting to IDR12,291,887 million.
- 3) SU-002 indexation arrears amounting to IDR11,231,072 million.
- 4) SU-004 indexation arrears amounting to IDR26,701,608 million.

Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut:

- 1) SU-007 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2025.
- 2) Bunga SU-007 sebesar 0,1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali, yaitu pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Februari 2006 dan tanggal 1 Agustus 2006.
- 3) Pokok SU-007 diangsur sebanyak 38 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Februari 2007 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 Agustus 2025. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dibayar dengan Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan.

Baki debit SU-007 per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp40.532.844 juta.

d. Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)

SRBI-01 diterbitkan sebagai pengganti SUP Nomor SU-001/MK/1998 dan Nomor SU-003/MK/1999 dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 (SKB Tahun 2003). Nilai nominal SRBI-01 adalah sebesar Rp144.536.094 juta.

Pada tanggal 31 Juli 2012 telah ditandatangani revisi SKB Tahun 2003 oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian yang antara lain memuat restrukturisasi Obligasi Negara Nomor

The terms and conditions for this Bond are as follows:

- 1) *SU-007 took effect on January 1, 2006 and matures on August 1, 2025.*
- 2) *SU-007 bears an annual interest at 0.1%, calculated on the remaining principal and paid in cash by the Government to Bank Indonesia every six months, on February 1 and August 1. The first interest payment was made on December 1, 2006 for interests due on February 1, 2006 and on August 1, 2006.*
- 3) *Principal repayment on SU-007 was divided into 38 installments. The first installment was due and paid on February 1, 2007 and the next installments are due and paid on August 1 and February 1 each year until the final installment on August 1, 2025. Principal repayments are settled either in cash or with tradeable Government Securities.*

The outstanding balance of SU-007 as of December 31, 2015 was IDR40,532,844 million.

d. Treasury Bond Series SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)

SRBI-01 was issued to replace SUP Number SU-001/MK/1998 and Number SU-003/MK/1999 in relation to the implementation of the Joint Agreement between the Government and Bank Indonesia on the Settlement of the Bank Indonesia Liquidity Support (BLBI) as well as the Financial Relationship between the Government and Bank Indonesia dated August 1, 2003 (SKB of 2003). The nominal value of SRBI-01 was IDR144,536,094 million.

On July 31, 2012 a revision to SKB of 2003 was signed by the Governor of Bank Indonesia, the Minister of Finance, and the Coordinating Minister for the Economy that, among others, contained the restructuring of Treasury Bond Series

Seri SRBI-01/MK/2003 dari semula pembayaran sekaligus (bullet payment) pada saat jatuh tempo tahun 2033 dengan sistem *self-liquidating*, menjadi pembayaran dengan metode cicilan (*amortized*) s.d. jatuh tempo tahun 2043, sehingga persyaratan SRBI-01 mengalami perubahan sebagai berikut:

- 1) SRBI-01 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003, dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2043.
- 2) SRBI-01 dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1% dari sisa pokok, yang dibayar oleh Pemerintah setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.
- 3) Pokok SRBI-01 dibayar setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Agustus 2043. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah.

Baki debit SRBI-01 per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp124.196.975 juta.

e. Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Keuangan Internasional

Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam LKI pada tanggal 31 Desember 2015 nihil karena telah diselesaikan bersamaan dengan pengalihan pengelolaan dan penatausahaan keuangan terkait keanggotaan NKRI pada IMF dari Kemenkeu kepada Bank Indonesia (catatan E.3).

f. Tagihan kepada Bank dalam rangka Penyaluran Kredit Sebelum Tahun 1999

Tagihan Kepada Bank dalam rangka Penyaluran Kredit Sebelum Tahun 1999 antara lain terdiri atas Tagihan kepada Bank berupa *Subordinated Loan* (SOL) dan KLBI yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, saldo SOL dan KLBI masing-masing sebesar Rp464.498 juta dan Rp1.488.524 juta. Penurunan saldo SOL dan KLBI tersebut

Number SRBI-01/MK/2003 from the bullet payment on maturity due in 2033 with a self-liquidating system, whereby payment will be amortized and maturing on 2043, therefore, the terms and conditions of SRBI-01 were amended as follows:

- 1) *SRBI-01 became effective on August 1, 2003, and matures on August 1, 2043.*
- 2) *SRBI-01 bears an annual interest at 0.1% of the remaining principal, which is paid by the Government once every six months, on February and August.*
- 3) *SRBI-01 Principal is paid on February 1 and August 1 of each year wherein the last installment is due and payable on August 1, 2043. Principal installments are paid in cash or from Bank Indonesia's surplus, which have been allocated to the Government.*

The outstanding balance of SRBI-01 as of December 31, 2015 was IDR124,196,975 million.

e. Claims due to Government Membership of International Institutions

Claims arising from Government membership in International Financial Institutions as of December 31, 2015 is nil as it had already been settled following the handover of financial management and administration pertaining to Indonesia's membership with the IMF from the Ministry of Finance to Bank Indonesia (notes E.3).

f. Claims Arising From Credit to Banks Prior to 1999

Claims arising from credit to banks prior to 1999 that, among others, consisted of Claims on Banks in the form of Subordinated Loan (SOL) and KLBI disbursed in accordance with Act Number 13 of 1968 on the Central Bank. As of December 31, 2015 and December 31, 2014, the balances of the SOL and KLBI were IDR464,498 million and IDR1,488,524 million respectively. The decrease in the SOL and KLBI balances was mainly due

terutama karena adanya pelunasan dana kelolaan dari PT BTN sebesar Rp877.269 juta. Bank Indonesia tetap melakukan upaya untuk penyelesaian Tagihan kepada Bank berupa SOL dan KLBI tersebut.

to the repayment of managed funds from PT BTN amounting to IDR877,269 million. Bank Indonesia continues to collect these SOL and KLBI.

5. Aset Non Kebijakan

Aset Non Kebijakan Bank Indonesia per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp36.413.967 juta dan Rp22.878.730 juta dengan rincian sebagai berikut:

5. Other Assets

Bank Indonesia's Other Assets as of December 31, 2015 and December 31, 2014 were IDR36,413,967 million and dan IDR22,878,730 million respectively, with details as follows:

Uraian	2015	2014 (Disajikan Kembali) (As Restated)	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Penyertaan	873.541	819.923	Participation
Bank for International Settlements	804.566	757.723	Bank for International Settlements
International Islamic Liquidity Management	68.975	62.200	International Islamic Liquidity Management
Dikurangi :			Less :
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	0	0	Allowance for Impairment of Financial Assets
Aset Keuangan	2.107.250	2.122.832	Other Financial Assets
Uang asing dan giro dalam valuta asing	20.910	23.700	Foreign Currency Banknotes and Demand Deposit
Tagihan kepada non bank di dalam negeri	7.919.060	7.948.312	Claims on Domestic Non Bank
Tagihan kepada non bank di luar negeri	1.228.416	1.116.816	Claims on Foreign Non Bank
Dikurangi :			Less :
Penyisihan Penurunan Nilai Aset	7.061.136	6.965.996	Allowance for Impairment of Financial Assets
Aset Tetap dan Lainnya	33.433.176	19.935.975	Property and Equipment
Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud	16.192.473	15.951.033	Tangible and Intangible Fixed Assets
Aset Lainnya	17.240.703	3.984.942	Others
Jumlah Aset Non Kebijakan	36.413.967	22.878.730	Total Other Assets

a. Penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS)

Tujuan penyertaan pada BIS adalah untuk memperoleh akses lebih besar terhadap kegiatan BIS dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, meningkatkan kerja sama di bidang

a. Participation in Bank for International Settlements (BIS)

The purposes of the equity participation are to gain more access in BIS' decision-making activities, to utilize the provided facilities, to increase international confidence on Indonesia, and to improve cooperation in Central Banking pertaining to monetary policy, financial system

140

198

216

233

kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Bank Indonesia membeli 3.000 lembar saham (0,55% dari total saham yang beredar) pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai nominal SDR5,000.00/saham dengan total harga perolehan SDR42,054,000.00 atau setara dengan Rp804.566 juta per 31 Desember 2015.

b. International Islamic Liquidity Management (IILM)

Tujuan dibentuknya IILM adalah untuk menyediakan instrumen keuangan syariah jangka pendek yang berkualitas tinggi, likuid dan dapat diperdagangkan secara internasional dengan rating tinggi terutama untuk mendukung pengelolaan likuiditas oleh lembaga keuangan syariah. Keanggotaan Bank Indonesia direpresentasikan dengan kepemilikan saham IILM per 31 Desember 2015 sebesar 6,67% atau senilai USD5,000,000.00 setara dengan Rp68.975 juta.

c. Tagihan Kepada Non Bank

Termasuk dalam tagihan kepada non bank di dalam negeri, antara lain:

- 1) Tagihan karena pemberian kredit *channeling* sebesar Rp5.829.710 juta, yang merupakan tagihan atas KLBI yang disalurkan melalui bank sebagai *channeling agent* namun hingga jatuh tempo tagihan tersebut masih belum terselesaikan. Termasuk dalam tagihan karena pemberian kredit *channeling* adalah tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp5.700.008 juta.

Dalam rangka memenuhi permintaan Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-152/MK.05/2008 tanggal 3 April 2008, BPK-RI telah melakukan penelitian atas tunggakan KUT. Tujuan penelitian tersebut adalah menilai tunggakan KUT tahun penyediaan 1998/1999 pola *channeling* per 31 Desember 2009 sesuai prosedur yang disepakati bersama (agreed upon procedure) dalam rangka risk sharing antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).

stability, and payment systems. Bank Indonesia purchased 3,000 shares (0.55% of total issued shares) on September 29, 2003 with a nominal value of SDR5,000.00/share and a total acquisition cost of SDR42,054,000.00 or equivalent to IDR804,566 million as of December 31, 2015.

b. International Islamic Liquidity Management (IILM)

IILM's objective is to provide high-quality, liquid and internationally tradeable short-term Islamic financial instruments with high ratings, used mainly to support liquidity management by Islamic financial institutions. Bank Indonesia's membership includes shares in IILM that as of December 31, 2015 amounting to 6.67% worth USD5,000,000.00 or equivalent to IDR68,975 million.

c. Claims on Non-Banks

Included in claims on domestic non-banks are:

- 1) *Claims on loan channeling amounting to IDR5,829,710 million, which represent claims on KLBI channeled through banks as channeling agents but has not been settled as per due date. Included the claims resulting from the channeling are arrears derived from the Agriculture Enterprise Credit (KUT) amounting to IDR5,700,008 million.*

In compliance with the Minister of Finance's Letter Number S-152/MK.05/2008 dated April 3, 2008, the BPK-RI (Indonesian State Audit Board) had audited the KUT arrears. The objective of the audit was to assess whether the arrears arising from the 1998/1999 KUT channeling as of December 31, 2009 were in accordance with the approved procedures on risk sharing among the Government, Bank Indonesia, and the Indonesian Credit Insurance Public Company (Perum Jamkrindo).

BPK-RI dengan surat Nomor 06/S/IV/01/2011 tanggal 14 Januari 2011 telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Direktur Utama Perum Jamkrindo. Dalam LHP dimaksud, BPK-RI menyimpulkan bahwa Program KUT Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999 pola *channeling* mengandung beberapa kelemahan sistem pengendalian manajemen baik dari segi desain dan implementasinya yang meliputi kebijakan, organisasi, mekanisme penyaluran dan pelunasan KUT, pelaporan, pendokumentasian dan pengawasan. Kelemahan tersebut cenderung menjadi penyebab tingginya tunggakan KUT TP 1998/1999 pola *channeling*.

Selanjutnya dalam rangka risk sharing BPK-RI menyarankan agar Bank Indonesia, Pemerintah, dan Perum Jamkrindo untuk melakukan hal-hal antara lain:

- a) Menyepakati status tunggakan KUT TP 1998/1999 pola *channeling* yang tidak didukung dokumen penyaluran yang lengkap, tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian dan tidak didukung sertifikat penjaminan Perum Jamkrindo.
- b) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka penyelesaian saldo rekening milik Pemda pada bank pelaksana yang digunakan untuk menampung pelunasan KUT TP 1998/1999 pola *channeling*.
- c) Melakukan koordinasi dengan bank pelaksana untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan saldo tunggakan dan tabungan beku.

Dalam rangka membahas penyelesaian risk sharing KUT, Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan kementerian terkait (Kementerian Koordinator

Through letter Number 06/S/IV/01/2011 dated January 14, 2011, the BPK-RI had submitted its audit report to the Minister of Finance, the Governor of Bank Indonesia, and the President Director of Jamkrindo. In this report, the BPK-RI concluded that the KUT arrears derived from the channeling credit program in 1998/1999 revealed a number of weaknesses in terms of management control, design and implementation that covers policies, organization, KUT delivery and settlement mechanism, reporting, documentation, and supervision. These weaknesses had led to high arrears derived from the KUT channeling program in 1998/1999.

Furthermore, within the context of risk sharing, BPK-RI suggested Bank Indonesia, the Government, and Jamkrindo to:

- a) *Agree on the status of KUT channeling arrears for 1998/1999, which were not supported by full disbursement documentation and by Farmers Group Needs Definitive Plans (RDKK) as per Minister of Agriculture decree and with Certificate of Guarantee from Jamkrindo.*
- b) *Coordinate with the Local Government (Pemda) for the settlements of the account balances of the Pemda in the implementing banks, which were used to accommodate the payment of KUT loans in 1998/1999.*
- c) *Coordinate with the implementing banks for the settlement of the outstanding balance and frozen accounts.*

In regards to the discussions to resolve KUT risk sharing, Bank Indonesia has carried out a number of discussions with the related ministries (Coordinating Ministry for the Economy, Ministry of

Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Perum Jamkrindo), pembahasan terakhir dilakukan pada tanggal 5 Maret 2015.

- 2) Tagihan pinjaman dan pembiayaan multiguna kepada pegawai dan Anggota Dewan Gubernur per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.000.445 juta.

d. Aset Tetap dan Lainnya

Aset Tetap dan Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp13.497.202 juta terutama karena peningkatan Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka sebesar Rp13.181.591 juta.

6. Uang dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia dengan posisi per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp586.775.262 juta dan Rp528.549.571 juta dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Uang yang dicetak	877.090.452	718.065.760	Printed Money
Dikurangi:			Less:
Uang dalam Penguasaan Bank Indonesia	290.315.190	189.516.189	Currency in Vault
Jumlah Uang dalam Peredaran	586.775.262	528.549.571	Total Currency in Circulations

Dalam upaya menjaga ketersediaan uang layak edar untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, Bank Indonesia senantiasa menyediakan uang layak edar dalam jumlah yang cukup dan menarik uang yang tidak layak edar (*clean money policy*).

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam kegiatan pemusnahan Rupiah. Koordinasi dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman kedua belah pihak yang antara lain mengatur tata cara pemusnahan Rupiah, termasuk pembuatan

Finance, State Ministry of Cooperatives, and Small and Medium Enterprises, as well as Jamkrindo), wherein the last discussion was carried out on March 5, 2015.

- 2) *Claims on loans and multipurpose financing to employees and Members of the Board of Governors as of December 31, 2015 amounts to IDR2,000,445 million.*

d. Fixed Assets and Others

Fixed Assets and Others increased to IDR13,497,202 million largely due to the increase in Prepaid Income Tax amounting to IDR13,181,591 million.

6. Currency in Circulation

Currency in circulation is a valid payment instrument and it is not under the possession of Bank Indonesia, with position as of December 31, 2015 and December 31, 2014 were IDR586,775,262 million and IDR528,549,571 million respectively, with details as follows:

*As part of efforts to provide adequate currency for circulation throughout Indonesia, Bank Indonesia constantly provides adequate currency for circulation in sufficient quantity and withdraws from circulation currency that is unfit for circulation (*clean money policy*).*

In accordance with Act Number 7 of 2011 dated June 27, 2011 on Currencies (the Currency Act), Bank Indonesia shall coordinate with the Government in Rupiah culling activities. The coordination that is carried out is based on a memorandum of understanding between both parties that governs the procedures for culling Rupiah, including making official

berita acara pemusnahan Rupiah, serta penyampaian informasi setiap periode tiga bulan. Selain itu, juga diatur bahwa jumlah dan nilai nominal Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Terkait dengan kewajiban penyampaian laporan pemusnahan, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 Bank Indonesia telah menyampaikan Laporan Jumlah dan Nilai Nominal Uang yang Dimusnahkan untuk periode triwulan IV tahun 2014 dan triwulan I s.d. III tahun 2015 kepada Kemenkeu selaku wakil dari Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/1/PBI/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2014.

Selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, Bank Indonesia telah melakukan pemusnahan uang Rupiah senilai Rp160.250.541 juta yang terdiri dari 5.917.102.356 lembar uang kertas senilai Rp160.231.069 juta dan 48.964.640 keping uang logam senilai Rp19.472 juta. Selain uang tidak layak edar yang masuk ke Bank Indonesia, pemusnahan tersebut juga mencakup uang yang sudah dicabut/ditarik dari peredaran atau dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, dan telah ditukarkan oleh masyarakat ke Bank Indonesia. Selama tahun 2015, jumlah uang yang dicabut/ditarik dari peredaran dan ditukarkan oleh masyarakat ke Bank Indonesia sebesar Rp25.111 juta terdiri dari 921.127 lembar uang kertas dan 14.936.140 keping uang logam. Pada tahun 2015, terdapat uang logam pecahan Rp25 Tahun Emisi 1991 yang telah dicabut/ditarik dari peredaran dan tidak dapat lagi ditukarkan di Bank Umum, namun masih dapat ditukarkan di Bank Indonesia sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/14/PBI/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Logam Pecahan Rp25 Tahun Emisi 1991.

announcements for the Rupiah's culling, as well as providing periodic information quarterly. Moreover, it also stipulates that the amount and nominal value of the Rupiah to be culled shall be announced in the Official Gazette of the Republic of Indonesia. In regards to the required reporting of the currency culling activities, throughout the period of January 1 to December 31, 2015, Bank Indonesia has submitted the Report of Amount and Nominal Value of Currency Culled for the fourth quarter 2014 and first quarter to the third quarter 2015 periods to the Ministry of Finance in its capacity as the representative of the Government. In addition to that, Bank Indonesia has also issued Bank Indonesia Regulation Number 17/1/PBI/2015 dated January 30, 2015 on the Amount and Nominal Value of the Rupiah Currency Culled in 2014.

Throughout the period of January 1 to December 31, 2015, Bank Indonesia has culled Rupiah valued at IDR160,250,541 million, consisting 5,917,102,356 notes valued at IDR160,231,069 million and 48,964,640 coins valued at IDR19,472 million. In addition to the currency unfit for circulation held by Bank Indonesia, this culling process has also included currency that was removed from circulation or declared no longer valid as legal tender and had been exchanged by the public to Bank Indonesia. In 2015, the amount of money that was removed from circulation and exchanged by the public to Bank Indonesia amounted to IDR25,111 million, consisting of 921,127 notes and 14,936,140 coins. In 2015, the Rp25 coins issued in 1991 were removed from circulation and can no longer be exchanged in Banks, but they may be exchanged in Bank Indonesia as prescribed in Bank Indonesia Regulation Number 12/14/PBI/2010 dated August 13, 2010 on the Removal and Withdrawal from Circulation of Rp25 Coins Issued in 1991.

7. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp800.877.864 juta dan Rp880.072.254 juta dengan rincian sebagai berikut:

7. Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation

Financial liabilities related to monetary policy implementation as of December 31, 2015 and December 31, 2014 were IDR800,877,864 million and IDR880,072,254 million respectively, with details as follows:

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Giro Bank	392.784.697	362.383.166	Bank Demand Deposits
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Rupiah	171.340.038	373.103.654	Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah Dalam Rupiah	24.650.570	31.336.162	Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Valas	207.260.164	112.079.884	Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah Dalam Valas	4.842.395	1.169.388	Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency
Jumlah Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter	800.877.864	880.072.254	Total Financial Liabilities Related to Monetary Policy Implementation

a. Giro Bank

a. Banks Demand Deposits

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Giro Bank Umum			Conventional Bank Demand Deposits
Dalam Rupiah	297.119.031	276.811.984	In Rupiah
Dalam Valas	83.757.137	74.667.863	In Foreign Currency
Giro Bank Syariah			Sharia Bank Demand Deposits
Dalam Rupiah	11.637.041	10.672.449	In Rupiah
Dalam Valas	271.488	230.870	In Foreign Currency
Jumlah Giro Bank	392.784.697	362.383.166	Total Banks Demand Deposits

b. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Rupiah
b. Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Sertifikat Bank Indonesia	31.108.304	86.481.953	Bank Indonesia Certificates
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	41.126.560	101.181.835	Bank Indonesia Certificates of Deposits
Penempatan Dana	94.517.539	98.819.533	Deposit Facilities
Liabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Surat Berharga	4.405.105	85.901.353	Liabilities to Banks Due to Repo Operations
Lainnya	182.530	718.980	Others
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Rupiah	171.340.038	373.103.654	Total Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah

c. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah dalam Rupiah
c. Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	6.280.000	8.129.999	Bank Indonesia Sharia Certificates
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	18.001.600	21.977.500	Bank Indonesia Sharia Deposit Facility
Liabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Syariah Surat Berharga	368.970	1.228.663	Liabilities to Banks Due to Sharia-based Repo Operation
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Berbasis Syariah Dalam Rupiah	24.650.570	31.336.162	Total Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Rupiah

d. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang dalam Valuta Asing
d. Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Penempatan Berjangka dalam Valuta Asing	168.450.337	75.200.737	Term Deposits in Foreign Currency
Surat Berharga Bank Indonesia Valas	6.866.034	0	Bank Indonesia Foreign Exchange Bills
Pinjaman Luar Negeri	2.624.289	2.777.663	Foreign Borrowings
Lainnya	29.319.504	34.101.484	Others
Jumlah Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang Dalam Valas	207.260.164	112.079.884	Total Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency

140

198

216

233

- 1) Pinjaman Luar Negeri merupakan pinjaman sindikasi dari kreditor luar negeri dengan The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch yang bertindak sebagai agent, dengan jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00 yang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1995.

Dalam kesepakatan London Club III telah dilakukan amandemen kedua tanggal 6 September 2002, yakni untuk menjadwalkan ulang pokok pinjaman sebesar USD300,000,000.00 untuk periode pembayaran 14 Desember 2008 s.d. 14 Desember 2019.

Saldo per 31 Desember 2015 adalah sebesar USD155,443,200.00 atau setara dengan Rp2.144.339 juta dan JPY4,175,184,298.00 atau setara dengan Rp478.160 juta dan bunga pinjaman yang masih harus dibayar sebesar Rp1.790 juta.

- 2) Pada subpos Lainnya per 31 Desember 2015 terdapat kewajiban *Cash Collateral* dalam rangka *Third Parties Securities Lending* (TPSL) yang terdiri dari beberapa valuta asing setara dengan Rp29.257.616 juta.

e. Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing

Surat Berharga yang Diterbitkan dan Utang berbasis Syariah dalam Valuta Asing per 31 Desember 2015 sebesar Rp4.842.395 juta dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.169.388 juta.

8. Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional

Alokasi Hak Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional (*SDR allocations*) per 31 Desember 2015 sebesar SDR1,980,438,720.00 atau setara dengan Rp37.889.219 juta dan per 31 Desember 2014 setara dengan Rp35.683.248 juta.

- 1) *Foreign borrowings are syndicated loans from foreign creditors with The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch as the agent, amounting to USD500,000,000.00 that were signed on June 14, 1995.*

Within the London Club III agreement, a second amendment dated September 6, 2002, which was made to reschedule the loan's principal payment of USD300,000,000.00 for the period of December 14, 2008 to December 14, 2019.

The balance as of December 31, 2015 was USD155,443,200.00 or equivalent to IDR2,144,339 million and JPY4,175,184,298.00 or equivalent to IDR478,160 million with payable interest of IDR1,790 million.

- 2) *Presented in the other sub-account as of December 31, 2015, Cash Collateral in Third Parties Securities Lending (TPSL) comprising various foreign currencies equivalent to IDR29,257,616 million.*

e. Sharia-based Securities Issued and Liabilities Denominated in Foreign Currency

Sharia-based securities issued and liabilities in foreign currency as of December 31, 2015 and December 31, 2014 were IDR4,842,395 million and IDR1,169,388 million respectively.

8. Counterpart of Special Drawing Rights Allocated by the IMF

Counterpart of Special Drawing Rights Allocated by the IMF as of December 31, 2015 was SDR1,980,438,720.00 or equivalent to IDR37,889,219 million and as of December 31, 2014 equivalent to IDR35,683,248 million.

9. Liabilitas Keuangan Kepada Pemerintah

Liabilitas Keuangan Kepada Pemerintah per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp151.106.418 juta dan Rp69.994.425 juta dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Giro Pemerintah:			Government Demand Deposit:
Dalam Rupiah	94.338.745	52.678.548	In Rupiah
Dalam Valas	56.718.841	17.253.093	In Foreign Currency
Pinjaman dari Pemerintah	48.832	62.784	Borrowings from Government
Jumlah Liabilitas Keuangan Kepada Pemerintah	151.106.418	69.994.425	Total Liabilities to the Government

a. Dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai pemegang Kas Pemerintah, Bank Indonesia melakukan pengelolaan Giro Pemerintah. Dari total Giro Pemerintah per 31 Desember 2015 sebesar Rp151.057.586 juta, terdapat Giro Pemerintah yang memperoleh remunerasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Giro Pemerintah dalam Rupiah	94.061.662	52.510.853	Government Demand Deposit in Rupiah
Giro Pemerintah dalam Valas	55.139.138	15.135.599	Government Demand Deposit in Foreign Currencies
Jumlah Giro Pemerintah yang memperoleh Remunerasi	149.200.800	67.646.452	Total Government Demand Deposit Earning Remuneration

Dalam giro valas Pemerintah antara lain terdapat jaminan pembukaan *Letter of Credit* Pemerintah sebesar Rp843.327 juta.

b. Pinjaman dari Pemerintah dalam Rupiah adalah pinjaman Pemerintah dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL) yang berasal dari ASEAN Japan Development Fund for Indonesia dengan jangka waktu sampai dengan 20 April 2019. Pinjaman tersebut diteruskan oleh Bank Indonesia kepada bank pelaksana untuk Perkebunan Besar Swasta Nasional.

9. Liabilities to the Government

The balance of liabilities to the Government as of December 31, 2015 and December 31, 2014 were IDR151,106,418 million and IDR69,994,425 million respectively, with details as follows:

a. In its capacity as a holder of the Government's Cash, Bank Indonesia manages Government Demand Deposits. From the total Government Demand Deposits as of December 31, 2015 amounting to IDR151,057,586 million, Government Demand Deposits that received remuneration are as follows:

The Government Demand Deposits in Foreign Currency includes guarantee to open a Government Letter of Credit amounting to IDR843,327 million.

b. Loans from the Government in Rupiah are the government loans received from the Two Step Loan (TSL) program granted by the ASEAN Japan Development Fund for Indonesia with a tenor of up to April 20, 2019. These loans are subsequently loaned by Bank Indonesia to the executing banks for the Large Privately-owned National Plantations.

Pinjaman Pemerintah dalam Rupiah per tanggal 31 Desember 2015 terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp48.119 juta, consulting service sebesar Rp424 juta dan bunga sebesar Rp289 juta, sedangkan per 31 Desember 2014 terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp61.867 juta, consulting service sebesar Rp545 juta dan bunga sebesar Rp372 juta.

Loans from the Government denominated in Rupiah as of December 31, 2015 were made of IDR48,119 million principal, IDR424 million consulting services, and IDR289 million interests. Meanwhile as of December 31, 2014 they consisted of IDR61,867 million principal, IDR545 million consulting services and IDR372 million interests.

10. Kewajiban Non Kebijakan

Kewajiban Non Kebijakan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp29.589.632 juta dan Rp23.869.029 juta, dengan rincian sebagai berikut:

10. Other Liabilities

Other Liabilities as of December 31, 2015 and December 31, 2014 were IDR29,589,632 million and IDR23,869,029 million respectively, with details as follows:

Uraian	2015	2014 (Disajikan Kembali) (As Restated)	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Giro Lembaga Domestik dan Internasional	425.533	2.722.217	Demand Deposit from Domestic and International Institutions
Imbalan Kerja	7.639.911	5.158.516	Employee Benefits
Lainnya	21.524.188	15.988.296	Others
Jumlah Kewajiban Non Kebijakan	29.589.632	23.869.029	Total Other Liabilities

- a. Giro Lembaga Domestik dan Internasional Terdapat penurunan Giro Lembaga Domestik dan Internasional sebesar Rp2.296.684 juta antara lain karena penurunan giro milik OJK sebesar Rp989.537 juta dan penyajian rekening giro *IMF Account Number 1* sebesar Rp1.005.066 juta, semula disajikan dalam pos Kewajiban Non Kebijakan (subpos Giro Lembaga Domestik dan Internasional) menjadi ke pos Hak Tarik Khusus pada Lembaga Keuangan Internasional (catatan E.3).

- a. *Demand Deposits from Domestic and International Institutions Demand Deposits from Domestic and International Institutions dropped by IDR2,296,684 million due to a decrease in OJK demand deposits by IDR989,537 million and the exclusion of IMF Account Number 1 amounting to IDR1,005,066 million from Other Liabilities account (Demand Deposits from Domestic and International Institutions subaccounts) into the Special Drawing Rights allocated by the IMF (note E.3).*

- b. Kewajiban Imbalan Kerja Kewajiban imbalan kerja terdiri dari kewajiban imbalan jangka panjang dan pascakerja. Kewajiban imbalan kerja dicatat berdasarkan perhitungan aktuaris independen pada posisi 31 Desember 2015 dengan menggunakan PSAK 24 (Revisi 2013). Asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaris antara lain: asumsi tingkat mortalita menggunakan *Group Annual Mortality (GAM)* tahun

- b. *Employee Benefits Liabilities Employee benefits liabilities consists of long-term and post-employment benefits. Employee benefits liabilities are booked based on the independent actuary's calculations as of December 31, 2015 by using PSAK 24 (2013 Revision). The assumptions used in the actuary's calculations include: mortality rate assumptions using the 1983 Group Annual Mortality (GAM), employee benefit tax*

1983, loading pajak imbalan kerja sebesar 15% s.d. 30%, dan tingkat diskonto sebesar 8,81% s.d. 9,57%.

loading of 15% to 30%, and discount rate of 8.81% up to 9.57%.

Mutasi aset, liabilitas, dan beban imbalan kerja pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Movements for employee benefit asset, liabilities, and expenses as of January 1 to December 31, 2015 are as follows:

Uraian	Manfaat Pensiun Pension Benefit	Tunjangan Pemilikan Rumah Housing Allowance	Tunjangan Kesehatan Hari Tua Retirement Benefit Program	Imbalan Pascakerja Post Employment Benefits	Imbalan Kerja Jangka Panjang Long-Term Benefits	Pajak untuk Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Tax on Post Employment Benefit and Long-Term Employment Benefits	Jumlah Total	Description
	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	Rp juta IDR Million	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Saldo Aset/ (Kewajiban) 31 Desember 2014 (Disajikan Kembali)	(2.263.099)	0	(431.875)	(573.841)	(1.517.297)	(372.404)	(5.158.516)	Asset/(Liabilities) Balance as per Desember 31, 2014 (as restated)
Beban Imbalan Kerja	(785.730)	(157.507)	(124.004)	(89.738)	(645.887)	(192.548)	(1.995.414)	Employment Benefit Expenses
Beban/ (pendapatan) Selisih Revaluasi	307.463	77.899	(2.096.671)	41.525	0	5.926	(1.663.858)	Revaluation Reserves Expenses/ (Revenues)
Pendanaan Bank Indonesia	617.972	79.608	94.295	0	0	0	791.875	Bank Indonesia's Contribution
Pembayaran Manfaat	0	0	0	41.989	277.743	66.270	386.002	Benefit Payment
Saldo Aset/ (Kewajiban) 31 Desember 2015	(2.123.394)	0	(2.558.255)	(580.065)	(1.885.441)	(492.756)	(7.639.911)	Asset/(Liabilities) Balance as per Desember 31, 2015

Komposisi investasi aset program terdiri dari:

The investment compositions of asset program are as follows:

Uraian	2015	2014	Description
	Nilai Investasi Investment Value	Nilai Investasi Investment Value	
	%	%	
Kas dan Setara Kas	22	30	Cash or Cash Equivalent
Surat Berharga	66	56	Securities
Lainnya	12	14	Others
	100	100	

11. Selisih Revaluasi

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp119.877.899 juta dan Rp156.573.616 juta yang terdiri atas:

11. Revaluation Reserves

Unrealized gains or losses as of December 31, 2015 and December 31, 2014 were IDR119,877,899 million and IDR156,573,616 million respectively, with details as follow:

Uraian	2015	2014 (Disajikan Kembali) (As Restated)	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Selisih Revaluasi Emas	33.522.240	34.185.338	Gold Revaluation
Selisih Revaluasi Valuta Asing:			Foreign Currency Revaluation:
Selisih Revaluasi Penjabaran Valuta Asing	45.981.039	62.999.120	Foreign Currency Definition Revaluation
Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing	40.328.869	37.710.660	Foreign Currency Transaction Revaluation
Selisih Revaluasi Instrumen Keuangan	(10.731.731)	9.209.518	Financial Instrument Revaluation
Selisih Revaluasi Lainnya	10.777.482	12.468.980	Others Revaluation
Jumlah Selisih Revaluasi	119.877.899	156.573.616	Total Revaluation Reserves

12. Modal

Jumlah Modal dan Kewajiban Moneter yang diperhitungkan dalam perhitungan Rasio Modal per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, sebagai berikut:

12. Capital

The amount of Capital and Monetary Liabilities used in calculating Capital Ratios as of December 31, 2015 and December 31, 2014, are as follows:

Uraian	2015	2014 (Disajikan Kembali) (As Restated)	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
a. Modal			a. Capital
- Modal	3.726.349	2.948.029	- Capital
- Revaluasi Aset Tetap	14.135.880	14.163.519	- Revaluation of Fixed Assets
- Cadangan Umum	95.818.969	57.397.040	- General Reserves
- 90% Surplus Tahun Berjalan (setelah pajak)	55.192.929	37.337.129	- 90% Current Year Surplus (after tax)
Jumlah	168.874.127	111.845.717	TOTAL
b. Kewajiban Moneter			b. Monetary Liabilities
- Uang dalam Peredaran	586.775.262	528.549.571	- Currency in Circulation
- Giro Pemerintah	151.057.586	69.931.641	- Government Demand Deposits
- Giro Bank	392.784.697	362.383.166	- Bank Demand Deposits
- Giro Penduduk Lainnya	366.147	1.397.294	- Other Demand Deposits
- Surat Berharga yang Diterbitkan	376.149.373	478.921.573	- Securities Issued
- Pinjaman dari Pemerintah	48.832	62.784	- Borrowings from the Government
Jumlah	1.507.181.897	1.441.246.029	TOTAL
c. Rasio Modal	11,20%	7,76%	c. Capital Ratio

Kenaikan modal sebesar Rp778.320 juta karena adanya pengalihan *Quota* IMF dari Kemenkeu kepada Bank Indonesia (catatan E.3).

The capital increase by IDR778,320 million was due to the handover of the IMF Quota from the Ministry of Finance to Bank Indonesia (notes E.3).

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia diatur bahwa dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia di atas 10%, maka Bank Indonesia menyetorkan sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah. Sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah tersebut terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia.

Bank Indonesia Regulation stipulates in the event that capital and liability ratio reaches over 10%, Bank Indonesia has to allocate the surplus balance for the Government. The surplus allocated to the government will be used to pay government liability to Bank Indonesia.

Rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.20%. Dengan rasio modal tersebut, sisa surplus yang merupakan bagian Pemerintah sebesar Rp18.155.938 juta.

Bank Indonesia's capital and liability ratio as of December 31, 2015 was 11.20%. At this ratio, the surplus balance for the government amounted to IDR18,155,938 million.

13. Akumulasi Surplus/Defisit

Saldo Akumulasi Surplus/Defisit per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp176.351.174 juta dan Rp115.025.697 juta dengan rincian sebagai berikut:

13. Accumulated Surplus/Deficit

The balance of Accumulated Surplus/Deficit as of December 31, 2015 and December 31, 2014 respectively were IDR176,351,174 million and IDR115,025,697 million, with details as follow:

Uraian	2015	2014 (Disajikan Kembali) (As Restated)	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Cadangan Umum	95.818.968	57.397.040	General Reserves
Cadangan Tujuan	19.206.729	16.142.958	Statutory Reserves
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	61.325.477	41.485.699	Current Year Surplus (Deficit)
Jumlah Akumulasi Surplus/ Defisit	176.351.174	115.025.697	Total Accumulated Surplus/ Deficit

Peningkatan Cadangan Umum sebesar Rp38.421.928 juta karena adanya alokasi surplus Bank Indonesia tahun 2014 sebesar Rp37.108.356 juta, realisasi penggunaan Cadangan Tujuan sebesar Rp1.084.799 juta dan koreksi Cadangan Umum sehubungan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) sebesar Rp294.565 juta. Selain itu, terdapat koreksi Aset Pajak Tangguhan sehubungan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) sebesar Rp65.792 juta.

The increased General Reserves of IDR38,421,928 million was due to Bank Indonesia's 2014 surplus allocation amounting to IDR37,108,356 million, utilized Statutory Reserves amounting to IDR1,084,799 million and correction on General Reserves as a result of the application of PSAK 24 (2013 Revision) amounting to IDR294,565 million. Additionally, it was also noted a correction on Deferred Tax Asset due to the changes on PSAK 24 (2013 revision) amounting to IDR65,792 million.

Peningkatan Cadangan Tujuan sebesar Rp3.063.771 juta karena terdapat alokasi surplus Bank Indonesia tahun 2014 sebesar Rp4.123.151 juta dan koreksi Cadangan Tujuan sehubungan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) sebesar Rp32.729 juta. Selain itu, terdapat koreksi Aset Pajak Tangguhan sehubungan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) sebesar Rp7.310 juta dan penggunaan Cadangan Tujuan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 sebesar Rp1.084.799 juta dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembaruan/penggantian aset tetap sebesar Rp1.035.154 juta.
- 2) Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp49.645 juta.

The increased Statutory Reserves of IDR3,063,771 million was due to Bank Indonesia's 2014 surplus allocation amounting to IDR4,123,151 million and correction on Statutory Reserves by the application of PSAK 24 (2013 Revision) amounting to IDR32,729 million. Moreover, a correction was made to Statutory Reserves by IDR7,310 million following the enactment of PSAK24 (2013 revision) and Statutory Reserves utilized for the period from January 1 to December 31, 2015 amounted to IDR1,084,799 million, with details as follows:

- 1) *Renewal/replacement of fixed assets amounting to IDR1,035,154 million.*
- 2) *Organizational and Human Resource (HR) Development amounting to IDR49,645 million.*

14. Pajak Penghasilan

a. Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan

Uraian	2015	2014 (Disajikan Kembali) (As Restated)	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Pajak Kini	(21.193.568)	(13.965.624)	Current Tax
Pajak Tangguhan :			Deffered Tax:
Pendapatan Pajak Tangguhan	165.167	25.021	Deffered Tax Income
Beban Pajak Tangguhan	0	0	Deffered Tax Expenses
Jumlah Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan	(21.028.401)	(13.940.603)	Total Deffered Tax Income (Expenses)

b. Rekonsiliasi

Bank Indonesia melakukan rekonsiliasi antara Surplus (Defisit) sebelum pajak penghasilan dan Pendapatan (Beban) pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, Bank Indonesia mencatat surplus fiskal sebesar Rp84.774.271 juta. Pajak penghasilan sampai dengan 31 Desember 2015 atas surplus fiskal tersebut adalah sebesar Rp21.193.568 juta, namun Bank Indonesia memiliki kredit pajak sebesar Rp15.256.422 juta, sehingga pajak penghasilan kurang bayar menjadi sebesar Rp5.937.146 juta.

14. Income Tax

a. Income Tax Revenues (Expenses)

b. Reconciliation

Bank Indonesia reconciles between Surplus (Deficit) before income tax and income tax revenues (expenses) in accordance with the prevailing tax regulations.

For the period ended December 31, 2015, Bank Indonesia registered a fiscal surplus of IDR84,774,271 million. Income tax as of December 31, 2015 on this fiscal surplus was IDR21,193,568 million. As Bank Indonesia holds a tax credit of IDR15,256,422 million, thereby the income tax is short by IDR5,937,146 million.

c. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2015, Bank Indonesia memiliki liabilitas pajak sebagai berikut :

c. Tax Liabilities

Bank Indonesia's tax liabilities as of December 31, 2015 consisted of:

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
PPh Pasal 17	21.193.568	13.965.624	Article 17
PPh Pasal 21	42.776	49.679	Article 21
PPh Pasal 22	0	0	Article 22
PPh Pasal 23	17.411	2.303	Article 23
PPh Pasal 25	0	169.499	Article 25
PPh Pasal 26	123	178	Article 26
PPh Pasal 4 ayat 2	39.410	32.680	Article 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	3.509	2.249	Value Added Tax (VAT)
Total	21.296.797	14.222.212	Total

d. Pajak Dibayar Dimuka

Pada tanggal 31 Desember 2015, Bank Indonesia memiliki pajak dibayar dimuka sebagai berikut :

d. Prepaid Taxes

Bank Indonesia's prepaid taxes as of December 31, 2015 were as follows:

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
PPh Pasal 22	59.639	41.006	Article 22
PPh Pasal 23	161	289	Article 23
PPh Pasal 25	15.196.623	2.033.990	Article 25
PPN	172	8	Value Added Tax (VAT)
Total	15.256.595	2.075.293	Total

15. Pendapatan Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Pendapatan Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2014, terdiri atas:

15. Income from Monetary Policy Implementation

Income from Monetary Policy Implementation for the period from January 1 to December 31, 2015 and January 1 to December 31, 2014 consisted of:

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Pendapatan Bunga	31.754.228	28.831.434	Interest Income
Pendapatan Imbalan	36.271	0	Income from Sharia-based Transaction
Transaksi Aset Keuangan	4.792.850	7.924.352	Net Result on Financial Transaction
Selisih Kurs Transaksi Valas	80.670.317	51.971.100	Net Result on Foreign Currency Transaction
Lainnya	315.842	362.113	Others
Jumlah Pendapatan Pelaksanaan Kebijakan Moneter	117.569.508	89.088.999	Total Income from Monetary Policy Implementation

Pendapatan Selisih Kurs Transaksi Valas untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 sebesar Rp80.670.317 juta merupakan dampak penjabaran transaksi valas ke Rupiah dalam rangka pengelolaan devisa dan pelaksanaan kebijakan moneter. Meningkatnya pendapatan tersebut bukan merupakan tujuan Bank Indonesia namun merupakan dampak atau implikasi dari pelaksanaan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai Rupiah.

The net result of foreign currency transactions for the period from January 1 to December 31, 2015 were IDR80,670,317 million, earned from the implementation of foreign currency transactions to Rupiah under foreign revenues management and monetary policy implementation. This increased revenue has never been Bank Indonesia's objective, but rather an impact of policy implementation adopted by Bank Indonesia within the context of maintaining the stability of the Rupiah's value.

16. Pendapatan Pengelolaan Sistem Pembayaran

Pendapatan Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2014, terdiri atas:

16. Income from Payment System Services

Income from Payment System Services for the period from January 1 to December 31, 2015 and January 1 to December 31, 2014 consisted of:

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Sistem Pembayaran Tunai	39.178	6.549	Cash Payment Systems
Sistem Pembayaran Non Tunai			Non-cash Payment Systems
Pendapatan Jasa Penyelenggaraan	193.288	250.068	Fees and Commissions from Payment System Services
Pendapatan Jasa Pengelolaan Rekening	97.370	98.572	Fees and Commissions from Account Management Services
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Sistem Pembayaran	329.836	355.189	Total Income from Payment System Services

Pendapatan Sistem Pembayaran Tunai sebesar Rp39.178 juta antara lain berasal dari penarikan uang logam yang ditarik dari peredaran sebesar Rp12.890 juta dan penjualan hasil peleburan uang logam sebesar Rp9.890 juta.

Income from Cash Payment Systems was IDR39,178 million derived from coin withdrawal that were removed from circulation amounting to IDR12,890 million and sales earn from resmelting coins amounting to IDR9,890 million.

17. Pendapatan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Pendapatan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2014, masing-masing sebesar Rp268 juta dan Rp119 juta.

17. Income from Macroprudential Regulation and Supervision

Income from Macroprudential Regulation and Supervision for the period from January 1 to December 31, 2015 and January 1 to December 31, 2014 were IDR268 million and IDR119 million respectively.

18. Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan

Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2014, terdiri atas:

18. Income from Providing Fund

Income from Providing Fund for the period from January 1 to December 31, 2015 and January 1 to December 31, 2014 consisted of:

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Pendapatan bunga dari surat utang yang diterbitkan Pemerintah namun tidak dapat dipindahtangankan	227.366	234.882	Interest Income from non-tradable Government Securities
Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada bank sebelum tahun 1999	17.231	22.153	Interest Income from Credits to Banks Prior to 1999
Lainnya	578	3	Others
Jumlah Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan	245.175	257.038	Total Income from Providing Fund

19. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2014, masing-masing sebesar Rp3.036.599 juta dan Rp3.399.127 juta.

19. Other Income

Other Income for the period from January 1 to December 31, 2015 and January 1 to December 31, 2014, consists of IDR3,036,599 million and IDR3,399,127 million respectively.

20. Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter

Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2014, terdiri atas:

20. Monetary Policy Implementation Expenses

Monetary Policy Implementation Expenses for the period from January 1 to December 31, 2015 and January 1 to December 31, 2014 consisted of:

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Beban Bunga:	20.424.692	21.691.645	Interest Expenses:
Sertifikat Bank Indonesia	4.113.721	6.277.424	Bank Indonesia Certificates
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	5.101.225	2.273.254	Bank Indonesia Certificates of Deposit
Surat Berharga Bank Indonesia Valas	2.499	0	Bank Indonesia's Securities Denominated in Foreign Currency
Penempatan Berjangka Dalam Rupiah dan Valuta Asing	213.780	56.731	Term Deposits Denominated in Rupiah and Foreign Currency
Penempatan Dana	5.047.836	5.940.237	Deposit Facilities
Liabilitas Kepada Bank Karena Transaksi Repo Surat Berharga	4.185.259	5.554.325	Liabilities to Banks Due to Repo Operation
Pinjaman Luar Negeri	35.372	33.672	Foreign Borrowings
Jasa Giro Bank Rupiah	1.725.000	1.556.002	Rupiah Denominate Bank Current Account Service
Beban Imbalan:	1.391.901	1.054.449	Interest Expenses:
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	595.582	309.543	Sharia-based Bank Indonesia Certificates
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	742.139	688.828	Bank Indonesia Sharia Deposit Facility
Liabilitas Repo SSB Berbasis Syariah	52.231	56.078	Sharia-based Securities Repo Liabilities
Penempatan Berjangka Syariah Valuta Asing	1.949	0	Sharia-based Term Deposits Denominated in Foreign Currency
Lainnya	529.579	460.740	Other Expenses
Jumlah Beban Pelaksanaan Kebijakan Moneter	22.346.172	23.206.834	Total Monetary Policy Implementation Expenses

21. Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran

Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2014, terdiri atas:

Uraian	2015	2014	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
Sistem Pembayaran Tunai:	3.663.295	2.836.848	Cash Payment Systems:
Perencanaan, Pengadaan dan Pencetakan Uang	3.542.802	2.747.648	Currency Planning, Procurement, and Printing
Distribusi Uang, Layanan kas dan Penanggulangan Uang Palsu	120.493	89.200	Currency Distribution, Cash Services and Destruction of Counterfeit Currency
Sistem Pembayaran Non Tunai	78.787	89.129	Non-Cash Payment Systems
Jumlah Beban Pengelolaan Sistem Pembayaran	3.742.082	2.925.977	Total Payment System Services Management Expenses

21. Payment System Expenses

Payment System Expenses for the period from January 1 to December 31, 2015 and January 1 to December 31, 2014 consisted of:

22. Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Beban Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2014, masing-masing sebesar Rp113.531 juta dan Rp77.856 juta.

22. Macroprudential Regulation and Supervision Expenses

Macroprudential Regulation and Supervision Expenses for the period from January 1 to December 31, 2015 and January 1 to December 31, 2014 were IDR113,531 million and IDR77,856 million respectively.

23. Beban Remunerasi kepada Pemerintah

Beban remunerasi atas rekening giro milik Kemenkeu untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp4.253.586 juta dan Rp3.513.071 juta.

23. Remuneration on Government General Deposits Expenses

Remuneration on Government General Deposits for the Ministry of Finance for the period of January 1 to December 31, 2015 and January 1 to December 31, 2014 were IDR4,253,586 million and IDR3,513,071 million respectively.

24. Beban Umum dan Lainnya

Beban Umum dan Lainnya pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2014, terdiri atas:

24. General and Administrative Expenses

General and Administrative Expenses for the period from January 1 to December 31, 2015 and January 1 to December 31, 2014 consisted of:

Uraian	2015	2014 (Disajikan Kembali) (As Restated)	Description
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
SDM, Organisasi dan Logistik	8.222.789	6.284.015	Human Resource (Salaries), Organization, and Logistic
Lainnya	149.348	1.666.417	Other Expenses
Jumlah Beban Umum dan Lainnya	8.372.137	7.950.432	Total Expenses

Dalam beban SDM, Organisasi, dan Logistik termasuk juga Tunjangan Hari Tua (THT) berupa Tunjangan Pemilikan Rumah (Tuperum) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT) serta kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Dalam beban SDM, Organisasi, dan Logistik termasuk beban pegawai yang ditugaskan ke OJK.

Human Resource, Organizational, and Logistic expenses include Retirement Benefits (THT) in Tuperum and TKHT as well as participation in the Social Security Agency (BPJS) as mandated by Act Number 24 of 2011 on the Social Security Agency, including health insurance, work accident insurance, life insurance, and retirement insurance. Human Resource, Organizational, and Logistic expenses include expenses for employees who are assigned to work with OJK.

F. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Bank Indonesia melakukan transaksi dengan pihak berelasi terkait dengan Pemerintah, pengelolaan imbalan kerja, dana pensiun, dan kepegawaian sebagai berikut:

F. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Bank Indonesia conducts transactions with related parties associated with the Government, management of employee benefits, pension fund, and employees as follows:

Pihak Berelasi <i>Related Party</i>	Sifat hubungan <i>Nature of Relations</i>	Sifat dari transaksi <i>Nature of Transactions</i>
Pemerintah <i>Government</i>	a. Pemilik Dana <i>Depositor</i>	a. Pengelolaan rekening Giro Pemerintah <i>Government General Deposit management</i>
	b. Debitur <i>Debtor</i>	b. Penyelesaian SUP <i>SUP Settlement</i>
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia <i>Bank Indonesia's Employee Welfare Foundation</i>	Pengelola program THT <i>Post-Employment Benefit Program management (THT)</i>	Kontribusi THT <i>Contribution to Post-Employment Benefit Program (THT)</i>
Dana Pensiun Bank Indonesia <i>Bank Indonesia's Pension Fund</i>	Dana pensiun pemberi kerja <i>Employer's Pension Fund</i>	Kontribusi dana pensiun <i>Contribution to Pension Fund</i>
Personil manajemen kunci <i>Key Management</i>	Dewan Gubernur <i>Board of Governors</i>	Fasilitas Pinjaman <i>Loan Facility</i>
Pegawai <i>Employees</i>	Pegawai <i>Employees</i>	Fasilitas Pinjaman <i>Loan Facility</i>

G. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2015, Bank Indonesia memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

G. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

As of December 31, 2015, Bank Indonesia's commitments and contingencies consist of:

1. Komitmen

a. Rencana Kenaikan Quota IMF

Pada saat dilakukan IMF 14th General Review of Quotas pada tahun 2010, negara-negara anggota IMF menyepakati untuk meningkatkan *quota* IMF sebesar 100%. Adanya kenaikan *quota* tersebut menyebabkan *quota* Indonesia, sebagai salah satu anggota IMF, akan meningkat sebesar SDR2,569,100,000.00 menjadi SDR4,648,400.000.00 dan *quota share Indonesia* akan meningkat menjadi 0,974%. Peningkatan *quota* hasil IMF 14th General Review of Quotas akan berlaku efektif apabila:

1. Commitments

a. Letter of Consent to IMF

At the IMF 14th General Review of Quotas in 2010, IMF member countries agreed to increase the IMF quota by 100%. This has increased the quota for Indonesia, as an IMF member, by SDR2,569,100,000.00 to SDR4,648,400.000.00 and Indonesia's quota share to increase to 0.974%. The quota increase from the IMF 14th General Review of Quotas took effect when:

140

198

216

233

- 1) Negara-negara anggota yang memiliki setidaknya 70% pangsa *quota* telah menyampaikan persetujuan (*consent*) kenaikan *quota* kepada IMF.
- 2) Negara anggota yang mewakili setidaknya 85% hak suara telah meratifikasi perubahan (*amendment*) *Article of Agreement IMF* tentang *Board Reform*. Negara anggota diminta segera menyampaikan persetujuan kenaikan *quota* dan meratifikasi perubahan *Article of Agreement IMF* tentang *Board Reform*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan mengirimkan Surat kepada Gubernur Bank Indonesia dengan Nomor Surat S-871/MK.011/2011 tanggal 28 Desember 2011 perihal Persetujuan Pemerintah atas kenaikan *quota* IMF dalam rangka *14th General Review of Quotas* yang berisi antara lain atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Keuangan menyetujui kenaikan *quota* IMF dan mengingat Gubernur Bank Indonesia adalah Governor di IMF untuk Indonesia dapat mengirimkan *letter of consent* kepada IMF. Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, pada tanggal 12 April 2012 Gubernur Bank Indonesia mengirimkan *letter of consent* kepada IMF yang merupakan salah satu syarat penambahan *quota* Indonesia di IMF.

Per 31 Desember 2015, kenaikan *quota* belum berlaku efektif karena menunggu ratifikasi amandemen *Articles of Agreement* oleh Amerika Serikat untuk memenuhi jumlah voting power yang dipersyaratkan sebesar minimal 85%, dan sampai dengan 31 Desember 2015 mencapai 77,25%.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 maka keterwakilan NKRI di IMF telah beralih dari Kemenkeu kepada Bank Indonesia. Pembayaran kenaikan *quota* IMF dalam rangka *14th General Review of Quotas* akan dibayarkan Bank Indonesia setelah kenaikan *quota* berlaku efektif.

- 1) *Member countries with at least 70% quota share submit consent to the IMF to increase the quota.*
- 2) *Member countries that represent at least 85% of voting rights have ratified the amendment to the IMF Article of Agreement regarding Board Reform. Member countries are requested to submit their approval to increase the quota and to ratify amendments to IMF's Article of Agreement.*

In regards to this matter, the Minister of Finance has sent a Letter to the Governor of Bank Indonesia through Letter Number S-871/MK.011/2011 dated December 28, 2011 on Government's Approval on the IMF quota increase within the framework of the 14th General Review of Quotas including, among others, the approval of the Minister of Finance on behalf of the Government of Indonesia on the IMF quota increase, and since the Governor of Bank Indonesia's is in the capacity of a Governor at the IMF for Indonesia, the Governor of Bank Indonesia can send a letter of consent to the IMF. Following this letter, the Governor of Bank Indonesia submitted the letter of consent to the IMF as one of the requirements for Indonesia's quota increase in IMF.

As of December 31, 2015, the quota increase has not yet taken effect due to the amendment ratification process of the Articles of Agreement by the United States to meet the minimum 85% voting power requirement. As of December 31, 2015, the voting power stood at 77.25%.

With the enactment of Government Regulation Number 98 of 2015 dated December 28, 2015, therefore the representation of Indonesia at the IMF is transferred from the Ministry of Finance to Bank Indonesia. Payment of the increased IMF quota within the context of the 14th General Review of Quotas will be paid by Bank Indonesia once the quota becomes effective.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank Indonesia memiliki kewajiban komitmen dalam valuta asing dan Rupiah sebesar rencana kenaikan *quota* NKRI di IMF.

In relation to the above-mentioned, Bank Indonesia has commitments in foreign currency and Rupiah amounting to NKRI's increased quota at the IMF.

b. Kerjasama Ekonomi Keuangan Regional

1) Bank Indonesia memiliki Fasilitas *currency swap* dalam kerangka kerja sama keuangan regional, yaitu *ASEAN Swap Arrangement (ASA)* dengan negara-negara ASEAN, *Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)* dengan negara ASEAN beserta Cina, Korea, dan Jepang (*ASEAN + 3*) dan *Bilateral Swap Arrangement (BSA)* antara Bank Indonesia dengan Bank of Japan (BoJ) sebagai agen dari Kementerian Keuangan Jepang. Kerja sama tersebut bertujuan untuk membantu mengatasi masalah neraca pembayaran dan atau kesulitan likuiditas jangka pendek.

b. Regional Financial Economics Cooperation

1) *Bank Indonesia has a currency swap facility within the framework of regional cooperation, namely the ASEAN Swap Arrangement (ASA) with ASEAN member countries, the Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) with ASEAN member countries along with China, Korea, and Japan (ASEAN + 3) and the Bilateral Swap Arrangement (BSA) between Bank Indonesia with the Bank of Japan (BoJ) as agent of Japan's Ministry of Finance. This cooperation seeks to assist in resolving balance of payment issues and/or short-term liquidity issues.*

2) Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki Fasilitas *currency swap* dalam bentuk perjanjian *Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA)*, yaitu dengan People's Bank of China yang bertujuan untuk mendukung perdagangan dan investasi kedua negara serta penyediaan likuiditas jangka pendek bagi stabilisasi pasar keuangan, serta kerjasama BCSA dengan Bank of Korea dan Reserve Bank of Australia yang keduanya bertujuan untuk mendukung perdagangan kedua Negara.

2) *In addition to this, Bank Indonesia also has currency swap facility in the form of a Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) agreement, namely with the People's Bank of China to support trade and investment of both countries as well as provide short-term liquidity to stabilize the financial market, as well as the BCSA cooperation with the Bank of Korea and the Reserve Bank of Australia that is meant to support trade of both nations.*

Bank Indonesia memiliki tagihan komitmen sebesar fasilitas *currency swap* yang belum dicairkan dalam kerangka kerjasama ASA, CMIM, BSA dan BCSA. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kewajiban komitmen sebesar fasilitas *currency swap* yang belum dicairkan oleh negara mitra kerjasama dalam kerangka kerjasama ASA, CMIM dan BCSA.

Bank Indonesia has commitment charges amounting to the currency swap facility's amount that has not been drawn within the framework of the ASA, CMIM, BSA, and BCSA cooperation. In addition to this, Bank Indonesia also has commitment charges amounting to the currency swap facility that has not been drawn by the partner nations within the framework of the ASA, CMIM, and BCSA cooperation.

2. Kontinjensi

Perkara Hukum yang Ditangani Bank Indonesia

- a. Perkara hukum di luar negeri
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Bank Indonesia menangani 2 (dua) perkara perdata yang berada di luar negeri terkait penyelesaian kewajiban Indover Bank Amsterdam di Pengadilan Distrik Amsterdam.

Salah satu perkara tersebut yaitu Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank Amsterdam menghadapi tuntutan hukum dari *Trustees* untuk bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul akibat proses likuidasi Indover Bank.

Tuntutan hukum tersebut bermula ketika Bank Indonesia sebagai kreditur telah mengajukan gugatan (*statement of claim*) atas deposito dan giro Bank Indonesia di Indover Bank ke Pengadilan Distrik Amsterdam. Atas klaim Bank Indonesia tersebut, pada bulan April 2010 *Trustees* menyampaikan gugatan balik (*statement of counterclaim*) di Pengadilan Distrik Amsterdam yang mendalilkan bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank berkewajiban untuk menanggung defisit Indover Bank dan men-*set off* tagihan Bank Indonesia yang ada di Indover Bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia tetap berpendirian bahwa sesuai hukum perusahaan, tanggung jawab Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal pada Indover Bank hanya sebatas penyertaan Bank Indonesia pada Indover Bank.

Pada tanggal 27 Agustus 2014 Pengadilan Distrik Amsterdam memutuskan mengabulkan gugatan Bank Indonesia dan menolak gugatan balik (*statement of counterclaim*) *Trustee*. Atas putusan Pengadilan Distrik Amsterdam dimaksud, pada tanggal 26 November 2014 *Trustees* mengajukan pernyataan banding, dan pada tanggal 23 Juni 2015 *Trustee* mengajukan Memori Banding. Bank Indonesia saat ini sedang mempersiapkan Kontra Memori Banding Bank Indonesia.

2. Contingencies

Legal Matters

- a. *Foreign Legal Matters*
As of December 31, 2015, Bank Indonesia are faced with 2 (two) overseas legal cases pertaining to the Indover Bank bankruptcy settlement in Amsterdam District Court.

One of these issues involved Bank Indonesia as the sole shareholder of Indover Bank Amsterdam, which faced a lawsuit from Trustees for all losses incurred resulting from Indover's liquidation process.

This legal suit began when Bank Indonesia, as the creditor, submitted a statement of claim over Bank Indonesia's term deposits and demand deposits in Indover Bank to the Amsterdam District Court. In response to Bank Indonesia's claims, the Trustees submitted a statement of counterclaim in April 2010 with the Amsterdam District Court that argued that as the sole shareholder of Indover Bank, Bank Indonesia is obliged to bearing Indover Bank's deficit and set off Bank Indonesia's obligations in Indover Bank. In this regard, Bank Indonesia firmly believes that in accordance to corporate law, Bank Indonesia's responsibility as a sole shareholder in Indover Bank was limited only to Bank Indonesia's investment in Indover Bank.

On August 27, 2014, the Amsterdam District Court decided in favor of Bank Indonesia and refused the Trustee's statement of counterclaim. As a result of the Amsterdam District Court's decision, the Trustees submitted a statement of appeal on November 26, 2014, and a Memorandum of Appeal on June 23, 2015. Bank Indonesia is currently preparing a Contra Appeal.

b. Perkara hukum di dalam negeri

Selain menghadapi perkara hukum di luar negeri, Bank Indonesia juga menangani 263 (dua ratus enam puluh tiga) perkara di dalam negeri yang terdiri atas perkara perdata sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) perkara, perkara Tata Usaha Negara sebanyak 19 (sembilan belas) perkara, dan 1 (satu) perkara uji materiil (*judicial review*). Selain itu terdapat 3 (tiga) perkara pidana yang ditangani oleh Bank Indonesia. Dari perkara-perkara tersebut, sebanyak 68 (enam puluh delapan) perkara telah diputus oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. *Domestic legal matters*

*In addition to the legal cases overseas, Bank Indonesia were also faced with 263 (two hundred sixty three) domestic cases, comprising 243 (two hundred forty three) civil cases, 19 (nineteen) administrative legal cases, and 1 (one) judicial review case. Additionally, there were 3 criminal cases faced by Bank Indonesia. Of these legal cases, 68 (sixty eight) cases have been decided by the court with permanent and legally binding effects (*inkracht van gewijsde*).*

H. INFORMASI LAIN

Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debit (FSD) eks. Bank Take Over PT Bank Danamon Indonesia

Pada tahun 1998/1999 Bank Indonesia telah memberikan BLBI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 di Indonesia sebesar Rp144.536.094 juta.

Sebagai tindak lanjut Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, telah dilakukan pengalihan BLBI posisi tanggal 29 Januari 1999 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah c.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp144.536.094 juta dengan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Akta Cessie) tanggal 22 Februari 1999, dan di sisi lain Pemerintah menerbitkan Surat Utang SU-001/MK/1998 sebesar Rp80.000.000 juta dan SU-003/MK/1999 sebesar Rp64.536.094 juta.

Dari total BLBI yang telah dialihkan kepada Pemerintah c.q. BPPN sebesar Rp144.536.094 juta, termasuk di dalamnya FSD sebesar Rp54.460.896 juta. Dalam jumlah FSD tersebut terdapat FSD eks. Bank Take Over (BTO) PT Bank Danamon Indonesia (PT BDI) yang terdiri dari PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., dan PT Bank Tiara Asia Tbk., sebesar Rp20.129.741 juta. Terhadap FSD sebesar Rp20.129.741 juta tersebut terdapat

H. OTHER INFORMATION

Debit Balance Facility (FSD) Interest Claims

In 1998/1999, Bank Indonesia provided BI Liquidity Assistance (BLBI) to banks that encountered liquidity problems following the Indonesian monetary crisis in 1998, amounting to IDR144,536,094 million.

As a follow up to the Joint Agreement between the Governor of Bank Indonesia and the Minister of Finance dated February 6, 1999, the BLBI position as of January 29, 1999 was handed over from Bank Indonesia to the Indonesian Government c.q. Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) amounting to IDR144,536,094 million based on Deed of Surrender and Transfer of Title (Cessie Deed) dated February 22, 1999, and for its part, the Government issued Treasury Bond SU-001/MK/1998 amounting to IDR80,000,000 million and SU-003/MK/1999 amounting to IDR64,536,094 million.

The total amount of BLBI handed over to the Governement c.q. BPPN of IDR144,536,094 million included IDR54,460,896 million in FSD. This FSD amount included ex. Bank Take Over (BTO) of PT Bank Danamon Indonesia (PT BDI), comprising PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., and PT Bank Tiara Asia Tbk., which amounted to IDR20,129,741 million. Included to this FSD of IDR20,129,741 million

beban bunga FSD sebesar Rp5.322.248 juta dengan rincian sebagai berikut:

was FSD's accrued interest of IDR5,322,248 million, with the following details:

	Pokok FSD FSD Principal	Bunga FSD FSD Interest	
	Rp Juta IDR Million	Rp Juta IDR Million	
- PT Bank Danamon Tbk.	16.691.825	4.379.861	- PT Bank Danamon Tbk.
- PT Bank PDFCI Tbk.	1.995.000	534.959	- PT Bank PDFCI Tbk.
- PT Bank Tiara Asia Tbk.	1.442.916	407.428	- PT Bank Tiara Asia Tbk.
Jumlah	20.129.741	5.322.248	Total

Berdasarkan Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, tagihan bunga sebesar Rp5.322.248 juta tidak ikut dialihkan kepada Pemerintah. Namun Menteri Keuangan (Menkeu) dengan surat Nomor SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Umum dalam rangka Pembayaran Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Bank menyatakan bahwa bunga FSD termasuk dalam angka sementara rincian kewajiban bank yang dapat dibiayai penjaminan Pemerintah dengan catatan pelaksanaan pembayaran masih akan dibicarakan kembali.

Based on the Joint Agreement between the Governor of Bank Indonesia and Minister of Finance dated February 6, 1999, the claims on interest amounting to IDR5,322,248 million were not transferred to the Government. However, the Minister of Finance through Letter Number SR-176/MK.01/1999 dated May 31, 1999 on General Letter of Authorization in regards to Government Guarantee Payment to Bank Liabilities stated that the FSD Interest was included in the interim bank liabilities that could be financed by the Government guarantees, provided that payment's implementation will be subject to further discussions.

Dalam rangka penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, Bank Indonesia telah melakukan upaya penyelesaian sebagai berikut:

In resolving the FSD interest claims derived from the ex. BTO PT BDI, Bank Indonesia has done some settlement efforts such as the following:

- Menyampaikan surat tagihan kepada eks. BTO PT BDI masing-masing dengan surat Nomor 1/124/UK, Nomor 1/122/UK dan Nomor 1/123/UK tanggal 6 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet. Eks. BTO PT BDI masing-masing dengan surat Nomor B.0741-DIR tanggal 12 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet, Nomor BI-015/FA25/0799 tanggal 13 Juli 1999 perihal Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet/BLBI sebesar Rp527.519 juta dan Nomor 238/BTA-CS/VII/99 tanggal 12 Juli 1999 perihal Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet menyatakan bahwa bunga FSD telah diperhitungkan dalam rekapitalisasi yang dilakukan oleh BPPN dan meminta agar Bank Indonesia tidak melakukan pendebetan giro eks. BTO PT BDI di Bank Indonesia untuk pembayaran bunga FSD serta meminta Bank Indonesia melakukan konfirmasi dengan BPPN.

- Submitted claims letter to the ex. BTO PT BDI respectively through letter Number 1/124/UK, Number 1/122/UK and Number 1/123/UK dated July 6, 1999 on FSD Interest Claims of Ex. BTO PT BDI respectively through Letter Number B.0741-DIR dated July 12, 1999 on FSD Interest Liabilities, Number BI-015/FA25/0799 dated July 13, 1999 on FSD/BLBI Claims amounting to IDR527,519 million and Number 238/BTA-CS/VII/99 dated July 12, 1999 on FSD Interest Liabilities, stating that the FSD Interest was incorporated into the recapitalization amount carried out by BPPN and requested Bank Indonesia to pay the FSD Interest and to confirm with BPPN.

- b. Menyampaikan surat kepada BPPN mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, terakhir surat Nomor 6/63/BKt tanggal 10 Maret 2004 perihal Kewajiban Bunga Fasilitas Saldo Debet PT Bank Danamon Indonesia.
- c. Memasukkan permasalahan bunga FSD dalam agenda yang dibahas antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Kerja yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu dengan GBI Nomor 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Beberapa Permasalahan di Bidang Keuangan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Namun sampai dengan SKB dimaksud berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, belum diperoleh penyelesaian atas permasalahan bunga FSD tersebut.
- d. Meminta data/dokumen rekapitalisasi eks. BTO oleh BPPN kepada PT BDI melalui surat Nomor 12/166/DKBU tanggal 23 Februari 2010 dan Nomor 12/248/DKBU tanggal 5 April 2010 masing-masing perihal Permasalahan Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet Bank Indonesia kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk., dan PT Bank PDFCI Tbk.
- e. Menyampaikan surat kepada Menkeu mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks. BTO PT BDI, terakhir surat Nomor 14/1/GBI/DKBU tanggal 26 Maret 2012 perihal Tagihan Bunga Fasilitas Saldo Debet Bank Indonesia kepada PT Bank Danamon, PT Bank PDFCI, dan PT Bank Tiara Asia.

Bank Indonesia tetap melanjutkan tugas pengelolaan tagihan bunga FSD eks. BTO termasuk upaya penagihan, dengan mempertimbangkan bahwa tagihan tersebut merupakan aset yang masih memerlukan tindak lanjut yang komprehensif.

- b. *Submitted a letter to BPPN pertaining to the resolution of FSD claims ex. BTO PT BDI, through Letter Number 6/63/BKt dated March 10, 2004 on FSD Interest Liabilities of PT Bank Danamon Indonesia.*
- c. *Included matters pertaining to the FSD Interest in the agenda of discussions between the Government of Indonesia and Bank Indonesia through the Committee that was formed by the Joint Decision of the Minister of Finance with GBI Number 7/23/KEP.GBI/2005 dated April 29, 2005 on the Establishment of a Coordinating Team on Settlement of Financial Issues between Bank Indonesia and Ministry of Finance. However, there was no resolution to this FSD interest matter as of the Joint Decision's expiry date on December 31, 2005.*
- d. *Requested data/documents pertaining to the recapitalization of ex BTO by BPPN to PT BDI through Letter Number 12/166/DKBU dated February 23, 2010 and Number 12/248/DKBU dated April 5, 2010 on Bank Indonesia's FSD Interest Claims to PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk., and PT Bank PDFCI Tbk.*
- e. *Submitted letters to the Minister of Finance pertaining to the Settlement of FSD Interest Claims for ex. BTO PT BDI, with the most recent being Letter Number 14/1/GBI/DKBU dated March 26, 2012 on Bank Indonesia's FSD Interest Claims to PT Bank Danamon, PT Bank PDFCI, and PT Bank Tiara Asia.*

Bank Indonesia continued to manage the FSD interest claims, including endeavoring to ensure their recovery, by considering that these claims constitute assets that require comprehensive resolution.

Lampiran

Appendixes

Lampiran. Daftar Singkatan
Appendix. List of Abbreviations and Acronyms

ASA	: ASEAN Swap Arrangement
AUD	: Australian Dollar
BCSA	: Bilateral Currency Swap Arrangement
BDI	: Bank Danamon Indonesia
BIS	: Bank for International Settlements
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia/ <i>Bank Indonesia Liquidity Assistance</i>
BoJ	: Bank of Japan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ <i>Social Security Organizing Agency</i>
BPK-RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/ <i>Republic of Indonesia Audit Board</i>
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional/ <i>Indonesian Bank Restructuring Agency</i>
BSA	: Bilateral Swap Arrangement
BTO	: Bank Take Over
CAD	: Canadian Dollar
CMIM	: Chiang Mai Initiative Multilateralization
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/ <i>Republic of Indonesia House of Representatives</i>
EUR	: Euro
FASBIS	: Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah/ <i>Bank Indonesia Sharia Deposit Facility</i>
FFR	: Fed Fund Rate
FPJP	: Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek/ <i>Short-Term Funding Facility</i>
FPJPS	: Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah/ <i>Sharia Short-Term Funding Facility</i>
FLI	: Fasilitas Likuiditas Intrahari/ <i>Intraday Liquidity Facility</i>
FX	: Foreign Exchange
FSD	: Fasilitas Saldo Debet/ <i>Debit Balance Facility</i>
GBP	: Great Britain Poundsterling
GWM	: Giro Wajib Minimum/ <i>Minimum Reserve Requirement</i>
HIPC	: Heavily Indebted Poor Countries
IILM	: International Islamic Liquidity Management
IMF	: International Monetary Fund
Indover Bank	: N.V. De Indonesische Overseeze Bank
JPY	: Japanese Yen
KAKBI	: Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia/ <i>Bank Indonesia Financial Accounting Policy</i>
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan/ <i>Ministry of Finance</i>
KLBI	: Kredit Likuiditas Bank Indonesia/ <i>Bank Indonesia Liquidity Credit</i>
KUT	: Kredit Usaha Tani/ <i>Farm Credit Scheme</i>
LDR	: Loan to Deposit Ratio
LFR	: Loan to Funding Ratio
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan/ <i>Audit Report</i>
LKI	: Lembaga Keuangan Internasional/ <i>International Financial Institution</i>
LLD	: Lalu Lintas Devisa/ <i>Foreign Exchange Flow</i>
Ltd.	: Limited

140

198

216

233

Menkeu	: Menteri Keuangan/ <i>Minister of Finance</i>
MRBI	: Manajemen Risiko Bank Indonesia/ <i>Bank Indonesia Risk Management</i>
N.V.	: Naamloze Vennootschap
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia/ <i>Unitary State of the Republic of Indonesia</i>
NPL	: <i>Net Performing Loan</i>
NZD	: New Zealand Dollar
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan/ <i>Financial Services Authority</i>
OPT	: Operasi Pasar Terbuka/ <i>Open Market Operations</i>
Perum Jamkrindo	: Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia/ <i>Indonesian Credit Guarantee Public Service Company</i>
PBI	: Peraturan Bank Indonesia/ <i>Bank Indonesia Regulation</i>
PDG	: Peraturan Dewan Gubernur/ <i>Board of Governors Regulation</i>
PDP2LK	: Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan/ <i>Fundamental Principles for the Preparation and Presentation of Bank Indonesia Financial Statements</i>
Pemda	: Pemerintah Daerah/ <i>Regional Government</i>
Persero	: Perusahaan Perseroan/ <i>Limited Company</i>
PKAK	: Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan/ <i>Statement of Financial Accounting Policy</i>
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan/ <i>Minister of Finance's Regulation</i>
PN	: <i>Promissory Notes</i>
PPh	: Pajak Penghasilan/ <i>Income Tax</i>
PRGF	: <i>Poverty Reduction and Growth Facility</i>
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/ <i>Statement of Financial Accounting Standards</i>
PT	: Perseroan Terbatas/ <i>Limited Liability Company</i>
Repo	: <i>Repurchase Agreement</i>
RDKK	: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani/ <i>Definitive Plan For Farmers Needs</i>
RI	: Republik Indonesia/ <i>Republic of Indonesia</i>
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara/ <i>General State Cash Account</i>
Rp	: Rupiah
RR	: <i>Reverse Repo</i>
RTGS	: <i>Real Time Gross Settlement</i>
SBBI	: Surat Berharga Bank Indonesia/ <i>Bank Indonesia Marketable Securities</i>
SBI	: Sertifikat Bank Indonesia/ <i>Bank Indonesia Certificates</i>
SBIS	: Sertifikat Bank Indonesia Syariah/ <i>Bank Indonesia Sharia Certificates</i>
SBN	: Surat Berharga Negara/ <i>State Marketable Securities</i>
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara/ <i>State Sharia Marketable Securities</i>
SDBI	: Sertifikat Deposito Bank Indonesia/ <i>Bank Indonesia Certificate of Deposit</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia/ <i>Human Resources</i>
SDR	: <i>Special Drawing Rights</i>
SKB	: Surat Keputusan Bersama/ <i>Joint Decision</i>
SKNBI	: Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia/ <i>Bank Indonesia National Clearing</i>
SOL	: <i>Subordinated Loan</i>
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara/ <i>State Treasury Bills</i>
SPNS	: Surat Perbendaharaan Negara Syariah/ <i>State Sharia Treasury Bills</i>
SSB	: Surat-Surat Berharga/ <i>Marketable Securities</i>

SU	: Surat Utang/ <i>Treasury Bonds</i>
SUN	: Surat Utang Negara/ <i>Marketable Treasury Bonds</i>
SUP	: Surat Utang Pemerintah/ <i>Government Bond</i>
TD	: <i>Term Deposit</i>
THT	: Tunjangan Hari Tua/ <i>Retirement Benefit Program</i>
TOZ	: Troy Ounce
TP	: Tahun Penyediaan/ <i>Provision Year</i>
TPSL	: Third-Party Securities Lending
TSL	: <i>Two Step Loan</i>
TKHT	: Tunjangan Kesehatan Hari Tua/ <i>Retirement Health Plan</i>
Tuperum	: Tunjangan Pemilikan Rumah/ <i>Housing Allowance</i>
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah/ <i>Small Medium Enterprise</i>
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah/ <i>Micro Small Medium Enterprise</i>
UU	: Undang-Undang/ <i>Act</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar/ <i>Constitution of the Republic of Indonesia</i>
USD	: United States Dollar
Valas	: Valuta Asing/ <i>Foreign Exchange</i>



Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Telp. (62 21) 131

Fax. (62 21) 3861458

www.bi.go.id

email: bicara@bi.go.id